KABUPATEN
MOROWALI
UTARA

RENJA TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Halaman

DAFTAR ISI ..... ***i***
DAFTAR TABEL ..... ***ii***
DAFTAR GAMBAR ..... ***ii***
KATA PENGANTAR ..... ***iii***
BAB I PENDAHULUAN ***1***
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN LALU ***5***
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 30
2.4 Review terehadap Rancangan Awal RKPD 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ***38***
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 41
3.3 Program dan Kegiatan 43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ***54***
BAB V PENUTUP ***61***

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C 29 Rekapiltulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 9

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan 28

Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan RKPD..... 31

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda..... 42

Tabel T-C 32 Review Terhadap Rancangan RKPD..... 47

Tabel T-C 33 Rencana Pendanaan 55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi..... 26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-nya dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2021-2026, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 Pada Kantor Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2024.

Kami berharap dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kabupten Morowali Utara serta mendukung dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara, sehingga pembangunan di Kabupaten Morowali Utara dapat berjalan dengan lancar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, guna meningkatkan kesehjateraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 21 Juli 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina Tkt. 1, IV/b
NIP. 19710811 200604 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Peneilitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri No 90 Tahun 2019 yang telah di sempurnakan dengan keputusan menteri dalam negeri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh Bappelitbangda sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda
- 2.4 Review Terhadap RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda

BAB V : Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021–2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, pelaksanaan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sampai dengan Bulan Desember 2022 dialokasikan sebesar

Rp3.438.027.203,00 dan terealisasi sebesar Rp2.823.744.782,00 (82,00%).

B. Belanja Langsung Perangkat Daerah Pada Tahun Anggaran 2022 Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.544.471.392,00. yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 14 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp1.716.232.452,00 (48,00 %), seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara s.d Bulan Oktober 2022

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.688.000,00	204.582.725,00	96,00	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	842.286.826,00	510.335.266,00	61,00	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.643.452,00	327.835.243,00	41,00	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.460.000,00	71.934.218,00	75,00	100,00
2	Program Perencanaan Pengendalianm Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	591.230.250,00	316.881.650,00	54,00	100,00
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	137.892.100,00	64.379.250,00	47,00	100,00

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	128.769.350,00	88.990.700,00	69,00	69,00
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	266.999.214,00	28.793.550,00	11,00	100,00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	309.506.700,00	17.996.500,00	06,00	100,00
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	39.996.100,00	24.034.650,00	60,00	100,00
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	68.513.850,00	24.522.000,00	36,00	100,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	19.987.350,00	9.538.000,00	48,00	100,00
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	28.498.200,00	26.408.700,00	93,00	100,00

Sumber : Realisasi Anggaran dan Fisik Bappelitbangda Kab. Morowali Utara Tahun 2022

Dari Tabel diatas diketahui bahwa terdapat 11 (Sebelas) kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dibawah 80,00 %, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2022 telah melakukan

efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan Parsial I Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran mencapai sebesar Rp7.547.196.450,00 terdiri atas 4 Program, 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.
b. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Perencana Bappelitbangda yang Berkualitas Sehingga Berdampak Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka pada Tahun 2022 Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menyusun Strategi :

a. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
b. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Baik, Berkualitas dan Sistematis; dan,
c. Menyediakan Kebutuhan Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan Yang Akurat.

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
b. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian/Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Daerah; dan

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara

No.Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi	
									Target RKPD Th 2021	Realisasi RKPD Th 2021	Persentase Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7/6*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11 = 10/4*
2	**14**				**STATISTIK**									
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**	**Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang ditindaklanjuti oleh SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**93%**	**93%**	**0%**	**193%**	**193%**
2	**14**	**1**	**1**		Pengumpulan,Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Buku Data Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Yang Tersusun dalam satu sistem	100%	75%	100%	90%	90%	0%	165%	165%
2	**14**	**1**	**2**		Penyusunan Profil daerah	Dokumen data Informasi Desa dan Kecamatan	100%	98%	100%	93%	93%	0%	191%	191%
2	**14**	**1**	**3**		Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah buku data Statistik daerah Kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%	95%	95%	0%	195%	195%
2	**14**	**1**	**3**		Pengembangan E-Government Berbasis Data Elektronik	Tersusunnya Data E Goverment Berbasis Data Elektronik	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
2	**14**	**1**	**3**		Peningkatan Difusi dan Penerapan Teknologi	Meningkatnya implementasi penerapan teknologi di Kabupaten Morowali Utara	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

4	**03**				**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**									
4	**03**	**3**			**PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN**	**Jumlah Kerjasama Pembangunan yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**200%**	**200%**
4	**03**	**3**	**1**		Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya koordinasi antar instansi/ lembaga sehubungan dengan penelitian dan hasil penelitian di bidang inovasi dan teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
4	**03**	**3**	**2**		Koordinasi Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial Budaya dan pemerintahan	Terlaksananya koordinasi antar instansi/ lembaga sehubungan dengan penelitian dan hasil penelitian di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
4	**03**				**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**									
4	**03**	**10**			**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**93%**	**93%**	**0%**	**193%**	**193%**
4	**03**	**10**			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	92%	92%	0%	192%	192%
4	**03**	**10**			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
4	**03**	**10**			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Tingkat koordinasi kedalam dan keluar daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	82%	82%	0%	182%	182%
4	**03**	**10**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**
4	**03**	**01**			Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

4	**03**	**10**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**
4	**03**	**01**			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
4	**03**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**92%**	**92%**	**0%**	**192%**	**192%**
4	**03**	**2**			Penyusunan rancangan RPJMD	Tersusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD	100%	85%	100%	84%	84%	0%	169%	169%
4	**03**	**2**			Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD Kab. Morowali Utara	100%	100%	100%	90%	90%	0%	190%	190%
4	**03**	**2**			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	100%	100%	100%	99%	99%	0%	199%	199%
4	**03**	**2**			Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
4	**03**	**2**			Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Singkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	100%	99%	100%	100%	100%	0%	199%	199%
4	**03**	**2**			Koordinasi dan Desminasi Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Dana DAK dan TP	Terlaksananya Koordinasi dan Deseminasi Pengendalian Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Dana DAK dan TP	100%	95%	100%	68%	68%	0%	163%	163%
4	**03**	**2**			Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang Daerah	100%	95%	100%	80%	80%	0%	175%	175%
4	**03**	**2**			Koordinasi Pelaksanaan Bidang Litbang dan Statistik	Terlaksananya Koordinasi Bidang Litbang dan Statistik	100%	98%	100%	98%	98%	0%	196%	196%
4	**03**	**2**			Koordinasi Pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi tingkat pusat Dan Daerah	100%	36%	100%	90%	90%	0%	126%	126%
4	**03**	**8**			**PROGRAM PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI**	**Persentase kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dengan**	**100%**	**100%**	**100%**	**71%**	**71%**	**0%**	**171%**	**171%**
4	**03**	**8**			Evaluasi Pelaksanaan RKPD	Terlaksannya evaluasi RKPD Morowali Utara	100%	99%	100%	80%	80%	0%	179%	179%
4	**03**	**8**			Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksannya Monev Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	70%	70%	0%	170%	170%
4	**03**	**8**			Evaluasi RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021	Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJMD Kab. Morowali Utara 2016	100%	56%	100%	63%	63%	0%	119%	119%

4	**03**	**5**			**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**	**Persentase SKPD mitra Bidang Ekonomi yang mempunyai dokumen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**200%**	**200%**
4	**03**	**5**			Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi	Terlaksananya Koordinasi Bidang Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
4	**03**	**5**			Evaluasi RAD Pangan dan Gizi	Terlaksananya evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
4	**03**	**5**			Inventarisasi Permasalahan Bidang Perekonomian dan SDA	Presentase Terlaksananya Inventarisasi Permasalahan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%
4	**03**	**5**			**PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA**	**Persentase SKPD mitra Bidang Sosial Budaya yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**96%**	**96%**	**0%**	**196%**	**196%**
4	**03**	**5**			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya kegiatan SDGs	100%	100%	100%	99%	99%	0%	199%	199%
4	**03**	**5**			Koordinasi perencanaan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pemerintah dan pembangunan manusia	100%	95%	100%	93%	93%	0%	188%	188%
4	**03**	**5**			Koordinasi Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan HAM	Terkoordinasinya Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan HAM	100%	97%	100%	100%	100%	0%	197%	197%
4	**03**	**6**			**PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM**	**Persentase SKPD mitra Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**99%**	**99%**	**0%**	**199%**	**199%**
4	**03**	**6**			Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan	100%	100%	100%	99%	99%	0%	199%	199%

4	**03**	**7**			**PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**	**Persentase menurunnya Rumah Tangga Miskin**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**200%**	**200%**
4	03	7			Fasilitas Program Pengmbangan Komunitas Adat Terpencil / KAT (Kampung Analipu)	Peningkatan Kehidupan penduduk KAT suku wana	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	200%
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**95%**	**100%**	**0%**	**195%**	**195%**
5	05	02			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	95%	100%	0%	195%	195%
5	**01**	**01**			**PROGRAM PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
5	***01***	***01***	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Peningkatan Sumber Daya Aparatur***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
5	***01***	***01***	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	100%	0%	100%	92%	92%	100%	192%	192%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	0%	100%	75%	75%	100%	175%	175%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	0%	100%	91%	91%	100%	191%	191%

5	***01***	***01***	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	**01**	**01**	**2.08**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	0%	100%	97%	97%	100%	197%	197%
5	**01**	**01**	**2.08**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	0%	100%	85%	85%	100%	185%	185%
5	**01**	**01**	**2.08**	**03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	0%	100%	98%	98%	100%	198%	198%
5	**01**	**01**	**2.08**	**04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	0%	100%	85%	85%	100%	185%	185%
5	***01***	***01***	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	**01**	**01**	**2.09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
5	**01**	**01**	**2.09**	**06**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	0%	100%	98%	98%	100%	100%	100%
5	**01**	**01**	**2.09**		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
5	***01***	**02**	**2.01**		***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Meningkatnya Kualitas Perencanaan***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	**01**	**02**	**2.01**	**04**	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100%	0%	100%	99%	99%	100%	199%	199%
5	**01**	**02**	**2.01**	**05**	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
5	**01**	**02**	**2.01**	**07**	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/RKPD	100%	0%	100%	87%	87%	100%	187%	187%
5	***01***	**02**	**2.02**		***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	***100%***	***0%***	***0%***	***0%***	***0%***	***100%***	***100%***	**100%**
5	**01**	**02**	**2.02**	**01**	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
5	**01**	**02**	**2.02**	**03**	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

5	***01***	**02**	**2.03**		***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Meningkatnya Kualitas Perencanaan***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	**01**	**02**	**2.03**	**01**	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
5	**01**	**02**	**2.03**	**02**	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
5	**01**	**02**	**2.03**	**03**	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100%	0%	100%	26%	26%	100%	126%	126%
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
5	***01***	**02**	**2.01**		***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	**01**	**03**	**2.01**	**05**	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
5	**01**	**03**	**2.01**	**06**	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

5	**01**	**03**	**2.01**	**07**	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100%	0%	100%	84%	84%	100%	184%	184%
5	**01**	**03**	**2.01**	**08**	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
5	**01**	**03**	**2.01**	**09**	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	100%	0%	100%	94%	94%	100%	194%	194%
5	***01***	**02**	**2.02**		***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	**200%**
5	**01**	**03**	**2.02**	**01**	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	100%	0%	100%	67%	67%	100%	167%	167%
5	**01**	**03**	**2.02**	**02**	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

5	**01**	**03**	**2.03**	**04**		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	0%	100%	64%	64%	100%	164%	164%
5	**01**	**03**	**2.03**	**05**		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	100%	0%	100%	63%	63%	100%	163%	163%
5	**05**	**02**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
5	***05***	***02***	***2.01***			***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	***Tingkat Pemanfaatan hasil kajian***	***100%***	***0%***	***100%***	***99%***	***99%***	***100%***	***199%***	***199%***
5	**05**	**02**	**2.01**	**14**		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian	Jumlah data dan kajian peraturan yang di fasilitasi dan di evaluasi	100%	0%	100%	99%	99%	100%	199%	199%
5	***05***	***02***	***2.03***			***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***	***Meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara***	***100%***	***0%***	***0%***	***0%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***
5	**05**	**02**	**2.03**	**01**		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

5	***05***	***02***	***2.04***		***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	***Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah***	***100%***	***0%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***200%***	***200%***
5	**05**	**02**	**2.04**	**01**	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100%	0%	100%	75%	75%	100%	175%	175%
5	**05**	**02**	**2.04**	**03**	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Tingkat cakupan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100%	0%	100%	99%	99%	100%	199%	199%

Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan Parsial I Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran mencapai sebesar Rp7.547.196.450,00 terdiri atas 4 Program, 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

c. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.
d. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Perencana Bappelitbangda yang Berkualitas Sehingga Berdampak Pada Kualitas Produk Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka pada Tahun 2022 Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menyusun Strategi :

d. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
e. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Baik, Berkualitas dan Sistematis; dan,
f. Menyediakan Kebutuhan Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan Yang Akurat.

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

c. Meningkatkan Pemenuhan Managemen Kebutuhan Kantor;
d. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian/Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Daerah; dan
e. Menyusun Kajian-Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
b) Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
c) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
d) Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
e) Koordinasi dan pelaksanaan program-program penelitian dan pengembangan serta statistic di daerah;
f) Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain;
g) Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
h) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain, Kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
i) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BAPPELITBANGDA) Kabupaten Morowali Utara mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
       Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur membawahi:
    1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
    2. Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
    3. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahi :
    1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Badan. Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan, melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam bidang penyusunan bahan rencana anggaran dan belanja, pengelolaan keuangan dan barang, pembukuan dan perhitungan anggaran dan verifikasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :

a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

   Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penyusunan dan mempersiapkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten morowali utara.

b) Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan bahan perencanaan program, mengevaluasi pelaksanaan tugas serta pelayanan pengolahan data dan pelaporan.

c) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

   Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pelaksanaan rencana, dan hasil pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian Dan Infrastruktur

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur terdiri atas :

a) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan, pengoordinasian, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

c) Sub Bidang Perekonomian dan SDA

Sub Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang perekonomian dan SDA.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas penyiapan bahan pengkordinasian dan melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

a) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

b) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Penelitian dan Pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

c) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan perekayasan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Morowali Utara :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara



Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Berupa Penyediaan dan Penyusunan Dokumen-Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten Morowali Utara, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Program Prioritas Kabupaten Morowali Utara Dalam RPJMD. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja Perangkat Daerah yang dihubungkan dengan capaian Program Prioritas serta Visi-Misi Kabupaten Morowali Utara dalam RPJMD.
2. Persentasi Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan PD; Persentasi Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan PD Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Lingkup Sarana dan Prasarana Wilayah, serta Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terhadap Dokumen Perencanaan PD; dimana Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja BAPPELITBANGDA dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022 (s.d Oktober 2022)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Hak-Hak ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	82%	100%	100%	
			Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47%	96%	100%	100%	
			Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	61%	100%	100%	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	41%	100%	100%	
			Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	
2	Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	54%	100%	100%	
			Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	47%	100%	100%	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	26%	69%	100%	100%	

3	Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	11%	100%	100%	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	6%	100%	100%	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	60%	100%	100%	
4	Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah		Tingkat Pemanfaatan hasil kajian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	36%	100%	100%	
			Adanya Referensi Kajian Tentang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	48%	100%	100%	
			Meningkatkan inovasi dan teknologi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	93%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti Pendidikan Lanjutan, Kursus, Pelatihan untuk Meningkatkan Profesionalisme Bidang Perencanaan Sehingga Dapat Menghasilkan Aparatur Perencanaan yang Kreatif dan Inovatif;
2. Menerapkan Right Man On The Right Place Dalam Penempatan/Perekrutan Aparatur. Hal ini Berdampak Pada Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan, Mengingat Aparatur yang Dimiliki Lebih Responsive Terhadap Perkembangan Kebijakan Provinsi dan Nasional serta Menghasilkan Perencanaan Yang Akuntabel;
3. Mengembangkan Teknologi Informasi serta Perangkat Keras dan Kelengkapannya Dalam Mendukung Manajemen Pengelolaan Perencanaan yang Lebih Baik Dalam Menunjang Pembangunan;
4. Optimalisasi Perlengkapan dan Peralatan yang Memadai, serta Penambahan Ruangan untuk Memenuhi Standard Kelayakan Kerja

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Morowali Utara dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan RKPD)			
								Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan
2							**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
5							**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**01**						**PERENCANAAN**								
5	**01**	**01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4.956.953.589**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4.956.953.589**	
5	**01**	**01**	**1.02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.443.994.170**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.443.994.170**	
5	01	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	3.443.994.170	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	3.443.994.170	**Bappelitbangda**
5	**01**	**01**	**1.05**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**110.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**110.000.000**	
5	01	01	1.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	110.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	110.000.000	**Bappelitbangda**
5	**01**	**01**	**1.06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**565.922.747**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**565.922.747**	
5	01	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.998.517	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.998.517	**Bappelitbangda**
5	01	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.386.894	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.386.894	**Bappelitbangda**
5	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.517.086	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.517.086	**Bappelitbangda**
5	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	442.020.250	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	442.020.250	**Bappelitbangda**

5	**01**	**01**	**2.07**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**			**50.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**			**50.000.000**	
5	01	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	3 Unit	50.000.000	**Bappelitbangda**
5	**01**	**01**	**2.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**522.576.672**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**522.576.672**	
5	01	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	**Bappelitbangda**
5	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	99.190.672	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	99.190.672	**Bappelitbangda**
5	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64.710.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64.710.000	**Bappelitbangda**
5	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	355.676.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	355.676.000	**Bappelitbangda**
5	**01**	**01**	**1.09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**264.460.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**264.460.000**	
5	01	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	79.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	79.000.000	**Bappelitbangda**
5	01	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	17.460.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	17.460.000	**Bappelitbangda**
5	01	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	168.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	168.000.000	**Bappelitbangda**

5	**01**	**02**					**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN**			**1.301.513.779**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN**			**1.301.513.779**	
5	**01**	**02**	**2.01**				**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			**864.381.529**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			**864.381.529**	
5	01	02	2.01	04			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	60 Berita Acara	70.183.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	60 Berita Acara	70.183.000	**Bappelitbangda**
5	01	02	2.01	05			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	11 Berita Acara	237.232.200	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	11 Berita Acara	237.232.200	**Bappelitbangda**
5	01	02	2.01	07			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	556.966.329	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	556.966.329	**Bappelitbangda**
5	**01**	**02**	**2.02**				**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**			**64.999.700**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**			**64.999.700**	
5	01	02	2.02	01			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	14.999.700	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	14.999.700	**Bappelitbangda**
5	01	02	2.02	02			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	20 Buku	10.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	20 Buku	10.000.000	**Bappelitbangda**
	01	02	2.02	03			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	20 Buku	40.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	20 Buku	40.000.000	**Bappelitbangda**
5	**01**	**02**	**2.03**				**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**			**372.132.550**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**			**372.132.550**	
5	01	02	2.03	01			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	43.999.850	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	43.999.850	**Bappelitbangda**
5	01	02	2.03	02			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Kerja Sama	78.133.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	2 Kerja Sama	78.133.000	**Bappelitbangda**
5	01	02	2.03	03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	249.999.700	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	249.999.700	**Bappelitbangda**

5	**01**	**03**					**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI**			**389.998.200**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI**			**389.998.200**	
5	**01**	**03**	**1.01**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**129.999.400**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**129.999.400**	
5	01	03	1.01	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	94.999.700	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	94.999.700	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.01	06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	48 OPD	9.999.700	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	48 OPD	9.999.700	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.01	07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	48 OPD	10.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	48 OPD	10.000.000,00	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.01	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	15.000.000,00	**Bappelitbangda**

5	**01**	**03**	**1.02**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**129.999.400**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**129.999.400**	
5	01	03	1.02	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	94.999.700	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	94.999.700	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.02	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	14 OPD	9.999.700	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	14 OPD	9.999.700	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	14 OPD	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	14 OPD	10.000.000	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.02	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	14 Laporan	15.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	14 Laporan	15.000.000	**Bappelitbangda**
5	**01**	**03**	**1.03**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**129.999.400**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**129.999.400**	
5	01	03	1.03	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	94.999.700	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	94.999.700	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.03	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	48 OPD	9.999.700	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	48 OPD	9.999.700	**Bappelitbangda**
5	01	03	1.03	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	48 OPD	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	48 OPD	10.000.000	**Bappelitbangda**

5	01	03	1.03	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	15.000.000	**Bappelitbangda**
5	**05**						**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**250.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**250.000.000**	
5	**05**	**02**	**2.01**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**			**50.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**			**50.000.000**	
5	05	02	2.01	14			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50.000.000	**Bappelitbangda**
5	**05**	**02**	**1.03**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi**			**150.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi**			**150.000.000**	
5	05	02	1.03	01			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	150.000.000	**Bappelitbangda**
5	**05**	**02**	**2.04**				**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			**50.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			**50.000.000**	
5	05	02	2.04	03			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	50.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	50.000.000	**Bappelitbangda**
TOTAL										**6.898.465.568**				**6.898.465.568**	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 di Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN MOROWALI UTARA

Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat **7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional** diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
d. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
c. Pembangunan rendah karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPELITBANGDA

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2026. Adapun Visi dalam RPJMD

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2026 adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA "YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
d. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
e. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka Bappelitbangda mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, seperti yang tersaji dalam Tabel 3.1 :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kinerja pelayanan public	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Profesionalitas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Progrpam Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Renja Perangkat Daerah Berkulaitas Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Indikator kinerja Pembangunan yang tercapai 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Persentase Hasil Kelitbangan Yang di Implementasikan	10%	10%	15%	20%	25%	30%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Pada Tahun 2022 terdiri atas :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
  a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- ❖ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  a) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
  b) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  c) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
b) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
c) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

❖ Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan Pembangunan Daerah
a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
b) Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
c) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

❖ Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

❖ Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya manusia)
a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

❖ Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini bertujuan sebagai presentase SKPD yang memiliki dokumen perencanaan 5 tahunan yang sesuai standar bidang infrastruktur dan kewilayahan.

❖ Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian Peraturan

a) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

❖ Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

❖ Pengembangan Inovasi dan Teknologi

a) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPELITBANGDA

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disajikan pada Tabel T.C 33 berikut ini :

TABEL T - C. 33
RENCANA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**1**				**PERENCANAAN**					**6.898.465.568**					**7.243.388.846**
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.956.953.589**					**5.204.801.268**
5	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**3.443.994.170**					**3.616.193.879**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	33 Orang/bulan	100 Persen	3.443.994.170	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.616.193.879
5	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**110.000.000**					**115.500.000**
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	6 Orang	100 Persen	110.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	115.500.000
5	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**565.922.747**					**594.218.884**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Paket	100 Persen	1.998.517	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.098.443
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Paket	100 Persen	74.386.894	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	78.106.239
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Paket	100 Persen	47.517.086	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	49.892.940
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	442.020.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	464.121.263
5	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**50.000.000**					**52.500.000**
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	3 Unit	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	52.500.000
5	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**522.576.672**					**548.705.506**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.150.000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	99.190.672	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	104.150.206
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	64.710.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	67.945.500
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	355.676.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	373.459.800

TABEL T - C. 33
RENCANA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**1**				**PERENCANAAN**					**6.898.465.568**					**7.243.388.846**
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**4.956.953.589**					**5.204.801.268**
5	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**3.443.994.170**					**3.616.193.879**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	33 Orang/bulan	100 Persen	3.443.994.170	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.616.193.879
5	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**110.000.000**					**115.500.000**
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	6 Orang	100 Persen	110.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	115.500.000
5	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**565.922.747**					**594.218.884**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Paket	100 Persen	1.998.517	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.098.443
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Paket	100 Persen	74.386.894	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	78.106.239
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Paket	100 Persen	47.517.086	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	49.892.940
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	442.020.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	464.121.263
5	**1**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**50.000.000**					**52.500.000**
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	3 Unit	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	52.500.000
5	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**522.576.672**					**548.705.506**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	3.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.150.000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	99.190.672	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	104.150.206
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	64.710.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	67.945.500
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	355.676.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	373.459.800

5	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**264.460.000**						**277.683.000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	11 Unit	100 Persen	79.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	82.950.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	23 Unit	100 Persen	17.460.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	18.333.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Unit	100 Persen	168.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	176.400.000
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					**1.301.513.779**						**1.366.589.468**
5	**1**	**2**	**2,01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**					**864.381.529**						**907.600.605**
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	60 Berita Acara	100 Persen	70.183.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen	73.692.150
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	11 Berita Acara	100 Persen	237.232.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen	249.093.810
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	556.966.329	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen	584.814.645
5	**1**	**2**	**2,02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**					**64.999.700**						**68.249.685**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	4 Masukan	100 Persen	14.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen	15.749.685
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	20 Buku	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen	10.500.000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	20 Buku	100 Persen	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen	42.000.000

5	**1**	**2**	**2,03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**					**372.132.550**						**390.739.178**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	43.999.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen		46.199.843
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	2 Kerja Sama	100 Persen	78.133.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen		82.039.650
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	249.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		"Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah"	100 Persen		262.499.685
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**389.998.200**						**409.498.110**
5	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**					**129.999.400**						**136.499.370**
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	94.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		99.749.685
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	48 OPD	100 Persen	9.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		10.499.685
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	48 OPD	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		10.500.000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		15.750.000

5	**1**	**3**	**2,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**					**129.999.400**						**136.499.370**
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	94.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		99.749.685
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	14 OPD	100 Persen	9.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		10.499.685
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	14 OPD	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		10.500.000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	14 Laporan	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		15.750.000
5	**1**	**3**	**2,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**					**129.999.400**						**136.499.370**
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	94.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		99.749.685
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	15 OPD	100 Persen	9.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		10.499.685
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	15 OPD	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		10.500.000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	15 Laporan	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen		15.750.000

5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**250.000.000**					**262.500.000**
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					**250.000.000**					**262.500.000**
5	**5**	**2**	**2,02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**					**50.000.000**					**52.500.000**
5	05	02	2.02	04	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah	100 Persen	52.500.000
5	**5**	**2**	**2,03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**					**150.000.000**					**157.500.000**
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah	100 Persen	157.500.000
5	**5**	**2**	**2,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**					**50.000.000**					**52.500.000**
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah	100 Persen	52.500.000
									TOTAL	**6.898.465.568**					**7.243.388.846**

BAB IV
PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman Pada Resntra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat Tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Renja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana di masa mendatang oleh para pimpinan Manajemen beserta seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara sehingga akan diperoleh peningkatan Kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semoga Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Kolonodale, 21 Juli 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

GERZOM TANDI, ST, M.Eng
Pembina, IV/b
NIP. 19710811 200604 1 013

RENCANA KERJA (RENJA)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2024

dlhdmorut2017@gmail.com

Copyright: wordexceltemplates.com

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Alamat : Jl. Poros Ganda-Ganda no..., Kolonodale (94971)

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 188.4/01/SK-RANWAL RENJA/DLHD/II/2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TENTANG

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan RPJMD;

b. Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah perlu disusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Ranwal Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah tentang Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5414);
5. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 58, Tambahan Lembaran RI Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang laporan Kinerja instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (Gambaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

KEDUA : Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Sebagaimana Diktum Pertama disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

KETIGA : Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.

KEEMPAT : Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 13 Februari 2023

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Ir. SYARIFUDIN, ST.,MT
NIP. 19731016 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 telah diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.

Kolonodale, 13 Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kab. Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Ir. SYARIFUDIN, ST.,MT
NIP. 19731016 200003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 29

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 35

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 38

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 56

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Perangkat Daerah..... 60

3.3 Program dan Kegiatan..... 61

BAB IV PENUTUP 73

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rekpatulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Tahun Berjalan Kabupaten Morowali Utara 11

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 32

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Morowali Utara Dinas Lingkungan Hidup Daerah..... 40

Tabel 4. Rancangan Awal Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Perangkat Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang ada dan atau yang mungkin akan timbul.

Rancangan awal rencana kerja memberikan arahan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan program secara efektif yang didalamya terdapat indikator sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah disertai indikasi pendanaan yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

Adapun Ranwal Renja sendiri adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ranwal renja menterjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka

menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Identifikasi Masalah serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan berpedoman kepada Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. Dokumen Ranwal Renja ini menggambarkan tentang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara di bidang lingkungan hidup. Program yang disusun dalam Ranwal Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2024 bersifat indikatif dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang telah dicapai periode sebelumnya, sehingga dengan tersusunnya Ranwal Renja Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024.

1.1.3. Keterkaitan Antara Ranwal Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rancangan awal rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang termuat dalam RPJMD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

RANWAL RENJA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara, mengacu pada :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Masing-Masing Jabatan Perangkat Daerah Pada Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja tahunan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.

Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 bersifat indikatif dan disusun secara sistematis, terarah, komprehensif, antisipatif, dan fleksibel dengan perubahan lingkungan yang senantiasa terjadi setiap saat dengan tujuan untuk :

a. Merumuskan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kajian ekologis, ekonomis dan sosial

budaya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;

b. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam pengelolaan lingkungan hidup;
c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
d. Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup;
e. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
f. Melakukan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1.4 Sistamatika Penulisan

Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sistimatika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Analisis capaian Renstra
2.2 Identifikasi Masalah.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Arah dan Kebijakan Renstra
3.2 Tujuan dan sasaran pokok Renja

3.3 Program dan kegiatan prioritas

3.4 Indikator sasaran/target kegiatan.

BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2023 DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Terdiri dari rencana kegiatan dan program serta target untuk Tahun 2024 dan prakiraan Maju Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja PD tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efeisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi

acuan dalam menyusun program kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara.

Secara garis besar pengalokasian dana yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran berdasarkan rencana kerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung**

Pagu Anggaran	Rp 2.843.188.423,-
Realisasi	Rp 2.750.637.955,-
Sisa Anggaran	Rp 92.550.468,-
Persentase	**96,74 %**

- **Belanja Langsung**

Pagu Anggaran	Rp 4.593.621.126,-
Realisasi	Rp 4.426.206.472,-
Sisa Anggaran	Rp 167.414.654,-
Persentase	**96,35 %**

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pada tahun-tahun selanjutnya diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan antara lain:

a) Mengupayakan untuk menyusun perencanaan dengan target kinerja hasil/keluaran yang lebih terukur.
b) Menyusun kerangka acuan kerja (KAK) untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
c) Meningkatkan kompetensi personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
d) Menetapkan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan melalui jasa pihak ke-3 (tiga).

e) Mengusulkan kegiatan yang lebih realitis, terukur, terarah dan dipertanggung jawabkan keterkaitan langsungnya dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

TABEL 1. REKAPTULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023 TAHUN BERJALAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
Daerah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)/3*	*11=(10/4)*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat kesejahteraan pegawai**	**12 Bulan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 Bulan**		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Pegawai**	**100%**	-	-	-	-	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	0 psg	-	-	-	-	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 org	-	-	-	-	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	-	-	-	-	**100%**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	-	-	-	-	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	-	-	-	-	100%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	-	-	-	-	-		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	-	-	-	-	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	0 Unit	-	-	-	-	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	-	-	-	-	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	-	-	-	-	**100%**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	-	-	-	100%		

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	-	-	-	-	**100%**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	10 Unit	-	-	-	-	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	14 Unit	-	-	-	-	100%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	18 Unit	-	-	-	-	100%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit	-	-	-	-	-		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase tersedianya dokumen Lingkungan Hidup**	**100%**	-	-	-	-	-		

	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen Lingkungan**	**1 Dok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Dok**		
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan RPPLH	1 Dok	-	-	-	-	-		
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya RPPLH Kab/Kota	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok		
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	**Terselenggaranya KLHS Kab/Kota**	**1 Dok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Dok**		
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya pembuatan KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok		
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya pembuatan KLHS RPJMD	1 Dok	-	-	-	-	-		
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembuatan KLHS untuk KRP	1 Dok	-	-	-	-	-		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terkendali**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**5 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 Kegiatan**		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut	3 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terkelolaanya laboratorium lingkungan hidup	0 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan		
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**6 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 Kegiatan**		
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Keg		

	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Keg		
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dihentikan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Keg		
	Pemulihan Pencerahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**19 Kegiatan**	-	-	-	-	**19 Kegiatan**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya penghentian sumber pencemaran	6 Kegiatan	-	-	-	-	6 Kegiatan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya pembersihan unsur pencemar	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Terlaksananya pelaksanaan remediasi	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya pelaksanaan restorasi	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	**Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI**	**0 Kegiatan**	-	-	-	-	-		

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengelolaan KEHATI**	**7 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 Kegiatan**		
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersedianya rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	2 Dok	-	-	-	-	7 Kegiatan		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terkelolanya Taman KEHATI	1 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Pengelolaan Kebun Raya	Terkelolanya Kebun Raya	0 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 Kegiatan	-	-	-	-	7 Kegiatan		
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terkelolanya Taman KEHATI lainnya	0 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan KEHATI	0 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati	2 Kegiatan	-	-	-	-	-		

	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase Ketaatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Terlaksananya Pelaporan B3 dan Limbah B3**	**0 Dok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya izin penyimpanan sementara limbah B3	0 Dok	**-**	**-**	**-**	**-**	0 Dok		
	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terpantaunya Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100%	**-**	**-**	**-**	**-**	100%		
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengumpulan Limbah B3**	**4 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 Kegiatan**		

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya izin pengumpulan limbah B3	2 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya pengelolaan limbah B3 secara sistematis	2 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)**	**100%**	-	-	-	-	**100%**		
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan**	**7 Kegiatan**	-	-	-	-	**100%**		

	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terpantaunya Persyaratan izin Lingkungan	2 Kegiatan	-	-	-	-	7 Kegiatan		
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas SDM PPLH	1 Orang	-	-	-	-	1 Orang		
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	2 Kegiatan	-	-	-	-	7 Kegiatan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya pengawasan lingkungan oleh PPLH	2 Kegiatan	-	-	-	-	7 Kegiatan		
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Persentase MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang diakui**	**100%**	-	-	-	-	-		

	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Terlaksananya pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA**	**1 Kelompok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kelompok**		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersedianya data dan informasi MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional	1 Kelompok	**-**	**-**	**-**	**-**	1 Kelompok		
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Terlaksananya Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan hak MHA**	**1 Kelompok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kelompok**		
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersedianya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1 Kelompok	**-**	**-**	**-**	**-**	1 Kelompok		

	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Presentase Masyarakat sadar lingkungan yang aktif**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya edukasi dan komunikasi lembaga kemasyarakatan dibidang lingkungan**	**3 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 Kegiatan**		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	1 Kegiatan	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	**-**	**-**	**-**	**-**	-		
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penyuluhan dan Kampanye lingkungan hidup	1 Kegiatan	**-**	**-**	**-**	**-**	3 Kegiatan		

	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Presentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**1 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kegiatan**		
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Kegiatan	**-**	**-**	**-**	**-**	1 Kegiatan		
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Tertanganinya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**8 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 Kegiatan**		

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	4 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Terpantaunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	4 Kegiatan	-	-	-	-	8 Kegiatan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Presentase Sampah yang di Angkut**	**100%**	-	-	-	-	**100%**		
	Pengelolaan Sampah	**Tersedianya SAPRAS Pengelolaan Persampahan yang efektif dan efisien**	**100%**	-	-	-	-	-		
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Jakstrada Kab/Kota	1 Dok	-	-	-	-	100%		
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya pengurangan sampah dari sumbernya	1 Kegiatan	-	-	-	-	100%		

	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	1 Kegiatan	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	1 Kegiatan	-	-	-	-	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan	-	-	-	-	100%		
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Kebijakan kerjasama Pengelolaan persampahan	1 Dok	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	1 Paket	-	-	-	-	100%		

	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	**Tersedianya Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah**	**1 Dok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Dok**		
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah secara elektronik	1 Dok	**-**	**-**	**-**	**-**	1 Dok		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah**	**6 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 Kegiatan**		
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terpenuhinya ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	2 Kegiatan	**-**	**-**	**-**	**-**	2 Kegiatan		
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Tersedianya Penilaian kinerja pengelolaan sampah	2 Kegiatan	**-**	**-**	**-**	**-**	2 Kegiatan		

	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Terpantaunya pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan		

Kolonodale, 13 Februari 2023

KEPALA DINAS

Ir. SYARIFUDIN, ST.,MT

NIP. 19731016 200003 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Analisis Kondisi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis permanfaatan ruang sangat erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Bilamana ada intervensi pembangunan harus menyesuaikan dengan pola ruang dan struktur ruang yang ada di daerah.

Beberapa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang bersentuhan dengan tata ruang adalah Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan yang dipedomani dalam perencanaan pembangunan adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 - 2036.

Pemanfaatan ruang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

2.2.2 Analisis Kondisi Kewilayahan Dan Kependudukan

Kabupaten Morowali Utara memiliki karakteristik wilayah yang spesifik dengan pola bentang alam yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dan sebagian berupa dataran rendah dan perairan laut yang merupakan bagian dari Teluh Tolo. Pusat Pemerintahan berada di Kota Kolonodale dengan konsentrasi penduduk yang cukup padat sesingga pemanfaatan ruang untuk pemukiman menjadi sangat terbatas. Untuk itu perlu dicarikan alternatif dalam merencanakan pengembangan wilayah dan infrastruktur agar pembangunan berkelanjutan bisa dicapai.

2.2.3 Analisis Terkait Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Lembaga ini dibentuk untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menjamin kebutuhan manusia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Jenis pelayanan yang menjadi tanggungjawab/ kewenangan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Melakukan kajian lingkungan hidup
- Melakukan evaluasi dokumen lingkungan Hidup
- Menginventarisasi data pengelolaan sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca
- Mengembangkan instrument ekonomi lingkungan hidup
- Melaksanakan proses perizinan di bidang lingkungan hidup
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan
- Melakukan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan

2.2.4 Analisis SPM/IKK/Indikator lainnya

Beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/Kota :
    - Indeks kUalitas Air
    - Indeks Kualitas Udara
    - Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota,
- Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota,

2.2.5 Analisis Kondisi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai pelayanan yang optimal dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang andal dan mampu menjawab setiap tantangan dalam proses pembangunan.

Kondisi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara masih belum memadai sehingga cukup menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mengatasi hal ini perlu diperkuat dengan mendorong setiap aparatur untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan mengikuti Bimbingan Teknis di bidang lingkungan hidup.

TABEL 2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MOROWALI UTARA

No.	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Kualitas Air	Presentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air		-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Indeks Kualitas Udara	Presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi		-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

		persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara										
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya		-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
4	Terlaksananya pengelolan sampah di wilayah kab/kota			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kolonodale, 13 Februari 2023

KEPALA DINAS

Ir. SYARIFUDIN, ST.,MT

NIP. 19731016 200003 1 003

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Tingkat Kinerja

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup. Bentuk pelayanan selain bersifat umum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis dengan kualifikasi sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Tingkat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat diukur dari aktifitas pelaksanaan kegiatan, dimana target program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi anggaran dan waktu yang ditentukan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup diperhadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain adalah :

Permasalahan pelayanan OPD	- Kurangnya pemahaman para pelaku usaha dan/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. - Keterbatasan data dan informasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
Faktor penghambat	- Tidak adanya tim terpadu terhadap pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. - Keterbatasan kualitas dan kuantitas ASN di bidang

	perencanaan, pengelolaan dan perlindungan serta data informasi lingkungan hidup. - Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi tentang kewajiban pelaku usaha dan stakeholder terhadap proses perencanaan, pengelolaan, perlindungan serta data informasi lingkungan hidup
Faktor pendorong	- Telah adanya sistem tindak lanjut pengaduan terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. - Penetapan pedoman tentang pelaksanaan proses perencanaan /pengelolaan data/penerbitan /pemeriksaan /penilaian dokumen lingkungan. - Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan intitusi lingkungan hidup di tingkat pusat , provinsi , maupun daerah yang efektif

Permasalahan pelayanan OPD	Menurunnya kualitas lingkungan di Kabupaten Morowali Utara secara umum
Faktor penghambat	Kurangnya pemahaman Pelaku usaha tentang prosedur pengelolaan limbah B3, pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku
Faktor pendorong	Meningkatnya industri pengolahan SDA di Morowali Utara

Permasalahan pelayanan OPD	Kecenderungan terjadinya peningkatan timbulan sampah

Faktor penghambat	- Kurang memadainya personil dan sarpras pengelolaan persampahan. - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelolah sampah. - Belum tersedianya TPA
Faktor pendorong	- Besarnya anggaran untuk pengadaan sarpras persampahan. - Kurangnya Sosialisasi Pemilahan sampah

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas cukup berdampak pada proses pengelolaan lingkungan.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Dengan adanya permasalahan lingkungan ini dapat memberi peluang dalam hal menciptakan program dan kegiatan sekaligus memberi tantangan dalam mengatasinya dengan menyusun strategi yang dapat digunakan untuk mencari alternative pemecahan permasalahan lingkungan.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa isu penting yang menjadi permasalahan lingkungan di daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

- Adanya perubahan fungsi lahan dari aktifitas manusia yang memicu terjadinya penurunan daya dukung lahan.
- Kerusakan Daerah Aliran Sungai akibat dari kegiatan pertambangan material bahan bangunan.
- Adanya bekas kegiatan usaha pertambangan nikel yang tidak direklamasi.
- Degradasi keanekaragaman hayati.

2.3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program yang terkait dengan kebutuhan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan seperti pelestarian sumber-sumber mata air dengan program penurapan mata air dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2.3.6 Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrembang

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat telah dibangun komunikasi dengan masyarakat pedesaan agar terlebih dahulu melakukan inventarisasi kerusakan lahan dan sumber-sumber air yang perlu mendapat perhatian untuk segera ditanggulangi.

2.3.7 Kesesuaian Usulan Musrembang dengan Isu penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Kegiatan musrenbang menjadi referensi dalam menyusun program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai isu penting adalah rehabilitasi kerusakan hutan dan lahan, dan penurapan mata air.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan mengkomunikasikan isi dari rancangan tersebut dengan pelaksana pada bidang-bidang teknis terkait. Konfirmasi ke pelaksana teknis kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan lokasi kegiatan, target kinerja/keluaran, dan kebutuhan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya setiap pelaksana teknis

kegiatan diminta untuk menyusun lebih awal rancangan awal rencana kerjadan angaran (RKA) Tahun 2024. Melalui review ini dapat diketahui kapasitas dan kemampuan pelaksana teknis kegiatan dalam merealisasikan kegiatannya masing-masing.

Selain itu melalui review ini dapat dilakukan evaluasi seberapa penting kegiatan tersebut sehingga diperlukan perhatian khusus dalam alokasi anggaran, demikian sebaliknya bila kegiatan tersebut dianggap tidak begitu penting maka alokasi anggarannya dapat disesuaikan. Adapun hasil terhadap review rancangan awal RKPD Tahun 2023 masih memerlukan penyesuaian alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan.

TABEL 3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	DLHD	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**5.671.869.590,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	DLHD	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**10.034.539.340,00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLHD	**Tingkat kesejahteraan pegawai**	**12 Bulan**	**3.231.617.110,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DLHD	**Tingkat kesejahteraan pegawai**	**12 Bulan**	**3.231.617.110,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHD	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.321.617.110,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHD	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.231.617.110,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLHD	**Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Pegawai**	**100%**	**59.161.430,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	DLHD	**Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Pegawai**	**100%**	**99.161.430,00**	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLHD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	100%	44.161.430,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLHD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	100%	**44.161.430,00**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLHD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLHD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	**55.000.000,00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLHD	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**129.739.550,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DLHD	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**229.739.550,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DLHD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5.598.328,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DLHD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5.598.328,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 Bulan	10.526.594,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	10.526.594,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLHD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Bulan	800.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLHD	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	800.000,00	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLHD	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	12.707.928,60	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLHD	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	12.707.928,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100.106.700,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	200.106.700,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLHD	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**104.856.250,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DLHD	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**3.336.616.250,00**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLHD	Tersedianya KendaraanDinas Jabatan	0%	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLHD	Tersedianya KendaraanDinas Jabatan	100%	497.760.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHD	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	0%	50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHD	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	2.750.000.000,00	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHD	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	54.856.250,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHD	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	88.856.250,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLHD	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**1.690.665.250,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DLHD	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**2.301.255.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHD	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHD	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	2.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	22.785.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	22.785.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.665.480.250,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHD	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	2.276.070.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLHD	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**455.830.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DLHD	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100%**	**836.150.000,00**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLHD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	10 Unit	35.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLHD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	10 Unit	35.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	14 Unit	354.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	14 Unit	634.820.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHD	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	18 Unit	14.630.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHD	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	18 Unit	14.630.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLHD	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit	51.200.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLHD	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	151.200.000,00	

2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	DLHD	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terkendali**	**100%**	**27396.900,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	DLHD	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terkendali**	**100%**	**278.396.900,00**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHD	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**5 Kegiatan**	**10.469.600,00**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	DLHD	**Terlaksananya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**100%**	**120.469.600,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLHD	Terlaksananya pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut	3 Kegiatan	5.023.600,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLHD	Terlaksananya pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut	10 Kegiatan	95.023.600,00	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHD	Terkelolaanya laboratorium lingkungan hidup	1 Kegiatan	5.446.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHD	Terkelolaanya laboratorium lingkungan hidup	10 Kegiatan	25.446.000,00	

	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHD	**Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**7 Kegiatan**	**10.000.000,00**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	DLHD	**Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**106.000.000,00**	
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHD	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Kegiatan	10.000.000,00	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHD	Jumlah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dihentikan	10 Kegiatan	106.000.000,00	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLHD	**Terlaksananya Upaya Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	**21 Kegiatan**	**6.927.300,00**	**Pemulihan Pencerahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	DLHD	**Terlaksananya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan**	**100%**	**51.927.300,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	DLHD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintahan dan/atau Provinsi	2 Kegiatan	6.927.300,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	DLHD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintahan dan/atau Provinsi	25 Kegiatan	51.927.300,00	

			dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan					dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan			
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**	DLHD	**Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI**	**100%**	**10.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**	DLHD	**Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI**	**100%**	**10.800.000,00**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	DLHD	**Terlaksananya pengelolaan KEHATI**	**7 Kegiatan**	**10.800.000,00**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	DLHD	**Terlaksananya pengelolaan KEHATI**	**100%**	**10.800.000,00**	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLHD	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan KEHATI	2 Kegiatan	10.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLHD	Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan KEHATI	7 Kegiatan	10.000.000,00	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	DLHD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati	1 Kegiatan	800.000,00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	DLHD	Terkelolanya Taman KEHATI lainnya	7 Kegiatan	800.000,00	

4	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	DLHD	**Persentase Ketaatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3**	**100%**	**15.218.850,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	DLHD	**Persentase Ketaatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3**	**100%**	**105.218.850,00**	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLHD	**Terlaksananya Pelaporan B3 dan Limbah B3**	**6 Dok**	**15.218.850,00**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	DLHD	**Terlaksananya Pelaporan B3 dan Limbah B3**	**100%**	**105.218.850,00**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DLHD	Tersedianya izin penyimpanan sementara limbah B3	=	5.121.350,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DLHD	Tersedianya izin penyimpanan sementara limbah B3	24 Dok	75.121.350,00	

	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLHD	Terpantaunya Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	5 Kegiatan	10.097.500,00	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLHD	Terpantaunya Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100%	30.097.500,00	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	DLHD	**Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)**	**100%**	**20.432.950,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	DLHD	**Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)**	**100%**	**170.432.950,00**	
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan	DLHD	**Terlaksananya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan**	**6 Kegiatan**	**20.432.950,00**	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	DLHD	**Terlaksananya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan**	**100%**	**170.432.950,00**	

	oleh Pemerintah Daerah					**diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**					
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLHD	Terpantaunya Persyaratan izin Lingkungan	12 Kegiatan	7.121.900,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLHD	Terpantaunya Persyaratan izin Lingkungan	24 Dokumen	57.121.900,00	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DLHD	Meningkatnya kapasitas SDM PPLH	10 Orang	5.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	DLHD	Meningkatnya kapasitas SDM PPLH	6 Orang	55.000.000,00	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLHD	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	10 Kegiatan	8.311.050,00	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLHD	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	24 Dokumen	58.311.050,00	

6	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	DLHD	**Persentase MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang diakui**	**100%**	**4.053.500,00**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	DLHD	**Persentase MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang diakui**	**100%**	**64.053.500,00**	
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	DLHD	**Terlaksananya Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan hak MHA**	**1 Kelompok**	**4.053.500,00**	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	DLHD	**Terlaksananya Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan hak MHA**	**100%**	**64.053.500,00**	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan Hak	DLHD	Tersedianya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1 Kelompok	4.053.500,00	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan Hak	DLHD	Tersedianya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1 Kelompok	64.053.500,00	

	MHA terkait dengan PPLH					MHA terkait dengan PPLH					
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	DLHD	**Presentase Masyarakat sadar lingkungan yang aktif**	**100%**	**3.785.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	DLHD	**Presentase Masyarakat sadar lingkungan yang aktif**	**100%**	**3.785.000,00**	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLHD	**Terselenggaranya edukasi dan komunikasi lembaga kemasyarakatan dibidang lingkungan**	**3 Kegiatan**	**3.785.000,00**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	DLHD	**Terselenggaranya edukasi dan komunikasi lembaga kemasyarakatan dibidang lingkungan**	**100%**	**3.785.000,00**	

	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DLHD	Terselenggaranya Penyuluhan dan Kampanye lingkungan hidup	20 Kegiatan	3.785.000,00	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DLHD	Terselenggaranya Penyuluhan dan Kampanye lingkungan hidup	5 Kelompok	3.785.000,00	
8	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	DLHD	**Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani**	**100%**	**5.660.900,00**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	DLHD	**Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani**	**100%**	**5.660.900,00**	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di BidangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	DLHD	**Tertanganinya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**9 Kegiatan**	**5.660.900,00**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di BidangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota**	DLHD	**Tertanganinya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**100%**	**5.660.900,00**	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	DLHD	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 Kegiatan	5.660.900,00	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	DLHD	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	20 Dokumen	5.660.900,00	

9	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	DLHD	**Presentase Sampah yang di Angkut**	**100%**	**84.155.156,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	DLHD	**Presentase Sampah yang di Angkut**	**100%**	**400.879.990,00**	
	Pengelolaan Sampah	DLHD	**Tersedianya SAPRAS Pengelolaan Persampahan yang efektif dan efisien**	**100%**	**12.303.300,00**	**Pengelolaan Sampah**	DLHD	**Tersedianya SAPRAS Pengelolaan Persampahan yang efektif dan efisien**	**100%**	**386.551.240,00**	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLHD	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	1 Kegiatan	12.303.300,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLHD	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	100%	142.303.300,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	DLHD	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan	5.807.700,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	DLHD	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan	100%	5.807.700,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLHD	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	1 Paket	61.715.406,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLHD	Tersedianya Sarpras Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	100%	238.440.240,00	

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	DLHD	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah**	**7 Kegiatan**	**4.328.750,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	DLHD	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah**	**100%**	**14.328.750,00**	
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	DLHD	Terpantaunya pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	1 Kegiatan	4.328.750,00	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	DLHD	Terpantaunya pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	20 Dokumen	14.328.750,00	
TOTAL					**5.843.372.846,80**					**11.073.767.430,00**	

Kolonodale, 13 Februari 2023

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Ir. SYARIFUDIN, ST.,MT

NIP. 19731016 200003 1 003

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup yaitu:

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Indonesia Asri dan Lestari	Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN) 2005-2025	Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan social ekonomi, dan upaya konsevasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam

			dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan : a. Pemantauan kualitas udara, air, dan air laut; b. Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiataan; c. Penyediaan informasi cuaca dan iklim; d. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan; e. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; f. Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati

			dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keankeragaman hayati terancam punah baik didaratan maupun perairan; g. Penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. 2. Penanggulangan Pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan a. Penanganan Pencemaran Kerusakan Lingkungan; b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; c. Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta d. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu. 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan :

			a. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; b. Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; c. Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; d. Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta e. Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah. 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan : a. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; b. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta

			c. Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA & LH.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam program strategis 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan mempertimbangkan visi dan misi Bupati terpilih dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup adalah memantapkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik dengan cara :

- Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
- Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Melindungi lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumber daya alam
- Meningkatkan kapasitas Ruang Terbuka Hijau
- Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan pelaku usaha.
- Meningkatkan fungsi pelayanan
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Adapun sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan organisasi dalam memantapkan pengelolaan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan di Kabupaten Morowali Utara dengan menjaga fungsi dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan memperhatikan indeks kualitas air, indek

kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan serta terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan memperhatikan presentase penyelesaian kasus perusakan lingkungan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada berikut ini.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.843.372.846,00**							**9.215.958.258,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**5.843.372.846,00**							**9.215.958.258,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.671.869.590,00**				**Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik**			**8.354.694.258,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***100***									
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.231.617.110,00				Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah			3.328.564.665,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu (Bulan)				*12*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Petasia)*					*12*		
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.231.617.110,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah			3.328.564.665,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*25*	*26*	*26*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Petasia)*					*26*		
			Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan ASN (Tahun)				*1*	*3.231.617.110,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						59.161.430,00				Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			135.509.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Petasia)*					*100*		
	2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						44.161.430,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah			75.509.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0*	*1*	*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*1*		
			Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (Buah)				*86*	*44.161.430,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN dan Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN dan Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0*	*0*	*10*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN dan Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*10*		
			Biaya Kontribusi Bimtek ASN (Orang)				*10*	*15.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Lingkungan Hidup Daerah*			
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.739.550,00				Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			189.106.593,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Petasia)*					*100*		
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.598.328,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah			5.476.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*5*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*5*		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Paket)				*5*	*5.598.328,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.526.594,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		12.430.593,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*3*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*3*		
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer (Paket)				*3*	*10.526.594,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						800.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*2*		
			Belanja Alat Dapur (Paket)				*1*	*800.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.707.928,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		16.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*7*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*7*		
			Belanja Kertas dan Cover (Paket)				*7*	*12.707.928,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.106.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*10*	*10*	*12*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*15*		
			Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Laporan)				*12*	*100.106.700,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						104.856.250,00				Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			1.818.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Petasia)*					*100*		
	2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*0.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*1.00*		
			Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan (Unit)				*0*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*3.00*	*1.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*5.00*		
			Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Unit)				*1*	*50.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						54.856.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*10.00*	*3.00*	*3.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*5.00*		
			Belanja Modal Personal Computer (Unit)				*3*	*54.856.250,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.690.665.250,00				Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			2.238.014.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Petasia)*					*100*		
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*12*		
			Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Lembar)				*240*	*2.400.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.785.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*10*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*10*		
			Belanja Tagihan Listrik (Bulan)				*12*	*22.785.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.665.480.250,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		2.215.514.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*12*		
			Belanja Jasa Kantor (Bulan)				*12*	*1.665.480.250,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN dan Tenaga Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						455.830.000,00				Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			645.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (%)				*100*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Petasia)*					*100*		
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah			35.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*11*		
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)				*10*	*35.500.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						354.500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*14.00*	*14.00*	*11.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*14.00*		
			Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Liter)				*43.060*	*354.500.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.630.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*5*	*10*	*20*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*20*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Unit)				*20*	*14.630.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.200.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*0*	*2*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*	*2*		
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (M2)				*200*	*51.200.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**27.396.900,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**			**556.264.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan yang Taat Terhadap Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL/UPL, SPPL) (%)				***100***						***Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara***			
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						10.469.600,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			328.264.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Kegiatan)				*4*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*6*		
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						5.023.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			178.264.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)		*2*	*3*	*2*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*3*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Kota (Dokumen)				*2*	*5.023.600,00*	*(Seluruh Kecamatan Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						5.446.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kab. Morowali Utara		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0*	*1*	*2*		*(Kab. Morowali Utara, Seluruh Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kab. Morowali Utara*	*3*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah (Dokumen)				*2*	*5.446.000,00*	*(Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						10.000.000,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Kegiatan)				*7*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*8*		
	2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)		*0.00*	*2.00*	*5.00*		*(Kab. Morowali Utara, Seluruh Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*25.00*		
			Jasa Pengujian Kualitas Air dan Udara (Sampel)				*5*	*10.000.000,00*	*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kab. Morowali Utara*			
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						6.927.300,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			178.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Upaya Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan (Kegiatan)				*21*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*20*		
	2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran						6.927.300,00							178.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)		*5.00*	*6.00*	*2.00*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (Kegiatan)				*2*	*6.927.300,00*	*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kab. Morowali Utara*			
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI (%)***				***100***	**10.800.000,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**	***Kelompok Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kab. Morowali Utara***		**25.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						10.800.000,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Pengelolaan KEHATI (Orang)				*7*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*7*		
	2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)		*0*	*0*	*2*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*4*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Orang)				*2*	*10.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kab. Morowali Utara*			
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						800.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Masyarakat Kab. Morowali Utara		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)		*0*	*0*	*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*				*Masyarakat Kab. Morowali Utara*	*1*		
			Belanja Pemeliharaan (Orang)				*10*	*800.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara*			
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan yang Taat Terhadap Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL/UPL, SPPL) (%)***				***100***	**15.218.850,00**				**Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik**	***Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara***		**30.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						15.218.850,00				Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Pelaporan B3 dan Limbah B3 (Dokumen)				*6*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, Petasia)*					*6*		
	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						5.121.350,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		*0*	*0*	*14*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*14*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah (Kegiatan)				*3*	*5.121.350,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil B3 dan Limbah B3 Kab. Morowali Utara*			
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3						10.097.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil B3 dan Limbah B3 Kab. Morowali Utara		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)		*3*	*1*	*5*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*				*Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil B3 dan Limbah B3 Kab. Morowali Utara*	*5*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah (Kegiatan)				*5*	*10.097.500,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil B3 dan Limbah B3 Kab. Morowali Utara*			
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase Perusahaan Pemegang Izin Lingkungan yang Taat Terhadap Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL/UPL, SPPL) (%)***				***100***	**20.432.950,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**	***Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil B3 dan Limbah B3 Kab. Morowali Utara***		**75.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						20.432.950,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan (Kegiatan)				*6*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*7*		
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						7.121.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)		*4*	*0.00*	*12.00*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*12.00*		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Lembar)				*500*	*7.121.900,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara*			
	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						5.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Orang)		*0*	*0*	*10*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*				*Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara*	*5*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Orang)				*10*	*5.000.000,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara*			
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						8.311.050,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		*2*	*2*	*10*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*				*Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara*	*10*		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Botol/Liter)				*7*	*8.311.050,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara*			
6.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Persentase MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Diakui (%)***				***100***	**4.053.500,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**	***Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Morowali Utara***		**30.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						4.053.500,00				Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA (Kelompok)				*1*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*1*		
	2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						4.053.500,00							30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*1*		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Orang)				*50*	*4.053.500,00*	*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat Hukum Adat Kab. Morowali Utara*			
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase Masyarakat Sadar Lingkungan yang Aktif (%)***				***100***	**3.785.000,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**	***Kelompok Masyarakat Hukum Adat Kab. Morowali Utara***		**15.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.785.000,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terselenggaranya Edukasi dan Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Lingkungan (Kegiatan)				*3*		*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*3*		
	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						3.785.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)		*0*	*0*	*20*		*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*0.00*		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				*2*	*3.785.000,00*	*(Kec. Petasia, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**5.660.900,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**			**30.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup (%)				***100***						***Kelompok Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara***			
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						5.660.900,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Oleh Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kegiatan)				*9*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*10*		
	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota						5.660.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)		*0*	*0*	*5*		*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*					*5*		
			Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				*2*	*5.660.900,00*	*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*			
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**84.155.156,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**			**100.000.000,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
			Volume Sampah yang di Angkut (%)				***100***						***Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara***			
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						79.826.406,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Yang Efektif dan Efisien (%)				*100*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						12.303.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		*0*	*0*	*1*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*2*		
			Belanja Jasa Kantor (Kegiatan)				*1*	*12.303.300,00*	*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*			
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						5.807.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kegiatan)				*3*	*5.807.700,00*	*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*			
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						61.715.406,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)		*20*	*20*	*30*		*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*				*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*	*40*		
			Belanja Bahan-Bahan Kimia (Liter)				*25*	*61.715.406,00*	*(Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*			
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						4.328.750,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah (Kegiatan)				*7*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*8*		
	2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah						4.328.750,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)		*0*	*0*	*1*		*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*2*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kegiatan)				*1*	*4.328.750,00*	*(Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Kegiatan dan/atau Usaha, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*			
	J U M L A H							**5.843.372.846,00**							9.215.958.258,00	

BAB IV
PENUTUP

Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara, merupakan salah satu acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja organisasi tahun 2022 sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan di bidang Lingkungan Hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 2024.

Semoga Rancangan awal rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Demikian Rancangan Awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini kami susun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas operasional,

khususnya dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2024 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 13 Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Ir. SYARIFUDIN, ST.,MT
NIP. 19731016 200003 1 003

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DUKCAPIL GO DIGITAL
GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kasih dan karunia-Nya, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

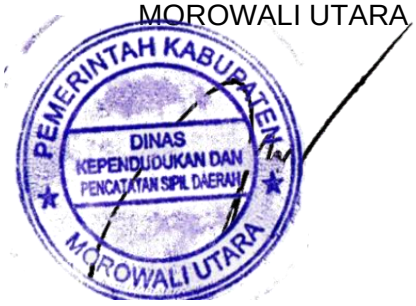
Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan Acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Morowali Utara diharapkan setiap tahunnya akuntabilitas kinerja dapat terukur secara rinci dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari apa yang diharapkan dan masih terdapat kekurangan, namun koreksi dan saran merupakan bahan masukan yang berharga bagi kami untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua dan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

KOLONODALE, 9 MARET 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MOROWALI UTARA



Drs. BENDHART TANDI TIALEN
NIP: 19671007 199312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II : REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 41

BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakkan Nasional 45

3.2 Tujuan dan Sasaran 45

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 46

BAB IV : RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas tentunya memerlukan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 salah satunya menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya Eselon II saja yang membuat rencana kerja, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin pada Unit Kerja.

Perencanaan awal rencana kerja merupakan pedoman sebagai dokumen resmi daerah dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa “Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala

Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan".

Alasan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah disebabkan karena diterbitkannya Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkannya Perda nomor 7 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Morut 2021-2026.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara yang menjadi urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yamg selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk program, kegiatan selama 2 tahun.

B. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklaturperencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4817).

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2006-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (lembaran daerah nomor 11 tambahan lembaran daerah nomor 25).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara merupakan arah dan pedoman bagi sekretariat dan bidang dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, yaitu:

a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam satu tahun perencanaan.
c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

B. Landasan Hukum.

C. Maksud dan Tujuan.

D. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tidak lepas dari Rencana Startegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Program atau kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, yaitu :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp19.803.000	Rp19.800.000	99,98

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp31.044.050	Rp31.035.212	99,97
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.704.000	Rp1.480.000	86,85
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp15.231.725	Rp15.020.928	98,62
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp1.245.350	Rp1.245.000	99,97
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp3.054.659	Rp3.048.039	99,78
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp14.499.834	Rp6.214.197	42,86
7	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00
8	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp11.118.000	Rp11.118.000	100,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp 8.412.500	Rp8.000.000	95,10
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp 2.911.700	Rp2.911.700	100,00
11	Belanja Modal Personal Computer	Rp 15.989.000	Rp15.989.000	100,00
12	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 60.000.000	Rp53.200.000	88,67
13	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Rp 89.263.000	Rp88.699.000	99,37
14	Belanja Modal Bangunan Parkir	Rp 150.000.000	Rp149.439.000	99,63

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 19.375.000	Rp19.356.250	99,90

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 150.666.000	Rp150.592.660	99,95
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 27.500.000	Rp22.024.700	80,09

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. Pengadaan Mebel

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp 7.245.000	Rp7.245.000	100

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Modal Personal Computer	Rp 29.134.443	Rp29.000.000	99,54

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp 3.200.000	3.200.000	100,00

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Tagihan Air	Rp 1.200.000	Rp1.100.000	91,67
2	Belanja Tagihan Listrik	Rp 34.672.800	Rp34.195.000	98,62
3	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 34.600.000	Rp27.725.000	80,13
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 6.000.000	Rp5.947.000	99,12

c. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 15.006.000	Rp14.902.740	99,31
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 10.414.000	Rp10.405.000	99,91

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 51.000.000	Rp42.350.000	83,04
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 4.200.000	Rp4.200.000	100,00
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 312.000.000	Rp311.900.000	99,97
4	Belanja Lembur	Rp 89.800.000	Rp89.800.000	100,00

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp27.250.000	Rp27.241.501	99,97
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp76.000.000	Rp76.000.000	100,00

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp29.930.000	Rp23.829.000	79,62
2	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp8.030.000	Rp8.030.000	100,00
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Rp8.280.000	Rp8.280.000	100,00

6. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 810.500	Rp810.000	99,94
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 10.060.000	Rp10.060.000	100,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 8.577.000	Rp8.417.200	98,14

b. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp3.174.400	Rp3.174.400	100,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.080.000	Rp4.580.000	90,16
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp5.648.100	Rp3.410.500	60,38

c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp1.789.400	Rp1.765.000	98,64
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.000.000	Rp12.729.905	97,92
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-

7. Penataan Pendaftaran Penduduk

a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp55.950.000	Rp55.950.000	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp82.726.050	Rp67.000.000	80,99
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp375.300.000	Rp374.903.300	99,89
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp56.680.000	Rp55.982.964	98,77
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp274.112.000	Rp273.341.159	99,72
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp506.629.000	Rp506.261.924	99,93
8	Belanja Modal Personal Computer	Rp129.553.465	Rp129.500.000	99,96
9	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp91.065.000	Rp91.065.000	100,00
10	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp175.000.000	Rp175.000.000	100,00

8. Pelayanan Pencatatan Sipil.

a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp2.006.810	Rp1.886.810	94,02
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp58.000		0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.175.000	Rp1.050.000	89,36
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp50.632.000	Rp48.206.000	95,21
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp62.816.000	Rp62.550.000	99,58

9. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp1.215.000		0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.440.000	Rp12.665.000	94,23
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp17.445.000	Rp17.153.600	98,33
4	Belanja Modal Personal Computer	20.150.000	Rp20.150.000	100,00
5	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.500.000		0,00

10. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp3.000		0,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp600.000	Rp600.000	100,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.137.000	Rp6.137.000	100,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.451.500	Rp36.451.500	100,00

11. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.710.000	Rp7.710.000	100,00

12. Penyusunan Profil Kependudukan

a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp950.500	Rp950.500	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp59.800		0,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp13.057.000	Rp13.057.000	100,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp10.160.000	Rp9.940.000	97,83

TABEL T-C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGAH/KABUPATEN MOROWALI UTARA/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program RANWAL RENJA PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Reaisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RANWAL RENJA
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100		100	97	97%	100		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	100		100	99	99%	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100		100	96	96%	100		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100		100	99	99%	100		

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100		100	97	97%	100		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan yang Diadakan	100		100	100	100%	100		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan	100		100	99	99%	100		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100		100	100	100%	100		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100		100	90	90%	100		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100		100	99	99%	100		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100		100	99	99%	100		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	100		100	99	99%	100		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100		100	86	86%	100		
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk									

			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Presentase Tersedianya Data Base yang Valid	100		100	99	99%	100	
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Presentase Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	100		100	80	80%	101	
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terbentuknya Kampung GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	100		100	98	98%	102	
			Penataan Pendaftaran Penduduk								
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Dokumen Adminduk	100		100	98	98%	100	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
			Pelayanan Pencatatan Sipil								
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Tersediannya Dokumen Pencatatan Sipil	100		100	97	97%	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti BIMTEK	100		100	100	100%	100	
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Updating System dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	100		100	89	89%	100	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								

				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	100		100	99	99%	100	
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								
				Penyusunan Profil Kependudukan								
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersedianya Laporan Perkembangan Penduduk dan Pencatatan Sipil	100		100	98	98%	100	

CATATAN:

JUMLAH PROGRAM : 5 Program Bidang
JUMLAH KEGIATAN : 13 Kegiatan
JUMLAH SUB KEGIATAN : 22 Kegiatan
: PERMENDAGRI 90 DAN PERMENDAGRI 050

KOLONODALE, 9 MARET 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MOROWALI UTARA

Drs. BE[illegible]ART TANDI TIALEN
NIP: 19671007 199312 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara mempunyai sasaran bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencapai sasaran tersebut di tuangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
2. Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran.
3. Prosentase penduduk yang memiliki KTP.
4. Tingkat keakuratan peristiwa kependudukan.
5. Tingkat updating database kependudukan.

Dari indikator sasaran kinerja tersebut dijabarkan dalam 5 program dan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara. Adapun untuk mencapai target presentase kepemilikan Kartu Keluarga dilaksanakan dengan kegiataan pelayanan Kartu Keluarga, sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan Sipil, intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, pemeliharaan jaringan online dan hardware, peningkatan SDM operator, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, penataan dokumen kependudukan, pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan intensifikasi untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Target prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran dicapai dengan kegiatan pelayanan pencatatan sipil, sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil, intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 17 peningkatan SDM operator, pembangunan aplikasi pelayanan, pemeliharan jaringan online dan hardware, pengadaan sarana penyimpanan dokumen kependudukan, penataan dokumen kependudukan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan.Target presentase penduduk yang memiliki KTP akan dicapai dengan kegiatan seperti pelayanan

KTP Elektronik (KTP-EL), sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil, intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, pemeliharaan jaringan online dan hardware, penataan dokumen kependudukan, pembangunan aplikasi pelayanan, peningkatan SDM operator, pengadaan sarana penyimpanan dokumen kependudukan dan pengadaan peralatan administrasi kependudukan. Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa penduduk akan dicapai dengan kegiatan pelayanan surat pindah datang, pelayanan Kartu Keluarga, pengelolaan informasi kependudukan, intensifikasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan dan pemeliharaan jaringan online dan hardware. Adapun untuk mencapai tingkat updating database kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan online dan hardware, pengadaan peralatan pendukung SIAK, peningkatan SDM operator SIAK dan pengelolaan informasi kependudukan. Guna terwujutnya pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu didukung sarana prasarana dan sumber daya manusia. Sedangkan dengan adanya struktur organisasi yang baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu masih terbatasnya ruang penyimpan dokumen, belum adanya sarana dan prasarana pada ruang pertemuan, lingkungan atau halaman kantor kurang representatif dan sarana prasarana ruang pelayanan kurang memadai.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 48 orang yang terdiri dari 28 PNS dan 20 Non PNS, yang terdidi dari:

1. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
    a. Pembina Tkt. I (IV/b) : 2 Orang
    b. Pembina (IV/a) : 1 Orang
    c. Pembina Tkt. I (III/d) : 7 Orang
    d. Penata (III/c) : 2 Orang
    e. Penata Muda Tkt. I (III/b) : 2 Orang
    f. Penata Muda (III/a) : 11 Orang
    g. Pengatur (II/c) : 3 Orang
    h. Pengatur Muda Tkt. I (II/b) : 1 Orang

3. Kondisi Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan

a. SD : -

b. SLTP : -

c. SLTA : 13 Orang

d. Sarjana Muda/D3 : 1 Orang

e. Sarjana/S1 : 34 Orang

f. Pasca Sarjana/S2 : Orang

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah/ Kabupaten Morowali Utara/ Kota Kolonodale

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RANWAL RENJA Perangkat Daerah (PD)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisasis
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun (N) 2024	Tahun (N+1) 2025	Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun (N) 2024	Tahun (N+1)2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			100	100	100	100	97	100	100	100	
2.	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan			100	100	100	100	98	100	100	100	
3.	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			100	100	100	100	96	100	100	100	

4.	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			100	100	100	100	99	100	100	100	
5.	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			100	100	100	100	97	100	100	100	
6.	Jumlah Peralatan yang Diadakan			100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadakan			100	100	100	100	99	100	100	100	
8.	Tersedianya jasa surat menyurat			100	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			100	100	100	100	90	100	100	100	
10.	Presentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	100	100	100	99	100	100	100	

11.	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	100	100	100	99	100	100	100	
12.	Jumlah Kendaraan Dinas			100	100	100	100	99	100	100	100	
13.	Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			100	100	100	100	86	100	100	100	
14.	Presentase Tersedianya Data Base yang Valid			100	100	100	100	99	100	100	100	
15.	Presentase Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			100	100	100	100	80	100	100	100	
16.	Terbentuknya Kampung GISA(Gerakan Indonesia SadarAdminduk)			100	100	100	100	98	100	100	100	
17.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Dokumen Adminduk			100	100	100	100	98	100	100	100	

18.	Presentase Tersediannya Dokumen Pencatatan Sipil			100	100	100	100	97	100	100	100	
19.	Jumlah Aparatur yang Mengikuti BIMTEK			100	100	100	100	100	100	100	100	
20.	Presentase Updating System dan Pemeliharaan Perangkat SIAK			100	100	100	100	89	100	100	100	
21.	Jumlah Peserta Sosialisasi			100	100	100	100	99	100	100	100	
22.	Tersedianya Laporan Perkembangan Penduduk dan Pencatatan Sipil			100	100	100	100	98	100	100	100	

KOLONODALE, 9 MARET 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
MOROWALI UTARA

Drs. BENDIARY TANDI TIALEN
NIP: 19671007 199312 1 003

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara untuk saat ini yaitu:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan perangkat lunak, terutama pemenuhan kebutuhan alat cetak KTP-el untuk 10 Kecamatan.
2. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur penyelenggara pelayanan Adminduk.
3. Terlambatnya pengiriman blanko KTP-EL dari Kementrian Dalam Negeri..
4. Jarak dan letak geografis merupakan faktor penting yang menjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan.
6. Sarana dan prasarana gedung pelayanan dan ruang rapat, halaman kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, rak penyimpan dokumen masih kurang memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada Rancangan Awal RKPD, namun terdapat kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya**.**

TABEL T-C 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGAH/KABUPATEN MOROWALI UTARA/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Lembar.....Dari**

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Disdukcapil***	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Rp 4.593.420.329**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Disdukcapil***	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Rp 4.593.420.329**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Disdukcapil***	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	**100%**	**Rp 3.557.066.548**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Disdukcapil***	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	**100%**	**Rp 3.557.066.548**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Disdukcapil***	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 3.557.066.548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Disdukcapil***	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	**Rp 3.557.066.548**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Disdukcapil***	**Peningkatan Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**Rp 19.803.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Disdukcapil***	**Peningkatan Sumberdaya Aparatur**	**100%**	**Rp 19.803.000**	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	***Disdukcapil***	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang diadakan	100%	Rp 19.803.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	***Disdukcapil***	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang diadakan	100%	**Rp 19.803.000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Disdukcapil***	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**Rp 303.761.959**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Disdukcapil***	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**Rp 303.761.959**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Disdukcapil***	Jumlah, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	100%	Rp 125.277.959	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Disdukcapil***	Jumlah, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	100%	**Rp 125.277.959**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Disdukcapil***	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Rp 21.350.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Disdukcapil***	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	**Rp 21.350.000**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Disdukcapil***	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi secara Efektif dan Efisien	100%	Rp157.134.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Disdukcapil***	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi secara Efektif dan Efisien	100%	**Rp 157.134.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**Rp62.496.022**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**Rp 62.496.022**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Disdukcapil***	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	100%		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Disdukcapil***	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	100%	**Rp -**	

	Pengadaan Mebel	***Disdukcapil***	Jumlah Pengadaan Mebel	100%	Rp9.056.250	Pengadaan Mebel	***Disdukcapil***	Jumlah Pengadaan Mebel	100%	**Rp 9.056.250**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Disdukcapil***	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	Rp53.439.772	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Disdukcapil***	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	**Rp 53.439.772**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Disdukcapil***	**Meningkatya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**Rp476.552.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Disdukcapil***	**Meningkatya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**Rp 476.552.800**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Disdukcapil***	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Rp2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Disdukcapil***	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	**Rp 2.500.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Disdukcapil***	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%	Rp47.872.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Disdukcapil***	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%	**Rp 47.872.800**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Disdukcapil***	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp25.420.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Disdukcapil***	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	**Rp 25.420.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	***Disdukcapil***	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum kantor	100%	Rp400.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	***Disdukcapil***	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum kantor	100%	**Rp 400.760.000**	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Disdukcapil***	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**Rp173.740.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Disdukcapil***	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**Rp 173.740.000**	
	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	***Disdukcapil***	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional**	100%	Rp127.500.000	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	***Disdukcapil***		100%	**Rp 127.500.000**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Disdukcapil***	**Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor**	100%	Rp46.240.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Disdukcapil***		100%	**Rp 46.240.000**	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	***Disdukcapil***	**Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Rp1.216.203.330**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Disdukcapil***	**Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Rp 1.216.203.330**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp67.481.080**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp 67.481.080**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Tersedianya Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100%	Rp18.969.980	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Tersedianya Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100%	**Rp 18.969.980**	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	Persentase Penyelesaian Masalah Kependudukan	100%	Rp13.160.700	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	Persentase Penyelesaian Masalah Kependudukan	100%	**Rp 13.160.700**	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	Terbentuknya Kampung GISA	100%	Rp35.350.400	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	Terbentuknya Kampung GISA	100%	**Rp 35.350.400**	

	Penataan Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	**Persentase Mutu Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil**		**Rp1.148.722.250**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	***Disdukcapil***	**Persentase Mutu Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil**		**Rp 1.148.722.250**	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	***Disdukcapil***	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diadakan	100%	Rp1.148.722.250	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	***Disdukcapil***	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diadakan	100%	**Rp 1.148.722.250**	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Rp78.978.710**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Rp 78.978.710**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	***Disdukcapil***	**Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp78.978.710**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp 78.978.710**	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	***Disdukcapil***	Persentase Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Rp78.978.710	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	***Disdukcapil***	Persentase Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	100%	**Rp 78.978.710**	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Rp60.284.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Rp 60.284.500**	
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp30.027.000**	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp 30.027.000**	

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Persentase Updating Sistem dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	100%	Rp30.027.000	**Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***	Persentase Updating Sistem dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	100%	**Rp 30.027.000**	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningkanya Tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp21.747.500**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***	**Meningkanya Tertib Administrasi Kependudukan**		**Rp 21.747.500**	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%	Rp21.747.500	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%	**Rp 21.747.500**	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningkatnya SDM Tenaga pengelola SIAK**		**Rp8.510.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya SDM Tenaga pengelola SIAK**		**Rp 8.510.000**	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	***Disdukcapil***	Jumlah Aparatur yang Mengikuti BIMTEK	100%	Rp8.510.000	**Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan**	***Disdukcapil***	Jumlah Aparatur yang Mengikuti BIMTEK	100%	**Rp 8.510.000**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	***Disdukcapil***	**Meninkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntanbel**		**Rp23.933.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Disdukcapil***	**Meninkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntanbel**		**Rp 23.933.500**	

	Penyusunan Profil Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**		**Rp23.933.500**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	***Disdukcapil***	**Meningatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**		**Rp 23.933.500**	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	***Disdukcapil***	Jumlah Data Kependudukan yang Tersedia	100%	Rp23.933.500	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	***Disdukcapil***	Jumlah Data Kependudukan yang Tersedia	100%	**Rp 23.933.500**	

Kolonodale, 9 Maret 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Drs. BENDHART TANDI TIALEN
NIP: 19671007 199312 1 003

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara di diskusikan dalam ruang lingkup DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap bidang serta di bahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun program dari DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL T-C 32

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGAH/KABUPATEN MOROWALI UTARA/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Disdukcapil***	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Disdukcapil***	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Disdukcapil***	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Disdukcapil***	**Peningkatan Sumberdaya Aparatur**		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	***Disdukcapil***	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang diadakan	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Disdukcapil***	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Disdukcapil***	Jumlah, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	100%	

			diadakan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	***Disdukcapil***	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Disdukcapil***	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi secara Efektif dan Efisien	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Disdukcapil***	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	100%	
	Pengadaan Mebel	***Disdukcapil***	Jumlah Pengadaan Mebel	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Disdukcapil***	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Disdukcapil***	**Meningkatya Kinerja Pelayanan Publik**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Disdukcapil***	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Disdukcapil***	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Disdukcapil***	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	***Disdukcapil***	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum kantor	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Disdukcapil***	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Disdukcapil***	Tersedianya Jasa Pemeliharaa n Kendaraan Dinas Operasional	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Disdukcapil***	Jumlah Pemeliharaa n Peralatan Kantor	100%	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Disdukcapil***	**Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**		

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Tersedianya Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100%	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	Persentase Penyelesaian Masalah Kependudukan	100%	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	Terbentuknya Kampung GISA	100%	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	***Disdukcapil***	**Persentase Mutu Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil**		
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	***Disdukcapil***	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diadakan	100%	
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil**		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	***Disdukcapil***	**Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan**		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	***Disdukcapil***	Persentase Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	100%	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**		
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Persentase Updating Sistem dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	100%	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningkanya Tertib Administrasi Kependudukan**		
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningkatnya SDM Tenaga pengelola SIAK**		

	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	***Disdukcapil***	Jumlah Aparatur yang Mengikuti BIMTEK	100%	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Disdukcapil***	**Meninkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntanbel**		
	Penyusunan Profil Kependudukan	***Disdukcapil***	**Meningatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**		
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	***Disdukcapil***	Jumlah Data Kependudukan yang Tersedia	100%	

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakkan Nasional

1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan standar pelayanan minimal (SPM).
2. Meningkatakan tertib administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola SIAK dan kelembagaannya.
4. Memperkuat jaringan SIAK dengan pembangunan, pengoprasian dan pemeliharaan secara terpadu.
5. Pengintegrasian program Kependudukan Nasional disesuaikan dengan kondisi daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah (2021-2026). Arah pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Dinas dan Mengembangkan Satu Perangkat Dinas Satu Inovasi . Adapun untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Morowali Utara, sehingga dari prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas ependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
2. Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Bupati Morowali Utara yang tertuang dalam RPJMD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara berusaha meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui 5 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Rp. 3,557,066,548
   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Rp. 19,803,000
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah : Rp. 303,761,959
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Rp. 62,496,022
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 476,552,800
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 173,740,000
2. Program Pendaftaran Penduduk
   a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Rp. 67,481,080
   b. Penataan Pendaftaran Penduduk : Rp. 1,148,722,250
3. Program Pencatatan Sipil
   a. Pelayanan Pencatatan Sipil : Rp. 78,978,710
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Rp. 30,027,000
   b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Rp. 21,747,500
   c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Rp. 8,510,000
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
   a. Penyusunan Profil Kependudukan : Rp. 23,933,500

TABEL TC-33

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU DI TAHUN 2025

PROVINSI SULAWESI TENGAH/KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Disdukcapil***		**Rp 4.593.420.329**	**DAU**			**Rp3.972.569.756**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	***Disdukcapil***	**100%**	**Rp 3.557.066.548**	**DAU**		**100%**	**Rp2.951.096.382**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	***Disdukcapil***	100%	Rp 3.557.066.548	**DAU**		100%	Rp2.951.096.382
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan Sumberdaya Aparatur**	***Disdukcapil***	**100%**	**Rp 19.803.000**	**DAU**		**100%**	**Rp24.867.652**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang diadakan	***Disdukcapil***	100%	Rp 19.803.000	**DAU**		100%	Rp24.867.652
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien**	***Disdukcapil***	**100%**	**Rp 303.761.959**	**DAU**		**100%**	**Rp139.973.006**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	***Disdukcapil***	100%	Rp 125.277.959	**DAU**		100%	Rp66.132.347

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	***Disdukcapil***	100%	Rp 21.350.000	**DAU**		100%	Rp26.125.425
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi secara Efektif dan Efisien	***Disdukcapil***	100%	Rp 157.134.000	**DAU**		100%	Rp47.715.234
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	***Disdukcapil***	**100%**	**Rp 62.496.022**	**DAU**		**100%**	**Rp89.878.133**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	***Disdukcapil***	100%		**DAU**		100%	Rp0
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	***Disdukcapil***	100%	Rp 9.056.250	**DAU**		100%	Rp14.256.788
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	***Disdukcapil***	100%	Rp 53.439.772	**DAU**		100%	Rp75.621.345
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatya Kinerja Pelayanan Publik**	***Disdukcapil***	**100%**	**Rp 476.552.800**	**DAU**		**100%**	**Rp650.756.814**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	***Disdukcapil***	100%	Rp 2.500.000	**DAU**		100%	Rp4.760.000
				Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	***Disdukcapil***	100%	Rp 47.872.800	**DAU**		100%	Rp49.798.076
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	***Disdukcapil***	100%	Rp 25.420.000	**DAU**		100%	Rp33.099.788
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum kantor	***Disdukcapil***	100%	Rp 400.760.000	**DAU**		100%	Rp563.098.950
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	***Disdukcapil***	**100%**	**Rp 173.740.000**	**DAU**		**100%**	**Rp115.997.769**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional**	***Disdukcapil***	100%	Rp 127.500.000	**DAU**		100%	Rp84.121.208
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor**	***Disdukcapil***	100%	Rp 46.240.000	**DAU**		100%	Rp31.876.561
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	***Disdukcapil***		**Rp 1.216.203.330**	**DAU**			**Rp2.022.917.087**
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***		**Rp 67.481.080**	**DAU**			**Rp128.050.241**

				Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	***Disdukcapil***	100%	Rp 18.969.980	**DAU**		100%	Rp27.875.276
				Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Masalah Kependudukan	***Disdukcapil***	100%	Rp 13.160.700	**DAU**		100%	Rp22.745.167
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terbentuknya Kampung GISA	***Disdukcapil***	100%	Rp 35.350.400	**DAU**		100%	Rp77.429.798
				Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Mutu Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil**	***Disdukcapil***		**Rp 1.148.722.250**	**DAU**			**Rp1.894.866.846**
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diadakan	***Disdukcapil***	100%	Rp 1.148.722.250	**DAU**		100%	Rp1.894.866.846
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil**	***Disdukcapil***		**Rp 78.978.710**	**DAU**			**Rp73.460.154**
				Pelayanan Pencatatan Sipil	**Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***		**Rp 78.978.710**	**DAU**			**Rp73.460.154**
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil	***Disdukcapil***	100%	Rp 78.978.710	**DAU**		100%	Rp73.460.154
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***		**Rp 60.284.500**	**DAU**			**Rp94.150.442**
				Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***		**Rp 30.027.000**	**DAU**			**Rp34.100.153**
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Updating Sistem dan Pemeliharaan Perangkat SIAK	***Disdukcapil***	100%	Rp 30.027.000	**DAU**		100%	Rp34.100.153
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Meningkanya Tertib Administrasi Kependudukan**	***Disdukcapil***		**Rp 21.747.500**	**DAU**			**Rp49.005.121**

				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	***Disdukcapil***	100%	Rp 21.747.500	**DAU**		100%	Rp49.005.121
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Meningkatnya SDM Tenaga pengelola SIAK**	***Disdukcapil***		**Rp 8.510.000**	**DAU**			**Rp11.045.168**
				Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti BIMTEK	***Disdukcapil***	100%	Rp 8.510.000	**DAU**		100%	Rp11.045.168
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Meninkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntanbel**	***Disdukcapil***		**Rp 23.933.500**	**DAU**			**Rp48.635.745**
				Penyusunan Profil Kependudukan	**Meningatnya Pemanfaatan Data Kependudukan**	***Disdukcapil***		**Rp 23.933.500**	**DAU**			**Rp48.635.745**
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Data Kependudukan yang Tersedia	***Disdukcapil***	100%	Rp 23.933.500	**DAU**		100%	Rp48.635.745

Kolonodale, 9 Maret 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Drs. BENDHART TANDI TIALEN
NIP: 19671007 199312 1 003

BAB IV

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif Tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya Anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang di tetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan kebijakan umum APBD, Prioritas dan plafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat di rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

Adapun telah tersusunnya Ranwa Renja tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, maka dengan ini kita ketahui bersama bahwa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dokumen yang sangat penting karna digunakan dalam kepengurusan dokumen lain seperti Rekening Bank, BPJS, SIM dan Pasport.

Data kependudukan Kementrian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk segala keperluan (Alokasi anggaran termasuk juga dengan penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal). Maka sangat perlu adanya penyajian data online agar data kependudukan selalu up to date, sehingga bagi setiap elemen yang membutuhkan data kependudukan dengan secepatnya mendapatkan data yang valid.

Kolonodale, 9 Maret 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
MOROWALI UTARA

Drs. BENDHART TANDI TIALEN
NIP: 19671007 199312 1 003

DOKUMEN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



ALAMAT KANTOR:
JL POROS GANDA-GANDA KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH
Jl. Poros Ganda-Ganda, email: dinkesmorut@gmail.com Kolonodale, 94671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Nomor : 440/ 894 /SK/DINKES/VIII/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesui jadwal yang ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Perencanaan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun RENJA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun RENJA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan;
b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanan kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024;
c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024;
e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024;
f. Merumuskan kegiatan prioritas Renja tahun 2024;
g. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan rencana kerja bidangnya masing-masing pada Dinas Kesehatan;
h. Melaksanakan penyempurnaan Renja Dinas Kesehatan atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Kesehatan
i. Menyesuaikan dokumen Rancangan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 sesuai dokumen RKPD tahun 2024 yang telah ditetapkan; dan
j. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 02 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

AGNO BERNIAT, SKM.,M.Kes
NIP. 19671115 199103 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
Nomor : 440/ 684 /SK/DINKES/VIII/2023
Tanggal : 03 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Alno Berniat, SKM.,M.Kes	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan
2	Yoknasari Lande, SKM	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	Rolex Rimson Malta, SKM	Sekretaris	Tim Perencana Kesehatan
4	Titin Rositawati, SKM.,M.Kes	Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
5	I Ketut Suamba, SKM	Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6	Arif Paskal Pokonda, SST	Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
7	Hj. Nur Hikmawati L, S.Si.Ri	Koordinator	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
8	Siti Rahmi Dg Siame, SKM	Anggota	Tim Perencana Kesehatan
9	Andika Angraini Umar, S.Farm.,M.Kes	Anggota	Tim Perencana Kesehatan
10	Nurhidayah Kurnia Rahim, SKM	Anggota	Tim Perencana Kesehatan
11	Minarsih Makmur, SKM	Anggota	Tim Perencana Kesehatan
12	Yeni Kristina Wengku, SKM	Anggota	Ketua Tim Kerja Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
13	Asrinah Songko, SKM	Anggota	Ketua Tim Kerja Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
14	Kia Toding Lintin, S.Tr.Keb	Anggota	Ketua Tim Kerja Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
15	Ni Luh Rainamiasih, S.Kep	Anggota	Ketua Tim Kerja Upaya Penyehatan Lingkungan
16	Atma K. Rongalliwa, SKM	Anggota	Ketua Tim Kerja Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
17	Elamiaty Simbangu, SST	Anggota	Ketua Tim Kerja Imunisasi
18	Citramawati Taangga, SKM	Anggota	Ketua Tim Kerja Penanggulangan Penyakit Menular Langsung
19	Vindus K Gabela, AMKL	Anggota	Ketua Tim Kerja Penanggulangan Penyakit Menular Bersumber Serangga dan Binatang
20	Sulistianingsih, SKM.,M.Kes	Anggota	Ketua Tim Kerja Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
21	Rismawaty, SKM	Anggota	Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer, Akreditasi dan Rujukan
22	Besse Emmisailan, SKM.,M.Kes	Anggota	Ketua Tim Kerja Pelayanan Pengobatan Tradisional
23	Fera Herawati.A, Amd.Keb	Anggota	Ketua Tim Kerja Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
24	Yandry Randabunga, S.Si	Anggota	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kefarmasian dan Gudang Obat
25	Isi Noviani Zainuddin, SKM.,MAP	Anggota	Ketua Tim Kerja SDMK
26	Yoberson Ambodale, SKM	Anggota	Ketua Tim Kerja Pelayanan Administrasi Perizinan
27	Nilawaty, SKM	Anggota	Ketua Tim Kerja Penanganan Terpadu Krisis Kesehatan
28	Hana Geyumbo, S.Kep	Anggota	Koordinator PSC 119
29	Muru Angriani Taro, SKM	Anggota	Operator SIPD

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ALMO INDRIYAT, SKM.,M.Kes
NIP. 19671115 199103 1 014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 telah selesai disusun dan ditetapkan. Renja Dinas Kesehatan merupakan suatu metode perencanaan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, agar dapat menentukan prioritas pembanguan kesehatan.

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), salah satu dari pelaku pembangunan kesehatan adalah Kementerian Kesehatan ditingkat pusat, sedang di daerah Dinas Kesehatan yang berperan sebagai penanggung jawab, penggerak pembina dan pelaksanaan pembangunan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 diharapkan dapat dipergunakan oleh semua pihak yang terkait dalam pembangunan di Kabupaten Morowali Utara agar dapat memberikan perhatian penuh dalam pembangunan kesehatan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kesehatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Amin.

Morowali Utara, 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH

ALNO BERNIAT, SKM.,M.Kes
NIP.19671115 199103 1 014

-

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……..…….……...…… 1

1.2 Landasan Hukum ……..…… 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……..…… 7

1.4 Sistematika Penulisan ……..……. 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah…….. 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ……. 30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah……... 38

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…….. 43

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……... 50

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……... 52

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah……... 53

3.3 Program dan Kegiatan…….. 55

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan 129

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 132

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian …… 156

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ……. 157

5.3 Rencana Tindak Lanjut .....……. 157

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	12
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara ……..……..	33
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara	44
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara …….....	51
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan …….....	54
Tabel 3.2	Perumusan Standar Pelayanan Minimal …….....	55
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Morowali Utara……...…….....	57
Tabel 4.1	Daftar Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.....	129
Tabel 4.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2024.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara mempunyai kewajiban menyusun Renja Bidang Kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja Dinas Kesehatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya. Renja Dinas Kesehatan mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Dinas Kesehatan adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kesehatan, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Proses penyusunan renja adalah sebagai berikut :

1. Persiapan
    a. Pembentukan Tim Penyusun Renja.

b. Orientasi mengenai renja perangkat daerah.
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja.
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah).

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal renja dinas kesehatan berpedoman pada :

a. Renstra Perangkat Daerah
b. Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
c. Hasil Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan

3. Penyusunan Rancangan Rencana Perangkat Daerah

Proses penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Penyusunan rancangan rencana perangkat daerah, penyesuaian isi Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Penyempurnaan rancangan awal Renja PD mencakup :

No.	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah		Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
1	Rencana Program	Acuan	Perumusan Rencana Program
2	Kegiatan		Kegiatan
3	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja
4	Pendanaan Indikatif		Pendanaan Indikatif
5	Lokasi Kegiatan		Lokasi Kegiatan
6	Kelompok Sasaran		Kelompok Sasaran

Memperoleh masukan untuk penajaman target kinerja, target sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Dalam rangka penajaman materi rancangan renja perangkat daerah (target kinerja, sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran) dan usulan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA dalam forum ini.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Merupakan proses penyempurnaan rancangan kerja perangkat daerah menjadi akhir renja. Perumusan rancangan akhir ini sesuai dengan dokumen rancangan awal dan mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Merupakan proses verifikasi rancangan akhir renja perangkat daerah yang meliputi tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Rancangan akhir yang telah terverifikasi (Penetapan Renja Perangkat Daerah) dimana BAPPEDA menyerahkan dokumen rancangan akhir Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah sejak ditetapkan menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Didalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024, memuat program, kegiatan, tujuan, kelompok sasaran dan pagu indikatif, dan usulan-usulan masyarakat melalui hasil Musrenbang dan pokok pikiran dewan, sehingga terlihat benang merah pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan dan RKPD Tahun 2024 dengan langkah- langkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara disamping sebagai dokumen perencanaan juga merupakan dokumen awal dalam tahapan penyusunan anggaran pembangunan. Dengan kata lain Renja Perangkat Daerah adalah tahapan permulaan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Disamping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Sebagai suatu instansi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dengan berpijak pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai Visi sesuai Renstra yaitu " Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera".

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara No. 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomar 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 799);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.515-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 050-5889 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Kesehatan tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 879);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3, Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara; (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan di bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

b. Tujuan

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ke dalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2024 dan prakiraan tahun 2025.
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.
4. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 di lingkup Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud danTujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Tahun 2022 pagu yang tersedia untuk membiayai seluruh kegiatan pada Dinas Kesehatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Kabupaten Morowali Utara sebesar 153.352.716.586,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.367.903.807,00 dengan persentase 78,5% dan sisa keuangan Rp. 32.984.812.779,00 (21,5%).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang mencapai keberhasilan baik fisik maupun keuangan maka dari itu akan dirincikan sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
   a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
   b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   d. Penyediaan peralatan dan bahan logistic kantor;
   e. Penyediaan peralatan Rumah Tangga;
   f. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
   g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   h. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   j. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   k. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
   l. Pengadaan prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   m. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan;
   n. Pemeliharaan Kesehatan dan Mesin Lainnya;

o. Pengadaan Obat dan Vaksin;
p. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
q. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota;
r. Operasional Pelayanan Rumah Sakit;
s. Operasional Pelayanan Puskesmas;
t. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
u. Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya; dan
v. Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
   a. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   c. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan ;
   d. Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Lainnya;
   e. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; dan
   f. Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**.
   Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara di tahun 2022.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**
   a. Masih lemahnya dukungan anggaran dan disertai adanya rasionalisasi anggaran pada setiap tahunnya.
   b. Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah,
   c. Meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.**
   Target capaian kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra

menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab**
   a. Mengoptimalkan anggaran dalam perencanaan sehingga menciptakan kegiatan yang lebih efektif.
   b. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan melihat pada skala prioritas masalah kesehatan.
   c. Melakukan perencanaan dalam menyusun anggaran yang efektif, efesien dan tepat sasaran.

Salah faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut yaitu adanya pengurangan atau rasionalisasi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPD sebelumnya. Dengan adanya rasionalisasi target yang semula tercantum tinggi tidak diturunkan seiring dengan adanya pengurangan anggaran dan ini menyebabkan capaian realisasi pada sebagian kegiatan tidak bisa mencapai target. Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel T-C29 di bawah ini.

Tabel T. C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2023

Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan **Lembar: 1**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Dinkes Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program/Kegiatan (Renja) Dinkes Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinkes Tahun 2022	Realisasi Renja Dinkes Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									

1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)*** ***Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara efektif dan Efisien (UPT Puskesmas Mayumba)(%)***								
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya proses perencanaan dan evaluasi yang berkualitas(%)*		0					0	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)* *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)*		0					0	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan pelayananadministrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien (UPT PUSKESMAS BETELEME)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (PUSKESMAS BATURUBE) (%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (PUSKESMAS WONGKO NDAYA) (%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Dinas Kesehatan)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Lee)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Tambayoli) (%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Pandauke)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Potowe Indo) %)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara efektif dan efisien (UPT Puskesmas Panca Makmur)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien (UPT PUSKESMAS KOLONODALE)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif dan efisien (UPT. Puskesmas Petumbea)*								

		(%) *Peningkatan Pelayanan Administrasi umum perangkat Daerah Secara efektif dan efisien (UPT.Puskesmas Anutoluwu) (%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (UPT.Puskesmas Molino)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan efisien (UPT PUSKESMAS TOMATA) (%)* *Peningkatan pelayananadministrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien (UPT Puskesmas Mayumba) (%)*								
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Potowe Indo) (Paket)* *Peralatan dan Perelngkapan Kantor (UPT Puskesmas Mayumba)(Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan(Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor PUSKESMAS BATURUBE (Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Pandauke) (Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor Puskesmas Tambayoli(Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor PUSKESMAS WONGKO NDAYA(Paket)* *Peralatan Dan Perlengkapan Kantor UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)* *Peralatan dan perlengkapan kantor UPT PUSKESMAS BETELEME (Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT.Puskesmas Molino (Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. Puskesmas Petumbea (Paket)* *Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Puskesmas Tomata (Paket)*		0					5.655.000	

1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)* *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Puskesmas Potowe Indo (Paket)* *Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan(Paket)* *Peralatan Rumah Tangga PUSKESMAS BATURUBE(Paket)* *Peralatan Rumah Tangga (Puskesmas Lee)(Paket)* *Peralatan Rumah Tangga (Puskesmas Pandauke)(Paket)* *Peralatan Rumah Tangga UPT.Puskesmas Molino(Paket)*		0					64.760.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)* *Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT Puskesmas Mayumba(Laporan)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD (Puskesmas Lee)(Laporan)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD (UPT Puskesmas Panca Makmur) (Laporan)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas KesehatanLaporan)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Puskesmas Potowe Indo(Laporan)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Puskesmas Tambayoli(Paket)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT.Puskesmas Anutoluwu(Paket)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT. Puskesmas Petumbea (Laporan)* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT Puskesmas Tomata(Paket)* *Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PUSKESMAS WONGKO NDAYA(Laporan)*		260.348.925					426.250.873	

1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan(%)*								
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)* *Penyediaan Mebel Dinas Kesehatan(Paket)*		0					31.400.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT. Puskesmas Petumbea)(%)* *Meningkatnya Pelayanan Publik (Puskesmas Pandauke)(%)* *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPT Puskesmas Mayumba)(%)* *Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT Puskesmas Panca Makmur)(%)* *Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Dinas Kesehatan)(%)* *Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Dinas Kesehatan)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif da efisien(UPT PUSKESMAS BETELEME)(%)* *Meninkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT Puskesmas Kolonodale)(%)* *Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT.Puskesmas Anutoluwu)(%)* *Peningkatan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (UPT.Puskesmas Molino)(%)* *Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT Puskesmas Tomata)(%)* *Meningkatnya kinerja pelayanan publik (PUSKESMAS BATURUBE)(%)* *Meningkatnya kinerja pelayanan publik (Puskesmas Lee)(%)* *Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Puskesmas Tambayoli)(%)*								
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)* *Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan) (Laporan)* *Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PUSKESMAS WONGKO NDAYA(Laporan)* *Penyediaan Jasa Peralatan dan Penglengkapan Kantor UPT.Puskesmas Anutoluwu(Paket)* *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*		0					0	

		PUSKESMAS BATURUBE(Laporan) *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Lee)(Laporan)* *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Potowe Indo)(Laporan)* *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Puskesmas Kolonodale)(Paket)* *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor(UPT Puskesmas Mayumba)(Laporan)* *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Puskesmas Petumbea)(Laporan)* *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Puskesmas Tambayoli (Paket)*								
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)* *Jasa Pelayanan Umum Kantor PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)* *Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT.Puskesmas Molino(Laporan)* *Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan (UPT PUSKESMAS KOLONODALE) (Paket)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan) (Laporan)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PUSKESMAS BATURUBE(Laporan)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Puskesmas lee) (Laporan)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Puskesmas Pandauke)(Paket)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Puskesmas Potowe Indo)(Laporan)* *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PUSKESMAS BETELEME)(Laporan)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Puskesmas Mayumba)(Laporan)*		0					13.984.003.523	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Puskesmas Panca Makmur)(Laporan) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Puskesmas Petumbea)(Laporan)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Puskesmas Tambayoli(Paket)* *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kntor Yang Disediakan UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)* *Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Puskesmas Tomata) (Laporan)*								
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (UPT Puskesmas Tomata)(%)* *Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efesien (PUSKESMAS BATURUBE)(%)* *Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Tambayoli)(%)* *Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien (Puskesmas Lee)(%)* *Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (UPT Puskesmas Mayumba)(%)* *Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (Dinas Kesehatan)(%)*								
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)* *Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PUSKESMAS BATURUBE(Unit)* *Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Unit)* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT*		0					178.626.881	

		Puskesmas Tomata)(Unit) *Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Puskesmas Lee) (Unit)* *Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan (Unit)* *Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (UPT PKM Panca Makmur)(Unit)* *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT Puskesmas Mayumba)(Unit)*								
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)* *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Dinas Kesehatan)(Unit)* *Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT Puskesmas Tomata(Unit)*		0					14.577.300	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)* *Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Puskesmas Lee)(Unit)* *Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Puskesmas Tambayoli(Unit)* *Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Puskesmas Mayumba)(Unit)* *Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Puskesmas Tomata)(Unit)* *Pemeliharaan Gedung (Puskesmas Pandauke)(Unit)* *Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan(Unit)* *Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan(Unit)*		0					0	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan (Dinas Kesehatan)(%)*** ***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Tomata)***								

		(%) ***Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Mayumba)(%)***								
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)(%)*								
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun(Unit)* *Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya(Unit)*		0					20.500.448.788	
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun(Unit)* *Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan(Unit)*		0					1.051.954.707	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas(Unit)* *Rehabilitasi Puskesmas(Unit)*		0					0	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya(Unit)* *Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)*		0					0	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)* *Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan(Unit)*		0					0	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan(Unit)* *Pengadaan Prasarana dan Pendukung(Jenis)*		0					4.286.668.122	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan(Unit)* *Pengadaan Alat Kesehatan(Paket)*	100%	0	100%	60%	6	100%	3.933.145.346	60%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	*Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)* *Pengadaan Obat dan Vaksin(Paket)*	100%	7.390.422.177	100%	50%	50%	100%	4.241.747.067	50%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	*Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan(Paket)* *Peyediaan Bahan Habis Pakai Medis(Paket)*	100%	0	100%	70%	7	100%	633.049.552	70%

1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan(Unit)*		0					24.080.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)*		0					0	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar(Unit)* *Kalibrasi Alat Kesehatan(Unit)*	100%	0	100%	21,43%	2	100%	108.668.470	100%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Potowe Indo) (%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Mayumba)(%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Panca Makmur)(%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)(%)* *Cakupan Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Petumbea) (%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT.Puskesmas Anutoluwu)(%)* *Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (UPT PUSKESMAS BETELEME)(%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Tomata) (%)* *Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (UPT PUSKESMAS KOLONODALE)(%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS BATURUBE)(%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Lee)(%)* *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Tambayoli) (%)*								
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)* *Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Orang)*	100%	62%	100%	62%	6	100%	0	62%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)*	100%	70%	100%	70%	7	100%	429.700.000	70%

		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Orang)								
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)* *Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir(Orang)*	100%	95%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)* *Pelayanan kesehatan Balita (Orang)*	100%	75%	100%	75%	75%	100%	75%	75%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)* *Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar(Orang)*	100%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)* *Pelayanan Penduduk Usia Produktif(Orang)*	100%	12,53%	100%	12,53%	12,53%	100%	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)* *Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk Usia Lanjut (Orang)*	100%	63%	100%	100%	100%	100%	19.700.000	63%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)* *Pelayanan Penderita Hipertensi (Orang)*	100%	12,53%	50%	12,53%	25,06%	100%	20.665.500	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)* *Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus(Orang)*	100%	2,35%	50%	2,35%	4,7%	100%	13.720.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)* *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan ODGJ(Orang)*	100%	39,5%	80%	39,5%	49,37%	80%	15.427.200	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar(Orang)* *Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(Orang)*	100%	45%	2.123%	958	45%	100%	18.018.350	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai*	100%	44%	3417%	1501%	144%	100%	113.813.990	

		Standar(Orang) *Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita HIV(Orang)*								
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar(Dokumen)* *Pelayanan pada KLB(Dokumen)*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar(Dokumen)* *Pelayanan Kesehatan Pada Krisis Kesehatan(Dokumen)*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)* *Pelayanan Kesehatan Gizi (Dokumen)*	100%	83%	100%	83%		100%	273.824.650	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(Dokumen)* *Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(Dokumen)*	100%	40%	60%	40%		100%	33.866.050	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)* *Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)*	100%	75 %	80 %	75%		100%	48.994.150	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya(Dokumen)* *Kesehatan Tradisional(Dokumen)*	100%	21.4%	100%	21.4%	21.4%	100%	21.4%	21.4%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)* *Surveilans Kesehatan(Dokumen)*	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus(Dokumen)* *Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)*	100%	0	100%	100%	100%	100%	1.201.495.706	100%

1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)* *Operasional PSC(Dokumen)*		0					268.958.980	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)* *Jaminan Kesehatan Masyarakat (Orang)*	100%	99,58%	100%	99,58%	99,58%	100%	99,58%	99,58%
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)* *Pengiriman Spesimen Penyakit (Paket)*	100%	0%	6	0%	0%	6	0%	0%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat(Dokumen)* *Kabupaten/Kota Sehat(Dokumen)*		0					19.939.700	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan(Dokumen)* *Pemelitian Kesehatan(Dokumen)*	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit(Dokumen)* *Operasional RS Pratama (Dokumen)*		7.403.940					725.647.683	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas(Dokumen)* *Operasional Pelayananan Puskesmas (JKN Puskesmas Tambayoli)(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) PKM Mayumba(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) Puskesmas Lee(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas Pandauke) (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas Tambayoli) (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) PUSKESMAS WONGKO NDAYA(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK)UPT.Puskesmas Anutoluwu*	10.360.585.300						10.251.536.709	

		(Dokumen) *Operasional pelayanan puskesmas (BOK) UPT PUSKESMAS BETELEME(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) UPT PUSKESMAS KOLONODALE(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) UPT.Puskesmas Molino (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK UPT Puskesmas Panca Makmur(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) UPT. Puskesmas Petumbea (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK UPT Puskesmas Tomata) (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) Puskesmas Lee(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) Puskesmas potowe Indo (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)* *Operasional pelayanan puskesmas (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN UPT Puskesmas Mayumba) (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) UPT.Puskesmas Molino (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN UPT Puskesmas Panca Makmur)* *(Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) UPT Puskesmas Petumbea (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN UPT Puskesmas Tomata) (Dokumen)* *Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pandauke)(Dokumen)* *Opersional Pelayanan Puskesmas (JKN) UPT PUSKESMAS*								

		KOLONODALE(Dokumen) *Oprasional Pelayanan Puskesmas (BOK) Puskesmas Potowe Indo (Dokumen)*								
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)* *BOK Kabupaten(Dokumen)*		0					857.274.550	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit)* *Akreditasi Puskesmas(Puskesmas)*	100%	92,8%	100%	92,8%	92,8%	100%	92,8%	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)(%)*		0					0	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen)* *Pengelolaan data dan informasi Kesehatan(Dokumen)*		0					20.530.000	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	*Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan(Unit)* *Perangkat Sistem Informasi(Unit)*		0					20.530.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Fasilitas Kesehaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar(Unit)*								
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti PerizinannyaUnit)* *Pengawasan dan Tindak Lanjut Perizinan(Unit)*								
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)* *Peningkatan Mutu(Unit)*		0					32.717.700	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan (Dinas Kesehatan) (%)***								
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar (Dinas Kesehatan)(%)*	100%	99%	100%	99%	99%	100%	99%	99%
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan(Dokumen)*	100%	0	100%	99%	99%	100%	14.862.050	99%

		Pengawasan Izi Praktik Tenaga Kesehatan(Dokumen)								
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tersedianya SDMK yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan)(%)*	100%	98%	100%	98%	98%	100%	98%	98%
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan(Dokumen)* *Pembinaan dan Pengawasan SDMK(Dokumen)*	100%	0	100%	0	0	100%	14.456.600	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kapasitas SDMK (Dinas Kesehatan)%)*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya(Orang)* *Peningkatan Kompetensi SDMK (Orang)*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)***								
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Tersedianya apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan) (%)*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)(Sarana)* *Pengendalian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)Sarana)*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Tersedianya sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu perusahaan rumah tangga sesuai standar (Dinas Kesehatan)(%)*	100%	0	100%	0	0	100%	0	0

1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga(Dokumen)* *Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertent Perusahaan Rumah Tangga(Dokumen)*	100%	0	100%	0	0	100%	0	0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Tersedianya pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang memenuhi standar(%)*	100%	80%	100%	80%	80%	100%	80%	80%
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)* *Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi(%)*	100%	80%	100%	80%	80%	100%	80%	80%
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Tersedianya tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) yang sesuai standar(%)*	100%	70%	100%	70%	70%	100%	70%	70%
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)(Dokumen)* *Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)*	100%	70%	100%	70%	70%	100%	70%	70%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil	*Meningkatnya pengawasan makanan*	100%	70%	100%	70%	70%	100%	70%	

	Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*minuman industri rumah tangga yang beredar (Dinas Kesehatan)(%)*								70%
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan(Unit)* *Pengawasan dan Pemeriksaan Post Market(Sarana)*	100%	70%	100%	70%	70%	100%	70%	70%
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan)***								
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya promosi kesehatan(%)*	80%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(Dokumen)* *Promosi dan Advokasi(Dokumen)*	80%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gerakan hidup bersih dan sehat (%)*	80%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)* *Promosi PHBS(Dokumen)*	80%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%

Morowali Utara, 1 Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ALNO BERNIAT, SKM.,M.Kes
NIP.19671115 199103 1 014

2.2Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan kesehatan.

Dalam kerangka urusan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan Prioritas Daerah (IKK) dan Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya maupun pelayanan kesehatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat berdasarkan Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2022 Tahun (n-2)	Target 2023 Tahun (n-1)	Target 2024 Tahun (n)	Target 2025 Tahun (n+1)	2022 Tahun (n-2)	2023 Tahun (n-1)	Target 2024 Tahun (n)	Target 2025 Tahun (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**											
1	Persentase Ibu hamil Yang Mendapatkan Pelayanan K4	100%	100%	1	1	1	1	60%	6	1	10	
II	**Persentase pelayanan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar**											
1	Persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	70%	100%	100%	
2	Persentase Kunjungan Nifas	100%		100%	100%	100%	100%	79%	87 %	100 %	100 %	
III	**Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir sesuai standar**											
1	Persentase Kunjugan Neonatal (KN lengkap)	100%		1	1	1	1	87%	9	1	10	
2	Persentase bayi < 6 bulan yang mendaptkan ASI EKSLUSIF	100%		4	5	5	6	55,7%	6	5	60	
IV	**Persentase pelayanan kesehatan pada anak balita sesuai standar**											
1	Persentase kunjungan posyandu (D/S)	100%		70%	75%	80%	85%	68,49%	66,38%	80%	85%	
2	Persentase balita Stunting	14%		2	1	1	1	10,5%	12,9%	16%	14%	
3	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100%		9	9	1	1	95,8%	1	5		
4	Persentase balita mendapat kapsul Vit. A	100%		8	8	8	90%	94%	90%	8	90	
5	Persentase anak usia 18-24 bulan mendapat imunisasi tambahan	100%		8	9	9	100%	78,2%	51,3%	9	10	
6	Pelayanan balita menggunakan pendekatan MTBS	100%		7	7	1	100%	57%	57%	1	10	
V	**Persentase pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar**											
1	Jumlah sekolah yang mendapatkan penjaringan Kesehatan	100%		1	1	1	100%	75%	76%	1	10	
2	Persentase siswa medapatkan penjaringan Kesehatan	100%		1	1	1	100%	100%	100%	1	10	
3	Cakupan anak usia Sekolah Dasar mendapatkan pelayanan imunisasi tambahan (BIAS)	100%	100%	9	9	1	100%	90,3%	99,4%	1	10	
VI	**Persentase Pelayanan Keshatan pada Usia Produktif usia 15 – 59 tahun yang mendapat pelayanan skrining sesuai standar**											
1	Cakupan penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan deteksi dini PTM	100%		1	1	1	100%	7,50 %	12,53 %	7	78	
	Cakupan pemeriksaan IVA dan SADANIS pada wanita usia 30-50 tahun	100%		1	1	1	100 %	80 %		2	21	
VII	**Penduduk Usia > 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**											
1	Cakupan penduduk usia > 60 tahun mendapatkan pelayanan menimal 1 kali dalam setahun	100 %		1	1	1	100%	63%	79,39%	1	10	
VIII	**Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi**											
1	Cakupan penderita hipertensi usia > 15 mendapatkan pelayana kesehatn sesuai standar	100%		1	1	1	100%	3,60%	7,73%	2	29	
IX	**Persentase pelayanan kesehatan pada penderita DM sesuai standar**											
1	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus usia > 15	100%		1	1	1	100%	16,10%	2	1	19	

	tahun sesuai standar											
X	**Persentase pelayanan kesehatan pada ODGJ (ODGJ) berat sesuai standar**											
1	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan mendampingan tenaga kesehatan	100%	100%	1	0	1	100%	80%	3	3	37	
XI	**Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**											
1	Persentase orang terduga Tuberkulosis (TB) yang dilakukan pemeriksaan Penunjang	100%	100%	1	1	1	100%	2%	4	9	90	
2	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita TBC	100%		3	3	3	464	139	1	8	90	
3	Persentase Angka Keberhasilan pengobatan TB (*Succes Rate*)	100%		9	9	9	90%	85,61%	7	8	90	
XII	**Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**											
1	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%	8	8	8	90%	73%	4	8	90	
2	Cakupan orang dengan HIV-AIDS yang ditemukan memulai terapi ARV			8	8	9	90%	1,5%	2	5	7,	

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan (Di Luar SPM) Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anal
				Target 2022 Tahun (n-2)	Target 2023 Tahun (n-1)	Target 2024 Tahun (n)	Target 2025 Tahun (n+1)	2022 Tahun (n-2)	2023 Tahun (n-1)	Target 2024 Tahun (n)	Target 2025 Tahu (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Kematian Bayi AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	0%	0%	0	0	0	0%	15,3%	7	7	0	
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi			7	7	8	80%	69,71%	6	7	7	
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	0%	0%	0	0	0	0%	0%	2	0	0	
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	0	0	0	0	0	0	527	1	0	0	
5	Rasio Posyandu per Satuan Balita			70%	9	1	100%	47,67%	3	1	1	
6	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk			1	1/	1/100.000 pddk	1/50.000 penduduk	1/100.000 penduduk	1	1	1	
7	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	100%		1	1	1	100%	80%	8	1	1	
8	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	100%	100%	1	1	1	100%	80%	8	1	1	
9	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	1	1	1	100%	100%	1	1	1	
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD			8	8	9	95%	8,3 (11 Kasus Positif)	14,39 (Kasus Posistif)	9	9	
11	Persentase penderita diare ditangani sesui standar	Balita		1	1	1	100%	100%	9	1	1	
		≥ 5 Tahun		1	1	1	100%	100%	1	1	1	
12	Persentase penderita pneumoni balita ditangani sesuai standar			6	7	7	70%	5,06%	1			
13	Angka Kejadian Malaria			API≤ 1/1000 pddk	API≤ 1/1000 p	API≤ 1/1000 pddk	API≤1/1000 pddk	API 0.1 (9 kasus positif)	API 0,34 (43 Kasus Positif)	API≤ 1/1000 p	A Pddk	
14	Pencapaian Eliminasi malaria (Kecamatan)			10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	8 Kec.	8 Kec.	10 Kec.	10 Kec.	
15	Prevalensi Kusta							4 Kasus	3			
16	Cakupan orang dengan risiko tertular Hepatitis B dan C dilakukan deteksi dini (Ibu Hamil)			9	9	1	100%		5	1	1	
17	Persentase penerapan Kawasan Tanpa Rokok (7 kawasan)			8	8	8	85%	25%	2	3	5	
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin			1	1	1	100%	100%	1	1	1	
19	Cakupan Kunjungan Bayi	100%	100%		1	1	100%	89%	9	9	100%	
22	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin			1	1	1	100%	100%	1	1	1	
23	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Penanganan KLB < 24 Jam	Tertanganin ya KLB < 24 Jam	1	1	1	100%	Tidak terdeteksi krna adanya kasus covid	Tidak terdeteksi krna adanya kasus covid 0%	1	1	Asumsi berdasarkan je kasus

Berdasarkan Tabel T-C.30 di atas terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target program dan beberapa pula telah mencapai target program. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil, realisasi capaian program mengalami peningkatan dari 60% pada tahun 2021 menjadi 63% di tahun 2022, walau demikian capaian ini masih rendah jika dibanding dengan target program KIA yaitu 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mendapatkan *Ante Natal Care* (ANC) secara rutin di fasyankes, selain itu tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan ANC K1 murni sehingga menyebabkan K4 tidak bisa tercapai.

2. Persentase Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, realisasi tahun 2022 sebesar 70% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 66 %. Capaian ini masih rendah jika dilihat dari target program yaitu 100%. Hal disebabkan masih ada persalinan yang di tolong bukan oleh tenaga kesehatan terutama wilayah-wilayah pegunungan atau desa-desa terisolir akibat kesulitan akses jalan.
3. Persentase kunjungan nifas, realisasi tahun 2022 sebesar 87 % masih rendah dibanding target program yaitu 100 %. Hal ini disebabkan pada saat kunjungan nifas, ibu nifas tidak ada di tempat dengan alasan ibu telah pindah tempat dan tenaga kesehatan tidak maksimal melakukan kunjungan.
4. Persentase kunjungan posyandu, realisasi tahun 2022 sebesar 66,38% sedangkan target program adalah 80%. Rendahnya cakupan ini karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat posyandu dimana anak balita yang sudah mendapat imunisasi lengkap tidak lagi dibawa ke posyandu.
5. Persentase balita stunting, realisasi tahun 2022 sebesar 12,9 % sedangkan target program adalah 14%. Rendahnya cakupan ini dikarenakan masih kurangnya kunjungan ibu batita ke Posyandu untuk mendapatkan pemantauan pertumbuhan di Posyandu secara berkala, kurangnya pengetahuan ibu tentang pola asuh dan pola makan yang baik serta sanitasi yang masih kurang.
6. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), realisasi tahun 2022 hanya sebesar 102 %. Capaian ini telah melebihi target program 100% hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang sudah menyadari pentingnya Imunisasi dasar Lengkap bagi balita.
7. Persentase balita mendapat kapsul Vit. A, realisasi tahun 2022 yaitu 90 %. Capaian ini sudah mencapai target program yaitu 100%, karena masyarakat sudah memiliki pentingnya pemberian kapsul vitamin A kepada balita.
8. Persentase anak usia 18-24 bulan mendapat imunisasi tambahan, realisasi tahun 2022 hanya 51,3 %, menurun di banding tahun 2021 yaitu 66,6 %. Capaian program imunisasi ini masih rendah karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu. Sebagain besar masyarakat marasa cukup setelah anak mendapatkan imunisasi campak di usia 9 bulan. Walaupun upaya komunikasi, informasi dan edukasi sering dilakukan, namun partisipasi orang tua terhadap imunisasi tambahan bagi anak badutanya belum juga tercapai.
9. Persentase siswa mendapatkan penjaringan kesehatan, realisasi 76% di tahun 2022, target program adalah 100%. Walaupun sebahagain besar sekolah telah dilakukan penjaringan kesehatan namun tidak semua siswa terjaring pemeriksaan kesehatan, hal ini disebabkan

karena beberapa areal sekolah yang sulit dijangkau, serta tidak didukung dengan sarana penunjang kegiatan skrining seperti UKS KIT.

10. Persentase penderita diare ditangani sesuai standar, realisasi 95%. Capaian ini telah memenuhi target 80% disebabkan logistik diare di beberapa fasyankes, seperti obat oralit, zink dan cairan infus telah tersedia secara optimal.
11. Persentase penderita pneumonia balita di tangani sesuai standar, realisasi 11,6% dari target 60% tahun 2022. Pelayanan standar bagi balita pneumoni adalah diberikan tatalaksana MTBS, namun masih banyak petugas yang belum terlatih manajemen MTBS sehingga masih ada kasus pneumoni yang ditangani tidak sesuai standar.
12. Angka Kejadian Malaria sesuai target eliminasi tahun 2022 adalah API kurang dari 1 per 1000 penduduk yang dipengaruhi oleh keaktifan pengelola dalam memberikan sosialisasi, pemriksaan dan melakukan pencatatan pelaporan yang baik.
13. Pencapaian Eliminasi Malaria dibuktikan dengan capaian angka kejadian malaria (API) kurang dari 1 per 1000 penduduk. Hal ini akan terealisasi di 10 kecamatan pada akhir tahun 2022, namun upaya untuk mempertahankan status eliminasi akan tetap dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan strategis lainnya.
14. Cakupan penduduk usia 15-59 tahun mendapat pelayanan deteksi dini PTM, realisasi program yaitu 12,53 % hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan skrining PTM (Penyakit Tidak Menular) baik di dalam maupun di luar gedung, selain itu minimnya bahan habis pakai untuk skrining PTM juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan skrining.
15. Cakupan penduduk usia >60 tahun mendapat pelayanan kesehatan, realisasi tahun 2022 sebesar 84,19% belum mencapai target 100% dikarenakan kurang anggaran untuk kegiatan posyandu lansia dan kurangnya bahan medis habis pakai dalam menunjang kegiatan program lansia serta tidak memenuhi parameter pemeriksaan lansia yang jika salah satunya tidak dilaksanakan maka pemeriksaan dianggap tidak standar dan pemeriksaan yang paling banyak dilakukan yaitu pemeriksaan gula.
16. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, realisasi tahun 2022 yaitu 7,73% hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat untuk melakukan kontrol tekanan darah dan minum obat bagi penderita hipertensi, minimnya tenaga terlatih program PTM, minimnya promosi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM di masyarakat, minimnya anggaran program PTM.
17. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM), realisasi tahun 2022 mencapai 2,35% hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan penderita DM untuk melakukan kontrol gula darah dan minum obat DM, minimnya tenaga terlatih program PTM,

minimnya promosi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM di masyarakat, minimnya anggaran program PTM.

18. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, tahun 2022 mencapai 39,5% dikarenakan kegiatan pendampingan bagi keluarga ODGJ kurang dilakukan selain itu kurangnya tenaga terlatih dalam kesehatan jiwa menjadi kendala dalam pencapaian indikator serta kurangnya obat-obatan dalam penanganan ODGJ di fasilitas kesehatan, dilain sisi kurangnya sarana prasarana perawatan pasien jiwa di fasilitas kesehatan.
19. Persentase orang terduga Tuberkulosis (TB) yang dilakukan pemeriksaan penunjang, realisasi tahun 2022 hanya 32%, sedangkan cakupan penemuan dan pengobatan penderita TBC sebesar 50%. Faktor yang mempengaruhi capaian ini, antara lain: rasa bosan dari pasien yang menjalani pengobatan 6-9 bulan sehingga putus berobat, Keterbatasan sarana prasarana (komputer dan jaringan) di fasyankes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan, sering pergantian pengelola program TB dan petugas laboratorium sedangkan petugas yang baru belum dilatih, masih tingginya stigma di masyarakat tentang penyakit TB. Perlu adanya kerjasama lintas sektor, lintas program dalam penanggulangan penyakit TBC.
20. Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate*), realisasi 85%, dari target program 100%. Kekurangan capaian ini karena ada beberapa penderita yang pindah tempat tinggal dan ada juga yang meninggal.
21. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, realisasi tahun 2022 adalah 44%. Rendahnya capaian ini dikarenakan pemeriksaan HIV hanya dilakukan pada ibu hamil saat ANC atau pada pasien yang mengalami infeksi oportunistik yang di rawat di rumah sakit. Data pemetaan populasi kunci (lelaki seks lelaki, transgeder/waria) tidak memadai, masih tingginya stigma terhadap ODHIV di masyarakat sehingga orang yang beresiko terinfeksi HIV takut untuk melakukan tes HIV. Data skiring HIV *underreported*, anggaran yang tidak memadai untuk mendukung pelaksaan program.
22. Prevalensi Kusta, realisasi tahun 2022 sebesar 0,25% (3 kasus), capaian ini belum memenuhi target eliminasi kusta disebabkan karena masih kurang aktifnya FKTP untuk melakukan pemantauan kasus-kasus kusta yang ada di masyarakat terutama di wilayah sulit dan terisolir.
23. Cakupan orang dengan risiko tertular Hepatitis B dan C dilakukan deteksi dini, realisasi tahun 2022 adalah 55,94%. Rendahnya realisasi ini karena cakupan deteksi dini hepatitis B dan C masih terbatas pada ibu hamil.

24. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan upaya penanggulangan <24 jam, realisasi 100%. Pencapaian ini karena aktifnya sistem kewaspadaan dini dan respon KLB (SKDR-KLB) di semua tingkat pelayanan kesehatan dasar, disamping aktifnya petugas surveilans dalam melaporkan setiap kejadian melaui aplikasi online.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka untuk mempermudah analisa terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, maka dilakukan analisa dengan metode SWOT (*SWOT analysis)* sebagai berikut:

No	Program/kegiatan	Analisis SWOT			
		Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman/Hambatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Adanya dukungan kebijakan program pelayanan Kesehatan ibu bersalin melalui SPM	Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (bidan & dokter)	SDM Kesehatan untuk desa masih ada yang belum terpenuhi
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Adanya dukungan kebijakan program pelayanan Kesehatan ibu bersalin melalui SPM	Masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh nakes dan tidak di fasyankes	Peningkatan fungsi rumah tunggu kelahiran	Budaya masyarakat yang bertentangan dengan program kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Standarisasi kunjungan neonatal dengan menggunakan form MTBS	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan bayi baru lahir	Peningkatan kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan	Budaya masyarakat yang bertentangan dengan program kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Anak usia pendidikan dasar	- Adanya dukungan kebijakan program pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar melalui SPM - Adanya petugas kesehatan (dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat, perawat gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di sekolah dasar	-Kurangnya dukungan dana dan SDM dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar - Pelayanan kesehatan pada anak sekolah dasar belum menyeluruh ke semua sekolah-sekolah dasar yang ada di Kabupaten (khususnya kesehatan gigi dan mulut	-Peningkatan kapasitas SDM dan tersedianya dana dalam pelayanan tersebut. - Pengangkatan tenaga dokter, dokter gigi dan perawat gigi	- Masih ada pencabutan gigi liar oleh tenaga yang bukan tenaga kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Penduduk usia produktif	Adanya dukungan kebijakan program pelayanan Kesehatan penduduk usia produktif melalui SPM	Kurangnya sosialisasi kepada penduduk usia produktif di fasilitas posbindu PTM maupun ke fasyankes	Dengan adanya pelayanan kesehatan penduduk usia produktif yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat	- Parsitipasi masyarakat kurang ke fasilitas pelayanan posbindu PTM dan puskesmas - minimnya bahan habis pakai untuk skrining PTM juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan skrining
6	Pelayanan Kesehatan Penduduk usia lanjut	Adanya dukungan kebijakan program pelayanan Kesehatan penduduk usia lanjut melalui SPM	Tingkat kesadaran lansia yang rendah tentang adanya program lansia	Adanya program indonesia sehat sehingga ada program pemerintah yang mendukung program lansia sehat yang	Budaya hidup sehat yang belum tertanam oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

				dilakukan oleh puskesmas	
7	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Adanya dukungan kebijakan program pelayanan hipertensi melalui SPM	Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengukuran tekanan darah dan pengobatan hipertensi	Tersedianya faskes yang memberikan pelayanan terpadu PTM seperti Posbindu PTM	Perubahan gaya hidup (*life style*) masyarakat yang tidak berorientasi pada kesehatan menyebabkan meningkatnya PTM termasuk penderita hipertensi
8	Pelayanan kesehatan penderita DM	Adanya dukungan kebijakan program pelayanan DM melalui SPM	Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan gula darah dan pengobatan DM	Tersedianya faskes yang memberikan pelayanan terpadu PTM seperti Posbindu PTM	Perubahan gaya hidup (*life style*) masyarakat yang tidak berorientasi pada kesehatan menyebabkan meningkatnya PTM termasuk penderita DM
10	Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Adanya dukungan kebijakan program pelayanan ODGJ berat melalui SPM	- Program kesehatan jiwa belum menjadi prioritas intervensi di semua level administrasi - Terbatasnya sarana dan prasarana perawatan pasien jiwa di Puskesmas	Tenaga kesehatan terlatih program kesehatan jiwa, dukungan lintas sektor untuk penanganan ODGJ berat	Laju pembangunan disemua sektor menimbulkan kompetisi antar masyarakat, hal ini dapat memicu tekanan kejiwaan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jiwa
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Sebagain besar petugas pengelola program TB baik di FKTP maupun di Dinas Kesehatan telah dibekali dengan ketrampilan manajemen program dan tatalaksana penderita TB	Masih sering terjadi pergantian atau mutasi petugas yang telah di latih menyebabkan program pengendalian TB sedikit terabaikan	Dukungan kebijakan program TB sebagai program prioritas nasional	Munculnya penyakit new emerging (seperti Covid-19) selama tahun 2020-2021 menyebabkan ketakutan masyarakat untuk mengunjungi faskes dan ketakutan petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular HIV	Adanya kebijakan untuk menyediakan logistik program pengendalian HIV untuk deteksi dini orang yang berisiko tertulah HIV-AIDS	Minimnya anggaran untuk pelaksanaan program pengendalian HIV	Adanya dukungan kebijakan program pengendalian HIV sebagai program prioritas nasional oleh pemerintah pusat sampai ke daerah	Budaya masyarakat yang bertentangan dengan program masyarakat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan

sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, berbagai permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu masih tinggi.
2. Masih dijumpainya kasus gizi buruk.
3. Peningkatan resiko Penyakit Menular dan Tidak Menular.
4. Peningkatan Kompetensi SDM.
5. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum terpenuhi.
6. Regionalisasi sistem rujukan kesehatan belum berjalan optimal.
7. Regulasi di bidang kesehatan tingkat kabupaten belum memadai.
8. Dukungan pembangunan kesehatan dari lintas sektor belum optimal.
9. Terbatasnya sarana dan prasarana perawatan pasien jiwa di puskesmas.
10. Belum meratanya pembangunan antar wilayah.
11. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan.
12. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tugas pokok dan fungsi utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dampak masalah dan hambatan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan pencapaian kinerja program nasional, seperti SPM dan SDGs adalah adanya adat istiadat yang masih kental dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat yang berakibat negatif terhadap upaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, walaupun Kabupaten Morowali Utara sudah mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* namun masih ada masyarakat yang enggan memanfaatkan jaminan kesehatan yang didapatnya tersebut, sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pegunungan dan pesisir dimana kondisi geografis relatif sulit dan status ekonomi yang relatif rendah serta jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan. Bila kita dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah kita susun bersama maka dengan sendirinya target-target yang terdapat dalam SPM dan SDGs akan dapat kita penuhi.

Tantangan pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Hingga saat ini, seluruh unsur yang terlibat dalam sektor kesehatan telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, namun masalah kesehatan tidak menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, banyak sektor lain yang diperlukan

keterlibatannya dalam ikut menjaga dan mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat, antara lain sektor pendidikan, agama, pertanian/ketahanan pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, transmigrasi dan pemukiman, kelautan, peternakan, pertambangan dan sektor lainnya.

Tantangan lainnya adalah perkembangan globalisasi yang menghilangkan batas antar wilayah dan antar negara. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan dunia yang sangat pesat, tidak dapat dihindari akan memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan menggeser sistem pelayanan kesehatan di negara kita yang belum sesuai dengan kondisi terkini. Dengan adanya globalisasi, seluruh tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal dan prima dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan tingginya tuntutan tersebut, sarana dan prasarana kesehatan di semua tingkatan pelayanan harus disediakan dan dilengkapi agar dapat mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat.

Di lain pihak, makin banyak pasien di puskesmas dan rumah sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan, artinya dari sisi kuratif dan rehabilitatif terjadi peningkatan demand sementara dari sisi preventif dan promotif masih jauh ketinggalan. Hal ini perlu perhatian serius, mengingat aspek preventif dan promotif merupakan strategi utama yang sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tuntutan terbesar terhadap keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Aspek promotif dan preventif ini harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan secara optimal dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat.

Peluang pengembangan pelayanan bagi sektor kesehatan ke depan sangat terbuka lebar, terlebih kesehatan merupakan program prioritas, dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata dengan baik. Sistem kesehatan di Indonesia didukung oleh pembiayaan pemerintah yang cukup besar. Pembiayaan pemerintah bersumber baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Anggaran pemerintah pusat disalurkan melalui berbagai saluran misalnya DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOK Provinsi, BOK Kabupaten/Kota dan BOK Puskesmas). Sementara anggaran pemerintah daerah dapat dalam berbagai bentuk untuk mendukung program pusat maupun untuk pembiayaan program inovasi daerah.

Dengan begitu banyaknya sumber-sumber pembiayaan sistem kesehatan di Indonesia, diharapkan dapat memberi daya ungkit terhadap layanan kesehatan. Aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan

terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan diberdayakan secara maksimal dengan sendirinya seluruh masyarakat akan terlayani dengan baik. Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini juga memberikan peluang terhadap peningkatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaturan tata ruang kewilayahan perlu dilakukan agar pembangunan berkelanjutan yang proporsional dengan memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan dapat terus dilakukan. Pengembangan wilayah dan penataan ruang dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan *(growth pole)*, mengurangi kesenjangan pembangunan, penetapan kawasan-kawasan strategis, serta perencanaan alih fungsi lahan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam aktivitas ekonomi daerah termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Ketimpangan tersebut terjadinya tentu saja karena adanya perbedaan kondisi geografis dan topografi antar kecamatan di Kabupaten Morowali Utara yang memiliki kondisi alam yang sulit. Selain itu, sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi kesenjangan tersebut berimplikasi pada kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah kecamatan yang dilalui jalur Trans-Sulawesi relatif lebih maju dan beberapa wilayah masih tertinggal yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara. Upaya-upaya pembangunan yang lebih difokuskan pada wilayah kecamatan tertinggal dan terbelakang menjadi suatu keharusan sehingga ketimpangan atau kesenjangan antara wilayah dapat dikurangi atau diatasi. Implikasi dari ketimpangan antar wilayah tersebut menyebabkan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah juga berbeda terutama terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, keseimbangan pembangunan antar wilayah dalam jangka menengah harus menjadi prioritas.

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi wilayah yang relatif besar dalam kekayaan sumber daya alam, khususnya pada sektor pertambangan. Namun demikian, tantangan 5 (lima) tahun ke depan atau akhir perode jangka menengah adalah menata dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih belum berjalan secara optimal.

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan

terutama karena aktifitas pertambangan dan masih berlangsung eksploitasi hutan, akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*). Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan perhatian khusus bagi upaya peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan antara lain melalui sosialiasi dan regulasi yang bermanfaat bagi upaya untuk mempertahakan kualitas lingkungan hidup. Untuk mengantisipasi isu lingkungan kaitan dengan perubahan iklim, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.

Secara geografis dan topografis, Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam daerah yang rawan terhadap bencana alam. Kondisi iklim yang basah dengan kemiringan lereng terjal serta sungai berpotensi besar rawan bencana. Pemerintah daerah dalam jangka panjang maupun menengah dan jangka pendek harus melakukan langkah-langkah nyata sebagai upaya untuk antisipasi dan mitigasi terhadap bencana. Peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, agar bencana tersebut tidak menyebabkan kerugian harta benda dan jiwa yang lebih besar.

Dari analisis pembangunan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi adalah:

1. Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
2. Percepatan Penurunan Stunting.
3. Penurunan Prevalensi Wasting.
4. Penurunan Balita Gizi Buruk.
5. Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi.
6. Eliminasi TB.
7. Eliminasi Malaria.
8. Insiden HIV.
9. Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain :

1. Sumber Daya Kesehatan mengalami peningkatan dalam pengadaan dan distribusi namun rendah dalam produktivitas.

2. Jumlah tenaga kesehatan masih ada yang terkosentrasi pada satu Puskesmas tertentu.
3. Mutasi petugas kesehatan terutama pelaksana program di fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih tinggi dan tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru.
4. Akses masyarakat terhadap penerapan PHBS masih rendah.
5. Belum maksimalnya komitmen lintas sektor, kemitraan serta pemberdayaan masyarakat dalam dukungan program kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi :

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya kemitraan dengan lintas sektor terkait yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara berupa rancangan awal RKPD. Dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA 2021-2026) maupun Renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 mempedomai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun hasil review program dan kegiatan tahun 2024 tercantum pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara **Lembar: 1 dari 6**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	NON URUSAN					**NON URUSAN**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**			**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes Puskesmas	Jumlah rekening yang dibayar	100	215.263.659	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Dinkes Puskesmas	Jumlah rekening yang dibayar	100	215.263.659	
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	890.407.250	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	890.407.250	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes Puskesmas	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	100	460.117.709	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinkes Puskesmas	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	100	460.117.709	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	74.115.524	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah komponen istalasi istrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	74.115.524	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Dinkes Puskesmas	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	100	894.654.087	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Dinkes Puskesmas	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	100	894.654.087	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	100	850.938.126	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	100	850.938.126	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinkes Puskesmas	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	100	376.424.964	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinkes Puskesmas	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	100	376.424.964	
	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Tersedianya proses perencanaan dan evaluasi yang berkualitas	100	248,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Tersedianya proses perencanaan dan evaluasi yang berkualitas	100	248,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	98,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	98,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	150,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	150,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu	100	48,445,485,660	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu	100	48,445,485,660	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	100	48,445,485,660	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	48,445,485,660	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Peningkatan pelayananadministrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	100	2,718,834,293	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Peningkatan pelayananadministrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	100	2,718,834,293	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1,167,958,517	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1,167,958,517	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	122,988,456	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	122,988,456	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan	100	747,812,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan	100	747,812,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	550,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	550,000,000	
	Pengadaan Mebel	Dinkes Puskesmas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	197,812,000	Pengadaan Mebel	Dinkes Puskesmas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	197,812,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT. Puskesmas Petumbea)	100	19,627,035,337	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT. Puskesmas Petumbea)	100	19,627,035,337	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	18,521,364,428	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	18,521,364,428	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes Puskesmas	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (UPT Puskesmas Tomata)	100	1,289,403,068	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes Puskesmas	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (UPT Puskesmas Tomata)	100	1,289,403,068	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	62,040,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	62,040,000	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan (Dinas Kesehatan)**								
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	100	24,489,675,167	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan	100	24,489,675,167	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	100	1,250,000,000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	100	1,250,000,000	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	100	1,600,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	100	1,600,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	100	4,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	100	4,000,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	400,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	400,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	100	1,200,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	100	1,200,000,000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	3,000,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	3,000,000,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	5,217,928,231	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	5,217,928,231	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes Puskesmas	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100	5,585,956,508	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes Puskesmas	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100	5,585,956,508	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes Puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	100	1,982,662,428	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes Puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	100	1,982,662,428	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	100		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	100	4,600.,000,000	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	100		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	100	750,000,000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	255,128,000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100	255,128,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Potowe Indo)	100	57,343,327,224	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Potowe Indo)	100	57,343,327,224	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,945,850	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,945,850	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	99,999,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes Puskesmas	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	99,999,800	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	65,936,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes Puskesmas	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	65,936,400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes Puskesmas	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100,074,550	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes Puskesmas	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100,074,550	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	99,969,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	99,969,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,989,700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,989,700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,999,750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,999,750	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,999,108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	104,999,108	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	52,498,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	52,498,800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	104,999,500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	104,999,500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	104,990,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	104,990,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	104,998,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	104,998,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100	104,859,900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100	104,859,900	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	183,426,550	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	183,426,550	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	105,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	105,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	105,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	105,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100	104,999,950	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100	104,999,950	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	104,961,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	104,961,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	157,499,850	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinkes Puskesmas	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	157,499,850	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	100	104,852,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	100	104,852,000	
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis	100	104,949,000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	104,949,000	

			Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	150,000,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	150,000,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	20,521,683,434	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	20,521,683,434	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinkes Puskesmas	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100	49,980,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinkes Puskesmas	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100	49,980,000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	105,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	105,000,000	
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	100	105,000,000	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	100	105,000,000	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	6,000,000,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	6,000,000,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	19,154,451,982	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	19,154,451,982	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	8,092,057,800	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	8,092,057,800	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100	836,205,300	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100	836,205,300	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	100	450,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	100	450,000,000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	300,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	300,000,000	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinkes Puskesmas	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	100	150,000,000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinkes Puskesmas	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	100	150,000,000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Fasilitas Kesehaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	210,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Fasilitas Kesehaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	210,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	105,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinkes Puskesmas	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	105,000,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100	105,000,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100	105,000,000	
3	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes Puskesmas	Tersedianya apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan)	100	52,380,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes Puskesmas	Tersedianya apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan)	100	52,380,000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes Puskesmas	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	52,380,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes Puskesmas	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	52,380,000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan	Dinkes Puskesmas	Tersedianya sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu perusahaan rumah tangga	100	52,498,600	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Tersedianya sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu perusahaan rumah tangga sesuai standar (Dinas Kesehatan)	100	52,498,600	

	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		sesuai standar (Dinas Kesehatan)			Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100	52,498,600	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100	52,498,600	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Tersedianya pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100	52,430,000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Tersedianya pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100	52,430,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	52,430,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	52,430,000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes Puskesmas	Tersedianya tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) yang sesuai standar	100	52,500,000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes Puskesmas	Tersedianya tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) yang sesuai standar	100	52,500,000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	52,500,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	52,500,000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya pengawasan makanan minuman industri rumah tangga yang beredar	100	105,000,000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya pengawasan makanan minuman industri rumah tangga yang beredar	100	105,000,000	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	105,000,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	105,000,000	
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan (Dinas Kesehatan)**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar (Dinas Kesehatan)	100	99,998,200	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar (Dinas Kesehatan)	100	99,998,200	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	99,998,200	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	99,998,200	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Tersedianya SDMK yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan)	100	104,378,800	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Tersedianya SDMK yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan)	100	104,378,800	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	104,378,800	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	104,378,800	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kapasitas SDMK (Dinas Kesehatan)	100	184,170,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya Kapasitas SDMK (Dinas Kesehatan)	100	184,170,000	

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	184,170,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	184,170,000	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya promosi kesehatan	100	158,580,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya promosi kesehatan	100	158,580,000	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	158,580,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	158,580,000	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gerakan hidup bersih dan sehat	100	51,420,000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes Puskesmas	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gerakan hidup bersih dan sehat	100	51,420,000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100	51,420,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinkes Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100	51,420,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 diambil dari proses *bottom up planning dan top down planning* dengan mengacu kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Pada proses *bottom up planning***,** lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh lintas sektor perangkat daerah yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, Komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumber daya kesehatan yang makin terstandarisasi. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pemerataan dan pembinaan pelayanan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai peran, fungsi dan kewenangan yang sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan yang bermutu sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya, baik tenaga, sarana prasarana, alat kesehatan maupun berupa pedoman atau panduan.

Usulan hasil musrenbang terkait bidang kesehatan dilakukan verifikasi ke bagian perencanaan yang selanjutnya beberapa usulan tersebut diakomodir dalam RKPD Dinas Kesehatan tahun 2024 dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan anggaran yang ada. Sedangkan usulan dari Pokok Pikiran Dewan (POKIR) yang berasal dari anggota dewan juga dilakukan verifikasi namun ada beberapa yang pengganggarannya tidak masuk dalam RKPD Dinas Kesehatan Tahun 2024. Sehingga usulan tersebut apabila dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan Tahun 2024 melalui hasil musrenbang dan pokok pikiran dewan sebagaimana yang tercantum dalam tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
01.	Pembangunan Rumah Dinas RS Pratama Mayapuria	Desa Baturube Kec. Bungku Utara		1	Usulan 2023 Aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan sesuai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
02.	Pembangunan Gedung Laundry RS Pratama Mayapuria	Desa Baturube Kec. Bungku Utara		1	Usulan 2023 Aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan sesuai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
03.	Pembangunan pagar Polindes	Desa Posangke Kec. Bungku Utara		1	Usulan 2023 Aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan sesuai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
04.	Pembangunan Pagar dan Pengadaan Mobileur Pustu	Desa Tambarobone Kec. Bungku Utara		1	Usulan 2023 Aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan sesuai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
05.	Pengadaan alat kesehatan Pustu	Desa Lemo Kec. Bungku Utara		1	Usulan 2023 Aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan sesuai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
06.	Pengadaan Ambulance Puskesmas Potowe Indo Lijo	Desa Lijo Kec. Mamosalato		1	Usulan 2023 Aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan sesuai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
07.	Pengadaan Ambulance Laut Puskesmas Baturube	Desa Baturube Kec. Bungku Utara		1	Usulan 2023 Aspirasi rakyat melalui Musrenbang dan sesuai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam rancangan teknokratik RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021- 2024 disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya. Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
e. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
f. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
h. Meningkatnya efekstivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2021 – 2024 diarahkan pada :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan hidup kesehatan menggunakan pendekatan siklus, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinu (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Morowali Utara

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampaai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi damn misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah/le,baga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 disesuaikan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara dimana pembangunan bidang kesehatan masuk dalam misi RPJMD sehingga tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan adalah :

A. Tujuan Misi:
   1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang.
   2) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk Morowali Utara Sehat.
   3) Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan.
B. Sasaran :
   1) Meningkatnya cakupan pelayanaan kesehatan bagi masyarakat.

2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat.

3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

4) Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Morut Sehat.

5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

6) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD telah dirumuskan pula tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA					
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52	51	49	48	47	46
			Angka kesakitan per 100 penduduk	12	11	10	9	9	8
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69.80	70.20	70.50	70.90	71.20	71.50
		Meningkatkan status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk) yang ditangani sesuai standar	99%	99%	99%	99%	99%	99%
			Presentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2892	2727	2562	2397	2232	2067
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2892	2727	2562	2397	2232	2067
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2779	2789	2792	2800	2828	2856
			Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
			Persentase kelahiran di fasilitas kesehatan	93%	94%	95%	95%	95%	95%
			Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	80,33%	81,53%	82,74%	83,94%	85,15%
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
			Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90
		Meningkatnya Mutu Kesehatan Lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70	72,5	74	76,5	78	80

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Kesehatan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal spesifik Kabupaten Morowali Utara.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun layanan SPM Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 - 59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan pada usia lanjut	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	Setiap Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Setiap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Setiap Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDS	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS sesuai standar	100%

3. Dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Morowali Utara Dinas Kesehatan melalui program jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan telah menjamin penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

4. Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat.
5. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan melalui Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dirumuskan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah disusun berdasarkan Kepmendagri 900.1.515-1317 tahun 2023. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara menetapkan 5 program operasional dan 20 kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program/kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4). Program dan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
5). Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan **Lembar :1 dari 71**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**115.799.898.104,00**				**121.589.893.009,20**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**115.799.898.104,00**				**121.589.893.009,2**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**70.170.663.450,50**				**73.679.196.623,03**
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)		***100***				***100***	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (%)		***100***				***100***	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				168.000.000,00				176.400.000,00
		Tersedianya proses perencanaan dan evaluasi yang berkualitas(%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	

1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				78.000.000,00				81.900.000,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4.00*				*4.00*	
		Belanja Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*	*78.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.000,00				94.500.000,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3*				*3*	
		Belanja Jasa Narasumber (Kegiatan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	26.250.000,00
		Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan (Laporan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3*	*65.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	68.250.000,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.445.485.660,70				50.867.759.943,74
		Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	

1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				48.445.485.660,70				50.867.759.943,74
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*534*	*48.445.485.660,70*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*550*	50.867.759.943,74
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.096.599.693,00				2.201.429.677,65
		Peningkatan pelayananadministrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien (UPT PUSKESMAS BETELEME) (%)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*100*				*100*	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (PUSKESMAS BATURUBE)(%)	*(Puskesmas Baturube, Bungku Utara)*	*100*				*100*	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (PUSKESMAS WONGKO NDAYA)(%)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)*	*100*				*100*	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Lee) (%)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara	*(Puskesmas Tambayoli,*	*100*				*100*	

	Efektif dan Efisien (Puskesmas Tambayoli) (%)	*Soyo Jaya)*						
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Pandauke) (%)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*100*				*100*	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Potowe Indo)(%)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*100*				*100*	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara efektif dan efisien (UPT Puskesmas Panca Makmur)(%)	*(UPT Puskesmas Panca makmur, Soyo Jaya)*	*100*				*100*	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif dan Efisien (UPT PUSKESMAS KOLONODALE) (%)	*(UPT PUSKESMAS KOLONODALE, Petasia)*	*100*				*100*	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif dan efisien (UPT. Puskesmas Petumbea) (%)	*(UPT. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*100*				*100*	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum perangkat Daerah Secara efektif dan efisien (UPT.Puskesmas Anutoluwu) (%)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*100*				*100*	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (UPT.Puskesmas Molino) (%)	*(UPT.Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*100*				*100*	

		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan efisien (UPT PUSKESMAS TOMATA) (%)	*(UPT PUSKESMAS TOMATA, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Peningkatan pelayananadministrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien (UPT Puskesmas Mayumba) (%)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*100*				*100*	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				51.217.044,00				53.777.896,20
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*7*				*7*	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*4.685.360,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	4.919.628,00
		Belanja Alat Listrik PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*1.976.880,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	2.075.724,00
		Belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*10.810.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	11.350.500,00
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*7*	*12.498.318,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*7*	13.123.233,90

		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Puskesmas Lee) (Paket)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*470.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	493.500,00
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(PUSKESMAS WONGKO NDAYA, Bungku Utara)*	*1*	*4.685.360,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	4.919.628,00
		Komponen Instalasi Listrik (UPT Puskesmas Mayumba) (Paket)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*10.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	11.025.000,00
		Komponen Instalasi Listrik UPT Puskesmas Tomata (Paket)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*1*	*3.614.246,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	3.794.958,30
		Komponen Intalasi Listrik Potowe Indo (Paket)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*5*	*1.976.880,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*5*	2.075.724,00
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				669.284.790,00				702.749.029,50
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)							
		Belanja Alat/Bahan _ Kertas dan Cover (Puskesmas Pandauke) (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*650.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	682.500,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	*(UPT PUSKESMA*	*1*	*18.300.000,00*	*Dana Transfer*		*1*	19.215.000,00

		Kantor Lainnya UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*S PETUMBEA, Lembo Raya)*			*Umum-Dana Alokasi Umum*			
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat tulis kantor (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Laporan)	*(UPT PUSKESMA S BETELEME, Lembo)*	*1*	*15.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	15.750.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMA S PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*16.510.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	17.336.130,00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Paket)	*(UPT PUSKESMA S BETELEME, Lembo)*	*1*	*1.300.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	1.365.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMA S PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*2.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	2.100.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*9.483.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	9.957.675,00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan cover (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Laporan)	*(UPT PUSKESMA S BETELEME, Lembo)*	*1*	*13.860.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	14.553.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover UPT PUSKESMAS PETUMBEA	*(UPT PUSKESMA S*	*1*	*5.642.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*		*1*	5.924.625,00

		(Paket)	*PETUMBEA, Lembo Raya)*			*Alokasi Umum*			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*14.741.248,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	15.478.310,40
		Belanja alat pembersih untuk kegiatan kantor-perabot kantor (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*18.579.061,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	19.508.014,05
		Belanja ATK PUSKESMAS BATURUBE (Paket)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*13.319.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	13.984.950,00
		Belanja ATK PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*17.988.200,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	18.887.610,00
		Belanja ATK Puskesmas Wongko Ndaya (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*3.226.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	3.387.562,50
		Belanja Bahan-Bahan Kimia UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*7.480.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	7.854.000,00
		Belanja Bahan-Isi Tabung Gas UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*5.550.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	5.827.500,00

	Belanja Benda Pos (Puskesmas Pandauke) (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*2.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	2.625.000,00
	Belanja Kertas dan Cover PUSKESMAS BATURUBE (Paket)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*7.605.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	7.985.250,00
	Belanja Kertas dan Cover PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*3.042.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	3.194.100,00
	Belanja Materai PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*700.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	735.000,00
	Belanja Modal Alat Dapur UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*7.375.120,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	7.743.876,00
	Belanja Modal Alat Pendingin PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*13.026.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	13.677.300,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*9.025.173,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	9.476.431,65

		Belanja Modal Peralatan Personal Computer PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*1.144.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	1.201.200,00
		Belanja Modal Personal Computer PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*20.315.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	21.331.380,00
		Belanja Perabot Kantor PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*2.187.850,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	2.297.242,50
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Potowe Indo) (Paket)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*2*	*48.495.782,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	50.920.571,10
		Peralatan dan Perelngkapan Kantor (UPT Puskesmas Mayumba) (Paket)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	10.500.000,00
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*12*	*55.436.733,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*12*	58.208.569,65
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor PUSKESMAS BATURUBE (Paket)	*(Puskesmas Baturube, Bungku Utara)*	*1*	*100.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	105.000.000,00

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Pandauke) (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*1*	*57.550.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	60.427.500,00
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor Puskesmas Tambayoli (Paket)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*1*	*9.700.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	10.185.000,00
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(PUSKESMAS WONGKO NDAYA, Bungku Utara)*	*1*	*51.996.873,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	54.596.716,65
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*6.552.100,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	6.879.705,00
		Peralatan Dan Perlengkapan Kantor UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*6.552.100,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	6.879.705,00
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT.Puskesmas Molino (Paket)	*(UPT.Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*4*	*10.501.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	11.026.050,00
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT. Puskesmas Petumbea (Paket)	*(UPT. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*1*	*0*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	10.000.000,00
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Puskesmas Tomata (Paket)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori*	*4*	*81.949.100,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*		*4*	86.046.555,00

			Atas)			*Alokasi Umum*			
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				123.460.263,00				129.633.276,15
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)							
		Belanja Peralatan Rumah Tangga _ Perabot Kantor (Puskesmas Pandauke) (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*6.982.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	7.331.100,00
		Belanja Peralatan Rumah Tangga PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*5.359.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	5.627.895,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PUSKESMAS BATURUBE (Paket)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*9.397.129,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	9.866.985,45
		Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*	*86.473.252,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	90.796.914,60
		Peralatan Rumah Tangga (Puskesmas Lee) (Paket)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*2*	*7.247.179,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	7.609.537,95
		Peralatan Rumah Tangga (Puskesmas Pandauke) (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*1*	*6.982.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*		*1*	7.331.100,00

						Umum			
		Peralatan Rumah Tangga UPT.Puskesmas Molino (Paket)	*(UPT.Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*2*	*1.018.803,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	1.069.743,15
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				462.663.009,00				485.796.159,45
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)							
		Barang Cetakan dan Pengadaan UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*6.780.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	7.119.000,00
		Barang Cetakan dan Penggandaan (Puskesmas Lee) (Paket)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*1.050.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	1.102.500,00
		Barang Cetakan dan Penggandaan (Puskesmas Pandauke) (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*1*	*7.536.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	7.913.745,00
		Barang Cetakan dan Penggandaan PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(PUSKESMAS WONGKO NDAYA, Bungku Utara)*	*1*	*18.141.050,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	19.048.102,50
		Barang Cetakan dan Penggandaan UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*6.780.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	7.119.000,00

	Barang Cetakan dan Penggandaan UPT Puskesmas Petumbea (Paket)	*(UPT. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*1*	*26.913.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	28.259.175,00
	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Puskesmas Tambayoli (Paket)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*1*	*2.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	2.100.000,00
	Barang Cetak dan Penggandaan UPT Puskesmas Kolonodale (Paket)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*71.540,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	75.117,00
	Barang Cetak dan Penggandaan UPT Puskesmas Tomata (Paket)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*3*	*38.063.169,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	39.966.327,45
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dan penggandaan (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*24.390.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	25.609.500,00
	Belanja ATK Dinas Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*5*	*60.483.650,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*5*	63.507.832,50
	Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Paket)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*18.141.050,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	19.048.102,50
	Belanja Bahan Cetak Dinas Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB.*	*1*	*69.483.650,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*		*1*	72.957.832,50

			MOROWALI UTARA)			*Alokasi Umum*			
		Belanja Bahan Cetak/Penggandaan (Puskesmas Pandauke) (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*4.386.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	4.606.245,00
		Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan PUSKESMAS BATURUBE (Paket)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*20.829.200,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	21.870.660,00
		Belanja Kertas Cover Dinas Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*	*126.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	132.300.000,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*11.428.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	12.000.345,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Puskesmas Potowe Indo) (Paket)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*2*	*10.183.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	10.692.675,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPT Puskesmas Mayumba (Paket)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	10.500.000,00
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				789.974.587,00				829.473.316,35
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

	(Laporan)							
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PUSKESMAS INDO LIJO (Laporan)	*(Kolonodale, Petasia)*	*1*	*56.760.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	59.598.000,00
	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT Puskesmas Mayumba (Laporan)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*40.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	42.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD (Puskesmas Lee) (Laporan)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*12.745.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	13.382.775,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD (UPT Puskesmas Panca Makmur) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*1*	*76.474.010,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	80.297.710,50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Kesehatan (Laporan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*11*	*327.198.777,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*11*	343.558.715,85
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(PUSKESMAS BATURUBE, Bungku Utara)*	*1*	*92.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	96.600.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Puskesmas Potowe Indo) (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*1*	*59.598.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	62.577.900,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Puskesmas	*(Puskesmas Tambayoli,*	*1*	*13.000.000,00*	*Dana Transfer*		*1*	13.650.000,00

		Tambayoli (Paket)	*Soyo Jaya)*			*Umum-Dana Alokasi Umum*			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*14.334.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	15.051.540,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT. Puskesmas Petumbea (Laporan)	*(UPT. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*2*	*28.325.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	29.741.250,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT Puskesmas Tomata (Paket)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*1*	*39.538.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	41.515.425,00
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(PUSKESMAS WONGKO NDAYA, Bungku Utara)*	*1*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	31.500.000,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				69.467.983,00				72.941.382,15
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kesehatan (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*						72.941.382,15

		Pengadaan Kendaraa Dinas Operasional Dinas Kesehatan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				17.812.000,00				18.702.600,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)							
		Penyediaan Mebel Dinas Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*17.812.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	18.702.600,00
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.655.983,00				54.238.782,15
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)							
		Belanja Modal Peralatan Personal Computer PUSKESMAS POTOWE INDO (Unit)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*2*	*9.155.983,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	9.613.782,15
		Belanja Modal Personal Computer PUSKESMAS POTOWE INDO (Unit)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*2*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	21.000.000,00
		Belanja Modal (Puskesmas Pandauke) (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*3*	*22.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	23.625.000,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				19.055.201.784,00				20.007.961.873,20

Pemerintahan Daerah								
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT. Puskesmas Petumbea) (%)	*(UPT. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*100*				*100*	
	Meningkatnya Pelayanan Publik (Puskesmas Pandauke) (%)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*100*				*100*	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPT Puskesmas Mayumba) (%)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*100*				*100*	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT Puskesmas Panca Makmur) (%)	*(UPT Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*100*				*100*	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara efektif da efisien (UPT PUSKESMAS BETELEME) (%)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*100*				*100*	
	Meninkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT Puskesmas Kolonodale) (%)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*100*				*100*	

		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT.Puskesmas Anutoluwu) (%)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*100*				*100*	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (UPT.Puskesmas Molino) (%)	*(UPT.Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (UPT Puskesmas Tomata) (%)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik (PUSKESMAS BATURUBE) (%)	*(PUSKESMAS BATURUBE, Bungku Utara)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik (Puskesmas Lee) (%)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Puskesmas Tambayoli) (%)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*100*				*100*	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				236.149.245,00				247.956.707,25
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)							
		Belanja Jasa Internet Dinas Kesehatan (Laporan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	26.250.000,00

		Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah/Jurnal, Iklan Dinas Kesehatan (Laporan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	31.500.000,00
		Belanja Listrik Dinas Kesehatan (Laporan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*	*105.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	110.250.000,00
		Belanja Pulsa Internet PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*6.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	6.300.000,00
		Belanja Pulsa Internet PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*840.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	882.000,00
		Belanja Tagihan Listrik PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*30.780.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	32.319.000,00
		Belanja Tagihan Listrik PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*5.100.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	5.355.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*12.120.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	12.726.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT	*(UPT Puskesmas*	*1*	*2.085.586,00*	*Dana Transfer*		*1*	2.189.865,30

		Puskesmas Molino) (Laporan)	*Molino, Petasia Timur)*			*Umum-Dana Alokasi Umum*			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT.Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT.Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*4*	*11.220.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	11.781.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Puskesmas Panca Makmur) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*1*	*8.003.659,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	8.403.841,95
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				570.577.450,00				599.106.322,50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)							
		Belanja Makanan dan Minuman Pasien PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*66.420.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	69.741.000,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*18.360.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	19.278.000,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*17.160.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	18.018.000,00
		Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	*(Dinas Kesehatan,*	*1*	*212.325.000,00*	*Dana Transfer*		*1*	222.941.250,00

	(Laporan)	*KAB. MOROWALI UTARA)*			*Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*31.320.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	32.886.000,00
	Makan Minum Pasien (UPT Puskesmas Kolonodale) (Paket)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*59.081.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	62.035.050,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Penglengkapan Kantor UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*9.005.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	9.455.512,50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Lee) (Laporan)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*14.946.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	15.693.562,50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Puskesmas Potowe Indo) (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*2*	*33.358.700,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	35.026.635,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*9.005.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	9.455.512,50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor(UPT Puskesmas Mayumba) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*60.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	63.000.000,00

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Puskesmas Petumbea) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*1*	*34.596.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	36.325.800,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Puskesmas Tambayoli (Paket)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*2*	*5.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	5.250.000,00
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.248.475.089,00				19.160.898.843,45
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)							
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*70.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	73.500.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Puskesmas Pandauke) (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*28.250.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	29.662.500,00
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*31.063.700,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	32.616.885,00
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*22.427.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	23.548.612,50

		Belanja Bahan-Isi Tabung Gas PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*2.295.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	2.409.750,00
		Belanja Bahan-Isi Tabung Gas PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*2.920.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	3.066.000,00
		Belanja Honorarium pegawai Non PNS (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*450.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	472.500.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Honorer Daerah PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*360.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	378.000.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Honorer Daerah Puskesmas Pandauke (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*324.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	340.200.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Honorer Daerah PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*84.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	88.200.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Honorer Daerah PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*147.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	154.350.000,00
		Belenja Bahan-Bahan Isi Tabung Gas Oksigen (Puskesmas Pandauke)	*(Puskesmas Pandauke,*	*1*	*10.350.000,00*	*Dana Transfer*		*1*	10.867.500,00

	(Laporan)	*Pandauke, Kec. Mamosalato)*			*Umum-Dana Alokasi Umum*			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*224.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	235.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan) (Laporan)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*12*	*14.263.413.321,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*12*	14.976.583.987,05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Puskesmas Kolonodale) (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*513.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	538.650.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Puskesmas lee) (Laporan)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*12*	*150.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*12*	157.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*99.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	103.950.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Puskesmas Mayumba) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*360.575.278,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	378.604.041,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Puskesmas Molino) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*198.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	207.900.000,00

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Puskesmas Panca Makmur) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*1*	*198.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	207.900.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Puskesmas Tambayoli (Paket)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*1*	*147.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	154.350.000,00
		Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Puskesmas Tomata) (Laporan)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*1*	*442.984.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	465.133.200,00
		Uang Lembur Pegawai Non PNS (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Laporan)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*25.600.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	26.880.000,00
		Uang Lembur Pegawai Non PNS (UPT PUSKESMAS KOLONODALE) (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*94.596.540,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	99.326.367,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				335.908.329,80				352.703.746,29
		Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (UPT Puskesmas Tomata) (%)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efesien (PUSKESMAS BATURUBE) (%)	*(PUSKESMAS BATURUBE, Bungku Utara)*	*100*				*100*	

		Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (Puskesmas Tambayoli) (%)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*100*				*100*	
		Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien (Puskesmas Lee) (%)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (UPT Puskesmas Mayumba) (%)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*100*				*100*	
		Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				251.424.944,00				263.996.191,20
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)							
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	31.500.000,00
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	26.250.000,00

	Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PUSKESMAS BATURUBE (Unit)	*(PUSKESMAS BATURUBE, Bungku Utara)*	*2*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	31.500.000,00
	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Unit)	*(PUSKESMAS WONGKO NDAYA, Bungku Utara)*	*1*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	26.250.000,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT Puskesmas Tomata) (Unit)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*2*	*40.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	42.000.000,00
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Puskesmas Lee) (Unit)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*2*	*22.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	23.100.000,00
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14*	31.500.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (UPT PKM Panca Makmur) (Unit)	*(UPT PKM Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*3*	*29.424.944,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	30.896.191,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT Puskesmas Mayumba) (Unit)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	21.000.000,00

1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.796.764,80				21.836.603,04
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Dinas Kesehatan) (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*20*	*9.600.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*20*	10.080.000,00
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (UPT PUSKESMAS BETELEME) (Tahun)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*9.100.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	9.555.000,00
		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT Puskesmas Tomata (Unit)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*4*	*2.096.764,80*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*4*	2.201.603,04
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				63.686.621,00				66.870.952,05
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							
		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Puskesmas Pandauke) (Unit)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*3.024.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	3.175.200,00
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Puskesmas Lee) (Unit)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	*3.000.000,00*

		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Puskesmas Tambayoli (Unit)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*2*	*5.496.621,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	5.771.452,05
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Puskesmas Mayumba) (Unit)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*17.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	17.850.000,00
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Puskesmas Tomata) (Unit)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*11*	*15.142.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*11*	15.899.100,00
		Pemeliharaan Gedung (Puskesmas Pandauke) (Unit)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*1*	*3.024.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	3.175.200,00
		Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	21.000.000,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**45.504.809.453,50**				47.780.049.926,18
		Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan (Dinas Kesehatan) (%)		***100***				***100***	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Tomata) (%)		***100***				***100***	
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Mayumba)		***100***				***100***	

		(%)							
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				7.202.469.589,00				7.562.593.068,45
		Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Pandauke) (%)	*(Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*100*				*100*	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				970.000.000,00				1.018.500.000,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3*				*3*	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*	*770.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	808.500.000,00
		Pembangunan Gedung/Fasilitas Kesehatan (Unit)	*(Lembobelala , Lembobelala, Kec. Lembo Raya)*	*1*	*200.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	210.000.000,00
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				-				1.680.000.000,00

		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*				*4*	
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*0*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.000.000.000,00				1.050.000.000,00
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*				*4*	
		Rehabilitasi Puskesmas (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*1.000.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	1.050.000.000,00
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-				420.000.000,00
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*				*1*	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				600.000.000,00				630.000.000,00

		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*6*				*6*	
		Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3*	*600.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	630.000.000,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				301.799.000,00				316.888.950,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)							
		Pengadaan Alat Kesehatan (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*4*	*301.799.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*		*4*	316.888.950,00
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				34.822.500,00				36.563.625,00
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)							
		Kalibrasi Alat Kesehatan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI*	*100*	*34.822.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*		*100*	36.563.625,00

			UTARA)			*Umum*			
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				4.295.848.089,00				4.510.640.493,45
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)							
		Pengadaan Obat dan BMHP (Paket)	*(DInas Kesehatan Daeah, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10*	*4.295.848.089,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*10*	4.510.640.493,45
		Peyediaan Bahan Habis Pakai Medis (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*20*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*20*	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				38.012.339.864,50				39.912.956.857,73
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Potowe Indo) (%)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Mayumba) (%)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Panca Makmur) (%)	*(UPT Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*100*				*100*	

		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
		Cakupan Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Petumbea) (%)	*(UPT Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT.Puskesmas Anutoluwu) (%)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (UPT PUSKESMAS BETELEME) (%)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas Tomata) (%)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (UPT PUSKESMAS KOLONODALE) (%)	*(UPT PUSKESMAS KOLONODALE, Petasia)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS BATURUBE) (%)	*(PUSKESMAS BATURUBE, Bungku Utara)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Lee) (%)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*100*				*100*	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Tambayoli)	*(Puskesmas Tambayoli,*	*100*				*100*	

		(%)	*Soyo Jaya)*						
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				24.945.850,00				26.193.142,50
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2.397*	*24.945.850,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2500*	26.193.142,50
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				49.999.800,00				52.499.790,00
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2.562*	*49.999.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2600*	52.499.790,00
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				35.936.400,00				37.733.220,00
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2.662*	*35.936.400,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2700*	37.733.220,00

1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				20.074.550,00				21.078.277,50
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan kesehatan Balita (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10.682*	*20.074.550,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*10.900*	21.078.277,50
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				50.000.000,00				52.500.000,00
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14.252*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14.500*	52.500.000,00
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				49.969.000,00				52.467.450,00
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Penduduk Usia Produktif (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*66.470*	*49.969.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*67.000*	52.467.450,00
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				50.498.970,00				53.023.918,50

		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk Usia Lanjut (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10.770*	*50.498.970,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*11.000*	53.023.918,50
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				24.999.750,00				26.249.737,50
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Penderita Hipertensi (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*30.894*	*24.999.750,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*31.000*	26.249.737,50
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				54.999.108,00				57.749.063,40
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*7.984*	*54.999.108,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*8.200*	57.749.063,40
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				22.498.800,00				23.623.740,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan							

		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)							
		Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan ODGJ (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*314*	*22.498.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*350*	23.623.740,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				24.999.500,00				26.249.475,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*383*	*24.999.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*400*	26.249.475,00
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				24.990.000,00				26.239.500,00
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)							
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita HIV (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3.275*	*24.990.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3.400*	26.239.500,00
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				24.998.000,00				26.247.900,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							

		(Dokumen)							
		Pelayanan pada KLB (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*24.998.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	26.247.900,00
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				24.859.900,00				26.102.895,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)							
		Pelayanan Kesehatan Pada Krisis Kesehatan (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*24.859.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	26.102.895,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				23.426.550,00				24.597.877,50
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)							

		Pelayanan Kesehatan Gizi (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3*	*23.426.550,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	24.597.877,50
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				25.000.000,00				26.250.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)							
		Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*15*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*15*	26.250.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25.000.000,00				26.250.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)							
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14*	26.250.000,00
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				24.999.950,00				26.249.947,50
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)							
		Kesehatan Tradisional	*(Dinas Kesehatan,*	*14*	*24.999.950,00*	*Dana Transfer*		*14*	26.249.947,50

		(Dokumen)	*KAB. MOROWALI UTARA)*			*Umum-Dana Alokasi Umum*			
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				219.961.000,00				230.959.050,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)							
		Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*195.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	204.750.000,00
		Pemelitian Kesehatan (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	
		Surveilans Kesehatan (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*24.961.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	26.209.050,00
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				27.499.850,00				28.874.842,50
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)							
		Pelayanan Penyalahgunaan NAPZA (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10*	*27.499.850,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*12*	28.874.842,50
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				24.949.000,00				26.196.450,00

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)							
		Operasional PSC (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*24.949.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	26.196.450,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20.000.000,00				21.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)							
		Pelayanan P2PM dan PTM (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14*	21.000.000,00
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				14.000.020.835,00				14.700.021.876,75
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)							
		Jaminan Kesehatan Masyarakat (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*46.274*	*14.000.020.835,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*47.000*	14.700.021.876,75
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				9.980.000,00				10.479.000,00
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke							

		Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)							
		Pengiriman Spesimen Penyakit (Paket)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10*	*9.980.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*10*	10.479.000,00
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				25.000.000,00				26.250.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)							
		Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	26.250.000,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1.864.322.734,00				1.957.538.870,70
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)							
		Operasional RS Pratama (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*1.864.322.734,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*1*	1.957.538.870,70
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				17.381.676.106,50				18.250.759.911,83
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)							
		Alat Kegiatan Kantor - Alat Listrik (JKN) UPT Puskesmas Molino	*(UPT Puskesmas*	*1*	*4.200.000,00*	*Pendapatan Dana*		*1*	4.410.000,00

		(Laporan)	*Molino, Petasia Timur)*			*Kapitasi JKN pada FKTP*			
		Alat Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*15.815.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	16.605.750,00
		Alat Tulis Kantor (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*8.306.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	8.721.300,00
		Bahan Cetak (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*12.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	13.125.000,00
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*6.499.084,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	6.824.038,20
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*3.201.250,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	3.361.312,50
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*10.375.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	10.894.275,00
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*23.118.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	24.273.900,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JKN)	*(UPT.Puskesmas*	*1*	*1.750.000,00*	*Pendapatan Dana*		*1*	1.837.500,00

		UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*Anutoluwu, Petasia Barat)*			*Kapitasi JKN pada FKTP*			
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*5.757.850,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	6.045.742,50
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*30.634.660,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	32.166.393,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*1.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	1.050.000,00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*2.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	2.100.000,00
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*700.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	735.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*3.211.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	3.371.550,00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*3.802.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	3.992.625,00
		Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan kantor- Kertas dan Cover (JKN) UPT	*(UPT Puskesmas*	*1*	*7.013.500,00*	*Pendapatan Dana*		*1*	7.364.175,00

	Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*Kolonodale, Petasia)*			*Kapitasi JKN pada FKTP*			
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*1.177.223,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	1.236.084,15
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*470.281,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	493.795,05
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot kantor (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*14.367.719,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	15.086.104,95
	Belanja Alat Tulis Kantor (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*18.724.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	19.660.200,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (JKN) Puskesmas Pandauke (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*27.540.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	28.917.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*1.425.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	1.496.250,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas JKN (PUSKESMAS KOLONODALE (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*26.840.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	28.182.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu,*	*1*	*7.850.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN*		*1*	8.242.500,00

	(Paket)	*Petasia Barat)*			*pada FKTP*			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (JKN) UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*28.841.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	30.283.575,00
	Belanja bahan-bahan kimia (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*2.085.875,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	2.190.168,75
	Belanja Bahan-bahan Lainya (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*7.700.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	8.085.000,00
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*12.875.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	13.518.750,00
	Belanja bahan bakar dan pelumas (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*16.095.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	16.899.750,00
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*13.345.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	14.012.250,00
	Belanja Bahan Cetak (JKN) PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*1.073.450,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	1.127.122,50
	Belanja Bahan Cetak (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*2.565.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN*		*1*	2.693.775,00

					pada FKTP			
	Belanja Bahan Cetak (JKN) PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*2.408.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	2.528.400,00
	Belanja Bahan Cetak (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*1.610.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	1.690.500,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (JKN) PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*26.205.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	27.515.250,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*3.525.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	3.701.250,00
	Belanja bahan-isi tabung gas (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*29.700.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	31.185.000,00
	Belanja Bahan isi Tabung Gas (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*21.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	22.575.000,00
	Belanja Bahan Isi Tabung (JKN) UPT Puskesmas Molino (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*6.840.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	7.182.000,00
	Belanja Bahan Kimia (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*900.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN*		*1*	945.000,00

					pada FKTP			
	Belanja Benda Pos (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	525.000,00
	Belanja Isi Tabung Gas (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*2.680.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	2.814.000,00
	Belanja Jasa Medik (JKN) PUSKESMAS POTOWE INDO (Tahun)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*60.806.550,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	63.846.877,50
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN (Jasa Medik/JKN) Puskesmas Pandauke (Tahun)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*350.587.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	368.116.875,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (JKN) PUSKESMAS BATURUBE (Tahun)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*294.418.149,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	309.139.056,45
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*123.198.093,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	129.357.997,65
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Tahun)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*78.450.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	82.372.500,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (JKN) UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA,*	*1*	*294.072.133,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	308.775.739,65

		Lembo Raya)						
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*2.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	2.887.500,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*16.522.375,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	17.348.493,75
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (JKN) UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Paket)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*2.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	2.887.500,00
	Belanja kawat/faksimili/internet/ TV berlangganan (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*8.100.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	8.505.000,00
	BelanjaKawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-Pulsa Data Internet (JKN) Puskesmas Pandauke (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*12.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	12.600.000,00
	BelanjaKawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-Pulsa Data Internet (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*1.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	1.575.000,00
	Belanja Kawat/ Faksmili/ Internet/ TV Berlanganan (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*6.300.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	6.615.000,00
	Belanja Kertas dan Cover (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*8.646.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	9.078.825,00

	Belanja Kertas dan Cover (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*845.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	887.250,00
	Belanja Lembur (JKN) PUSKESMAS BATURUBE (Tahun)	*(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*100.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	105.000.000,00
	Belanja Lembur (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Tahun)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*21.900.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	22.995.000,00
	Belanja Lembur Non ASN (JKN) Puskesmas Pandauke (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*29.200.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	30.660.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pasien (JKN) Puskesmas Pandauke (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*45.633.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	47.914.650,00
	Belanja Materai (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*1.570.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	1.648.500,00
	Belanja Modal Alat Pendingin (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS KOLONODALE, Petasia)*	*1*	*14.190.540,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	14.900.067,00

	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (JKN) UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*50.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	52.500.000,00
	Belanja Modal Mebel (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*26.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	27.300.000,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Unit)	*(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)*	*1*	*1.950.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	2.047.500,00
	Belanja Modal Peralatan personal Komputer (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*10.010.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	10.510.500,00
	Belanja modal personal computer (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Unit)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*2*	*15.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*2*	15.750.000,00
	Belanja Pemeliaraan Komputer-Komputer unit- Personal Komputer (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*3.650.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	3.832.500,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan bermotor lainya (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*19.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	20.475.000,00

		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat AngkutanDarat Bermotor Lainnya(JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*9.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	10.237.500,00
		Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*40.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	42.000.000,00
		Belanja Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*8.912.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	9.357.600,00
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*10.170.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	10.678.500,00
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (JKN) UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*6.552.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	6.879.600,00
		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*9.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	9.450.000,00
		Belanja Pemeliharaan Mobil Dinas Pejabat (JKN) Puskesmas Pandauke (Unit)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*2*	*30.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*2*	31.500.000,00
		Belanja Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor (JKN) UPT Puskesmas Molino	*(UPT Puskesmas Molino,*	*1*	*15.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN*		*1*	15.750.000,00

	(Laporan)	*Petasia Timur)*			*pada FKTP*			
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (JKN) PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*9.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	10.237.500,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (JKN) UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*26.380.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	27.699.000,00
	Belanja Pemeliharaan/Perawatan _ Jasa Service Komputer/AC (JKN) Puskesmas Pandauke (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*3.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	3.150.000,00
	Belanja Peralatan Listrik (JKN) Puskesmas Pandauke (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*1.485.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	1.559.250,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*8.020.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	8.421.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*53.400.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	56.070.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (JKN) UPT PUSKESMAS PETUMBEA (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS PETUMBEA, Lembo Raya)*	*1*	*81.403.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	85.473.150,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (JKN) PUSKESMAS	*(Kolonodale,*	*1*	*69.000.000,00*	*Pendapatan Dana*		*1*	72.450.000,00

	BATURUBE (Laporan)	*Petasia)*			*Kapitasi JKN pada FKTP*			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (JKN) PUSKESMAS POTOWE INDO (Laporan)	*(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)*	*1*	*28.380.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	29.799.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Laporan)	*(Kolonodale, Petasia)*	*1*	*23.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	24.150.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Kota (JKN) Puskesmas Pandauke (Paket)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*110.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	115.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*26.370.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	27.688.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*7.743.600,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	8.130.780,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*30.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	31.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*37.582.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	39.461.100,00

	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota (JKN) UPT PUSKESMS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*57.100.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	59.955.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*20.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	21.000.000,00
	Belanja Pulsa Listrik (JKN) Puskesmas Pandauke (Laporan)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*1*	*12.600.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*1*	13.230.000,00
	Belanja Tagihan Listrik (JKN) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*6.120.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	6.426.000,00
	Belanja Tagihan Listrik (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*6.120.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	6.426.000,00
	Belanja Tagihan Listrik (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*32.297.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	33.911.850,00
	Belanja Tagihan Listrik (JKN) UPT Puskesmas Kolonodale (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Kolonodale, Petasia)*	*1*	*12.120.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	12.726.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Mobil Dinas (JKN) Puskesmas Pandauke (Unit)	*(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)*	*2*	*5.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*2*	5.250.000,00

	Jasa Medik (JKN) UPT. PuskesmasAnuntoluwu (Dokumen)	*(UPT. PuskesmasAnuntoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*130.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	136.500.000,00
	Jasa Medik (JKN) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*381.948.033,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	401.045.434,65
	Jasa Medik (JKN) UPT PUSKESMAS KOLONODALE (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS KOLONODALE, Petasia)*	*1*	*430.254.336,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	451.767.052,80
	Jasa Medik (JKN) UPT Puskesmas Molino (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*321.761.526,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	337.849.602,30
	Makan - Minum Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (JKN) UPT Puskesmas Molino (Laporan)	*(UPT Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*	*13.100.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	13.755.000,00
	Operasional Pelayananan Puskesmas (JKN Puskesmas Tambayoli) (Dokumen)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*1*	*192.572.379,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	202.200.997,95
	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) PKM Mayumba (Dokumen)	*(PKM Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*916.178.464,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	961.987.387,20
	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(PUSKESMAS BATURUBE, Bungku*	*1*	*1.249.736.880,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi*		*1*	1.312.223.724,00

		Utara)			*Khusus Non Fisik*			
	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) Puskesmas Lee (Dokumen)	*(Puskesmas Lee, Mori Atas)*	*1*	*681.811.900,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	715.902.495,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas Pandauke) (Dokumen)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*1*	*948.409.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	995.829.975,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas Tambayoli) (Dokumen)	*(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)*	*1*	*756.762.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	794.600.100,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Dokumen)	*(PUSKESMAS WONGKO NDAYA, Bungku Utara)*	*1*	*892.003.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	936.603.150,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK)UPT.Puskesmas Anutoluwu (Dokumen)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*	*768.877.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	807.321.375,00
	Operasional pelayanan puskesmas (BOK) UPT PUSKESMAS BETELEME (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS BETELEME, Lembo)*	*1*	*1.281.295.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	1.345.360.275,00

		Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) UPT PUSKESMAS KOLONODALE (Dokumen)	*(UPT PUSKESMAS KOLONODALE, Petasia)*	*1*	*696.696.458,30*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	731.531.281,22
		Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) UPT.Puskesmas Molino (Dokumen)	*(UPT.Puskesmas Molino, Petasia Timur)*	*1*		*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	*1.123.746.885,00*
		Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK UPT Puskesmas Panca Makmur (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*1*	*786.558.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	825.885.900,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK) UPT. Puskesmas Petumbea (Dokumen)	*(UPT. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*1*	*586.558.700,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	615.886.635,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK UPT Puskesmas Tomata) (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*1*	*965.133.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	1.013.390.175,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) PUSKESMAS BATURUBE (Laporan)	*(PUSKESMAS BATURUBE, Bungku Utara)*	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	
		Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) Puskesmas potowe Indo (Dokumen)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	

	Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) PUSKESMAS WONGKO NDAYA (Dokumen)	*(PUSKESMAS WONGKO NDAYA, Bungku Utara)*	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	
	Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) UPT.Puskesmas Anutoluwu (Paket)	*(UPT.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)*	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	
	Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN UPT Puskesmas Mayumba) (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Mayumba, Mori Utara)*	*1*	*300.151.078,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	315.158.631,90
	Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN UPT Puskesmas Panca Makmur) (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)*	*1*	*328.599.346,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	345.029.313,30
	Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN) UPT Puskesmas Petumbea (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)*	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	
	Operasional Pelayanan Puskesmas (JKN UPT Puskesmas Tomata) (Dokumen)	*(UPT Puskesmas Tomata, Mori Atas)*	*1*	*568.685.300,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	597.119.565,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Pandauke) (Dokumen)	*(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)*	*1*	*419.186.374,20*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP*		*1*	440.145.692,91
	Oprasional Pelayanan Puskesmas (BOK) Puskesmas Potowe Indo (Dokumen)	*(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)*	*1*	*950.864.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	998.407.200,00

1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3.820.528.911,00				4.011.555.356,55
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)							
		BOK Kabupaten (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*1*	*3.820.528.911,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*		*1*	4.011.555.356,55
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				36.205.300,00				38.015.565,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)							
		Akreditasi Puskesmas (Puskesmas)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14*	*36.205.300,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14*	38.015.565,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				250.000.000,00				262.500.000,00
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*95*				*100*	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				250.000.000,00				262.500.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)							

		Pengelolaan data dan informasi Kesehatan (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*	*200.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	210.000.000,00
		Perangkat Sistem Informasi (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*	*50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	52.500.000,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00				42.000.000,00
		Fasilitas Kesehaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*17*				*17*	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				15.000.000,00				15.750.000,00
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)							
		Perjalanan Dinas Pengawasan dan Tindak Lanjut Perizinan (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14*	*15.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14*	15.750.000,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				25.000.000,00				26.250.000,00
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan							

		kesehatan (Unit)							
		Kegiatan Peningkatan Mutu (Unit)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14*	26.250.000,00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**44.547.000,00**				46.774.350,00
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan (Dinas Kesehatan) (%)		***100***				***100***	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				9.998.200,00				10.498.110,00
		Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.03.2.01. 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				9.998.200,00				10.498.110,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)							
		Pengawasan Izi Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10*	*9.998.200,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*10*	10.498.110,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan				24.378.800,00				25.597.740,00

	UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
		Tersedianya SDMK yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				24.378.800,00				25.597.740,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)							
		Pembinaan dan Pengawasan SDMK (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*3*	*24.378.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*3*	25.597.740,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.170.000,00				10.678.500,00
		Meningkatnya Kapasitas SDMK (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.170.000,00				10.678.500,00
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)							

		Peningkatan Kompetensi SDMK (Orang)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*7*	*10.170.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*7*	10.678.500,00
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**40.878.200,00**				42.922.110,00
		Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)		***100***				***100***	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				19.949.600,00				
		Tersedianya apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi standar (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	20.947.080,00
1.02.04.2.01. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				19.949.600,00				20.947.080,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)							
		Pengendalian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Sarana)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*15*	*19.949.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*15*	20.947.080,00

1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				5.498.600,00				5.773.530,00
		Tersedianya sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu perusahaan rumah tangga sesuai standar (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				5.498.600,00				5.773.530,00
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)							
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*2*	*5.498.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*2*	5.773.530,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				5.430.000,00				5.701.500,00
		Tersedianya pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	

		yang memenuhi standar (%)							
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				5.430.000,00				5.701.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)							
		Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*	*5.430.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*100*	5.701.500,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				5.000.000,00				5.250.000,00
		Tersedianya tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) yang sesuai standar (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*90*				*100*	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara				5.000.000,00				5.250.000,00

	lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)							
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	*(Dinas kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10*	*5.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*10*	5.250.000,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				5.000.000,00				5.250.000,00
		Meningkatnya pengawasan makanan minuman industri rumah tangga yang beredar (Dinas Kesehatan) (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				5.000.000,00				5.250.000,00
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan							

		(Unit)							
		Pengawasan dan Pemeriksaan Post Market (Sarana)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*10*	*5.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*10*	5.250.000,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)***		***100***	**39.000.000,00**			***100***	40.950.000,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				28.580.000,00				30.009.000,00
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya promosi kesehatan (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.05.2.01. 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				28.580.000,00				30.009.000,00
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)							
		Promosi dan Advokasi (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*20*	*28.580.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*20*	30.009.000,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.420.000,00				10.941.000,00

		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gerakan hidup bersih dan sehat (%)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*100*				*100*	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				10.420.000,00				10.941.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)							
		Promosi PHBS (Dokumen)	*(Dinas Kesehatan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*14*	*10.420.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*14*	10.941.000,00
J U M L A H					**115.799.898.104,00**				**121.589.893.009,20**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan.

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 20 kegiatan dan 66 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	*2*	*3*
	1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**
	1.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
1.	**1.02.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.02.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
	1.02.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.*02.01.2.02.0001*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
	1.02.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
	1.02.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
	1.02.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
	1.02.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	1.02.01.2.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
	1.02.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*
	1.02.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
	1.02.01.2.08.0003	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
	1.02.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
	1.02.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
	1.02.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
2.	**1.02.02**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.01.0003	*Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya*
	1.02.02.2.01.0004	*Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0009	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas*
	1.02.02.2.01.0010	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya*
	1.02.02.2.01.0011	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0014	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0020	*Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*
	1.02.02.2.01.0023	*Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.02.0001	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*
	1.02.02.2.02.0002	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*
	1.02.02.2.02.0003	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*
	1.02.02.2.02.0004	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita*
	1.02.02.2.02.0005	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar*
	1.02.02.2.02.0006	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif*
	1.02.02.2.02.0007	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut*
	1.02.02.2.02.0008	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi*
	1.02.02.2.02.0009	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus*
	1.02.02.2.02.0010	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat*
	1.02.02.2.02.0011	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis*
	1.02.02.2.02.0012	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV*
	1.02.02.2.02.0013	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)*
	1.02.02.2.02.0014	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana*

	1.02.02.2.02.0015	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*
	1.02.02.2.02.0016	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*
	1.02.02.2.02.0017	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*
	1.02.02.2.02.0019	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya*
	1.02.02.2.02.0020	*Pengelolaan Surveilans Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0022	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA*
	1.02.02.2.02.0024	*Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan*
	1.02.02.2.02.0025	*Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*
	1.02.02.2.02.0028	*Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional*
	1.02.02.2.02.0029	*Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*
	1.02.02.2.02.0032	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*
	1.02.02.2.02.0033	*Operasional Pelayanan Puskesmas*
	1.02.02.2.02.0034	*Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*
	1.02.02.2.02.0035	*Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
	1.02.02.2.03.0002	*Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.04.0001	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya*
	1.02.02.2.04.0003	*Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*
3.	**1.02.03**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.01.0002	*Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.02.0003	*Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.03.0001	*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*
4.	**1.02.04**	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	1.02.04.2.01.0001	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	1.02.04.2.02.0001	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1*

		Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	1.02.04.2.03.0001	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	1.02.04.2.04.0001	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
	1.02.04.2.06.0001	*Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*
5.	**1.02.05**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.05.2.01.0001	*Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.05.2.02.0001	*Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 115.799.898.104,00 (Seratius Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah).** Rencana kerja berupa program, kegiatan dan pendanaan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	5	6	7	8
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**115.799.898.104,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**115.799.898.104,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**70.170.663.450,50**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			168.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			78.000.000,00	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*4*	*78.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.000.000,00	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*2*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*3*	*65.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48.445.485.660,70	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN			48.445.485.660,70	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*534*	*48.445.485.660,70*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.096.599.693,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			51.217.044,00	
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*4.685.360,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*1.976.880,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*10.810.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*

			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*7*	*12.498.318,00*	*Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*470.000,00*	*Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)	*1*	*4.685.360,00*	*Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*10.500.000,00*	*Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*1*	*3.614.246,00*	*Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)	*5*	*1.976.880,00*	*Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				669.284.790,00	
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*650.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*18.300.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*15.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*16.510.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*1.300.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*2.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*9.483.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*13.860.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*5.642.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*14.741.248,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*18.579.061,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*13.319.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*17.988.200,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*

			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*3.226.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*7.480.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*5.550.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*2.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*7.605.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*3.042.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*700.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*7.375.120,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*13.026.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*9.025.173,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*1.144.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*20.315.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*2.187.850,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)	*2*	*48.495.782,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*12*	*55.436.733,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Bungku Utara)	*1*	*100.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Pandauke,	*1*	*57.550.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*

		Mamosalato)			*Alokasi Umum*
		(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*1*	*9.700.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)	*1*	*51.996.873,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*6.552.100,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*6.552.100,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt.Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*4*	*10.501.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*0*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*4*	*81.949.100,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			123.460.263,00	
		(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*6.982.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*5.359.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*9.397.129,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*4*	*86.473.252,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*2*	*7.247.179,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)	*1*	*6.982.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt.Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*2*	*1.018.803,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			462.663.009,00	
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*6.780.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*1.050.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)	*1*	*7.536.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)	*1*	*18.141.050,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt.Puskesmas	*1*	*6.780.000,00*	*Dana Transfer*

			Anutoluwu, Petasia Barat)			*Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*26.913.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*1*	*2.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*71.540,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*3*	*38.063.169,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*24.390.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*5*	*60.483.650,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*18.141.050,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*1*	*69.483.650,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*4.386.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*20.829.200,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*2*	*126.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*11.428.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)	*2*	*10.183.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*10.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				789.974.587,00	
			(Kolonodale, Petasia)	*1*	*56.760.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*40.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*12.745.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)	*1*	*76.474.010,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan,	*11*	*327.198.777,00*	*Dana Transfer*

			Kab. Morowali Utara)			*Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Bungku Utara)	*1*	*92.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)	*1*	*59.598.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*1*	*13.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*14.334.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*2*	*28.325.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*1*	*39.538.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)	*1*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			69.467.983,00	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			-	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*1*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			17.812.000,00	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*1*	*17.812.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya			51.655.983,00	
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*2*	*9.155.983,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*2*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*3*	*22.500.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19.055.201.784,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			236.149.245,00	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*4*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*4*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*4*	*105.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*

			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*6.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*840.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*30.780.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*5.100.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*12.120.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*2.085.586,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt.Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*4*	*11.220.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)	*1*	*8.003.659,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				570.577.450,00	
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*66.420.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*18.360.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*17.160.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*1*	*212.325.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*31.320.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*59.081.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*9.005.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*14.946.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)	*2*	*33.358.700,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu,	*1*	*9.005.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*

		Petasia Barat)			*Alokasi Umum*
		(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*60.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*34.596.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*2*	*5.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.248.475.089,00	
		(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*70.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*28.250.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*31.063.700,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*22.427.250,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*2.295.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*2.920.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*450.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*360.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*324.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*84.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*147.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*10.350.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*224.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
		(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*12*	*14.263.413.321,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*

			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*513.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*12*	*150.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*99.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*360.575.278,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*198.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)	*1*	*198.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*1*	*147.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*1*	*442.984.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*25.600.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*94.596.540,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			335.908.329,80	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			251.424.944,00	
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Baturube, Bungku Utara)	*2*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)	*1*	*25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*2*	*40.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*2*	*22.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*14*	*30.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Pkm Panca Makmur, Soyo	*3*	*29.424.944,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*

			Jaya)			*Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya			20.796.764,80	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*20*	*9.600.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*9.100.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*4*	*2.096.764,80*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			63.686.621,00	
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*3.024.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*2*	*5.496.621,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*17.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*11*	*15.142.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)	*1*	*3.024.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*2*	*20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**45.504.809.453,50**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			7.202.469.589,00	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			970.000.000,00	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*2*	*770.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
			(Lembobelala, Lembobelala, Kec. Lembo Raya)	*1*	*200.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			-	
			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*0*		*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas			1.000.000.000,00	

			(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*1*	*1.000.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*1*	-	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*3*	600.000.000,00 *600.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*4*	301.799.000,00 *301.799.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*100*	34.822.500,00 *34.822.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	*(Dinas Kesehatan Daeah, Kab. Morowali Utara)* *(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*10* *20*	4.295.848.089,00 *4.295.848.089,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			38.012.339.864,50	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*2.397*	24.945.850,00 *24.945.850,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*2.562*	49.999.800,00 *49.999.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*2.662*	35.936.400,00 *35.936.400,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			20.074.550,00	

		(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*10.682*	*20.074.550,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14.252*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*66.470*	49.969.000,00 *49.969.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*10.770*	50.498.970,00 *50.498.970,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*30.894*	24.999.750,00 *24.999.750,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*7.984*	54.999.108,00 *54.999.108,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*314*	22.498.800,00 *22.498.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*383*	24.999.500,00 *24.999.500,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*3.275*	24.990.000,00 *24.990.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*1*	24.998.000,00 *24.998.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*1*	24.859.900,00 *24.859.900,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali*	*3*	23.426.550,00 *23.426.550,00*	*Dana Transfer Umum-Dana*

		Utara)			*Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*15*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14*	24.999.950,00 *24.999.950,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)* *(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)* *(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*1* *2* *1*	219.961.000,00 *195.000.000,00* *24.961.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan NAPZA	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*10*	27.499.850,00 *27.499.850,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*1*	24.949.000,00 *24.949.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14*	20.000.000,00 *20.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*46.274*	14.000.020.835,00 *14.000.020.835,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*10*	9.980.000,00 *9.980.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*3*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1.864.322.734,00	

		(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)	*1*	*1.864.322.734,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			17.381.676.106,50	
		(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*4.200.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*15.815.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*8.306.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*12.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*6.499.084,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*3.201.250,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*10.375.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*23.118.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*1.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*5.757.850,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*30.634.660,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*1.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*2.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*700.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*3.211.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*3.802.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*7.013.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*1.177.223,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
		(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*470.281,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*

			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*14.367.719,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*18.724.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*27.540.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*1.425.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*26.840.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*7.850.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*28.841.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*2.085.875,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*7.700.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*12.875.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*16.095.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*13.345.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*1.073.450,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*2.565.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*2.408.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*1.610.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*26.205.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*3.525.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*29.700.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*

			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*21.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*6.840.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*900.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*2.680.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*60.806.550,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*350.587.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*294.418.149,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*123.198.093,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*78.450.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*294.072.133,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*2.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*16.522.375,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*2.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*8.100.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*12.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*1.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*6.300.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*8.646.500,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas	*1*	*845.000,00*	*Pendapatan Dana*

			Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)			*Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Baturube, Baturube, Kec. Bungku Utara)	*1*	*100.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*21.900.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*29.200.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*45.633.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*1.570.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*14.190.540,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*50.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*26.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Lemo, Kec. Bungku Utara)	*1*	*1.950.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*10.010.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*2*	*15.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*3.650.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*19.500.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*9.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*40.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*8.912.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*10.170.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo	*1*	*6.552.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada*

			Raya)			*FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*9.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*2*	*30.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*15.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*9.750.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*26.380.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*3.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*1.485.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*8.020.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*53.400.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*81.403.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Kolonodale, Petasia)	*1*	*69.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Potowe Indo, Lijo, Kec. Mamosalato)	*1*	*28.380.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Kolonodale, Petasia)	*1*	*23.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*110.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*26.370.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*7.743.600,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*30.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*37.582.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*57.100.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*

			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*20.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*1*	*12.600.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*6.120.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*6.120.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*32.297.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*12.120.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Pandauke, Kec. Mamosalato)	*2*	*5.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*
			(Upt. Puskesmasanuntoluwu, Petasia Barat)	*1*	*130.000.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*381.948.033,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*430.254.336,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*321.761.526,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*	*13.100.000,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*1*	*192.572.379,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Pkm Mayumba, Mori Utara)	*1*	*916.178.464,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Puskesmas Baturube, Bungku Utara)	*1*	*1.249.736.880,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Puskesmas Lee, Mori Atas)	*1*	*681.811.900,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)	*1*	*948.409.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Puskesmas Tambayoli, Soyo Jaya)	*1*	*756.762.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*

			(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)	*1*	*892.003.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*	*768.877.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Upt Puskesmas Beteleme, Lembo)	*1*	*1.281.295.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Upt Puskesmas Kolonodale, Petasia)	*1*	*696.696.458,30*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Upt.Puskesmas Molino, Petasia Timur)	*1*		*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Upt Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)	*1*	*786.558.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Upt. Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*	*586.558.700,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*1*	*965.133.500,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
			(Puskesmas Baturube, Bungku Utara)	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Wongko Ndaya, Bungku Utara)	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt.Puskesmas Anutoluwu, Petasia Barat)	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Mayumba, Mori Utara)	*1*	*300.151.078,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Panca Makmur, Soyo Jaya)	*1*	*328.599.346,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Petumbea, Lembo Raya)	*1*		*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Upt Puskesmas Tomata, Mori Atas)	*1*	*568.685.300,00*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Pandauke, Mamosalato)	*1*	*419.186.374,20*	*Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP*
			(Puskesmas Potowe Indo, Mamosalato)	*1*	*950.864.000,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non*

						Fisik
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*1*	3.820.528.911,00 *3.820.528.911,00*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14*	36.205.300,00 *36.205.300,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			250.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)* *(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*2* *2*	250.000.000,00 *200.000.000,00* *50.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14*	15.000.000,00 *15.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14*	25.000.000,00 *25.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**44.547.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota			9.998.200,00	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*10*	9.998.200,00 *9.998.200,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota			24.378.800,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*3*	24.378.800,00 *24.378.800,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*

	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.170.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*7*	10.170.000,00 *10.170.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**40.878.200,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			19.949.600,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*15*	19.949.600,00 *19.949.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			5.498.600,00	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*2*	5.498.600,00 *5.498.600,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga			5.430.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*100*	5.430.000,00 *5.430.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa			5.000.000,00	

		Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)				
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*10*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			5.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*10*	5.000.000,00 *5.000.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**39.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.580.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*20*	28.580.000,00 *28.580.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.420.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	*(Dinas Kesehatan, Kab. Morowali Utara)*	*14*	10.420.000,00 *10.420.000,00*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan dinas kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam rangka merwujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera (SCS) dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, transparan dan akutabel.

Untuk menjaga efektifitas program dan kegiatan perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan preventif dan korektif yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.

Pada akhir tahun anggaran 2024 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diselesaikann maupun evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran organisasi.

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

a. Masalah kesehatan yang dihadapi di Indonesia cukup beragam termasuk di Kabupaten Morowali Utara.
b. Penemuan kasus terduga tuberkulosis harus menjadi perhatian, terutama pada kasus yang belum terdeteksi dengan bertambahnya populasi penduduk di lingkar tambang yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

c. Penanganan dan pencegahan stunting atau masalah gizi buruk disebabkan banyak faktor. Tidak hanya kurangnya asupan gizi, termasuk faktor lingkungan, seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan budaya. Sehingga perlu intervensi secara sensitif dan spesifik dengan melibatkan lintas sektor terkait.
d. Meningkatkan cakupan dan mutu Imunisasi Dasar Lengkap.
e. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam menghadapi penyakit yang berpotensi wabah/KLB.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada Renja Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Renja Dinas Kesehatan tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
b) Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 memfokuskan pada pecapaian target dari indikator SPM, IKK dan SDGs.
c) Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.
d) Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN. Dalam proses penyusunannya, Renja harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan RENSTRA Dinas Kesehatan).

5.3 Rencana tindak lanjut

Dari analisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan indikator SPM dan Indikator Kinerja Utama, rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas kesehatan melalui sosialisasi,

bimbingan teknis dan pelatihan.

b) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan termasuk pengelolaan kesehatan yang berbasis teknologi informasi.
c) Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset.
d) Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari bahwa dalam dokumen rencana kerja ini masih terdapat kekurangan/kelemahan yang membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan pembangunan secara berkualitas.

Morowali Utara, 17 Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH

ALNO BERNIAT, SKM.,M.Kes
NIP.19671115 199103 1 014

RANCANGAN RENCANA AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA AKHIR RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
(DPMPTSPD)
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatantahun 2024.

Rencana Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Daerah yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Daerah demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Akhir Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat member warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di KabupatenMorowali Utara.

Kolonodale, Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

ARMANSYAH A. P. S. Sos. Msi
Pembina Tingkat I, IV/c
Nip.19750220 200012 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiDPMPTSP

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintahan daerah perlu menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yangselanjutnya disebut Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD),sesuai dengan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)serta berpedoman pada Renstra.

Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran yang tidak terpisahkan dari Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dan Renstra Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Rancangan Renja-SKPD memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2024 yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan untuk periode satu tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi penanaman modal dan pengendalian investasi.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

2. Rancangan Akhir Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalamKUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakandalam Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja danAnggaran (RKA) tahun 2024.
3. Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahun sebelumnya sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat strategis dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejakawal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD harus mengacupada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan tetap berpedoman kepada Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rancangan Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Induk pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja SKPD harus selaras dengan program dankegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
4. Program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil(outcome), indicator kinerja keluaran(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan adanya upaya perbaikan dalam pelayanan perizinan dengan metode satu pintu juga merupakan langkah menuju terciptanya good governance, performance accountability dan public

service oriented dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada bidang perizinan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja (Rancangan Renja)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka PAnjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerinta Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2021-2025 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Rancangan Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Rancangan Akhir Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4. **Sistematika**

Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB.I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Rancangan Akhir Renja SKPD, Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD, Keterkaitan antara Rancangan Akhir Renja SKPD dengan Dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rancangan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Akhir Rencana Kerja tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, berisikan uraian mengenai isu-isu pentingdalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari SKPD langsung ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisi telahaan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan perioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Kabupaten Morowali Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RANCANGAN RENCANA AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan butuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2022

A. **Penetapan Indikator Kinerja.**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. **Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022 .**

Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara menerima anggaran sebesar Rp. **10.219.054.938**,- (Sepuluh Miliyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupian) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung diperuntukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **7.719.336.363,80**,- (Tujuh Miliyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 75,54%. Dengan ruang lingkup kegiatannya terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	7.022.756.545	5.235.482.488	75%

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.828.583	182.826.501	99%
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.604.900	16.604.800	100%
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	207.200.000	107.200.000	51%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.840.600	294.133.221	93%

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.826.624	73.935.177	71%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.282.012.000	853.426.000	67 %

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi

				(%)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	36.999.900	100%

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	31.612.700	29.621.100	93%
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	27.171.100	22.046.000	81%

3. Program Promosi Penanaman Modal

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	326.035.000	323.931.127	99%

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman	36.142.250	31.191.250	86%

	modal yang menjadi kewenangan daerah			

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal	53.854.886	53.746.250	99%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	421.832.000	330.159.200	78%

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Ralisasi	Realisasi (%)
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	154.137.750	126.833.350	82%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah

mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya.

Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada tahun 2022 dan Tahun Berjalan dapat diuraikan dalam Tabel 2.1 berikut ini

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2022 s/d TAHUN 2026

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD TAHUN 2023		
					TARGET RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	75%	**75%**	100%	**275%**	**100%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan antor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	99%	99%	100%	**299%**	**100%**
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	**300%**	**100%**
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	51%	51%	100%	**251%**	**100%**
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	93%	93%	100%	**293%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	**300%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	71%	71%	100%	**271%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	67%	67%	100%	**267%**	**100%**
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %	100%	**100%**	100%	**300%**	**100%**

				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	100 %	100%	100 %	93%	**93%**	100%	**293%**	**100%**
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100%	100 %	81%	**81%**	100%	**281%**	**100%**
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara	100 %	100%	100 %	99%	**99%**	100%	299%	100%
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Presentase Tercapainya Peningkatan Penanganan Masalah Pelayanan Publik	100 %	100%	100 %	86%	**86%**	100%	**286%**	**100%**
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara	100 %	100%	100 %	99%	**99%**	100%	**299%**	**100%**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara	100 %	100%	100 %	78%	**78%**	100%	**278%**	**100%**
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100 %	100%	100 %	82%	82%	100%	**282%**	**100%**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Morowali Utara tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD;
b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada Rencana Akhir Rencana Kerja SKPD.
d. Perencanaan program/kegiatan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunansecara keseluruhan.
e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPD dalam pencapaian indikator kinerja DPMPTSPD maupun Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak didukung dengan system kerja stakeholder pendukung, sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah , maka pada tahun 2024 DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Menyusun perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pembangunan dalam rangka

mewujudkan produk perencanaan yang efektif dan efisien, adalah:

- Menyusun rencana pembangunan daerah yang inovatif, responsive dan partisipatif.
- Meningkatkan koordinasi, baik antar SKPD, antar pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan.

Kebijakan :

- Menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara komprehensif pada tiap tahapan dan jangka pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
- Mengoptimalkan terlaksananya program pembangunan lintas SKPD di Kabupaten Morowali Utara dan Kerjasama dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana dengan daerah lain secara sinergis dan terpadu.

2) Strategi untuk meningkatkan basis data perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, adalah:
   - Menyediakan data/informasi statistik guna kebutuhan penyusunan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
   - Memaksimalkan proses evaluasi dan pengendalian yang koordinatif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

   Kebijakan :
   - Menyediakan Informasi/data statistik untuk kebutuhan perencanaan.
   - Melaksanakan dan mengintensifkan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
3) Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan, adalah:
   - Meningkatkan fungsi peneiitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan pembangunan

   Kebijakan:
   - Mengoptimalkan kegiatan pengakajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan, adalah :

- Memfasilitasi pelayanan prima kepada stakeholders, lintas SKPD dan listas kewilayahan.

  Kebijakan:
- Menyediakan sarana dan prasarana kantor dan komponen pendukung operasional.

5) Strategi untuk mewujudkan misi kelima : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan, adalah :
   - Melaksanakan capacity building SDM perencanaan pembangunan, memperluas wawasan dalam bidang perencanaan pembangunan.

     Kebijakan :
   - Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan perencanaan pembangunan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPTSPD

Berisikan kajian capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah di tentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakana tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2024. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebanyak 6 (Enam) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diuapayan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode tahun 2022 memaparkan capaian kinerja dalam bidang keuangan yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yeng telah dikelola dan menjadi keharusan setiap tahun untuk dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah in

Tabel 2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		100%	100%	100%	100%	75%	-	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		100%	100%	100%	100%	99%	-	100%	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun		100%	100%	100%	100%	51%		100%	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	93%		100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tahun		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun		100%	100%	100%	100%	71%		100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun		100%	100%	100%	100%	67%		100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		100%	100%	100%	100%	100		100%	100%	
									-			
II	**Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah**											
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	93%	-	100%	100%	
III	**Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**											
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	81%	-	100%	100%	
IV	**Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali**											

	Utara											
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	99%	-	100%	100%	
V	**Presentase Tercapainya Peningkatan Penanganan Masalah Pelayanan Publik**											
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	86%	-	100%	100%	
VI	**Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara**											
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	99%	-	100%	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	78%	-	100%	100%	
VII	**Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan**											

	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan											
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan		100%	100%	100%	100%	82%	-	100%	100%	

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DPMPTSPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja, dan kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka isu aktual yang berkembang saat ini adalah

1. Belum optimalnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola pelayanan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa indikator pelayanan publik.
2. Belum optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal

Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum di gunakan adalah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Uhit Pelayanan Publik. Berdasarkam isu tersebut, sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengelola pelayanan publik di bidang perizinan serta peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal.

Pencermatan dinamika lingkungan eksternal dan internal, maka kedepan dapat diidentifikasin beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih menfokuskan strategi oragnisasi dalam rangka pencapain tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Ada beberapa faktor faktor kunci yang sangat berpengaruh terhadapa keberhasilan pelaksanaan tugas an fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang.
2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi.
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan pelayanan perizinan, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah.

4. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional yang jelas.
5. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi dibidang penanaman modal.
6. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rancangan Renja DPMPTSPD dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan RKPD.

Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja SKPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Akhir Rencana Kerja DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 pada Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan RKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015.

Review terhadap Rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3dibawah ini:

Tabel 2.3 (T.C.31)

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

NO	RANCANGAN SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRORAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	5.017.274.814	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		5.017.274.814	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					

	Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	111.083.163	Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		111.083.163	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	29.700.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		29.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	313.330.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	109.239.136	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	109.239.136	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	587.670.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	587.670.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**					

						Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemilaharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Jabatan		Presentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemilaharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Jabatan		Presentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	65.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100 %	49.829.516	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	49.829.516	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**					
	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Presentase terlaksanya pengembangan potensi unggulan daerah	100 %	54.305.900	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Presentase terlaksanya pengembangan potensi unggulan daerah	100%	54.305.900	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Presentase keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan promosi	100 %	412.062.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Presentase keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan promosi	100%	412.062.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	100 %	57.441.700	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	100%	57.441.700	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 %	159.323.500	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100%	159.323.500	

			Terintegrasi secara Elektronik					Terintegrasi secara Elektronik			
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten /Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 %	77.217.600,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100%	77.217.600,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan	100 %	203.370.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan	100%	203.370.000	

			Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 %	307.522.664	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100%	307.522.664	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM**					

						INFORMASI PENANAMAN MODAL					
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Presentase tercapainya hasil data perizinan yang akurat setiap tahun	100 %	66.978.900,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Presentase tercapainya hasil data perizinan yang akurat setiap tahun	100%	66.978.900,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Morowali Utara yang berupaya semaksimal mungkin menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara . Untuk menunjang kegiatan pelayanan yang masksimal, maka pada DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar kantor	100%	rapat-rapat koordinasi
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	DPMPTSP	Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	Pemenuhan gaji dan tunjangan PNS
3	**Administrasi Umum**				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPTSP	Presentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Service kendaraan dan biaya STNK kendaraan dinas
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPMPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Biaya perbaikan peralatan kerja
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan kebutuhan kantor berupa ATK
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan biaya foto copy dan cetak amplop

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Penyediaan printer, laptop dan alat kantor lainnya
	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPMPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan biaya makan dan minum rapat dan pertemuan lainnya
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Provinsi, Pusat dan daerah lainnya	Presentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar kantor	100%	Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, Pusat dan daerah lainnya.
4	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPMPTSP	Presentase tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	100%	Pemenuhan pakaian dinas harian warna Khaki
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Presentase tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	100%	Pemenuhan pakaian dinas harian warna Khaki
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan	100%	Penyediaan printer, laptop dan

			perlengkapan kantor		alat kantor lainnya
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan bahan logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan biaya foto copy dan cetak amplop
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi, Pusat dan daerah lainnya	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar kantor	100%	Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, Pusat dan daerah lainnya.
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Presentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Service kendaraan dan biaya STNK kendaraan dinas
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
10	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Presentase tersedianya data dan informasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	100%	Pemberian insentif kemudahan penanaman modal
11	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Presentase tersedianya data dan informasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	100%	Pemberian insentif kemudahan penanaman modal
12	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Presentase terlaksanya pengembangan potensi unggulan daerah	100%	Pembuatan Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten

					Morowali Utara
13	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Presentase terlaksananya Pengembangan potensi unggulan daerah	100%	Pembuatan Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten Morowali Utara
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
14	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara	Presentase keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan promosi	100%	Mengikuti kegiatan pameran di Provnsi, Pusat dan daerah lainnya
15	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara	Presentase keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan promosi	100%	Mengikuti kegiatan pameran di Provnsi, Pusat dan daerah lainnya
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
16	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				

	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Presentase penanganan pengaduan masyarakat tentang perizinan dan non perizinan	100%	Pemenuhan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat
17	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Presentase penanganan pengaduan masyarakat tentang perizinan dan non perizinan	100%	Pemenuhan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
18	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Morowali Utara	Presentase tersedianya referensi untuk evaluasi dan penyusunan rencana investasi	100%	Pengawasan pelaksanan Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara
19	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Morowali Utara	Presentase tersedianya referensi untuk evaluasi dan penyusunan rencana investasi	100%	Pengawasan pelaksanan Penanaman Modal di Kabupaten Morowali Utara
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
20	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Presentase tercapainya hasil data perizinan yang akurat setiap tahun	100%	Proses perizinan melalaui OSS
	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
21	Pengolahan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Presentase tercapainya hasil data perizinan yang akurat setiap tahun	100%	Proses perizinan melalaui OSS

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah.Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Melihat kondisi tersebut diatas DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antara daerah, antar fungsi pemerintah maupun pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksana dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, sfektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pembangunan dalam rangka mewujudkan produk perencanaan yang efektif dan efisien;

   Tujuan :

   - Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif, responsive dan partisipatif
   - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip good governance.

   Sasaran :

   - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
   - Terwujudnya efektifitas mekanisme koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan Terwujudnya program pembangunan lintas sektoral / SKPD dan lintas daerah secara sinergis, sistematik dan terpadu.

2. Meningkatkan basis data perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;

   Tujuan :

   - Meningkatnya penyajian informasi data statistik daerah yang cepat, tepat dan akurat
   - Meningkatnya kualitas dan kuantitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

   Sasaran :

   - Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas data pembangunan.
   - Terwujudnya peningkatan hasil penilaian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari tahun ke tahun.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan;

   Tujuan :

   Meningkatnya pelayanan prima kepada stakeholders, lintas SKPD dan lintas kewilayahan.

   Sasaran :

   Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor dan komponen pendukung operasional.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur.

   Tujuan :

   Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur.

   Sasaran :

   Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur/

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah KabupatenMorowali Utara, maka kegiatan yang dilaksanakan lebih mengarah kepada pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui invetasi penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 6 Program dan 12 kegiatanyang dilaksanakan di dalam dan luar daerah Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 terdiri dari :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3) Program promosi Penanaman Modal
4) Program Pelayanan Penanaman Modal
5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6) Program Pengelolaan Data dan sistem informasi penanaman Modal

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	HasilKegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**7.621.348.993**					**6.980.216.805**
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.233.297.213**					**6.254.894.984**
2	**18**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.017.274.814**					**4.015.469.849**
2	18	1	2,02	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji danTunjangan ASN		100 Persen	34 Orang/ bulan	100 persen	5.017.274.814	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.017.274.814
2	**18**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**454.113.263**					**467.271.175**
2	18	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	4 Paket	100 persen	111.083.163	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	140.821.020

2	18	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	4 Paket	100 persen	. 29.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	. 18.672.742
2	18	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	150 Laporan	100 persen	313.330.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	307.777.413
2	**18**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**696.909.136**					**728.729.027**
2	18	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		100 Persen	12 Laporan	100 persen	109.239.136	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	18.936.470
2	18	1	2,08	4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		100 Persen	12 Laporan	100 persen	587.670.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	709.792.557
2	18	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								65.000.000					41.619.968

2	18	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 Persen	15 Unit	100 persen	65.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	41.619.968
2	18	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								104.135.416					104.135.416
2	18	2	2,01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								49.829.516					49.829.516
2	18	2	2,01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi;/ Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	49.829.516		100 Persen	20 Kegiatan Usaha	100 persen	49.829.516	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi;/ Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	100 Persen	49.829.516
2	18	2	2,02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								54.305.900					54.305.900

2	18	2	2,02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi;/ Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	1 Dokumen	100 persen	54.305.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi;/ Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	100 Persen	54.305.900
2	18	3			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								469.503.700					150.707.028
2	18	3	2,01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								469.503.700					150.707.028
2	18	3	2,01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara		100 Persen	2 Dokumen	100 persen	57.441.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100 Persen	57.441.700
2	18	3	2,01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara		100 Persen	2 Dokumen	100 persen	412.062.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100 Persen	150.707.028
2	18	4			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								236.541.100					21.678.595

2	18	4	2,01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								236.541.100				21.678.595
2	18	4	2,01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Presentase Tercapainya Peningkatan Penanganan Masalah Pelayanan Publik		100 Persen	50 PelakuUsaha	100 persen	159.323.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	100 Persen	21.678.595
2	18	4	2,01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap PelayananTerpadu Perizinan dan NonPerizinan	Presentase Tercapainya Peningkatan Penanganan Masalah Pelayanan Publik		100 Persen	50 Orang	100 persen	77.217.600,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	100 Persen	77.217.600,00
2	18	5			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								510.892.664				527.515.397
2	18	5	2,01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								510.892.664				527.515.397
2	18	5	2,01	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara		100` Persen	50 PelakuUsaha	100 persen	203.370.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100` Persen	60.596.725

2	18	5	2,01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Presentase Tercapainya Minat Investor untuk Berinvestasi di Wilayah Kabupaten Morowali Utara		100` Persen	10 Kegiatan Usaha	100 persen	307.522.664	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100` Persen	466.918.672
2	18	6			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**								66.978.900					25.420.801
2	18	6	2,01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								66.978.900					25.420.801
2	18	6	2,01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		100 Persen	5 Dokumen	100 persen	66.978.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan kualitas pelayanan publik	100 Persen	25.420.801
TOTAL													7.621.348.993					6.980.216.805

BAB IV

RANCANGAN RENCANA AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 telah menyusun Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja yang terdiri dari 6 Program dan 10 kegiatan.

Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja tersebut di akan dilaksanakan di dalam dan diluar wilayah Kabupaten Morowali Utara. Tahap awal kegiatan yang dilaksanakan adalah pendataan di kecamatan, selanjutnya data tersebut akan dievaluasi untuk menentukan tindak lanjut untuk masing-masing kegiatan.

Pendanaan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah Kabupaten Morowali Utara, seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali UtaraTahun 2024.

Rancangan Rencan Kerja dan pendanaan tahun 2024 dilaksanakan dalam bentuk Program dan kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.621.348.993 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 6.233.297.213
2. Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Rp. 104.135.416
3. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 469.503.700
4. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 236.541.100
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 510.892.664
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 66.978.900

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Renja DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DPMPTSPD. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rancangan Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara. Rancangan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Renja DPMPTSPD ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf DPMPTSPD.Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur, melalui pemberian dukungan penuh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tupoksi.

Demikian Rancangan Rencana Akhir Rencana Kerja DPMPTSPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024, semoga mampu meningkatkan kinerja DPMPTSPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

ARMANSYAH A. P. S. Sos. Msi
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip.19750220 200012 1 005

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA



BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanakan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Rancangan Akhir OPD terdiri dari 3 tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Rancangan Akhir Renja OPD. Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Akhir Renja OPD yang definitif.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Akhir Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Akhir Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun sebelumnya sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Morowali Utara harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat dituntut untuk mampu membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hokum Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repunlik Indonesia) Tahun 2014 nomor Tambahan Negara Lembaran Negara Republik nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang- undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021.
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
c. Rancangan Akhir Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
d. Rancangan Akhir Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat T.A. 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	6	11	183%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Akhir Renja dan pencapaian Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sampai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel. 2 T.C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program pelayanan administrasi perkantoran	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**100%**	**99,51%**	**100%**	**95,42%**	**95,42%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kelnacaran Administrasi Perkantoran	100%	99,90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	99,79%	100%	98,65%	98,65%	100%	100%	100%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%	98,84%	100%	87,61%	87,61%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien**	**100%**	**80,95%**	**100%**	**62,50%**	**62,50%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Dinas	Tersedianya Sarana dan Prasarana administrasi yang Memadai pada Bagian Kesra	100%	80,95%	100%	62,50%	62,50%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kamampuan Sumber Daya Aparatur	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	**Prosentase Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**	**100%**	**58,24%**	**100%**	**63,74%**	**63,74%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Kegiatan STQ/MTQ Tkt. Kab. Dan Tkt Provinsi	Terlaksananya kegiatan STQ/MTQ Tkt. Kab. Dan Tkt.	100%	99,57%	100%	94,94%	94,94%	100%	100%	100%
	Kegiatan Safari Ramadhan dsan Halal bi Halal	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan dsan Halal bi Halal	100%	66,29%	100%	90,81%	90,81%	100%	100%	100%

				Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Terlaknasanya Kegiatan Pembinaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Isra Mi'raj, Nuzul Qur'an, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam Dan Natal	100%	96,00 %	100%	88,37%	88,37%	100%	100%	100%
				Kegiatan Pelayanan Jamaah Haji	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Jamaah Haji	100%	0,00 %	100%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%
				Kegiatan Pelaksanaan Pesparawi	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pesparawi	100%	0,00 %	100%	94,65%	94,65%	100%	100%	100%
				Kegiatan Utsawa Dharma Gita	Terlaksananya Kegiatan Utsawa Dharma Gita	100%	87,30 %	100%	84,88%	84,88%	100%	100%	100%
				Operasional Organisasi Keagamaan	Terlaksananya Operasional Organisasi Keagamaan,MUI, BAMAG, LPPTQ, LPPD, LPDG, KOMDA ALKHAIRAT, REMAJA MESJID, PEMUDA GEREJA	100%	37,50 %	100%	94,98%	94,98%	100%	100%	100%
				Operasional Baznas	Terlaksananya Operasional Baznas	100%	95,83 %	100%	88,79%	88,79%	100%	100%	100%
				Kegiatan Wisata Rohani	Terpenuhinya Kegiatan Wisata Rohani	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%
				Kegiatan Umroh Imam	Terpenuhinya Kegiatan Umroh Imam	100%	0,00 %	100%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%
				Tim Pemantau Haji Daerah	Terpenuhinya Tim Pemantau Haji Daerah	100%	0%	100%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Bagian Kesrejahteraan Rakyat merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mempuyai tugas yaitu Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan di Bidang Peralatan dan perlengkapan kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kualitas kehidupan beragama sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 10).

Adapun gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Kesrejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3 T.C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra (%)					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anlisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	100	100	100	100	99,48%	99,90%	100	100	
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	100	100	100	100	100%	99,79%	100	100	
3	Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			100	100	100	100	100	100%	98,84%	100	100	
4	Lancarnya Operasional Kantor			100	100	100	100	100	91,67%%	80,95%	100	100	
5	Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ Tingkat kab Dan propinsi			100	100	100	100	100	83,58%	99,57%	100	100	
6	Terlaksananya kegiatan safari Ramadhan dan Halal bi Halal			100	100	100	100	100	97,15%	66,29%	100	100	
7	Terlaksananya kegiatan peringatan Hari-hari besar keagamaan			100	100	100	100	100	64,18%	96,00%	100	100	
8	Terlaksananya kegiatan pelayanan jamaah haji			100	100	100	100	100	64,09%	0,00%	100	100	
9	Terlaksananya kegiatan Pesparawi			100	100	100	100	100	94,63%	0,00%	100	100	
10	Terlaksananya kegiatan Utsawa Dharma Gita			100	100	100	100	100	100%	87,30%	100	100	
11	Terlaksananya Operasional organisasi keagamaan			100	100	100	100	100	99,86%	37,50%	100	100	
12	Terlaksananya Operasional BAZNAS			100	100	100	100	100	100%	95,83%	100	100	
13	Terpenuhinya pelaksanaan wisata Rohani			100	100	100	100	100	66,67%	100%	100	100	
14	Terlaksananya Pelaksanaan Umrah Imam			100	100	100	100	100	100%	0,00%	100	100	
15	Terpenuhinya Tim Pemantau haji Daerah			100	100	100	100	100	100%	0%	100	100	

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing sub bagian.
- Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
- Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
- Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan Bagian Kesra dan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Melihat pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Mengikuti diklat, seminar dan workshop sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara mengusulkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.883.487.735,00,-. Namun untuk sementara total pagu T.A 2024 yang disetujui adalah sebesar Rp. 14.883.487.735,00,-. Hasil analisis dari total pagu yang di setujui disajikan pada tabel berikut :

Tabel.4 T.C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						14.883.487.735,00							5.266.686.912,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						14.883.487.735,00							5.266.686.912,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						14.883.487.735,00							5.266.686.912,00	
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-			-	801.064.500,00						-	0,00	
	4	01	01	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% 100% 100% 100Persen 100% 100%			-	365.814.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN	100% 100% 100% 100Persen 100% 100%	0,00	
	4	01	01	2.	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	48.068.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	68.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	249.746.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100% 100% 100Persen			-	41.640.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN	100% 100% 100Persen	0,00	

	4	01	01	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	41.640.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100Persen 100% 100% 100% 100%			-	364.610.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN	100Persen 100% 100% 100% 100%	0,00	
	4	01	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	364.610.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% 100Persen 100% 100%			-	29.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 100Persen 100% 100%	0,00	

	4	01	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	29.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	-	-			-	14.082.423.235,00						-	5.266.686.912,00	
	4	01	02	2. 02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	14.082.423.235,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kelompok Masyarakat	-	5.266.686.912,00	
	4	01	02	2.	00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100 Dokumen	14.082.423.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kelompok Masyarakat		5.266.686.912,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
											J U M L A H	**14.883.487.735,00**							**5.266.686.912,00**	

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Bagian Kesejahteraan menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipasif. Keterpaduan proses perencaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah – olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan – tahapan Musrembang sendiri meliputi Musrembang tingkat RT/RW, Musrembang tingkat kelurahan, Musrembang Tingkat Kecamatan dan Musrembang tingkat Kabupaten. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan Musrembang yang telah dilakukan setiap tahunnnya diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar – benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil usulan musrembang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja OPD yang nantinya Rancangan Awal Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Rancangan Awal Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara.

Tabel.4 T.C. 31

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS SATU (1)
KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI (DESA/KEL)	VOLUME	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
1	*P1*		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PAGAR MESJID	KEAMANAN RUMAH IBADAH	KOLO ATAS	60 M	Rp 250.000.000	KESRA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rancana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut harus Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal

7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rancangan Awal Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2021 – 2026, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Seiring tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dalam RPJDM Kabupaten Morowali Utara, Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Ke-6 yaitu **“Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.”**

Dari rumusan diatas maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi, yaitu **“*Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang berkualitas.*”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan kegiatan keagamaan yang profesional dengan senantiasa menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENJA SKPD

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah :

a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2024 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2024 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran tahun 2025.
b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama 1 (satu) tahun mendatang.

Sasaran Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah :

a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025.
b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu dan tertibnya administrasi Kesejahteraan Rakyat
c. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
d. Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2022 menetapkan 2 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 4 Kegiatan Serta 7 Sub Kegiatan Adapun Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental terbagi beberapa bagian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Sub Kegiatan
     - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Sub Kegiatan
     - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- **Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
  1. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental
     - Jumlah Jamaah Haji
     - Jumlah TPHD Berangkat Ke Arab Saudi
     - Jumlah Umrah Imam Berangkat Ke Arab Saudi
     - Jumlah Wisata Rohani berangkat Ke Yerusalem
     - Persentase Kegiatan Pesparawi
     - Persentase Kegiatan Safari Ramadhan dan Halal Bi Halal daerah
     - Safari Natal Daerah
     - Persentase Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten
     - Persentase Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi
     - Persentase Kegiatan Utsawa Dharma Gita Tkt. Provinsi Lainnya
     - Persentase Operasional BAZNAZ
     - Persentase Operasional Organisasi Keagamaan, MUI, BAMAG, LPPTQ, LPPD, LPDG, KOMDA ALKHAIRAT, REMAJA MASJID, PEMUDA GEREJA, PHBI
     - Presentase Hari - Hari Besar Keagamaan : Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun Baru Islam dan Natal Pemda
     - Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat (guru mengaji, imam dan pegawai syara') Pendeta dan Pemangku
     - Presentase Pelatihan Kifayah
     - Penyerahan Bahan Pada Pihak Ketiga
     - Dialog Antar Umat Beragama
     - Kemah Lintas Agama
     -

Adapun rencana program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat T.A. 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.5 T.C. 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						14.883.487.735,00							5.266.686.912,0	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						14.883.487.735,00							5.266.686.912,00	
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH						14.883.487.735,00							5.266.686.912,00	
1	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	801.064.500,00						-	0,00	
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% 100% 100% 100Persen 100% 100%			-	365.814.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN	100% 100% 100% 100Persen 100% 100%	0,00	
	4 01 01 2.0 00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	48.068.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4 01 01 2.0 00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	68.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	4	01	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	249.746.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100% 100% 100Persen			-	41.640.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN	100% 100% 100Persen	0,00	
	4	01	01	2.0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	41.640.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100Persen 100% 100% 100% 100%			-	364.610.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN	100Persen 100% 100% 100% 100%	0,00	

	4	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	364.610.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% 100Persen 100% 100%			-	29.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 100Persen 100% 100%	0,00	
	4	01	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	29.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	14.082.423.235,00						-	5.266.686.912,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	14.082.423.235,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kelompok Masyarakat	-	5.266.686.912,00	
	4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100 Dokumen	14.082.423.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kelompok Masyarakat		5.266.686.912,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
										JUMLAH	**14.883.487.735,00**							**5.266.686.912,00**	

BAB IV
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						14.883.487.735,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						14.883.487.735,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						14.883.487.735,00		
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	801.064.500,00		
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% 100% 100% 100Persen 100% 100%			-	365.814.500,00		
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	48.068.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	68.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	249.746.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100% 100% 100Persen			-	41.640.000,00		
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	41.640.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100Persen 100% 100% 100% 100%			-	364.610.000,00		

	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	364.610.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% 100Persen 100% 100%			-	29.000.000,00		
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	29.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	14.082.423.235,00		
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	14.082.423.235,00		
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100 Dokumen	14.082.423.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H											**14.883.487.735,00**		

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,

SAHARUDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

BAB V
P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2025, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi,misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya, Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel

Kolonodale, Juli 2024

Kepala Bagian
Kesehahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Morowali Utara,

BAHARUDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Kuda Laut No. Fax Kolonodale

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR : 821.29 / /SET-DPRD/X/2023

T E N T A N G

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari tahapan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Morowali Utara tentang Rancangan Akhir rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Pasal 1

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul Rencana Strategi mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran program kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;

b. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Perangkat Daerah (PD) adalah Unit Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari induk Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Organisasi;
e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
f. Tujuan adalah suatu sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai dalam jangka waktu tertentu;
g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan, sasaran yang sama dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistematika penulisan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V Penutup

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
Padatanggal : Oktober 2023

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIS,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 1968060 2199503 1 003

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara perlu adanya perencanaan yang matang dan sistematis agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar, oleh karena itu setiap Perangkat Daerah (PD) harus mempunyai perencanaan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Perencanaan tersebut baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) untuk dijadikan sebagai dasar-dasar pelaksanaan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara lebih terarah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat meraih hasil yang optimal.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini, serta diharapkan semua pihak bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara bisa berjalan dengan sukses.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah dan keberkahan pada kita semua. Amin

Kolonodale, Oktober 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Morowali Utara,



Heltan Ransa, SH
Nip. 19680602 199503 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....

Daftar Isi .....

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang .....

I.2. Landasan Hukum .....

I.3. Maksud dan Tujuan .....

I.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....

2.4. Review Terhadap Rancangan Tahun .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....

3.3. Program dan Kegiatan .....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB V PENUTUP .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025, dan Isu-isu strategis Rancangan Teknokratik Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025, menjadi pedoman/acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 dan Isu-isu strategis Rancangan Teknokratik Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan menuju Morowali Utara Maju dan Terdepan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Set-DPRD Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Rancangan Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB.I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun dan Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD sejauh mana tingkat pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs *(Suistanable Development Goals),* tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Perangkat Daerah langsung ditujukan kepada Sekretariat DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisikan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKERTARIAT DPRD TAHUN 2022

Renja SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2022.

A. Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara menerima anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 38.971.460.358,- (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung diperuntukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 38.182.571.993,- ; dengan capaian kinerja keuangan sebesar 87,52%. Dengan ruang lingkup kegiatannya terdiri atas:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

     Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.692.544.731 dan terealisasi sebesar Rp. 2.617.696.831, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Sosialisasi Peraturan Per-UU

     Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Per-UU memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 67.806.000 dan terealisasi sebesar Rp. 67.806.000, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  2. Bimbingan Teknis Implementasi Per-UU

     Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Per-UU memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 205.896.000 dan terealisasi sebesar Rp. 190.896.000, dengan capaian kinerja sebesar 83,34%.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

     Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.964.756 dan terealisasi sebesar Rp. 33.963.632, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

     Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terdiri dari perabot kantor, pengadaan cendera mata, pengadaan pakaian olahraga dan belanja modal kendaraan bermotormemiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 972.306.964 dan terealisasi sebesar Rp. 753.070.417, dengan capaian kinerja sebesar 90,38%.
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

     Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terdiri dari pengadaan alat listrik, pengadaan mebel, pengadaan alat pendingin, pengadaan alat dapur, pengadaan alat rumah tangga lainnya dan pengadaan lukisan/ukiran memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 117.090.520 dan terealisasi sebesar Rp. 95.711.279, dengan capaian kinerja sebesar 63,64%.
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

     Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terdiri dari pengadaan alat tulis kantor, pengadaan kertas dan coverdan pengadaan bahan komputer memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 170.791.500 dan terealisasi sebesar Rp. 170.736.900, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  5. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan

     Sub Kegiatan Bahan Cetakan dan Penggadaan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 65.423.065 dan terealisasi sebesar Rp. 65.376.550, dengan capaian kinerja sebesar 99,92%.

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU

   Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU yang terdiri dari pengadaan alat tulis kantor dan bahan cetak memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 54.986.250 dan terealisasi sebesar Rp. 54.674.100, dengan capaian kinerja sebesar 99,12%.

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terdiri dari perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.163.334.700 dan terealisasi sebesar Rp. 1.152.910.176, dengan capaian kinerja sebesar 99,12%.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

   Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang terdiri dari pengadaan belanja modal lemari arsip dan meja rapat memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.258.750 dan terealisasi sebesar Rp. 18.255.000, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terdiri dari pembangunan kantor baru DPRD dan Mesjid Kantor DPRD memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.969.997.204 dan terealisasi sebesar Rp. 6.954.930.586, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terdiri dari pembelian materai memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.495.000, dengan capaian kinerja sebesar 99,85%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terdiri dari belanja bahan cetak, tagihan listrik, pembayaran surat kabar, internet dan TV berlangganan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 382.781.320 dan terealisasi sebesar Rp. 368.252.261, dengan capaian kinerja sebesar 96,82%.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terdiri dari belanja pakan natura dan belanja makanan dan minuman memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 485.599.500 dan terealisasi sebesar Rp. 485.542.500, dengan capaian kinerja sebesar 99,99%.

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari uang makan lembur dan lembur ASN dan Non ASN, belanja jasa tenaga administrasi, jasa tenaga operator komputer, jasa tenaga pelayanan umum, jasa tenaga ahli, jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga juru masak memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.003.676.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.968.559.000, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terdiri dari belanja pemeliharaan dan pajak kendaran dinas Pimpinan DPRD masak memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.882.248, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terdiri dari belanja bahan bakar, pemeliharaan dan pajak kendaran dinas bermotor perorangan dan kendaraan dinas bermotor beroda dua memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 227.822.000 dan terealisasi sebesar Rp. 196.039.801, dengan capaian kinerja sebesar 81,93%.

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terdiri dari belanja pemeliharaan sarana kantor berupa genset, personal komputer, AC dan printer memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.320.000dan terealisasi sebesar Rp. 37.320.000, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terdiri dari belanja pemeliharaan sarana gedung kantor, rujab Pimpinan DPRD memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 456.906.800 dan terealisasi sebesar Rp. 416.117.000, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Kegiatan Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD
  1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

     Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.072.286.348 dan terealisasi sebesar Rp. 11.072.286.348, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

     Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang terdiri dari belanja Pakaian dan atribut DPRD, Pakaian Adat Daerah dan Pakaian Olahraga memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 349.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 317.494.696, dengan capaian kinerja sebesar 88%.
  3. Pelaksanaan Medical Check Up

     Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up yang terdiri dari belanja medical check up Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 62.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.961.000, dengan capaian kinerja sebesar 24%.
- Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
  1. Fasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

     Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terdiri dari belanja bahan cetak dan belanja makanan dan minuman memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 361.085.000 dan terealisasi sebesar Rp. 360.671.950, dengan capaian kinerja sebesar 99,94%.
  2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

     Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang terdiri dari belanja natura dan pakan lainnya untuk Pimpinan DPRD memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.140.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.140.000.000, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

     Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari belanja bahan cetak, belanja makanan dan minuman, belanja jasa honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 939.409.000 dan terealisasi sebesar Rp. 938.067.950, dengan capaian kinerja sebesar 88,59%.
- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
  1. Pembahasan KUA dan PPAS

     Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS yang terdiri dari belanja bahan cetak dan belanja makanan dan minuman memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 79.813.500 dan terealisasi sebesar Rp. 74.298.000, dengan capaian kinerja sebesar 49%.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
  1. Pendalaman Tugas DPRD

     Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD yang terdiri dari belanja bahan bimbingan teknis dan belanja perjalanan dinas memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.455.005.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.299.986.440, dengan capaian kinerja sebesar 53,15%.
  2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

     Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang terdiri dari belanja langganan surat kabar memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 241.088.288, dengan capaian kinerja sebesar 96,60%.
- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

     Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam daerah memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 482.927.100 dan terealisasi sebesar Rp. 425.117.684, dengan capaian kinerja sebesar 87,42%.
  2. Pelaksanaan RESES

     Sub Kegiatan Pelaksanaan RESES yang terdiri dari belanja barang pakai habis dan belanja perjalanan dinas dalam daerah memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.332.274.350 dan

terealisasi sebesar Rp. 1.332.274.350, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Kegiatan Fasilitasi DPRD
    1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

       Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terdiri dari belanja perjalanan dinas memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.234.154.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.233.090.006, dengan capaian kinerja sebesar 99,75%.

Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan usulan sebesar Rp. 38.971.460.358,- yang terbagi dari Belanja Operasi Rp. 31.337.261.882,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 13.764.831.079 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.572.430.803 dan Belanja Modal Rp. 7.634.198.475,- yang terurai dalam 2 program, 13 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dan Tahun Berjalan dapat diuraikan dalam tabel T-C.29 berikut ini berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara

No.Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th 2022			Target Program /Kegiatan RKPD Th 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJM s/d Th 2023		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Th 2022	Realisasi RKPD Th 2022	Persentase Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Program dan Kegiatan s/d Th 2023 (%)	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7/6*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11 = 10/4*	*12*
4															
4	02														
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	94%	93.77%	100%	193.77%	193.77%	

4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Hak-Hak ASN**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**300.00%**	**300.00%**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	300.00%	300.00%	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**	**100%**		**100%**	**92%**	**91.67%**	**100%**	**191.67%**	**191.67%**	
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	100%		100%	100%	100.00%	100%	200.00%	200.00%	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	91.67%	100%	83.34%	83.34%	100%	275.01%	275.01%	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**100%**		**100%**	**93%**	**93.17%**	**100%**	**193%**	**193%**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%		100%	100%	100.00%	100%	200%	200%	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	96.05%	100%	90.38%	90.38%	100%	286.43%	286.43%	

4	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%		100%	64%	63.64%	100%	164%	164%	
4	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%		100%	100%	100.00%	100%	200%	200%	
4	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%		100%	100%	99.92%	100%	200%	200%	
4	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tersedianya Notulen Alat Kelengkapan Dewan dan Paripurna serta Produk Hukum yang Dibukukan	100%		100%	99%	99.12%	100%	199%	199%	
4	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	73.46%	100%	99.12%	99.12%	100%	272.58%	272.58%	
4	**02**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**300.00%**	**300.00%**	
4	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Persentase Tersedianya Pengadaan Mebel	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	300%	
4	02	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Tersedinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	300.00%	300.00%	

4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Lancaranya Administrasi Perkantoran**	**100%**		**100%**	**99%**	**99.17%**	**100%**	**199.17%**	**199.17%**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedinya Jasa Surat Menyurat	100%		100%	100%	99.85%	100%	199.85%	199.85%	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		100%	97%	96.82%	100%	196.82%	196.82%	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	37.24%	100%	99.99%	99.99%	100%	237.23%	237.23%	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		100%	100%	100.00%	100%	200.00%	200.00%	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**100%**		**100%**	**95%**	**95.48%**	**100%**	**195%**	**195%**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		100%	100%	100.00%	100%	200%	200%	

4	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%		100%	82%	81.93%	100%	182%	182%	
4	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%		100%	100%	100.00%	100%	200%	200%	
4	02	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%		100%	100%	100.00%	100%	200%	200%	
4	**02**	**01**	**2.15**			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**71%**	**70.67%**	**100%**	**171%**	**171%**	
4	02	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Aparatur	100%		100%	100%	100.00%	100%	200%	200%	
4	02	01	2.15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	100%	88%	88.00%	100%	288%	288%	
4	02	01	2.15	03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100%	32%	100%	24%	24.00%	100%	156%	156%	

4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**100%**	**99.97%**	**100%**	**200%**	**200%**	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%		100%	100%	99.94%	100%	200%	200%	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	300%	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PERSENTASE PEMENUHAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**100%**		**100%**	**81%**	**81.27%**	**100%**	**181%**	**181%**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**89%**	**88.59%**	**100%**	**189%**	**189%**	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Tersedinya Naskah Akademik dan Raperda Hak Inisiatif	100%	91%	100%	89%	88.59%	100%	280%	280%	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**49%**	**49.00%**	**100%**	**149%**	**149%**	

4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan Dewan	100%	97.57%	100%	49.00%	49.00%	100%	246.57%	246.57%	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**75%**	**74.88%**	**100%**	**174.88%**	**174.88%**	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	100%		100%		0.00%	100%	100%	100%	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	100%	95.36%	100%	53.15%	53.15%	100%	248.51%	248.51%	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	100%		100%	97%	96.60%	100%	196.60%	196.60%	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**94%**	**93.71%**	**100%**	**193.71%**	**193.71%**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	66.33%	100%	87.42%	87.42%	100%	253.75%	253.75%	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanan Reses	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	300%	300%	

4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**		**100%**	**100%**	**99.75%**	**100%**	**200%**	**200%**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%		100%	100%	99.75%	100%	200%	200%	

Kolonodale, Oktober 2023

Sekretaris DPRD

HELTAN RANSA, SH

NIP. 19680602 199503 1 003

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Dokumen Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025, dan Isu-isu strategis Rancangan Teknokratik Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025, menjadi pedoman/acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD disajikan dalam format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Morowali Utara

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persen			***100%***	***100%***	***100%***	***94%***	***100%***	***100%***	***100%***	
Kegiatan	Persentase Terpenuhinya Hak-Hak ASN **(Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN **(Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)**	Bulan			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Meningkatnya Kuaitas SDM Aparatur **(Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*91,67%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **(Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan **(Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*83,34%*	*100%*	*100%*	*100%*	

Kegiatan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran **(Administrasi Umum Perangkat Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*93,17%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan **(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan **(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*90,38%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan **(Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*63,64%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan **(Penyediaan Bahan Logistik Kantor)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan **(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,92%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan **(Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,12%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,12%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien **(Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan **(Pengadaan Mebel)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	

Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **(Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Lancaranya Administrasi Perkantoran **(Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,17%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat **(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,85%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*96,82%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **(Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,99%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan **(Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien **(Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*95,48%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya **(Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya **(Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*81,93%*	*100%*	*100%*	*100%*	

Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara **(Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya**)	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuptaen/Kota **(Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*70,67%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD **(Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan **(Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*88%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD **(Pelaksanaan Medical Check Up DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*24%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **(Layanan Administrasi DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,97%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD **(Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,94%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga yang Disediakan **(Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Program	**DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persen			***100%***	***100%***	***100%***	***81,27%***	***100%***	***100%***	***100%***	
Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **(Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD)**	Persen			*100%*	*9%*	*100%*	*88,59%*	*100%*	*100%*	*100%*	

Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah **(Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*88,59%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **(Pembahasan Kebijakan Anggaran)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*49%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA PPAS **(Pembahasan KUA dan PPAS)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*49.00%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **(Peningkatan Kapasitas DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*74,88%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD **(Orientasi DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*		*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD **(Pendalaman Tugas DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*53,15%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokuemntasi Dewan **(Publikasi dan Dokumentasi Dewan)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*96,60%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **(Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*93,71%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah **(Kunjungan Kerja dalam Daerah)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*87,42%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses **(Pelaksanaan Reses)**	*Persen*			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	

Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **(Fasilitasi Tugas DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,75%*	*100%*	*100%*	*100%*	
Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD **(Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD)**	Persen			*100%*	*100%*	*100%*	*99,75%*	*100%*	*100%*	*100%*	

Kolonodale, Oktober 2023

Sekretaris DPRD

HELTAN RANSA, SH

NIP. 19680602 199503 1 003

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
- Perubahan peraturan perundang-undangan (regulasi) yang begitu cepat, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitas kedewanan.
- Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
- Masih rendahnya disiplin dan motivasi kerja pegawai.
- Kemampaun SDM dalam pemanfaatan informasi teknologi (IT) masih rendah.
- Masih kurangnya tenaga ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Melihat pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Mengikuti diklat, seminar dan workshop sesuai dengan tupoksinya.
- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan pembangunan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN TAHUN 2024

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar

dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah sebagaimana terlampir dalam tabel T-C.31 berikut :

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD			Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)								Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4**						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4	**02**					**SEKRETARIAT DPRD**				**4**	**02**					**SEKRETARIAT DPRD**				
						PERENCANAAN			**39.569.127.400**							**PERENCANAAN**			**39.569.127.400**	
4	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**26.193.649.000**	**4**	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**26.193.649.000**	
4	**02**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.089.133.767**	**4**	**02**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.089.133.767**	
4	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.089.133.767	4	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.089.133.767	
4	**02**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**361.020.600**	**4**	**02**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**361.020.600**	

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

4	02	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	162.124.600	4	02	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	162.124.600	
4	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	198.896.000	4	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	198.896.000	
4	**02**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2.753.873.390**	**4**	**02**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2.753.873.390**	
4	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**100%**	240.548.120	4	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**100%**	240.548.120	
4	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**100%**	689.566.720	4	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**100%**	689.566.720	
4	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**100%**	-	4	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**100%**	-	
4	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**100%**	144.569.500	4	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**100%**	144.569.500	
4	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**100%**	284.128.950	4	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**100%**	284.128.950	

4	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**100%**	53.554.500	4	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**100%**	53.554.500	
4	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**100%**	1.341.505.600	4	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**100%**	1.341.505.600	
4	**02**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**183.300.000**	**4**	**02**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**183.300.000**	
4	02	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**100%**	-	4	02	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**100%**	-	
4	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**100%**	-	4	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**100%**	-	
4	02	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	**100%**	183.300.000	4	02	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	**100%**	183.300.000	
4	02	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**100%**	-	4	02	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**100%**	-	
4	**02**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.709.642.604**	**4**	**02**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.709.642.604**	

4	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**100%**	-	4	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**100%**	-	
4	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**100%**	644.249.004	4	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**100%**	644.249.004	
4	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**100%**	500.588.600	4	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**100%**	500.588.600	
4	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**100%**	2.564.805.000	4	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**100%**	2.564.805.000	
4	**02**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.512.247.750**	**4**	**02**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.512.247.750**	
4	02	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	**100%**	127.050.000	4	02	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	**100%**	127.050.000	
4	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**100%**	173.650.350	4	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**100%**	173.650.350	

4	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**100%**	97.920.000	4	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**100%**	97.920.000	
4	02	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**100%**	2.113.627.400	4	02	01	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**100%**	2.113.627.400	
4	**02**	**01**	**2.15**			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**11.928.786.889**	**4**	**02**	**01**	**2.15**			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**11.928.786.889**	
4	02	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	**100%**	11.216.286.889	4	02	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	**100%**	11.216.286.889	
4	02	01	2.15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	**100%**	650.000.000	4	02	01	2.15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	**100%**	650.000.000	
4	02	01	2.15	03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	**100%**	62.500.000	4	02	01	2.15	03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	**100%**	62.500.000	
4	**02**	**01**	**2.16**			**Layanan Administrasi DPRD**			**1.655.644.000**	**4**	**02**	**01**	**2.16**			**Layanan Administrasi DPRD**			**1.655.644.000**	
4	02	01	2.16	03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	**100%**	515.644.000	4	02	01	2.16	03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	**100%**	515.644.000	
4	02	01	2.16	04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	**100%**	1.140.000.000	4	02	01	2.16	04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	**100%**	1.140.000.000	

4	**02**	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**13.375.478.400**	**4**	**02**	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**13.375.478.400**	
4	**02**	**02**	**2.01**			**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**917.899.000**	**4**	**02**	**02**	**2.01**			**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			**917.899.000**	
4	02	02	2.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	**100%**	917.899.000	4	02	02	2.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	**100%**	917.899.000	
4	**02**	**02**	**2.02**			**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			**616.203.750**	**4**	**02**	**02**	**2.02**			**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			**616.203.750**	
4	02	02	2.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	**100%**	616.203.750	4	02	02	2.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	**100%**	616.203.750	
4	**02**	**02**	**2.04**			**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**2.303.809.600**	**4**	**02**	**02**	**2.04**			**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**2.303.809.600**	
4	02	02	2.04	01		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	**100%**	315.896.000	4	02	02	2.04	01		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	**100%**	315.896.000	
4	02	02	2.04	02		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	**100%**	1.987.913.600	4	02	02	2.04	02		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	**100%**	1.987.913.600	
4	02	02	2.04	03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**100%**	-	4	02	02	2.04	03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	**100%**	-	

4	**02**	**02**	**2.05**			**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**2.079.599.650**		**4**	**02**	**02**	**2.05**			**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**2.079.599.650**	
4	02	02	2.05	01		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	**100%**	586.468.600		4	02	02	2.05	01		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	**100%**	586.468.600	
4	02	02	2.05	02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	**100%**	-		4	02	02	2.05	02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	**100%**	-	
4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	**100%**	1.493.131.050		4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	**100%**	1.493.131.050	
4	**02**	**02**	**2.08**			**Fasilitasi Tugas DPRD**			**7.457.966.400**		**4**	**02**	**02**	**2.08**			**Fasilitasi Tugas DPRD**			**7.457.966.400**	
4	02	02	2.08	01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	**100%**	7.457.966.400		4	02	02	2.08	01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	**100%**	7.457.966.400	
								TOTAL	**39.569.127.400**										**TOTAL**	**39.569.127.400**	

CATATAN

JUMLAH PROGRAM : 2

JUMLAH KEGIATAN : 13

JUMLAH SUB KEGIATAN : 33

CATATAN

JUMLAH PROGRAM : 2

JUMLAH KEGIATAN : 13

JUMLAH SUB KEGIATAN : 33

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipasif. Keterpaduan proses perencaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan-tahapan Musrembang sendiri meliputi Musrembang tingkat RT/RW, Musrembang tingkat kelurahan, Musrembang Tingkat Kecamatan dan Musrembang tingkat Kabupaten. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan Musrembang yang telah dilakukan setiap tahunnnya diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil usulan musrembang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara disajikan pada tabel T-C.32 berikut:

T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NAMA PD : SEKRETARIAT DPRD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan				
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Morowali Utara**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**26.193.649.000,00**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Morowali Utara	*Persentase Terpenuhinya Hak-Hak ASN*	100%	3.089.133.767,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Morowali Utara	*Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur*	100%	361.020.600,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Morowali Utara	*Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran*	100%	2.753.873.390,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Morowali Utara	*Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien*	100%	183.300.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali Utara	*Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran*	100%	3.709.642.604,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali Utara	*Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efektif dan Efisien*	100%	2.512.247.750,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Morowali Utara	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100%	11.928.786.889,00
	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Morowali Utara	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100%	1.655.644.000,00
2	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**Kab. Morowali Utara**	***Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran***	**100%**	**13.375.478.400,00**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Morowali Utara	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100%	917.899.000,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Morowali Utara	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100%	616.203.750,00

	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Morowali Utara	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100%	2.303.809.600,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Morowali Utara	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100%	2.079.599.650,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Morowali Utara	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100%	7.457.966.400,00
					39.569.127.400,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum di dalam visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur dan memiliki 8 misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni:

1. Merosotnya kewibawaan negara.
2. Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasioanl.
3. Merebaknya intoleransi dan krisi kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

1. Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk meciptakan birokrasi yang efektif, serta pemberatasan korupsi.
2. Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan serta keberlanjutan pembangunan.

3. Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan kelautan.

Dari rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi, yaitu "**Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Dalam Menunjang Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif**".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola administrasi Keuangan Sekretariat Dewan Yang Tertib dan Lancar Akuntabel;
2. Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD yang Optimal dalam Pembahasan Produk-produk Hukum Daerah dan Produk Dewan
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kompleks Perkantoran Dewan.

Sekretariat DPRD dengan visi dan misi tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang dan harus realistis.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
2. Harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi
3. Menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan pokok fungsi organisasi
4. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.
5. Tujuan organsasi mewakili tujuan umum seluruh unit kerja
6. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka meralisasikan misi dimaksud.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan misinya menentukan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Misi 1 “Mewujudkan tata kelola administrasi Keuangan Sekretariat Dewan yang tertib, lancar dan Akuntabel”, maka ditetapkan tujuan:
   a. Meningkatkan Kompetensi, Daya Tanggap dan Profesionalitas Aparatur
   b. Meningkatkan kedisiplinan aparatur
   c. Meningkatkan pelayanan administrasidan prosedur keuangan yang efektif dalam rangka menunjang DPRD
2. Untuk mewujudkan Misi 2 “Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD yang optimal dalam pembahasan produk-produk hukum daerah dan produk dewan”, maka ditetapkan tujuan:
   a. Peningkatan kompetensi dan kinerja DPRD
   b. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana sekaligus optimalisasi pemanfaatannya
   c. Mengembangkan informasi berbasis teknologi tentang produk peraturan daerah dan produk dewan
   d. Mempercepat proses penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD dalam menegakkan kaidah demokrasi
3. Untuk mewujudkan Misi 3 “Mewujudkan sarana dan prasarana kompleks Perkantoran Dewan”, maka ditetapkan tujuan:
   a. Memperlancar mekanisme kerja

b. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana yang efektif dalam rangka menunjang kinerja DPRD
c. Mempercepat proses penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD dalam menegakkan kaidah demokrasi
d. Menciptakan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD
e. Memberikan ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
f. Memfasilitasi fungsi legisatif melalui pembuatan perda.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profile pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut dengan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah *(value added)* bagi *stakeholder* layanan. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai *(srtategic objective).* Melalui parameter tersebut, dapat dikenal indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang:

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
3. Menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 terdiri dari:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
8. Layanan Administrasi DPRD

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Peningkatan Kapasitas DPRD
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5. Fasilitasi Tugas DPRD

Berikut disajikan pada tabel T-C.33 rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL T - C. 33

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**02**					**SEKRETARIAT DPRD**								**39.569.127.400**					**46.698.392.970**
4	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**26.193.649.000**					**32.985.831.450**
4	**02**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.089.133.767**					**3.243.590.455**
4	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Hak-Hak ASN	Kantor Set-DPRD	100 Persen	27 Orang/Bulan	100 Persen	3.089.133.767	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.243.590.455

5						**BELANJA DAERAH**								**3.089.133.767**						
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**3.089.133.767**						
5	**1**	**01**				**Belanja Pegawai**								**3.089.133.767**						
5	**1**	**01**	**01**			**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**								**1.614.954.609**						
5	**1**	**01**	**01**	**01**		**Belanja Gaji Pokok ASN**								**1.153.002.925**						
5	**1**	**01**	**01**	**01**	**0001**	**Belanja Gaji Pokok PNS**								**1.153.002.925**						
						Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								1.153.002.925						
5	**1**	**01**	**01**	**02**		**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**								**99.705.567**						
5	**1**	**01**	**01**	**02**	**0001**	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**								**99.705.567**						
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								99.705.567						
5	**1**	**01**	**01**	**03**		**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**								**124.426.799**						

5	**1**	**01**	**01**	**03**	**0001**	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**								**124.426.799**					
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjsangan)								124.426.799					
5	**1**	**01**	**01**	**05**		**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**								**40.436.712**					
5	**1**	**01**	**01**	**05**	**0001**	**Belanja Tunjangan Funsional Umum PNS**								**40.436.712**					
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								40.436.712					
5	**1**	**01**	**01**	**05**		**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**								**56.538.405**					
5	**1**	**01**	**01**	**05**	**0001**	**Belanja Tunjangan Funsional Umum PNS**								**56.538.405**					
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								56.538.405					

5	**1**	**01**	**01**	**06**		**Belanja Tunjangan Beras ASN**								**75.236.257**							
5	**1**	**01**	**01**	**06**	**0001**	**Belanja Tunjangan Beras PNS**								**75.236.257**							
						Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								75.236.257							
5	**1**	**01**	**01**	**07**		**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**								**6.469.709**							
5	**1**	**01**	**01**	**07**	**0001**	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**								**6.469.709**							
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								6.469.709							
5	**1**	**01**	**01**	**08**		**Belanja Pembulatan Gaji ASN**								**220.764**							
5	**1**	**01**	**01**	**08**	**0001**	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**								**220.764**							
						Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								220.764							

5	**1**	**01**	**01**	**09**		**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**								**58.917.471**					
5	**1**	**01**	**01**	**09**	**001**	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**								**58.917.471**					
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								58.917.471					
5	**1**	**01**	**02**			**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**								**1.474.179.158**					
5	**1**	**01**	**02**	**01**		**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN**								**1.474.179.158**					
5	**1**	**01**	**02**	**01**	**001**	**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS**								**1.474.179.158**					
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)								1.474.179.158					
4	**02**	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**361.020.600**					**379.071.630**

4	0 2	0 1	2. 05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		100 Persen	250 Orang	100 Persen	162.124.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	170.230.830
5						**BELANJA DAERAH**								**162.124.600**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**162.124.600**					
5	**1**	**0 2**				**Belanja Barang dan Jasa**								**162.124.600**					
5	**1**	**0 2**	**0 1**			**Belanja Barang**								**30.700.000**					
5	**1**	**0 2**	**0 1**	**0 1**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**30.700.000**					
5	1	0 2	01	01	00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								4.375.000					
5	1	0 2	01	01	00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								4.875.000					
5	1	0 2	01	01	00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								21.450.000					
5	**1**	**0 2**	**0 2**			**Belanja Jasa**								**41.000.000**					
5	**1**	**0 2**	**0 2**	**0 1**		**Belanja Jasa Kantor**								**8.500.000**					

5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia								8.500.000					
5	**1**	**02**	**02**	**05**		**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**								**7.500.000**					
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan								7.500.000					
5	**1**	**02**	**02**	**12**		**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**								**25.000.000**					
5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi								25.000.000					
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**90.424.600**					
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**90.424.600**					
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								90.424.600					

4	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		100 Persen	25 Orang	100 Persen	198.896.000			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	208.840.800
5						**BELANJA DAERAH**								**198.896.000**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**198.896.000**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**198.896.000**					
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**198.896.000**					
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**198.896.000**					
5	1	02	04	01	00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								198.896.000					
4	**02**	**01**	**2, 06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2.753.873.390**					**2.891.567.060**
4	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kantor Set DPRD	100 Persen	407 Unit	100 Persen	240.548.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	252.575.526
5						**BELANJA DAERAH**								**240.548.120**					

5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**40.548.120**							
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**40.548.120**							
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**40.548.120**							
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**40.548.120**							
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik								40.548.120							
5	**2**					**BELANJA MODAL**								**200.000.000**							
5	**2**	**04**				**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**								**200.000.000**							
5	**2**	**04**	**04**			**Belanja Modal Jaringan**								**200.000.000**							
5	**2**	**04**	**04**	**02**		**Belanja Modal Jaringan Listrik**								**200.000.000**							
5	2	04	04	02	0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya								200.000.000							
4	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kantor Set DPRD	100 Persen	6565 Unit	100 Persen	689.566.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	724.045.056		

5						**BELANJA DAERAH**								**689.566.720**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**167.066.720**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**167.066.720**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**167.066.720**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**167.066.720**					
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas								7.200.000					
34	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor								34.341.720					
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata								20.000.000					
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga								42.525.000					
5	1	02	01	01	0078	Belanja Pakaian Jas/Safari								63.000.000					
5	**2**					**BELANJA MODAL**								**522.500.000**					

5	**2**	**02**				**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**							**522.500.000**							
5	**2**	**02**	**02**			**Belanja Modal Alat Angkutan**							**62.000.000**							
5	**2**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**							**62.000.000**							
5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua							62.000.000							
5	**2**	**02**	**05**			**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**							**460.500.000**							
5	**2**	**02**	**05**	**01**		**Belanja Modal Alat Kantor**							**237.500.000**							
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya							237.500.000							
5	**2**	**02**	**05**	**02**		**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**							**223.000.000**							
5	2	02	05	02	0005	Belanja Modal Alat Pendingin							23.000.000							
5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya							200.000.000							

4	02	01	2, 06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kantor Set DPRD	100 Persen	1089 Unit	100 Persen	144.569.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 Persen	151.797.975
5						**BELANJA DAERAH**								**144.569.500**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**144.569.500**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**144.569.500**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**144.569.500**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**144.569.500**					
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								70.287.000					
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								52.122.500					
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos								5.000.000					
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								17.160.000					

4	0 2	0 1	2, 06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kantor Set-DPRD	100 Persen	4 Paket	100 Persen	284.128.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	298.335.398
5						**BELANJA DAERAH**								**284.128.950**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**284.128.950**					
5	**1**	**0 2**				**Belanja Barang dan Jasa**								**284.128.950**					
5	**1**	**0 2**	**0 1**			**Belanja Barang**								**284.128.950**					
5	**1**	**0 2**	**0 1**	**0 1**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**284.128.950**					
5	1	0 2	01	01	00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								284.128.950					
4	0 2	0 1	2, 06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran		100 Persen	175 Buku	100 Persen	53.554.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	56.232.225
5						**BELANJA DAERAH**								**53.554.500**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**53.554.500**					
5	**1**	**0 2**				**Belanja Barang dan Jasa**								**53.554.500**					

5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**53.554.500**						
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**53.554.500**						
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								102.000						
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								676.000						
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								52.776.500						
4	02	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran		100 Persen	26 Laporan	100 Persen	1.341.505.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.408.580.880
5						**BELANJA DAERAH**								**1.341.505.600**						
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**1.341.505.600**						
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**1.341.505.600**						
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**1.341.505.600**						

5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**1.341.505.600**				
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								951.299.000				
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								390.206.600				
4	**02**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**183.300.000**				**792.465.000**
4	02	01	2,07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien	Kantor Set-DPRD	100 Persen	3 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	500.000.000
4	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efisien	Kantor Set-DPRD	100 Persen	158 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50.000.000
4	02	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tersediany a Peralatan dan Mesin Lainnya		100 Persen	5 Unit	100 Persen	183.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	192.465.000
5						**BELANJA DAERAH**								**183.300.000**				

5	**2**					**BELANJA MODAL**								**183.300.000**					
5	**2**	**02**				**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**								**183.300.000**					
5	**2**	**02**	**05**			**Belanja Modal Komputer**								**7.000.000**					
5	**2**	**02**	**05**	**02**		**Belanja Modal Komputer Unit**								**7.000.000**					
5	2	02	05	02	00 03	Belanja Modal Alat Pembersih								7.000.000					
5	**2**	**02**	**06**			**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**								**125.500.000**					
5	**2**	**02**	**06**	**01**		**Belanja Modal Alat Stuido**								**125.500.000**					
5	2	02	06	01	00 13	Belanja Modal Peralatan Studio Audio								125.500.000					
5	**2**	**02**	**10**			**Belanja Modal Komputer**								**50.800.000**					
5	**2**	**02**	**10**	**01**		**Belanja Modal Komputer Unit**								**18.000.000**					
5	2	02	10	01	00 02	Belanja Modal Personal Computer								18.000.000					
5	**2**	**02**	**10**	**02**		**Belanja Modal Peralatan Komputer**								**32.800.000**					
5	2	02	10	02	00 03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer								32.800.000					

4	02	01	2,07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediany a Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 Persen	0 Unit	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50.000.000
4	**02**	**01**	**2,08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3.709.642.604**					**3.895.124.734**
4	02	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersediany a Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Set-DPRD	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	644.249.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	676.461.454
5						**BELANJA DAERAH**								**644.249.004**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**644.249.004**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**644.249.004**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**150.000.000**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**150.000.000**					
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								150.000.000					

5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**								**494.249.004**					
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**								**494.249.004**					
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air								12.000.000					
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik								227.250.000					
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah								150.000.000					
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan Iuran TV Kabel								104.999.004					
4	02	01	2, 08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kantor Set-DPRD	100 Persen	27 Laporan	100 Persen	500.588.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	525.618.030
5						**BELANJA DAERAH**								**500.588.600**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**500.588.600**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**500.588.600**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**500.588.600**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**500.588.600**					

5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura								79.664.600					
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								47.100.000					
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Minuman Jamuan Tamu								373.824.000					
4	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kantor Set DPRD	100 Persen	24 Laporan	100 Persen	2.564.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.693.045.250
5						**BELANJA DAERAH**								**2.564.805.000**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**2.564.805.000**					
5	**1**	**01**				**Belanja Pegawai**								**89.160.000**					
5	**1**	**01**	**03**			**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**								**89.160.000**					
5	**1**	**01**	**03**	**07**		**Belanja Honorarium**								**89.160.000**					

5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								57.000.000				
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								32.160.000				
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**2.475.645.000**				
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**231.609.000**				
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**231.609.000**				
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								231.609.000				
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**								**2.244.036.000**				
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**								**2.244.036.000**				
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi								942.000.000				
5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum								36.000.000				
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli								288.000.000				
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan								72.000.000				

5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan								144.000.000					
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir								135.000.000					
5	1	02	02	01	0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak								132.000.000					
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur								495.036.000					
4	**02**	**01**	**2,09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.512.247.750**					**2.637.860.138**
4	02	01	2,09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efefktif dan Efisien	Kantor Set DPRD	100 Persen	3 Unit	100 Persen	127.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	133.402.500
5						**BELANJA DAERAH**								**127.050.000**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**127.050.000**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**127.050.000**					
5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**								**127.050.000**					

5	**1**	**02**	**03**	**02**		**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**								**127.050.000**					
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan								127.050.000					
4	02	01	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efefktif dan Efisien	Kantor Set DPRD	100 Persen	28 Unit	100 Persen	173.650.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	182.332.868
5						**BELANJA DAERAH**								**173.650.350**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**173.650.350**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**173.650.350**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**55.650.350**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**55.650.350**					
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas								55.650.350					

5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**								**118.000.000**					
5	**1**	**02**	**03**	**02**		**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**								**118.000.000**					
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan								80.000.000					
5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua								38.000.000					
4	02	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efefktif dan Efisien	Kantor Set DPRD	100 Persen	61 Unit	100 Persen	97.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	102.816.000
5						**BELANJA DAERAH**								**97.920.000**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**97.920.000**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**97.920.000**					

5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**								**97.920.000**					
5	**1**	**02**	**03**	**02**		**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**								**97.920.000**					
5	1	02	03	02	01 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya								10.150.000					
5	1	02	03	02	01 21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin								16.470.000					
5	1	02	03	02	01 33	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film								50.000.000					
5	1	02	03	02	04 05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer								10.950.000					
5	1	02	03	02	04 06	Belanja Pemeliharaan Komputer-Pkomputer Unit-Personal Computer								10.350.000					

4	02	01	2, 09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara Efefktif dan Efisien	Kantor Set DPRD	100 Persen	4 Kegiatan	100 Persen	2.113.627.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.219.308.770
5						**BELANJA DAERAH**								**2.113.627.400**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**1.053.627.400**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**1.053.627.400**					
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Pemeliharaan**								**85.000.000**					
5	**1**	**02**	**02**	**08**		**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**								**85.000.000**					
5	1	02	02	08	00 05	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya								85.000.000					
5	**1**	**02**	**03**			**Belanja Pemeliharaan**								**968.627.400**					
5	**1**	**02**	**03**	**03**		**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**								**968.627.400**					

5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor								818.627.400					
5	1	02	03	03	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I								150.000.000					
5	**2**					**BELANJA MODAL**								**1.060.000.000**					
5	**2**	**03**				**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**								**785.000.000**					
5	**2**	**03**	**01**			**Belanja Modal Bangunan Gedung**								**785.000.000**					
5	**2**	**03**	**01**	**01**		**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**								**785.000.000**					
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor								185.000.000					
5	2	03	01	01	0002	Belanja Modal Bangunan Geudang								200.000.000					
5	2	03	01	01	0033	Belanja Modal Bangunan Parkir								200.000.000					
5	2	03	01	01	0036	Belanja Modal Taman								200.000.000					

5	**2**	**04**				**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**								**275.000.000**					
5	**2**	**04**	**02**			**Belanja Modal Bangunan Air**								**275.000.000**					
5	**2**	**04**	**02**	**04**		**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**								**275.000.000**					
5	2	04	02	04	0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya								275.000.000					
4	**02**	**01**	**2, 15**			**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**11.928.786.889**					**12.525.226.233**
4	02	01	2, 15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kantor Set-DPRD	100 Persen	25 Orang/Bulan	100 Persen	11.216.286.889	Pendapatan Asli Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	11.777.101.233
5						**BELANJA DAERAH**								**11.216.286.889**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**11.216.286.889**					

5	**1**	**01**				**Belanja Pegawai**								**11.216.286.889**					
5	**1**	**01**	**04**			**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**								**10.870.686.889**					
5	**1**	**01**	**04**	**01**		**Belanja Uang Representasi DPRD**								**563.144.400**					
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD								563.144.400					
5	**1**	**01**	**04**	**02**		**Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**								**36.367.800**					
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD								36.367.800					
5	**1**	**01**	**04**	**03**		**Belanja Tunjangan Beras DPRD**								**47.797.200**					
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD								47.797.200					
5	**1**	**01**	**04**	**04**		**Belanja Uang Paket DPRD**								**48.292.440**					
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD								48.292.440					
5	**1**	**01**	**04**	**05**		**Belanja Tunjangan Jabatan DPRD**								**812.551.291**					
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD								812.551.291					

5	**1**	**01**	**04**	**06**		**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD**								**32.337.900**					
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD								32.337.900					
5	**1**	**01**	**04**	**07**		**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD**								**45.460.632**					
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD								45.460.632					
5	**1**	**01**	**04**	**08**		**Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD**								**3.150.000.000**					
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD								3.150.000.000					
5	**1**	**01**	**04**	**09**		**Belanja Tunjangan Reses DPRD**								**787.500.000**					
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD								787.500.000					
5	**1**	**01**	**04**	**10**		**Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**								**784.970**					

5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD								784.970					
5	**1**	**01**	**04**	**12**		**Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**								**2.160.450.256**					
5	1	01	04	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD								48.450.256					
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD								2.112.000.000					
5	**1**	**01**	**04**	**13**		**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**								**3.186.000.000**					
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD								3.186.000.000					
5	**1**	**01**	**06**			**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**								**345.600.000**					
5	**1**	**01**	**06**	**01**		**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**								**345.600.000**					
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD								345.600.000					

4	02	01	2, 15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kantor Set-DPRD	100 Persen	150 Pasang	100 Persen	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	682.500.000
5						**BELANJA DAERAH**								**650.000.000**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**650.000.000**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**650.000.000**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**650.000.000**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**650.000.000**					
5	1	02	01	01	0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD								325.000.000					
5	1	02	01	01	0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)								100.000.000					
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)								100.000.000					
5	1	02	01	01	0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)								100.000.000					
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga								25.000.000					

4	02	01	2,15	03		Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kantor Set-DPRD	100 Persen	25 Orang	100 Persen	62.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	65.625.000
5						**BELANJA DAERAH**								**62.500.000**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**62.500.000**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**62.500.000**					
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**								**62.500.000**					
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**								**62.500.000**					
5	1	02	02	01	0073	Belanja Medical Check Up								62.500.000					
4	**02**	**01**	**2.16**			**Layanan Administrasi DPRD**								**1.655.644.000**					**6.620.926.200**
4	02	01	2.16	03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kantor Set DPRD	100 Persen	13 Laporan	100 Persen	515.644.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.423.926.200
5						**BELANJA DAERAH**								**515.644.000**					

5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**515.644.000**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**515.644.000**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**437.744.000**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**437.744.000**					
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								26.750.000					
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								410.994.000					
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**								**59.900.000**					
5	**1**	**02**	**02**	**01**		**Belanja Jasa Kantor**								**59.900.000**					
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia								1.500.000					
5	1	02	01	01	0007	Honorarium Rohaniwan								2.400.000					
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli								20.000.000					
5	1	02	01	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan								33.000.000					
5	1	02	01	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir								3.000.000					

5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**18.000.000**						
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**18.000.000**						
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								18.000.000						
4	02	01	2.16	04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		100 Persen	12 Laporan	100 Persen	1.140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.197.000.000
5						**BELANJA DAERAH**								**1.140.000.000**						
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**1.140.000.000**						
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**1.140.000.000**						
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**1.140.000.000**						
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**1.140.000.000**						
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura								1.140.000.000						
4	**02**	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**13.375.478.400**						**13.712.561.520**

4	**0 2**	**0 2**	**2. 0 1**			**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**917.899.000**						**963.793.950**
4	0 2	0 2	2. 01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	917.899.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	963.793.950
5						**BELANJA DAERAH**								**917.899.000**						
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**917.899.000**						
5	**1**	**0 2**				**Belanja Barang dan Jasa**								**917.899.000**						
5	**1**	**0 2**	**0 1**			**Belanja Barang**								**325.122.000**						
5	**1**	**0 2**	**0 1**	**0 1**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**325.122.000**						
5	1	0 2	01	01	00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								318.522.000						
5	1	0 2	01	01	00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								6.600.000						
5	**1**	**0 2**	**0 4**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**592.777.000**						

5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**592.777.000**						
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								592.777.000						
4	**02**	**02**	**2.02**			**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**616.203.750**						**647.013.938**
4	02	02	2.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kantor Set-DPRD	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	616.203.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	647.013.938
5						**BELANJA DAERAH**								**616.203.750**						
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**616.203.750**						
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**616.203.750**						
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**63.628.750**						
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**63.628.750**						
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								2.878.750						

5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								60.750.000						
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**552.575.000**						
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**552.575.000**						
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								552.575.000						
4	**02**	**02**	**2.04**			**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**2.303.809.600**						**2.087.309.280**
4	02	02	2.04	01		Orientasi DPRD	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	315.896.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	-
5						**BELANJA DAERAH**								**315.896.000**						
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**315.896.000**						
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**315.896.000**						
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**315.896.000**						
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**315.896.000**						

5	1	02	04	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								315.896.000						
4	02	02	2,04	02		Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	1.987.913.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	2.087.309.280
5						**BELANJA DAERAH**								**1.987.913.600**						
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**1.987.913.600**						
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**1.987.913.600**						
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**1.987.913.600**						
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**1.987.913.600**						
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								1.987.913.600						
4	**02**	**02**	**2.05**			**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**2.079.599.650**						**2.183.579.633**

4	02	02	2.05	01		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		100 Persen	35 Laporan	100 Persen	586.468.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	615.792.030
5						**BELANJA DAERAH**								**586.468.600**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**586.468.600**					
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**586.468.600**					
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**586.468.600**					
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**586.468.600**					
5	1	02	04	01	00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								586.468.600					
4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	1.493.131.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	1.567.787.603
5						**BELANJA DAERAH**								**1.493.131.050**					
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**1.493.131.050**					

5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**1.493.131.050**					
5	**1**	**02**	**01**			**Belanja Barang**								**620.186.250**					
5	**1**	**02**	**01**	**01**		**Belanja Barang Pakai Habis**								**620.186.250**					
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								8.936.250					
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								15.000.000					
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos								2.250.000					
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								594.000.000					
5	**1**	**02**	**02**			**Belanja Jasa**								**562.500.000**					
5	**1**	**02**	**02**	**05**		**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**								**112.500.000**					
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan								112.500.000					

5	**1**	**02**	**02**	**12**		**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**								**450.000.000**							
5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi								450.000.000							
5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**								**310.444.800**							
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**								**310.444.800**							
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								310.444.800							
4	**02**	**02**	**2.08**			**Fasilitasi Tugas DPRD**								**7.457.966.400**							**7.830.864.720**
4	02	02	2.08	01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		100 Persen	17 Dokumen	100 Persen	7.457.966.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	7.830.864.720
5						**BELANJA DAERAH**								**7.457.966.400**							
5	**1**					**BELANJA OPERASI**								**7.457.966.400**							
5	**1**	**02**				**Belanja Barang dan Jasa**								**7.457.966.400**							

5	**1**	**02**	**04**			**Belanja Perjalanan Dinas**							**7.457.966.400**					
5	**1**	**02**	**04**	**01**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**							**7.457.966.400**					
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							7.457.966.400					
												39.569.127.400						**46.698.392.970**

Kolonodale, Oktober 2023

Sekretaris DPRD

HELTAN RANSA, SH

NIP. 19670405 199803 2 005

CATATAN

JUMLAH PROGRAM : 2 Program

JUMLAH KEGIATAN : 13 Kegiatan
JUMLAH SUB KEGIATAN : 33 Sub Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam uraian rencana kerja dan pendanaan disajikan program dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana diuraikan berikut.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
8. Layanan Administrasi DPRD

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Peningkatan Kapasitas DPRD
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5. Fasilitasi Tugas DPRD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Tahunan memuat Strategi dan Kebijakan mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kolonodale, Oktober 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Morowali Utara



HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

RANCANGAN AKHIR RENCANA KINERJA (RENJA)



DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat tersusun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2024 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja.

Demikian semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kolonodale, Maret 2023

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH

GATOT S.E.BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DISPARPORA TAHUN 2022..... 6

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH RAGA 6

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA 7

2.3. ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN MOROWALI UTARA 9

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 22

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM 23

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 24

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL .. 24

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARPORA KABUPATEN MOROWALI UTARA 24

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 25

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 27

BAB V. PENUTUP 28

5.1 KESIMPULAN 28

5.2 HARAPAN 28

5.3 KAIDAH PELAKSANAAN 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun Kelima dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara menterjemahkan dan mengoperasikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke dalam Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang di formulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja SOPD juga diintegrasikan dengan

Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SOPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SOPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SOPD yang dilanjutkan dengan Renja SOPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SOPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 3708 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 – 2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang kedudukan dan susunan Dinas Daerah;
22. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 tahun 2017 Tugas dan Fungsi Masing – masing Jabatan Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematik Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review Terhadap Renja RKPD

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terjadinya Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 9.946.798.133,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.826.833.713 atau sebesar 88 %.

Untuk melihat hasil evaluasi tingkat capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada uraian rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada Tabel. 1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara;
c. Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
d. Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan serta lintas Organisasi Perangkat Daerah
e. Morowali Utara memiliki potensi wisata yang indah dan alami dengan wisata unggulannya Kawasan Teluk Tomori (Kecamatan Petasia) dan Cagar Alam Morowali (Kecamatan Soyo Jaya dan Bungku Utara). Selain Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan yang tersebut di atas, terdapat pula DTW lain yang tidak kalah menarik di antaranya : Puncak Harmoni (Desa Korololaki), Pantai Ungkea (Desa Ungkea), Air Panas Beteleme (Desa Beteleme), Hutan Pinus Ensa (Desa Ensa), Goa Tamanoa (Desa Wawopada), Air Terjun Werampado'a (Desa Lemo), Air Terjun Pumbera (Desa Boba), Pulau Togonteo (Desa Tambale), Pasir Timbul Pulau Sapabunginang (Desa Kolo Bawah), Air Terjun Peratoa (Desa Mandula), Wisata Kandang Sapi (Desa Mandula), dan Masih banyak lagi DTW lainnya.
f. Tersedianya prosedur, standar, pedoman teknis Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang Destinasi Pariwisata;
g. Hasil pembangunan yang selama ini berupa sarana dan prasarana pariwisata secara kualitas dan kuantiítas semakin meningkat dari tahun ke tahun;
h. Adanya dukungan dari insan pencinta pariwisata yang ada di sekitar Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) untuk mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW) terkait pada khususnya dan Pariwisata di Kabupaten Morowali Utara pada umumnya ;

i. Kerjasama dalam mempromosikan pariwisata Kabupaten Morowali Utara terjalin dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
j. Semangat dari Dinas pariwisata yang terus menerus mempromosikan dan memasarkan Pariwisata yang ada di kabupaten Morowali utara akan mengundang investor untuk menginvestasikan dananya untuk kemajuan pariwisata di masa mendatang;
k. Regulasi dan apresiasi pemerintah terhadap atlet-atlet yang berprestasi sangat tinggi;
l. Kesadaran pemuda diharapkan akan tumbuh serta tanggung jawabnya dalam membangun potensi dan karakter bangsa di masa depan;

2. Faktor Ekternal

a) Kawasan Teluk Tomori dan Cagar Alam Morowali mampu mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara begitu juga dengan DTW Lainnya;
b) Morowali Utara memiliki masyarakat yang ramah merupakan modal bagi Morowali Utara untuk mengembangkan industri pariwisata;
c) Kemajuan teknologi memberikan informasi dan akses tentang destinasi wisata Morowali Utara pada Wisatawan yang hendak berkunjung ;
d) Mendorong Sanggar Seni Budaya untuk meningkatkan kwalitas dan kwantitas ;
g) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya;
h) Masyarakat Morowali Utara yang semakin ”kritis” untuk mengikuti perkembangan pembangunan Morowali Utara;
i) Lingkungan masyarakat Morowali Utara yang semakin kondusif;
j) Kebijakan pemerintah yang semakin ”memihak kepentingan” daerah;
k) Tersedianya sarana prasarana yg mendukung untuk beraktifitas olahraga;
l) Munculnya beberapa pemuda pelopor yang tersebar di beberapa wilayah.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2023 mencapai 95,84%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraannya Tugas dan Fungsinya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Sekretariat

a. Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.
b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang terjadi di Bidang Sekretariat Pariwisata dimana keterbatasan petugas melebihi jam kerja seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya digantikan dengan hak yang lain.

2. Bidang Pemuda dan Olah Raga.

a. Perlunya sekretariat kantor KNPI yang tersendiri,
b. Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kabupaten Morowali Utara.
c. Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja.
d. Perlunya lapangan bulu tangkis yang berstandart nasional.
e. Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.
f. Status pengelolaan sarana prasarana sampai saat ini masih dilakukan OPD, untuk pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara, untuk ijin penggunaan dilakukan oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/ penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/ Dispenda.

3. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Pengusaha hotel, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan dan rumah makan belum berstandarisasi dan belum mempunyai tanda daftar usaha pariwisata.
b. Di Kabupaten Morowali Utara ekonomi kreatifnya sudah berjalan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa yang dikerjakan termasuk ekonomi kreatif.
c. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi kreatif.

4. Bidang Destinasi Pariwisata

a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi.
b. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama tinggal).
c. Perlunya penambahan anggaran untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata termasuk pengembangan SDM Pariwisatanya.

5. Kawasan Wisata

a. Masih kurangnya sarana dan prasrana Pariwisata berada di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW)
b. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Kuliner yang berada di Kawasan Pariwisata dan belum adanya regulasi yang mengatur penggunaan kios kuliner yang sudah ada.
c. Perlunya Master Plan Pariwisata untuk setiap Daya Tarik Wisata (DTW)

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata pemuda dan olahraga;
2. Penyelengaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

B. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi Dinas Daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan kebijkan teknis pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.

   Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi :

   a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris**

   Sekretaris mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Sekretaris menyelenggarakan fungsi

   a. penyiapan bahan Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
   b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program Dinas;
   c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumahtangga, arsip dan dokumentasi Dinas;
   d. penyiapan bahan pengaduan dan pelayanan informasi;
   e. penyiapan bahan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
   f. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
   g. penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
   h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Asset;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dinas, anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset;
b. melaksanakan rencana program dan anggaran Dinas;
c. melaksanakan koordinasi dan pengukuran kinerja, penatausahaan keuangan Dinas;
d. melaksanakan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja, melaksanakan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
f. melaksanakan evaluasi, verifikasi dokumen dan pertanggung jawaban pelaporan keuangan Dinas;
g. melaksanakan koordinasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas;
h. melaksanakan pencatatan barang milik daerah/aset;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik negara;

e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat ekspedisi dinas dan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan dinas; dan
f. melaksanakan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
h. menyelenggarakan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatiham, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
i. melaksanakan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
j. melaksanakan pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan mendorong dan menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, pengembangan dan pengelolaan potensi kepariwisataan. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. penyiapan bahan analisis dan penyusunan data pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. penyiapan bahan standarisasi dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. penyiapan bahan fasilitasi kerjasama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. penyiapan bahan koordinasi Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pariwisata ekonomi kreatif;dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi

1. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
2. Seksi Pengembangandan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif; dan
3. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan rencana dan program kerja dibidang pengembangan promosi pariwisata;
b. melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis program kegiatan;
c. menyelenggarakan inventarisasi dan dokumentasi pengembangan promosi pariwisata;
d. melaksanakan Koordinasi dan Kemitraan Pengembangan Promosi pariwisata;
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan provinsi dan pemerintah pusat;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemasaran dan promosi wisata; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan ekonomi kreatif, Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif;
b. melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis program kegiatan;
c. melaksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi Pengembangan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif ;
d. melaksanakan Koordinasi dan Kemitraan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan dan pemanfaatan ekonomi kreatif; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi seni, budaya, media, design, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja;
b. membagi tugas kegiatan peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap seni dan bakat sumber daya manusia;
d. melaksanakan pembinaan usaha jasa, usaha sarana ekonomi kreatif berbasis seni budaya, multimedia dan IPTEK;
e. mengevaluasi hasil kegiatan peningkatan sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. melaporkan hasil kegiatan peningkatan sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang destinasi pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan analisis pasar, kerjasama dan kemitraan;
b. penyiapan bahan analisis data pengelolaan destinasi pariwisata, kerjasama dan kemitraan;
c. penyiapan bahan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata;
d. penyiapan bahan kegiatan pengembangan wisata dan kawasan strategis;
e. penyiapan bahan penetapan kebijakan pengembangan wisata dan pengelolaan usaha pariwisata;
f. penyiapan bahan penetapan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata;

g. penyiapan bahan penyelenggaraan koordinasi pengelolaan destinasi, pengembangan danpengelolaan usaha pariwisata analisis pasar, kerjasama dan kemitraan;
h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
2. Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strategis;
3. Seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata.

(1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;

Seksi Pengelolaan destinasi pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pengembangan dan destinasi pariwisata. Seksi Pengelolaan destinasi pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan program kerja pengelolaan destinasi pariwisata;
b. melaksanakan pedoman pengelolaan destinasi pariwisata;
c. melaksanakan kebijakan Nasional dan Provinsi serta penetapan kebijakan dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
d. membangun kelembagaan pariwisata (sumber daya manusia pariwisata, asosiasi pariwisata, koordinasi kelembagaan lain, kelompok sadar wisata, dll);
e. melaksanakan tata kelola destinasi berupa BIMTEK,Sosialisasi dan lain-lain untuk pengembangan destinasi pariwisata;
f. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) didalam destinasi pariwisata;
g. melaksanakan koordinasi pengelolaan destinasi pariwisata dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas, Provinsi dan Kementrian Pariwisata;
h. melaksanakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Destinasi; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strategis

Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strtegis mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan wisata dan kawasan strategis. Seksi Pengembangan Wisata dan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan program kerja di bidang pengembangan wisata dan kawasan strategis;
b. pelaksanaan rencana pengembangan wisata dan kawasan strategis;
c. melaksanakan penerapan pedoman pengembangan wisata dan kawasan strategis;
d. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan pengembangan wisata dan kawasan strategis;
e. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengembangan wisata dan kawasan strategis dengan sub.unit kerja lain dilingkungan Dinas;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan wisata dan kawasan strategis; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi pengelolaan usaha pariwisata

Seksi pengelolaan usaha pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelakasnaan tugas pelayanan pengelolaan usaha pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi pengelolaan usaha pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan program kerja dibidang pengelolaan usaha pariwisata;
b. melaksanakan penerapan pedoman dan bimbingan pengelolaan usaha pariwisata;
c. melaksanakan pengelolaan usaha pariwisata;
d. melaksanakan koordinasi pelayanan pengembangan pengelolaan usaha pariwisata dengan sub.unit kerja lain dilingkungan Dinas;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengelolaan usaha pariwisata ; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kepemudaan dan olahraga;
b. penyiapan bahan penyusunan data kepemudaan, olahraga dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
d. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana;
e. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
f. penyiapan bahan penyelenggaraan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
g. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
h. penyiapan bahan kegiatan pengawasan dan pengendalian tentang pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
j. penyiapan bahan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga;
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :

1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
2. Seksi Pendidikan dan Keterampilan; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

(1) Seksi Pembinaan Kepemudaan

Seksi Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang kepemudaan. Seksi Pembinaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kepemudaan;
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data kegiatan kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan;

c. melaksanakan bahan penyelenggaraan kebijakan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, keserasian kebijakan dan pemberdayaan dalam pembangunan;
d. melaksanakan bahan penyelenggaraan pengembangan manajemen, wawasan, kreativitas, keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepemudaan;
e. melakukan peningkatan peran serta, pembangunan kapasitas, dan kompetensi lembaga kepemudaan serta peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, kepeloporan, dan pengaturan sistem penganugrahan prestasi;
f. melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif (pengrusakan);
g. melaksanakan bahan penyelenggaraan fasilitasi, kerjasama dan pemberian dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan, skala Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;
h. melaksanakan bahan penyelenggaraan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan jaringan dan sistem informasi kepemudaan;
i. melaksanakan koordinasi bidang kepemudaan meliputi koordinasi dengan lembaga–lembaga pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah;
j. melaksanakan bahan penyelenggaraan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar bidang kepemudaan;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kepemudaan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pendidikan dan Keterampilan Pemuda dan Olahraga

Seksi Pendidikan dan Keterampilan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. Seksi Pendidikan dan Keterampilan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi pendidikan dan keterampilan Pemuda dan Olahraga;
b. melaksanakan penyusunan konsep rencana kebutuhan Pendidikan dan keterampilan pemuda dan olahraga;

c. melaksanakan pengaturan, pendistribusian Pendidikan dan keterampilan pemuda dan olahraga;
d. melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis penggunaan serta pemeliharaan Pendidikan dan keterampilan kepemudaan dan olahraga;
e. menyelenggarakan bahan usulan pengadaan dan pendistribusian serta penghapusan Pendidikan dan keterampilan pemuda dan olah raga;
f. melaksanakan bahan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan Pendidikan dan keterampilan kepemudaan, olahraga dan kesenian;
g. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendidikan dan keterampilan Pemuda dan Olahraga;
h. melaksanakan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang olahraga. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan serta keserasian kebijakan olahraga jenjang pendidikan, prestasi dan rekreasi;
b. melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data kegiatan olahraga;
c. melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kegiatan pekan dan kejuaraan olahraga serta juga memberi usulan pendanaan kegiatan keolahragaan;
d. melaksanakan bahan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat, industri dan kewirausahaan dalam pembangunan olahraga;
e. melaksanakan bahan pengaturan, sistem penganugrahan, penghargaan, kesejahteraan pelaku olahraga, pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
f. melaksanakan pengembangan manajemen olahraga, peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
g. melaksanakan kebijakan kriteria lembaga keolahragaan dan melakukan pembinaan organisasi dan kegiatan keolahragaan serta pengaturan

pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar bidang keolahragaan;

h. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;melaksanakan bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan serta pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
i. melaksanakan bahan koordinasi bidang keolahragaan meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
j. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan Seksi Olahraga; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel. 2

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagaimana terurai dalam Tabel. 3

2.5 Penelaahan Usulan Program

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, di samping berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026. Untuk lebih jelas hasil telaahan usulan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara terurai pada Tabel. 4

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijaksanaan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 - 2026, disebutkan bahwa melalui Pariwisata Kabupaten Morowali Utara harus memiliki prospek yang kompetitif berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik beratkan pada strategi pengembangan obyek wisata terutama wisata sejarah, sekaligus mewujudkan citra Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Wisata.

Dengan demikian upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan di Morowali Utara dari tahun ke tahun lebih berkualitas, tepat sasaran dan terukur.

Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan layanan pada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pariwisata yang mengarah pada optimalisasi kinerja obyek wisata.
3. Memasyarakatkan Olah Raga dan Mewujudkan Pemuda yang Berkualitas
4. Menggali, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan keragaman budaya

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

3.3 Program Dan Kegiatan

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menangani urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan di daerah serta pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 yang terdiri dari 6 Program dan 13 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
   1. Administrasi Keuangan Perangkat daerah;
   2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
   5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata :
   Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

c. Program Pemasaran Pariwisata:
   Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   2. Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

f. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah yang berisi Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran. Mengingat keterbatasan Sumber Daya Anggaran Pelaksanaan Program Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah pada Tabel. 5

BAB V
PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, penyelenggaraan kegiatan Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut :

5.1 KESIMPULAN

1. Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan.
2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

5.2 HARAPAN

1. Dalam pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara ini, diharapkan seluruh Perangkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara.

5.3 KAIDAH PELAKSANAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridho atas terwujudnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024. Amin.

Kolonodale, 2024

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Morowali Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH

GATOT S.E.BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

Tabel. TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang tepat waktu								
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	33 Orang	33 Orang	100.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur								
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan	45 Pasang	45 Pasang	45 Pasang	45 Pasang	100.00%	45 Pasang	45 Pasang	100.00%
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya yang di adakan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100.00%	4 Orang	4 Orang	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah secara Efektif dan Efisien								
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	100.00%	25 Paket	25 Paket	100.00%
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00%	2 Paket	2 Paket	100.00%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	2 Laporan	2 Laporan	100.00%
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien								
	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00%	2 Unit	2 Unit	100.00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00%	2 Unit	2 Unit	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100.00%	5 Unit	5 Unit	100.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100.00%	10 Unit	10 Unit	100.00%
2.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata								
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW**								
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	3 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00%	2 Lokasi	1 Lokasi	100.00%
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
3.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pemasaran Pariwisata**								
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri**								
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 promosi	2 promosi	2 promosi	2 promosi	100.00%	2 promosi	2 promosi	100.00%
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pemasaran Pariwisata**								
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM Pariwisata yang mampu menerjemahkan Program-program Pariwisata**								
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100.00%	10 Orang	10 Orang	100.00%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100.00%	10 Orang	10 Orang	100.00%
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
5.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan								
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirauasaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemuda yang memiliki Wira Usaha Pemula**								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00%	1 Unit	1 Unit	100.00%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcomes/Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
6.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**							-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga**								
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00%	2 Unit	2 Unit	100.00%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Atlet/Cabor yang mewakili Kabupaten/Kota**								
	Penyelenggaran Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Atlet/Cabor yang mengikuti Seleksi**								
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	15 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100.00%	25 Orang	25 Orang	100.00%
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan(Sport Science) (Pelatda)	1 Pelatda	1 Pelatda	1 Pelatda	1 Pelatda	100.00%	1 Pelatda	1 Pelatda	100.00%
7.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pengembangan Kapasitas Kepramukaan**								
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

GATOT S.E.BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

Tabel. T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Administrasi Keuangan Perangkata Daerah											
	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12 bulan	33 Orang	33 Orang	33 Orang	12 bulan	12 bulan	33 Orang	33 Orang	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan			50 Lembar	-	45 Lembar	50 Lembar	45 Lembar	-	45 Lembar	50 Lembar	
	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan yang disediakan			10 Paket	10 Paket	25 Paket	25 Paket	10 Paket	10 Paket	25 Paket	25 Paket	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Penyediaan Barang Milik Daderah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-	1 Unit	2 Unit	2 Unit	
	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			-	-	2 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah											
`	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan perlengkapan Kantor yang disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya			5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	
	Persentase Pemasaran Pariwisata											
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	1 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif											
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar											
	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				10 Orang	10 Orang	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10 Orang	
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata				10 Orang	10 Orang	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10 Orang	
	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Persentase Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara			1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan							**-**				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											
	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi			5 Atlet	15 Atlet	15 Atlet	15 Atlet	5 Atlet	15 Atlet	15 Atlet	15 Atlet	
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan(Sport Science) (Pelatda)			-	1 Pelatda	1 Pelatda	1 Pelatda	-	1 Pelatda	1 Pelatda	1 Pelatda	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
	Persentase pengembangan Kapasitas Kepramukaan											
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

GATOT S.E.BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

Tabel. T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana (DAU+DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disparpora	100%	2,124,907,486	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disparpora	100%	5,850,349,775		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang tepat waktu			1,300,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang tepat waktu			4,820,750,893		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disparpora	33 Orang	1,300,000,000	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disparpora	33 Orang	4,820,750,893		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			110,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			139,567,500		
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan	Disparpora	4 Orang	100,000,000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan	Disparpora	4 Orang	108,405,000		
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya yang di adakan	Disparpora	45 Lembar	10,000,000	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya yang di adakan	Disparpora	45 Lembar	31,162,500		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah secara Efektif dan Efisien			374,984,086	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah secara Efektif dan Efisien			576,191,122		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Disparpora	25 Paket	54,984,086	- Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Disparpora	25 Paket	131,082,722		
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Disparpora	2 Paket	20,000,000	- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Disparpora	2 Paket	54,240,400		
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disparpora	2 Laporan	300,000,000	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	Disparpora	2 Laporan	390,868,000		
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien			25,000,000	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien			21,604,800		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana (DAU+DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Disparpora	2 Unit	100,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Disparpora	2 Unit	80,000,000		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Disparpora	2 Unit	25,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Disparpora	2 Unit	21,604,800		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			316,923,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			270,840,260		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disparpora	12 Laporan	41,923,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Disparpora	12 Laporan	49,730,260		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Disparpora	12 Laporan	200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Disparpora	12 Laporan	161,210,000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Disparpora	12 Laporan	75,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Disparpora	12 Laporan	59,900,000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien			23,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien			43,000,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Disparpora	5 Unit	23,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Disparpora	5 Unit	43,000,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Disparpora	10 Unit	17,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Disparpora	10 Unit	20,140,000		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	**Kecamatan Petasia Timur**		**752,215,038**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	**Kecamatan Petasia Timur**		**358,837,950**		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana (DAU+DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW**				**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW**					
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	Desa ungkea Kec. Petasia Timur dan Desa Koya	2 Unit	717,215,038	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	Desa ungkea Kec. Petasia Timur	2 Unit	350,407,950		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Desa ungkea Kec. Petasia Timur dan	1 Dokumen	35,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Desa ungkea Kec. Petasia Timur	1 Dokumen	8,430,000		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Pemasaran Pariwisata**	**Morowali Utara**	**100%**	**132,850,750**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pemasaran Pariwisata**	**Morowali Utara**	**100%**	**9,895,000**		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri**				**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri**					
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Morut	2 Promosi	122,850,750	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik	Morut	2 Promosi	296,894,000		
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Morut	1 Dokumen	10,000,000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik	Morut	1 Dokumen	9,895,000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Pemasaran Pariwisata**	**Morowali Utara**	**100%**	**75,187,291**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pemasaran Pariwisata**	**Morowali Utara**	**100%**	**1,261,280,250**		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM Pariwisata yang mampu menerjemahkan Program-program Pariwisata**				**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pariwisata yang mampu menerjemahkan Program-program Pariwisata**					
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Morut	10 Orang	25,000,000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Morut	1 Kegiatan	1,044,659,750		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana (DAU+DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	Morut	10 Orang	25,187,291	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Morut	20 Orang	193,571,550		
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Morut	1 Laporan	25,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Pariwisata Kreatif	Jumlah Rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Pariwisata Kreatif	Morut	1 Dokumen	23,048,950		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Tersebar 10 kecamatan**		**462,876,863**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Tersebar 10 kecamatan**		**1,053,040,150**		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga**					
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Morut	1 Unit	115,000,000	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Morut	3 Unit	485,000,000		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Atlet/Cabor yang mewakili Kabupaten/Kota**				**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Atlet/Cabor yang mewakili Kabupaten/Kota**					
	Penyelenggaran Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kolonodale	1 Dokumen	317,876,863	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang ikut Kompetisi	Kolonodale	10 Orang	553,230,000		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Atlet/Cabor yang mengikuti Seleksi**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet/Cabor yang mengikuti Seleksi**					
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Palu	15 Orang	30,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Palu	15 Orang	14,810,150		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana (DAU+DAK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan(Sport Science) (Pelatda)	Kolonodale	1 Pelatda	101,129,000	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan(Sport Science) (Pelatda)	Kolonodale	1 Pelatda	50,136,350		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase pengembangan Kapasitas Kepramukaan**			**30,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pengembangan Kapasitas Kepramukaan**			**400,000,000**		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**					
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Desa Tompira kec. Petasia Timur dan Jakata	1 Laporan	30,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Desa Tompira kec. Petasia Timur dan Jakata	1 Laporan	400,000,000		

Kolonodale, Maret 2024

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

GATOT S.E.BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

Tabel. TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disparpora	100%	2,286,907,486	DAU		100%	2,059,285,636
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang tepat waktu			1,300,000,000				1,326,000,000
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Disparpora	12 Bulan	1,300,000,000			12 Bulan	1,326,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			110,000,000				10,200,000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan	Disparpora	4 Orang	100,000,000			4 Orang	102,000,000
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Disparpora	50 Lbr	10,000,000			4 Orang	10,200,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah secara Efektif dan Efisien			374,984,086				382,483,768
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Disparpora	12 Laporan	54,984,086			12 Laporan	56,083,768
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Disparpora	12 Laporan	20,000,000			12 Laporan	20,400,000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disparpora	12 Laporan	300,000,000			12 Laporan	306,000,000
	Penyediaan barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			125,000,000				450,761,868
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Disparpora	2 Unit	100,000,000			12 Bulan	102,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Disparpora	2 Unit	25,000,000			12 Bulan	25,500,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			316,923,400				323,261,868
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disparpora	12 Bulan	41,923,400			12 Bulan	42,761,868
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Disparpora	12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	204,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Disparpora	12 Bulan	75,000,000			12 Bulan	76,500,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien			60,000,000				17,340,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Disparpora	5 Unit	43,000,000			5 Unit	43,860,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Operasional	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara	Disparpora	10 Unit	17,000,000			10 Unit	17,340,000

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
2.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata			**752,215,038**				**767,259,339**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW**							
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	Desa Ungkea dan Desa Koya	2 Lokasi	717,215,038			2 Lokasi	731,559,339
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Ungkea dan Desa Koya	1 Dokumen	35,000,000			1 Dokumen	35,700,000
3.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pemasaran Pariwisata**			**132,850,750**				**125,307,765**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri**							
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Morut	2 promosi	122,850,750			3 Event	125,307,765
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Morut	1 Dokumen	10,000,000			3 Event	10,200,000
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pemasaran Pariwisata**			**75,187,291**				**76,691,037**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM Pariwisata yang mampu menerjemahkan Program-program Pariwisata**							
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Morut	10 Orang	25,000,000			10 Orang	25,500,000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	Morut	10 Orang	25,187,291			10 Orang	25,691,037
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Morut	1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,500,000
6.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**			**564,005,863**				**575,285,980**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga**							
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Tersebar	1 Paket	115,000,000			1 Jenis	117,300,000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Atlet/Cabor yang mewakili Kabupaten/Kota**							
	Penyelenggaran Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Palu	10 Orang	317,876,863			12 Orang	324,234,400
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Atlet/Cabor yang mengikuti Seleksi**							
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Morut	15 Orang	30,000,000		Balut	1 Cabor	30,600,000
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan(Sport Science) (Pelatda)	Kolonodale	15 Orang	101,129,000		Balut	1 Cabor	103,151,580
7.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pengembangan Kapasitas Kepramukaan**			**30,000,000**	**DAU**			**30,600,000**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**							
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kolonodale	1 Dokumen	30,000,000			1 Dokumen	30,600,000
	JUMLAH				**3,841,166,428**		**JUMLAH**		**4,209,715,737**

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

JIBRAIL ABD. KADIR, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691021 199503 1 002

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**													
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**2,220,900,081**					**2,220,900,081**
3	**26**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,228,647,000**					**1,253,219,940**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	Disparpora	100 Persen	33 Orang	33 Orang	1,228,647,000	DAU		Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,253,219,940
3	**26**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**100,317,681**					**76,500,000**
3	26	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	Disparpora	100 Persen	4 Orang	4 Orang	75,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	76,500,000
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya yang di adakan	Berkurangnya pelanggaran Disiplin Aparatur	Disparpora	100 Persen	45 Psg	45 Psg	25,317,681	DAU		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	25,824,035
3	**26**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**410,012,000**					**418,212,240**
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Disparpora	100 persen	25 Paket	25 Paket	80,000,000	DAU		Persentase Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan	100%	81,600,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Disparpora	100 Persen	2 Paket	2 Paket	30,012,000	DAU		Persentase Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	30,612,240

3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	Disparpora	100 Persen	2 Laporan	2 Laporan	300,000,000	DAU		Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	100%	306,000,000
3	**26**	**1**			**Penyediaan barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**105,000,000**					**521,063,736**
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disparpora	100 Persen	2 Unit	2 Unit	45,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	45,900,000
					Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tersedianya Mebel	Disparpora	100 Persen	2 Unit	2 Unit	60,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	61,200,000
3	**26**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													**323,261,868**
3	**26**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**316,923,400**					**155,040,000**
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disparpora	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	41,923,400	DAU		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	42,761,868
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	Disparpora	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	204,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	Disparpora	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	75,000,000	DAU		Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	76,500,000
3	**26**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,000,000**					**17,340,000**
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Disparpora	100 Persen	5 Unit	5 Unit	43,000,000	DAU		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	43,860,000

3	26	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya	Disparpora	100 Persen	10 Unit	10 Unit	17,000,000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	17,340,000
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**752,215,038**					**767,259,339**
3	**26**	**2**	**2**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**													
3	26	02	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kunjungan wisatawan	Desa Ungkea,Koya	100 Persen	2 Unit	2 Unit	717,215,038	DAU		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan	2 Unit	731,559,339
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah Laporan Monev	Desa Ungkea,Koya	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	DAU		Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	1 Laporan	35,700,000
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**132,850,750**					**10,200,000**
3	**26**	**3**	**2**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**													
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan	Event Promosi Pariwisata Nusantara yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Nasional	Jakarta, Morut	100 Persen	2 Promosi	2 Promosi	122,850,750	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak,Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan	2 Promosi	125,307,765
3	26	03	2.01	01	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran	Jumlah Dokumen Monev	Morut	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	10,200,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**75,187,291**					**76,691,037**
3	**26**	**05**	**2**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**													
3	**26**	**3**	**2**	**01**	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Morowali Utara	100 Persen	10 Orang	10 Orang	**25,000,000**	DAU		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10 Orang	25,500,000

3	26	03	2.01		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan Pariwisata	Meningkatnya kemampuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan	Kabupaten Morowali Utara	100 Persen	10 Orang	10 Orang	**25,187,291**	DAU		Meningkatnya kemampuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pegembangan	10 Orang	25,691,037
3	26	03	2.01		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Morowali Utara	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	**25,000,000**	DAU		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	25,500,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**													
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**564,005,863**					**472,134,400**
2	**19**	**3**	**2**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**													
2	19	03	2.01	03	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Prestasi di Bidang Olahraga semakin meningkat	Kolonodale Kecamatan petasia	100 Persen	1 Unit	1 Unit	**115,000,000**	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	1 Unit	117,300,000
2	**19**	**3**	**2**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**													
2	19	03	2.02	1	Penyelenggaran Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Palu	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	**317,876,863**	DAU		Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	324,234,400
2	**19**	**3**	**2**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**													
2	19	03	2.03	03	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Kolonodale	100 Persen	15 Orang	15 Orang	**30,000,000**	DAU		Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	15 Orang	30,600,000
2	19	03	2.03	03	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan(Sport	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	Kolonodale	100 Persen	1 Pelatda	1 Pelatda	**101,129,000**	DAU		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan(Sport	1 Pelatda	103,151,580
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**30,000,000**					**30,600,000**

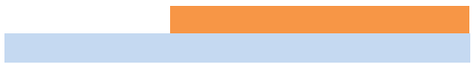
2	**19**	**4**	**2**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**													
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan tingkat Daerah	Desa Tompira Kec. Petasia Timur & Jakarta	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	DAU		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	30,600,000
												TOTAL	**3,775,159,023**					**4,049,919,257**

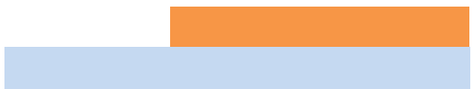
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

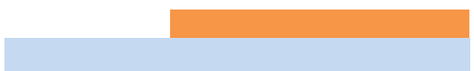
GATOT S.E.BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

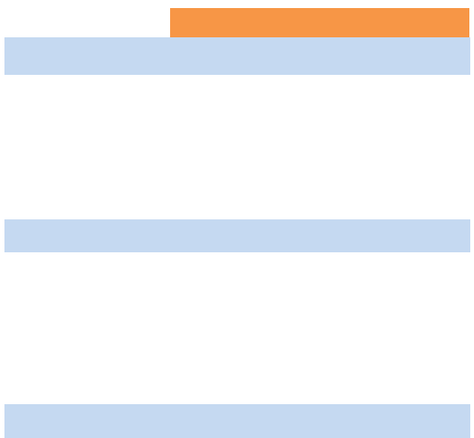
#REF!

121344600









RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mempersiapkan Rencan Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan Rancangan awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir RKPD dan penetapan RKPD. Oleh karena itu RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara reublik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaa Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Menjabarkan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Rencana Kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah:

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

2. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
3. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
4. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematik Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terjadinya Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program / kegiatan, pelaksanaan rencana program / kegiatan serta hasil rencana program / kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 8.898.050.876,00,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.470.531.915,00,- (Delapan Milyar Sembilan Empat Ratus Tujuh Puluh Juta

Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar 95,20 %.

Untuk melihat hasil evaluasi tingkat capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada uraian rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tabel. T-C.29

Tabel. T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	19	24	24	100%	24	67	279%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien**								
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24		0	0	100%	24	24	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100%	2	6	60 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	117	100	100	100 %	100	317	52,83 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya pelayanan Publik**								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8		4	4	100%	4	8	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah**								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11		11	11	100%	11	22	200%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	25	25	100%	25	70	350%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	300%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1.220	244	244	244	100%	244	732	60%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	122	70	75	50	66,67%	2	122	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	122	17	48	48	100 %	0	74	60,66 %
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	60	10	11	11	100 %	11	32	53,33 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	**Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun desa**								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	122	122	122	122	100 %	122	366	300 %
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	122	0	70	70	100 %	75	145	119 %
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	0	0	0	0 %	1	1	50 %
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan PAD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	284 Dokumen	0	0	0	0 %	284	284	100 %

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Asli Desa								
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	14	4	4	4	100 %	2	10	71,43 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need approach*), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*), pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat (*community institusional approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat *(prosperity approach),* pendekatan lintas sektoral dan program *(cross sectoral program approach),* pendayagunaan teknologi tepat guna *(appropite technologi approach*) serta pemberdayaan masyarakat perdesaan (*rural community approach*).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu mempunyai tugas pokok membantu bupati **"Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah".**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabuapten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat yang

dipimpin seorang Sekretaris Dinas dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) Kepala Bidang dengan 4 (empat) Kepala Seksi.

Adapun uraian tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabuapten Morowali Utara sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT DINAS

Tugas :

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriterai yang ditetapkan oleh Pemerintah;
d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang kekayaan milik daerah dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. Pemberiqn saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yakni :

1) Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan keuangan dan asset. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, keuangan dan asset.
   b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, pengelolaan kkeuangan dan asset, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
   c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan asset dengan pihak dan unit terkait.
   d. Melaksanakan pembinaan dan petu njuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset.
   e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan asset.
   f. Mengelola tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
   g. Menyiapan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan asset.
   h. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
   i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis dilingkungan dinas.
   j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaliasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dilingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
l. Melaksanakan tuga kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub. Bagian umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat, menertibkan dan kerumahtanggaan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Melaksanaan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai.
c. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan.
e. Melaksanakan /menyiapkan bahan usulan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri dan Surat Keterangan Pegawai.
f. Melaksanakan pengumpulan data evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan.
g. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan dilingkungan kantor.
h. Membuat laporan dan pendokemantasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian.
i. Melaksanakan tuga kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. **BIDANG PENATAAN KERJASAMA DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

Tugas :

Menyiapkan dan melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasi dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang pembinaan administrasi penataan desa, pembinaan evaluasi perkembangan desa dan pengelolaan data desa.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan operasional penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
b. Penyiapan tugas penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
c. Penyiapan, memberi petunjuk penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
d. Menata desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
e. Penyiapan bahan penyelenggaraan penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
f. Mengevaluasi penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;
g. Penyiapan bahan laporan penataan desa, pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa; dan
h. pelaksanaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Kerjasama dan Penyelnggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dibantu oleh 2(dua) seksi :

1. Seksi Penataan dan Kerjasama Desa, melaksanakan tugas melaksanakan pembinaan, fasilitas, koordinasi, supervise penyelenggaraan Penataan dan Kerjasama Desa. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Penataan dan Kerjasama Desa.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan.

c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan.
d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dengan unit/instansi kerja terkait.
e. Melaksanakan fasilitasi perubahan status Desa/Kelurahan.
f. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penetapan Desa/Kelurahan.
h. Melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan.
i. Melaksanakan verifikasi penataan tapal batas Desa/Kelurahan, Peta Desa/Kelurahan, dan Nomor Register Desa/Kelurahan.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa/Kelurahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penataan dan Kerjasama Desa.
k. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bersama antar Desa dengan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise, penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan unit/instansi kerja terkait.
   e. Melaksanakan pembinaan dan monitoring Pemilihan Kepala Desa.
   f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyusunan regulasi desa.

g. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan perencanaan desa.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
j. Melaksanakan bahan dan data, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

Tugas :

Menyiapkan dan melaksanakan kebijkan, memberikan bimbingan Teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat.

Fungsi:

a. Merencanakan operasional pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
b. Menyiapkan pendistribusian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
c. Penyiapan bahan dan memberi petunjuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
d. Menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
e. Penyiapan bahan evaluasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
f. Penyiapan bahan membuat laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan ketahanan masyarakat dan hukum adat;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa dibantu oleh 2(dua) seksi :

1. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise penyelenggaraan penataan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi:
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa dengan unit/instansi kerja terkait.
   e. Melaksanakan identifikasi dan penataan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa/Kelurahan.
   f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan.
   g. Melaksanakan pembinaan lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan.
   h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun bahan dan data dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.
   i. Merencanakan operasional pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perrdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.
   j. Menyelenggarakan pengelolaan pembangunan desa, dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.
   k. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pembangunan desa, dan kawasan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam.
   l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervise penyelenggaraan pengembangan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat. Untuk menyelenggarakan tugas, seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan program kerja seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   c. Melaksanakan kebijakan teknis kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   d. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat dengan unit/instansi kerja terkait.
   e. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis pengurus Pembina Kesejateraan Keluarga, LPM, Lembaga Adat, Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Lembaga Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat.
   f. Melaksanakan melaksanakan peniilaian dan pencanangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
   g. Melaksanakan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
   h. Melaksanakan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa.
   i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Masyarakat dan Hukum Adat.
   k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel. T-C.30.

Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMD
Kabupaten Morowali Utara

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal			30	25	2	0	27	2	2	0	
2	Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri			5	6	65	80	23	48	65	80	
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	99,45 %	97,72 %	100 %	100 %	
4	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa			100 %	100 %	100 %	100 %	97,83 %	96,95%	100 %	100 %	
5	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			100 %	100 %	100 %	100 %	91,95 %	96.10 %	100 %	100 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian penyelanggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara yang bertugas membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa mandiri yang dapat dioperasionalkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan didesa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi meningkatkan Peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan arah kebijakan :
    - Mengembangkan kapasitas usaha BUMDes
    - Mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha
2. Strategi Meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa dengan arah kebijakan :
    - Peningkatan kapasitas kelembagaan
    - Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa
    - Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan
    - Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna
    - Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan
3. Strategi Pelaksanaan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan :
    - Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
    - Meningkatkan Kapasitas Apatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana terurai dalam tabel. T-C.31

Tabel. T-C.31
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**7.613.635.882**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**7.832.556.932**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**	**100 %**	**2.981.194.293**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**	**100 %**	**2.881.194.293**	
	Kab. Morowali Utara	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org	2.981.194.293	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Org	2.881.194.293	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	**100 %**	**401.709.450**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	**100 %**	**912.535.500**	
	Kab. Morowali Utara	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	29 Paket	109.046.200	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara	Jumlah paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Paket	340.617.350	
	Kab. Morowali Utara	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	20.439.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	20.444.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kab. Morowali Utara	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	272.224.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali Utara	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 Laporan	551.474.000	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100 %**	**4.142.402.139**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100 %**	**3.950.497.139**	
	Kab. Morowali Utara	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	57.080.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	81.810.000	
	Kab. Morowali Utara	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	4.085.322.139	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	3.868.687.139	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**88.330.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**88.330.000**	
	Kab. Morowali Utara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	38.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali Utara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	38.000.000	
	Kab. Morowali Utara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainya yang dipelihara	25 Unit	16.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali Utara	Jumlah Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainya yang dipelihara	25 Unit	16.730.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kab. Morowali Utara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	33.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali Utara	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	33.600.000	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Administrasi Pemerintahan Desa**	**100 %**	**390.494.320**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Administrasi Pemerintahan Desa**	**100 %**	**2.337.114.320**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahaan Desa	**100 %**	**390.494.320**	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahaan Desa	**100 %**	**2.337.114.320**	
	Kab. Morowali Utara	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan desa	244 Orang	125.820.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Morowali Utara	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan desa	244 Orang	182.180.000	
	Kab. Morowali Utara	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	2 Dokumen	106.626.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Morowali Utara	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	2 Dokumen	2.042.014.000	
	Kab. Morowali Utara	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	57 Laporan	84.548.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	38.220.000	
	Kab. Morowali Utara	Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	11 Dokumen	73.500.320	Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Morowali Utara	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	11 Dokumen	74.700.320	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ,**	**100 %**	**1.220.404.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		**Persentase Pemberdayaan**	**100 %**	**4.042.593.070**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**			**LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Kelompok Mayarakat Dalam Membangun Desa	100 %	1.220.404.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Partisipasi Kelompok Mayarakat Dalam Membangun Desa	100 %	4.042.593.070	
	Kab. Morowali Utara	Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan lembaga masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen hasil penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan lembaga masyarakat hukum adat	122 Dokumen	80.200.000	Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan lembaga masyarakat hukum adat	Kab. Morowali Utara	Jumlah Dokumen hasil penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan lembaga masyarakat hukum adat	122 Dokumen	226.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kab. Morowali Utara	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	284 Dokumen	85.400.000	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	550 Dokumen	2.406.892.250	
	Kab. Morowali Utara	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	54.804.000	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Morowali Utara	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	409.000.820	
	Kab. Morowali Utara	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluraga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga	2 Dokumen	1.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluraga	Kab. Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga	2 Dokumen	1.000.000.000	
					9.224.534.202					**14.212.264.322**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat pada taun 2024, dapat disajikan pada Tabel T-C. 32.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**				
	Penyelenggaraan Penataan Desa				
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Desa	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJM Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 untuk program dan kegiatan ditahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian desa.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Status desa.
2. Terwujudnya pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu,

adil dan terjangkau.

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menangani urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan di daerah serta pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari 3 Program, 6 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

3.3.1 Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

3.3.2 Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
3. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
4. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
6. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan.

3.3.3 Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN.
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan.
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
5. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik.
6. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
7. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
8. Pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya.
9. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
10. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
11. Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa.

12. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
13. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
14. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
15. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
16. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
17. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tabel. T-C.33.

Tabel. T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024 dan 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**7.832.556.932**				**6.786.255.782**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**		**100 %**	**2.881.194.293**				**3.550.000.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali Utara	22 Org	2.881.194.293	APBD		100%	3.550.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien		**100 %**	**912.535.500**				**694.010.657**
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Morowali Utara	60 Paket	340.617.350	APBD		100%	265.054.399
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Morowali Utara	4 Paket	20.444.150	APBD		100%	20.321.391
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Morowali Utara	120 Laporan	551.474.000	APBD		100%	408.634.867
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Meningkatnya Pelayanan Publik**		**100 %**	**3.950.497.139**				**2.420.461.125**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	Kab. Morowali Utara	12 Laporan	81.810.000	APBD		100%	77.461.125
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kab. Morowali Utara	12 Laporan	3.868.687.139	APBD		100%	2.340.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100 %**	**88.330.000**				**121.784.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Morowali Utara	10 Unit	38.000.000	APBD		100%	76.475.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainya yang dipelihara	Kab. Morowali Utara	25 Unit	16.730.000	APBD		100%	20.309.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Kab. Morowali Utara	1 Unit	33.600.000	APBD		100%	25.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Administrasi Pemerintahan Desa**		**100 %**	**2.337.114.320**				**878.178.178**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahaan Desa		**100 %**	**2.337.114.320**				**878.178.178**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan desa	Kab. Morowali Utara	244 Orang	182.180.000	APBD		100%	132.882.029
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Morowali Utara	2 Dokumen	2.042.014.000	APBD		100%	106.626.000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Morowali Utara	1 Laporan	38.220.000	APBD		100%	536.247.200
	Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Morowali Utara	11 Dokumen	74.700.320	APBD		100%	102.422.949
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	**Persentase Pemberdayaan**		**100 %**	**4.042.593.070**				**38.156.776.736**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**							
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi Kelompok Mayarakat Dalam Membangun Desa		100 %	**4.042.593.070**				38.156.776.736
	Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan lembaga masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen hasil penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan lembaga masyarakat hukum adat	Kab. Morowali Utara	122 Dokumen	226.700.000	APBD		100%	250.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Morowali Utara	550 Dokumen	2.406.892.250	APBD		100%	36.800.976.737
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Morowali Utara	2 Laporan	409.000.820	APBD		100%	105.800.000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak	Kab. Morowali Utara	2 Dokumen	1.000.000.000	APBD		100%	1.000.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluraga	PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga							
					14.212.264.322				**45.821.210.696**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Strategi Perangkat Daerah 2021-2026. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara 2021-2026.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang memusatkan pada pencapaian arah tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian target pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Disamping itupula pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkornisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Juni 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. H.ANDI PARENRENGI
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 196612311995031020

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Kerja (Renja), tahun 2024 sebagai pedoman program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja Bagian Pemerintahan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Bagian Pemerintahan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan merupakan penjabaran yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dan Renstra Bagian Pemerintahan untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (RENJA) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi sasaran acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja berdasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dan sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,

keuangan, pelayanan umum, pemanfataan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD yang didasarkan pada penalaan rancangan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
2. Rumusan program/kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
3. Penyusunan renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan kegiatan APBD.
4. Program dan kegiatan yang di rencanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun -n dan tahun +1.

   Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA PPAS dan RAPDB.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor: 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Akhir Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Rencana Kerja (RENJA) menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Rencana Kerja (RENJA) berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sebagai Berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja.

1.1 Latar Belakang

Memuat ringkasan tentang pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja, keterkaitan Renja dan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Pada bab ini Memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Pemerintahan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Pemerintahan.
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Pemerintahan
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bagian pemerintahan
3.3 Program dan Kegiatan
Berisi faktor-faktor bahan pertimbangan rumusan program serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Pemerintahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Pemerintahan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya

dibidang Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan yang meliputi Kecamatan dan Kelurahan, Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang administrasi pemerintahan d
c. an otonomi daerah;
d. Penyiapan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
e. Penyiapan pembinaan dibidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Pemerintahan .

Isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain **REFORMASI BIROKRASI,** sebagaimana yang di amanatkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tujuan yang hendak dicapai terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik, Bersih, dan Profesional melalui prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Government) dengan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kinerja aparatur;
2. Tersedianya data dan informasi statistik;
3. Meningkatnya efektifitas peraturan daerah;
4. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah;
5. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui Pemerintahan yang baik, profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (*good gonernance)* merupakan isu strategis yang sangat penting untuk

mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap pembangunan dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

a. Terwujudnya pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program;
b. Terwujudnya pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengendalian pelaksanaan tata pemerintahan;
c. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaporan pelaksanaan pemerintahan;
d. Penyusunan program dan laporan pemerintahan;
e. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga pelaksanaan pelayanan administrasi dan sistim pelaporan pelaksanaan pemerintahan menuju kearah yang lebih baik;
f. Tersedianya suatu sistem yang mendukung sehingga proses penyerahan dan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga tidak terdapat lagi keterlambatan dalam penyerahan dan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan langkah bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan tahun 2024 Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah, Kabupaten Morowali Utara disajikan pada tabel berikut.

Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Bagian Pemerintahan.

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BAG. PEMERINTAHAN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Orang Yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92 Orang	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Penyediaan dan Peralatan Kantor Yang Disediakan	2 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERSEBAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsyltasi SKPD	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAG. PEMERINTAHAN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	TERSEBAR	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	TERSEBAR	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	TERSEBAR	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	TERSEBAR	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	BAG.PEMERINTAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	TERSEBAR	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	1 Laporan	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut harus paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Pemerintahan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan ini adalah :

a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah untuk Tahun 2024 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi dengan kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2024 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran tahun 2023
b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama 1 (satu) tahun mendatang.

Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan adalah:

a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2022;
b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu dan tertibnya administrasi pemerintahan;
c. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
d. Memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara, melalui laporan yang dapat disajikan tentang informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap bulannya.

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan arah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024, maka Bagian Pemerintahan merumuskan Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

A. Administrasi Tata Pemerintahan
   - Penataan Administrasi Pemerintahan
   - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
   - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

B. Fasilitasi Kerjasama Daerah
   - Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang juga diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2024, maka Bagian Pemerintahan telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Merujuk pada dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 8.468.792.100 (Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah)

Dana tersebut diperuntukan bagi pencapaian program dan kegiatan rutin dan kegiatan baru yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sehingga memberikan nuansa penambahan wawasan baru dalam pencapaian target sasaran yang direncanakan.

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, dan perkiraan target 2024 dapat dilihat dalam tabel yang memuat Program dan Kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali utara sebagaimana terlampir

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara

BAGIAN PEMERINTAHAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								**1,133,501,900.00**					**2,412,375,599.34**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**85,015,550.00**					**165,000,000.00**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan dan Evaluasi Yang Berkualitas		100%	4 Laporan	100%	**85,015,550.00**	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	**165,000,000.00**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor								767,150.00					997,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover								4,280,000.00					2,365,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat								3,960,000.00					27,484,950.00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa								25,156,000.00					60,861,950.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								43,352,400.00					41,426,400.00
- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan								7,500,000.00					7,500,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**46,030,000.00**					**62,215,300.00**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		100%	4 orang	100%	**46,030,000.00**	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	**62,215,300.00**
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa								46,030,000.00					16,708,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah								**454,452,800.00**					**247,000,000.00**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien		100%	2 Paket	100%	**246,567,900.00**	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	**55,210,000.00**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								11,856,400.00					5,940,350.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos								26,000,000.00					5,210,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer								390,000.00					400,000,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								21,021,500.00					44,059,650.00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)								8,500,000.00					44,059,650.00
- Belanja Modal Alat Pendingin								29,800,000.00					44,059,650.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film								55,000,000.00					44,059,650.00
- Belanja Modal Personal Computer								48,000,000.00					44,059,650.00
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer								46,000,000.00					44,059,650.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien		100%	1 Paket	100%	**34,232,500.00**	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	**42,000,000.00**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								34,232,500.00					42,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien		100%	12 Laporan	100%	**173,652,400.00**	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	**155,000,000.00**
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa								119,200,000.00					98,786,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								54,452,400.00					53,177,000.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**233,900,000.00**					**115,210,000.00**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik		100%	2 Laporan	100%	**4,300,000.00**	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	**20,000,000.00**
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah								4,300,000.00					4,300,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik		100%	4 Laporan	100%	**229,600,000.00**	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	**90,000,000.00**
- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan								22,800,000.00					4,000,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat								19,800,000.00					1,000,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi								135,000,000.00					50,000,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer								12,000,000.00					5,000,000.00
- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi								40,000,000.00					30,000,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**36,080,000.00**					**40,000,000.00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien		100%	6 unit	100%	**25,000,000.00**	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	**25,000,000.00**
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan								15,000,000.00					15,000,000.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua								10,000,000.00					10,000,000.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien		100%	16 unit	100%	**11,080,000.00**	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	**15,000,000.00**
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin								3,050,000.00					3,050,000.00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer								8,030,000.00					10,030,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**246,360,000.00**					**1,782,950,299.34**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik		100%	2 Unit	100%	**246,360,000.00**	DAU		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	**1,782,950,299.34**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								2,080,000.00					5,000,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								4,280,000.00					11,325,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural								60,000,000.00					95,150,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur								15,000,000.00					75,000,000.00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor								165,000,000.00					500,500,000.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								**7,335,290,200.00**					**1,777,541,510.75**
Administrasi Tata Pemerintahan								**7,335,290,200.00**					**1,647,541,510.75**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya penataan administrasi yang tertib		100%	3 Dokumen	100%	**7,082,602,000.00**	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	**1,050,000,000.00**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								2,620,500.00					5,850,700.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								6,522,500.00					6,100,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								5,250,000.00					5,250,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat								30,030,000.00					10,150,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli								288,000,000.00					250,000,000.00
- Belanja Jasa Pengukuran Tanah (Sertipikasi Lahan Masyarakat)								650,000,000.00					500,000,000.00
- Belanja Sewa Asrama								215,000,000.00					80,000,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa								148,144,000.00					40,000,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								105,782,400.00					42,332,400.00
- Belanja Modal Tanah								5,570,407,150.00					1,022,555,514.09
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi								700,000.00					500,000,000.00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan								4,800,000.00					500,000,000.00
- Belanja Modal Lapangan Lainnya								55,345,450.00					500,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Meningkatnya penataan administrasi yang tertib		100%	2 Dokumen	100%	**131,605,400.00**	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	**330,000,000.00**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								2,210,000.00					10,526,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								10,075,000.00					15,325,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat								11,550,000.00					18,700,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa								32,262,000.00					46,702,000.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								75,508,400.00					51,148,200.00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya penataan administrasi yang tertib		100%	4 Dokumen	100%	**121,082,800.00**	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	**267,541,510.75**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								1,521,000.00					5,885,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								8,450,000.00					11,017,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak								11,795,000.00					15,795,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat								11,550,000.00					15,180,000.00
- Belanja Jasa Kantor								10.750.000,00					58,210,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa								38,516,000.00					58,210,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								33,500,800,00					50,847,400.00
Fasilitasi Kerjasama Daerah								**87,009,000.00**					**130,000,000.00**
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Meningkatnya kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan		100%	1 Laporan	100%	**87,009,000.00**	DAU		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	1 Laporan	**130,000,000.00**
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								2,210,000.00					9,731,000.00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover								10,075,000.00					15,325,000.00
- Belanja Makan minum rapat								11,550,000.00					5,500,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa								32,262,000.00					55,342,000.00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								75,508,400.00					46,230,700.00
							TOTAL	**8,468,792,100.00**					**4,189,917,110.09**

CATATAN:

JUMLAH PROGRAM : 2
JUMLAH KEGIATAN : 8
JUMLAH SUB KEGIATAN : 15

Kolonodale, September 2024
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



BING EFRI TOBIGO, S.A.P
Pembina Tkt. I (III/d)
NIP. 19720221 199203 1 009

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan proses perencanaan atas kerjasama seluruh komponen Bagian Pemerintahan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan/penyesuaian seperlunya.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Bagian Pemerintahan Sekeretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Kolonodale, September 2024

Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Morowali Utara



BING EFIR TOBIGO, S.A.P
Penata Tkt.I (III/d)
NIP. 19720221 199203 1 009

2024

RENJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Morowali Utara lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Dengan kata lain, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen rancangan perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai salah satu acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan program-program kerja efektif dan efisien serta transparan, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk Visi-Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja Bapenda) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah (Bapenda) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan itu dan sesuai dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, yaitu merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) pada setiap tahun anggaran.

Keberadaan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal-SKPD) ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan tahunan, yang menjadi prioritas kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, serta memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Dalam hal ini, termasuk juga

kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat daerah yang merupakan salah satu mekanisme perencanaan bersifat partisipatif.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan KeuanganDaerah

7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentag Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 018).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah.

1.3. Maksud danTujuan

Rencana Kerja OPD ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas-tugas pemungutan pendapatan asli daerah, baik pajak daerah, maupun retribusi daerah sekaligus dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan (ekstensifikasi) sumber-sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024. Dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utaradapatdiperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi, dan kebutuhan dinas yang telah dijabarkan lebihlanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Morowali Utara sehingga perencanaan semakin terintegrasi dan komprehensif serta mampu mendorong komitmen dinas dalam mencapai target realisasi yang telah diprioritaskan. Selain itu, Renja juga bermanfaat sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2024 dan menjadi alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara secara terukur.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas kegiatan dan menyalurkan aspirasi bidang dan bagian dalam pererencanaan SKPD dalam rangka ikut memajukan pembangunan Kabupaten Paser. Serta menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum dan memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja secara terukur.

1.4. Sistematika

Penyusunan Rencana Kerja Bapenda yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

A. Tahapan Rumusan Rencana Kerja Bapenda

Perumusan isi dan substansi Rencana Kerja (Renja) Bapenda sangat menentukan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mendokumentasikan perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan, yaitu sebagai berikut :

a. Pengolahan data dan informasi, berupa bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan, mencakup Kondisi Pelayanan Bapenda, Organisasidan Tatalaksana Bapenda, serta Hasil Evaluasi Pencapaian Target Program dan Kegiatan Renstra Bapenda;
b. Analisis gambaran pelayanan, berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapenda dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi;
c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu, berupa telaahan terhadap kemampuan Bapenda dalam melaksanakan program dan kegiatannya dengan mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Bapenda serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

B. Tahapan Penyajian Rencana Kerja Bapenda

Penyajian Rancangan Awal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Rencana Kerja OPD, Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD, Keterkaitan antara Rencana Kerja OPD dengan Dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan

Daerah pada tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.4. SistematikaPenulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL PD TAHUN LALU

21. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja OPD dan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

22. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam PP Nomor 6 Tahun 2008.

23. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

24. Review terhadap Rencana Kerja RKPD,berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan Akhir Renja RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

25. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara adalah Badan yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah yang mulai berlaku efektif per 1 April 2019.

Keberhasilan pencapaian kinerja akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan, Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Morowali Utara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatanselanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Pemerintah Daerah, maka pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah;
2) Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah;
3) Persentase realisasi penerimaan pajak daerah,dan;
4) Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Awal Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah :Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) = 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)=2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun {(n-2)=2022}	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2022	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) = 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	---	---	---
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	---	---	---
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	100%	100%	0%	0%	---	---	---

					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100%	100%	---	0%	---	---	---
					Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	3 Orang	100%	100%	---	0%	---	---	---
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah SecaraEfektif dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	---	---	---
					Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0%	100%	100%	100%	---	---	---
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.32%	100%	99.99%	99.99%	---	---	---
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	---	---	100%	0%	0%	---	---	---
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	---	100%	100%	100%	---	---	---
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100%	100%	100%	100%	---	---	---
					Operasional UPTD Bapenda	Tersedianya operasional UPTD Bapenda	---	98.87	0%	0%	0%	---	---	---
					Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya KegiatanPemeriksaan	---	100%	0%	0%	0%	---	---	---

						Pajak Daerah									
					Fasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah	Terlaksanya fasilitasi penyelesaian pajak daerah	---	100%	0%	0%	0%	---	---	---
					Rekonsiliasi Data pendapatan asli daerah dan Dana Bagi Hasil	Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi data PAD dan Dana Bagi Hasil	---	100%	0%	0%	0%	---	---	---
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	0%	100%	100%	100%	---	---	---
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	0%	100%	100%	100%	---	---	---
					- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	0%	100%	100%	100%	---	---	---
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan dari sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)	100 %	98.95%	100%	99.67%	99.67%	---	---	---
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan dari sektor paja, Jumlah dan persentase PAD								
					- Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Dokumen	---	100%	100%	100%	---	---	---

					- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyususan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Arialis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	13 Dokumen	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8 Laporan	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	78770 Obyek Pajak	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Dokumen	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi	8 Layanan	---	100%	100%	100%	---	---	---

					Daerah	Pajak Daerah								
					- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50 Dokumen	---	100%	100%	100%	---	---	---
					- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9 Dokumen	---	100%	99.71%	99.71%	---	---	---
					- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	---	100%	95.67%	95.67%	---	---	---
					- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	---	100%	99.99%	99.99%	---	---	---
					- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	---	100%	0%	0%	---	---	---

Secara umum pada tahun 2022, sebagian besar program kegiatan mencapai tingkat realisasi di atas 90% hingga 100%, ini menunjukkan bahwa program kegiatan telah terealisasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya, dan diharapkan pada tahun 2023 dan 2024 semua program kegiatan akan mencapai tingkat realisasi hingga 100%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Badan Pendapatan Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Morowali Utara pada prinsipnya mempunyai tugas untuk melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah. Salah satunya upayanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan peningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah yang merupakan sumber PAD. Apabila di tampilkan dalam tabel adalah sebagai berikut

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thnn-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024(thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah Pajak Daerah			9-10 Jenis	9-10 Jenis	9-10 Jenis	9-10 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	9-10 Jenis	9-10 Jenis	
2.	Jumlah Retribusi daerah			13-15 Jenis	13-15 Jenis	13-15 Jenis	13-15 Jenis	---	12 Jenis	13-15 Jenis	13-15 Jenis	

Jika dilihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, untuk tahun 2022 pencapaian indicator realisasi jumlah pajak daerah adalah 8 Jenis Pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C. Capaian realisasi jumlah retribusi daerah pada tahun 2022 adalah 12 jenis, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (PBG), dan Retribusi Izin Trayek untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Tugas dan Fungsi utama Badan Pendapatan Kab. Morowali Utara adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta sumber-sumber pendapatan yang lain, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Pendapatan Kabupaten Morowali Utara memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

a. KepalaBadan;
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program danPerencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendaftaran PajakDaerah;
    2. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah;dan
    3. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah.
d. Bidang Penyuluhan dan Penagihan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi;
    2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

e. Bidang Keberatan,membawahi:
   1. Sub Bidang Pengaduan Pajak Daerah
   2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Daerah; dan
   3. Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
f. Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil, membawahi:
   1. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pusat;
   2. Sub Bidang Dana Bagi Hasil Provinsi Pendapatan lainnya; dan
   3. Sub Bidang Bagi hasil Pajak/Retribusi Desa
g. UPT Badan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah senantiasa berkoordinasi dengan OPD penghasil PAD lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Kab. Morowali Utara masih menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian capaian kinerja, berikut hambatan-hambatan yang dimaksud:

1. Kurang representatifnya ruangan kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara (Badan Pendapatan Daerah belum memiliki kantor sendiri).
2. Kurangnya sumber daya manusia dibanding dengan jenis dan jumlah tanggungjawab yang harus dilaksanakan terutama untuk mengelola data obyek pajak dan pelayanan terhadap wajibpajak.
3. Masih adanya kecenderungan masyarakat untuk "*menghindar*" dari kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD

Dengan membandingkan antara Rencana Kerja RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, maka kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD tahun 2024
Kab. Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.871.373.293	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	5.743.675.805	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	5.743.675.805	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.743.675.805	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.743.675.805	
	Aministrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		***Aministrasi Umum Perangkat Daerah***	Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	347.960.650	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.283.333	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.283.333	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daera	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	679.099.880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	679.099.880	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	363.823.050	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	363.823.050	
	- Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.231.000	- Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.231.000	
	- ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	16.000.000	- ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	16.000.000	
	- Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	16.000.000	- Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	16.000.000	
	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah -	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		***Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*** -	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
	- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	72.472.000	- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	72.472.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan	15.840.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan	15.840.000	

			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	729.040.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	729.040.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Badan Pendapatan Daerah	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	35.000.000.	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	35.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	183.160.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	183.160.000	
	- **Program Pengelolaan Pendapatan daerah**	Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan dari Sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)	100 %		- **Program Pengelolaan Pendapatan daerah**	Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan dari Sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)	100 %		
	- ***Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah***	Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan dari Sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)	100 %		***Kegiatan Penelolaan Pendapatan Daerah*** -	Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan dari Sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)	100 %		
	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Dokumen	74.999.600	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Dokumen	74.999.600	

	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Provinsi, Pusat, dan Daerah Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	13 Dokumen	408.647.150	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Provinsi, Pusat, dan Daerah Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	13 Dokumen	408.647.150	
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	99.739.500	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	99.739.500	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	21.894.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	21.894.500	
	Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	91.540.650	Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	91.540.650	
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8 Laporan	103.506.700	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8 Laporan	103.506.700	
	- Penilaiaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	78.770 Obyek Pajak	123.234.800	- Penilaiaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	78.770 Obyek Pajak	123.234.800	
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Dokumen	85.763.950	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Dokumen	85.763.950	

	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 Layanan	74.644.000	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8 Layanan	74.644.000	
	- Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	103.370.782	- Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	103.370.782	
	- Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50 Dokumen	200.282.150	- Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50 Dokumen	200.282.150	
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9 Dokumen	118.127.680	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9 Dokumen	118.127.680	
	- Pengendalaian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	72.955.270	- Pengendalaian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	72.955.270	
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	20.199.100	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	20.199.100	
	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	49.969.100	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	49.969.100	

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

Ir. AGUNG SATRIA PONGA, ST. MM
NIP. 19661206 200003 1 003

2.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat

Untuk Tahun 2024 usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/kota belum ada.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks.Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabititas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kera Indonesia di luarnegeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan Negara dan sekaligus meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian intensif berupa stimulus perpajakan. Upaya penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui pemeberian intensif fiscal pada program konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan terbarukan khususnya energi panasbumi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara sangatlah kompleks dan memerlukan kerja keras bagi segenap elemen yang ada untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi dan sosial yang telah menjadi krisis multi dimensi di tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah. Krisis multi dimensi ini menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara sampai dengan saat ini.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang berimbas pada keberatan Wajib Pajak atas ketetapan Pajak
2. Kurangnya infrastruktur yang mendukung proses penagihan pajak terutang
3. Kurangnya infrastruktur untuk menggali potensi pajak daerah
4. Kenaikan NJOP
5. Kurangnya sosialisasi tentang perpajakan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena keterbatasan pagu anggaran.

Sehingga diperlukan suatu pemikiran yang brilian untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih baik/tinggi.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Pada saat ini yang menjadi program prioritas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah masalah pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Morowali Utara

Tujuan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan professional
3. Meningkatkan system pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja Bapenda Tahun 2024 diantaranya:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional
3. Tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
4. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut Rencana Kerja RKPD, serta mempertimbangkan hasil telahaan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah :Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Bidang Pendapatan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.550.065.068				6.106.228.225
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100 Persen	5.743.675.805			100 Persen	5.059.287.855
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.743.675.805	APBD		12 Bulan	5.059.287.855
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen				100 Persen	51,105,600
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket		APBD		1 Paket	28,392,000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Badan Pendapatan Daerah	1 Orang		APBD		3 Orang	22,713,600

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 Persen	1.754.437.263			100 Persen	347.960.650
					- Penyediaan Komponen inntalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	4.283.333	APBD		1 Paket	5,604,409
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	679.099.880	APBD		1 Paket	56.736.835
					- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket		APBD		1 Paket	28.121.600
					- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	2 Paket	363.823.050	APBD		2 Paket	40,523,706
					- Penyelenggaaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	707.231.000	APBD		1 Laporan	216.974.100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 Persen	16.000.000			100 Persen	23,481,796
					- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	15 Unit	16.000.000	APBD		15 Unit	23,481,796
					Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 Persen	817.352.000			100 Persen	580.842.622
					- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan		APBD		1 Laporan	5,621,616
					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	72.472.000	APBD		1 Laporan	40,653,224

					- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	15.840.000	APBD		1 Laporan	527.394.600
					- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	729.040.000	APBD		1 Laporan	7,173,182
					Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100 Persen	218.160.000			100 Persen	43,549,702
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Pendapatan Daerah	17 Unit	35.000.000	APBD		17 Unit	27,959,490
					- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Badan Pendapatan Daerah	15 Unit	183.160.000	APBD		17 Unit	15,590,212
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan dari sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)		100 Persen	1.648.874.932			100 Persen	624,639,478
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan dari sektor paja, Jumlah dan persentase PAD		100 Persen	1.648.874.932			100 Persen	624,639,478
					- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	8 Dokumen	74.999.600	APBD		8 Dokumen	23,897,932
					- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	13 Dokumen	408.647.150	APBD		13 Dokumen	85,712,642

					-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	20 Laporan	99.739.500	APBD		20 Laporan	25,213,039
					-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	10 Unit	21.894.500	APBD		10 Unit	33,745,920
					-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	10 Laporan	91.540.650	APBD		10 Laporan	24,746,671
					-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	8 Laporan	103.506.700	APBD		8 Laporan	113,611,095
					-	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	78770 Obyek Pajak	123.234.800	APBD		78770 Obyek Pajak	46,681,040
					-	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	8 Dokumen	85.763.950	APBD		8 Dokumen	46,118,833
					-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Layanan	74.644.000			8 Layanan	29,246,464
					-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	12 Dokumen	103.370.782			12 Dokumen	29,096,857

					- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	50 Dokumen	200.282.150			50 Dokumen	44,994,560
					- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	118.127.680			9 Dokumen	33,745,920
					- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	10 Dokumen	72.955.270			10 Dokumen	28,211,555
					- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	20.199.100			5 Laporan	25,871,029
					- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	49.969.100			10 Laporan	33,745,920
TOTAL									**10.198.500.000**				**6,730,867,703**

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

Ir. AGUNG SATRIA PONGA, ST. MM
NIP. 19661206 200003 1 003

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rancangan awal yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Awal bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Badan Pendapatan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.berikut ini:

Tabel 4.1
TABEL RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Badan Pendapatan					
	PROGRAM PENUNJANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	5.871.373.293	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100%	5.743.675.805	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.743.675.805	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100%	1.754.437.263	
	- Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	4.283.333	APBD
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	679.099.880	APBD
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	2 Paket	363.823.050	APBD
	- Penyelenggaaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	707.231.000	APBD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100%	16.000.000	
- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	15 Unit	16.000.000	APBD
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100%	817.352.000	
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	72.472.000	APBD
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	15.840.000	APBD
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	729.040.000	APBD
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100%	218.160.000	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Badan Pendapatan Daerah	17 Unit	35.000.000	APBD
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Badan Pendapatan Daerah	15 Unit	183.160.000	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan dari sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)		100%	1.648.874.932	

	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan dari sektor paja, Jumlah dan persentase PAD		100%	1.648.874.932	
	- Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	8 Dokumen	74.999.600	APBD
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyususan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Pusat, Provinsi, dan Daerah Lainnya	13 Dokumen	408.647.150	APBD
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	20 Laporan	99.739.500	APBD
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	21.894.500	APBD
	- Pendataan dan Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	10 Laporan	91.540.650	APBD
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	8 Laporan	103.506.700	APBD
	- Penilaiaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya)	Kabupaten Morowali Utara	78770 Obyek Pajak	123.234.800	APBD
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	8 Dokumen	85.763.950	APBD
	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	8 Layanan	74.644.000	APBD

	- Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kabupaten Morowali Utara	12 Dokumen	103.370.782	APBD
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	50 Dokumen	200.282.150	APBD
	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	9 Dokumen	118.127.680	APBD
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Morowali Utara	10 Dokumen	72.955.270	APBD
	- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Morowali Utara	5 Laporan	20.199.100	APBD
	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali Utara	10 Laporan	49.969.100	APBD

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

Ir. AGUNG SAPRIA PONGA, ST. MM
NIP. 19661206 200003 1 003

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja organisasi perangkat daerah (Rencana Kerja - OPD 2024) ini, dengan tujuan untuk menentukan acuan dan arah pembangunan di bidang pendapatan Kabupaten Morowali Utara. Penyusunan ini tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Rencana Kerja – OPD ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga semua komponen dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara ikut terapresiasi dan terwakili, juga ikut bertanggung jawab terhadap program kerja yang direncanakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten MorowaliUtara.

Semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 , Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

RENCANA KERJA
(RENJA)

BKPSDMD

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan atas ijinNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan setelah melalui beberapa tahapan proses. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama kurun satu tahun dan sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara.

Melalui Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ini ditetapkan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Dengan demikian, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selama periode tersebut.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024. Semoga dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selalu berupaya melakukan reformasi birokrasi menuju ASN yang profesional, berdaya saing dan melayani.

Masukan mengenai penyempurnaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026.

Kolonodale, Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670720 198703 1 006

DAFTAR ISI

Contents

Halaman Judul ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **7**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD **41**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **52**

BAB V PENUTUP **67**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolahan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keraja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005- 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Daerah; Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
33. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dimaksudkan agar BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara mempunyai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya selama satu tahun. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting diharapkan kepada Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penyusunan perencanaan agar memberikan perhatian penting pada program-program yang telah disusun dan direncanakan oleh BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dan tentunya diikuti pula dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Selain itu, penyusunan ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara untuk periode satu tahun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan BKPSDMD.
2. menjabarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan Renstra BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ke dalam rencana pembangunan tahunan;
3. sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 menyangkut strategi dan arah kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

4. menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keraja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BKPSDMD Tahun 2024, didasarkan pada Renstra BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra. Dari hasil evaluasi Rencana Kerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 diperoleh kesimpulan bahwa secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara telah terlaksana dan berjalan dengan SANGAT BAIK.

Adapun keberhasilan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 105,10% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu : a. “Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD”, dari target ≥ 92% terealisasi 96,69% dengan tingkat capaian 105,10% (Sangat Tinggi).
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan capaian kinerja 129,98% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

a. “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 70 terealisasi 78,48 dengan tingkat capaian 112,11% (Sangat Tinggi).
b. “Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu” dari target 65% terealisasi 96,10% dengan tingkat capaian 147,85% (Sangat Tinggi).

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Anggaran BKPSDMD dengan capaian kinerja 105,99% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
   a. “Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD” dari target ≥85% terealisasi 95,18% dengan tingkat capaian 111,98% (Sangat Tinggi).
   b. “Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK” dari target 0 temuan terealisasi 0 temuan dengan tingkat capaian 100,00% (Sangat Tinggi).
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan capaian kinerja 101,83% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya” dari target 40 terealisasi 40,73 dengan tingkat capaian 101,83% (Sangat Tinggi).
5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Rasio Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan capaian kinerja 111,66% yang diperoleh melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
   a. “Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)” dari target 210% terealisasi 249,31% dengan tingkat capaian 118,72% (Sangat Tinggi).
   b. “Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 15% terealisasi 16,75%. Dengan tingkat capaian 111,67% (Sangat Tinggi).
   c. “Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 35% terealisasi 36,61% dengan tingkat capaian 104,60% (Sangat Tinggi).

Nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 mencapai nilai 96,69% dari target 100% dengan nilai-rata-rata capaian kinerja sebesar 98,95% atau berpredikat SANGAT TINGGI, sedangkan capaian anggaran 95,18% dari target sebesar 100% dengan rata-rata tingkat kinerja anggaran sebesar 88,75% atau berpredikat TINGGI. Total realisasi keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar Rp. 9.197.714.591 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9.663.793.312 (Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022). Di Tahun 2021, nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara mencapai nilai rata- rata 98,95% dari target 100%, sedangkan capaian anggaran 99,46% dari target sebesar 100%. Berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2021 realisasi anggaran sebesar Rp 5.943.176.322,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.974.856.489,00 atau sebesar 99,46%.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan keuangan tahun lalu dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja dan keuangan Tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja dan keuangan Tahun 2021 atau mengalami penurunan. Hal ini berdampak terhadap belum maksimalnya pencapaian target renstra BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang diinginkan dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). **Tabel 2.1** (Tabel T-C.29) berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara s/d Tahun 2024.

Tabel 2.1. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	**03**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (2)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (36)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	03	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(12)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (295)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%
5	03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (5)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	03	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (5)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	**03**	**01**	**2**	**06**		**Adminitrasi Umum Perangkat daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**95.24%**	**95.24%**	**100.00%**	**195.24%**	**195.24%**
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (4)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1)	100.00%	0.00%	100.00%	85.71%	85.71%	100.00%	185.71%	185.71%
5	03	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	**03**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%	200.00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (2)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
5	03	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (4)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
5	**03**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	**03**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (7)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (10)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	**03**	**02**				**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**99.41%**	**99.41%**	**100.00%**	**199.41%**	**199.41%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**03**	**02**	**2**	**01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**98.22%**	**98.22%**	**100.00%**	**198.22%**	**198.22%**
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (1)	100.00%	0.00%	100.00%	92.86%	**92.86%**	**0.00%**	**92.86%**	**92.86%**
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	02	2	01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (1)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (12)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (12)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	**03**	**02**	**2**	**02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (12)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (2)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	**03**	**02**	**2**	**03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (1)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	02	2	03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (1)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (5)	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**200.00%**
5	03	02	2	03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (10)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	**03**	**02**	**2**	**04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (12)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (6)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (3372)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
5	**04**	**02**				**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	**04**	**02**	**2**	**01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	04	02	2	01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	04	02	2	01	04	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	**04**	**02**	**2**	**02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	04	02	2	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	04	02	2	02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	04	02	2	02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	04	02	2	02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (0)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Kolonodale, Juli 2023

Disusun Oleh :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

NIP. 19670720 198703 1 006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara. Termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan Pelayanan Prima kepada masyarakat dan Aparatur sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara disajikan pada **Tabel 2.2** (Tabel T-C.30). Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

Tabel 2.2. (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*16*	*17*	*18*
1	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**99.05%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
1.1.	**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**0.00%**	0.00%	100.00%	100.00%	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas yang disusun (12)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.1.3	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.2.	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.2.2	Jumlah Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada BKPSDMD yang tersedia (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(2)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.3.	**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**0.00%**	0.00%	100.00%	100.00%	
1.3.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*16*	*17*	*18*
1.4.	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	
1.4.1	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (2)			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
1.4.2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (36)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.4.3	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(12)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.4.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (295)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.4.5	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (5)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.4.6	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (5)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.5.	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**95.24%**	115.40%	100.00%	100.00%	
1.5.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.5.2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (4)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.5.3	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.71%	161.59%	100.00%	100.00%	
1.5.4	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.6.	**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	
1.6.1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1)			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
1.6.2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (2)			100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proycksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*16*	*17*	*18*
1.6.3	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (4)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.6.4	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.7.	**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	
1.7.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.7.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.7.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.7.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.8.	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	
1.8.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	112.50%	100.00%	100.00%	
1.8.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (7)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
1.8.3	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (10)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	
1.8.4	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*16*	*17*	*18*
2	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN**			**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**99.41%**	**85.20%**	**100.00%**	**100.00%**	
2.1.	**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**98.22%**	94.85%	100.00%	100.00%	
2.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (1)			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.86%	0.00%	0.00%	0.00%	
2.1.2	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	111.11%	100.00%	100.00%	
2.1.3	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (1)			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2.1.4	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2.1.5	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	84.55%	100.00%	100.00%	
2.1.6	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (12)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2.1.7	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (12)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	78.57%	100.00%	100.00%	
2.2.	**Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**	93.75%	100.00%	100.00%	
2.2.1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (12)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2.2.2	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (2)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	
2.2.3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proycksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*16*	*17*	*18*
2.3.	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**							**100.00%**	82.22%			
2.3.1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	
2.3.2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (1)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
2.3.3	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (5)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2.3.4	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (10)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	80.00%	100.00%	100.00%	
2.4.	**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**0.00%**	70.00%	100.00%	100.00%	
2.4.1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (12)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2.4.2	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (6)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	60.00%	100.00%	100.00%	
2.4.3	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (3372)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	
3	**Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah**			**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**	**90.20%**	**100.00%**	**100.00%**	
3.1.	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**0.00%**	0.00%	100.00%	100.00%	
3.1.1	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*16*	*17*	*18*
3.1.2	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3.1.3	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3.2.	**Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**0.00%**	90.20%	100.00%	100.00%	
3.2.1	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3.2.2	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3.2.3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3.2.4	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	90.20%	100.00%	100.00%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*16*	*17*	*18*
3.2.5	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (0)			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	

Kolonodale, Juli 2023

Disusun Oleh :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

NIP. 19670720 198703 1 006

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu :

1. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia
2. Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi
3. Belum terpusatnya pelaksanaan pengembangan kompetensi
4. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai
5. Masih belum jelasnya “reward system”
6. Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi
7. Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan
8. Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan penetapan kebutuhannya
9. Kurangnya dukungan teknologi informasi
10. Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, jika dikaji lebh mendalam akan diperoleh bahwa hal-hal berikut ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh BKPSMD :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menuntut perubahan pada 8 (delapan) area perubahan;
3. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun ke depan yang perlu disiapkan penggantinya;
4. Belum adanya sistem Reward dan Punishment yang tegas terhadap kedisiplinan aparatur;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu ditingkatkan sehingga pelayanan Kepegawaian bisa berjalan dengan baik, bersih dan transparan.
6. Sarana dan prasarana harus ditingkatkan, khususnya bangunan gedung kantor yang representatif untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik.
7. Adanya koordinasi yang belum optimal antar instansi.
8. Masih adanya pelanggaran disiplin pegawai;
9. Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi;
10. Masih tingginya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.

11. Masih rendahnya motivasi PNS untuk memangku jabatan fungsional.
12. Belum tepatnya penempatan pegawai yang seharusnya disesuaikan dengan kompetensi;
13. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Selain tantangan, permasalahan yang ada juga bisa menjadi peluang bagi BKPSDMD. Peluang yang dapat dimanfaatkan BKPSDMD untuk menghadapi tantangan ke depan adalah :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi BKPSDMD (baik itu UU, PP, Perpres, Permen, Perda, dll yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian).
2. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personel dengan menerapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;
3. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional;
4. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;
5. Pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. Adanya unit di masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian;
7. Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga;
8. Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketertiban umum melalui profesionalisme dan kinerja pemerintah daerah.

Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah pelayanan publik bidang kepegawaian yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) melalui penataan pegawai yang profesional dan proporsional, dengan dukungan sarana prasarana yang memadai di daerah. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, bahwa dengan semakin berkurangnya pegawai yang pensiun pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan tidak mengurangi pelayanan di bidang kepegawaian di daerah, sedangkan peluang

untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang ada di daerah dan terus dilakukan pembinaan pengawasan agar Pegawai Negeri Sipil di daerah mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik di bidang kepegawaian, oleh karena itu isu-isu penting di atas yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan adalah:

1. Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah berdampak pada tuntutan perbaikan kinerja pegawai di bidang pelayanan kepegawaian yang membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja;
2. Komposisi pegawai yang ada harus sesuai dengan kebutuhan terutama dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi;
3. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat, tepat dan transparan sebagai perwujudan *good governance*;
4. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur yang terstruktur agar PNS lebih disiplin dan profesional;
5. Terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
6. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi yang berbasis data elektronik melalui jaringan internet dalam menunjang pelayanan kepegawaian.

2.4. Review Terhadap RKPD

Penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, dengan arahan Bupati Morowali Utara terkait prioritas program/

kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 2.3 (T-C.31) berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel 2.3. (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikatif	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
5.03	**KEPEGAWAIAN**										
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**3,526,826,964.40**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**10,464,050,235.00**	
5.03.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**27,000,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**27,000,000.00**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**12 Dokumen**	**10,000,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**4 Laporan**	**4,000,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1 Laporan**	**13,000,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1,968,836,964.40**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4,864,949,307.00**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 + 17 – 59 Orang/Bulan	1,919,636,964.40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**1 Tahun (40 Orang)**	**4,815,749,307.00**	**SESUAI DPA 2023 + TPP 30%**
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	36,000,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**1 Dokumen**	**36,000,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	13,200,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**2 Dokumen**	**13,200,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD			
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semasteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikatif	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**12,000,000.00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**12,000,000.00**	
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
5.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,000,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1 Laporan**	**12,000,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**369,700,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**389,700,000.00**	
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket	29,500,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**59 Paket**	**29,500,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15,200,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**12 Dokumen**	**15,200,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan			Pemulangan Pegawai yang pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan			
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan			Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan			
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	295,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**59 Orang**	**295,000,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	59 Orang	5,000,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	**59 Orang**	**25,000,000.00**	**Pegawai BKPSDMD mengikuti Sosialisasi Peraturan Terbaru sebanyak 2 kali Kegiatan**
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	25,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	**5 Orang**	**25,000,000.00**	**SESUAI RENSTRA**
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**367,400,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**692,520,928.00**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		**258,001,448.00**	**SESUAI DPA 2023**
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,200,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**4 Paket**	**16,358,180.00**	**SESUAI DPA 2023**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikatif	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM-Morowali Utara-Palu-Makassar-Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	125,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM-Morowali Utara-Palu-Makassar-Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	388,761,300.00	Anggaran 2023 perlu tambahan anggaran untuk pelaksanaan Rapat Internal Bulanan dan Rapat Koordinasi Bulanan
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1,200,000.00	Pengelolaan Arsip Dinamis BKPSDMD
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	28,200,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	28,200,000.00	SESUAI RENSTRA
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM**	**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**359,690,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM**	**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**4,050,000,000.00**	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	DI HILANGKAN DI 2024 krn sudah dimasukkan di Tahun 2023
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	249,690,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	249690000	600,000,000.00	Butuh penambahan 1 unit mobil operasional di tahun 2024
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	100,000,000.00	Pengadaan Mebel	BKPSDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	100,000,000.00	SESUAI RENSTRA
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	10 Unit	150,000,000.00	Perlu tambahan PC Unit+Peralatan PC karena adanya penambahan Pegawai
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,200,000,000.00	Perlu Pengadaan GEDUNG AULA untuk kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung DIKLAT
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Perlu Pengadaan untuk kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung DIKLAT berupa Lapangan Upacara/Olahraga/Taman di Tahun 2025
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**326,200,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**330,180,000.00**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,200,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,200,000.00	SESUAI RENSTRA
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14,060,000.00	SESUAI DPA 2023
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	295,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	314,920,000.00	SESUAI DPA 2023
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**96,000,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**97,700,000.00**	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	52,000,000.00	Tambahan Biaya pemeliharaan untuk 1 Unit Roda 4 pengadaan Tahun 2023
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	7 Unit	14,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya			
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara			Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara			
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	21,700,000.00	SESUAI DPA 2023
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	24,000,000.00	SESUAI RENSTRA

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikatif	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN**	**100%**	**1,571,491,298.35**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN**	**100%**	**3,458,899,736.00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**266,491,298.35**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**889,704,936.00**	
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	141,491,298.35	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	**4 Dokumen**	**308,103,636.00**	**SESUAI DPA 2023**
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Makasar-Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN			Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Makasar-Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN			
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	25,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	**3 Dokumen**	**28,684,800.00**	**SESUAI DPA 2023**
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN			Evaluasi Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN			
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	25,000,000.00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	**2 Lembaga**	**200,000,000.00**	**Fasilitasi KORPRI dan DWP BKPSDMD dan kegiatan fasilitasi profesi ASN lainnya seperti sosialisasi aturan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, perlindungan hukum pegawai, dll.**
5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN			Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN			
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	50,000,000.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	**12 Dokumen**	**58,420,000.00**	**SESUAI DPA 2023**
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	25,000,000.00	Pengelolaan Data Kepegawaian	makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	**12 Dokumen**	**294,496,500.00**	**SESUAI DPA 2023**
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**120,000,000.00**	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**377,366,800.00**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	20,000,000.00	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	**2 Dokumen**	**48,817,500.00**	**SESUAI DPA 2023**
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	50,000,000.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	**2 Dokumen**	**128,549,300.00**	**SESUAI DPA 2023 + 50 Juta untuk Pelaksanaan Ujian Dinas**
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	50,000,000.00	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	**1 Dokumen**	**200,000,000.00**	**Manajemen Talenta dan Manajemen Karier ASN sudah harus dilaksanakan (Tim + Rapat + Koordinasi-Konsultasi+Dokumen) + SIDANG+PELANTIKAN+ Kegiatan+Dokumen**
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**850,000,000.00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**1,837,482,100.00**	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya			
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	350,000,000.00	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	**1 Dokumen**	**860,977,000.00**	**SESUAI DPA 2023**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikatif	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	150,000,000.00	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	150000000	150,000,000.00	SESUAI RENSTRA
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang	250,000,000.00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	15 orang	650,340,800.00	SESUAI DPA 2023 + 50Juta untuk Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat			
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan			
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional			
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN			
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional			Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional			
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang	100,000,000.00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	233 Orang	176,164,300.00	SESUAI DPA 2023
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**335,000,000.00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	**354,345,900.00**	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	170,000,000.00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	170,000,000.00	SESUAI RENSTRA
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	45,000,000.00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 orang	45,000,000.00	SESUAI RENSTRA
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3372 Orang	120,000,000.00	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3372 Orang	139,345,900.00	SESUAI DPA 2023
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah**	**100%**	**1,337,391,457.46**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah**	**100%**	**6,071,071,000.00**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana Indikatif	
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun			
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	862,391,457.46	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	5,271,071,000.00	Tambahan anggaran untuk pelaksanaan Orientasi PPPK (916 orang) + Diklat Fungsional untuk 233 Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan 31 Desember 2021 + DIKLAT PIM II (3 Orang) & III (15 Orang)
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	25,000,000.00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	50,000,000.00	SESUAI RENSTRA
					6,435,709,720.21			Jumlah		19,994,020,971	

Kotamobagu, Juli 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Drs. NIMROD ACON TANDI, M.Si.
NIP. 19670720 198703 1 006

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara disajikan dalam **Tabel 2.4** (T-C.32) berikut.

Tabel 2.4. (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.03	**KEPEGAWAIAN**				
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	
5.03.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**12 Dokumen**	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**4 Laporan**	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1 Laporan**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**1 Tahun (40 Orang)**	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**1 Dokumen**	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**2 Dokumen**	
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progrnosis Realisasi Anggaran		
5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
5.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKPSDMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1 Laporan**	
5.03.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BKPSDMD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**59 Paket**	
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**12 Dokumen**	
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang pensiun	BKPSDMD	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan		
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	BKPSDMD	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPSDMD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**59 Orang**	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	**59 Orang**	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BKPSDMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	**5 Orang**	
5.03.01.2.06	**Adminitrasi Umum Perangkat daerah**		**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPSDMD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**4 Paket**	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	BKPSDMD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM-Morowali Utara-Palu-Makassar-Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**1 Laporan**	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**12 Dokumen**	
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**1 Dokumen**	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	**5.03.01.2.07.02**	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	BKPSDMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**4 Paket**	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	**10 Unit**	
5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**0**	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**1 Unit**	
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1 Laporan**	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	BKPSDMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**1 Laporan**	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**1 Laporan**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BKPSDM**	**Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	**8 Unit**	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya		
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	BKPSDMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara		
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**12 Unit**	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**1 unit**	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN**	**100%**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	**4 Dokumen**	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Makasar-Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	**3 Dokumen**	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN		
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDMD	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	**2 Lembaga**	
5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	**12 Dokumen**	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	**12 Dokumen**	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	**2 Dokumen**	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDMD	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	**2 Dokumen**	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	**1 Dokumen**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	**1 Dokumen**	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	**5.03.02.2.03.03**	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	**15 orang**	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN		
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDMD	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	**233 Orang**	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDMD	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 orang	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3372 Orang	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah**	**100%**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDMD	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDMD	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3000 Orang	
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**	**100%**	
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	BKPSDMD	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	100%	
5.04.02.2.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	BKPSDMD	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik		
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota	BKPSDMD	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	20 Orang	
5.04.02.2.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	BKPSDMD	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		
5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	1 Dokumen	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.04.02.2.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDMD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	**1 Laporan**	
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDMD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	**1 Dokumen**	

Kolonodale, Juli 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
NIP. 19670720 198703 1 006

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih yaitu : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**

Dalam upaya mewujudkanvisi tersebut, maka dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan bermasyarakat di daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Misi kabupaten Morowali Utara yang memuat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. **Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.**

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD sebagai pengelola Aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah **Misi ke-5** yaitu : **"Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik"**. Berdasarkan telaah visi dan misi tersebut, selanjutkan ditetapkan bahwa tujuan BKPSDMD sesuai

RPJMD periode 2021-2026 adalah **Tujuan ke-1** yaitu **"Meningkatkan kinerja pelayanan publik"** dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Strategis BKPSDMD periode 2021-2026 adalah **Sasaran ke-1** yaitu **"Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif"**.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah	Permasalahan Pada Pelayanan BKPSDMD Morowali Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik** Tujuan : 1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik Sasaran : 2. Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	1. Belum terwujudnya pelayanan yang cepat dan akurat 2. Belum terpenuhinya kebutuhan akan kompetensi dan kinerja pegawai	1. Masih kurangnya koordinasi dengan PD Kabupaten Morowali Utara 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM 3. Kurangnya Disiplin PNS	1. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerja pelayanan Publik dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan Daerah 2. Adanya tuntutan Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Pemerintah Pusat

3.1.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2015-2019 yaitu : "Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025". Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

a. BKN merupakan mendatori Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional. Tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.
b. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas-tugas dalan pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpangan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.
c. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, Yaitu :
    1. Profesional
        a) BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah dimanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajeman ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
        b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lemabaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajeman ASN dan pelayanan kepegawaian.
    2. Bermartabat
        a) BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;
        b) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai – nilai moral yang membentuk citra positif BKN;
        c) Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip

profesionalisme, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran Rencana strategis BKN dalam rangka mewujudkan Visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan BKN, berikut adalah sasaran strategis BKN Tahun 2015-2019 adalah :

“Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN “

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Bedasarkan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Negara Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKN	Permasalahan Pada Pelayanan BKPSDMD Morowali Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara**	1) Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia 2) Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi 3) Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan	1) Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi 2) Masih Rendahnya motivasi PNS untuk memangku jabatan fungsional	Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga lain

Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2015-2019 yaitu “Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian Bersih dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi “. Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk manjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam

melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kemeterian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Adapun aparatur negara berkepribadian bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali Utara telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian PAN RB	Permasalahan Pada Pelayanan BKPSDMD Morowali Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten	1) Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia 2) Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi 3) Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diharapkan	1) Belum terpetakannya jenis jabatan pelaksana dari setiap pegawai ASN	1) Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga lain
2	Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompetitif	1) Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia 2) Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai	1) Masih Rendahnya motivasi PNS untuk memangku jabatan fungsional	1) Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi BKPSDM (UU-PP Perpres-Permen Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; dan

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan tujuan daerah dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, BKPSDMD sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, bertujuan :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik"

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

Jadi berdasarkan sasaran daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, sasaran BKPSDMD adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif"

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam stretegi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel 3.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kabupaten Morowali Utara

VISI : Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera **MISI V : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
			Meningkatkan kapasitas aparatur

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab). Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan merupakan perpaduan perencanaan yang:

1. Partisipatif
2. Dari atas (top-down)
3. Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2021-2026.
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pelayanan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

4. Merumuskan Jabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif”: sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak eksklusif dan konservatif.
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pelayanan kepegawaian. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pelayanan kepegawaian di Kabupaten Morowali Utara jelas dan terjaga.
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi; perhatian untuk jajaran legislatif.
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat menjadi optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan “Rolling – Plan”.
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
   a. Meningkatkan jangkauan sasaran organisasi.
   b. Meningkatkan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Morowali Utara.

3.3.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

3.3.3. Rencana Program dan Kegiatan

1. Kepegawaian

Untuk mendukung upaya pelayanan kepegawaian maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pelayanan kepegawaian melalui:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan uraian Kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Kepegawaian Daerah, dengan uraian Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2. Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mendukung upaya program pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM aparatur maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan melalui:

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan uraian Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Kerja dan Pendaaan Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan platform di Tahun 2024, sebagian proses menggunakan platform SIPD Kemendagri melalui link https://morowaliutarakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/ , SIPD.GO.ID melalui link https://sipd.go.id dan menggunakan pflatform SIPD-RI melalui link https://sipd-ri.kemendagri.go.id untuk penginputan pada tahapan penganggaran.

Hasil Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tertera dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH						9.614.602.061,00							4.759.738.108,86	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.614.602.061,00							4.759.738.108,86	
	5.03	KEPEGAWAIAN						8.008.255.211,00							3.275.938.409,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.667.168.111,00						-	2.211.927.097,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 persen			-	189.269.286,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	29.394.786,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	131.652.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	28.222.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 persen			-	4.271.353.645,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	939.611.097,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	4.260.202.145,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		926.411.097,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.00 Dokumen	11.151.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 persen			-	75.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	448.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				59 Paket	17.700.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				59.00 Orang	25.152.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				59.00 Orang	18.568.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5.00 Orang	14.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen			-	738.909.180,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	367.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	248.097.700,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	16.358.180,00	Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		14.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	446.853.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	27.600.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		28.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen			-	22.256.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	40.916.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	22.256.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		40.916.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen			-	303.980.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	307.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	23.060.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	280.920.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		295.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen			-	85.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	32.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12.00 Unit	21.700.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	12.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Petasia Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**	-			-	**2.341.087.100,00**						-	**1.064.011.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	100 persen			-	375.979.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	294.011.312,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				4.00 Dokumen	248.857.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		119.011.312,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				3.00 Dokumen	29.189.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12.00 Dokumen	30.147.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12.00 Dokumen	67.984.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	100 persen			-	120.980.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2.00 Dokumen	40.900.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2.00 Dokumen	80.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	100 persen			-	1.844.127.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100 persen	700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1.00 Dokumen	1.241.127.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				15.00 Orang	603.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.606.346.850,00**							**1.483.799.699,86**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	-	-			-	**1.606.346.850,00**						-	**1.483.799.699,86**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	100,persen			-	1.606.346.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	100,persen	1.483.799.699,86	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1.606.346.850,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Kolonodale Kab. Morowali Utara, Petasia, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		1.483.799.699,86	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	J U M L A H							**9.614.602.061,00**							**4.759.738.108,86**	

BAB V
PENUTUP

Sejalan dengan Misi-5 Kabupaten Morowali Utara yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yaitu : "***Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***". BKPSDMD telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan BKPSDMD selama periode Renstra sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja pelayanan BKPSDMD di masa yang akan datang. Dari program-program prioritas ini kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja BKPSDMD.

Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan misi Kabupaten Morowali Utara tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta PD-PD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja BKPSDMD. Keberhasilan pencapaian Renja ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, tanggung jawab, kerja tuntas, dan konsisten untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKPSDMD di saat ini dan di masa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut, sehingga rencana kerja yang dibuat harus sejalan dengan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026.

Komplek Perkantoran Bupati Morowali Utara

Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia,
Kolonodale - 94971

Website: http://bkpsdm.morowaliutarakab.go.id

email :bkpsdmdmorowaliutara@gmail.com

FB : Bkpsdmd Morowali Utara Instagram : @bkpsdmd_morut

RENCANA KERJA OPD



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan Renja ke delapan yang disusun sejak dibentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Renja ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang penyelenggaraan penanganan bencana untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja BPBD tahun 2024 merupakan rencana tahun ketiga periode pelaksanaan Renstra BPBD tahun 2022-2026 yang dirumuskan dengan mencermati kondisi eksisting OPD, lingkungan strategis, prioritas pembangunan daerah dan tingkat kebutuhan masyarakat melalui hasil Musrenbang. Penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu pada tahap awal penyusunan Renja OPD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD. Tahap kedua adalah penyajian Renja OPD untuk dibahas dan dilakukan singkronisasi bersama-sama dengan Tim Bappeda yang hasilnya menjadi Renja Final yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Renja 2024 disesuaikan dengan target kinerja bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai implementasi dari visi dan Misi Kepala daerah yang termuat dalam RPJMD maupun Renstra OPD dengan titik berat pada program penanggulangan bencana baik prabencana maupun pasca bencana.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2035;
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2024;
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25); dan
27. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 39).

28. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 360/01/Renstra-BPBD-MU/I/2017 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Morowali Utara untuk 1 (satu) tahun ke depan sebagai implementasi dari pelaksanaan Renstra BPBD 2017-2024.

Penyusunan Renja tahun 2024 bertujuan :

1. Mendokementasikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun ke depan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat serta kebijakan operasional Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanganan bencana.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BPBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud danTujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Reviev Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. Tujuan,Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.2 Rencana Program dan Kegiatan

BAB. IV. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Sehubungan hal tersebut di atas maka untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana program serta hasil rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana belum dapat dilakukan secara komprehensif disebabkan Pasca Pandemi Covid 19 yang melanda Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021-2022. Banyak dari perencanaan program yang harus ditunda atau dimodifikasi. Ini juga berdampak pada jadwal pelaksanaa kegiatan tahunan yang harus tertunda tiap tahunnya. Namun demikian program kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana dapat dievaluasi dengan berpedoman pada target capaian indikator program RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Morowali Utara dan pencapaian Renstra s/d tahun 2023, disajikan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASILPELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2023
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja OPD Tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.01	7			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**90%**	**90%**	**90.0%**
04.01	7			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**

04.01	7			Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana secara efektif dan efisien**	**90%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**75%**	**75%**	**75.0%**
04.01	7			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang menunjang tugas- tugas kedinasan	1 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Pengadaan mebeuler	Tersedianya mobiler untuk memenuhi kebutuhan kantor	1 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai	1 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	**25.0%**
04.01	7			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan sarana gedung kantor sehingga berfungsi baik	1 Kegiatan	0%	0%	0%	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**	**100%**	**4%**	**0%**	**0%**	**0%**	**15%**	**19%**	**19.0%**
04.01	7			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai bidangnya	1 Kegiatan	0	0	0	0	8 orang	10 orang	**20.0%**
04.01	7			Sosialisasi peraturan perundang undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	0	0	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**

04.01	7			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Terlaksananya kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	0	0	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**Persentase Desa Rawan Bencana Yang Tangguh Terhadap Bencana**	**50%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**15%**	**15%**	**15.0%**
				Pembinaan dan pengembangan desa tangguh bencana	Jumlah desa rawan bencana yang dibina dan tangguh terhadap bencana	1 Dok	**0**	**0**	**0**	**0**	10 Desa	10 Desa	**15.6%**
04.01	7			**Program Kedaruratan dan Logistik**	**Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**75%**	**75%**	**75.0%**
04.01	7			Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	1 Pkt	0	0	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**	**Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**	**85%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**75%**	**75%**	**75.0%**
04.01	7			Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (DALA)	Terlaksanannya penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DaLA)	1 pkt	0%	0%	0%	0%	1 pkt	1 pkt	**20.0%**
04.01	7			Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana	1 pkt	0%	0%	0%	0%	1 pkt	1 pkt	**20.0%**

				Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana	1 pkt	0	0	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial**	**Persentase rumah yang di rehabilitasi akibat bencana**	**1 pkt**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**75%**	**75%**	**75.0%**
04.01	7			Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam/social	Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	1	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monev dan pelaporan	100 Unit	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana**	**Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana**	**1 Kegiatan**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Tinggi**
04.01	7			Pemetaaan Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen hasil pemetaan dan pengakajian daerah rawan bencana	0,5	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 Dok	1 Dok	**20.0%**
04.01	7			Pelaksanaan Mitigasi Bencana	Terlaksananya kegiatan mitigasi bencana	1 Keg	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM TRC	10 Org	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Rencana Kontigency	Terlaksananya Kegiatan Rencana Kontigency	1 Keg	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Penyuluhan, Simulasi, Mitigasi Bencana	terlaksananya kegiatan penyuluhan, simulasi, mitigasi bencana	1	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**

04.01	7			Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana	Tersedianya infrastruktur untuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana	0,85	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**	**Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana**	**1**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Tinggi**
04.01	7			Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	1 Pkt	0%	0%	0%	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	1 Pkt	0%	0%	0%	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**
04.01	7			**Program Tanggap Darurat Bencana**	**Persentase penanganan tanggap darurat bencana**	**85%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**85%**	**85%**	**85.0%**
04.01	7			Investigasi dan Identifikasi / Kaji Cepat Kejadian Bencana	Terlaksananya KCKB	1 Tim	0%	0%	0%	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**
04.01	7			Penanggulangan Darurat sarana dan prasarana Vital	Terlaksananya penanganan darurat sarana dan prasarana akibat bencana	1	0%	0%	0%	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	**20.0%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi menangani penyelenggaraan penanggulangan bencana maka BPBD Kabupaten Morowali Utara sebagai OPD yang baru terbentuk akhir tahun 2016 tengah fokus melakukan konsolidasi internal dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang tersedia serta melaksanakan koordinasi baik ditingkat Provinsi maupun pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kinerja pelayanan kebencanaan sangat erat kaitannya dengan kondisi eksisting wilayah Kabupaten Morowali utara baik dari aspek geografi maupun topografis yang tergolong rentan dengan bencana alam. Kejadian bencana terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2006 (masih bergabung dengan Kabupaten Morowali) adalah banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Bungku Utara yang menimbulkan korban jiwa meninggal sebanyak ±75 orang dan kerusakan rumah penduduk yang cukup banyak, terutama pada dua desa yakni desa Ueruru dan desa Boba seluruh pemukimannya rata dengan tanah. Selain itu ancaman banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Laa (DAS Laa adalah Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah) yang melintasi beberapa Kecamatan, telah merupakan ancaman tahunan yang banyak menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat.

Sebagian wilayah Morowali Utara terletak di daerah pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Tolo. Adanya perubahan iklim global, sebagian daerah tersebut semakin sering terjadi gelombang ekstrim dan abrasi kawasan pesisir pantai terutama di Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato dan Petasia Timur.

Ancaman lainnya adalah adanya kawasan rawan gerakan tanah dan gempa bumi yang dipengaruhi sesar naik Soyo Jaya-Bungku Utara - Mamosalato, sesar geser Mamosalato - Soyo Jaya dan sesar matano diperairan Teluk Tolo.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas merupakan tantangan besar yang dihadapi BPBD Kabupaten Morowali Utara, sehingga dalam rangka kinerja pelayanan penyelenggaraan penanganan bencana perlu ditingkatkan melalui dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang

sesuai dengan standar serta dukungan semua stakeholder dan sektor terkait dengan membangun hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dan sinergis. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko korban akibat bencana sebagai tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Adapun pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Morowali Utara sampai dengan tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA BPBD KABUPATEN MOROWALI UTARA S/D TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Tahun		Realisasi Capaian Tahun ke Tahun		Rasio Capaian Tahun ke Tahun	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	7	8	9	17
1	Persentase lancarnya administrasi perkantoran				95%	100%	95%	100%	0%	1,00
2	Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien				85%	90%	85%	90%	0%	1,00
3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur				0%	60%	0%	60%	0%	0,00
4	Persentase Desa Rawan Yang Tangguh Terhadap Bencana				40%	65%	40%	65%	0%	1,00

5	Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik				90%	95%	100%	90%	95%	0,00
6	Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				90%	95%	100%	90%	95%	0,00
7	Persentase rumah yang di rehabilitasi akibat bencana				90%	0%	100%	90%	0%	0,00
8	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana				Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
9	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana				Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
10	Persentase penanganan tanggap darurat bencana				95%	95%	100%	95%	95%	0,00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Secara operasional pemerintahan Kabupaten Morowali Utara baru berjalan 9 (sembilan) tahun sejak diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2013. Sebagai Daerah Otonomi Baru yang mana kelembagaan OPD yang menangani penanggulangan bencana juga baru dibentuk akhir tahun 2016, maka dalam pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Morowali Utara masih banyak terdapat kendala dan hambatan. Beberapa permasalahan mendasar berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan Program Kegiatan OPD tahunan.
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kompotensi dan pengetahuan tentang kebencanaan;
3. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, baik untuk menunjang kegiatan perkantoran, gudang logistik dan peralatan maupun sarana dan prasarana mobilitas penanggulangan bencana;
4. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor.;
5. Belum adanya kajian atas resiko bencana dan pemetaannya;
6. Belum terbentuknya desa tangguh bencana;
7. Belum terbentuknya Satgas/Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana;
8. Belum optmalnya ketersediaan anggaran personil dan kerjasama dengan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana;
9. Kurangnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.

2.4. Review terhadap RKPD

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 terdapat beberapa point yang perlu direview yang berkaitan dengan

indikator program dan target capaiannya untuk disesuaikan dengan Renstra BPBD 2022-2026. Adapun indikator yang perlu disesuaikan karena berorientasi pada output kegiatan bukan outcome yaitu program pencegahan dan kesiapsiagaan, program kedaruratan dan logistik dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Hasil Review rancangan RKPD dimaksud selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN MOROWALI UTARA

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.jt)	No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.jt)	Catatan Penting
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***	***(13)***
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**95%**	**1,875.00**	1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**95%**	**1,875.00**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	950.00		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	950.00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	475.00		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	475.00	
	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Kegiatan	450.00		Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Kegiatan	450.00	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana secara efektif dan efisien**	**85%**	**1,450.00**	2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana secara efektif dan efisien**	**85%**	**1,450.00**	

(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang menunjang tugas- tugas kedinasan	1 Kegiatan	250.00		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang menunjang tugas- tugas kedinasan	1 Kegiatan	250.00	
	Pengadaan mebeuler	Kabupaten	Tersedianya mobiler untuk memenuhi kebutuhan kantor	1 Kegiatan	250.00		Pengadaan mebeuler	Kabupaten	Tersedianya mobiler untuk memenuhi kebutuhan kantor	1 Kegiatan	250.00	
	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten	Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai	1 Kegiatan	750.00		Pembangunan gedung kantor	Kabupaten	Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai	1 Kegiatan	750.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten	Terlaksanannya pemeliharaan sarana gedung kantor sehingga berfungsi baik	1 Kegiatan	200.00		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten	Terlaksanannya pemeliharaan sarana gedung kantor sehingga berfungsi baik	1 Kegiatan	200.00	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**	**40%**	**275.00**	3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**	**40%**	**275.00**	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Dalam daerah dan Luar daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai bidangnya	10 orang	100.00		Pendidikan dan pelatihan formal	Dalam daerah dan Luar daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai bidangnya	10 orang	100.00	
	Sosialisasi peraturan perundang undangan	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	100.00		Sosialisasi peraturan perundang undangan	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	100.00	

(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	75.00		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	75.00	
4	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**		**Persentase Desa Rawan Bencana Yang Tangguh Terhadap Bencana**	**40%**	**250.00**	4	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**		**Persentase Desa Rawan Bencana Yang Tangguh Terhadap Bencana**	**40%**	**250.00**	
	Pembinaan dan pengembangan desa tangguh bencana	Kecamatan /Desa	Jumlah desa rawan bencana yang dibina dan tangguh terhadap bencana	14 desa	250		Pembinaan dan pengembangan desa tangguh bencana	Kecamatan/ Desa	Jumlah desa rawan bencana yang dibina dan tangguh terhadap bencana	14 desa	250	
5	**Program Kedaruratan dan Logistik**		**Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistic**	**90%**	**350.00**	5	**Program Kedaruratan dan Logistik1**		**Cakupan Pelayanan kedaruratan dan logistik**	**90%**	**350.00**	
	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Kecamatan /Desa	Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	1 Pkt	350.00		Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Kecamatan/ Desa	Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	1 Pkt	350.00	
6	**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**		**Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**	**90%**	**5,400.00**	6	**Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**		**Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**	**90%**	**5,400.00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (DALA)	Kecamatan /Desa	Terlaksanannya penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DALA)	1 pkt	225.00		Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (DALA)	Kecamatan/ Desa	Terlaksanannya penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DALA)	1 pkt	225.00	
	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	Kecamatan /Desa	Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana	1 pkt	175.00		Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	Kecamatan/ Desa	Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca bencana	1 pkt	175.00	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Kecamatan /Desa	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana	1 pkt	5000.00		Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Kecamatan/ Desa	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana	1 pkt	5000.00	
7	**Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial**		**Persentase rumah yang di rehabilitasi akibat bencana**	**90%**	**850.00**	7	**Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial**		**Persentase rumah yang di rehabilitasi akibat bencana**	**90%**	**850.00**	
	Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Kecamatan /Desa	Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/social	1 kegiatan	750.00		Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Kecamatan/ Desa	Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/social	1 kegiatan	750.00	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan /Desa	Terlaksananya Kegiatan Monev dan pelaporan	1 Kegiatan	100.00		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kecamatan/ Desa	Terlaksananya Kegiatan Monev dan pelaporan	1 Kegiatan	100.00	
8	**Program Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana**		**Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana**	**Sedang**	**3860.00**	8	**Program Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana**		**Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana**	**Sedang**	**3860.00**	

(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
	Pemetaaan Daerah Rawan Bencana	Kabupaten	Jumlah dokumen hasil pemetaan dan pengakajian daerah rawan bencana	1 Dok	1000.00		Pemetaaan Daerah Rawan Bencana	Kabupaten	Jumlah dokumen hasil pemetaan dan pengakajian daerah rawan bencana	1 Dok	1000.00	
	Pelaksanaan Mitigasi Bencana	Kecamatan /Desa	Terlaksananya kegiatan mitigasi bencana	1 Kegiatan	315.00		Pelaksanaan Mitigasi Bencana	Kecamatan/ Desa	Terlaksananya kegiatan mitigasi bencana	1 Kegiatan	315.00	
	Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM TRC	1 Kegiatan	250.00		Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat	Dalam daerah dan Luar daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM TRC	1 Kegiatan	250.00	
	Rencana Kontigency	Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Rencana Kontigency	1 kegiatan	350.00		Rencana Kontigency	Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Rencana Kontigency	1 kegiatan	350.00	
	Penyuluhan, Simulasi, Mitigasi Bencana	Kabupaten/ Kecamatan	terlaksananya kegiatan penyuluhan, simulasi, mitigasi bencana	1.00	195.00		Penyuluhan, Simulasi, Mitigasi Bencana	Kabupaten/ Kecamatan	terlaksananya kegiatan penyuluhan, simulasi, mitigasi bencana	1.00	195.00	
	Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana	Kabupaten/ Kecamatan /Desa	Tersedianya infrastruktur untuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana	1 Kegiatan	1750.00		Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana	Kabupaten/ Kecamatan/ Desa	Tersedianya infrastruktur untuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana	1 Kegiatan	1750.00	
9	**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**		**Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana**	**Sedang**	**700.00**	9	**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**		**Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana**	**Sedang**	**700.00**	

(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kabupaten/ Kecamatan /Desa	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	1 kegiatan	200.00		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Kabupaten/ Kecamatan/ Desa	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	1 kegiatan	200.00	
	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Kabupaten	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	1 Pkt	500.00		Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana aam	Kabupaten	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	1 Pkt	500.00	
10	**Program Tanggap Darurat Bencana**		**Persentase penanganan tanggap darurat bencana**	**95%**	**1,225**	10	**Program Tanggap Darurat Bencana**		**Persentase penanganan tanggap darurat bencana**	**95%**	**1,225**	
	Investigasi dan Identifikasi / Kaji Cepat Kejadian Bencana	Kecamatan /Desa	Terlaksananya KCKB	1 kegiatan	225.00		Investigasi dan Identifikasi / Kaji Cepat Kejadian Bencana	Kecamatan/ Desa	Terlaksananya KCKB	1 kegiatan	225.00	
	Penanggulangan Darurat sarana dan prasarana Vital	Kabupaten/ Kecamatan /Desa	Terlaksananya penanganan darurat sarana dan prasarana akibat bencana	1 Kegiatan	1000.00		Penanggulangan Darurat sarana dan prasarana Vital	Kabupaten/ Kecamatan/ Desa	Terlaksananya penanganan darurat sarana dan prasarana akibat bencana	1 Kegiatan	1000.00	
	JUMLAH				**16,235.00**		**JUMLAH**				**16,235.00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Morowali Tahun 2024, juga telah mencermati dinamika dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat khususnya terhadap dampak akibat kejadian bencana. BPBD Kabupaten Morowali Utara sangat merespon berbagai usulan program dan kegiatan dari masyarakat serta berbagai aspirasi yang disampaikan melalui DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berbagai usulan tersebut disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024

Kajian Resiko Bencana (KRB)	500.000.000	1	Keg	***500.000.000***
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	500.000.000	1	Keg	***500.000.000***
Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PB)	500.000.000	1	Keg	***500.000.000***
Sosialisasi	100.000.000	10	Keg	***1.000.000.000***
Simulasi/Gladi	100.000.000	3	Keg	***300.000.000***
Pembuatan Papan Jalur Evakuasi	50.000.000	1	Keg	***50.000.000***
Pembuatan Papan Informasi	1.500.000	10	Keg	***15.000.000***
Pengadaan Kamera Udara (Drone)	30.000.000	10	Unit	***300.000.000***
Pengadaan Seragam dan Perlengkapan TRC	1.500.000	30	Org	***45.000.000***
Dana Siap Pakai Khusus/Respon cepat Darurat (buka Rekening Baru)	1.000.000.000	1	Tahun	***1.000.000.000***
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	1	Keg	***50.000.000***
Pembangunan Gedung Kantor BPBD	8.500.000.000	1	Keg	***8.500.000.000***
Pembangunan Gudang / Workshop	2.500.000.000	1	Keg	***2.500.000.000***
Pengadaan Alat Berat Excafator Operasional Respon Darurat Bencana	1.750.000.000	1	Unit	***1.750.000.000***
Pembangunan Tanggul Penutup Banjir Desa Kalombang	8.300.000.000	1	Keg	***8.300.000.000***
Pembangunan Tanggul Penutup Banjir Ds. Lembah Sumara	7.500.000.000	1	Keg	***7.500.000.000***
Pembangunan Tanggul Penutup Banjir Ds. Tambarobone dan Uemasi	21.500.000.000	1	Keg	***21.500.000.000***
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Ungkea	5.000.000.000	1	Keg	***5.000.000.000***
Pembangunan Tanggul Bronjong Sungai Ds. Poona	1.000.000.000	1	Keg	***1.000.000.000***
Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Mandoa, Ds. Dolupo Karya	500.000.000	1	Keg	***500.000.000***
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Desa Uewaju	5.000.000.000	1	Keg	***5.000.000.000***
Pembangunan Kanal Pembuangan Sungai Lampi Desa Bunta	14.775.640.000	1	Keg	***14.775.640.000***

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran Renja BPBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 pada dasarnya merupakan pengimplementasian dari Visi dan Misi Renstra BPBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2017-2024 yang akan dicapai pada tahun berkenan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Misi 1	:	Mewujudkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang handal, efektif dan efisien.
Tujuan	:	Meningkatkan tatakelola dan sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan dapat diakses secara cepat dengan sasaran : Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan terukur berdasarkan standar operasional dan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana.
Misi 2	:	Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penanganan kejadian bencana;
Tujuan	:	Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana dengan sasaran : Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa.
Misi 3	:	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama multi sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
Tujuan	:	Peningkatan keterpaduan dan kerjasama seluruh sektor yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sasaran : Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama yang sinergis dalam penanganan bencana oleh seluruh sektor yang terkait di daerah maupun tingkat provinsi dan pusat.

Misi 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Tujuan : Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien dengan sasaran : Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dengan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai.

Misi 5 : Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dari dampak bencana.

Tujuan : Perbaikan sarana dan prasarana publik akibat bencana serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat secara normal pasca bencana dengan Sasaran : Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana dengan mengutamakan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renja BPBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan dalam Renstra BPBD tahun 2022-2026 yang akan dilaksanakan pada tahun yang berkenan, disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat melalui hasil-hasil Musrenbang serta kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Morowali Utara.

Rencana program dan kegiatan tersebut terdiri dari 10 program dan 27 jenis kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
    a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
    b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
    c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
    a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
    b. Pengadaan mebeuler.

c. Pembangunan gedung kantor.
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :
   a. Pendidikan dan pelatihan formal.
   b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
   c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan kegiatan :
   a. Pembinaan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana
5. Program kedaruratan dan logistik dengan kegiatan :
   a. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara.
6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan kegiatan :
   a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (DALA).
   b. Program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana.
   c. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana.
7. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, dengan kegiatan :
   a. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/Sosial
   b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
8. Program pencegahan dan pengurangan resiko bencana, dengan kegiatan :
   a. Pemetaan Daerah Rawan Bencana.
   b. Pelaksanaan mitigasi bencana.
   c. Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat.
   d. Rencana kontigency.
   e. Penyuluhan, simulasi mitigasi bencana.
   f. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana.
9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan :
   a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

b. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam.

10. Program Tanggap Darurat Bencana, dengan kegiatan :
    a. Investigasi dan Identifikasi / Kaji Cepat Kejadian Bencana.
    b. Penanggulangan Darurat Sarana dan Prasarana Vital

Rencana program dan kegiatan yang mencakup target kinerja program dan kerangka pendanaan BPBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.1.

Table 3.1
RENCANA KERJA OPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								**3.684.044.806**					**3.831.406.598**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**3.006.040.033**					**3.006.040.033**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**1.773.276.948**					**1.773.276.948**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	23 Orang/bulan	100%	1.773.276.948	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.773.276.948
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN							23 org/bln	840.000.000					
Belanja Tambahan Penghasilan ASN							23 org/bln	933.276.948					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**91.500.000**					**91.500.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (PDH & PDL)	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	86 Paket	100 %	41.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	41.500.000
Belanja pakaian Dinas Harian (PDH)							43 Org	20.000.000					
Belanja pakaian Dinas Lapangan (PDL)							43 Org	21.500.000					
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	5 Orang	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	25.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	5 Orang	100 %	25.000.000			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	25.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah								**435.793.085**					**435.793.085**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	2 Paket	100 %	81.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	81.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								75.000.000					
Belanja Materai							100	1.000.000					
Belanja Umbul umbul dan Bendera Merah Putih								5.000.000					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	2 Paket	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	20.000.000
Belanja Natura								20.000.000					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	100 %	100 %	44.793.085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	44.793.085
Penggandaan								27.793.085					
Cetak Baliho								17.000.000					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	3 Laporan	100 %	290.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	290.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa								170.000.000					
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								120.000.000					

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**100.000.000**					**100.000.000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	2 Unit	2 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100.000.000
Pengadaan Kendaraan Roda 2							2 Unit	100.000.000					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**490.120.000**					**490.120.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	3 Laporan	100 %	35.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	35.720.000
Belanja Tagihan Air							12 bln	3.600.000					
Belanja Tagihan Listrik							12 bln	12.120.000					
Belanja Langganan Koran								10.000.000					
Iklan Koran								5.000.000					
BBM								5.000.000					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Laporan	100 %	454.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	454.400.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji Non PNS & Sopir)							21 Org/bln	318.000.000					
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan							6 Org/Bln	34.800.000					
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							7 Org/bln	36.600.000					
Makan Minum Rapat atau Tamu								15.000.000					
Belanja Ekpedisi								50.000.000					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**115.350.000**					**115.350.000**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**115.350.000**					**115.350.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	12 Unit	100 %	70.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	70.350.000
kendaraan dinas roda 4							2 Unit	40.000.000					
kendaraan dinas roda 2							10 Unit	20.000.000					
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer							10 Unit	7.300.000					
Service AC							5 Unit	3.050.000					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	100 %	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	45.000.000
Pengecetan Gedung Kantor Sementara								5.000.000					
Rehablilitasi Gedung Kantor								40.000.000					

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								**678.004.773**					**825.366.565**
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								**95.000.000**					**95.000.000**
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Masyarakat Mengetahui Daerah-Daerah Rawan Bencana	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	1 Dokumen	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	45.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor								-					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover								-					
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/panitia penyusunan Dokumen KRB								-					
Belanja cetak spanduk								-					
Honorarium Narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia penyusunan Dokumen								-					
Belanja Sewa Sewa Gedung								-					
Uang transport Peserta Penyusunan KRB								-					
Belanja Perjalanan Dinas													
Belanja Perjalanan Dinas Biasa								25.000.000					
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								20.000.000					
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Masyarakat Mengetahui Daerah-Daerah Rawan Bencana	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	75 %	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	50.000.000

Belanja Jasa Konsultansi													
Pembuatan Aplikasi Sistim Informasi Kebencanaan								-					
Belanja Cetak													
Belanja baliho/bener penyebaran informasi tentang potensi bencana								-					
soialisasi Penanggulangan bencana													
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor								2.000.000					
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/panitia Sosialisasi								7.000.000					
Honorarium Narasumber, moderator, pembawa acara dan								10.000.000					
Belanja Sewa Sewa Gedung								1.500.000					
Uang transport Peserta Penyusunan								10.000.000					
Pakaian peserta/ panitia sosialisasi								5.000.000					
Tas Siaga Bencana								3.500.000					
Kampanye Hari kesiapsiagaan Nasional													
Kampanye Hari kesiapsiagaan Nasional								-					
Belanja Perjalanan Dinas													
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								11.000.000					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-					
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								**418.004.773**					**525.366.565**
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pengetahuan Masyarakat Akan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Ketangguhan BPBD dan Realawan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	50 %	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	40.000.000

Bimtek													
pelatihan TRC Desa								-					
Bimtek Mitigasi Bencana								35.000.000					
Belanja Perjalanan Dinas													
Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-					
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								-					
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Peralatan mengadapi darurat bencana	Pengetahuan Masyarakat Akan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Ketangguhan BPBD dan Realawan Bencana	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	0 Dokumen 100 %	100 %	35.000.000			Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	42.361.792
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Pengetahuan Masyarakat Akan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Ketangguhan BPBD dan Realawan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	0 Unit	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	50.000.000
Belanja Modal													
Belanja Modal Kendaraan Operasional Roda empat													
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang-													
pembuatan alat ukur ketianggian air													
Pembangunan pos pengamat banjir													

Pengadaan alat Berat													
Belanja Modal Alat SAR Lainnya													
Belanja Barang dan Jasa													
Belanja seragam dan Kelengkapan TRC- PB													
Seragam Relawan Bencana													
Perlengkapan septi perlindungan diri TRC								10.000.000					
Belanja Bahan Bakar								-					
Belanja bahan bakar simulasi, pelatihan kesiapsiagaan								5.000.000					
Perbaikan dan perawatan Peralatan Kesiapsiagaan													
Biaya Perbaikan dan Perawatan Peralatan Kesiapsiagaaa								15.000.000					
Belanja Perjalanan Dinas													
Belanja Perjalanan Dinas Biasa													
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Rencana penanggulangan bencana dimulai dari Desa	Pengetahuan Masyarakat Akan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Ketangguhan BPBD dan Realawan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	10 Kecamata	n100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	45.000.000
Belanja Perjalanan Dinas													
Belanja Perjalanan Dinas Biasa								15.000.000					
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								30.000.000					

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Penunjang Kegiatan Pasca Bencana	Pengetahuan Masyarakat Akan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Ketangguhan BPBD dan Realawan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	100 %	100 %	223.004.773	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	298.004.773
Belanja Perjalanan Dinas Biasa								**62.790.000**					
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								**85.214.773**					
Belanja Bahan Bangunan Pasca Bencana							10 Unit	**75.000.000**					
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Pengetahuan Masyarakat Akan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Ketangguhan BPBD dan Realawan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	20 Orang	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	50.000.000
BIMTEK TRC Desa							20 Org	50.000.000					
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								**120.000.000**					**160.000.000**
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Respon cepat untuk mengumpulkan data masyarakat terkonfirmasi serta penyediaan sarana dan prasarana vital	Kegiatan Penyelamatan Evakuasi	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	75 %	75 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	45.000.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Adanya Data hasil assesmen Kejadian bencana Kabupaten kota	Kegiatan Penyelamatan Evakuasi	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	75 %	75 %	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	50.000.000

1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Kerjasama lintas sector dalam bidang kebencanaan.	Kegiatan Penyelamatan Evakuasi	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	75 %	75 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	35.000.000
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tersedianya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelamatan Evakuasi	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	0 Orang 75 %	75 %	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	30.000.000
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa								20.000.000					
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								5.000.000					
1	**05**	**03**	**2,04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**45.000.000**					**45.000.000**
1	05	03	2,04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Peraturan Penggulangan Bencana Kabupaten	Kab. Morowali Utara, Petasia, Kolonodale	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100 Persen	45.000.000
					Belanja Pakai Habis													
					Belanja ATK								500.000					
					Belanja Jasa Konsultansi													
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko bencana													
					Belanja Perjalanan Dinas													
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa								24.500.000					
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								20.000.000					
												TOTAL	**3.684.044.806**					**3.831.406.598**

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari Renstra 2022-2026 yang akan dilaksanakan pada tahun yang berkenan.

Renja tahun 2024 telah mengakomodir berbagai aspirasi dan dinamika kebutuhan masyarakat melalui hasil-hasil Musrenbang serta kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana akibat kondisi geografis dan topografis wilayah Kabupaten Morowali Utara yang tergolong rentan dengan bencana, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD, perlu mendapat dukungan optimal untuk peningkatan sarana dan prasarana serta logistik penanganan bencana melalui pendanaan yang memadai.

Dengan ditetapkannya Renja tahun 2024 ini diharapkan dapat dipedomani dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Morowali Utara.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Morowali Utara

DELFIA PARENTA, ST
NIP. 196811091998031008

RENCANA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

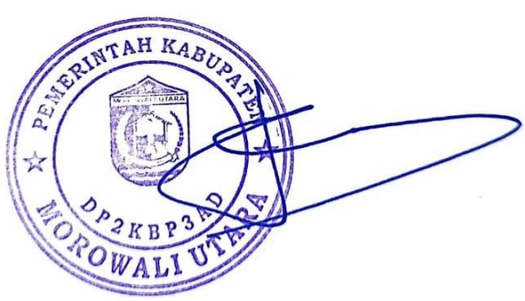
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedomaan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja DP2KBP3AD yang telah disusun ini merupakan komitmen dari Pimpinan dan seluruh staf DP2KBP3AD demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Semoga Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 2024

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



ALNO BERNIAT, SKM.M.Kes
NIP. 19671115199103 1 014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Govermance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan *mendorong* partisipasi masyarakat.

Sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke dalam program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara, sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SOPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SOPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SOPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SOPD yang dilanjutkan dengan Renja SOPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SOPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan Dinas Daerah;

20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing–masing Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematik Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terjadinya Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

- Kebijakan perencanaan program/kegiatan,
- Pelaksanaan rencana program/kegiatan serta
- Hasil rencana program/kegiatan.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 11.996.804.793,00.

Capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada uraian rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tabel. T-C.29

Tabel. T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra %
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN**								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	100%							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%		100%		100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	100%							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%		100%		100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakna	100%		99%		99%	100%	83,34%	83,34%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100%		100%		100%	100%	66,68%	66,68%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		100%		100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%		100%		100%			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		100%		100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%		100%		100%	100%	74,94%	74,94%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%		100%		100%	100%	93,15%	93,15%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya						100%	76,91%	76,91%
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan Peserta Kb, Rasio Akseptor Kb, Rata-Rata Jumlah Anak Perjumlah Umur Perkawinan, Pembentukan Kampung Kb, Presentase Klinik Kb Yang Dibentuk**								
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengendalian Penduduk**								
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	100%		100%		97,62%	100%	99,13%	99,13%
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan Peserta Kb, Rasio Akseptor Kb, Rata-Rata Jumlah Anak Perjumlah Umur Perkawinan, Pembentukan Kampung Kb, Presentase Klinik Kb Yang Dibentuk**								
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								

	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100%		100%		100%	100%	99,64%	99,64
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK						100%	98,22%	98,22%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Cakupan Peserta KB Rasio Akseptor KB, Penurunan Angka Kelahiran Total dan Unmet Need, Peningkatan Prevalensi Kontrasepsi Modern, Meningkatnya Media Usia Pertama Perempuan (MKJP), Distribusi alat dan Obat Kontrasepsi**								
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia	100%		100%		100%	100%	100%	100%
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100%		100%		100%	100%	100%	100%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%		100%			100%	91,34%	91,34%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						100%	100%	100%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%		100%		100%	100%	80%	80%

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%		100%		96,85%	100%	100%	100%
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**									
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (note : disatukan kegiatannya sesuai renstra)	**Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (note : disatukan kegiatannya sesuai renstra)**								
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		100%		100%			
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						100%	99,95%	99,95%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		100%		100%	100%	98,72%	98,72%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%		100%		82,64%	100%	100%	100%

5	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**									
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partsispasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partsispasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100%		100%		99,95%	100%	100%	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%		100%		100%	100%	100%	100%
6	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**									
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%		100%			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota						100%	100%	100%

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan								
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						100%	76,58%	76,58%
9	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**									
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100%	100%	100%
10	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**									
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					100%	100%	100%	100%

	Penyediaan Layanan Bagi Aanak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Layanan Bagi Aanak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						100%	100%	100%

Kolonodale, 2024

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

ALNO BERNIAT, SKM.M.Kes
NIP. 19671115199103 1 014

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Kinerja Pelayananan yang berkaitan dengan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun lingkup Pelayanan Urusan wajib Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara tesebut terdiri atas :

1. Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan penggerakan
2. Bidang Keluarga Berencana
3. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
5. Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan gambaran kinerja dimana secara garis besar, hasil pencapaian (*outcome)* berdasarkan target sasaran Renstra DP2KBP3AD TAHUN 2021-2026 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah jiwa dalam keluarga/jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2016 sebanyak 111.528 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat wanita yang menikah atau Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 19.533 PUS.
2. Partisipasi pemakaian alat kontrasepsi dari PUS yang ada adalah sebanyak 13.993 akseptor semuanya dilayani melalui jalur program pemerintah dan swasta. Berdasarkan keadaan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali Utara dalam pemakaian alat kontrasepsi cukup tinggi.
3. Bila dibandingkan akseptor aktif dalam penggunaan alat kontrasepsi dengan Pasangan Usia Subur yang ada / *Current User* (CU) terdapat sebanyak 71 %, artinya 71 %dari PUS yang ada telah menggunakan alat kontrasepsi dalam mengatur tingkatkelahiran. PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi

adalah sebanyak 5.540, dikarenakan berbagai alasan sebagai berikut : *karena hamil, Ingin Anak Segera,Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi.*

4. Kelompok lain disebut dengan *Unmet-Need* yaitu kelompok-kelompok yang membutuhkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat terlayani, ini disebabkan antara lain karena ketidaktahuan akseptor terhadap sarana alat kontrasepsi, keterbatasan kemampuan dalam mendapatkan alat kontrasepsi, keterbatasan akses dengan sarana pelayanan dan adanya budaya setempat yang tidak menerima kehadiran alat kontrasepsi moderen.
5. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut telah tersedia tempat pelayanan berupa klinik pemerintah yang melayani keluarga-keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat pertama, yaitu sebanyak 13 Klinik KB dan di dukung oleh sarana-sarana pelayanan lainnya seperti : Rumah sakit 1 unit, Puskesmas 13 unit, Pustu sebanyak 52 unit, Poskesdes sebanyak 84 unit, Klinik KB Swasta sebanyak 9 unit dan sarana-sarana pendukung lainnya seperti : Poliklinik, Apotik, Toko Obat dan penyalur alat kontrasepsi lainnya. Dari segi ketenagaan Dokter yang ada sebanyak 10 orang, jumlah bidan yang ada dan melaksanakan pelayanan secara mandiri terdapat sebanyak 181 orang.
6. Untuk klasifikasi keluarga yang ada di kabupaten Morowali Utara, DP2KBP3AD memberikan klasifikasi berdasarkan tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu dengan membagi kemampuan keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan tertiar sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Dari pemenuhan kebutuhan tersebut maka keluarga tersebut dikategorikan menjadi Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus. Hasil rekapitulasi pendataan Keluarga yang dilaksanakan tahun 2016 menunjukkan bahwa ada 6.225 KK tergolong Keluarga Pra-Sejahtera, 6.551 KK termasuk kategori Keluarga Sejahtera-I. Keluarga Sejahtera II dan Keluarga Sejahtera III masing-

masing sebanyak 10.035 KK dan 5.431 KK. Untuk keluarga Sejahtera III plus terdapat sebanyak 252 KK.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Morowali Utara.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah terdiri dari:

a. Kepala Dinas

(1) Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi :

b) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

e) Pelaksanaan administrasi dan perencanaan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

f) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan Dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

a) Sub Bagian Program dan Perencanaan

(1) Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan bahan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Program dan Perencanaan;
b. Melaksanakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Melaksanakan, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Minimal, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, serta segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

d. Melaksanakan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Melaksanakan bahan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. Melaksanakan urusan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk opersaional kegiatan, revisi anggaran;
g. Melaksanakan urusan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, dan statistik bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Melaksanakan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan melaksanakan urusan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
i. Melaksanakan urusan pendokumentasian kegiatan;
j. Melaksanakan bahan pelaporan kinerja dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
k. Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

(1) mempunyai tugas melaksanakan bahan koordinasi rumusan kebijakan, pembinaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan bahan penyusunan kegiatan rutin;
b. Melaksanakan urusan akuntansi, verifikasi dan melaksanakan administrasi keuangan;
c. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
d. Melaksanakan pertanggung jawaban, pengelolaan dokumen keuangan dan melaksanakan urusan gaji pegawai;
e. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntunan perbendaharaan dan ganti rugi;
f. Melaksanakan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
g. Melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi barang;
h. Menyelenggarakan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
i. Melaksanakan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Keuangan dan Aset; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, pemberian dukungan administrasi ketatausahaan kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

b. Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, mengelola system informasi manajemen kepegawaian;
c. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan atau BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU /KARSI), Pemberian tanda penghargaan/Tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;
d. Melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Keputusan Bupati Serta telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang–undangaan, urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
e. Melaksanakan, menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, pensiun pegawai dan lain-lain;
f. Melaksanakan, menyelenggarakan fasilitas penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
g. Melaksanakan, menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;
h. Melaksanakan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
i. Melaksanakan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
j. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia pegawai, melaksanakan evaluasi kinerja PLKB/PKB, melaksanakan perhitungan dan penetapan angka kredit PLKB/PKB;
k. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program kerja, melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluh dan penggerakan.

(2) Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penyiapan bahan penyusunana kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan;
b. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan;
c. Penyiapan bahan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka kuantitas penduduk;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
e. Penyiapan bahan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Daerah;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, penyuluh dan penggerakan;
h. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a) Seksi Advokasi dan Penggerakan

(1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan.

(2) Uraian tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan;
b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Penggerakan;
c. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi dan Seksi Advokasi dan Penggerakan;
d. Melaksanakan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria dibidang advokasi dan Seksi Advokasi dan Penggerakan;
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Seksi Advokasi dan Pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Advokasi dan Seksi Advoaksi dan Pergerakan;
g. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyiapan, penyusunan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;

(2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan bahan perumusan, dan bahan penyiapan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana ;
b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluh, pendayagunaan petugas lapangan Keluarga Berencana;
c. Melaksanakan penyelenggaraan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pendayagunaan petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
e. Melaksanakan penyelenggaraan bahan penguasaan potensi wilayah di bidang penyuluh pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
f. Melaksanakan pembentukan Kader, Pelatihan, Orientasi, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
g. Melaksanakan penyelenggaraan Institusi Masyarakat Pedesaan dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam melaksanakan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan, Pendayagunaan, Petugas lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
i. Melaksanakan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;

j. Melaksanakan kebijakan dan pengembangan pemberdayaan penyuluh Keluarga Berencana dan jejaring Keluarga Berencana;
k. Melaksanakan dan menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

(1) Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di kabupaten;

(2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
b. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
c. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
d. Melaksanakan Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
e. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
f. Melaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
g. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
h. Melaksanakan pemantuan dan evaluasi di seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

i. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
j. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Keluarga Berencana

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar produser dan criteria bidang Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
d. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang Keluarga Berencana; dan
h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

(1) mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.
(2) Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;

b. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana;
d. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
e. Melaksanakan dan menyusun rencana program dan kegiatan pada seksi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
f. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat-obat kontrasepsi serta jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
g. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi jangka panjang;
h. Melaksanakan fasilitas pelayanan Keluarga Berencana, Keluarga Berencana pasca persalinan dan pasca keguguran;
i. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan peningkatan dan kelestarian kesertaan ber-KB;
j. Melaksanakan penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
k. Melaksanakan sasaran pendistribusian Alat Kontrasepsi; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

(1) mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggara Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

(2) Uraian tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Melaksanakan dan menyusun rencana program kegiatan seksi Jaminan pelayanan Keluarga Berencana;
b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang jaminan Keluarga Berencana;

c. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
e. Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
f. Melaksanakan penetapan dan pengembangan/perluasan jaringan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi ;
g. Melaksanakan penetapan sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, peningkatan sasaran *Unmet Need*, Peningkatan sasaran penanggulan masalah kesehatan reproduksi serta peningkatan sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
h. Melaksanakan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi serta pelaksanaan *informed chois dan informedconsent* dalam pelayanan Keluarga Berencana;
i. Melaksankan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Keluarga Berencana;
j. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
k. Melaksanakan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesertaan Keluarga Berencana; dan
l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB

(1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB.

(2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB ;

b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB;
c. Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis Pembinaan Kesertaan ber-KB;
d. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;
e. Melaksnakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
f. Melaksanakan Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana dan melaksanakan pembinaan ber-KB;
g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;
h. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

a. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan keluarga di Kabupaten.
b. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
    a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan kesejahteraan keluarga;
    b. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang ketahanan kesejahteraan keluarga;
    c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga balita;
    d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
    e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan;

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
g. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang ketahanan keluarga; dan
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

(2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Melaksanakan dan menyusun rencana program kegiatan seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
b. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. Melaksankan dan mengembangkan kegiatan, metode-metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga;
d. Melaksanakan kemitraan untuk aksebilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS);
e. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan keluarga sejahtera;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, Standar, Prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
g. Melaksankan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
h. Melaksankan penyusunan sasaran peningkatan dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera;

i. Melaksakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Keluarga sejahtera;
j. Melaksanakan tugas pembuatan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksankan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia.

(2) Uraian tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a) Melaksankan perumusan dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia;
b) Melaksanakan Penyelenggaraan Norma Standar Prosedur dan Kriteria pada bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita dan Lansia;
c) Melaksanakan dan menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina ketahanan Keluarga Balita dan Lansia;
d) Melaksankan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia;
e) Melaksanakan penyelenggaraan saran dan prasarana pelayanan pembinaan Keluarga Balita dan Lansia;
f) Melaksanakan penyusunan sasaran peningkatan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia;
g) Melaksanakan sosialisasi program bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia;
h) Melaksanakan pembentukan kelompok Tribina, Pelatihan, Orientasi, Workshop, dan kegiatan lainnya untuk meningkatakan pengetahuan dan keterampilan di bidang Ketahanan Balita dan Lansia;

i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijaka n di bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita dan lansia ; dan

j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja

(1) mempunyai tugas melaksanakan Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur, dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

(2) Uraian tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Melaksanakan perumusan dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Ketahanan Remaja;

b. Melaksanakan penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pada bidang ketahanan remaja;

c. Melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Ketahanan Remaja;

d. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pembinaan Ketahanan Remaja;

e. Melaksankan penyelenggaraan sarana dan prasarana pelayanan pembinaan Ketahanan Remaja;

f. Melaksanakan penyusunan sasran peningkatan partisipasi remaja dalam kegiatan pembinaan ketahanan;

g. Melaksanakan kebijakan dan pengembangan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi;

h. Melaksanakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Bina Ketahanan Remaja;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Remaja; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

(1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre, pemberdayaan perempuan, pencegahan, perlindungan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, Ketenagakerjaan, Situasi Darurat, dan kondisi khusus dari timdak pidana perdagangan orang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, hukum dan politik;
b. Melaksanakan Pembinaan, fasilitas pengawasan kelembagaan dan pelaksanaan kesetaraan gendre dibidang ekonomi, social, hukum, dan politik;
c. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan;
d. Pengoordinasian, pembinaan, dan pengawasan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gendre di bidang ekonomi, social, hukum dan politik;
e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, tentang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan penanganan masalah sosial perempuan;
f. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender bidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik;
g. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial, ekonomi, hukum dan Politik;
h. Menyiapkan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

a) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan pengarusutamaan Gender

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik Dan Pengarusutamaan Gender.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

a. Merencanakan program kegiatan fasilitas, pengembangan, dan penguatan jaringan kelembagaan pemberdayaan ekonomi sosial, hukum dan politik;
b. Menyiapkan rencana kegiatan seksi PUG dibidang ekonomi;
c. Menyiapkan kegiatan dan materi penyuluhan dan TOT kepada kelompok ekonomi perempuan yang mempunyai usaha ekonomi produktif;
d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender, di bidang politik, hukum dan sosial;
e. Memfasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender bidang politik dan hukum;
f. Menyiapkan kegiatan dan meteri penyuluhan pelatihan TOT bidang pengarusutamaan gendre, sosial, hukum dan politik;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Perlindungan perempuan; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pencegahan, perlindungan dan penangan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi;

a. Merencanakan program kegiatan pencegahaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan upaya pencegahaan dan penanganaan kekerasan terhadap perempuan;
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah tindakan tertulis maupun lisan dalam rangka pencegahaan dan penanganan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan;
d. Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan penanganan kekerasan dan perlindungan perempuan;
e. Menyiapkan bahan-bahan modul penelitian kapasitas sumber daya manusia tenaga pengelola layanan terpadu dan pendamping korban kekerasan;
f. Menyiapkan bahan sosialisasi pencegahaan dan perlindungan perempuan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penanganan dan perlindungan perempuan pada pusat pelayanan terpadu;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Seksi Advokasi dan Pendampingan Hukum

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan pemberdayaan perempuan dalam bidang Advokasi dan Pendampingan Hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan,

dalam situasi darurat, dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Advokasi dan Pendampingan Hukum mempunyai fungsi :

a. Merencanakan pembinaan fasilitas advokasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan penanganan korban pada lembaga penyedia layanan terpadu;
c. Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan penaganan korban kekerasan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
d. Menyiapkan fasilitas pelayanan penanganan korban kekerasan dan pendampingan hukum yang berperspektif gender;
e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, advokasi dan pendampingan hukum bagi tenaga pendampingan korban kekerasan;
f. Melaksanakan upaya advokasi dan pendampingan hukum secara berjenjang kepada perempuan korban kekerasan;
g. Menyiapkan konsep tata naskah Perundang-undangan dalam mengadvokasi dan memfasiliatsi layanan pendampingan perempuan korban kekerasan;
h. Melaksanakan koordinasi terpadu pada lembaga penyedia layanan dan organisasi pemerhati perempuan untuk melakukan pendampingan agar mendapatkan advokasi hukum yang berkeadilan;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Advokasi dan Pendampingan Hukum Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

(1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengkajian, fasilitasi, evaluasi dan

pemantauan serta bimbingan teknis, dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dan pengawas pengembangan Kabupaten layak anak yang meliputi terwujud : Puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan rute anak selamat ke dan dari sekolah;
b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan kelembagaan pemenuhan dan tumbuh kembang anak;
c. Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan tentang masalah perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan Kabupaten layak anak;
d. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, dan kegiatan budaya;
e. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, dan kegiatan budaya;
f. Menyiapkan koordinasi dan sinkronasi penyerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas, dan kegiatan budaya;
g. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
i. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Perlindungan Hak Anak

(1) mempunyai tugas penyiapkan perumusan kebijakan, pengkajian, koordinasi, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang perlindungan khusu anak.

(2) Untuk menyelanggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
g. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
h. Melaporakan hasil pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Perlindungan Anak kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemenuhan Hak Anak

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
c. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sispil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;

g. Menyiapkan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usah terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
h. Menyiapkan penguatan dan penegmbangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemenuhan Hak Anak dan Kelembagaan Anak kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Data dan Informasi Anak

(1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai fungsi :
a. Melaksankan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan pengembangan data dan informasi gender dan anak;
b. Merencanakan tersedianya data dan informasi gender dan anak sebagai acuan pengembangan program;
c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis dan bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan khusus bagi anak;
d. Memfasilitasi pengintegrasian kebijakan seksi data informasi gender dan anak;
e. Menyiapkan bahan dan modul pelatihan peningkatan kapasitas dan sosialisasi kebijakan dan informasi gender dan anak;

f. Memfasiltasi pelayanan data dan informasi gender dan anak sebagai bahan dasar pembuatan profil anak;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas seksi Data dan Informasi Anak kepada Kepala Bidang Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel. T-C.30

Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP2KBP3AD
Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	100	100			1 Laporan	1 Laporan	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100	100	100	100	100%	100%	42 Orang / Bulan	42 Orang / Bulan	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				100	100	100			4 Laporan	4 Laporan	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100	100	100			42 Paket	42 Paket	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100	100	100			35 Orang	25 Orang	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	100	100	100	100%	100%	5 Paket	5 Paket	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100	100	100	100	99%	66,68	10 Paket	10 Paket	
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100	100	100	100	100%	100%	1 Paket	1 Paket	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	100	100	100	100%	100%	42 Laporan	42 Laporan	
12	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100	100	100			3 Unit		
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100	100	100			3 Unit		
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100	100	100	100	100%		3 Unit		
15	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				100	100	100			3 Unit		

16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100	100	100	100	100%	100%	10 Laporan	10 Laporan	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100	100	100	100	100%	74,94%	12 laporan	12 laporan	
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100	100	100			1 Laporan	1 Laporan	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100	100	100	100	100%	93,15%	1 Laporan	1 Laporan	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100	100	100			5 Unit	10 Unit	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100	100	100		76,91%	5 Unit	10 Unit	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				100	100	100			3 Unit	5 Unit	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100	100	100			3 Unit	10 Unit	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100	100	100			1 Unit	1 Unit	
25	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
26	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
27	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
28	Penguatan Kerja sama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
29	Advkasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kependudukan, pendidikan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS JALUR Non formal dan informal				100	100	100			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	

30	pelaksanaan sarahsehan hasil pemuktahiran data keluarga				100	100	100			1 Laporan	1 Laporan	
31	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			100	100	100	100	97,62%	99,13%	1 Dokumen	1 Dokumen	
32	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja			100	100	100	100	100%	99,64%	10 Organisasi	10 Organisasi	
33	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal				100	100	100			20 Dokumen	20 Dokumen	
34	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK				100	100	100			1 Unit	1 Unit	
35	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				100	100	100			10 Dokumen	10 Dokumen	
36	Pengendalian Program KKBPK				100	100	100		96,22%	10 Laporan	10 Laporan	
37	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				100	100	100			10 Organisasi	10 Organisasi	
38	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			100	100	100	100	100%	100%	279 Unit	279 Unit	
39	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			100	100	100	100	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	
40	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			100	100	100	100	100%	91,34%	375 Orang / Kader di 10 Kecamatan	375 Orang / Kader di 10 Kecamatan	
41	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				100	100	100		100%	13 Laporan	13 Laporan	
42	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				100	100	100			15 Orang	15 Orang	
43	Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				100	100	100			740 Orang	740 Orang	
44	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			100	100	100	100	100%	80%	10 Laporan	10 Laporan	

45	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				100	100	100			15 Orang	15 Orang	
46	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				100	100	100			1 Laporan	1 Laporan	
47	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran				100	100	100			20 Orang	20 Orang	
48	Peningkatan Kesertaan Ber-KB bagi Pria				100	100	100			10 Orang	10 Orang	
49	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			100	100	100	100	96,85%	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	
50	Pembinaan Terpadu Kampung KB				100	100	100			22 Laporan	20 Laporan	
51	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				100	100	100			1 Kelompok	1 Kelompok	
52	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			100	100	100	100	100%		10 Laporan	10 Laporan	
53	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				100	100	100		99,95%	375 Orang / Kader di 10 Kecamatan	375 Orang / Kader di 10 Kecamatan	
54	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			100	100	100	100	100%	98,72%	10 Laporan	10 Laporan	
55	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			100	100	100	100	82,64%	100%	10 Laporan	10 Laporan	

56	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				100	100	100			10 Dokumen	10 Dokumen	
57	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partsispasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			100	100	100	100	99,95%		10 Organisasi	10 Organisasi	
58	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			100	100	
59	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100		100%	100	100	
60	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			100	100	
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
62	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota				100	100	100		100%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	
63	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			20 Orang	20 Orang	
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Layanan	1 Layanan	
65	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Laporan	1 Laporan	
66	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100%	76,58%	10 Orang	10 Orang	

67	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kab/kota				100	100	100			10 Orang	10 Orang	
68	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			15 Dokumen	15 Dokumen	
69	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100%		1 Layanan	1 Layanan	
70	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
71	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
72	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Organisasi	1 Organisasi	
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
74	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			10 Orang	10 Orang	
75	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100%	99,86%	1 Dokumen	1 Dokumen	
76	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
77	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hhidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	

78	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	
79	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100		60,90%	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	
80	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100			10 Orang	10 Orang	
81	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100		53,35%	1 Layanan	1 Layanan	
82	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	
83	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				100	100	100			1 Dokumen	1 Dokumen	

Kolonodale, 2024

KEPALA DINAS P2KBP3AD

ALNO BERNIAT, SKM.M.Kes
NIP. 19671115199103 1 014

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, DPPKBD Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

a. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
b. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah
c. Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang
d. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) belum optimal
e. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal.
f. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR, dan PKLK) belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana yang terurai dalam Tabel. T-C. 31

Tabel. T-C.31
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Lokasi	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kenutuhan Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH			**11.996.804.793,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**			**11.996.804.793,00**
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**		**7.072.003.453**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**		**5.335.991.570,00**
	Dinas P2KBP3AD	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	**100%**	**5.484.071.760.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	**100%**	**4.763.991.570,00**
	Dinas P2KBP3AD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang /Bulan	**5.478.071.760,00**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang /Bulan	4.763.991.570,00
	Dinas P2KBP3AD	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**341.998.050,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**376.500.000,00**
	Dinas P2KBP3AD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	10 Paket	**51.038.000,00**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	10 Paket	**68.000.000,00**
	Dinas P2KBP3AD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	**30,025.450,00**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	**15.000.000,00**
	Dinas P2KBP3AD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	**260.934.600,00**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	**293.500.000,00**

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**	**38.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**		**38.000.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	38.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		38.000.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**		**1.080.563.643,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**		**1.080.563.643,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	**5.300.000,00**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	**5.300.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komu nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**48.213.643,00**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komu nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	**48.213.643,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	**1.027.050.000,00**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	**1.027.050.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**		**133.370.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**		**133.370.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	123.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	123.000.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10.370.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10.370.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan peserta KB,Rasio Akseptor KB, Rata-rata jumlah anak per jumlah Umur Perkawinan, Distribusi Alat, Pembentukan Kampung, Persentase Klinik KB yang		**24.992.490,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Cakupan peserta KB,Rasio Akseptor KB, Rata-rata jumlah anak per jumlah Umur Perkawinan, Distribusi Alat, Pembentukan Kampung, Persentase Klinik KB yang		**24.992.490,00**

			dibentuk				dibentuk		
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pengendalian Penduduk**	**100%**	**24.992.490,00**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pengendalian Penduduk**	**100%**	**24.992.490,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	24.992.490,00	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	24.992.490,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Cakupan Peserta KB Rasio Akseptor KB, Penurunan Angka Kelahiran Total dan Unmet Need, Peningkatan Prevalensi Kontrasepsi Modern, Meningkatnya Media Usia Pertama Perempuan (MKJP), Distribusi alat dan Obat Kontrasepsi**	**100%**	**4.071.230.650,00**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan Peserta KB Rasio Akseptor KB, Penurunan Angka Kelahiran Total dan Unmet Need, Peningkatan Prevalensi Kontrasepsi Modern, Meningkatnya Media Usia Pertama Perempuan (MKJP), Distribusi alat dan Obat Kontrasepsi**	**100%**	**4.071.230.650,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kaerifan Budaya Lokal**	**100%**	**3.493.469.600,00**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kaerifan Budaya Lokal**	**100%**	**3.493.469.600,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Program Pengendalian Program KKBPK	10 Laporan	3.468.482.000,00	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Program Pengendalian Program KKBPK	10 Laporan	3.468.482.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Advikasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	24.987.600,00	Advikasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	24.987.600,00

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pelayanan KB (PKB/PLKB)**	**100%**	**507.732.850,00**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pelayanan KB (PKB/PLKB)**	**100%**	**507.732.850,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	279 Unit	**246.913.000,00**	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	279 Unit	**246.913.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	375 Orang	24.966.500,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	375 Orang	24.966.500,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan, PelaksanaanPenyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	235.853.350,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan, PelaksanaanPenyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	235.853.350,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**70.028.200,00**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**70.028.200,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Laporan	**20.018.900,00**	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Laporan	**20.018.900,00**

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	740 Orang	**25.008.500,00**	Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	740 Orang	**25.008.500,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi di Fasilits Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	25.000.800,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi di Fasilits Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	25.000.800,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera**	**100%**	**110.000.200,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera**	**100%**	**110.000.200,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (note : disatukan kegiatannya sesuai renstra)**	**Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera**	**100%**	**110.000.200,00**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (note : disatukan kegiatannya sesuai renstra)**	**Persentase Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera**	**100%**	**110.000.200,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10 Laporan	11.559.299,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10 Laporan	11.559.299,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10 Laporan	60.000.000,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10 Laporan	60.000.000,00

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10 Laporan	13.441.000,00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10 Laporan	13.441.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pisat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pisat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 Kelompok	25.000.000,00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pisat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pisat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 Kelompok	25.000.000,00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**718.578.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**718.578.000,00**
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase Partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**100%**	**175.000.000,00**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**100%**	**175.000.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100%**	**175.000.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**175.000.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	175.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	175.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**100%**	**124.596.000,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**100%**	**124.596.000,00**

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya *enyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang emerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100%**	**15.000.000,00**	**Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**100%**	**15.000.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	15.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	15.000.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**109.596.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**109.596.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	74.569.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	74.569.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak**	**100%**	**15.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak**	**100%**	**15.000.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**15.000.000,00**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**15.000.000,00**

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**100%**	**39.778.000,00**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**100%**	**39.778.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100%**	**39.778.000,00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**100%**	**39.778.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.778.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.778.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Tersedianya Perlindungan Khusus Anak**	**100%**	**364.204.000,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Tersedianya Perlindungan Khusus Anak**	**100%**	**364.204.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**109.700.000,00**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**109.700.000,00**
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	1 Orang	109.700.000,00	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	1 Orang	109.700.000,00
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Penyediaan Layanan Bagi Aanak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25.504.000,00**	**Penyediaan Layanan Bagi Aanak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**25.504.000,00**

	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	1 Orang	254.504.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	1 Orang	254.504.000,00

Kolonodale, 2024

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

ALNO BERNIAT, SKM.M.Kes
NIP. 19671115199103 1 014

2.5 Penelaahan Usulan Program

Dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, di samping berpedoman pada Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026.

Untuk lebih jelas hasil telaahan usulan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara terurai pada Tabel. T-C.32

Tabel . T-C.32
Usulan Program Dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas P2KBP3AD**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas P2KBP3AD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 Orang /Bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas P2KBP3AD**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas P2KBP3AD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakna	10 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas P2KBP3AD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas P2KBP3AD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	10 Laporan	
	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Presentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia	279 Unit	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	375 Orang	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Laporan	
	Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	740 Orang	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Persentase Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera**		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (note : disatukan kegiatannya sesuai renstra)	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (note : disatukan kegiatannya sesuai renstra)**		

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10 Laporan	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Yang dibentuk	1 Kelompok	
5	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	
6	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				
	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Tersedianya Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan**		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	
8	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak**		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			

	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
9	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
10	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	1 Orang	
	Penyediaan Layanan Bagi Aanak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**		
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	1 Orang	

KEPALA DINAS P2KBP3AD

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DP2KBP3AD

ALNO BERNIAT, SKM.M.Kes
NIP. 19671115199103 1 014

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Tengah, RPJM Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD

Tujuan Jangka Menengah SKPD Untuk melaksanakan Misi dan mencapai Visi Dinas Pengendalian penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana daerah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender Dan Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana

TUJUAN DP2KBP3AD	SASARAN DP2KBP3AD
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.	Peningkatan KIE kepada masyarakat untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Tri Bina (BKB, BKR dan BKL).	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada kader Tribina (BKB, BKR dan BKL).
Meningkatkan Pelayanan dan Jumlah akseptor KB	penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang	Pengendalian Laju pertumbuhan penduduk.
Meningkatkan kesetaraan, keadilan dan kualitas sistem data gender dan anak	Optimalisasi Penyediaan data gender dan anak.
Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dalam keluarga	Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan keterlibatan perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.
Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.	Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terjadi
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DP2KBP3AD	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Penyediaan sarana dan prasarana DP2KBP3AD yang memadai.
Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap	Optimalisasi ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi pada semua wilayah.
Meningkatnya kesertaan ber KB Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan kinerja dan penguatan advokasi serta KIE kepada masyarakat dan pelayanan KB secara rutin pada semua wilayah
Implementasi pengarusutamaan Gender.	Peningkatan pengarusutamaan gender.
Meningkatnya perempuan dalam legeslatif dan lembaga profesional.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.
Meningkatnya aksesibilitas layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.	Peningkatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pelatihan bagi kader yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	optimalisasi sistem layanan perlindungan khusus kepada anak.
Meningkatnya implementasi Kabupaten layak anak dan Forum Anak Daerah.	Terpenuhinya klaster Kabupaten Layak Anak (KLA)
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Peningkatan kualitas kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menangani urusan wajib Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan di daerah serta pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari 9 Program dan 17 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1 Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6. Program Perlindungan Perempuan
7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
9. Program Perlindungan Khusus Anak

3.3.2 Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
7. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
8. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
9. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
10. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

12. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/Kota
14. Pengumpulan, Pengilaha Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat daerah Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
16. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
17. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif Tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah pada Tabel. T-C.33

Tabel. T-C.33
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH**				**11.996.804.793,00**				**9.537.505.251,00**
2	**14**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**			**7.072.003.453**				**5.335.991.570,00**
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	**Dinas P2KBP3AD**	**100%**	**5.484.071.760.00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**4.763.991.570,00**
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas P2KBP3AD	42 Orang /Bulan	**5.478.071.760,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		42 Orang /Bulan	**4.763.991.570,00**
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**	**Dinas P2KBP3AD**	**100%**	**341.998.050,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**376.500.000,00**
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Dinas P2KBP3AD	10 Paket	**51.038.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	68.000.000,00
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas P2KBP3AD	1 Paket	**30,025.450,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	15.000.000,00

2	14	01	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas P2KBP3AD	42 Laporan	**260.934.600,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	293.500.000,00
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**38.000.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			
2	14	1	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	38.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**		**1.080.563.643,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**145.500.000,00**
2	14	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	**5.300.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	**5.500.000,00**
2	14	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komu nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	**48.213.643,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	**65.000.000,00**
2	14	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	**1.027.050.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	75.000.000,00
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**		**133.370.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**50.000.000,00**
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	123.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	40.000.000,00
2	14	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	10.370.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	**10.000.000,00**

2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Cakupan peserta KB,Rasio Akseptor KB, Rata-rata jumlah anak per jumlah Umur Perkawinan, Distribusi Alat, Pembentukan Kampung, Persentase Klinik KB yang dibentuk			**24.992.490,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**11.812.826,00**
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan peserta KB,Rasio Akseptor KB, Rata-rata jumlah anak per jumlah Umur Perkawinan, Distribusi Alat, Pembentukan Kampung, Persentase Klinik KB yang dibentuk**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**24.992.490,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**11.812.826,24**
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Cakupan peserta KB,Rasio Akseptor KB, Rata-rata jumlah anak per jumlah Umur Perkawinan, Distribusi Alat, Pembentukan Kampung, Persentase Klinik KB yang dibentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	24.992.490,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11.812.826,24
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Cakupan peserta KB, Rasio Akseptor KB,Penurunan angka kelahiran total dan unmet need,peningkatan prevalensi kontrasepsi moderen, meningkatnya media usia pertama perempuan (MUKP),Distribusi alat dan obat kontrasepsi			**100%**	**4.071.230.650,00**			**4.063.249.811,00**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kaerifan Budaya Lokal**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**3.493.469.600,00**	**DAK/DAU**		**100**	**2.285.000.000,00**
2	14	03	2.01	01	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Program Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	3.468.482.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Organisasi	2.250.000.000,00
2	14	03	2.01	02	Advikasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Organisasi	24.987.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	35.000.000,00
2	**14**	**3**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Pelayanan KB (PKB/PLKB)**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**507.732.850,00**	**DAK/DAU**		**100**	**1.658.249.811,00**

2	14	03	2.02	01	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	279 Unit	**246.913.000,00**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Organisasi	1.548.249.811,00
2	14	03	2.02	02	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	375 Orang	24.966.500,00	Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik		200 Unit	**35.000.000,00**
2	14	03	2.02	03	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan, PelaksanaanPenyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	235.853.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	**75.000.000,00**
2	**14**	**3**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**70.028.200,00**	**DAK/DAU**			**120.000.000,00**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	**20.018.900,00**	Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik & DAU		20 Laporan	**40.000.000,00**
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	740 Orang	**25.008.500,00**	Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik & DAU		20 Orang	**40.000.000,00**
2	14	03	2.03	03	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi di Fasilits Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	25.000.800,00	Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik dan Dana Transfer Umum(DAU)		740 Orang	**40.000.000,00**
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera**		**100%**	**110.000.200,00**				**30.000.000,00**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (note : disatukan kegiatannya sesuai renstra)**	**Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**110.000.200,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**30.000.000,00**

2	14	04	2.01	01	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	11.559.299,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kelompok	5.000.000,00
2	14	04	2.01	03	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			**5.000.000,00**
2	14	04	2.01	04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	13.441.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		375 Orang / Kader di 10 Kecamatan	**10.000.000,00**
2	14	04	2.01	07	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pisat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pisat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kelompok	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Kelompok	10.000.000,00
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan**		**100%**	**175.000.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**50.000.000,00**
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**175.000.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**50.000.000,00**

2	08	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000,00
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**		**100%**	**124.596.000,00**	**124.596.000,00**			**12.000.000,00**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya *enyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang emerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**15.000.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**		**100**	**7.000.000,00**
2	08	03	2.01	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	7.000.000,00
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**109.596.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**5.000.000,00**
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.500.000,00
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	74.569.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.500.000,00

2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak**		**100%**	**15.000.000,00**				**10.000.000,00**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Tingkat Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**15.000.000,00**	**Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum**			**10.000.000,00**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum		1 Dokumen	10.000.000,00
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**			**100%**	**39.778.000,00**			**13.201.044,00**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**39.778.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**13.201.044,00**
2	08	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	39.778.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Organisasi	13.201.044,00
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Tersedianya Perlindungan Khusus Anak**			**100%**	**364.204.000,00**			**11.250.000,00**
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**109.700.000,00**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**			**7.500.000,00**
2	08	07	2.01	01	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	109.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Perangkat Daerah	7.500.000,00
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Bagi Aanak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**25.504.000,00**	**Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum**			**3.750.000,00**

2	08	07	2.02	01	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang	254.504.000,00	Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum		10 Orang	3.750.000,00

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Morowali Utara



Alno Berniat, SKM.M.Kes
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 196711151991031014

BAB V
PENUTUP

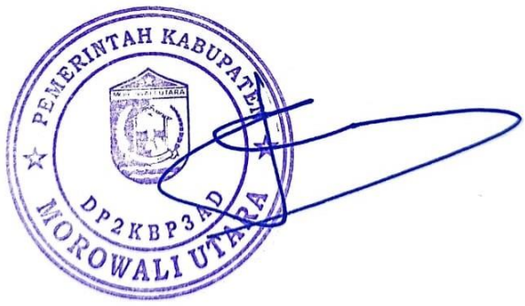
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Strategi Perangkat Daerah 2021-2026. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang memusatkan pada pencapaian arah tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024 yang mengacu pada isu strategis serta pendekatan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian target pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Adapun program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu pula pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 2024

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



ALNO BERNIAT, SKM.M.Kes
NIP. 19671115199103 1 014

RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA



TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RENJA

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 semoga dapat di implementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun

perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kolonodale,

Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan Daerah

YANISMAL BORUALE,SE.MM
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19700106 199203 1 012

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iv
DAFTAR TABEL	.....	v
I. PENDAHULUAN	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	.....	9
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	10
2.2 Anaslis Kinerja Pelayanan DISKUMPERINDAG		14
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	18
2.4 Review terhadap Perangkat Daerah	.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	26
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	.....	29
3.3 Program dan Kegiatan	.....	32
III. PENUTUP	.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD s/d Tahun 2024..... 12

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskumperindag Kab. Morowali Utara Tahun 2024..... 15

Tabel 2.4 : Review terhadap RKPD Tahun 2024 21

Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024..... 28

RENJA Tahun 2024.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2024, bahwa seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan

disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
6. Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepada Daerah. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepada Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 menjabarkan rencana

kegiatan Diskumperindag Kabupaten Morowali Utara yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.1.3 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja dari rancangan Renja sampai rancangan akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perencanaan dan Penganggaran yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Landasan Hukum Perencanaan

1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional.
2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Propinsi Sulawesi Tengah
3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

10) Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
11) Permendagri 18/2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 - 2025.
13) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara

b. Landasan Hukum Penganggaran

1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancanagan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan program kerja secara operasional dan teknis sesuai kewenangan, tugas poko dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sesuai urusan dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara.
3. Menyediakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan:

1. Terwujudnya dokumen perencanaan kerja yang komprehensif sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara
2. Terwujudnya pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dan seluruh pihak terkait (*stakeholders*) dalam pembangunan bidang Koperasi, UMKM Perindustrian, dan Perdagangan.
3. Terwujudnya kejelasan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara.
4. Terwujudnya pedoman dan acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

BABI :PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menegah Perindustrian dan Perdagangan

2.4 Review terhadap rancangan awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BABIII : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengaju pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain :

1. Realsiasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koeprasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, maka rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

Tabel : TC. 29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2023

DINAS KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Daerah	Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2023	
										Target Renja 2022 (%)	Realisasi Renja (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)*	11 = (10/4)*
						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah									
2	**17**					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**83,48%**	**83,48%**	**100%**	183,48%	**183,48%**
2	17	1	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan sumber daya aparatur**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	200,00%	**200,00%**
2	17	1	2	05	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	5 orang	**0,00%**	0 orang	0,00%	0,00%	0 orang	0,00%	0 orang
2	17	1	2	05	02	Pengadaian Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	50 Pasang	**0,00%**	47 Pasang	100,00%	100,00%	47 Pasang	47 Pasang	47 Pasang
2	17	1	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**0,00%**	**100%**	**69,74%**	**69,74%**	**100%**	169,74%	**169,74%**
2	17	1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 Unit	**0,00%**	1 Unit	78,95%	78,95%	2 Unit	2 Unit	2 Unit
2	17	1	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang diadakan	12 bln	**0,00%**	12 bln	0,00%	0,00%	12 bln	12 bln	12 Bln
2	17	1	2	06	05	Pengadaan Barang cetakan dan Penggandaan	Presentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	**0,00%**	100%	99,99%	99,99%	100%	199,99%	199,99%
2	17	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien	100%	**0,00%**	100%	100%	100%	100%	200,00%	200%
2	17	1	2	07		**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerinth daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**0,00%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	200,00%	**100%**
2	17	1	2	07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	2 Unit	**0,00%**	3 Unit	0,00%	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%
2	17	1	2	07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel	0,%	**0,00%**	25 Unit	100%	100%	25 Unit	25 Unit	25 Unit
2	17	1	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**0,00%**	**100%**	**69,48%**	**69,48%**	**100%**	169,48%	**169,48%**
2	17	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bln	**0,00%**	12 bln	99,86%	99,86%	12 bln	12 Bln	12 bln
2	17	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	**0,00%**	12 bln	69,44%	69,44%	12 bln	12 Bln	12 bln

2	17	1	2	08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	0,00%	12 bln	13,03%	13,03%	12 bln	12 Bln	12 bln
2	17	1	2	08	04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Presentase pemenuhan Jasa pelayanan umum kantor	12 bln	0,00%	12 bln	91,60%	91,60%	12 bln	12 Bln	12 bln
2	17	1	2	09		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan Efisien**	**100%**	0,00%	**100%**	**79,17%**	**79,17%**	**100,00%**	179,17%	**179,17%**
2	17	1	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional	tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	0,00%	12 Unit	58,34%	58,34%	12 Unit	12 Unit	12 Unit
2	17	1	2	09	09	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang rawat/rehab	1 Unit	0,00%	1 Unit	100,00%	100,00%	0,00 %	100,00%	100,00%
2	17	03				**Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi**	**Presentase hasil evaluasi lembaga koperasi**	**100,00%**	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	200,00%	**200,00%**
2	17	03	2	01		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan kemampuan SDM Koperasi	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
2	17	03	2	01	01	Pengawsan kekuatan,kesehatan,kemandirian,ketangguhan,serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi Yang dibina	50 Koperasi	0,00%	40 Koperasi	100,00%	100,00%	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi
2	17	05				**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi**	**Presentase Peningkatan Perkoperasian**	**100%**	0,00%	**100%**	**95,31%**	**95,31%**	**100,00%**	195,31%	**195,31%**
2	17	05	02	01		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan kemampuan SDM Koperasi	100%	0,00%	100%	95,31%	95,31%	100,00%	195,31%	95,31%
2	17	05	02	01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	150 Koperasi	0,00%	120 Koperasi	95,32%	95,32%	120 Koperasi	120 Koperasi	95,32%
2	17	04				**Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi**	**Presentase meningkatnya koperasi sehat**	**100%**	0,00%	**100%**	**75,00%**	**75,00%**	**100%**	175,00%	**75,00%**
2	17	04	02	01		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaanya dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Persentase meningkatnya koperasi sehat	100%	0,00%	100%	75,00%	75,00%	100,00%	175,00%	175,00%
2	17	04	02	01	01	Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dievaluasi	25 Koperasi	0,00%	15 Koperasi	75,00%	75,00%	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi
2	17	06				**Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi**	**Presentase Koperasi yang diberdayakan**	**100%**	0,00%	**100%**	**66,66%**	**66,66%**	100,00%	166,66%	**166,66%**
2	17	06	02	01		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar,Akses Pembiayaan,Pengutan kelembagaan, Standarisasi, dan Rektruturasi usaha koperasi	100%	0,00%	100%	66,66%	66,66%	100,00%	166,66%	166,66%
2	17	06	02	01	01	Pemberdayaan peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar,Akses Pembiayaan,Pengutan kelembagaan, Standarisasi, dan Rektruturasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	85 orang	0,00%	40 orang	66,66%	66,66%	80 orang	80 Orang	80 Orang
2	17	07				**Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro**	**Peningkatan capaian pemberdayaan UMKM**	**100%**	0,00%	**100%**	**67,29%**	**67,29%**	**100,00%**	167,29%	**167,29%**

2	17	07	02	01		Pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	100%	0,00%	100%	96,13%	96,13%	100,00%	196,13%	196,13%
2	17	07	02	01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	1 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	75,00%	75,00%	1 Dokumen	1 Dokumen%	1 Dokumen
2	17	07	02	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan usaha mikro	Jumlah fasilitasi kemudahan yang dilakukan	200 UMKM	0,00%	150 UMKM	100%	100%	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM
2	17	07	02	01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan Pengembangan usaha mikro	Jumlah potensi dan prodak usaha mikro yang diberdayakan	150 Produk	0,00%	100 Produk	109,52%	109,52%	100 Produk	100 Produk	100 Produk
2	17	07	02	01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	100%	0,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
2	17	08				**Program Pengembangan UMKM**	**Tingkat capaian Pengembangan UMKM**	**100%**	0,00%	**100%**	**85,95%**	**85,95%**	**100,00%**	185,95%	**185,95%**
2	17	08	02	01		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Meningkatnya jumlah usaha kecil	100%	0,00%	100%	85,96%	85,96%	100,00%	185,96%	185,96%
2	17	08	02	01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk dan Pengolahan,pemasaran,SDM, serta desain dan tekhnologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	100 UKM	0,00%	50 UKM	85,96%	85,96%	50 UKM	50 UKM	50 UKM
3	30	02				**Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan**	**Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan**	**100%**	0,00%	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	200,00%	**200,00%**
2	17	08	02	01		Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	Meningkatnya ketertiban perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
2	17	08	02	01	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen	100 Distributor/Pedagang	0,00%	100 Distributor/Pengecer	100,00%	100,00%	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer
3	30	03				**Program peningkatan sarana distribusi perdagangan**	**Presentase peningkatan sarana distribusi perdagangan**	**100%**	0,00%	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	200,00%	**200,00%**
3	30	03	02	01		Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	0,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	200,00%	200,00%
3	30	03	02	01	01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	4 pasar	0,00%	0,00 %	100,00%	100,00%	1 pasar	1 Pasar	1 Pasar
3	30	04				**Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**Tingkat capaian stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**100%**	0,00%	**100%**	**52,99%**	**52,99%**	**100%**	152,99%	**152,99%**
3	30	04	02	01		Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya jaminan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	0,00%	100%	75,00%	75,00%	100%	175,00%	175,00%
3	30	04	02	01	01	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 Distributor/pengecer	0,00%	500 Distributor/pedagangan	75,00%	75,00%	100 Distributor/pengecer	100 Distributor/pengecer	100 Distributor/pengecer
3	30	04	02	02		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	Stabilnya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar	100%	0,00%	100%	83,96%	83,96%	100%	183,96%	183,96%

3	30	04	02	02	02	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Tersedianya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat	12 Bln	0,00%	12 Bln	83,96%	83,96%	12 Bln	12 Bln	12 Bln
3	30	04	02	02		Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi ditingkat daerah kabupaten/kota	Persentase tersedianya pupuk dan pestisida bersubsidi	100%	0,00%	100%			100%	100,00%	100,00%
3	30	04	02	02	02	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	20 orang	0,00%	10 orang	100,00%	100,00%	13 orang	13 Orang	13 Org
3	30	05				**Program pengembangan Ekspor**	**Meningkatnya Pengembangan Ekspor**	**100%**	0,00%	**100,00%**	**20,00%**	**20,00%**	100,00%	120,00%	**120,00%**
3	30	05	02	01		Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Meningkatnya usaha promosi dagang	100%	0,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	120,00%	120,00%
3	30	05	02	01	01	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/kota	Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	100 Pedagang	0,00%	10 Pedagang	20,00%	20,00%	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang
3	30	06				**Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen**	**Presentase Standariasi metrologi legal**	**100%**	0,00%	**100,00%**	**66,67%**	**66,67%**	**100,00%**	166,67%	**167%**
3	30	06	02	01		Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Meningkatnya standarisasi hasil ukur	100%	0,00%	100%	66,67%	66,67%	100%	166,67%	166,67%
3	30	06	02	01	01	Pelaksanaan Mtrologi legal berupa tera-tera ulang	Presentase Standarisasi metrologi legal	100%	0,00%	100%	66,67%	66,67%	100%	166,67%	166,67%
3	30	07				**Program Penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri**	**Meningkatnya penggunaan dan pemsaran produk dalam negeri**	**100%**	0,00%	**100%**	**50,00%**	**50,00%**	**100%**	150,00%	**150,00%**
3	30	07	02	01		Pelaksanaan promosi, pamasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya promosi dan penggunaan produk dalam negeri	100%	0,00%	100%	50,00%	50,00%	100%	150,00%	150,00%
3	30	07	02	01	02	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota	Presentase Peningkatan Pemsaran dan penggunaan produk dalam negeri	100%	0,00%	100%	100,00%	100,00%	100%	200,00%	200,00%
3	30	07	02	01	03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	100%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	100%	100,00%	100,00%
3	31	02				**Program perencanaan dan pengembangan industri**	**Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri**	**100%**	0,00%	**100%**	88,89%	88,89%	**100%**	188,89%	188,89%
3	30	02	02	01		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri dan peran serta masyarakat	100%	0,00%	100%	88,89%	88,89%	100%	188,89%	188,89%
3	30	02	02	01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Persentase tingkat capaian koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan	100%	0,00%	100%	100%	100%	100%	200,00%	200%
3	30	02	02	01	;04	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Persentase tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	100%	0,00%	100%	100%	100%	100%	200,00%	200%
3	30	02	02	01	;05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	100 IKM	0,00%	100 IKM	97%	97%	100 IKM	100 IKM	100 IKM
3	31	03				**Program Pengendalian Izin usaha industri Kabupaten/kota**	**Peningkatan Pengendalian usaha industri**	**100%**	0,00%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	200,00%	**200%**
3	30	03	02	01		Penerbitan izin usaha industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya komitmen yan terintegrasi	100%	0,00%	100%	100%	100%	100%	200,00%	200%

3	30	03	02	01	01	Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI kewenangan kabupaten kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan isistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah perolehan IUI<IPUI<IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	100 IKM	0,00%	100 IKM	100%	100%	100 IKM	100 IKM	100 IKM
3	31	04				**Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional**	**Presentase peningkatan pengelolaan SIINas**	**100%**	0,00%	**100%**	**87,97%**	**87,97%**	**100%**	187,97%	**188%**
3	30	04	02	01		Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten kota	Meningkatnya diseminasipublikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	100%	0,00%	100%	87,97%	87,97%	100%	187,97%	188%
3	30	04	02	01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data sistem informasi Industri Nasional (SIINas)	Meningkatnya pengumpulan, pengelolaan dan analisis data sistem informasi Industri Nasional (SIINas)	100%	0,00%	100%	98,44%	98,44%	100%	198,44%	198%
3	30	04	02	01	02	Diseminasi Publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas	Jumlah Desiminasi, publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	100 IKM	0,00%	100 IKM	37,50%	37,50%	100 IKM	100 IKM	100 IKM

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaiman cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisinya disajikan pada bagian ini.

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capain		Proyeksi		catatan analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	11	12	12	13
1	**Peningkatan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek			0,00	5 Org	5 Org	5 Org	0,00	5 Org	5 Org	5 Org	
2	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut dan Perlengkapannya yang di Adakan			47 Psg	47 Psg	50 Psg	50 Psg	47 Psg	47 Psg	50 Psg	50 Psg	
2	**Peningkatan sumber daya aparatur**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan			1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
2	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang di Adakan			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	
3	Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Presentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi secara efektif dan efisien			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	**Meningkatnya Pelayanan Publik**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan			3 Unit	0%	2 Unit	0	3 Unit	0%	0	0	
2	Jumlah Pengadaan Mebel			25 Unit	25 Unit	0	30 Unit	25 Unit	25 Unit	30 Unit	30 Unit	
4	**Meningkatnya Pelayanan Publik**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	
3	Presentase penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	
4	Presentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	
5	Presentase Jasa pelayanan umum kantor			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	
5	**Terselenggaranya Kegiatan kantor secara Efektif dan Efisien**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	
2	Jumlah Gedung Kantor Yang Di rawat/Rehab			1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	

6	**Presentase Hasil Evaluasi Lembaga koperasi**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Koperasi yang di Bina			40 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	
7	**Presentase Peningkatan Perkoperasian**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Sosialisasi			120 Koperasi	120 Koperasi	150 Koperasi	150 Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	150 Koperasi	150 Koperasi	
8	**Presentase Meningkatnya Koperasi Sehat**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Koperasi Yang di Evaluasi			15 Koperasi	15 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	
9	**Presentase Koperasi yang diberdayakan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Koperasi Yang di berdayakan			40 Koperasi	80 Koperasi	100 Koperasi	110 Koperasi	40 Koperasi	80 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	
10	**Peningkatan Capaian Pemberdayaan UMKM**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Dokumen Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan			150 UMKM	150 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	
3	Jumlah Potensi dan Produk Usaha Mikro yang di berdayakan			100 Produk	100 Produk	150 Produk	150 Produk	100 Produk	100 Produk	150 Produk	150 Produk	
4	Presentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	**Tingkat Capaian Pengembangan UMKM**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi menjadi Usaha Kecil			50 UMKM	50 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	
12	**Tingkat Cakupan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan komitmen			100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	
13	**Presentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan			1 Pasar	1 Pasar	2 Pasar	3 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	
14	**Tingkat Capaian Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Tingkat Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			50 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	150 Distributor/Pengecer	50 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	100 Distributor/Pengecer	

2	Tersedianya Harga Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	
3	Jumlah Pengadaan Pupuk dan pestisida Bersubsidi			10 Org	13 Org	15 Org	15 Org	10 Org	13 Org	15 Org	15 Org	
15	**Presentase tersedianya Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Pengadaan Pupuk dan pestisida Bersubsidi			10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	
16	**Meningkatnya Pengembangan Eksport**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Usaha Produk Unggulan yang Mendapatkan Pembinaan			10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	10 Pedagang	
17	**Presentase Standarisasi Metrologi Legal**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Presentase Standarisasi Metrologi Legal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	**Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Presentase Peningkatan Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Sistem dan jaringan informasi perdagangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	**Tingkat Cakupan Perencanaan dan Pembangunan Industri**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Presentase tingkat capaian koordinasi sinkronisasi dan pelaksanan kebijakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentas etingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sarana dan prasrana industri			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Presentase Peningkatan Peran serta Masyarakat			100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	
20	**Peningkatan Pengendalian Usaha Industri**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Jumlah Perolehan IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara Elektronik			100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	
21	**Presentase Peningkatan pengolahan SIINas**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
1	Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis data sistem informasi industri nasional (SIINas)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah Desiminasi publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas			100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM	

2.3 . Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian

terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Melakukan Operasi Pasar (Pasar bersubsidi)
2. Peningkatan Ekonomi Yang Inklufif Dan Pengentasan Kemiskinan
3. Era Industri 4.0 Dan Teknologi Digital

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu – isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran.

1. Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan berusaha memberdayakan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk pemberdayaan itu dilakukan dengan memastikan bahwa UMKM mendapat pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas mungkin.

2. Pemerintah dapat memberi dukungan terhadap UMKM dalam bentuk pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan
3. Pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap masyrakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan diadakannya operasi pasar (pasar bersubsidi).
4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat mendorong perbaikan standar hidup penduduk Kabuapten Morowali Utara karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya kemiskinan..
5. Merespon Industri 4.0 dapat mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia untuk membuat organisasi lebih kreatif.
6. Pemerintah sudah saatnya mengdopsi/mengoptimalkan tata kelola yang efektif dan transaparan. Pengambilan keputusan sudah harus berbasiskan Big data, membuat institusi berkarakter kreatif, dan memunculkan talenta para civitas akademika untuk mengambil manfaat dari Revolusi Industri.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukan review terhadap rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal Perangkat Daerah, karena pada hakekatnya Renja Perangkat Daerah tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah rancangan Perangkat

Daerah tersebut sudah ditetapkan menjadi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain;

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD terlampir.

Tabel : TC.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal SKPD						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indiaktif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**													
2	17	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**													
2	17	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.050.242.501,00**					**2.050.242.501,00**
2	17		2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	Diskumperindag	100 Persen	23 Orang	100 Persen	2.050.242.501,00			Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.050.242.501,00
2	17	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**80.000.000,00**					**80.000.000,00**
2	17	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	5 Org	100 Persen	40.000.000,00	APBD			5 Org	40.000.000,00
2	17	1	2,05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	50 Pasang	100 Persen	400.000.000,00	APBD			50 Pasang	400.000.000,00
2	17	1	2,06		**Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah**								**215.521.013,00**					**215.521.013,00**
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	2 Unit	100 Persen	75.000.000,00	APBD		Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	75.000.000,00
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	5.064.876,00	APBD			12 Bulan	5.064.876,00
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	APBD		Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 Persen	20.000.000,00

2	17	01	2,06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	115.456.137,00	APBD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 Persen	115.456.137,00
2	17	1	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50.000.000,00**					**50.000.000,00**
2	17	1	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	2 Unit	100 Persen	50.000.000,00	APBD			2 Unit	50.000.000,00
2	17	1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan mebel	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	APBD			0,00	0,00
2	17	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**501.292.000,00**					**501.292.000,00**
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	APBD		Tersedianya jasa surat menyurat	100 Persen	10.000.000,00
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	18.000.000,00	APBD		Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	18.000.000,00
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	446.250.000,00	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	446.250.000,00
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	27.042.000,00	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	27.042.000,00
2	17	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**103.000.000,00**					**103.000.000,00**

2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	12 Unit	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	12 Unit	50.000.000,00
2	17	1	2,09	09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	1 Unit	100 Persen	53.000.000,00	APBD		Jumlah Gedung Kantor yang di Rawat/Rehab	1 Unit	53.000.000,00
2	17	3			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**44.878.018,00**					**44.878.018,00**
2	17	3	2,01		**Pemeriksaandan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**44.878.018,00**					**44.878.018,00**
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akutantabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi	Jumlah Koperasi yang di bina	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	40 Koperasi	100 Persen	44.878.018,00	APBD		Jumlah Koperasi yang di bina	40 Koperasi	44.878.018,00
2	17	3			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**140.243.808,00**					**140.243.808,00**
2	17	3	2,01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**140.243.808,00**					**140.243.808,00**
2	17	03	2,01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Presentase peningkatan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	150 Koperasi	100 Persen	140.243.808,00	APBD	120 Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Sosialisasi	150 Koperasi	140.243.808,00
2	17	3			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI**								**56.097.523,00**					**56.097.523,00**
2	17	3	2,01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**56.097.523,00**					**56.097.523,00**
2	17	03	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Jumlah Koperasi Yang di evaluasi	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Diskumperindag	100 persen	25 Koperasi	100 persen	56.097.523,00	APBD	15 Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Evaluasi	25 Koperasi	56.097.523,00
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**70.121.904,31**					**70.121.904,31**
2	**17**	**6**	2,01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**70.121.904,31**					**70.121.904,31**
2	17	06	2,01	01	Pemerdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiyaan, Penguatan Kelembagaan, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang di berdayakan	Meningkatnya produktivitas nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan, standarisasi dan rekstrurisasi usaha koperasi	Diskumperindag	100 Persen	100 Orang	100 Persen	70.121.904,31	APBD		Jumlah Sumber Daya Manusia yang di berdayakan	100 Orang	70.121.904,31
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**200.000.000,00**					**200.000.000,00**
2	17	07	2,01		**Pemerdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Klembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**								**200.000.000,00**					**200.000.000,00**
2	17	07	2,01	01	Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	1 Dokumen	50.000.000,00

2	17	07	2,01	03	Fsilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	200 UMKM	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	200 UMKM	50.000.000,00
2	17	07	2,01	04	Pemerdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	150 produk	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	150 produk	50.000.000,00
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	100 Persen	50.000.000,00
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**140.243.808,00**					**140.243.808,00**
2	**17**	**8**	2,01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**140.243.808,00**					**140.243.808,00**
2	17	**8**	2,01	01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tingkat capaian pengembangan UMKM	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	Meningkatnya jumlah usaha kecil	Diskumperindag	100 Persen	100 UMKM	100 Persen	140.243.808,00	APBD		Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	100 UMKM	140.243.808,00
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**56.097.523,00**					**56.097.523,00**
3	**30**	**2**	2,01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**								**56.097.523,00**					**56.097.523,00**
3	30	02	2,01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik	Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	Meningkatnya ketertiban perizinan dan pendaftaran perusahaan	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor/Pengecer	100 Persen	56.097.523,00	APBD		Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	100 Distributor/ Pengecer	56.097.523,00
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**200.000.000,00**					**200.000.000,00**
3	**30**	**3**	2,01		**Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**200.000.000,00**					**200.000.000,00**
3	30	04	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Tersedia	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumperindag	100 Persen	2 Pasar	100 Persen	200.000.000,00	APBD		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Tersedia	2 Pasar	200.000.000,00
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**196.341.332,00**					**196.341.332,00**
3	**30**	**4**	2,01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**65.447.111,00**					**65.447.111,00**

3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat capaian stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya jaminan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Diskumperindag	100 Persen	100Distributor/Pengecer	100 Persen	65.447.111,00	APBD		Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100Distributor/Pengecer	65.447.111,00
3	**30**	**4**	2,01		**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**65.447.110,00**					**65.447.110,00**
3	30	04	2,01	02	Pemantuan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Tersedianya Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar	Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebtuhan pokok dan Barang penting pada pasar	Presentase Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar	Diskumperindag	100 Persen	12 Bln	100 Persen	65.447.110,00	APBD		Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebtuhan pokok dan Barang penting pada pasar	12 Bln	65.447.110,00
3	**30**	**4**	2,01		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota**								**65.447.111,00**					**65.447.111,00**
3	30	04	2,01	03	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Presentase Hasil Pengawasan Pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Presentase Peningkatan Pengadaan Pupuk dan Pestisida	Diskumperindag	100 Persen	15 Org	100 Persen	65.447.111,00	APBD		Jumlah Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	15 Org	65.447.111,00
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**98.170.666,00**					**98.170.666,00**
3	**30**	**5**	2,01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten kota**								**98.170.666,00**					**98.170.666,00**
3	30	05	2,01	02	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	Meningkatnya usaha promosi dagang	Diskumperindag	100 persen	10 Pedagang	100 persen	98.170.666,00	APBD		Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	10 Pedagang	98.170.666,00
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**84.146.285,00**					**84.146.285,00**
3	**30**	**6**	2,01		**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan**								**84.146.285,00**					**84.146.285,00**
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang	Presentase Peningkatan Standarisasi dan perlindungan konsumen	Presentase Standarisasi metrologi legal	Meningkatnya standarisasi hasil ukur	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	84.146.285,00	APBD		Presentase Standarisasi metrologi legal	100 Persen	84.146.285,00
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**112.195.047,00**					**112.195.047,00**
3	**30**	**7**	2,01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**112.195.047,00**					**112.195.047,00**

3	30	07	2,01	01	Pemasaran dan Peninngkatan Produk Dalam Negeri Ditingkat Kab/Kota	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya Pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	56.097.523,00	APBD		Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	100 Persen	56.097.523,00
3	30	07	2,01	02	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	56.097.524,00	APBD		Persentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100 Persen	56.097.524,00
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**228.183.232,00**					**228.183.232,00**
3	**31**	**2**	**2,01**		**Penyusulan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**228.183.232,00**					**228.183.232,00**
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan industri	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	Tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	APBD		Tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	100 Persen	75.000.000,00
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pemabngunan Sarana dan Prasarana industri	Tingkat cakupan perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Tingkat capaian Koordinasi, Sinkronisasi rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Inndustri	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakats	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	APBD		Tingkat capaian Koordinasi, Sinkronisasi rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100 Persen	75.000.000,00
3	31	03	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	100 IKM	100 Persen	78.183.232,00	APBD		Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	100 IKM	78.183.232,00
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA**								**84.146.285,00**					**84.146.285,00**
3	31	3	2,01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**													
3	31	03	2,01	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Peningkatan pengendalian usaha Industri	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	Meningkatnya pemenuhan komitmen yang terintegrasi	Diskumperindag	100 Persen	100 IKM	100 Persen	84.146.285,00	APBD		Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	100 IKM	84.146.285,00
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**100.000.000,00**					**100.000.000,00**

3	31	4	2,01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, LUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**100.000.000,00**					**100.000.000,00**
3	31	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan dan analisis data sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tingkat Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan dan Anlsis data Sistem Informasi (SIINas)	Tingkat Capaian Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan dan Anlsis data Sistem Informasi (SIINas)	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengeloaan dan Analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Tingkat Capaian Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan dan Anlsis data Sistem Informasi (SIINas)	100 Persen	50.000.000,00
3	31	04	2,01	02	Diseminasi,Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Presentase Peningkayan Pengelolaan SIINas	Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Meningkatnya Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Diskumperindag	100 Persen	100 IKM	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	100 IKM	50.000.000,00
Jumlah													**4.810.920.945,31**					**4.810.920.945,31**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrembang, baik ditingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrembang tahun 2023, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan telah ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Sebagian aspirasi masyarakat tersebut telah tertampung dalam bentuk program / kegiatan tahun 2024 ini, dan bagi yang belum akan ditampung pada tahun berikutnya.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrembang tingkat kecamatan.

Tabel TC 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Morowali Utara

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	(Sumber Dana)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan lima proritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Ketujuh prioritas itu yakni, pertama, Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, Mengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, ketiga, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, keempat, Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan, kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, keenam, Membangun lingkungan hidup,meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, ketujuhj Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Program-program Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang akan ditelaah oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka Korporatisasi pangan, modernisasi koperasi, implementasi pengawasan koperasi system pengawasan,pengentasan kemiskinan ekstrem, fasiliatsi dan pendampingan terhadap peningkatan usaha standarisasi dan sertifikasi produk NIB, penguatan pusat layanan usaha terpadu (PLUT), Serta peningkatan kontribusi sektor industry dan perdagangan.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional yaitu Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejatera, adil dan berkesinambungan. Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejatera, adil dan berkesinambungan tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi –Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2024 yang akan di implementasikan dalam rencana kerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran visi Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan,serta lingkungan strategis, maka dapat ditetapkan tujuan pembangunan koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan agar terwujudnya masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara secara umum adalah menjadikan koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.

Tujuan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan profesional kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menumbuhkan koperasi, industri dan perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan daya saing industry kecil menengah Kabupaten Morowali Utara dalam menghadapi pasar bebas.
4. Meningkatkan kontribusi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Menciptakan pelaku usaha perdagangan yang tangguh dan professional
6. Meningkatkan pasar tradisional modern yang sehat dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/strategis.
8. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Sasaran pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan cakupan pengembangan industri yang berbasis sumber daya lokal.
3. Meningkatkan jumlah sentra IKM
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha perdagangan.
5. Meningkatkan persentase pengembangan Koperasi, Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.

6. Terciptanya pasar tradisonal modern yang bersih, tertip, aman, nyaman dan sehat baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar.
7. Terciptanya efisiensi sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat.
8. Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok masyarakat.
9. Terciptanya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban dalam dunia usaha.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
		1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan. 2. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya
		1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan 2. Pengadaan Mebel
		1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten / kota	1. Penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	1. Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten / kota	1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi	1. Peningkatan pemahaman dan

		koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDm Koperasi.
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	1. Pemberdayaan koperasi dangan keanggotaan daerah kabupaten/kota.
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan dengan para pemangku kepentingan	1. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro 2. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro 3. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro 4. Penyusunan basis data usaha mikro
7.	Program Pengembangan UMKM	1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1. Produksi dan Pengolaha, pemasaran,sumber daya manusia,serta desain dan tekhnologi.

8.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1. Penerbitan izin dan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha took swalayan	1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan took swalayan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektornik
9.	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1. Penyediaan sarana distribusi perdagangan
10.	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan poko dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat
		2. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat pasar kabupaten/kota	1. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan 2. Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota
		3. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersibsidi

		tingkat daerah kabupaten/kota	
11.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
12.	Program Penggunaan pemasaran produk dalam negeri	1. Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	1. Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota.
13.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten / kota	1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industry 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat

14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	1. Penerbitan izin usaha industry (IUI), Izin perluasan usaha industry (IPUI), Izin usaha kawasan industry (IUKI), dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	1. Fasilitasi pemenuhan Masyarakat /standar kegiatan usaha sektor Perindustrian dalam rangka penertiban perizinan berusaha berbasis risiko melalui system informasi industry nasional (SIInas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach OSS RBA.
15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi industry nasional	1. Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota	1. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industry, data Kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui system informasi industry nasional SIInas. 2. Desiminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/ kota melalui SIInas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Rencana kerja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana Kerja merupakan acuan tiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indicator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU 2024

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indiaktif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**													
2	17	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**													
2	17	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.050.242.501,00**					**2.050.242.501,00**
2	17		2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	Diskumperindag	100 Persen	23 Orang	100 Persen	2.050.242.501,00			Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.050.242.501,00
2	17	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**80.000.000,00**					**83.908.099,00**
2	17	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	5 Org	100 Persen	40.000.000,00	APBD		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bintek	5 Org	41.954.050,00
2	17	1	2,05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan	Peningkatan sumber daya aparatur	Diskumperindag	100 Persen	50 Pasang	100 Persen	400.000.000,00	APBD		Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan	50 Pasang	41.954.049,00
2	17	1	2,06		**Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah**								**215.521.013,00**					**220.521.013,00**
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	2 Unit	100 Persen	75.000.000,00	APBD		Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	75.000.000,00
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	5.064.876,00	APBD		Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	12 Bulan	5.064.876,00

2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	APBD		Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 Persen	20.000.000,00
2	17	01	2,06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	115.456.137,00	APBD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 Persen	120.456.137,00
2	17	1	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50.000.000,00**					**55.000.000,00**
2	17	1	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	2 Unit		50.000.000,00	APBD		Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional	0,00	
2	17	1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan mebel	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	APBD		Jumlah Pengadaan mebel	30 unit	55.000.000,00
2	17	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**501.292.000,00**					**501.292.000,00**
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	APBD		Tersedianya jasa surat menyurat	100 Persen	10.000.000,00
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	18.000.000,00	APBD		Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	18.000.000,00
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	446.250.000,00	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	446.250.000,00

2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskumperindag	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	27.042.000,00	APBD		Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	27.042.000,00
2	17	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**103.000.000,00**					**105.000.000,00**
2	17	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	12 Unit	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	12 Unit	50.000.000,00
2	17	1	2,09	09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	Presentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah	Diskumperindag	100 Persen	1 Unit	100 Persen	53.000.000,00	APBD		Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	1 Unit	55.000.000,00
2	17	3			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**44.878.018,00**					**53.037.658,00**
2	17	3	2,01		**Pemeriksaandan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit SimpanPinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**44.878.018,00**					**53.037.658,00**
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akutantabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi	Jumlah Koperasi yang di bina	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	40 Koperasi	100 Persen	44.878.018,00	APBD		Jumlah Koperasi yang di bina	50 Koperasi	53.037.658,00
2	17	3			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**140.243.808,00**					**100.000.000,00**
2	17	3	2,01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**140.243.808,00**					**100.000.000,00**
2	17	03	2,01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Presentase peningkatan perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	Presentase Peningkatan Kemampuan SDM Koperasi	Diskumperindag	100 Persen	150 Koperasi	100 Persen	140.243.808,00	APBD		Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	150 Koperasi	100.000.000,00
2	17	3			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI**								**56.097.523,00**					**66.297.073,00**
2	17	3	2,01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**56.097.523,00**					**66.297.073,00**
2	17	03	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Jumlah Koperasi Yang di evaluasi	Presentase meningkatnya koperasi sehat	Diskumperindag	100 persen	25 Koperasi	100 persen	56.097.523,00	APBD		Jumlah Koperasi Yang di evaluasi	25 Koperasi	66.297.073,00
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**70.121.904,31**					**79.556.487,00**
2	**17**	**6**	2,01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**70.121.904,31**					**79.556.487,00**
2	17	06	2,01	01	Pemerdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiyaan, Penguatan Kelembagaan, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang di berdayakan	Meningkatnya produktivitas nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan, standarisasi dan rekstrurisasi usaha koperasi	Diskumperindag	100 Persen	100 Orang	100 Persen	70.121.904,31	APBD		Jumlah Sumber Daya Manusia yang di berdayakan	100 org	79.556.487,00

2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**200.000.000,00**					**250.000.000,00**
2	17	07	2,01		**Pemerdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Klembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**								**200.000.000,00**					**250.000.000,00**
2	17	07	2,01	01	Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	1 Dokumen	62.500.000,00
2	17	07	2,01	03	Fsilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	200 UMKM	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Fasilitasi kemudahan yang dilakukan	200 UMKM	62.500.000,00
2	17	07	2,01	04	Pemerdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	150 produk	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah potensi dan produk usaha mikro yang di berdayakan	150 produk	62.500.000,00
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Tingkat capaian pemberdayaan UMKM	Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Presentase capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	100 Persen	62.500.000,00
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**140.243.808,00**					**100.000.000,00**
2	**17**	**8**	2,01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**140.243.808,00**					**100.000.000,00**
2	17	**8**	2,01	01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tingkat capaian pengembangan UMKM	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	Meningkatnya jumlah usaha kecil	Diskumperindag	100 Persen	100 UMKM	100 Persen	140.243.808,00	APBD		Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil	100 Koperasi	100.000.000,00
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**													
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**56.097.523,00**					**66.297.073,00**
3	**30**	**2**	2,01		**Peneribitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**								**56.097.523,00**					**66.297.073,00**
3	30	02	2,01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik	Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	Meningkatnya ketertiban perizinan dan pendaftaran perusahaan	Diskumperindag	100 Persen	100 Distributor/Pengecer	100 Persen	56.097.523,00	APBD		Jumlah Fasilitasi pemenuhan komitmen	100 Distributor/Pengecer	66.297.073,00
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**200.000.000,00**					**300.000.000,00**
3	**30**	**3**	2,01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**200.000.000,00**					**300.000.000,00**
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Tersedia	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumperindag	100 Persen	2 Pasar	100 Persen	200.000.000,00	APBD		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Tersedia	2 Pasar	300.000.000,00

3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**196.341.332,00**					**65.413.112,00**
3	**30**	**4**	2,01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**65.447.111,00**					**65.413.112,00**
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tingkat capaian stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya jaminan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Diskumperindag	100 Persen	100Distributor/ Pengecer	100 Persen	65.447.111,00	APBD		Tingkat capaian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	100Distributor/Pengecer	65.413.112,00
3	**30**	**4**	2,01		**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**65.447.110,00**					**65.413.112,00**
3	30	04	2,01	02	Pemantuan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Tersedianya Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar	Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebtuhan pokok dan Barang penting pada pasar	Presentase Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar	Diskumperindag	100 Persen	12 Bln	100 Persen	65.447.110,00	APBD		Terpantaunya Harga dan Stok Barang Kebtuhan pokok dan Barang penting pada pasar	12 Bln	65.413.112,00
3	**30**	**4**	2,01		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota**								**65.447.111,00**					**65.413.112,00**
3	30	04	2,01	03	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Presentase Hasil Pengawasan Pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Presentase Peningkatan Pengadaan Pupuk dan Pestisida	Diskumperindag	100 Persen	15 Org	100 Persen	65.447.111,00	APBD		Jumlah Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	15 Org	65.413.112,00
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**98.170.666,00**					**106.975.317,00**
3	**30**	**5**	2,01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten kota**								**98.170.666,00**					**106.075.317,00**
3	30	05	2,01	02	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	Meningkatnya usaha promosi dagang	Diskumperindag	100 persen	10 Pedagang	100 persen	98.170.666,00	APBD		Jumlah usaha produk usaha unggulan yang mendapatkan pembinaan	10 Pedagang	106.975.317,00
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**84.146.285,00**					**92.815.902,00**
3	**30**	**6**	2,01		**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan**								**84.146.285,00**					**92.815.902,00**

3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang	Presentase Peningkatan Standarisasi dan perlindungan konsumen	Presentase Standarisasi metrologi legal	Meningkatnya standarisasi hasil ukur	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	84.146.285,00	APBD		Presentase Standarisasi metrologi legal	100 Persen	92.815.902,00
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**112.195.047,00**					**119.334.732,00**
3	**30**	**7**	2,01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**112.195.047,00**					**119.334.731,00**
3	30	07	2,01	01	Pemasaran dan Peniningkatan Produk Dalam Negeri Ditingkat Kab/Kota	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya Pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	56.097.523,00	APBD		Persentase Peningkatan Pemasaran dan Peggunaan produk dalam negeri	100 Persen	59.667.366,00
3	30	07	2,01	02	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	56.097.524,00	APBD		Persentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100 Persen	59.667.366,00
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**													
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**228.183.232,00**					**250.000.000,00**
3	**31**	**2**	**2,01**		**Penyusulan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**228.183.232,00**					**250.000.000,00**
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan industri	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	Tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	APBD		Tingkat capaian koordinasi sikronisasi dan pelaksanaan kebijakan	100 Persen	75.000.000,00
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pemabngunan Sarana dan Prasarana industri	Tingkat cakupan perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Tingkat capaian Koordinasi, Sinkronisasi rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Inndustri	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	APBD		Tingkat capaian Koordinasi, Sinkronisasi rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Inndustri	100 Persen	75.000.000,00
3	31	03	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Tingkat cakupan perencanaan dan pembangunan industri	Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatnya pengembangan penyebaran dan pewilayahaan industri dan peran serta masyarakat	Diskumperindag	100 Persen	100 IKM	100 Persen	78.183.232,00	APBD		Presentase Peningkatan peran serta masyarakat	100 IKM	100.000.000,00
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA**								**84.146.285,00**					**92.815.902,00**
3	31	3	2,01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**													**92.815.902,00**

3	31	03	2,01	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Peningkatan pengendalian usaha Industri	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	Meningkatnya pemenuhan komitmen yang terintegrasi	Diskumperindag	100 Persen	100 IKM	100 Persen	84.146.285,00	APBD		Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	100 IKM	92.815.902,00
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**100.000.000,00**					**113.924.690,00**
3	31	4	2,01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, LUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**100.000.000,00**					**113.924.691,00**
3	31	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan dan analisis data sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tingkat Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan dan Anlsis data Sistem Informasi (SIINas)	Tingkat Capaian Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan dan Anlsis data Sistem Informasi (SIINas)	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengeloaan dan Analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Diskumperindag	100 Persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan dan analisis data sistem Informasi Industri	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Tingkat Capaian Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan dan Anlsis data Sistem Informasi (SIINas)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan dan analisis data sistem Informasi	56.962.345,00
3	31	04	2,01	02	Diseminasi,Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Presentase Peningkayan Pengelolaan SIINas	Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Meningkatnya Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Diskumperindag	100 Persen	Diseminasi,Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	100 Persen	50.000.000,00	APBD		Jumlah Desiminasi, Publikasi data informasi dan analisa industri dalam SIINas	Diseminasi,Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	56.962.345,00
					Jumlah								**4.810.920.945,31**					**5.002.357.783,00**

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan rencana yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Rancangan Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 di Kabupaten Morowali Utara.

KEPALA DINAS KOPERASI UMKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YANISMAL BOTUALE, SE.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700106 199203 1 012

RENJA
KECAMATAN PETASIA BARAT
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN PETASIA BARAT
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN PETASIA BARAT
Jln. Budi Utomo Desa Tiu, Kec. Petasia Barat Kab. Morowali Utara 94671

KEPUTUSAN CAMAT PETASIA BARAT
NOMOR : 005 / SK / PTS-BRT / 1 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENJA 2024 DAN PERUBAHAN RENJA 2024
KECAMATAN PETASIA BARAT

CAMAT PETASIA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka enengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Renja 2024 dan Perubahan Renja 2024 Kecamatan Petasia Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Hasil Rapat Penyusunan Renja 2024 dan Perubahan Renja 2024 tanggal 18 Januari 2024.

5. Hasil Penilaian Resiko Kecamatan Petasia Barat 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam daftar **LAMPIRAN** keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renja 2024 dan Perubahan Renja 2024 Kecamatan Petasia Barat;

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menyiapkan data bahan penyusunan Renja 2024 dan Renja Perubahan 2024 Kecamatan Petasia Baratr
2. Menganalisis dan memverifikasi data bahan penyusunan renja 2024 dan perubahan Renja 2024 Kecamatan Petasia Barat
3. Menyusun Renja 2024 dan Perubahan Renja 2024 Kecamatan Petasia Barat sesuai sistematikan penyusunan renja dalam permendagri 86 tahun 2017.

Ketiga : Lampiran Keputusan Camat Petasia Barat sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Petasia Barat;

Kelima Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diadakan perubahan dan/atau perbaikan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tiu
Pada Tanggal : Januari 2024

CAMAT

SAT YUN MAN BERT LAUO, SH
Pembina / IV a
NIP. 19700601 200012 1 007

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT PETASIA BARAT KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : **005 / SK / PTS-BRT / 1 /2024**
TENTANG TIM PENYUSUN RENJA 2024 DAN RENJA P E R U B A H A N 2024 KECAMATAN PETASIA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN
1.	Sat Yun Man Bert Lauo, SH NIP. 19700601 200012 1 007	Penanggung Jawab	Camat
2.	Leyman Salianggo, S.Sos NIP. 19731220 200701 1 017	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Hazrin Kapiso, S.IP NIP. 19801011 201001 1 012	Sekretaris	Kepala Subbag. Program , Keuangan dan Aset
4.	Alkatib Panangi, SE NIP. 19750401 199503 1 001	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan
5.	Setryanus, S.Kep NIP. 19780109 199703 1 003	Anggota	Kepala Seksi Kesra
6.	Albrian Lumenta, SE NIP. 19820127 201412 1 001	Anggota	Kepala Subbag. Umum, dan Kepegawaian.
7.	Ramli, SE NIP. 19811003 2008011008	Anggota	Kepala seksi Trantib
8.	Alweni Sinauru, SH NIP. 19740223 201212 2 001	Anggota	Kepala seksi Ekbang
9.	Jasman Pombalawo, SE NIP.19791126 200801 1 007	Anggota	Kepala seksi PMD
10.	Faria Toliwongi, S.IP NIP. 19741225 200701 2 020	Anggota	Pengelola Data.

Ditetapkan di : Tiu
Pada Tanggal : Januari 2024

CAMAT

SAT YUN MAN BERT LAUO, SH
Pembina /IV a
NIP. 19700601 200012 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Petasia Barat Tahun Anggaran 2024* ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen *Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)* ini merupakan penjabaran dari perubahan Rencana *Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024* serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kantor Camat Petasia Barat.

Perubahan rencana kerja ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, perubahan kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi faktual yang terjadi selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan. Melalui dokumen ini diharapkan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Petasia Barat dapat lebih terarah, efektif, dan efisien guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan *Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Petasia Barat Tahun Anggaran 2024*, baik melalui masukan, saran, maupun dukungan data dan informasi. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Demikian kata pengantar ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan Kecamatan Petasia Barat.

Petasia Barat, Februari 2024

CAMAT PETASIA BARAT

SAT YUN MAN BERT LAUO, SH

NIP. 19700601 200012 1 0

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

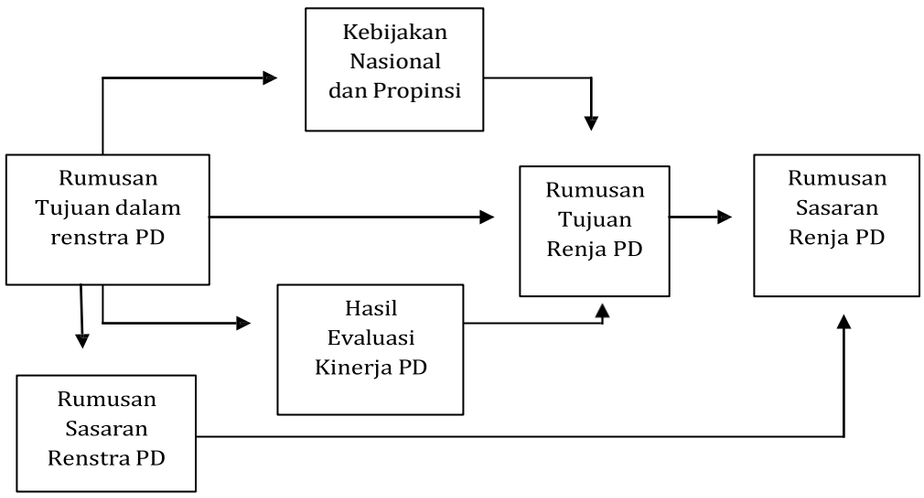
Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD).

Renja Kecamatan Petasia Barat Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024.

Renja Kecamatan Petasia Barat Tahun Anggaran 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara.

Penyusunan Renja Kecamatan Petasia Barat mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Petasia Barat Tahun 2021-2026 (Renstra PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Renja Kecamatan Petasia Barat memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Petasia Barat, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pengaggaran Pemerintah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan Renja Kecamatan Petasia Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Petasia Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Petasia Barat Tahun Anggaran 2024 adalah:

- Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.
- Kondisi yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun.
- Mengevaluasi Renja Kecamatan Petasia Barat Tahun sebelumnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Petasia Barat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Petasia Barat
2.3. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Petasia Barat
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PETASIA BARAT TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PETASIA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Petasia Barat Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 secara rinci adalah sebagai berikut:

URUSAN OTONOMI DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini berupa Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan Cover , Belanja Benda Pos, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin. Dana yang dianggarkan Rp. 23.678.174,00- dengan realisasi sebesar Rp.. 23.678.174,00 atau 100%.

b. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini Karena keterbatasan Anggaran tidak dianggarkan pada tahun 2024

c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan Kegiatan ini berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak. Dana yang dianggarkan Rp. 5.787.700,00- dengan realisasi sebesar Rp. 5.787.700,00- atau 100 %.

d. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan ini berupa pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dana yang dianggarkan Rp. 190.944.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 177.722.462 atau 92,19%

B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini berupa Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2024

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini berupa Belanja Pulsa Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 17.170.000,00- dengan realiasi sebesar Rp. 17.170.000,00- atau 100%

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini berupa Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Makan Minum Tamu. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 11.217.000,00- dengan realiasi sebesar Rp. 11.217.000,00 atau 100%.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini berupa Belanja Honorarium Penangggungjawab Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 189.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 189.000.000,00,- atau 100%.

C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Kegiatan ini berupa Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua. Dana yang dianggarakan sebesar Rp. 19.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.500.000,00,- atau 50%.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan ini tidak dianggarkan pada tahun 2024.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Kegiatan ini berupa Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keg.Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dana yang dianggarkan Rp. 29.200.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.760.000,- atau 86,45%.

Secara umum, Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel TC-29

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nama OPD : Kantor Kecamatan Petasia Barat

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja dan Kegiatan (Renja)Perangkat DaerahTahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Presentase Tlancarnya Administarsi Perkantoran***								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN**								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan PNS*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	300.00%	300%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Jasa Penunjang Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300.00%	300%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja dan Kegiatan (Renja)Perangkat DaerahTahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	100%	100%	100%	92,19%	92,19%	100%	292,19%	292,19%
	Program Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	300.00%	200%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	300.00%	200%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	300.00%	200%
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan								

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja danKegiatan (Renja)Perangkat Daerah Tahun 2024	Prakiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi TargetRenstra (%)
	Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau kendaran Dinas jabatan	Jumlah Pemeliharaan,biaya pemeliharan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	100%	100%	100%	50.00%	100%	100%	250.00%	250%
	Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Presentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**								
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Masyarakat yang diberdayakan	100%	100%	100%	86,45%	86,45%	100%	286,45%	286,45%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Petasia Barat menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, Maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petasia Barat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
5) Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi. Secara umum Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Petasia Barat.Tabel TC-30

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PETASIA BARAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*				*8*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,19%	100%	92,19%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK							Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*				*8*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyedia jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,dan pajak kendaran dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	50%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan													
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,45%	100%	86,45%	

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas dan fungsi Kantor Camat Petasia Barat yang merupakan perangkat daerah (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Petasia Barat.

Kecamatan Petasia Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petasia Barat antara lain :

a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Petasia Barat.
b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Petasia Barat juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Petasia Barat dalam mencapai Visi dan Misi antara lain :

a. Organisasi Kecamatan Petasia Barat merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
b. Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi dan jarak tempuh dari kecamatan ke Kabupaten memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
c. Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing Perangkat daerah membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke Kecamatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERANGKAT DAERAH

Berikut dapat kita lihat review rancangan awal Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Barat dalam tabel TC-31

Reviw terhadap Rancangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Morowali Utara

No	Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Presentase Tlancarnya Administarsi Perkantoran***			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Presentase Tlancarnya Administarsi Perkantoran***			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN***		***2,310,531,833***			***Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN***			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kec.Petasia Barat*	*Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan PNS*	*23 Orang*	2,310,531,833	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Kec.Petasia Barat	*Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan PNS*	*23 Orang*	2,505,272,016	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***27,000,000.00***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Petasia Barat	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	10,000,000.00	* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Petasia Barat	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	25,018,174	
	* Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Kec.Petasia Barat	Presentase barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	100%	7,000,000.00	* Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Kec.Petasia Barat	Presentase barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	100%	5,787,700	
	* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Petasia Barat	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	100%	10,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Petasia Barat	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	100%	190,944,600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***202,630,000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	* Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Petasia Barat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	1,630,000	* Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Petasia Barat	Tersedianya Administrasi Kantor	100%	-	
	* Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Petasia Barat	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	100%	10,000,000.00	* Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Petasia Barat	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	100%	18,430,000	
	* Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Petasia Barat	Presentase Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	8,000,000.00	* Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Petasia Barat	Presentase Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	11,217,000	

	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Petasia Barat	Presentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	183,000,000.00	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Petasia Barat	Presentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	179,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***17,000,000.00***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	* Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kec.Petasia Barat	Jumlah Pemeliharaan,biaya pemeliharan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	100%	7,000,000.00	* Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec.Petasia Barat	Jumlah Pemeliharaan,biaya pemeliharan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	100%	21,000,000	
	* Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Petasia Barat	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	10,000,000.00	* Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Petasia Barat	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		**Presentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		***8,233,589.00***	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**Presentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Petasia Barat				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Petasia Barat				
	* Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Petasia Barat	Presentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	8,233,589.00	* Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Petasia Barat	Presentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	34,600,000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Petasia Barat pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Morowali Utara dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Petasia Barat maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dan Masyarakat
Kecamatan Petasia Barat Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Gedung Serbaguna	Kantor Camat	Tersedianya Gedung serbaguna untuk mendukung Pelayanan Masyarakat	500.000.000	Kantor Camat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Petasia Barat dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
c. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
d. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan.
e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan

kebutuhan masyarakat Kecamatan Petasia Barat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan
g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Petasia Barat, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Petasia Barat baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyrakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Morowali Utara yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat
6. Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya di kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
10. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
11. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PAD dan PBB kecamatan
13. Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan
14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam lomba Desa dan kegiatan Kemasyarakatan lainnya
15. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Urusan Kewenangan Kantor Camat Petasia Barat pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pem.Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan

program yang ditetapkan.

Untuk tahun 2024, Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatannya adalah :
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administarsi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Kegiatannya adalah :
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Secara umum rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju 2024. Tabel TC-33

Tabel.TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7. ,01	**Unsur Kewilayahan**								
7:01	**Kecamatan**								
7:01:01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**							
7.1.1.2.'02.'01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
7.,01.'01.2.'02.'01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	*Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan PNS*	Kec.Petasia Barat	100%	2.310.531.833,00	Dana Alokasi Umum		100%	1,857,024,925,00
7.1.1.2.'05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								

7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Petasia Barat	100%		Dana Alokasi Umum			
7.1.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec.Petasia Barat	100%	25.018.174,00	Dana Alokasi Umum		100 %	35.018.174,00
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Petasia Barat			Dana Alokasi Umum			
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kec.Petasia Barat	100%	5.787.700,00	Dana Alokasi Umum		100%	8,650,000
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Kec.Petasia Barat	100%	190.944.600,00	Dana Alokasi Umum		100%	196,304,200

7.1.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec.Petasia Barat	100%	0	Dana Alokasi Umum		100%	1,635,000
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Kec.Petasia Barat	100%	18.430.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	23,584,161
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kec.Petasia Barat	100%	11.217.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	12,877,000
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Petasia Barat	100%	179.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	183,000,000
Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas**							

7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan,biaya pemeliharan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kec.Petasia Barat	100%	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	21,000 ,000
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Petasia Barat	100%	0	Dana Alokasi Umum		100%	35.000 ,000
7.1.3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Presentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**							
7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Presentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec.Petasia Barat	100%	34.600.000,00	Dana Alokasi Umum		100%	81,420 ,000

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Petasia Barat di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Petasia Barat sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Kecamatan Petasia Barat yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Petasia Barat demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Petasia Barat telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Alamat : Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka – Kolonodale

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Nomor : 800.05/09/BPBJ/I/2023

TENTANG
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2023
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a. bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan Rancangan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja sebagaimana huruf a tersebut di atas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;

c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf b di atas, maka dipandang perlu Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Utara

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan RPJMD
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Pasal 1

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul Rencana Strategis mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran program kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
b. Rancangan Awal Rencana Kerja adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT

DAERAH) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;
e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
f. Tujuan adalah suatu sebagai penjabaran atau impleentasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai dalam jangka waktu tertentu;
g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelakasanaan;
i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan, sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas dan pokok dan fungsi yang dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistematika penulisan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat

Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal : 24 Januari 2023

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara



MUHAMMAD RIDHO HAMZAH, S.Pi, M.Si.,AIFO-P
Pembina Tkt.I,IV/b
NIP. 19750225 200604 1 011

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara perlu adanya perencanaan yang matang dan sistematis agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar, oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus mempunyai perencanaan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Perencanaan tersebut baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membuat Rancangan Awal Rencana Kerja untuk dijadikan sebagai dasar – dasar pelaksanaan pembangunan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Renja ini berisikan Rencana kegiatan yang diusulkan berdasarkan Renstra (RPJM) periode : 2021-2024.

Dengan adanya Renja ini diharapkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara lebih terarah dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, sehingga dapat meraih hasil yang optimal.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Renja tahun 2024 ini, serta diharapkan semua pihak bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara bisa berjalan dengan sukses.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah dan keberkahan pada kita semua. Amin.

Kolonodale, 13 Februari 2023
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,



MUHAMMAD RIDHO HAMZAH, S.Pi.,M.Si.,AIFO-P
Pembina Tkt.I,IV/b
NIP. 19750225 200604 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RACANGAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungi PD 8

2.3. Reviuw Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 10

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 10

3.2. Tujuan dan Sasaran 12

3.3. Program dan Kegiatan 13

BAB IV DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 14

BAB V PENUTUP 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanakan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja Tahunan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan

ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

3. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun sebelumnya sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dituntut untuk mampu membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor: 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3 Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

BAB IV DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023.

Tabel 5 Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RANCANGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (RENJA) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024.
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mempuyai tugas yaitu menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah daerah sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 10).

2.2 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

a. Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing sub bagian.
b. Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
c. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
d. Masih kurangnya tenaga ASN di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Melihat pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

a. Mengikuti diklat, seminar dan workshop sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
c. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan pembangunan

2.3 REVIUW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan PenunjangUrusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,36%**	**99,36%**	**100%**	**299,36%**	**299,36%**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi/PKS	100%	100%	100%	98,93%	**98,93%**	100%	**298,93%**	**298,93%**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	99,78%	**99,78%**	100%	**299,78%**	**299,78%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Lancarnya Operasional Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,93%**	**99,93%**	**100%**	**299,93%**	**299,93%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	100%	100%	100%	99,95%	**99,95%**	100%	**299,95%**	**299,95%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	99,90%	**99,90%**	100%	**299,90%**	**299,90%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Lancarnya Operasional Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**96,27%**	**96,27%**	**100%**	**296,27%**	**296,27%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	**100,00%**	**100,00%**	100%	**300,00%**	**300,00%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	100%	100%	100%	98,17%	**98,17%**	100%	**298,17%**	**298,17%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	90,65%	**90,65%**	100%	**290,65%**	**290,65%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Lancarnya Operasional Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,66%**	**99,66%**	**100%**	**299,66%**	**299,66%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	99,66%	**99,66%**	100%	**299,66%**	**299,66%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	99,66%	99,66%	100%	**299,66%**	**299,66%**
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Terwujudnya Pengembangan data/informasi**								
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Terwujudnya Pengembangan data/informasi (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)**	100%	100%	100%	**99,33%**	**99,33%**	100%	**299,33%**	**299,33%**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	99,94%	**99,94%**	100%	**299,94%**	**299,94%**
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	98,72%	**98,72%**	100%	**298,72%**	**298,72%**

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			100	100	100	100	98	98,93	100	100	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			100	100	100	100	-	99,78	100	100	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	100	100	100	98	99,95	100	100	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	100	100	100	98	100	100	100	
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100	100	100	100	98	98,17	100	100	
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	100	100	100	98	99,9	100	100	
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100	100	100	100	98	90,65	100	100	
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100	100	100	100	98	99,66	100	100	
9	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100	100	100	100	98	98,72	100	100	
10	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			100	100	100	100	98	98,72	100	100	

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	**Lokasi**	**Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikator**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana Indikator**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.176.675.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Persentase lancarnya Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.176.675.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	**Administrasi Kepegaiwaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	**95.945.000,00**	-		-	-	**95.945.000**	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	60.127.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya ASN yang memahami Peraturan Perundang-undangan	100%	60.127.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	35.818.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Pengetahuan ASN tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	35.818.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	**555.130.000,00**	-	-	-	100%	**555.130.000**	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	100%	189.144.000,00	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya Peralatan Perlengkapan Kantor	100%	189.144.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	365.986.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kantor	100%	365.986.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusaan Pemerintah Daerah**	Presentase Kelancaran Administrasi Perkantoran Presentase Lancarnya Operasional Kantor	100%	510.600.000,00	-	-	-	100%	510.600.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	14.400.000,00	Tingkat Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Lancarnya Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100%	14.400.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	10.230.000,00				100%	10.230.000	

	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	485.970.000,00	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Lancarnya Pelayanan Umum kantor	100%	485.970.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Lancarnya Operasional Kantor	100%	**15.000.000,00**	-	-	-	100%	**15.000.000**	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	15.000.000	
2	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	**1.148.230.000,00**	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Persentase lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	1.148.230.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	710.230.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya Pengadaan Barang dan Jasa	100%	710.230.000	
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	100%	438.000.000,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	438.000.000	
	Jumlah				**2.324.905.000,00**					**2.324.905.000**	

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Morowali Utara**	**-**	**-**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Morowali Utara**	**-**		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Morowali Utara	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi/PKS	60.127.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Morowali Utara	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	35.818.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Morowali Utara**	-	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara	Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	189.144.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali Utara	Presentase Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.986.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Morowali Utara**	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali Utara	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara	Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	10.230.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali Utara	Presentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485.970.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Morowali Utara**	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15.000.000	
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Kab. Morowali Utara	-	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	710.230.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	438.000.000	
TOTAL				**2.324.905.000**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut harus Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja- Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi

masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022 – 2024, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera".

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infratruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan perataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja peyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Seiring tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara, Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksana Visi yaitu :

" Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang menerapkan Prinsip Pengadaan yang Kredibel, Profesional dan Mensejahterakan Daerah ".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dan

dunia usaha pengadaan yang efesien efektif transparan bersaing dan akuntabel;

2. Meningkatkan sumber daya manusia pengadaan yang menjadi pembaharu pengembangan pengadaan yang inovatif dan berintegritas;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah :

a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2024 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran tahun 2024.
b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama 1 (satu) tahun mendatang.

Sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah :

a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu dan tertibnya Pengadaan Barang/Jasa.
c. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
d. Memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Morowali Utara, melalui laporan yang dapat disajikan tentang informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2024 menetapkan 2 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 5 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kegiatan :
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
   - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB IV
DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang juga diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2024, maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.776.530.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Dana tersebut diperuntukan bagi pencapaian program dan kegiatan rutin dan kegiatan baru yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sehingga memberikan nuansa penambahan wawasan baru dalam pencapaian target sasaran yang direncanakan.

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, dan perkiraan target 2024 dapat dilihat dalam tabel Rencana Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali utara sebagaimana terlampir.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								2.324.905.000					1.723.705.976
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.176.675.000					806.125.976
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								95.945.000					150.288.320
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Sumber daya Aparatur		100%	50 Orang	100%	60.127.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				119.421.850
4	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Sumber daya Aparatur		100%	5 Orang	100%	35.818.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35.814.000
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								555.130.000					193.158.812
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Lancarnya Operasional Kantor		100%	.... Paket	100%	189.144.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				51.024.126
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Lancarnya Operasional Kantor		100%	75 Laporan	100%	365.986.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				368.356.000
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								510.600.000					969.350.145
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Lancarnya Operasional Kantor		100%	....Laporan	100%	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14.400.000
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Lancarnya Operasional Kantor		100%	....Laporan	100%	10.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				166.800.000
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Lancarnya Operasional Kantor		100%	....Laporan	100%	485.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35.310.000
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								15.000.000					63.441.808
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Lancarnya Operasional Kantor		100%	1 Unit	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.000.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1.148.230.000					917.580.000
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								1.148.230.000					952.528.282

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa		100%	12 Dokumen	100%	710.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				479.580.000

4	**01**	**03**	**2,03**	**02**	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Terwujudnya Pengembangan Data/Informasi	**Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Peningkatan Ketersediaan Pegawai Siap Pakai dan Memiliki Kompetensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa		100%	**50 Dokumen**	100%	**438.000.000**	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi**				**438.000.000**
												TOTAL	**2.324.905.000**					**1.723.705.976**

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan proses perencanaan atas kerjasama seluruh komponen Pengadaan Barang dan Jasa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan/ penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah dituliskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) ini dapat membawa hasil positif dalam bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Visi dan Misi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 13 Februari 2023
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,



MUHAMMAD RIDHO HAMZAH, S.Pi.M.Si.,AIFO-P
Pembina Tkt.I,IV/b
NIP. 19750225 200604 1 011

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, ProgramProgram dan Kegiatan indikatif lnspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi lnspektorat.

Rencana Kerja Tahun 2024 dapat disusun atas partisipasi semua pihak yang ada di lnspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Besar harapan kami agar Renja ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada semua stakeholder.

Kolonodale, Juni 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat 17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25

3.3. Program dan Kegiatan 26

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 27

BAB V. PENUTUP 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	11
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2023	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara	17
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat	26
Tabel 4.1	Rincian Target Capaian Kinerja Dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2024	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Mandat utama Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan pemerintah, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu

dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri No 90 Tahun 2019 yang telah di sempurnakan dengan keputusan menteri dalam negeri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Rencana Kerja dalam rangka pendanaan yang bersifat indikatif merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan perkiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan.

Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

a. Meningkatkan sikap akuntabel dan menurunkan derajat penyimpangan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.

b. Meningkatkan responsibilitas lembaga pengawasan terhadap pengaduan masyarakat/laporan penyelewengan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021–2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat tahun 2022 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja Tujuan dan Sasaran Hingga akhir tahun 2022, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun perbandingan capaian indikator kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Fisik %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.924.500,00	123.315.250,00	82,14%	100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.507.500,00	1.347.500,00	66,67%	100,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	497.538.100,00	495.119.359,00	100,00%	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.675.583,00	483.387.207,00	93,98%	100,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.490.836,00	52.488.500,00	100,00%	100,00
		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606.082.100,00	591.830.800,00	98,87%	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.270.000,00	237.120.000,00	100,00%	100,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.626.609.650,00	2.448.537.261,00	54,27%	100,00

b. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksaaan renja Inspektorat dan pencapaian renstra Inspektorat s.d 2022

Tabel 2.2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2022

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENSTRA PD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PRESENTASE MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
		Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	100%	90,00%	100%	93,50%	93,50%	100%	95,20%	95,20%
		Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 2	75.00%	Level 3	Level 2	75.00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENSTRA PD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023	
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	100%	89,00%	100%	92,60%	92,60%	100%	94,74%	94,74%
		Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 3	Level 2	75.00%	Level 3	Level 2	75.00%

2.2 ANALISIS KINERA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Inspektorat. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah. Tugas yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara fokus kepada kinerja pelayanan antara lain :

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
3. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun secara teknis dan operasional, dalam melaksanakan kinerja pelayanan sesuai dengan fungsi pengawasan setiap tahun dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi antara lain :

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan prioritas dan risiko, meliputi:

1. Pemeriksaan Operasional Keuangan Perangkat Daerah meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujan Pemeriksaan Operasional Keuangan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah
   a. Fokus dan sasaran Pemeriksaan kinerja Inspektorat Daerah Morowali Utara yaitu mendasari Register Resiko yang tertuang dalam Rencana Tindak

Pengendalain (RTP) Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis Perangkat Daerah dan RTP Operasional OPD

b. Menilai aspek 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) yaitu APIP berperan dalam memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematik

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi;
   1) Probity Audit;
   2) Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa;
   3) Pemeriksaan Investigasi;
   4) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
   5) Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
4. Pengawasan Mandatori Merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab oleh Instansi Pusat / Instansi Vertikal atau Aparat Pengawas Lain yang bersifat wajib harus dilaksanakan, meliputi:
   a. Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA)
   b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   c. Reviu Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   d. Reviu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK);
   e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
   f. Reviu penyerapan anggaran
   g. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
   h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus :
   a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
   b. Penyalahgunaan wewenang;
   c. Hambatan dalam pelayanan publik;
   d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan

e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.

6. Pengawasan Prioritas Nasional Pengawasan prioritas nasional meliputi:
   a. Pemantauan, Pemeriksaan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
   b. Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :
   a. Consulting Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
   b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
   c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tertib Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%	83%	100%	100%	
			Peningkatan Pengelolaan Tertib Adminitrasi Keuangan Yang tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	90,00%	100%	100%	
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	93%4	100%	100%	
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	
2	Presentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan		Penurunan Kasus Temuan di Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	54,27%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Kurangnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPIP
2. Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan good governance serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari watchdog menjadi quality accurance dan consulting partner yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai dan terbatasnya anggaran Peningkatan Kapasitas APIP
3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam menyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah
5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan isu strategis yang ada di Inspektorat, keadaan yang diinginkan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Meningkatnya komitmen Seluruh Jajaran Pimpinan OPD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentang pentingya Implementasi Sistem Pengendalian Intern, sebagai bentuk pengawasan melekat dalam lingkup OPD.
2. Meningkatnya Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai Quality Assuarance dan Consulting Partner bagi OPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komperehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP).
4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.
5. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Morowali Utara dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**									
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
6	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
6	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	171.272.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	171.272.200
6	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
6	01	1	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8 Buku	1.633.850	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	8 Buku	1.633.850
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali Utara	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.767.812.111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Morowali Utara	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.767.812.111
6	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
6	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	30 Orang	23.837.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	30 Orang	23.837.500
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	30 Orang	921.653.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	30 Orang	921.653.000

6	01	1	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu Yang Diadakan	65 Orang	34,460,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu Yang Diadakan	65 Orang	44.986.000
6	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Morowali Utara	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	2 Dokumen	451,928,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Morowali Utara	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	2 Dokumen	451,928,000
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Morowali Utara	Tingkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	7,962,388	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Morowali Utara	Tingkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	7,962,388
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	13 Paket	1.276.088.750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	13 Paket	1.276.088.750
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Morowali Utara	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	30,637,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Morowali Utara	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	30,637,500
6	**01**	**01**	**2,08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
6	01	1	2,08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Morowali Utara	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	66,900,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Morowali Utara	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	66,900,000
6	01	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Morowali Utara	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	569.090.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Morowali Utara	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	569.090.000
6	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
6	01	01	2,09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	1 Unit	75,096,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	1 Unit	75,096,000

6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Kendaraan Dinas	19 Unit	216,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Kendaraan Dinas	19 Unit	216,500,000
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	23,870,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	23,870,000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**									
6	**01**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**									
6	01	01	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	8 Dokumen	970.001.450	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	8 Dokumen	970.001.450
6	01	01	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Pengawasan Keuangan Yang Dihasilkan	19 Dokumen	2.787.578.050	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Pengawasan Keuangan Yang Dihasilkan	19 Dokumen	2.787.578.050
6	01	01	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan	16 Dokumen	603.651.300	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan	16 Dokumen	603.651.300
TOTAL									**13.999.972.099**					**13.999.972.099**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, dikarenakan tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik Inspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat. Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di Indonesia maka peran Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai tranparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan, masyarakat akan langsung bereraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran Inspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Disini Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara membuka seluasluasnya setiap pengaduan masyarakat asalkan sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang sesuai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015- 2019, dalam satu periode ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi :

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai

Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut :

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ketiga yang selaras dengan peran Inspektorat Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan, ditetapkan Sasaran Strategis :

a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
   (1) Indeks Pengawasan Internal.
   (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil telaah tersebut, maka peran Inspektorat Daerah dalam mengawal jalannya pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sangat relevan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama Tahun 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2024
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	100%
			Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	100%
			Kapabilitas APIP Level 3	Level 3
			Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Di tindak lanjuti	90%
			Level Maturitas SPIP	Level 3

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Morowali Utara terdiri atas :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    f. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
    a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program. Rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2024 akan disajikan dalam tabel 4.1

TABEL 4.1
Rincian Target Capaian Kinerja Dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**													
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**													0
6	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													0
6	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tertib Waktu	Inspektorat Daerah	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	171.272.200	DAU		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	196.963.030
6	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**													
6	01	1	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Peningkatan Pengelolaan Tertib Adminitrasi Keuangan Yang tepat Waktu	Inspektorat Daerah	100 Persen	8 Buku	100 Persen	1.633.850	DAU		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	10 Buku	1.878.928
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pengelolaan Tertib Adminitrasi Keuangan Yang tepat Waktu	Inspektorat Daerah	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	5.767.812.111	DAU		Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.632.983.928
6	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													
6	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	100 Persen	30 Orang	100 Persen	23.837.500	DAU		Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/PKS	40 Orang	27.413.125

6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Inspektorat Daerah	100 Persen	30 Orang	100 Persen	921.653.000	DAU		Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	40 Orang	1.059.900.950
6	01	1	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu Yang Diadakan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Inspektorat Daerah	100 Persen	65 Orang	100 Persen	34,460,000	DAU		Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu Yang Diadakan	75 Orang	39.629.000
6	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Inspektorat Daerah	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	451,928,000	DAU		Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	2 Dokumen	519.717.200
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Inspektorat Daerah	100 Persen	1 Paket	100 Persen	7,962,388	DAU		Tingkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	9.156.746
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Inspektorat Daerah	100 Persen	13 Paket	100 Persen	1.276.088.750	DAU		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan	10 Paket	925.000.000
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien	Inspektorat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	30,637,500	DAU		Persentase Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 Persen	35.233.125

6	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														
6	01	01	2,09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/Direhap	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	100 Persen	1 Unit	100 Persen	75,096,000	DAU		Jumlah Gedung Kantor Yang Dirawat/ Direhap	1 Unit	86.360.400
6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	100 Persen	19 Unit	100 Persen	216,500,000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas	23 Unit	248.975.000
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	100 Persen	35 Unit	100 Persen	23,870,000	DAU		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 Unit	27.450.500
6	**01**	**01**	**2,08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**														
6	01	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	569.090.000	DAU		Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	654.453.500
6	01	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	66,900,000	DAU		Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	76.935.000
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**														0
6	**01**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**														
6	01	01	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Presentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Penurunan Kasus Temuan di Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	100 Persen	8 Dokumen	100 Persen	970.001.450	DAU		Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	11 Dokumen	1.212.501.813

6	01	01	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Presentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Keuangan Yang Dihasilkan	Penurunan Kasus Temuan di Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	100 Persen	19 Dokumen	100 Persen	2.787.578.050	DAU		Jumlah Dokumen Pengawasan Keuangan Yang Dihasilkan	23 Dokumen	3.623.851.465
6	01	01	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Presentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan	Penurunan Kasus Temuan di Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	100 Persen	16 Dokumen	100 Persen	603.651.300	DAU		Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan	19 Dokumen	754.564.125
TOTAL													13.999.972.099					16.132.967.834

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan dokumen perencanaan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam satu tahun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dan memperkecil resiko yang dapat mengancam kesinambungan kinerja organisasi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Derah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan target kinerja Inspektorat Daerah dan rencana kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024.

Selanjutnya, besar harapan kami pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 ini akan terlaksana dengan baik melalui dukungan dan kerjasama semua pihak demi terwujudnya cita-cita pengelolaan keuangan Kabupaten Morowali Utara yang Akuntabel dalam kerangka Good Governance

Kolonodale, Juni 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1003

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Alamat : Jln. Tarundungi No. 04 Kolonodale, Kode Pos-94971

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Nomor : 560/02/SK-DNKT/IV/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten Morowali Utara ;

b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;

c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf b diatas, maka dipandang perlu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentag Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 018).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGARASI KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGARASI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024.

Pasal 1

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul Rencana Strategis mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran program kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
b. Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;
e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
f. Tujuan adalah suatu sebagai penjabaran atau impleentasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai dalam jangka waktu tertentu;
g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelakasanaan;
i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan, sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas dan pokok dan fungsi yang dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistimatika penulisan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGARASI TAHUN 2023

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP.

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale

Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KARTIYANIS LAKAWA, ST
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19760421 200701 1 010

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rancanga awal Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja Disnakertrans yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Disnakertrans demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Morowali Utara
Kepala Dinas



KARTIYANIS LAKAWA,ST
NIP. 19760421 200701 1 010

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika..... 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023..... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023..... 7

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan..... 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 12

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Tahun..... 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 24

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 31

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Disnakertrans..... 31

3.2. Program dan Kegiatan..... 32

BAB IV. PENUTUP..... 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahun sebelumnya sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Induk pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mendefinisikan strategi, memperjelas prioritas organisasi, dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut yang tetap direkatkan dengan koridor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sebagai unit Pelaksana Teknis Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam Pencapaian VISI dan MISI Kabupaten Morowali Utara.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencaa Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 018).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB.I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. dan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan *(stakeholder)*, baik dari SKPD langsung ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara.

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan butuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKERTRANS TAHUN 2023

Renja Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2023.

A. Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara menerima anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 9.655.571.752 (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Duah Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal diperuntukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.8.907.505.078.. Dengan ruang lingkup progam kegiatannya terdiri atas :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dianggarkan sebesar Rp. 4.099.017.052 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.790.116.405 dengan presentase sebesar 92,46 %

b) Program Penempatan Tenaga Kerja, yang dianggarkan sebesar Rp. 873.415.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 459.947.033 dengan presentase sebesar 52,66 %
c) Program Hubungan Industrial, yang dianggarkan sebesar Rp. 171.538.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 164.499.401 dengan presentase sebesar 95,90 %
d) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang dianggarkan sebesar Rp. 4.511.601.700 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.492.942.239 dengan presentase sebesar 99,59 %

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2023 dan Tahun Berjalan dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Morowali Utara tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD;
b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA SKPD.
d. Perencanaan program/kegiatan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan.
e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disnakertrans dalam pencapaian indikator kinerja Disnakertrans maupun Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung, sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada tahun 2023 Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Menyusun perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pembangunan dalam rangka mewujudkan produk perencanaan yang efektif dan efisien, adalah:
   - Menyusun rencana pembangunan daerah yang inovatif, responsive dan partisipatif.

- Meningkatkan koordinasi, baik antar SKPD, antar pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dalam proses perencanaan pembangunan.

Kebijakan :

- Menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara komprehensif pada tiap tahapan dan jangka pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
- Mengoptimalkan terlaksananya program pembangunan lintas SKPD di Kabupaten Morowali Utara dan Kerjasama dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana dengan daerah lain secara sinergis dan terpadu.

2) Strategi untuk meningkatkan basis data perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, adalah:
   - Menyediakan data/informasi statistik guna kebutuhan penyusunan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
   - Memaksimalkan proses evaluasi dan pengendalian yang koordinatif, ukuntabel, transparan dan partisipatif.

   Kebijakan :
   - Menyediakan Informasi/data statistik untuk kebutuhan perencanaan.
   - Melaksanakan dan mengintensifkan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
3) Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan, adalah:
   - Meningkatkan fungsi peneiitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan pembangunan

   Kebijakan:
   - Mengoptimalkan kegiatan pengakajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan, adalah :
   - Memfasilitasi pelayanan prima kepada *stakeholders*, lintas SKPD dan listas kewilayahan.

   Kebijakan:

- Menyediakan sarana dan prasarana kantor dan komponen pendukung operasional.

5) Strategi untuk mewujudkan misi kelima : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan, adalah :
   - Melaksanakan *capacity building* SDM perencanaan pembangunan, memperluas wawasan dalam bidang perencanaan pembangunan.

   Kebijakan :
   - Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan perencanaan pembangunan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Melihat kondisi tersebut diatas Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antara daerah, antar fungsi pemerintah maupun pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksana dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan sebagai Daerah Otonomi baru, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif.
2. Menerapkan *Right Man On The Right Place* dalam penempatan/ perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional.
3. Mengutamakan *Garbage In Garbage Out*, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disnakertrans dilaksanakan oleh aparatur yang kompeten untuk menghasilkan perencanaan yang akuntabel.
4. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
5. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
3. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
4. Koordinasi dan pelaksanaan program-program penelitian dan pengembangan serta statistik di daerah;
5. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain;
6. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
7. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri; dan
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

B. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan urusan pengelolaan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan aset serta umum dan kepegawaian pada satuan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. penyiapan, bahan penyusunan perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
3. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kegiatan dinas dalam menyusun program kerja;
4. penyiapan bahan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian;
5. penyiapan bahan pengawasan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan dinas;
6. penyiapan bahan laporan Sekretariat dan Bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, dan barang; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, membawahi:

1. Sub Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1). Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas mempersiapkan kebijakan teknis, rencana program dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan aset, serta melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan aset di bidang Tenaga Kerja da Transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
2. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi;
3. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ dan LPPD Dinas;
4. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakaan;
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Program serta Dinas;
6. Melaksanakan penyusunan DUKDA/ DIKDA untuk penyiapan bahan rencana anggaran belanja rutin;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran belanja rutin;
8. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran belanja rutin;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengumpulan, pengelolaan data dan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dinas, urusan tata usaha rumah tangga dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;
3. Melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
4. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan .

3. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan daya saing tenaga kerja, kebijakan penempatan dan perluasan tenaga kerja, serta melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit,

penyesu aian Hubungan Industrial serta penyelidikan perselisihan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

1. Merencanakan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktifitas;
2. Mendistribusikan pelaksanaan kebijakan dibidang pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan , pemagangan dan produktifitas;
4. Menyelia perumusan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengembangan bursa kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian tenaga kerja asing; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Bidang Ketenagakerjaan yang membawahi:

a. Seksi Hubungan Industarial

Seksi Hubungan Industarial melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, pemutusan bubungan industrial dan pemutusan bubungan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Hubungan Industarial mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan dan mengelolah data bubungan industrial dan syarat kerja;
2. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pendidikan hubungan industrial serta pembentukan lembaga kerjasama Bipartit, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
3. Mengesahkan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;
4. Menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa dan mogok kerja;
5. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terbadap penggu naan mesin uap, bejana tekan listrik, kebakaran, konstruksi bangunan dan keselamatan kerja lainnya;
6. Merencanakan kegiatan seksi pengelolaan dan penetapan dewan pengupahan sesuai strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode , sistem, anggaran dan standar yang dibutubkan untuk mencapai tujuan;
7. Menyusun, menetapkan dan melaporkan upah minimum dan upah sektoral kabupaten;
8. Melaporkan basil kegiatan seksi pengelolaan dan penetapan dewan pengupahan sesuai basil yang dicapai untuk merumuskan kebijakan; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kelembagaan Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
   1. Merencanakan pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktifitas ;
   2. Mendistribusikan pela.ksanaan kebijakan dibidang pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan ;
   3. Memberikan petunjuk pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, pemagangan dan produktifitas;
   4. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang standarisasi kompetensi pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan,pemagangan dan produktifitas ;
   5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
   6. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
   7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merencanakan kegiatan , melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kesempatan kerja.

   Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
   1. Menyusun laporan, mengelolah data, menganalisa data pencari kerja dan data lowongan ;

2. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;
3. Menerbitkan Izin Menggunakan Tenaga Asing perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing dan memonitoring serta mengevaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral dan multibilateral penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Menerbitkan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta serta menerbitkan rekomendasi paspor Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan asal/ alamat calon Tenaga Kerja Indonesia;
6. Menyelenggarakan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/ perjanjian magang dan negeri;
7. Melaksanakn pelayanan pasar kerja serta menyebarluaskan informasi pasar kerja serta lowongan kerja;
8. Melaksanakan penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Angkatan Kerja Antar Daerah/ Angkatan Kerja Lokal serta menerbitkan SPP SKI, skala kabupaten ;
9. Menyebarluaskan sistem informasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan pengawasan terhadap penyetoran dana perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Melaksanakan sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja dan dan melakukan penelitian serta pengesahan perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar Negeri;
11. Menerbitkan Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Swasta luar Negeri, Tenaga Kerja

Swasta Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi usulan calon lokasi transmigrasi, penyiapan calon lokasi transmigrasi, perencanaan tata ruang pemukiman, pembangunan pemukiman, pemberdayaan kawasan, penempatan transmigrasi, memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan program transmigrasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan pemukiman, tata ruang pemukiman.
b. Melakukan penyiapan lahan, pembagian lahan dan pengurusan.
c. Melakukan penempatan transmigrasi.
d. Pemberian pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada transmigran dan masyarakat sekitar Unit Pemukiman Transmigrasi.
e. Melakukan koordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengaturan mobilisasi dan persebaran penduduk.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Transmigrasi membawahkan ;

a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

   Seksi Perencanan Kawasan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melakukan survey inventarisasi, identifikasi, perencanaan tata ruang pemukiman, penyiapan lahan dan pembagian lahan transmigrasi, melaksanakan pengurusan penerbitan sertifikat serta pengawasan pembagian sertifikat, monitoring dan evaluasi pembukaan lokasi.

b. Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk

Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas pokok dan fungsi menelaah pelaksanaan tata ruang (RTSP) untuk bahan usulan program, melaksanakan urusan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pada unit pemukiman yanga ada (PTA), melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pada unit pemukiman transmigrasi lokasi (PTB), monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, menyusun usaha pekerjaan bangunan, sarana dan prasarana pembangunan baru maupun rehabilitasi

c. Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Seksi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada transmigran dan masyarakat sekitar UPT, pelayanan pendidikan dan pelatihan, membimbing dan menyiapkan pembentukan KUD, pelayanan kesehatan dan Kelurga Berencana (KB)

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan kepada warga transmigrasi di unit pemukiman di bidang pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana, kelembagaan, Karang Taruna, PKK, perangkat desa dan keagamaan serta pembinaan usaha ekonomi antara lain pembinaan usaha tani, pembentukan dan pembinaan KUT serta kelompok usaha bersama.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai keahliannya
b. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya

c. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
d. Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kebutuhan daerah.
e. Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Kajian Atas Indikator Kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kabupaten Morowali Utara, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Induk Morowali 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Morowali 2021-2026, RKPD. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program prioritas Kabupaten Morowali Utara dalam RPJMD Kabupaten Morowali

   Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Profil Morowali Utara, Profil Daerah, serta dokumen lainnya, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Disnakertrans dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL TAHUN

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Terwujudnya kualitas dan kuntitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mampu mendukung penyelenggaraan administasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Terwujudnya kapasitas aparatur penyelenggaraan pelayanan administasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang profesional dan berwawasan *public service;*
4. Terwujudnya pelayanan administasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berkualitas dan pengelolaan data secara akurat;
5. Terwujudnya kompetensi dan produktifitas kerja masyarakat transmigrasi;
6. Terwujudnya kesempatan kerja dan meningkatnya hubungan industrial dan jaminan sosial serta perlindungan ketenagakerjaan;
7. Terwujudnya pembangunan dan pengembangan serta penyiapan kawasan transmigrasi bagi masyarakat transmigrasi.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi Disnakertrans;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mampu mendukung penyelenggaraan administrasi Disnakertrans;

3. Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggaraan pelayanan administrasi Disnakertrans;
4. Mengoptimalkan kawasan transmigrasi untuk kesejahteraan warga transmigrasi dan penduduk lokal yang ada disekitar kawasan transmigrasi.
5. Terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan mempunyai kompetensi daya saing ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh kalangan pemerintah maupun swasta.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 terdiri dari :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan angkatan kerja dan tenaga kerja melalui Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja secara khusus pada masyarakat Kab. Morowali Utara

3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja secara khusus pada masyarakat Kab. Morowali Utara.

4) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

   Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas perlindungan hukum, jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

5) PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI.

Program ini bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan serta penyiapan kawasan transmigrasi bagi masyarakat transmigrasi dan untuk Memerataan Pembangunan dan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal di Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Penyusunan Renja Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Disnakertrans. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Disnakertrans Kabupaten Morowali Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2024.
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								5,866,520,972					6,013,183,996
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,722,717,472					4,840,785,409
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,148,545,677					3,227,259,319
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	12 bulan	12 bulan	3,148,545,677	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,227,259,319
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								604,201,795					619,306,840
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	20 Paket	20 Paket	78,185,500	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	80,140,138
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	4 paket	4 paket	2,593,295	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,658,127
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	8 paket	8 paket	9,426,400	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	9,662,060
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah secara efektif dan efisien	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	30 laporan	30 laporan	513,996,600	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	526,846,515
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								353,400,000					362,235,000
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	1 paket	1 paket	Rp 98,400,000.00	APBD		Presentase Pemenuhan Barang Milik Daerag Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100,860,000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	20 unit	20 unit	Rp 255,000,000.00	APBD		Presentase Pemenuhan Barang Milik Daerag Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	#REF!
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								398,370,000					408,329,250
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	44,550,000	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	45,663,750
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	13,860,000	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	14,206,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	339,960,000	APBD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	348,459,000
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								218,200,000					223,655,000
2	07	01	2,09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	15 Unit	15 Unit	55,000,000	APBD		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	56,375,000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselenggaranya Kegiatan Kantor secara efektif dan efisien	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	20 Unit	20 Unit	163,200,000	APBD		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	167,280,000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								339,228,000					347,708,700
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								339,228,000					347,708,700
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG MEMILIKI STANDAR KOMPETENSI	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	30 Orang	30 Orang	339,228,000	APBD		Presentase Terselenggaranya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 Persen	347,708,700
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								346,053,100					354,704,428
2	07	04	1.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota								346,053,100					354,704,428
2	07	04	1,01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	JUMLAH TENAGA KERJA YANG DIBERDAYAKAN MELALUI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Dibina	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	346,053,100	APBD		Persentase capaian Penempatan Tenaga Kerja	100 Persen	354,704,428
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								458,522,400					469,985,460
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								288,757,900					295,976,848
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	PERSENTASE BESARAN SENGKETA PENGUSAHAN DENGAN PEKERJA YANG DISELESAIKAN	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	42 Perusahaan	1 Dokumen	288,757,900	APBD		Persentase Terselenggaranya Hubungan Industrial	100 Persen	295,976,848
2	07	05	2,02		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota								169,764,500					174,008,613
2	7	5	2.01	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berdampak pada kepentingan di daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE BESARAN SENGKETA PENGUSAHAN DENGAN PEKERJA YANG DISELESAIKAN	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	20 perkara	100 Persen	169,764,500	APBD		Persentase Terselenggaranya Hubungan Industrial	100 Persen	174,008,613

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								4,915,024,400					5,037,900,010
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								4,915,024,400					5,037,900,010
3	32	4	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								4,915,024,400					5,037,900,010
3	32	4	2.01	01	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 Persen	1 Satuan Pemukiman	100 Persen	4,915,024,400	APBD		Persentase Terselenggaranya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100 Persen	5,037,900,010
												TOTAL	10,781,545,372.00					11,051,084,006.30

CATATAN :

JUMLAH PROGRAM	**5**
JUMLAH KEGIATAN	**10**
JUMLAH SUB KEGIATAN	**17**

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPALA DINAS

KARTIYANIS LAKAWA,ST
NIP. 19760421 200701 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PERIKANAN DAERAH

RENCANA KERJA

(RENJA PD)

TAHUN 2024













JL. WOLTER MONGINSIDI, KEL. BAHOUE, KEC. PETASIA -KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA
e-mail : perikananmorut17@gmail.com
KODE POS 94971

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program. Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Rencana Kerja berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja PD Tahun 2024 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di Dinas Perikanan Daerah.

KEPALA DINAS
PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19640625 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.3.1. Maksud 4

1.3.2. Tujuan 4

1.4. Sistimatika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU **7**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 17

2.4. Review terhadap Rencana Kerja PD 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **32**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD Dinas Perikanan Daerah 32

3.2.1. Tujuan 32

3.2.2. Sasaran 39

3.3. Program dan Kegiatan 40

BAB IV PENUTUP **41**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja Pd) Tahun 2024 S/D Tahun 2025 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morwali Utara Tahun 2024 14

Tabel 2.3 Review Terhadap Rencana Kerja Pd Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 22

Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 30

Tabel 2.5 Rencana Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dibidang kelautan dan perikanan merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Rencana kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada target tahun terakhir Renstra Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Proses penyusunan Renja didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara pembahasan perencanaan di Forum SKPD antara usulan rencana Top Down tahun 2024 dengan usulan rencana Bottom Up hasil Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan. Sebagai dokumen perencanaan Renja Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara membuat kebijakan pembangunan, sasaran, program dan kegiatan.

Sehubungan dengan itu, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pemendagri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, Lampiran VI tentang tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
6. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

14. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Telah di Sempurnakan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Konektifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan arah dan kebijakan pembangunan Perikanan serta strategi dan prioritas dalam APBD tahun 2022-2026.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Rencana Kerja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun lalu (tahun n-2 dan tahun n-3) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1.4. Review terhadap Rencana Kerja PD

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

2.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran.

2.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah program / kegiatan selesai. Program terdiri atas beberapa kegiatan. Evaluasi program berorientasi ke depan dalam rangka pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program tersebut sudah tepat.

Tujuan evaluasi program adalah untuk :

1. Mempertanggungjawabkan keberhasilan program kepada masyarakat atau instansi yang membiayai program yang bersangkutan.
2. Keberhasilan maupun ketidak berhasilan program selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atas program tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut atau dialihkan ke program lain yang termasuk priortitas atau pada program yang lebih ekonomis, efisien dan efektif.

Program kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui dana DAU, PAD, DBH PUSAT, DBH PROVINSI, SILPA Tahun 2024 terdiri dari 4 (Empat) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan (tabel 2.1). Sedangkan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada (tabel 2.2). Realisasi anggaran tahun 2023 terdiri dari realisasi pendapatan dan belanja. Total target pendapatan/ penerimaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 32.330.000 Sedangkan belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terbagi atas belanja pegawai (belanja tidak langsung dan belanja langsung) serta belanja barang dan jasa Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebesar Rp.

12.776.157.986 realisasi sebesar Rp. 11.861.321.779,- atau 92,84 %. Dari rincian belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 12.222.586.736,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.468.819.779, atau 93,83 %, dan belanja modal sebesar Rp 553.571.250, dengan realisasi sebesar Rp. 392.502.000, atau 70,90 %.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja PD) s/d Tahun 2024 :

TABEL : 2.1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA PD) TAHUN 2024 s/d TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN PD TAHUN 2024			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2025	
									TARGET (%)	**REALISASI (%)**	**TINGKAT REALISASI (%)**		**REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025**	**TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA TAHUN 2025**
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	JUmlah Pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	160 buah	160 buah	160 buah	160 buah	160 buah	160 buah	160 buah	160 buah
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (laporan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Secara Efektif dan Efisien	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	120 lembar	120 lembar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120 kegiatan	120 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor	120 Unit	120 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**									
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**									
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Tersedianya Data Sumber Daya Ikan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	40 Kelompok	40 Kelompok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Terbentuknya Legalitas Kelompok Nelayan yang Berbadan Hukum	40 Kelompok	40 Kelompok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	03	2.02	0002	pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Terbentuknya kelas kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**									
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**									
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Meningkatnya kapasitas pembudidaya	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Tercapainya Fasilitasi Pembentukan dan Kelembagaan Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudi Daya Ikan**									
3	25	04	2.04	0002	penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota(DINAS PERIKANAN DAERAH)	Persentase jaminan ketersediaan Sarana dan prasarana budidaya	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**									
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota**									
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(DINAS PERIKANAN DAERAH)	Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha	1 POKHLATSAR	1 POKHLATSAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	25	06	2.02	0002	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(DINAS PERIKANAN DAERAH)	Terwujudnya pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 POKHLATSAR	2 POKHLATSAR	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KOLONODALE, Desember 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TENBER BAMBA, A.Pi., M.Si.
NIP. 19640625 198903 1 011

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaiman cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisinya disajikan pada bagian tabel 2.2.

TABEL : 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MORWALI UTARA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang tepat waktu**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (laporan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Secara Efektif dan Efisien			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Jumlah Pengadaan Mebel (set)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	**Meningkatkan Pengelolaan Penangkapan Ikan dalam Daerah**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tersedianya Data Sumber Daya Ikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tersedianya Jaminan Usaha Perikanan Tangkap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	**Meningkatkan Pemberdayaan Nelayan Kecil**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Terbentuknya Legalitas Kelompok Nelayan yang Berbadan Hukum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	**Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Meningkatnya kapasitas pembudidaya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tercapainya Fasilitasi Pembentukan dan Kelembagaan Kelompok			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	**Peningkatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase jaminan ketersediaan Sarana dan prasarana budidaya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	**Tersedianya Tanda Daftar Izin Usaha Mikro dan Kecil**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
-	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya kegiatan Pameran dan Promosi Hasil Perikanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	**Tercapainya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, kajian hasil evaluasi pelaksanaan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja RENSTRA PD, maka dirumuskan penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja RENSTRA PD.

Rumusan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Daerah :

1. Perumusan kebijakan strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan Dinas Perikanan Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten;
3. Pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang menjadi kewenangan kabupaten serta pemberdayaan masyarakat pesisir;
4. Pelaksanaan pengawasan penegak hukum di wilayah laut, pengelolaan terpadu pemanfaatan sumberdaya laut dan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan kabupaten;
5. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan diwilayah kabupaten;

6. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten;
7. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan, dalam wilayah kewenangan kabupaten;
8. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan atau rekomendasi perizinan Dinas Perikanan Daerah;
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat pengelola potensi kelautan, perikanan;
10. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Isu dan Permasalahan

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan disamping mempunyai peluang yang menjanjikan juga dihadapkan pada berbagai macam isu dan permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi, isu dan permasalahan tersebut diantaranya :

1. Terbatasnya benih yang berkualitas;
2. Kurangnya penyediaan induk berkualitas;
3. Kurangnya teknologi budidaya/perbenihan untuk komoditas yang sedang dan akan dikembangkan;
4. Alat tangkap nelayan yang masih tradisional dengan kemampuan *one day fishing*;

5. Sumberdaya Manusia pengolah hasil perikanan masih rendah, berskala kecil, tradisional;
6. Masih kurangnya pengetahuan nelayan;
7. Peningkatan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan;
8. Pengolahan hasil produksi perikanan masih tradisional;
9. Pemasaran produk perikanan kurang efisien;
10. Permodalan;
11. Sarana dan prasarana pelabuhan belum memadai;
12. Sarana dan prasarana pembudidaya belum memadai;
13. Kemampuan SDM.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja PD

Rencana Kerja PD disusun dengan menggunakan rancangan Renja PD dengan Kepala PD. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, Forum PD / Gabungan PD, serta Musrenbang Kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD. Mengingat tujuan dilakukannya review terhadap Renja PD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan rumusan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja PD, Karena pada hakekatnya Rencana Kerja (Renja PD) tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rencana Kerja PD. Pada akhirnya, Rencana Kerja (Renja PD) juga akan mengalami

penyempurnaan setelah rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Sehingga apabila ada dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam hal penyediaan dana indikatif maka usulan program kegiatan Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan baik. Review terhadap Renja PD ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangkan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

TABEL : 2.3
REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PD TAHUN 2024
KABUPATEN MOROWALIN UTARA

RANCANGAN AWAL PD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN (%)**	**PAGU INDIKATIF (Rp.)**	**PROGRAM/ KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN (%)**	**KEBUTUHAN DANA (Rp.)**	**CATATAN PENTING**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Rp 5.471.033.920.00**						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	**Rp 4.183.643.084.00**						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Presentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 4.183.643.084.00						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan Daerah	Peningkatan sumber daya aparatur	100%	Rp 58.512.500.00						
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perikanan Daerah	JUmlah Pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	100%	Rp 58.512.500.00						

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas Perikanan Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**	100%	**Rp 481.079.036.00**						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	100%	Rp 138.464.300.00						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	100%	Rp 4.208.986.00						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (laporan)	100%	Rp 27.900.350.00						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Secara Efektif dan Efisien	100%	Rp 310.505.400.00						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perikanan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 662.474.300.00**						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Rp 1,500,000.00						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	Rp 57.014.300.00						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 603.960.000.00						

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perikanan Daerah**	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**	**100%**	**Rp 85.325.000.00**						
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Dinas Perikanan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 32.500.000.00						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 40,000,000.00						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Dinas Perikanan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor	100%	Rp 12.825.000.00						
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan , semua Kelurahan**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap**	**100%**	**Rp 3.493.384.700.00**						
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan , semua Kelurahan**	**Meningkatkan Pengelolaan Penangkapan Ikan dalam Daerah**	**100%**	**Rp 2.592.891.000.00**						

	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Tersedianya Data Sumber Daya Ikan	100%	Rp 475.261.000.00						
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	100%	Rp 2.117.630.000.00						
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan , semua Kelurahan**	**Meningkatkan Pemberdayaan Nelayan Kecil**	**100%**	**Rp 900.493.700.00**						
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Terbentuknya Legalitas Kelompok Nelayan yang Berbadan Hukum	100%	Rp 837.738.000.00						
	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan kecil	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Terbentuknya kelas kelompok	100%	Rp 62.755.700.00						
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan , semua Kelurahan**	**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan budidaya**	**100%**	**Rp 1.479.936.100.00**						
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan , semua Kelurahan**	**Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil**	**100%**	**Rp 570.658.100.00**						

	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Meningkatnya kapasitas pembudidaya	100%	Rp 320.138.500.00						
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Tercapainya Fasilitasi Pembentukan dan Kelembagaan Kelompok	100%	Rp 250.519.600.00						
	Pengelolaan Pembudi Daya Ikan	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**Peningkatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**100%**	**Rp 909.278.000.00**						
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya	100%	Rp 909.278.000.00						
4	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**Meningkatnya ragam produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing, kelompok usaha pengelola hasil perikanan**	**100%**	**Rp 797.870.200.00**						
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	**Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan**	**Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota**	**100%**	**Rp 797.870.200.00**						

	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha	100%	Rp 197.870.200.00						
	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN DAERAH)	Kab. Morowali Utara, semua Kecamatan, semua Kelurahan	Terwujudnya pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 600.000.000.00						

KOLONODALE, Desember 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi., M.Si.

NIP. 19640625 198903 1 011

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum PD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan PD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait. Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum PD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja (Renja PD), serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor perikanan. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan acara forum PD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari *Bottom up maupun Top down*. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten

Morowali Utara. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritaskan berdasarkan tingkat ketergesaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 di Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Aspirasi masyarakat merupakan harapan sangat dalam bentuk akan menjadi perhatian serius Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan program kerja tahun 2024. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dijalankan dengan tertib terarah, efektif dan efisien. Adapaun usulan program dan kegiatan yang di usulkan oleh para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KABUPATEN MOROWALIN UTARA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	SUMBER DANA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Program Perikanan Tangkap	Desa Gililana	Pengadaan Katinting 13 PK honda	13	
2	Program Perikanan Tangkap	Desa Gililana	alat tangkap ikan	5	
3	Program Perikanan Tangkap				
4	Program Perikanan Tangkap	Kampung Bugis	Pengadaan perahu	4	
5	Program Perikanan Tangkap		katinting	6	
6	Program Perikanan Tangkap	Desa Gililana	alat tangkap ikan (pukat)	2	
7	Program Perikanan Tangkap				
8	Program Perikanan Tangkap	Desa tiu	Pengadaan Pukat dan bubu	1	
9	Program Perikanan Tangkap	Desa Gililana	pengadaan katinting 13 PK	8	
10	Program Perikanan Tangkap	Desa Ganda ganda	pengadaan katinting 13 PK	6	
11	Program Perikanan Tangkap	Desa Tandayondo	bantuan pembuatan sero ikan	1	
12	Program Perikanan Tangkap	Desa Baturube	pengadaan katinting 13 PK	6	
13	Program Perikanan Tangkap	Ds. Moleono	Katinting 5, 5 PK	10	
14	Program Perikanan Tangkap	Ds. Koromatantu	Bantuan alat tangkap ikan	1	
15	Program Perikanan Tangkap	Ds. Sampalowo	Bantuan alat tangkap ikan	1	
16	Program Perikanan Tangkap	Ds. Moleono	Bantuan alat tangkap ikan	1	
17	Program Perikanan Tangkap	Ds. Onepute	Bantuan alat tangkap ikan	1	
18	Program Perikanan Tangkap	bungintimbe	Bantuan alat tangkap ikan	10	
19	Program Perikanan Tangkap	Ds. Tandayondo	Pengadaan katinting 5,5 PK		
20	Program Perikanan Tangkap	lambolo	Pengadaan katinting	13	
21	Program Perikanan Tangkap	Ds Towara	Pengadaan Katinting 13 PK	8	
22	Program Perikanan Tangkap	Bahontula	katinting 9 PK	10	
23	Program Perikanan Tangkap	Tokala Atas	Perahu	1	

24	Program Perikanan Tangkap	Matube	Pengadaan Katinting 13 PK	8	
25	Program Perikanan Tangkap	Matube	Pengadaan Katinting Loncing 10 HP	22	
26	Program Perikanan Tangkap	Kolobawa	Pengadaan Katinting 13 PK	9	
27	Program Perikanan Tangkap	Tirongan Bawah	Pengadaan perahu	3	
28	Program Perikanan Tangkap		katinting	3	
29	Program Perikanan Tangkap	Bahontula	katinting 9 PK	12	
30	Program Perikanan Tangkap				
31	Program Perikanan Tangkap	Ungkea	Pengadaan Perahu fiber	1	
32	Program Perikanan Tangkap	Keuno	Pengadaan Perahu fiber	1	
33	Program Perikanan Tangkap	Ungkea	Pengadaan Perahu Mesin	1	
34	Program Perikanan Tangkap	Onepute	Pengadaan Perahu fiber	1	
35	Program Perikanan Tangkap	Onepute	Pengadaan sero dan perahu katinting	1	
36	Program Perikanan Tangkap	Ungkea	Pengadaan Katinting 13 PK	8	
37	Program Perikanan Tangkap	Koya	Pengadaan Katinting 13 PK	9	
38	Program Perikanan Tangkap	Ganda ganda	katinting 9 PK	9	
39	Program Perikanan Tangkap	Korolaki	Pengadaan Katinting 13 PK	2	
40	Program Perikanan Tangkap	Desa Gililana	katinting 9 PK	1	
41	Program Perikanan Tangkap	Desa Gililana	Pengadaan Katinting 13 PK honda	13	
42	Program Perikanan Tangkap		alat tangkap ikan	5	
43	Program Perikanan Budidaya	Ds gililana	Bantuan bibit ikan kerapu	3000	
44	Program Perikanan Budidaya		Pakan	6	
45	Program Perikanan Budidaya	kampung bugis	Bantuan bibit ikan air laut	7,500	
46	Program Perikanan Budidaya		Pakan	7	
47	Program Perikanan Budidaya	Ds ganda ganda	Bantuan bibit ikan kerapu	6,400	
48	Program Perikanan Budidaya		Pakan	5	
49	Program Perikanan Budidaya	Ds Koromatantu	Bantuan bibit ikan lele	11,000	
50	Program Perikanan Budidaya		Pakan	10	
51	Program Perikanan Budidaya	Ds Koromatantu	Bantuan Bibit ikan lele	17,000	
52	Program Perikanan Budidaya		Pakan	6	

53	Program Perikanan Budidaya		Kolam bundar	2	
54	Program Perikanan Budidaya	Ds. Malino Jaya	mesin pelet ikan		
55	Program Perikanan Budidaya	Ganda ganda	freezer	5	
56	Program Perikanan Budidaya	Ds gililana	KJA	1	
57	Program Perikanan Budidaya	Ds Korolaki	Benih lele dan pakan	1	
58	Program Perikanan Budidaya	Lembontonara	Benih lele dan pakan	1	
59	Program Perikanan Budidaya	Maralee	Benih lele dan pakan	1	
60	Program Perikanan Budidaya	Tinompo	Benih lele dan pakan	1	
61	Program Perikanan Budidaya	Tiu	Benih lele dan pakan	1	
62	Program Perikanan Budidaya	Bahontula	Benih nila dan pakan	1	
63	Program Perikanan Budidaya	Kampung Bugis	Benih Kerapu	7500	
64	Program Perikanan Budidaya		Pakan Ikan Air Laut	7	
65	Program Perikanan Budidaya	Petasia Timur	Benur Udang	1	
66	Program Perikanan Budidaya	Petasia	Benih lele	14000	
67	Program Perikanan Budidaya		pakan	10	
68	Program Perikanan Budidaya	desa jamor jaya	Benih lele	20000	
	Program Perikanan Budidaya		pakan	30	
	Program Perikanan Budidaya	desa keuno	Benih lele	7000	
	Program Perikanan Budidaya		pakan	8	
	Program Perikanan Budidaya	desa maralee	Benih lele	14410	
	Program Perikanan Budidaya		pakan	20	
	Program Perikanan Budidaya	desa petumbea	Benih lele	20000	
	Program Perikanan Budidaya		pakan	30	
	Program Perikanan Budidaya	desa sampalowo	Benih lele	14450	
	Program Perikanan Budidaya		pakan	20	
	Program Perikanan Budidaya	petasia	Benih ikan nila	13000	
	Program Perikanan Budidaya		pakan	10	

	Program Perikanan Budidaya		parang	2	
	Program Perikanan Budidaya		meja	1	
	Program Perikanan Budidaya		mesin paras	2	
	Program Perikanan Budidaya		genset	1	
	Program Perikanan Budidaya		refraktometer	1	
	Program Perikanan Budidaya		DO meter	1	
	Program Perikanan Budidaya	Ds gililana	Mikroskop	1	
	Program Perikanan Budidaya		Bantuan bibit ikan kerapu	3000	
JUMLAH					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kelautan dan Perikanan, sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 memiliki 7 (tujuh) arah kebijakan, diantaranya membangkitkan wawasan dan budaya bahari; meningkatkan dan menguatkan peranan SDM di bidang kelautan menetapkan wilayah kesatuan NKRI, aset dan hal-hal terkait di dalamnya termasuk kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut unclos; melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yuridiksi dan aset NKRI; mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan; mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut; serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambahan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan keterbatasan sumberdaya alam yang tersedia maka mendorong pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan di laksanakan seoptimal mungkin untuk kesehteraan masyarakat. Di sisi lain tuntutan untuk melestarikan sumberdaya kelautan, perikanan juga semakin besar sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD Dinas Perikanan Daerah

3.2.1. Tujuan

Mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026 dan Sesuai Visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni "*Terwujudnya Masyarakat Perikanan Yang Sejahtera Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan*

Dan Berdaya Saing" sedangkan Misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan yang berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan aparatur dan pelaku usaha;
2. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan Produksi Budidaya, produksi tangkapan dan pengolahaan serta pemasaran hasil perikanan sebagai usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi;
3. Menciptakan keseimbangan ekosistem sumberdaya alam yang mendukung pembangunan perikanan secara berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan pelayanan bagi pelaku perikanan.

Maka tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan;
2. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel;
3. Mewujudkan professional kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan masyarakat pesisir;
5. Meningkatkan penerimaan daerah dari produk perikanan;
6. Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia perikanan secara terintegrasi;
7. Memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan;
8. Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan;

9. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
10. Memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal;
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perikanan.

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan;
2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya;
3. Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk perikanan;
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia perikanan;
5. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan;
6. Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan;
7. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
8. Tersedianya teknologi dan informasi perikanan;
9. Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel;
10. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perikanan;
11. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	
1	*2*	*3*	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		3.2	Pengelolaan Pembudi Daya Ikan
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS
PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19640625 198903 1 011

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

Dinas Pertanian Kabupaten Morut

kabmorowaliutaradinaspertanian@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Untuk menyikapi hal tersebut, Rencana Kerja mencakup: 1. Pernyataan visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran Dinas; 2. Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas; 3. Uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan; 4. Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi Dinas pertanian dan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi yang bersangkutan. Perencanaan perlu dilaksanakan mengingat adanya ketidakpastian akibat pengaruh dinamika lingkungan yang dihadapi. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara, pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi dan Desentralisasi. Pencapaian yang maksimal dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan mampu memberikan kontribusi yang nyata atas berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Desember 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



Abbas Matoori, SP.,MM.
NIP 19640412 199403 1 011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....

BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 53

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 56
3.3 Program dan Kegiatan 57

BAB. IV PENUTUP 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran. Renja ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pertanian dan pangan daerah secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 - 2026.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari tahap persiapan, penyusunan rancangan Renja, penyusunan rancangan akhir Renja, dan penetap

Dalam tahap penyusunan rancangan Renja, dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra, perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta perumusan Tujuan, Sasaran, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RKPD. Dalam tahap penyusunan rancangan akhir, Renja mengalami penyempurnaan setelah dilakukan verifikasi rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD melalui Forum Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musrenbang Daerah. Selanjutnya dilakukan penajaman keselarasan berbagai dokumen acuan penyusunan Renja melalui pembahasan intern masing – masing Perangkat Daerah. Setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap rancangan akhir Renja, barulah dilakukan penetapan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Terbentuknya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, merupakan instansi dalam Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan. Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pertanian dan pangan daerah Kabupaten Morowali Utara 1 tahun kedepan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.
b. Orientasi mengenai Renja OPD Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
c. Penyusunan Agenda Kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan Renja OPD.
d. Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis
2. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan Pertanian dan Pangan di Kabupaten Morowali Utara, melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Dinas Peranian dan Pangan tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana

Kerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati Morowali Utara yaitu:

Mewujudkan masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahterah

"Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Prioritas Pembangunan Pertanian dan Pangan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2013 Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Peraturan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instransi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang (prakiraan maju).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN RENJA

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2022 – 2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tersebut memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 - 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun – tahun sebelumnya. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel T-C 29.

Tabel T-C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

Pencapaian RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran (Persen)**								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase penyedia jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan (Persen)		92,77%					92,77%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan (Persen)		97,57%					97,57%	
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase rapat yang diikuti (Persen)		82,07%					82,07%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Peresentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		(Persen)								
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Bangunan Gedung (Unit)		100%					100%	
	Program Penigkatan Kesejahteraan Petani	**Nilai Tukar Petani (NTP); Jumlah Pelatihan Kelompok Tani Yang Dilaksanakan (NTP/Klp)**								
	Peningkatan Produksi, produk tifitas dan mutu produk perkebunan (Sharing Pembantuan	Persentase Terlaksananya perencanaan dan target realisasi kegiatan perkebunan (Ha)		96,88%					96,88%	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan (Persen)**								
	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Jumlah Monev penyaluran pupuk bersubsidi dan Pestisida di Kecamatan (Ton)		100%					100%	
	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Produksi Padi,kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, bawang merah, cabe (Persen)		96,93%					96,93%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Jumlah Lahan Kering (pangan dan hortikultura) (Persen)		100%					100%	
	Pengembangan perbenihan /pembibitan	Durian, Rambutan, Sarana dan Prasarana (Kec)		100%					100%	
	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Penduduk	"Persentase Terlaksananya Kegiatan Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan" (Persen)		97,44%					97,44%	
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Penurunan Konsumsi Beras (Orang)		99,85%					99,85%	
	Informasi Akses Pangan Masyarakat dan Infrastruktur Pangan	Jumlah dokumen informasi publik ketersediaan pangan		97,73%					97,73%	
	Peningkatan Sistem Informasi Pasar	Jumlah Dokumen Rekomendasi ketersediaan pangan (klp)		99,25%					99,25%	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Persen)**								
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	BIMTEK/ Magang, pameran,Pelatihan wanita Tani		75,00%					75,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Persen)**								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian tepat guna - Pengadaan Combine -Pembangunan Jalan Tani Areal Persawahan Tongko -Peningkatan Jalan Tani -Peningkatan Usaha Jalan Tani (pelaburan dan pengerasan) - Pembentukan Jalan Tani - Pembentukan Jalan Tani - Traktor YANMAR Type EF 494 T - Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi di Ramonge - Jalan Tani - Janjutan Jalan Produksi di Dusun I	Persentase Terwujudnya pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana (-)		99,72%					99,72%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	- Irigasi Persawahan - Pembangunan Saluran Irigasi Korobomba - Pembangunan Jalan Usaha Tani									
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan (Persen)**								
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Alat dan mesin pertanian (Alat Pengolahan Tanah, Panen dan pasca panen) (Unit)		59,41%					59,41%	
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Persentase Tersedianya benih di setiap Kecamatan (Ha)		100,00%					100,00%	
	Sertifikasi Bibit UnggulPertanian/Perkebunan	Sertifikasi benih padi, Sertifikasi benih Palawija, Sertifikasi benih holtikultura, Pengujian lab, Monitoring pengawasan benih (Ha)		98,25%					98,25%	
	Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	**Jumlah Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan (Orang)**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Meningkatnya kemampuan, disiplin dan integritas Penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan (Penyuluh)		71,54%					71,54%	
	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Persentase Meningkatnya kesejahteraan Penyuluh pertanian/perkebunan (Penyuluh)		71,54%					71,54%	
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Persentase Terlaksananya kegiatan penyuluhan sesuai rencana. (Penyuluh)		30,00%					30,00%	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	**Kesehatan ternak/Kesehatan hewan (Kasus)**								
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Survellience penyakit (kali), 'Vaksinasi Rabies (ekor), 'Vaksinas ND (tetelo) (ribu ekor) (Kasus)		50,00%					50,00%	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	**Populasi Sapi; Populasi Kambing ; Populasi Ayam Buras (Ekor)**								
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana IB (Paket) (Paket)		62,50%					62,50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat (Ekor)		87,08%					87,08%	
	Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan (Paket), Benih Leguminosa (kg/thn), HMT (stek/thn), Konsentrat (kg/thn) (Paket)		100,00%					100,00%	
	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Perkebunan	**Profil Perkebunan Raya Daerah Yang dibuat; Data Statistik Perkebunan (Dokumen)**								
	Pendataan Statistik Perkebunan	Persentase Terlaksana kegiatan statistik perkebunan (Dokumen)		100,00%					100,00%	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat**								
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksana kegiatan statistik perkebunan**								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			100,00%	100,00%			100,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran Dewan Ketahanan Pangan**								
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	100%		100%	98.74%		100%	198.74%	198.74%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Rapat Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Distribusi Pangan	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan**								
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	100%		100%	50.00%		100%	150%	148.49%
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%		100%	48.49%		100%	148.49%	148.49%
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat**								
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Pembuatan Peta Kerawanan Pangan			100%	100%			100%	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penangangan Kerawanan Pangan**								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penurunan 1% tiap tahun nya kerawanan pangan			100%	100%			100%	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan			100%	100%			100%	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar**								
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan**								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen listrik/penerangan			100%	0%				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%		100%	100%		100%	200%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%		100%	75.00%		100%	175%	175%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100%	100%			100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%		100%	94.87%		100%	194.87%	194.87%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		100%	95.56%		100%	195.56%	195.56%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**								
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%					100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		100%	100%		100%	200%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%		100%	76.64%		100%	176.64%	176.64%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%		100%	99.80%		100%	199.80%	199.80%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**								
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%		100%	91.30%		100%	191.30%	191.30%
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya** **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100%		100%	89.90%		100%	189.90%	189.90%
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100%		100%	16.67%		100%	116.67%	116.67%
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/BibitHijauan Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan			100%	52.22%			52.22%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Ternak	Ternak yang Beredar								
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Terlaksananya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah**								
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100%		100%	53.83%		100%	153.83%	153.83%
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**								
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**								
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	100%		100%	75.00%		100%	175%	175%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	100%		100%	0%		100%	100%	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			100%	100%			100%	100%
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	100%		100%	52.61%		100%	152.61%	152.61%
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**								
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terselengaranya Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100%		100%	33.33%		100%	133.33%	133.33%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%					100%	100%	100%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terselengaranya Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100%		100%	79.14%		100%	179.14%	179.14%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%							
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Terselenggaranya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	100%		100%	79.67%		100%	179.67%	179.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Lainnya	Pertanian Lainnya								
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	100%					100%	100%	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Pengendalian Kesehatan hewan dan Masyarakan Veteriner**								
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**terlaksananya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular**								
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100%		100%	78.99%		100%	178.99%	178.99%
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah**								
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%		100%	50.00%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Veteriner									
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**								
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**								
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100%					100%	100%	100%
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100%		100%	100%		100%	200%	200%
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100%					100%	100%	100%
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**								
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
		Kabupaten/Kota								
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	100%					100%	100%	100%
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	100%		100%	82.17%		100%	182.17%	182.17%
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	100%					100%	100%	100%
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Honorer daerah dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh (BOP**								
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%		100%	75.68%		100%	175.68%	175.68%
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%		100%	90.00%		100%	190%	190%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA DPPD) Tahun 2023 (N)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan RENJA DPPD Tahun 2023 (N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2023	
					Target RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Realisasi RENJA DPPD Tahun 2022 (N-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/5)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100%		100%	100%		100%	200%	200%

Kolonodale 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

Abbas Matoori, SP., MM.

NIP. 19640412 199403 1 011

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2 (T-C.30) *Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan*

Tabel T-C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		100%	100%				100%				
2	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		100%	100%	100%	100%	100%	98.74%		100%	100%	
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
6	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		100%	100%	100%	100%	100%	50.00%		100%	100%	
7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		100%	100%	100%	100%	100%	48.49%		100%	100%	
8	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
10	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
11	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	0%		100%	100%	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	100%	100%	100%	100%	75.00%		100%	100%	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	100%	100%	94.87%		100%	100%	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	100%	100%	95.56%		100%	100%	
20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%	100%	76.64%		100%	100%	
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		100%	100%	100%	100%	100%	99.80%		100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Lainnya											
28	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
29	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%	91.30%		100%	100%	
30	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		100%	100%	100%	100%	100%	89.90%		100%	100%	
31	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		100%	100%	100%	100%	100%	16.67%		100%	100%	
32	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/BibitHijauan Pakan Ternak		100%	100%	100%	100%	100%	52.22%		100%	100%	
33	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		100%	100%	100%	100%	100%	53.83%		100%	100%	
34	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
35	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		100%	100%	100%	100%	100%	75.00%		100%	100%	
36	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		100%	100%	100%	100%	100%	0%		100%	100%	
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
38	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		100%	100%	100%	100%	100%	52.61%		100%	100%	
39	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		100%	100%	100%	100%	100%	33.33%		100%	100%	
40	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
41	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		100%	100%	100%	100%	100%	79.14%		100%	100%	
42	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
43	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		100%	100%	100%	100%	100%	79.67%		100%	100%	
44	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
45	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		100%	100%	100%	100%	100%	78.99%		100%	100%	
46	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		100%	100%	100%	100%	100%	50.00%		100%	100%	
47	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
48	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
49	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
50	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
51	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%	82.17%		100%	100%	
52	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	
53	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	75.68%		100%	100%	
54	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		100%	100%	100%	100%	100%	90.00%		100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
55	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Kolonodale 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

Aslan Matoori, SP., MM.

NIP. 19640412 199403 1 011

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah berkaitan dengan tugas dan fungsi antara lain :

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
2. SDM Aparatur (tenaga penyuluh) belum memenuhi standard kompetensi;
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani;
4. Rendahnya daya saing komoditas pertanian;
5. Belum sepenuhnya pelaksanaan Perda LP2B ;
6. Menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian;
7. Belum optimalnya produksi pangan;
8. Adanya serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan penurunan produktivitas ternak;
9. Kurangnya kemampuan dan keterampilan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian dan penganekaragaman tanaman pertanian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Diketahui bahwa rancangan awal RKPD disusun melalui analisis kebutuhan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah. Ada beberapa program kegiatan yang mendukung prioritas nasional tetapi tidak dapat dimasukkan dalam RKPD karena masih ada program/ kegiatan daerah yang masih belum dijalankan untuk

kesejahteraan masyarakat. Begitupun dalam besaran anggaran yang tidak sesuai antara Hasil Analisis Kebutuhan dan Rancangan Awal OPD. ***Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel.2.4 (T-C.31)***

Tabel T-C-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	100%	**210,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**		**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	100%	**210,000**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Terlaksana kegiatan statistik perkebunan**	100%	**210,000**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Terlaksana kegiatan statistik perkebunan**	100%	**210,000**	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia		105,000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia		105,000	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia		105,000	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia		105,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat**		**98,530,350**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat**		**98,530,350**	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		**Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran dewan ketahanan pangan**		**63,507,800**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran dewan ketahanan pangan**		**63,507,800**	
1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100%	12,434,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100%	12,434,000	
1.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	100%	4,925,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	100%	4,925,000	
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	19,600,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	19,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.4	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	100%	26,548,800	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	100%	26,548,800	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		**Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan**		**13,542,400**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan**		**13,542,400**	
1.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	100%	13,542,400	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	100%	13,542,400	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		**Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**21,480,150**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**21,480,150**	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		7,610,000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		7,610,000	
1.6	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan,	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	100%	13,870,150	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan,	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	100%	13,870,150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kelurahan	Berbasis Sumber Daya Lokal			Lokal	Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
3	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase Penanganan Kerawanan Pangan**	**100%**	**18,843,500**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase Penanganan Kerawanan Pangan**	**100%**	**18,843,500**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar**		**18,843,500**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar**		**18,843,500**	
3.1	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%	7,290,000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100%	7,290,000	
3.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	100%	11,553,500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	100%	11,553,500	
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**19,004,041,894**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**19,004,041,894**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**		**17,217,654,394**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya Hak-Hak ASN**		**17,217,654,394**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,217,654,394	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,217,654,394	
	Administrasi Umum **Perangkat Daerah**		**Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan**		**68,467,500**	**Administrasi Umum** **Perangkat Daerah**		**Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan**		**68,467,500**	
4.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2,460,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2,460,000	
4.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	720,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	720,000	
4.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1,600,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1,600,000	
	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Morowali Utara, Semua	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		422,500	Penyediaan Bahan Logistik	Kab. Morowali Utara, Semua	Jumlah Paket Bahan Logistik		422,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kantor	Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Disediakan			Kantor	Kecamatan, Semua Kelurahan	Kantor yang Disediakan			
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	7,785,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	7,785,000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	55,480,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	55,480,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**65,056,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**65,056,000**	
4.7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	22,256,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	22,256,000	
4.8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	40,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Lapangan	Kelurahan				Lapangan	Kelurahan				
4.9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	2,800,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	2,800,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan**		**1,557,664,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan**		**1,557,664,000**	
4.10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1,000,000	
4.11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	28,894,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	28,894,000	
4.12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyedia jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	100%	10,970,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyedia jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	100%	10,970,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1,516,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1,516,800,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**		**95,200,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**		**95,200,000**	
4.14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	70,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	70,000,000	
4.15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	25,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	25,200,000	
5	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	100%	**110,944,300**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	100%	**110,944,300**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		**Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian**		**34,630,700**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian**		**34,630,700**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100%	15,067,600	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100%	15,067,600	
5.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	19,563,100	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	19,563,100	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**13,192,000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**13,192,000**	
5.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100%	13,192,000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100%	13,192,000	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**11,790,000**	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah**		**11,790,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
								Kabupaten/Kota			
5.4	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100%	11,790,000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100%	11,790,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksnanya kegiatan Pengendalian Dan Pengawasaan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/Kota**		**15,220,000**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksnanya kegiatan Pengendalian Dan Pengawasaan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/Kota**		**15,220,000**	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		7,610,000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		7,610,000	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		7,610,000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		7,610,000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah		**Terlaksananya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam**		**36,111,600**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah**		**Terlaksananya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang**		**36,111,600**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kabupaten/Kota Lain		**1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**			**Kabupaten/Kota Lain**		**Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**			
5.5	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100%	33,933,600	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100%	33,933,600	
5.6	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100%	2,178,000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100%	2,178,000	
6	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	100%	**155,737,550**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	100%	**155,737,550**	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		**Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**88,973,800**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**88,973,800**	
6.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	100%	39,999,800	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian	100%	39,999,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Berkelanjutan/LCP2B		Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			Berkelanjutan/LCP2B		Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			
6.2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	100%	689,500	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	100%	689,500	
6.3	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	100%	48,284,500	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	100%	48,284,500	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		**Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**		**62,263,750**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**		**62,263,750**	
6.4	Pembanguan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	100%	15,000,000	Pembanguan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	100%	15,000,000	
6.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	15,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	15,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kelurahan					Kelurahan				
6.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	9,485,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	9,485,000	
6.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	7,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	7,000,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		778,750	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		778,750	
6.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	15,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100%	15,000,000	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah**		**4,500,000**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah**		**4,500,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kabupaten/ Kota					**Kabupaten/ Kota**			
6.9	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	100%	4,500,000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	100%	4,500,000	
7	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100%**	**62,168,400**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100%**	**62,168,400**	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		**terlaksananya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**		**27,557,300**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**		**terlaksananya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**		**27,557,300**	
7.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100%	27,557,300	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100%	27,557,300	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah**		**8,060,000**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk**		**8,060,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kabupaten/Kota					**Hewan Daerah** **Kabupaten/Kota**			
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		8,060,000	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		8,060,000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**26,551,100**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**26,551,100**	
7.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%	26,551,100	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%	26,551,100	
8	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**100%**	**35,574,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**100%**	**35,574,000**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian **Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**35,574,000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian** **Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**35,574,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100%	12,235,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100%	12,235,000	
8.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100%	13,435,000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100%	13,435,000	
8.3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100%	9,904,000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100%	9,904,000	
9	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**	100%	**41,234,000**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**	100%	**41,234,000**	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**41,234,000**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**41,234,000**	
9.1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Usaha Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	100%	19,610,000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Usaha Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	100%	19,610,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kelurahan					Kelurahan				
9.2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	100%	11,136,500	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	100%	11,136,500	
9.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	100%	10,487,500	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	100%	10,487,500	
10	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase Penyuluhan Pertanian**	100%	**64,559,400**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase Penyuluhan Pertanian**	100%	**64,559,400**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		**Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Honorer daerah dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh (BOP Penyuluh)**		**64,559,400**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Honorer daerah dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh (BOP Penyuluh)**		**64,559,400**	
10.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	15,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	15,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Kelurahan					Kelurahan				
10.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	5,340,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	5,340,000	
10.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100%	15,000,000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100%	15,000,000	
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk		15,000,000	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk		15,000,000	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		14,219,400	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		14,219,400	

Kolonodale 2023

Pangan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara



Abas Matoori, SP., MM.
NIP. 19640412 199403 1 011

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat ditampung melalui mekanisme musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui proses musrenbang dan forum OPD diperoleh data usulan masyarakat untuk pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan pangan.

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara berusaha semaksimal mungkin menampung aspirasi masyarakat. Apabila asprirasi masyarakat belum dapat dilaksanakan pada program kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka akan ditampung lagi pada tahun selanjutnya.

Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan daerah yang sangat kita cintai ini. Dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan pangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakata Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 2.5 (T-C 32) *Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024*

Tabel T-C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

No	Program / Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan	Lokasi			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**						
	- Pembangunan Jalan Tani	Kec. Bungku Utara		Desa Tanakuraya Dusun 2, Kab. Morowali Utara		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Jalan Tani	Kec. Bungku Utara		Desa Lemo, Kab. Morowali Utara		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Jalan Tani	Kec. Petasia Barat		Desa Moleono, Dusun 1		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Jalan Tani	Kec. Petasia Barat		Desa Tiu, Jalan Tani		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan

				Kontoba dan Korobokoe			
	- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Tani	Kec. Petasia Barat		Desa Maralee, Dusun III		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Embung pertanian	Kec. Mamosalato		RT 02 Dusun 3 Desa Tanagaya		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Jalan Tani	Kec. Lembo Raya		Dusun I, Desa Pa'awaru		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Jalan Tani	Kec. Soyo Jaya		Desa Bau, Dusun 2 Tameari		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Tani	Kec. Lembo		Dusun I dan II Korowalelo, Kec. Lembo		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Embung Pertanian	Kec. Lembo		Dusun II, Wara'a Kec. Lembo		120.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pembangunan Jalan Tani	Kec. Lembo		Dusun 1, Beteleme Kec. Lembo		200.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**						
	- Pengadaan bibit tanaman pertanian (Bibit Sawit)	Kec. Bungku Utara		3 Klp. Desa Lemowalia Kab. Morowali Utara		150.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pengadaan Alat/ Mesin Pertanian (Combine Yanwar DC 70)	Kec. Mamosalato		Klp. Tani Jaya Baru. Desa Tanasumpu Kec. Mamosalato		650.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pengadaan Alat/ mesin pertanian (Mesin Combine)	Kec. Mori Atas		Desa Gontara		650.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan
	- Pengadaan Alat/ mesin pertanian (Mesin Combine)	Kec. Mori Atas		Dusun 02, RT 05, Desa Taende		650.000.000	P1 Hasil Musrembang Kecamatan

Kolonodale 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

ABBAS MATOORI, SP, MM
NIP. 19640412 199403 1 011

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan Visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong", maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Untuk mendukung Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020 – 2024 yakni "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana kementerian.

Adapun Arah Kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas
2. Hilirisasi Pertanian
3. Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani untuk Pertumbuhan Nasional dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pembangunan pertanian tahun 2023 mampu melahirkan sektor pangan kuat dan adaptif, terhadap tantangan yang semakin beragam. Penguatan sektor pertanian diharapkan sekaligus mampu mengendalikan inflasi utamanya pangan guna menghadapi krisis pangan dunia.
Maju, Mandiri dan Modern merupakan salah satu menyikapi inflasi dan subtitusi impor.

Agar mampu mengendalikan inflasi dalam menghadapi krisis pangan dunia Kementerian Pertanian melakukan program penguatan pangan secara masif melalui beberapa langkah strategis.

Pertama, mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dalam menghadapi krisis pangan dunia serta fokus mendorong pengembangannya.

Kedua, adalah fakta bahwa lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Hal ini dinilai dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan apabila tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, penguatan program diversifikasi pangan lokal secara masif . Saat ini masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok, untuk itu Kementan diharapkan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun, dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020 .

Kementerian Pertanian pada tahun 2023, selain menjalankan program-program peningkatan produksi pangan yang selama ini telah berjalan dengan baik, akan memberikan perhatian serius pada program peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah yaitu :

1. Tujuan : Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat
   Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan

2. Tujuan : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing
   Sasaran : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dokumen RKPD Tahun 2024 yang telah disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut ini.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi stabilisasi pasokan dan harga pangan	- Penyediaan Indformasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan - Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya - Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan

	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	- Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal
Program Pengawasan Keamanan Pangan	- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

		Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabuapten/ Kota	- Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanamana Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan Tanaman Skala Kecil
	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	- Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang sumbernya dari Derah Kabupaten/ Kota Lain - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari

		Daerah Kabupaten/ Kota lain
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Komoditas Perkebunan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasrana Pertanian Lainnya
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Pengendalian dan Penanggulangan dan Penyakit Hewan dan Zoonosis
	Pengelolaan Pelayanan	- Penyediaan Pelayanan Jasa

	Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Medik Veteriner
Program Pengendalian dan Penanggulanan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	- Penanganan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Program Perizinan Usaha Pertanian	Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Usaha Pertanian - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian - Pembinanaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa - Penyediaan dan

		Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Adapun penyebaran lokasi program dan kegiatan bersifat pemerataan di 10 kecamatan yang ada di Kabuapten Morowali Utara melalui Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Ternak atau Gabungan Kelompok Ternak.

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaanannya sebesar Rp. 38.648.351462,- .

c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya disebabkan karena penginputan program/ kegiatan merupakan pengalihan ke permendagri no 90 tahun 2019.

d. *Tabel 3.3 (T-C 33)*.*Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah*

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**139,999,200**							**314,660,260**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**118,360,350**						100 Persen	**264,660,260**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran dewan ketahanan pangan	100 %		100 %	100 %	**77,470,850**						100 %	**164,660,260**	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				8 Laporan	7,471,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	8 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	28,990,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat (5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat (7) Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom (7) Peningkatan dan pengembangan	Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	18,460,260	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

2	09	03	2.01	10	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				1 Unit	6,700,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Unit	23,900,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
2	09	03	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				3 Laporan	34,309,850	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara		72,300,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	100 %		100 %	100 %	**15,890,000**						100 %	**50,000,000**	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				6 Dokumen	15,890,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	6 Dokumen	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100 %		100 %	100 %	**24,999,500**						100 %	**50,000,000**	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				10 Laporan	24,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	10 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**21,638,850**						100 Persen	**50,000,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %		100 %	100 %	**21,638,850**						100 %	**50,000,000**	
2	09	05	2.01	7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				6 Dokumen	21,638,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	6 Dokumen	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**40,952,505,367**							**16,975,181,489**		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**22,688,054,339**						100 Persen	**8,642,013,395**		
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	100 %		100 %	100 %	**19,629,494,003**						100 %	**6,405,320,214**		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	19,629,494,003	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(6) Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	100 Orang/bulan	6,405,320,214	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	100 %		100 %	100 %	**438,253,160**						100 %	**152,500,000**		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,009,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	1 Paket	33,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	43,634,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	1 Paket	43,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	294,609,600	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	76,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan	100 %		100 %	100 %	**2,495,107,176**						100 %	**2,031,193,181**		

3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49,636,176	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	70,993,181	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16,250,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	1,873,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,429,221,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	86,700,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100 %		100 %	100 %	**125,200,000**						100 %	**53,000,000**	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100,000,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	100 Unit	26,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,200,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	1 Unit	26,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**5,208,464,370**						100 Persen	**3,492,298,912**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %		100 %	100 %	**1,014,861,920**						100 %	**220,000,000**	

3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				10 Laporan	984,879,720	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik	Kabupaten Morowali Utara	10 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	29,982,200	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	170,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	**785,289,900**						100 %	**1,831,298,912**	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	785,289,900	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kabupaten Morowali Utara	3 Dokumen	1,831,298,912	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %		100 %	100 %	**3,408,312,550**						100 %	**1,441,000,000**	
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	208,157,400	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Ton	231,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	02	2.06	3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1 Ekor	3,200,155,150	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Ton	1,210,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**9,517,619,513**						100 Persen	**3,150,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %		100 %	100 %	**16,738,000**						100 %	**50,000,000**	

3	27	03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	16,738,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	100 %		100 %	100 %	**9,500,881,513**						100 %	**3,100,000,000**	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	249,998,400	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(3) Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	5,406,134,870	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktu	(3) Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	800,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	299,516,208	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(3) Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	2,878,677,555	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(3) Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	1,500,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	03	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				10 Unit	666,554,480	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	(3) Pembangunan secara menyeluruh dan merata	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	600,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**49,202,815**						100 Persen	**78,750,000**	

3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	**49,202,815**						100 %	**78,750,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	49,202,815	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	78,750,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**41,894,400**						100 Persen	**430,816,850**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %		100 %	100 %	**41,894,400**						100 %	**430,816,850**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	15,441,000	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Ha	120,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				2 Ha	12,333,900	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	2 Ha	190,816,850	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1 Ha	14,119,500	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Ha	120,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	100 Persen		0 Persen	100 Persen	**3,242,747,900**						100 Persen	**881,302,332**	
3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	**3,242,747,900**						100 %	**881,302,332**	

3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	18,969,550	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Dokumen	133,100,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	3,208,928,650	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Dokumen	291,375,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				1 Laporan	14,849,700	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	1 Laporan	456,827,332	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Penyuluhan Pertanian	100 Persen		100 Persen	100 Persen	**204,522,030**						100 Persen	**300,000,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Honorer daerah dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh (BOP Penyuluh)	100 %		100 %	100 %	**204,522,030**						100 %	**300,000,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	104,998,150	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(7) Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	99,523,880	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat	Kabupaten Morowali Utara	10 Unit	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
										TOTAL	**41,092,504,567**							**17,289,841,749**	

Kolonodale 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara



Ab. S.Matoori, SP., MM.
NIP. 19640412 199403 1 011

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 diarahkan pada upaya pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Kebijakan Rencana Strategis, selanjutnya Renja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang Pertanian dan Pangan.

Adanya Renja tahun 2024 ini akan mengarahkan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta jajarannya untuk melaksanakan tugas secara bertahap dan berkesinambungan disertai koordinasi dengan instansi terkait.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2024 sebagian besar diarahkan untuk perbaikan infrastruktur pertanian dan penyediaan sarana prasarana pertanian. Selain itu, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan juga diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan benih unggul lokal baik komoditas tanaman pangan maupun hortikultura dan ketersediaan alsintan yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA



BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun,yang memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,proses penyusunan Renja Rancangan Awal OPD terdiri dari 3 tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Rancangan Awal Renja OPD. Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakanmenjadi dokumen Rancangan Awal Renja OPD yang definitif.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran daripelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Awal Renja Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial-penerjemahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Awal Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rancangan Awal Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun sebelumnya sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan,Bagian Administrsi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat.Disisi lain,dalam era globalisasi,Bagian Administrasi Pembangunan dituntut untuk mampu membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik,sehingga mampu meningkatkankesejahteraan rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BagianAdministrasi Pembangunan Tahun2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repunlik Indonesia) Tahun 2014 nomor Tambahan Negara Lembaran Negara Republik nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang- undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahankedua atas undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021.
14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan-mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun2024 adalah sebagai berikut :

c. Rancangan Awal Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.

d. Rancangan Awal Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali-Utara Tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 LandasanHukum
- 1.3 Maksud danTujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASILEVALUASI RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUNLALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja Bagian Administrasi Pembangunan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel1berikut :

Tabel1.Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan T.A. 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Mencapai Level "Memuaskan"	- Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97.39%	97.39%
		- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	95.71%	95.71%
		- Tersedianya Kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	100%	97.48%	97.48%
2.	Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah	- Terlaksananya Kegiatan TEPRA	100%	100%	100%
		- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh OPD, dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B	- Tersusunnya Dokumen Standar Biaya	100%	100%	100%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Awal Renja dan pencapaian Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sampai tahun 2022 dengan tahun 2023dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2022 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2023 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik Mencapai Level "Memuaskan"	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99 %	99 %	97.39 %	97.39 %
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	95.71 %	95.71 %
		Tersedianya Kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	100 %	100 %	97.48 %	97.48 %
2	Optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah	Terlaksananya Kegiatan TEPRA	99 %	99 %	100 %	100 %
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level "rata-rata baik" untuk seluruh OPD, dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B	Tersusunnya Dokumen Standar Biaya	100 %	100 %	100 %	100 %

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Pro-gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indi-katif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Pro-gram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**742,220,581**					**771,909,405**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**306,291,413**					**303,383,510**
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**132,371,413**					**119,313,510**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Pemenu-han Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mor-owali Utara, Semua Kecama-tan, Semua Ke-lurahan	100 Persen	4 Paket	100 Persen	25,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	26,300,000.00
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan-daan yang Disediakan	Prosentase Pemenu-han Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mor-owali Utara, Semua Kecama-tan, Semua Ke-lurahan	100 Persen	2 Paket	100 Persen	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	11,960,000.00
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Pemenu-han Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mor-owali Utara, Semua Kecama-tan, Semua Ke-lurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	95,571,413	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	81,053,509.60
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**139,370,000**					**145,570,000**

4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase Pemenu-han Jasa Penunjang Urusan Pemerinta-han Daerah	Kab. Mor-owali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	2,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	2,670,000.00
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase Pemenu-han Jasa Penunjang Urusan Pemerinta-han Daerah	Kab. Mor-owali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	136,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	142,900,000.00
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**34,550,000**					**38,500,000**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli-haraan, dan Pajak Kendaraan Pero-rangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Ken-daraan Pero-rangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Prosentase Pemenu-han Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Mor-owali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	7 Unit	100 Persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	35,200,000.00
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Pemenu-han Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Mor-owali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	8 Unit	100 Persen	7,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	3,300,000.00

4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**435,929,168**					**468,525,895**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**435,929,168**					**468,525,895**
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Pro-gram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**				**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025**				
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indi-katif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**				**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**

									Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	244,743,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	269,600,000.00
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	191,185,668	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	198,925,895.00
												TOTAL	**742,220,581**					**771,909,405**

MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SINYO F. TOBIGO, SE
Nip. 19720225 200701 1 013

2.2. ANALISIS KINERJAPELAYANANBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan olehPemerintahProvinsi danPemerintah Kabupaten. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah(Musrenbang).

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mempuyai tugas yaitu Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan,Mengkoordinasikan PelaksanaanTugas dan Fungsi,Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan diBidang Penyusunan Program,Evaluasi dan Pelaporan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 8 Tahun2019 tentangTugas, Fungsidan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 10).

Adapun gambaran Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat daerah Bagian Admninstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada table Berikut :

Tabel.3 T.C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Program Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra (%)					Realisasi Capaia	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	202
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	TersedianyaJasaPeralatan danPer-lengkapan Kantor			100	100	100	100	100	97,00%	97.3
2	TersedianyaPeralatan danPer-lengkapanKantor			100	100	100	100	100	100%	95.7
3	TerlaksananyaRapat-RapatKonsultasiDalamdan Luar Daerah			100	100	100	100	100	100%	97.4
4	Terlaksananya Kegiatan TEPRA			100	100	100	100	100	82.00%%	99.0
5	Terlaksananya Monitoring.,Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan APBD			100	100	100	100	100	99.00%	100
6	Tersusunnya Dokumen Standar Biaya			100	100	100	100	100	94.00%	100

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,

SINYO F. TOBIGO, SE
Pembina, IV/a
NIP.19720225 200701 1 013

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADMNISTRASI PEMBANGUNAN

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi,Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaanterhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanantara lain sebagai berikut :

- Masih kurangnya koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi APBD.
- Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Masih ditemukannya program dan kegiatan yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain.

Melihat pada permasalahan yang ada,dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang,peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Mengikuti diklat, seminar dan workshop sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara mengusulkan Pagu Anggaran sebesar Rp.771.019.650,- Hasil analisis dari total pagu yang disetujui disajikan pada tabel berikut :

Tabel.4 T.C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kin
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**											
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**											
4	**1**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
4	1	1	02.6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*	58,996,500	DAU		*Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*
4	1	1	02.6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan*	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*	17,572,600	DAU		*Presentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan*
4	1	1	02.6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien*	*Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien*	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*	125,822,400	DAU		*Presentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien*
4	**1**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
4	**1**	**1**	**02.07**	05	Pengadaan Meubel	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*		DAU		*Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*
4	**1**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
4	1	1	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Terpernuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang efektif dan efisien*	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*	2,000,000	DAU		*Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
4	1	1	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Presentase Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*	123,480,000	DAU		*Presentase Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
4	**1**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**											
4	1	1	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara*	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*5 Unit*	27,000,000	DAU		*Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara*
4	1	1	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah*	*Presentase Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Sarana Kantor yang terpelihara*	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*8 Unit*	7,430,000	DAU		*Jumlah Sarana Kantor yang terpelihara*
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											
4	**1**	**3**	**02.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											
4	1	3	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Prosentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan*	*Presentase Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	Tersusunnya Laporan Pengendalian Program Pembangunan	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*	340,730,250	DAU		Tersusunnya Laporan Realisasi APBD
4	1	3	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Prosentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan*	*Presentase Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Paket Fisik APBD*	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan	*Bagian Adpemb*	*100%*	*100%*	*100%*	172,192,900	DAU		Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Paket Fisik APBD
												TOTAL	**875,224,650**			

Kolonodale, 2022

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,

SINYO F. TOBIGO, SE
NIP. 19720225 200701 1 013

Kolonodale, Januari 2023

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,



SINYO F. TOBIGO, SE
Pembina, IV/a
NIP.19720225 200701 1 013

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,maka Bagian Kesejahteraan menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipasif. Keterpaduan proses perencaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah–olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan–tahapan Musrembang sendiri meliputi Musrembang tingkatRT/RW,Musrembang tingkat kelurahan, Musrembang Tingkat Kecamatan dan Musrembang tingkat Kabupaten. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan Musrembang yang telah dilakukan setiap tahunnnya diperoleh usulankegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar–benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil usulan musrembang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja OPD yang nantinya Rancangan Awal Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Rancangan Awal Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

BAB III

TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dantanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,maupun perencanaan tahunan.Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rancana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Hal tersebut harus Paralel dengan pembuatan RKPD,sesuai denganPasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rancangan Awal Renja-SKPD,yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut,maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi-masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2022–2026,Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang Sejahtera dan Berdaya Saing melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Profesional”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur melalui penciptaan usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan profesional masyarakat dalam penjagaan yang inklusif.
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan.
7. Mengatasi kemiskinan dari pinggiran.

Seiring tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang memiliki peranpenting untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,maka dalam RPJDM Kabupaten Morowali Utara, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Ke -5 yaitu “**Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerahdalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik “**

Dari rumusan diatas maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DaerahKabupatenMorowali Utara menetapkan visi, yaitu**“ *Terwujutnya Penyusunn Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel.”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut,Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang transparan, bersinergi dan parsitipatif.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENJA SKPD

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah:

a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2024 sesuai Visi,Misi,Kebijakan,Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah,baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2024 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran tahun 2024.

b.Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama 1(satu) tahun mendatang.

Sasaran Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD ini adalah:

a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024.
b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Profesional.
c. Terwujudnya Ketersediaan Data dan Laporan Hasil Pembangunan yang Akurat Terwujudnya Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi antar Perangkat Daerah.
d. Terwujudnya Koordinasi,Integrasi, dan Sinkronisasi antar Perangkat Daerah.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2022 menetapkan 2 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 4 Kegiatan Serta 7 Sub Kegiatan Adapun pembagiannya sebagai berikut :

a. ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan
   - PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Sub Kegiatan
     - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
     - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. ProgramPerekonomian dan Pembangunan

- **Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**
  1. Sub Kegiatan
     - Pengendalian dan EcaluasiProgram pembangunan
     - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Adapun rencana program dan kegiatan Bagian Administrasi pembangunan T.A.2024 dapat dilihat pada table berikut :

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program dan Kegiatan Pera
Kabupaten Morowal
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indi-katif (Rp.)	Sumber
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**742,220,581**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**306,291,413**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**132,371,413**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 Persen	25,300,000	Dana Tra Dana Alo Umum
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peng-gandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan-daan yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 Persen	11,500,000	Dana Tra Dana Alo Umum
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penye-lenggaraan Rapat Koordinasi dan Kon-sultasi SKPD	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	95,571,413	Dana Tra Dana Alo Umum
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**139,370,000**	

4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	2,570,000	Dana Tra Dana Alo Umum
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	136,800,000	Dana Tra Dana Alo Umum
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**34,550,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	7 Unit	100 Persen	27,000,000	Dana Tra Dana Alo Umum
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	8 Unit	100 Persen	7,550,000	Dana Tra Dana Alo Umum

4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**435,929,168**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**435,929,168**	
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2024**				
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**		**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber**

										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	244,743,500	Dana Tra Dana Alo Umum
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Morowali Utara, Petasia, Bahoue	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	191,185,668	Dana Tra Dana Alo Umum
												TOTAL	**742,220,581**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara, yang juga diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2024, maka Bagian Administrasi Pembangunan telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah kabupaten Morowali Utara dengan total anggaran yang direncanakan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.015.000.000,- *(Satu miliar lima belas juta Rupiah).*

Lebih lanjut mengenai gambaran kebutuhan dana/pagu indikatif, dan perkiraan target 2024 dapat dilihat dalam tabel Rencana Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara di bawah ini :

				TW 1			TW 2			TW3		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP
	4-01	SEKRETARIAT DAERAH										
	4-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU-PATEN/KOTA										
	4-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	4-01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Per-lengkapan Kantor	**38,487,200**									
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,419,700	3,000,000	-	-	3,851,820	-	-	2,854,925	-	
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11,607,500	3,482,250	-	-	3,482,250	-	-	2,901,875	-	
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,460,000	1,338,000	-	-	1,338,000	-	-	1,115,000	-	
4	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
2	4-01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**17,000,000**									
1	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17,000,000	4,600,000	-	-	4,600,000	-	-	4,250,000	-	
3	4-01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordi-nasi dan Konsultasi SKPD	**129,248,800**									
1	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106,072,000	49,000,000	-	-	34,000,000	-	-	15,072,000	-	
2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,176,800	6,953,040	-	-	6,953,040	-	-	5,794,200	-	
4	**4-01.01.2.08.004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**193,800,000**									
1	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggung-jawaban Pengelola Keuangan	22,800,000	5,700,000	-	-	5,700,000	-	-	5,700,000	-	
2	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171,000,000	42,750,000	-	-	42,750,000	-	-	42,750,000	-	
	4-01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Dae-rah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
5	**4-01.01.2.09.001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**27,000,000**									
1	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Ber-motor Perorangan	15,000,000	3,750,000	-	-	3,750,000	-	-	3,750,000	-	
2	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12,000,000	4,500,000	-	-	4,500,000	-	-	3,000,000	-	

6	4-01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,280,000									
1	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2,440,000	-	-	-	2,440,000	-	-	-	-	
2	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Komputer	5,840,000	-	-	-	5,840,000	-	-	-	-	
7	4-01.03.2.02.002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	243,873,200									
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,201,500	-	-	-	4,000,000	-	-	1,201,500	-	
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,327,500	-	-	-	2,327,500	-	-	-	-	
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16,017,400	-	-	-	10,000,000	-	-	6,017,400	-	
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45,996,000	-	-	-	20,000,000	-	-	25,996,000	-	
5	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61,500,000	20,500,000	-	-	20,500,000	-	-	20,500,000	-	
6	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	51,800,000	12,950,000	-	-	12,950,000	-	-	12,950,000	-	
7	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6,944,000	-	-	-	6,944,000	-	-	-	-	
8	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Maintenance Aplikasi e-MEP TEPRA)	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-		-	
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,338,000	6,000,000	-	-	10,000,000	-	-	4,338,000	-	
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,748,800	11,874,400	-	-	-	-	-	11,874,400	-	
8	4-01.03.2.02.003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	357,310,800									
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,950,000	-	-	-	1,950,000	-	-	-	-	
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,014,000	-	-	-	1,014,000	-	-	-	-	
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,750,000	-	-	-	1,750,000	-	-	-	-	
4	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
5	5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3,000,000	2,000,000	-	-	1,000,000	-	-		-	
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130,616,000	45,616,000	-	-	40,000,000	-	-	30,000,000	-	
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	212,980,800	53,980,800	-	-	53,000,000	-	-	53,000,000	-	
	JUMLAH		**1,015,000,000**	**304,994,490**			**304,640,610**			**253,065,300**		

	304,500,000	304,500,000	253,750,000

Pengguna Anggaran
Sekertariat Daerah
Kab.Morowali Utara
Bagian Administrasi
Pembangunan

SINYO F. TOBIGO, SE

Nip. 19720225
200701 1 013

BAB V
P ENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaantugas pokokdan fungsiBagianAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024,sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2024,dengan mengacu pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapa ivisi,misi, dan tujuan,dengan mengerahkan seluruh potensi yangadadalaminstitusi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya, Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal,sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yangbaik dan akuntabel

Kolonodale, Januari 2024

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,

SINYO F. TOBIGO, SE
Pembina, IV/a
NIP.19720225 200701 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Poros Kolonodale - Ganda-Ganda, Kolonodale Kec. Petasia (Kode Pos 94671)

e-mail : dishubmorut24@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
Jalan Poros Kolonodale - Ganda-Ganda, Kolonodale Kec. Petasia (Kode Pos 94671)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Nomor : 912/18/DISHUB/VI/2023

T E N T A N G
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;

c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf b diatas, maka dipandang perlu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pehubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44221);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 – 2018;

12. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara 2017;

14. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Pasal 1

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berinteraksi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan keadaan yang ada atau mungkin timbul Rencana Strategis mengandung Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Program Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
b. Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Perangkat Daerah adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;
e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik;
f. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu;
g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
h. Kebijakan adalah ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistimatika penulisan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH TAHUN 2022
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal : 25 Juni 2023

K E P A L A,

Drs. IRWAN A. IBON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700821 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara ini memuat kondisi umum, tujuan, sasaran, isu - isu strategis yang menjadi agenda pembangunan bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2024 yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, mengigat dimasa-masa yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rancangan Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kolonodale, 25 Juni 2023

Kepala Dinas Perhubungan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Drs. IRWAN A. IBON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700821 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perhubungan 4

1.4. Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perhubungan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **27**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 27

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28

3.3. Program dan Kegiatan 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **39**

BAB V PENUTUP **45**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah APBD T.A. 2022 yang dikelola Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara 7

Tabel 2.2 Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A. 2022 yang dikelola Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara 7

Tabel 2.3 Realisasi Keuangan Dan Fisik Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara 8

Tabel 2.4 Realisasi Pencapaian Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 9

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara 14

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara 17

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara 22

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara 26

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara 32

Tabel 4.1 Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan. Fungsi RENJA Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pembangunan daerah. Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk (1 satu) tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Kabupaten Morowali Utara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan dan memeratakan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan sub dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi landasan bagi penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah atau rencana kerja pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi yang ada, maka perlu dijelaskan kendala bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar yaitu :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
g. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara;
b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara;
c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen perangkat daerah bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
b. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara.

1.4 Sistematika Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara.

Adapun sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan

1.4 Sistematika Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan

BAB 11 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 111 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2022, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2022 Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah **Rp. 8.012.368.522,00** *(Delapan Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).*

Namun, dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP), maka Anggaran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara berkurang menjadi **Rp. 12.563.601.734.00** *(Dua Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).* dengan rincian disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah APBD T.A. 2022 yang dikelola Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	*2*	*3*	*4*
4	**PENDAPATAN**	**317.500.000,00-**	**265.000.000,00-**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**317.500.000,00-**	**265.000.000,00-**
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	**317.500.000**,00-	**265.000.000**,00-
5	**BELANJA**	**8.012.368.522,00-**	**12.563.601.734,00-**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.069.311.849,81-**	**8.690.553.165,00-**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.979.274.298,10-	3.151.634.317,00-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.037.551,71-	5.538.918.848,00-
5.2	**BELANJA MODAL**	**943.056.672,19-**	**3.873.048.569,00-**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.345.865,00-	47.994.569,00-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.953.952,42-	548.184.000,00-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	529.756.854,77-	3.276.870.000,00-
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(7.694.868.522,00)**	**(12.298.601.734,00)**

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 3 Program dan 79 kegiatan didalamnya. Dari 79 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 79 atau 100,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A. 2022 yang dikelola Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi		Realisasi (%)
			Ya	Tidak	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23	23	0	100%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31	31	0	100%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	25	25	0	100%
	TOTAL	**79**	**79**	**0**	**100%**

Tingkat Penyerapan Dana untuk seluruh program per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 12.350.683.528,00** *(Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)* atau **98.31%** terhadap total nilai yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase

untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 adalah **100.00%.** Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Keuangan Dan Fisik

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Penyerapan Anggaran	Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.352.061.23,00	Rp 5.176.711.928,00	96.72%	99,49%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 4.735.605.500,00	Rp 4.704.526.600,00	99.34%	99,56%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 2.475.935.00,00	Rp 2.469.445.000,00	99.74%	99,95%
	TOTAL	**Rp 12.563.601.734,00**	**Rp 12.350.683.528,00**	**98,31%**	**100%**

Tabel 2.4

Realisasi Pencapaian

Dinas Perhubungan Daerah Kab. Morowali Utara

Tahun 2022

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, maka kami sajikan pada tabel 2.4 tentang Rekapitulasi Evaluasi Realisasi Pencapaian Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI (PENYERAPAN DANA)		KEU (%)
		VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)				
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**Rp.**	**5.352.061.234.00**	**Rp.**	**5.176.711.928.00**	**96.72%**
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	Rp.	3.151.634.317.00	Rp.	3.095.385.284.00	98.22%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1	Tahun	Rp.	22.642.040.00	Rp.	22.641.440.00	100%
	Belanja Modal Mebel	31	Buah	Rp.	34.648.704.00	Rp.	34.648.704.00	100%
	Belanja Modal Alat Pendingin	2	Buah	Rp.	13.345.865.00	Rp.	13.345.864.00	100%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Tahun	Rp.	24.308.983.00	Rp.	24.289.385.00	99.92%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	Rp.	144.665.000.00	Rp.	143.035.000.00	98.87%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	Rp.	89.922.000.00	Rp.	74.272.000.00	82.60%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	230	Lembar	Rp.	2.300.000.00	Rp.	2.300.000.00	100%
	Belanja Tagihan Listrik	1	Tahun	Rp.	42.000.000.00	Rp.	36.311.149.00	86,46%
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3	Media	Rp.	5.400.000.00	Rp.	5.400.000.00	100%
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1	Tahun	Rp.	5.040.000.00	Rp.	5.040.000.00	100%
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.699	Liter	Rp.	132.711.546.00	Rp.	132.601.523.00	99.92%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1	Tahun	Rp.	1.850.779.00	Rp.	1.850.779.00	100%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	688	Dos	Rp.	39.632.000.00	Rp.	39.632.000.00	100%
	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1	Tahun	Rp.	93.000.00.00	Rp.	93.000.00.00	100%
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1	Tahun	Rp.	1.257.000.000.00	Rp.	1.161.000.000.00	92.36%

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI		KEU (%)
		VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)		(PENYERAPAN DANA)		
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1	Tahun	Rp.	18.000.000.00	Rp.	18.000.000.00	100%
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1	Tahun	Rp.	22.700.000.00	Rp.	22.700.000.00	100%
	Belanja Lembur	1	Tahun	Rp.	19.200.000.00	Rp.	19.200.000.00	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	Rp.	30.000.000.00	Rp.	30.000.000.00	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	Rp.	40.000.000.00	Rp.	40.000.000.00	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	Unit	Rp.	4.060.000.00	Rp.	4.060.000.00	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit	Rp.	158.000.000.00	Rp.	157.998.800.00	100%
II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				**Rp.**	**4.735.605.500.00**	**Rp.**	**4.704.526.600.00**	**99.34%**
Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	Rp.	123.000.000.00	Rp.	102.000.000.00	82.93%
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1	Tahun	Rp.	498.950.000.00	Rp.	498.950.000.00	100%
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	Kegiatan	Rp.	199.813.000.00	Rp.	199.813.000.00	100%
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1	Kegiatan	Rp.	225.000.000.00	Rp.	225.000.000.00	100%
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1	Kegiatan	Rp.	126.000.000.00	Rp.	126.000.000.00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	Rp.	40.363.000.00	Rp.	36.407.000.00	90.20%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	Rp.	245.609.500.00	Rp.	241.166.000.00	98.19%
	Pemasangan Lampu Jalan Desa Beteleme	1	Kegiatan	Rp.	199.100.000.00	Rp.	199.100.000.00	100%
	Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Kelurahan Bahontula	1	Kegiatan	Rp.	99.360.000.00	Rp.	99.360.000.00	100%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Lijo	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.895.000.00	99.93%

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI		KEU (%)
		VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)		(PENYERAPAN DANA)		
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Mohoni	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.975.000.00	99.98%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Paawaru	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.925.000.00	99.95%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Panca Makmur	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.890.000.00	99.93%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Petumbea	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.920.000.00	99.95%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Ronta	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.970.000.00	99.98%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Siliti	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.900.000.00	99.93%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Tambarobone	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.860.000.00	99.91%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Tokonanaka	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.892.000.00	99.93%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Towara Pantai Dusun I	1	Kegiatan	Rp.	125.000.000.00	Rp.	124.996.000.00	100%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Wawondula	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.875.000.00	99.92%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dusun 01 dan 02 Desa Mayumba	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.930.000.00	99.95%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dusun I dan Dusun II Desa Lemboroma	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.915.000.00	99.94%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dusun I dan Dusun II Desa Tomui Karya	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.985.000.00	99.99%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dusun I dan Dusun II Desa Uluanso	1	Kegiatan	Rp.	125.000.000.00	Rp.	124.895.000.00	99.92%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dusun I dan II Desa Kumpi	1	Kegiatan	Rp.	125.000.000.00	Rp.	124.900.000.00	99.92%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dusun I - Dusun III Desa Era	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.895.000.00	99.93%

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI		KEU (%)
		VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)		(PENYERAPAN DANA)		
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dusun III Desa Korololama Lrg. Gereja	1	Kegiatan	Rp.	125.000.000.00	Rp.	124.898.000.00	99.92%
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya RT 1 - RT III Desa Lembobaru	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.885.000.00	99.92%
	Pengadaan Lampu Jalan Bahoue	1	Kegiatan	Rp.	99.340.000.00	Rp.	99.340.000.00	100%
	Pengadaan Lampu Jalan Bungintimbe	1	Kegiatan	Rp.	99.070.000.00	Rp.	99.070.000.00	100%
	Pemasangan PJU Desa Ensa	1	Kegiatan	Rp.	30.000.000.00	Rp.	29.919.600.00	99.73%
III. Program Pengelolaan Pelayaran				**Rp.**	**2.475.935.000.00**	**Rp.**	**2.469.445.000.00**	**99.74%**
Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien	Pengadaan Transportasi Laut Desa Koya	1	Unit	Rp.	50.000.000.00	Rp.	50.000.000.00	100%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Gililana	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.450.000.00	99.45%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Kolo Atas	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.450.000.00	99.45%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Koya	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.450.000.00	99.45%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Pandauke	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.565.000.00	99.57%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Tambale	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.600.000.00	99.60%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Tanauge	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.400.000.00	99.40%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Tirongan Bawah	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.430.000.00	99.43%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Ueruru	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.775.000.00	99.78%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Uewaju	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.420.000.00	99.42%
	Perencanaan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Ungkea Pantai	1	Dok	Rp.	100.000.000.00	Rp.	99.985.000.00	99.99%
	Perencanaan Pemasangan Rambu Suar Penyebrangan Desa Tambayoli	1	Dok	Rp.	99.840.000.00	Rp.	99.840.000.00	100%

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI		KEU (%)
		VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)		(PENYERAPAN DANA)		
	Perencanaan Pemasangan Rambu Suar Sungai Laa	1	Dok	Rp.	99.920.000.00	Rp.	99.920.000.00	100%
	Perencanaan Pembangunan Mushollah Pelabuhan Penyebrangan Kolonodale dan Baturube	1	Dok	Rp.	99.900.000.00	Rp.	99.900.000.00	100%
	Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Rakyat Desa Baturube (Pembuatan Pelataran Parkir dan Halte Ruang Tunggu)	1	Dok	Rp.	99.938.000.00	Rp.	99.938.000.00	100%
	Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Rakyat Desa Bungintimbe (Pembuatan Pelataran Parkir dan Halte Ruang Tunggu)	1	Dok	Rp.	99.900.000.00	Rp.	99.900.000.00	100%
	Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Rakyat Desa Kolo Bawah (Pembuatan Pelataran Parkir dan Halte Ruang Tunggu)	1	Dok	Rp.	99.938.000.00	Rp.	99.938.000.00	100%
	Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Rakyat Desa Lapangga	1	Dok	Rp.	99.900.000.00	Rp.	99.900.000.00	100%
	Perencanaan Pergerakan Kolam Labuh Pelabuhan Penyebrangan Kolonodale	1	Dok	Rp.	99.950.000.00	Rp.	99.950.000.00	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	Rp.	58.646.000.00	Rp.	57.900.000.00	98.73%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	Rp.	19.819.000.00	Rp.	18.630.000.00	94.00%
	Lanjutan Tambatan Perahu Desa Korololaki	1	Kegiatan	Rp.	150.000.000.00	Rp.	149.920.000.00	99.95%
	Pembangunan Tambatan Perahu Torogusoh	1	Kegiatan	Rp.	49.924.000.00	Rp.	49.924.000.00	100%
	Tambatan Perahu Dusun II Desa Ueruru Kec. Bungku Utara	1	Kegiatan	Rp.	199.070.000.00	Rp.	199.070.000.00	100%
	Tambatan Perahu Dusun III Desa Kolo Atas Kec. Mamosalato	1	Kegiatan	Rp.	149.190.000.00	Rp.	149.190.000.00	100%

Dan selanjutnya untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah maka kami sajikan pada tabel T-C.29 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Morowali Utara

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD	
					TARGET RENJA PD TAHUN (2022)	REALISASI RENJA PD TAHUN (2022)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2 15 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 15 01 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 15 01 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%
2 15 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 15 01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN (2020)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD	
					TARGET RENJA PD TAHUN (2021)	REALISASI RENJA PD TAHUN (2021)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**									
2 15 02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang/ terpelihara	100%	100%	100%	89%	89%	100%	100%	100%
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**									
2 15 03 13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun/ terpelihara	100%	100%	100%	87%	87%	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan indikator kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mencakup semua aspek pembangunan secara menyeluruh.

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Perhubungan Daerah telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain :

1. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan melalui kegiatan-kegiatan Konsultansi seperti Perencanaan maupun Studi Kelayakan;
2. Masih kurangnya pemahaman stakholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Perhubungan;
3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan;

Tiga aspek pelayanan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimum kami sajikan dalam tabel T-C.30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				RELISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TARGET RENJA OPD TAHUN (2021)	TARGET RENJA OPD TAHUN (2022)	TARGET RENJA OPD TAHUN (2023)	TARGET RENJA OPD TAHUN (2024)	TAHUN (2021)	TAHUN (2022)	TAHUN (2023)	TAHUN (2024)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.2.1 Analisa SWOT

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

a. Kekuatan *(StrengthS)*
    1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Morowai Utara;
    2. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ dan terminal;
    3. Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor;
    4. Tersedianya dermaga sebagai penghubung antar kecamatan.
b. Kelemahan *(Weaknesses)*
    1. Sebaran SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
    2. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan transportasi, kelalulintasan, teknik mesin, serta yang memiliki kemampuan IT diatas rata-rata;
    3. Belum sesuainya kompetensi dengan jenjang kepangkatan pada kelompok jabatan fungsional di bidang perhubungan;
    4. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
    5. Belum tersedianya PPNS dan penguji laik jalan bidang transportasi perairan.
c. Peluang *(Opportunities)*
    1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten;
    2. Letak geografis Kabupaten Morowali Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali;
    3. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarluaskan informasi.
d. Tantangan *(Threats)*
    1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan;
    2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
    3. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak terhadap kurangnya fasilitas lalu lintas;

4. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain;
5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan dengan belum tersedianya kendaraan pengujian kendaraan bermotor serta belum tercukupinya tenaga teknis penguji;
6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik.

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di bidang perhubungan adalah :

a. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi dintaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan dan kondisi jalan yang rusak dan sebagainya;
b. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, yang dipengaruhi oleh karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah;
c. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Morowali Utara, seperti marka jalan, rambu, RPPJ, guardrail, deleniator, lampu kedip, traffic light dn lain sebagainya, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan adanya aksi pencurian dan perusakan/vandalism;
d. Rendahnya disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;
e. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Morowali Utara, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru;
f. Terbatasnya dana unutk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi ”top priority” bagi pemangku kebijakan. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan

angkutan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi/orang per orang yang mengelola usaha angkutan yang dilakukan secara tradisional;

g. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan (kantor, tempat usaha dan sebagainya).

2.2.3 Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu – isu strategis pemerintahan tahun 2024 sebagai berikut :

a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan pengguna jasa transportasi;
b. Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya angka kecelakaan, sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang memadai;
c. Terdapat beberapa fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang sudah ada umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan rehabilitasi/ pemeliharaan;
d. Fasilitas pendukung transportasi (terminal) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat difungsikan kembali;
e. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi;
f. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik ruas jalan dan penanganan serta penertiban parkir;
g. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai dan tenaga penguji sesuai dengan kompetensinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten/kota sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan untuk itu Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel T-C.31 Tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5,681,366,937**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5,904,255,657**	
	- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	**3,503,596,771**	- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100%	**3,503,596,771**	
	- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	**3,503,596,771**	- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	**3,503,596,771**	
	- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	**94,995,000**	- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%	**94,995,000**	
	- **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	**33,075,000**	- **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	**33,075,000**	
	- **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	**61,920,000**	- **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	**61,920,000**	
	- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	**269,435,900**	- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Morowali Utara	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	**271,766,857**	
	- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	**36,851,600**	- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	**39,181,857**	
	- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	**28,599,300**	- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	**28,600,000**	
	- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	**203,985,000**	- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	**203,985,000**	
	- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Luar dan Dalam Daerah Kab. Morowali Utara	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	**1,614,126,029**	- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Luar dan Dalam Daerah Kab. Morowali Utara	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	**1,860,777,029**	
	- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	**1,940,000**	- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	
	- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	**49,800,000**	- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	**60,000,000**	
	- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	**1,562,386,029**	- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14 Laporan	**1,800,777,029**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Morowali Utara	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	100%	**199,213,237**	- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Morowali Utara	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	100%	**173,120,000**	
	- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	**40,000,000**	- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	**40,000,000**	
	- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	**60,000,000**	- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	**60,000,000**	
	- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	**5,520,000**	- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	**8,120,000**	
	- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	**93,693,237**	- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	**65,000,000**	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**100%**	**1,733,212,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**100%**	**840,274,000**	
	- **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kota Kolonodale dan Desa Kolo Bawah	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang/ terpelihara	100%	**1,733,212,000**	- **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kec. Petasia Barat	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang/ terpelihara	100%	**840,274,000**	
	- **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	**1,733,212,000**	- **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	**840,274,000**	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien**	**100%**	**2,204,127,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien**	**100%**	**699,493,000**	
	- **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Desa Ganda-Ganda, Desa Ueruru, Desa Matube, Desa Kolo Atas	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun/ terpelihara	100%	**2,204,127,000**	- **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	Kec. Bungku Utara	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun/ terpelihara	100%	**699,493,000**	
	- **Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau**		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2 Unit	**2,204,127,000**	- **Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau**		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	3 Unit	**699,493,000**	
					9,618,705,937					***7,444,022,657***	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *"top down & bottom up"*. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Dalam Musrenbang tahun 2022 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Perhubungan 2024 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Perhubungan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan Kegiatan Dinas Perhubungan.

Pada tahun anggaran 2023 sampai dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 belum terdapat usulan yang berasal dari proposal masyarakat, sedangkan dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2023 sebagai usulan program/kegiatan tahun 2024 terdapat 2 usulan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, yaitu : Pengadaan Lampu Jalan Dalam Desa Tiu, dan Lanjutan Tambatan Perahu Dusun II Desa Ueruru Kec. Bungku Utara. Gambaran Usulan Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.8 Tentang Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara.

Usulan tersebut selanjutnya telah dilaksanakan survey lapangan dan evaluasi oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara guna penentuan kelayakan yang menghasilkan bahwa lokasi tersebut sudah saatnya untuk diberikan perbaikan fasilitas yang memadai. Hal ini didasari beberapa pertimbangan, diantaranya :

1. Fasilitas yang ada masih belum memungkinkan untuk digunakan sehingga diprediksikan apabila pekerjaan tidak dilanjutkan maka akan mempersulit pengguna masyarakat;

2. Volume pekerjaan yang masih sangat banyak untuk diselesaikan;
3. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, data jumlah penumpang relatif banyak dan penerangan jalan umum di beberapa lokasi masih belum memadai.

Dari pertimbangan diatas, maka diperlukan kelanjutan untuk beberapa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**		
	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang/ terpelihara**		
	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terpasang		
	Pengadaan Lampu Jalan Dusun I dan IV Desa Molino	Kec. Petasia Timur		20 Unit	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan nasional Transportasi Jalan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui muatan lebih secara komprehensif;
2. Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, pembinaan dan penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, kelaikan sarana, serta ijin pengemudi di jalan);
3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: (1) manajemen lalu lintas; (2) pemasangan fasilitas dan rambu jalan; (3) mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang di jalan melalui penataan jaringan dan ijin trayek; (4) kerjasama antar lembaga pemerintah (pusat dan daerah);
4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil;
5. Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui :
   a. Menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
   b. Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.
   c. Meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan transparan dalam penyelenggaraan transportasi.
6. Meningkatkan profesionalisme SDM (petugas, disiplin operator dan pengguna di jalan), meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi;
7. Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan dan perdesaan dan yang terjangkau dan efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan pengembangan wilayahnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Visi

"TERWUJUDNYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG HANDAL DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TRANSPORTASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, TERINTEGRASI DAN PROFESIONAL"

Visi tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan *Leading Sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi serta sarana dan prasarana di Kabupaten Morowali Utara.

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang handal, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah serta peran masyarakat dalam penataan moda transortasi;
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat dan penyebrangan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi;
5. Mewujudkan pelayanan transportasi perkotaan dan perdesaan yang nyaman dan tertib.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi fahtor-faktor kunci keberhasilan *(Critical Success Factor)* yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

c. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagi

motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara adalah :

NO	T U J U A N
1	Meningkatkan pelayanan transportasi yang handal, efektif, efisien dan terintegrasi
2	Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya penataan moda transportasi
3	Peningkatan ketersediaan dan kerjasama antar sektor yang terkait dalam penyelenggaraan moda transportasi
4	Peningkatan sarana dan prasarana dalam mewujudkan sistem jaringan transportasi terpadu
5	Meningkatkan pelayanan transportasi perkotaan dan perdesaan yang nyaman, tertib, lancar dan terintegrasi

d. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

NO	S A S A R A N
1	Terwujudnya pelayanan yang cepat , tepat dan teratur sesuai standar operasional dan prosedur pelaksanaan transportasi
2	Terwujdunya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penataan pengembangan moda transportasi
3	Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama oleh seluruh sektor yang terkait di dalam maupun Tingkat Provinsi dan Pusat
4	Terwujudnya penyediaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan penyebrangan yang memadai
5	Peningkatan dan pengembangan pelayanan transportasi perkotaan dan perdesaan dalam daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - 1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
     - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
   - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - 1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - 1.3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - 1.3.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - 1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     - 1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   - 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - 1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
     - 1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
     - 1.5.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     - 1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
    2.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
        2.2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pelayaran
    3.1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
        3.2.1 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Untuk Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.444.022.657,00**							**8.685.454.175,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**7.444.022.657,00**							**8.685.454.175,00**	
1	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.904.255.657,00**				**Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat**			**5.178.402.249,00**	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***100***									
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.503.596.771,00				Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.140.259.733,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu (%)				*100*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.503.596.771,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			3.140.259.733,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*30*	*30*	*30*		*(Dinas Perhubungan, Ganda-Ganda, Kec. Petasia)*					*30*		
			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Orang /Bulan)				*30*	*2.033.846.195,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Tambahan Penghasilan ASN (Orang /Bulan)				*30*	*1469.750.576,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						94.995.000,00				Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			140.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur (%)				*100*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.012.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						33.075.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah			70.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*1*		
			Belanja Pakaian Olahraga (Paket)				*1*	*33.075.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
	2.15.012.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						61.920.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perhubungan		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*3*	*3*	*3*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN Dinas Perhubungan*	*3*		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan (Orang)				*4*	*61.920.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
	2.15.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						271.766.857,00				Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			238.177.417,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (%)				*100*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		
	2.15.012.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						39.181.857,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah			65.677.817,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*2*		
			Belanja Alat Tulis Kantor (Tahun)				*1*	*25.131.857,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Materai (Lembar)				*230*	*2.300.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (Unit)				*5*	*2.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Unit)				*3*	*9.750.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						28.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah	ASN Dinas Perhubungan		22.499.600,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN Dinas Perhubungan*	*2*		
			Belanja Cetak (Meter)				*152*	*7.600.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Penggandaan (Lembar)				*60.000*	*21.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						203.985.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*48*	*48*	*48*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN Dinas Perhubungan*	*48*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)				*15*	*145.490.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)				*33*	*58.495.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1860.777.029,00				Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			1540.030.099,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (%)				*100*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*1*		
			Belanja Materai (Laporan)				*1*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perhubungan		36.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN Dinas Perhubungan*	*1*		
			Belanja Tagihan Listrik (Laporan)				*1*	*60.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.777.029,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah	ASN Dinas Perhubungan		1.501.290.099,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*14*	*14*	*14*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*14*		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Paket)				*1*	*1.850.779,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Tahun)				*1*	*18.750.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Liter)				*9.035*	*115.196.250,00*	*(Dinas Perhubungan Daerah, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Orang)				*8*	*54.600.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Orang)				*1*	*8.160.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Orang)				*1*	*4.800.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang / Bulan)				*85*	*1.392.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kegiatan)				*3*	*22.700.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Orang / Bulan)				*3*	*18.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Jasa Tenaga Perhubungan (Orang / Bulan)				*4*	*105.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Tahun)				*1*	*5.400.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Lembur (Tahun)				*1*	*16.800.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kotak)				*700*	*37.520.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.012.09 2.15.012.09.0001 2.15.012.09.0002 2.15.012.09.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.120.000,00				Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			119.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (%)				*100*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*11*	*11*	*11*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*					*11*		
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Unit) *Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Unit)*				*10* *1*	*20.000.000,00* *20.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)* *(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan* *ASN Dinas Perhubungan*			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perhubungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN Dinas Perhubungan*	*2*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus (Unit) *Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Unit)*				*1* *2*	*20.000.000,00* *40.000.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)* *(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan* *ASN Dinas Perhubungan*			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.120.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perhubungan		4.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*8*	*8*	*8.00*		*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN Dinas Perhubungan*	*8.00*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin (Unit) *Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya (Unit)* *Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer (Unit)*				*4* *4* *4*	*2.440.000,00* *2.760.000,00* *2.920.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)* *(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)* *(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan* *ASN Dinas Perhubungan* *ASN Dinas Perhubungan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						65.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Dinas Perhubungan		-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Desa Ganda-Ganda, Desa Siliti, KAB. MOROWALI UTARA)*				*ASN Dinas Perhubungan*	*2*		
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Unit)				*2*	*65.000.000,00*	*(Desa Ganda-Ganda, Desa Siliti, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**840.274.000,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**			**1.605.797.483,00**	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**
			Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (%)				***100***						***ASN Dinas Perhubungan***			
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						840.274.000,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			1605.797.483,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang/ terpelihara (%)				*100*		*(Kota Kolonodale dan Desa Kolo Bawah, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						840.274.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			1605.797.483,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)		*30*	*30*	*30*		*(Kota Kolonodale dan Desa Kolo Bawah, KAB. MOROWALI UTARA)*					*30*		
			Belanja Makanan dan Minuman Forum LLAJ (Kotak)				*300*	*8.700.000,00*	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Pengguna LLAJ*			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)				*10*	*66.460.000,00*	*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)				*34*	*65.114.000,00*	*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Pemeliharaan PJU (penggantian lampu, perbaikan jaringan dan meterisasi) (Kegiatan)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan*			
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya (Unit)				*15*	*150.000.000,00*	*(Desa Mondowe, Petasia Barat)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan*			
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya (Unit)				*15*	*150.000.000,00*	*(Desa Kolo Bawah, Mamosalato)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan*			
	2.15.02.2.02.0002		*Pengadaan Lampu Jalan (Unit)*				*20*	*200.000.000,00*	*(Dusun I dan IV Desa Molino Kecamatan Petasia Timur, Molino, Kec. Petasia Timur)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**699.493.000,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**			**1.901.254.443,00**	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**
			Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien (%)				***100***						***Masyarakat***			
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						699.493.000,00				Pembangunan secara menyeluruh dan merata			1901254.443,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun/terpelihara (%)				*100*		*(Desa Ganda-Ganda, Desa Uereuru, Desa Matube, Desa Kolo Atas, KAB. MOROWALI UTARA)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						699.493.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			1901254.443,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)		*3*	*2.00*	*3*		*(Desa Ganda-Ganda, Desa Siliti, Desa Kolo Atas, KAB. MOROWALI UTARA)*					*3*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)				*10*	*66.460.000,00*	*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)				*20*	*33.033.000,00*	*(Kab. Morowali Utara, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan*			
			Lanjutan Tambatan Perahu (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(Dusun II Desa Ganda-Ganda, Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Pengguna dan Pemilik Laut, Sungai dan Danau*			
			Pembangunan Tambatan Perahu (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(Desa Siliti, Bungku Utara)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Pengguna Transportasi Laut, Sungai dan Danau*			
			Pembangunan Tambatan Perahu (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(Dusun III Desa Kolo Atas, Mamosalato)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Pengguna dan Pemilik Transportasi Laut, Sungai dan Danau*			
	JUMLAH							**7.444.022.657,00**							**8.685.454.175,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 memuat tentang program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat seperti pada Tabel 4.1. dibawah ini :

Tabel 4.1

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.444.022.657,00**							**8.685.454.175,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**7.444.022.657,00**							**8.685.454.175,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***100***	**5.904.255.657,00**				**Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat**			**5.178.402.249,00**	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu (%)*				*100*	3.503.596.771,00 *3.503.596.771,00*	*(DInas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*			Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		*100*	3.140.259.733,00 *3.140.259.733,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*30*	*30*	*30*	3.503.596.771,00	*(Dinas Perhubungan, Ganda-Ganda, Kec. Petasia)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*30*	3.140.259.733,00 *3.140.259.733,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Peningkatan Sumber Daya Aparatur (%)*				*100*	94.995.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*			Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		*100*	140.875.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	33.075.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah	*ASN Dinas Perhubungan*	*1*	70.875.000,00 *70.875.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*3*	*3*	*3*	61.920.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*3*	70.000.000,00 *70.000.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien (%)*				*100*	271.766.857,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*			Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		*100*	238.177.417,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*2*	*2*	*2*	39.181.857,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah	*ASN Dinas Perhubungan*	*2*	65.677.817,00 *65.677.817,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*2*	*2*	*2*	28.600.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah	*ASN Dinas Perhubungan*	*2*	22.499.600,00 *22.499.600,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*48*	*48*	*48*	203.985.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*48*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (%)*				*100*	1.860.777.029,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*			Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		*100*	1.540.030.099,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	-	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*1*	2.500.000,00 *2.500.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	60.000.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*1*	36.240.000,00 *36.240.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*14*	*14*	*14*	1.800.777.029,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah	*ASN Dinas Perhubungan*	*14*	1.501.290.099,00 *1.501.290.099,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien (%)*				*100*	173.120.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*			Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		*100*	119.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*11*	*11*	*11*	40.000.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*11*	55.000.000,00 *55.000.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*2*	*2*	*2*	60.000.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*2*	60.000.000,00 *60.000.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*8*	*8*	*8.00*	8.120.000,00	*(Dinas Perhubungan, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*8.00*	4.060.000,00 *4.060.000,00*	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*2*	*2*	*2*	65.000.000,00	*(Desa Ganda-Ganda, Desa Siliti, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	*ASN Dinas Perhubungan*	*2*	-	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor (%)***				***100***	**840.274.000,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**			**1.605.797.483,00**	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang/ terpelihara (%)*				*100*	840.274.000,00	*(Kota Kolonodale dan Desa Kolo Bawah, KAB. MOROWALI UTARA)*			Pembangunan secara menyeluruh dan merata		*100*	1605.797.483,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						840.274.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			1.605.797.483,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)		*30*	*30*	*30*		*(Kota Kolonodale dan Desa Kolo Bawah, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			ASN Dinas Perhubungan, Masyarakat, Masyarakat Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan, Masyarakat Pengguna Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Masyarakat Pengguna LLAJ	*30*	*1.605.797.483,00*	
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase Peningkatan Kwalitas sarana dan prasarana efektif dan efesien (%)***				***100***	**699.493.000,00**				**Pembangunan secara menyeluruh dan merata**			**1.901.254.443,00**	**DINAS PERHUBUNGAN DAERAH**
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang terbangun/terpelihara (%)*				*100*	699.493.000,00	*(Desa Ganda-Ganda, Desa Ueruru, Desa Matube, Desa Kolo Atas, KAB. MOROWALI UTARA)*			Pembangunan secara menyeluruh dan merata		*100*	1.901.254.443,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						699.493.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan secara menyeluruh dan merata			1.901.254.443,00	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)		*3*	*2.00*	*3*		*(Desa Ganda-Ganda, Desa Siliti, Desa Kolo Atas, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Dinas Perhubungan, Masyarakat Pengguna dan Pemilik Transportasi Laut, Sungai dan Danau*	*3*	*1.901.254.443,00*	
	J U M L A H							**7.444.022.657,00**							**8.685.454.175,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024.

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Program dan kegiatan untuk mecapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Sulawesi Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024;

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;
2. Menerapkan system *reward and punishment* terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat;
5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku;
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Demikian, semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara khususnya, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Kolonodale, 25 Juni 2023

Kepala Dinas Perhubungan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Drs. IRWAN A. IBON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700821 199003 1 003



RANCANGAN KERJA
DINAS SOSIAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS SOSIAL DAERAH
Alamat : Jalan Poros Ganda-Ganda, Kode Pos : 94971
E-mail : dinsosmorowaliutara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 460 / /SK-DINSOS/II/2024

TENTANG

RANCANGAN KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan rencana strategis dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa Rancangan Kerja (RENJA) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dilingkup Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksnakan program dan kegiatan;

c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);

16. PeraturanDaerah KabupatenMorowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentag Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah KabupatenMorowali Utara Tahun 2017Nomor 12).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Rancangan Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan SOPD Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kedua : Rancangan Kerja (Renja) SOPD Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan SKPD;

Ketiga : Rancanganb Kerja (Renja) SOPD Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai beriut :

Bab. I. Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

Bab. II. EvaluasiI Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD
2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Bab. IV. Rancanagan Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V. Penutup

Keempat : Rancangan Kerja SOPD Dinas Sosial daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan SOPD;

Kelima : Guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dan penjabaran RESTRA SOPD Dinas Sosial daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) SOPD Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas SOPD.

Keenam : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perluya.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal : Maret 2023

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

JIBRAIL ABD KADIR, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19691021 199503 1 002

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rancangan Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rancangan Kerja (Renja) Tahun 2022 sebagai pedoman program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024.

Rancangan Kerja Dinas Sosial Daerah yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Daerah demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang pelayanan sosial, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Semoga Rancangan Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara.

Kepala Dinas Sosial Daerah
Kabupaten Morowali Utara

JIBRAIL ABD KADIR, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19691021 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
.....
i

DAFTAR ISI
.....
ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
.....
1

1.2 Landasan Hukum
.....
3

1.3 Maksud dan Tujuan
.....
5

1.4 Sistematika Penulisan
.....
6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENJA DINAS SOSIAL
.....
5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
.....
9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah
.....
18

2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Daerah

.....
21

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Daerah
.....
22

2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat
.....
30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENJA DINAS SOSIAL DAERAH
.....
31

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial Daerah
.....
31

3.2 Program dan Kegiatan
.....
34

BAB IV RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
.....
37

BAB V PENUTUP
.....
40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.1.1 Pengertian Rancangan Kerja (Renja Perangkat Daerah)

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Daerah yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahun sebelumnya.

1.1.2 Proses penyusunan Rancangan Kerja OPD

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. dan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Ranwal Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Ranwal Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Ranwal Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

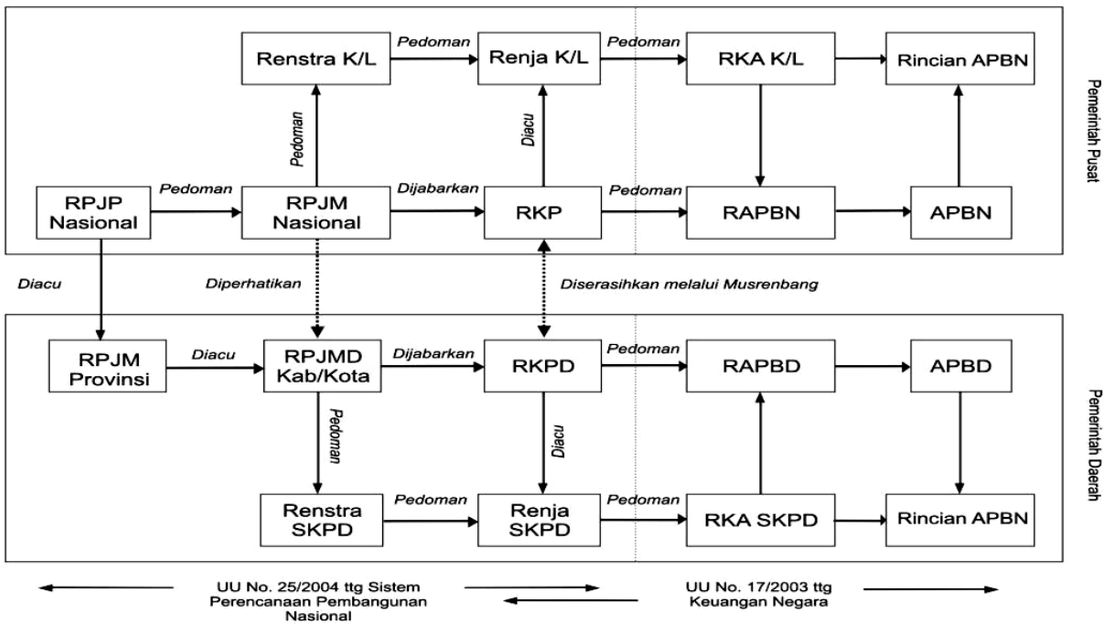
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial Daerah dituntut untuk mampu membuat/menyusun suatu

perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya terlihat dalam **Tabel I** dibawah ini :

Tabel I



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.
c.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB.I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang OPD, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II HASIL EVALUASI DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD di Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Sosial Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian di lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kecamatan.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda

tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali Utara adalah Dinas yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2017.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan, Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Morowali Utara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah , maka pada Tahun 2024 Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Menyusun Perencanaan Pelayanan Sosial yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pembangunan dalam rangka mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien.

2) Pemutakhiran basis data masyarakat miskin yang memerlukan bantuan pelayanan sosial dan kesehatan.
3) Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan, adalah :
   - Memfasilitasi pelayanan prima kepada stakeholders, lintas SKPD dan lintas kewilayahan.

     Kebijakan:
   - Menyediakan sarana dan prasarana kantor dan komponen pendukung operasional.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) = 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)=2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun {(n-2)=2020}	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) = 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**Persentase Kelancaran Adnimistrasi**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Bulan	25%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	12 bulan	100%	100%	100%	100%	12 bulan	4 Bulan	25%
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	12 bulan	100%	100%	100%	100%	12 bulan	4 Bulan	25%
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Persentase Kelancaran Adnimistrasi**								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	100%	100%	100%	100%	12 bulan	4 Bulan	25%

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	85%	85%	85%	100%	100%		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Bulan	100%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Bulan	100%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase lancarnya administrasi perkantoranBulan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Bulan	100%
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terlaksanya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	11 unit	4				11 unit	0	25%
					Pengadaaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian dinas pegawai (Psang)								
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur**	100%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0%
					Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian untuk hari-hari tertentu (Pasang)	35	68%	100%	100%	100%	35	0	0%
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**	100%	82%				100%	0	0%
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Aparatur (Org)	2 Kegiatan	39				2 Kegiatan	0	0%
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	**Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	400 KK	100%	100%	100%	100%	400 KK	0	0%

					Konsultasi dan Koordinasi PKH, KUBE, KAT dan PMKS lainnya	Terlaksananya Konsultasi PKH, KUBE, KAT dan PMKS Lainnya		100%						
					Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainya	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS	10 kec	100%				10 kec	0	0%
					Pembangunan Rumah Singgah Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksananya Rumah singga bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	10 unit	100%	100%	100%	100%	10 unit	0	0%
					Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya Penyandang cacat masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		100%						
					Sosialisasi Kube			100%						
					Sharing PKH	Terlaksananya Sharing PKH	12 bulan	100%	100%	100%	100%	12 bulan	4 Bulan	25%
					Peningkatan Kemampuan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Berdayanya fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya (KK)		250	100%	100%	100%			
					Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Meningkatkan keterampilan bagi keluarga miskin (orang)		250						
					Peltihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		100%	100%	100%	100%			
					Fasilitasi Manjemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Tercapainya Manajemen yang baik dalam pemberdayaan Fakir Miskin (KK)	10 kec	150				10 kec	0	0%

					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Korban bencana alam dan Pekerja Migran PMKS yang memperoleh askesos**	95 %	90%	90%	90%	100%	95 %		
					Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa dapat ditangani	100 %	5	12	12	100%	100 %	20%	20%
					Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Korban ekploitassi perdagangan perempuan dan anak mempunyai perlindungan hukum (Kasus)	12 bulan	30				12 bulan	4 bulan	25%
					Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Peningkatan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal (anak)		20						
					Pelayanan Psikologis bagi PMKS di trauma canter termasuk bagi korban bencana	Adanya pelayanan psikologis bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana								
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Pelayanan sarana dan prasarana kesejahteraan sosisal PMKS yang berkualitas								
					Pelayanan dan jaminan sosial bagi lansia	Adanya Pelayanan dan Jaminan sosial bagi lansia (orang)	300 orang	200	100%	100%	100%	300 orang	30 orang	10%
					Penyediaan logistik bencana	Tersedianya Logistik bencana (kecamatan)		10						

					Program pembinaan anak terlantar	**Terbinanya Anak terlantar**		40%							
					Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Peningkatan keterampilan anak terlantar (panti Asuhan)		2							
					Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Tersedianya data analisis permasalahan anak terlantar									
					Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	meningkatkan perkmbangan bakat anak terlantar		2							
					Monitoring evaluasi dan pelaporan	tersedianya data anak terlantar dan permasalahan anak terlantar (kecamatan)		10							
					Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar	Peningkatan keterampilan bagi tenaga pembina anak terlantar									
					Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	**Terbinanya Panti Asuhan dan Panti Jompo (6 Unit)**	4 panti	100%	100%	100%	100%	4 panti	0	0%
					Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Terpeliharanya sarana dan prasarana dpanti asuhan jompo	4 panti	3				4 panti	0	0%
					Temu Penguatan Keluarga dan Anak Dalam Meminimalisir Kekerasan Terhadap Anak (TEPAK)			100%	100%	100%	100%			
					Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Panti asuhan/jompo mempunyai sarana dan prasarana yang layak		3	100%	100%	100%			
					Peningkatan keterampilan tenga pelatih dan pendidik	meningkatkan ketrampilan tenaga pelatihan	4 panti					4 panti	0	0%

					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Persentase peningkaatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat sosial**	100%	60%	65%	65%	100%	100%		
					Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Menigkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	100%	10	65%	65%	100%	100%	0	0%
					Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Tersedianya LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	100%	1				100%	0	0%
					Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	**Persentase Terbinanya para penyandang cacat dan trauma**		55%	60%	60%	100%			
					Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma	Bagi penyandang cacat dan trauma mempunyai pendidikan yang layak (orang)		20						
					Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Bagi penyandang cacat dan eks trauma yang berdaya guna (orang)		20						
					Pendataan Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	tersedianya data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Kecamatan)		10	60%	60%	100%			
					Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan	Meningkatkan keterampilan tenaga pelatihan								
					Program pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Eks PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	**Jumlah PMKS yang dibina Jumlah Karang Taruna, Arsos, Pekerja Sosial Masyarakat dan Pelaku Usaha yang diberdayakan serta tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	15%

					Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Eks Penyakit sosial	Meningkatkan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial	100%	22				100%	0	0%
					Monitoring Evaluasi dan pelaporan	tersedianya data pekerja sosial, narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya. (Kecamatan)	100%	10	10	10	100%	100%	15%	15%
					Pemberdayaan Eks Penyakit sosial	Berdayanya bagi eks penyakit sosial	100%					100%	0	0%
					Program pembinaan manajemen/SDM bagi pengelola Panti, pendamping KUBE	**Jumlah pengelola panti dan pendamping KUBE, Petugas lapangan yang di bina**	100%	100%	18	18	100%	100%	0	0%
					Bantuan kelompok usaha bersama, Karang Taruna	Meningkatkan usaha bagi kelompok Karang Taruna (klmpk)	10 Kec	38				10 Kec	0	0%
					Sosialisasi dan Pembinaan KUBE	Terbinanya KUBE	1 Kegiatan	1				1 Kegiatan	0	0%
					Program Peencegahan dan Penyalagunaan Napza	**Jumlah yang mengikuti Sosialisasi pencegahan Napza**		100%						
					Sosialisasi Pencegahan Napza	**terlaksananya sosialisasi pencegahan napsa**		100						
					Program pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan Sosial	**Tersedianya Taman Makam Pahlawan**	100%	100%	99%	99%	100%	100%	0	0%
					Pembangunan Taman Makam Pahlawan						100%			
					Peringatan Hari Pahlawan	memperingati hari-hari pahlawan	1 Kegiatan	3	100%	100%	100%	1 Kegiatan	0	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah

Ruang Lingkup Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Morowali Utara tidak terlepas dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahtraan Sosial menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial sebagai suatu instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan Kesejahteraan Sosial. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial dikarenakan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar, yaitu menangani masalah dan menjalankan peran sesuai dengan statusnya.

Isu strategis masih tingginya penduduk miskin, berdampak langsung pada penurunan daya beli, keterbatasan mengakses pelayanan Kesejahteraan dan pendidikan, yang kesemuanya memberikan kontirbusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial semakin meningkat. Penyandang masalah Kesejahteraan soisial (PMKS) adalah komunitas keluarga miskin, hampir miskin, dan fakir miskin, seperti :

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak nakal
4. Anak jalanan

wanita rawan Sosial ekonomi, korban tindakan kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalah gunaan NAPZA, kelurga fakir miskin, kelurga berumah tidak layak huni, kelurga bermasalah Sosial, psikologi, korban bencana alam, korban bencana Sosial atau pengungsi, pekerja migrant terlantar, orang dengan bencana Sosial

atau pengungsi, orang dengan HIV/ AIDS (ODHA). Hal ini memerlukan pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, yang dalam pelaksanaannya mengggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi potensi yang ada pada diri manusia, alam dan institusi Sosial yang dapat digunakan untuk menunjang usaha Kesejahteraan Sosial

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAERAH

Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara selanjutnya disebut DINSOS, ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2017. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan Kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan social dan perlindungan social serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Fungsi yang diemban adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial berdasarakan Perda tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
    3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
    1. Sub Bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;dan
    3. Sub Bidang Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dengan membandingan antara rancangan awal RKPD dengan analis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2024, maka kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 adalah :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Forum					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Dinas Sosial Daerah**	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**100%**	**2.868.237.941**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	**Dinas Sosial Daerah**	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**	**100%**	**2.939.943.890**	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Daerah	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	2.152.277.795	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2.464.384.740	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Daerah	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	297.445.486	- Administrasi Umum	Dinas Sosial Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100%	295.144.969	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Daerah	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	331.522.184	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Daerah	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	339.810.238	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Sosial	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	86.992.476	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Sosial	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	89.167.287	

	Daerah	Daerah				Daerah	Daerah				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Dinas Sosial Daerah**	**Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya**	**100%**	**632.118.652**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL***	**Dinas Sosial Daerah**	**Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya**	**100%**	**647.921.618**	
	- Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial Daerah	Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya	100%	336.000.000	- Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial Daerah	Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya	100%	344.400.000	
	- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Daerah	Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya	100%	296.118.652	- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Daerah	Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya	100%	303.521.618	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Dinas Sosial Daerah**	**Korban Bencana Alam dan Pekerja Migran PMKS yang memperoleh Askesos**	**100%**	**367.328.622**	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	**Dinas Sosial Daerah**	**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**	**100%**	**376.511.878**	
	- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Daerah	Terbinanya Para Penyandang Cacat dan Trauma	100%	302.263.622	- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Daerah	Terbinanya Para Penyandang Cacat dan Trauma	100%	309.820.213	

	- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Daerah	Jumlah PMKS yang di Bina, Jumlah karang taruna, orsos, pekerja sosial masyarakat dan Pelaku Usaha yang diberdayakan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	100%	65.065.000	- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Daerah	Jumlah PMKS yang di Bina, Jumlah karang taruna, orsos, pekerja sosial masyarakat dan Pelaku Usaha yang diberdayakan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	100%	66.691.625	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Dinas Sosial Daerah**	**Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Pekerja Migran PMKS yang memperoleh Askesos**	**100%**	**306.571.100**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Dinas Sosial Daerah**	**Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Pekerja Migran PMKS yang memperoleh Askesos**	**100%**	**314.235.377**	
	- Penyediaan Logistik Bencana	Dinas Sosial Daerah	Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya	100%	200.000.000	- Penyediaan Logistik Bencana	Dinas Sosial Daerah	Berdayanya Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya	100%	205.000.000	
	- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Daerah	Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Pekerja Migran PMKS yang memperoleh Askesos	100%	106.571.100	- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Daerah	Terlayaninya Korban Bencana Alam dan Pekerja Migran PMKS yang memperoleh Askesos	100%	109.235.377	

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pelaksanaan musrembang kabupaten dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN KERJA DINAS SOSIAL DAERAH

Untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD yang diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD, selanjutnya diimpelemtasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 dalam proses penyusunan Renja harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, maupun provinsi.

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, yaitu:

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya
2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial
4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
5. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Dinas Sosial

Sasaran Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin
2. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4. Meningkatnya mutu layanan Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS
5. Terlaksananyanya pelayanan sosial dan psikososial
6. Terlaksananya pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
7. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

3.1.1. Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati Daerah Kabupaten Morowali Utara, dengan Visi ***"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Morowali Utara "*** yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan.Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat,kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini,yang di hadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya kebutuhan sosial dasar seperti kesehatan pendidikan,sandang,pangan,papan,dan kebutuhan sosial dasar lainnya.pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengolahan tersendiri,karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemuhan kebutuhan dasar.

PMKS masih menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke pelayanan sosial dasar penyandang cacat masih menghadapi kendala dalam hal kemandirian,produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka,dan keterbatasan jumlah dan kualitas. selain di sebabkan oleh kemiskina juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup pada bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen

dan profesionalisme pelayanan kesejahteran sosial.Kemampuan pemerintah dan peran masyarakat belum dapat menjangkau semua penyandang masalah kesejahteraan sosial .Disamping permasalahan sosial yang cenderung semakin kompleks sulit di prediksi waktu dan lokasi.

Pembangunan kesejahteraan sosial ke depan lebih di perkuat dengan mengedepankan peran aktif masyarakat,di ikuti dengan pengalihan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya,seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial,di perlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah,Pemerintah daerah dan masyarakat sehingga PKMS dapat di tingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan malasah kesejahteraan sosial (baik saran prasarana maupun anggaran) telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitas sosial,jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta program kompenansi bagi masyarkat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai kebijakan pembangunan nasional.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial ke depan masih di dominasi oleh permasalahan “konvensional” terutama kemiskinan dan keterlantaran,kecacatan,keterpencilan dan ketertinggalan, ketentuan sosial dan penyimpanan perilaku serta akibat bencana. Namun demikian, permasalahn “aktual” yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial,kesenjangan sosial,perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan. Demikian pula permasalahan kesejahteraan sosial “hulu” dan dampak pelaksanaan berbagai bidang pembanguan lain,secara intensif perlu di tangani melalui berbagai cara. Apabila hal ini luput dari perhatian,resiko-resiko yang potensial terjadi akan menjadi beban yang sangat berat baik terhadap meningkatnya beban “murni kesejahteraan

sosial" maupun permasalahn yang bersifat lebih "makro" terkait dengan masalah pembangunan lainnya. Memperhatikan gambaran di atas,maka masalah prioritas kesejahteraan sosial pada di arahkan pada :

1. kemiskinan,
2. ketunaan sosial,
3. keterlantaran,
4. kecacatan,
5. kebencanaan,
6. keterpencilan,
7. tindak kekerasan ,
8. kerentanan sosial.

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan direncakanan Dinas Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagai berikut: Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 terdiri dari : Selanjutnya,

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
   a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemberdayaan Sosial
   a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
   b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

di Luar Panti Sosial

4. Program Penanganan Bencana

   a. Penyediaan Logistik Bencana
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

BAB IV

RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**3,790,769,977**		
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**3,243,608,627**		
1	**6**	**1**	**2;01**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,140,048,561**		
1	**06**	**01**	**2.02**	**01**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**Peningkatan Pengelolaan Tertib Adminitrasi Keuangan Yang tepat Waktu**		**100 Persen**	**12 Bulan**	**100 Persen**	**2,140,048,561**	**APBDI**	
					Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					100%	100%	100%	1,337,441,605	APBDI	
					Belanja Tambahan Penghasilan (TPP) ASN					100%	100%	100%	751,588,272	APBDI	
					Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					100%	100%	100%	51,018,684	APBDI	
1	**6**	**1**	**2;06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**415,858,582;00**		

1	06	01	2.06	05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**14,433,660**	**APBD I**	
					Belanja Penggandaan dan Cetak					100%	100%	100%	11,523,660	APBD I	
					Belanja cetak Undangan (Hari Pahlawan)					100%	100%	100%	1,410,000;00	APBD I	
					Belanja Cetak Spanduk (Hari Pahwalawan)					100%	100%	100%	1,500,000	APBD I	
1	06	01	2.06	01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tingkat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**		**100 Persen**	**5 Jenis**	**100 Persen**	**1,997,697**	**APBD I**	
					Penyediaan Peralatan Listrik					100%	5 Jenis	100%	1,997,697	APBD I	
1	06	01	2.06	02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Yang Diadakan**	**Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif Dan Efisien**		**100 Persen**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**127,849,025**	**APBD I**	
					Pengadaan Motor Dinas					100%	100%	3 Unit	78,000,000	APBD I	
					Pengadaan Printer					100%	100%	1 Unit	5,850,000	APBD I	
					Pengadaan Meja Pelayanan					100%	100%	1 Unit	7,000,000	APBD I	

					Belanja Alat tulis Kantor					100%	100%	100%	34,747,350	APBD I	
					Belanja Peralatan kebersihan					100%	100%	100%	2,251,675	APBD I	
1	06	01	2.06	09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD**	**Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah**	**Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien**		**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**271,578,200**	**APBD I**	
					Perjalanan Dinas Luar daerah					100%	100%	100%	199,903,000	APBD I	
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah					100%	100%	100%	71,675,200	APBD I	
1	**6**	**1**	**2;08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**519,161,484;00**		
1	06	01	2.08	03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**57,898,300**	**APBD I**	
					Belanja Makan dan Minum Hari pahlawan					100%	100%	100%	19,916,000	APBD I	
					Pembaca Doa					100%	100%	100%	700,000	APBD I	
					Pembawa Acara					100%	100%	100%	800,000	APBD I	
					Marcing					100%	100%	100%	5,000,000	APBD I	
					Paskibraka					100%	100%	100%	1,500,000	APBD I	
					Dekorasi					100%	100%	100%	1,000,000	APBD I	

					Sewa Kursi					100%	100%	100%	750,000	APBD I	
					Sound					100%	100%	100%	1,500,000	APBD I	
					Tenda					100%	100%	100%	3,000,000	APBD I	
					Belanja makan dan Minum Rapat Kantor					100%	100%	100%	8,816,000;00	APBD I	
					Belanja BBM					100%	100%	100%	14,916,300	APBD I	
1	06	01	2.08	01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa surat menyurat**	**Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,800,000;00**	**APBD I**	
					Belanja Bahan Materai					100%	100%	100%	2,800,000;00	APBD I	
1	06	01	2.08	02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik**	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**		**100 Persen**	**12 Bulan**	**100 Persen**	**37,203,184**	**APBD I**	
					Belanja Listrik					100%	100%	100%	7,323,184	APBD I	
					Belanja Surat kabar/iklan					100%	100%	100%	25,800,000	APBD I	
					Belanja Kawat/Faximil/Internet					100%	100%	100%	4,080,000	APBD I	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**		**100%**	**12 Bulan**	**100%**	**421,260,000**	**APBD I**	

					Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					100%	12 Bulan	12 Bulan	42,000,000	APBDI	
					Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					100%	12 Bulan	12 Bulan	12,600,000	APBDI	
					Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (PKH,TAGANA,TKSK)					100%	12 Bulan	12 Bulan	132,660,000	APBDI	
					Honorarium Jasa Teng Administrasi					100%	12 Bulan	12 Bulan	234,000,000	APBDI	
1	**6**	**1**	**2;09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**168,540,000**		
1	06	01	2.09	02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**		**100%**	**9 Unit**	**100%**	**160,500,000**	**APBDI**	
					Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat-Pejabat Eselon II (CC dibawah 2.000)							1 Unit	17,500,000	APBDI	
					Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Roda Dua							7 Unit	12,000,000	APBDI	
					Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Oprasional Bencana							1 Unit	111,000,000	APBDI	
					Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat-Pejabat Eselon II (CC di atas 2.000)							5 Unit	20,000,000	APBDI	

1	06	01	2.09	06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor**	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**		**100 Persen**	**26Unit**	**100 Persen**	**8,040,000**	**APBDI**	
					Belanja Pemeliharaan Ac					100%	5 Unit	100%	3,050,000	APBDI	
					Belanja pemeliharaan Personal Komputer					100%	15 Unit	100%	2,920,000	APBDI	
					Belanja Pemeliharaan Printer					100%	6 Unit	100%	2,070,000	APBDI	
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**95,537,750**		
1	**6**	**2**	**2;01**		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**								**0**		
1	06	02	2.01	02	**Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT**	**Meningkatnya Pemberdayaan Sosial**	**Jumlah Rumah Hunian Yang Terbangun**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**		**100 Persn**	**250.00 KK**	**100 Persn**	**0**	**APBDI**	
					Pembangunan Rumah Hunian Sederhana					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Hunian Sederhana					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Hunian Sederhana					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Perjalanan Dinas Biasa					100%	100%	100%	0	APBDI	

					Perjalanan Dinas Dalam Kota					100%	100%	100%	0	APBD I	
					Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lemo							**15 Unit**		APBD I	**Musremban g Prioritas I**
					Pembangunan Rumah Hunian Sederhana Desa Lemowalia							**10 Unit**		APBD I	
					Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Desa Lemo									APBD I	
					Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Desa Lemowalia									APBD I	
1	**6**	**2**	**2;0 3**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**95,537,750**		
1	06	02	2.03	01	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatny a Pemberdayaa n Sosial**	**Peningkatan Kesehjahteran Masyarakat**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**		**100 Persen**	**50 KK**	**100 Persen**	**0**	**APBD I**	
					Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin					100%	100%	100%	0	APBD I	
1	06	02	2.03	03	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatny a Pemberdayaa n Sosial**	**Jumlah Ketersediaan Dana Sharing PKH**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6,969,950**	**APBD I**	
					Belanja Barang Pakai Habis					100%	100%	100%	2,913,950	APBD I	
					Belanja Cetak					100%	100%	100%	1,620,000	APBD I	

					Belanja makan dan Minum					100%	100%	100%	2,436,000	APBD I	
1	06	02	2.03	04	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemberdayaan Sosial**	**Jumlah Lembaga Yang di Bina**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**		**100 Persen**	**5 Lembaga**	**100 Persen**	**88,567,800**	**APBD I**	
					Belanja Bantuan Barang karang Taruna					100%	100%	100%	61,031,250	APBD I	
					Belanja Jasa Fasilitator TKSK					100%	100%	100%	0	APBD I	
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa					100%	100%	100%	11,790,000	APBD I	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					100%	100%	100%	15,746,550	APBD I	
1	06	02	2.03	05	**Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)**	**Meningkatnya Pemberdayaan Sosial**	**Jumlah Lembaga Yang Akan Dibentuk**	**Menurunnya Angka Kemiskinan**		**100 Persen**	**1 Lembaga**	**100 Persen**	**0**	**APBD I**	
					Belanja Barang Pakai Habis					100%	100%	100%	0	APBD I	
					Belanja Makan dan Menum Kegiatan					100%	100%	100%	0	APBD I	
					Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					100%	100%	100%	0	APBD I	
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					100%	100%	100%	0	APBD I	

					Belanja Perjalanan Dinas					100%	100%	100%	0	APBDI	
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**248,115,500;00**		
1	**6**	**4**	**2;01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**248,115,500**		
1	06	04	2.01	01	**Penyediaan Permakanan**	**Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial**	**Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan bantuan**	**menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial**	**Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100 Persen**	**45 Orang**	**100 Persen**	**54,247,400**	**APBDI**	
					Belanja Gizi Permakanan Penyandang cacat					100%	100%	100%	42,900,000	APBDI	
					Perjalanan Dinas Dalam					100%	100%	100%	11,347,400	APBDI	
1	06	04	2.01	03	**Penyediaan Alat Bantu**	**Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial**	**Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan bantuan**	**menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial**		**100 Persen**	**45 Orang**	**100 Persen**	**65,507,000**	**APBDI**	
					Belanja Alat Bantu Penyandang Disabilitas Kaki Palsu					100%	100%	100%	18,000,000	APBDI	

					Belanja Alat Bantu Penyandang Disabilitas Kursi Roda					100%	100%	100%	29,117,000	APBDI	
					Biaya Perjalanan Dinas Biasa					100%	100%	100%	18,390,000	APBDI	
1	06	04	2.01	05	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**	**Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial**	**Jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina**	**menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial**		**100 Persen**	**45 Orang**	**100 Persen**	**0**	**APBDI**	
					Belanja Barang Pakai Habis					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Belanja Makan Minum					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Perjalanan Dinas					100%	100%	100%	0	APBDI	

1	06	04	2.01	06	**Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat**	**Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakatyangmendapatkan bimbngan**	**menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar**		**100 Persen**	**200 orang**	**100 Persen**	**128,361,100;00**	**APBDI**	
					Bantuan Gizi Lansia					100%	100%	100%	94,522,000;00	APBDI	
					Perjalanan Dinas Biasa					100%	100%	100%	11,840,000;00	APBDI	
					Perjalanan Dinas Dalam Kota					100%	100%	100%	21,999,100;00	APBDI	
1	06	04	2.01	09	**Pemberian Layanan Data dan Pengaduan**	**Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial**	**jumlah Data penyandang cacat dan eks trauma yang tersedia**	**menurunnya angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti sosial**		**100 Persen**	**1 Dokumen**	**100 Persen**	**0**	**APBDI**	
					Belanja barang Pakai Habis					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Belanja Perjalanan Dinas					100%	100%	100%	0	APBDI	
1	**6**	**4**	**2;02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**0**		

1	06	04	2.02	07	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**	**Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial**	**Jumlah PMKS yang di Bina, Jumlah karang taruna, orsos, pekerja sosial masyarakat dan Pelaku Usaha yang diberdayakan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan**	**penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**100 Persen**	**2 Orang**	**100 Persen**	**0**	**APBDI**	
					Belanja Alat Tulis Kantor					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Belanja Cetak					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Belanja Makan Minum Kegiatan					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Narasumber					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis-Kontribusi Pelatihan/Praktek Kerja Anak Terlantar, Anak Cacat dan Anak Nakal					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa					100%	100%	100%	0	APBDI	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					100%	100%	100%	0	APBDI	
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**203,508,100**		
1	**6**	**6**	**2;01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**203,508,100**		

1	06	06	2.01	01	**Penyediaan Makanan**	**tingkat cakupan penanganan bencana**	**persentase ketersediaan logistik bencana**	**meningkatnya perlindunan sosial korbn bencana alam dan bencana sosial**		**- persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**203,508,100**	**APBD I**	
					Penyediaan Logistik Bencana					100%	100%	100%	161,118,100	APBD I	
					Perjalanan Dinas Luar Daerah ibukota Provinsi dan Sekitarnya								29,340,000		
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								13,050,000		
1	**6**	**6**	**2;02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								**0**		
1	06	06	2.02	01	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana**	**tingkat cakupan penanganan bencana**	**Persentase penangananmasalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa**	**meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana alam**		**- persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**0**	**APBD I**	
					- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					20 orang	100 Persen	100 Persen	0	APBD I	
					- Sewa Angkut Logistik Kendaraan Mobil 6 Roda Sewa Angkut Logistik					3 Unit/Keg	100 Persen	100 Persen	0	APBD I	
					Perjalanan Dinas Luar Daerah ibukota Provinsi dan Sekitarnya					1 Tahun	100 Persen	100 Persen	0	APBD I	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1 Tahun	100 Persen	100 Persen	0	APBD I	
												TOTAL	**3,790,769,977;00**		

BAB IV
P E N U T U P

Rancangan Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial Daerah. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Alamat : Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka
KOLONODALE

RENCANA AKHIR DAN RENCANA KERJA (R E N J A)











TAHUN ANGGARAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan harapan yang di inginkan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 di susun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08). Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai tolak ukur menetapkan standar keberhasilan pembangunan pada tahun 2024 di bidang pendidikan sekaligus sebagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam tiap tahunnya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan dalam bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan para pemangku kepetingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan secara efisien, efektif dan terintegrasi, sinegritas dan berkesinambungan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam menata dan membenahi organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Daerah, dan pada akhirnya dapat memacu percepatan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Demikian semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kolonodale, ... 2024

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kab. Morowali Utara,

MOH. RIDWAN DM. S.Ag
NIP. 19740111 199803 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan disektor Pendidikan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan disektor pendidikan perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang dimana semakin berkualitasnya pendidikan diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan disektor pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras pihak pendidikan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta konstribusi positif semua pihak dan berbagai sektor lainnya.Semua kebijaksanaan pembangunan yang sedang diselenggarakan hendaknya memiliki wawasan pendidikan terpadu. Artinya program pembangunan harus memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan lingkungan pendidikan dan perilaku yang berbudaya dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Morowali Utarayaitu "***Mewujudkan Morowali Utara yang Sehat Cerdas dan Sejahtera***"

B. Landasan Hukum

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tahun 2024 didasarkan pada landasan formil dan landasan materil. Landasan formil adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan DEaerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08).

Sedangkan yang menjadi landasan materil Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah:

1. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan stake holder pendidikan yang dirangkum melalui Forum Internal SKPD Pendidikan.
2. Berbagai literatur yang dapat mendukung penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyususun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2025
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang merupakan realisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Morowali Utara.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini adalah :

1. Untuk menggambarkan kebijakan, rencana program dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah pada tahun 2024;
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan yang lebih baik dan berdaya guna;
3. Sebagai wujud pertanggung jawaban dalam menunjang pencapaian Visi, Misi daerah di bidang pendidikan.

D. Kedudukan dan Tupoksi

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Hasil analisis pencapaian sasaran strategik tahun 2023 sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Intansi Pemerintah.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (Tahun 2023) dalam pelaksanaan pembangunan, sasaran dan kegiatan dituangkan dalam Program – Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan serta Generasi Muda dan Pendidikan Luar Sekolah. Dengan sumber Dana DAK Bidang Pendidikan, APBD dan lainnya.

Program dan Kegiatan serta Realisasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023.

Dapat dilihat pada table berikut :

No	Uraian			Pagu Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	385.156.950
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	159.323.527.099
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156.445.250
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.760.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.393.180
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.404.300
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	584.150.000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.300.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.998.306
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.927.688
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.880.231.000
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.500.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.980.000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	10.071.145.291
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.511.934.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.566.758.700
			Pengadaan Mebel Sekolah	1.782.265.818
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.955.625.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	25.182.277.890
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	455.934.200
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	283.407.680
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	117.798.900
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.496.476.800
			Penambahan Ruang Kelas Baru	7.591.349.799
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.355.610.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	307.325.000
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	299.185.750
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	261.369.723
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.002.923.400
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100.000.000
			Pengadaan Mebel PAUD	202.092.716
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.398.368.500
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	105.223.800
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	135.632.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	292.215.950
	4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	246.290.170
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	444.457.020
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	331.849.090
	2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	281.999.904
4.	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN			
	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.378.964.600
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	70.423.200
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Uraian Realisasi Kegiatan	76.632.000
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	450.443.200
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	97.047.300
7.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
	1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
			Pengembangan Cagar Budaya	246.269.758

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Undang-undang nomor 25 tahun 2024 tentang system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel :

REALISASI ANGGARAN tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	385.156.950	370,647,762	96,2 %
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	159.323.527.099	158628624964	99,6 %
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156.445.250	18,900,200	12,1 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.760.000	330962000	97,4 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.393.180	53,392,850	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.404.300	679.202.806	100 %
	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	584.150.000	583.143.000	99,8 %
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.300.000	17.293.320	100 %
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.998.306	74,937,000	100 %
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.927.688	259,662,688	99,8 %
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.880.231.000	11,581,481,000	97,5 %
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.500.000	110.977.400	90 %
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.980.000	21870000	72,9 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	10.071.145.291	9580972855	95,1 %
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh	1.511.934.000	1508973000	99,8 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.566.758.700	4.564.601.700	100 %
			Pengadaan Mebel Sekolah	1.782.265.818	1.778.100.000	99,8 %
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.955.625.000	4528645000	91,4 %
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	25.182.277.890	25,146,755,040	99,9 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	455.934.200	439,415,950	96,4 %
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	283.407.680	279,921,643	98,8 %
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	117.798.900	116,872,900	99,2 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.496.476.800	7,640,488,150	89,9 %
			Penambahan Ruang Kelas Baru	7.591.349.799	7.589.572.799	99,8 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.355.610.000	4311329000	99 %
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	307.325.000	251.095.000	81,7 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	299.185.750	299,136,950	100 %
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	261.369.723	240,350,423	92 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.002.923.400	1,005,846,800	100 %
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100.000.000	99.752.000	99,7 %
			Pengadaan Mebel PAUD	202.092.716	200,871,150	99,4 %
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.398.368.500	118,730,013	50 %
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	105.223.800	104,207,900	99 %
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	135.632.000	133,079,351	98,1 %
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	292.215.950	254,417,325	87,1 %
	4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	246.290.170	242,164,015	98,3 %
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	444.457.020	440,227,020	99 %
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	331.849.090	309,676,832	93,3 %
	2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	281.999.904	279,899,904	99,3 %
4.	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN					
	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.378.964.600	1,230,623,812	89,2 %

5.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	70.423.200	69,310,000	98,4 %
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Uraian Realisasi Kegiatan	76.632.000	76570880	99,9 %
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	450.443.200	132,175,600	2,93 %
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	97.047.300	95,347,300	98,2 %
7.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
	1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
			Pengembangan Cagar Budaya	246.269.758	246.086.098	99,9 %

Presentase serapan Anggaran Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah terdiri dari :

Persentase serapan anggaran di tahun 2023 :

a) Belanja Operasi = Realisasi Belanja Operasi x 100%
Alokasi Belanja Operasi
= Rp 193.275.277.558,- x 100%
Rp 220.023.282.353,-
= 87,84 %

b) Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal
= Rp 31.328.429.882,- x 100%
Rp 31.974.788.579,-
= 97,97 %

c) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp 224.603.770.440,- x 100%
Rp 251.998.070.932,-
= 89,12 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2023 tersebut diatas dapat menggambarkan secara umum seluruh Indikator Kinerja akan dilaksanakan dan menjadi tolok ukur pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2024

C. ISU –ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung pencapaian penyelanggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang bertugas membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasisebagai berikut:

1. Masih Adanya Kekurangan saran dan prasarana;
2. Keterbatasan Tenaga Pendidik;
3. Keterbatasan anggaran biaya untuk bimtek / pelatihan;
4. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan Pendidikan;
5. Lemahnya koordinasi antar sektor;
6. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pendidikan masih kurang;
7. Ketergantungan dalam pembiayaan anggaran terhadap pemerintah di atasnya;
8. Kemampuan Sumber Daya Pengajar yang masih terbatas;
9. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dalam pelaksanaan Pendidikan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah KabupatenMorowali Utara tahun 2021 – 2025, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab Tenaga Pendidik dan Kependidikan atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:

1. Pengembangan sumber daya Tenaga Pendidik melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (rewardand punishing;
2. Peningkatan kemampuan teknis Tenaga Pendidik;
3. Peningkatan kemampuana Tenaga Pendidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Sebagai Guru sehingga dapat menyelenggarakan Pembelajaran dengan optimal;
4. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi Sekolah-sekolah.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana terurai dalam tabel berikut.

Tabel (TC 31)
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024

E. USULAN PROGRAM

Dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL RENJA PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, di samping berpedoman pada Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2025. Untuk lebih jelas hasil telaahan usulan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara terurai pada Tabel berikut :

Tabel (TC 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan Bidang Pendidikan di tahun 2024 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Transformasi Ekonomi Indonesia. Pada tahun 2024 diharapkan mulai melepas dari tekanan pandemic COVID-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dituangkan dalam RENJA Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan;
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan;
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan;
4. Penguatan Budaya, Bahasa, dan Pendidikan Karakter;
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

Selain dari pada itu, cita cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan tranformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentujan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi structural yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan adalah:

1. Standarisasi Pelayanan melalui Akreditasi

   Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan, masingmasing lembaga penyelenggara satuan pendidikan perlu dievaluasi untuk memperoleh gambaran kinerja satuan pendidikan

sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan melalui Akreditasi Sekolah.

2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Pendidikan Dasar Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM Pendidikan Dasar diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

3. Pemantapan Kurikulum

   Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Desember 2014 dan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, memutuskan menghentika implementasi Kurikulum 2013, dan hanya melaksanakan secara terbatas pada sekolah-sekolah tertentu yang memenuhi standar pelaksanaan Kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum Merdeka berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) No. 022/H/KR/2023 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2023/2024. Fleksibilitas Kurikulum Merdeka menuntut inisiatif, keaktifan, dan kepercayaan diri ibu dan bapak guru untuk merancang kurikulum operasional sendiri, Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang seluasnya bagi pendidik dan peserta didik untuk berkolaborasi dalam merancang pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga hasil yang ingin dicapai bersama.

4. Penguatan manajemen pendidikan berbasis IT

   Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya perkembangan infrastuktur informasi global telah

mengubah pola dan cara kegiatan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Sistem jaringan pendidikan skala nasional (Jardiknas) dan Dapodik dibangun dengan harapan proses pengelolaan data dan informasi pendidikan dapat dilaksanakan lebih mudah, cepat, terintegrasi dan transparan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Sebuah organisasiharus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan kearah mana sebuah organisasi tersebutakan bergerakdan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi dimasa yang akan dating dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan 2021-2025. **Visi tersebut adalah sebagai berikut:**

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

a. **Visi** :

Visi Bupati Morowali Utara, adalah ***"Mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera Cerdas dan Sejahtera".***

b. Misi :

a. Pemeratan kesempatan memperoleh Pendidikan bermutu .
b. Membantu menfasilitasi pembangunan potensi anak secara utuh sejak usia dini.
c. Meningkatkan proposalisme dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan salah satupusat pembangunan dan pelestarian budaya daerah.
d. Membangun sarana dan prasarana pendidikan.
e. Mendorong dan menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Untuk mengetahui Target Kinerja Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.
2. Untuk mengetahui langkah – langkah dan strategi yang dapat di lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam pencapaian Target Kinerja Pembangunan di Bidang Pendidikan.

Sasaran :

1. Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan manajemen pendidikan yang efisien dan efektif.
4. Meningkatkan pembinaan dan kereatifitas olahraga dan seni di kalangan pelajar.
5. Meningkatkan dan mengembangkan seni budaya daerah.
6. Memperluas kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan kebudayaan daerah.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menangani urusan wajib Pendidikan. Untuk mendukung tercapainya pembangunan di daerah serta pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari 16 Program dan 37 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut

Program:

1. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Peangkat Daerah
2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Program Administrasi Umun Perangkat Daerah
4. Program Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
8. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
9. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
10. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
11. Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
12. Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak usia Dini dan Nonformal
13. Program Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
14. Program Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
15. Program Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunaya dalam Daerah Kabupaten/Kota

16. Program Pengelolaan Cagar Budaya Pringkat Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
14. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
15. Penambahan Ruang Kelas Baru
16. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
17. Pengadaan Mebel Sekolah
18. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar
19. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
20. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
21. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
22. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
23. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
24. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
25. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama
26. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
27. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

28. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
29. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
31. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
32. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
33. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
34. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
35. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
36. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
37. Pengembangan Cagar Budaya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PRANGKAT DAERAH

Dalam hal mewujudkan kondisi awal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap menyusun program-program pembangunan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan serta pengelompokan program. Pagu indikatif Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utarasebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan dari usulan dan kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Morowali Utara dan APBN Tahun 2024 yang dijabarkan dalam table berikut ini :

Tabel :
Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tahun 2024

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN TAHUN INI		SUMBER DANA
		JUMLAH	RINCIAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1-01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**	282,030,698,257		
1-01.01.2-02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
1-01.01.2-02.001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**200,746,955,965**		APBD
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		87,503,639,121	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		19,223,453,970	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		8,421,445,111	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		2,353,835,875	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		207,878,580	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		8,289,835,533	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		2,119,081,860	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		348,531,120	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		4,889,780,005	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		1,658,849,623	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		4,751,526,815	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1,214,311	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		299,300	

5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		6,166,936,929	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		947,850,225	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		13,283,391,587	
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD		34,300,032,000	
5.1.01.03.04.0001	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD		4,799,250,000	
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD		1,480,124,000	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
1.01.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	***131,063,250***		APBD
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		131,063,250	
	Instalasi Listrik - pangadaan Jaringan listrik (silpa 2023)			
1.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**534,190,000**		APBD
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		249,690,000	
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		198,000,000	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**			
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel		62,500,000	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		9,000,000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		15,000,000	
1.01.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**25,915,930**		APBD
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		25,915,930	
1.01.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**348,589,920**		APBD
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		274,837,600	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		73,752,320	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1.01.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**71,381,154**		APBD
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		35,381,154	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		36,000,000	
1.01.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**127,658,700**		APBD
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9,865,700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		51,363,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		6,350,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		13,680,000	

5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**			
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		41,000,000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		5,400,000	
1.01.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**11,761,604,800**		APBD
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		4,924,800	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		82,200,000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		20,160,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Belanja Makan dan minum Rapat kantor		48,000,000	
	Snack Rapat kantor		18,000,000	
	Snack Hardiknas dan Rempuk Pendidikan		36,000,000	
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		8,622,000,000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		786,000,000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		36,000,000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		18,000,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		90,320,000	
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
	Hibah Uang Bantuan Penyetaraan Sarjana bagi Guru Kontrak Daerah di Universitas Tompotika Luwuk		1,000,000,000	
	Hibah uang Kepada PSDKU Universitas Tadulako Kampus 2 Kolonodale		1,000,000,000	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1.01.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**85,000,000**		APBD
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		25,000,000	
	Pemeliharaan Mobil dinas Pejabat Esl III		30,000,000	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		30,000,000	
1.01.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**15,720,000**		APBD
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		9,150,000	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		6,570,000	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			
1.01.02.2.01.0006	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**780,000,000**		APBD

5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**			
	Paving Blok SDN 1 Tanasumpu		200,000,000	
	Pemasangan Paving Blok SDN Ganda-Ganda		100,000,000	
	Pembuatan Paving Blok SD GKST Beteleme		100,000,000	
	Pembuatan Paving Blok SDN 1 Bunta		100,000,000	
5.2.03.04.01.0004	**Belanja Modal Pagar**			
	Pembangunan Pagar SDN Keuno		80,000,000	
	Pembangunan Pagar SDN Lembah Sumara		100,000,000	
	Pembuatan Pagar SDN Towi		100,000,000	
1.01.02.2.01.0014	**Pengadaan Mebel Sekolah**	**1,350,140,000**		APBD
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel			
	Pengadaan Mobiler SD di 10 Kecamatan		1,350,140,000	
1.01.02.2.01.0016	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	**1,794,000,000**		APBD
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**			
	Bantuan Alat Olahraga Tersebar Kec. Petasia, Kec. Petasia Barat, Kec. Petasia Timur		150,000,000	
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**			
	Pengadaan Leptop Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan SD dan SMP		1,494,000,000	
	Pengadan TIK SDN Ganda-Ganda		150,000,000	
1.01.02.2.01.0021	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**	**23,232,030,000**		APBD
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**			
	Kegiatan Sosialisasi BOSP, BOSDA dan PIP		41,100,000	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	Kegiatan Sosialisasi BOSP, BOSDA dan PIP		10,800,000	
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**			
	Lembur Pengelolaan Dana BOSP dan BOSDA		71,350,000	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		17,000,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,800,000	
	Belanja Barang dan Jasa BOS			
	Belanja Barang dan Jasa Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD dan SMP Negeri		3,071,200,000	
	Belanja BOS Kinerja SD dan SMP (DAK Non Fisik-BOS Reguler)		700,000,000	
	Belanja BOS Reguler SD dan SMP (DAK Non Fisik-BOS Reguler)		13,714,417,755	
5.2.02.88.88.8888	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**			
	Belanja Modal Dana BOS Kinerja SD dan SMP (DAK Non Fisik-BOS Reguler)		370,000,000	
	Belanja Modal Dana BOSP Pusat SD dan SMP (DAK Non Fisik-BOS Reguler)		5,234,362,245	

1.01.02.2.01.0025	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	**329,041,600**		APBD
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Dasar		8,750,000	
	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten Morowali Utara		3,211,600	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga			
	Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah		1,500,000	
	Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah		9,000,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten Morowali Utara		33,600,000	
	Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah		17,280,000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		34,050,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10,900,000	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		58,500,000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			
	Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah		15,000,000	
	Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30,000,000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		4,500,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		5,000,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD		20,450,000	
	Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah		30,000,000	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		47,300,000	
1.01.02.2.01.0028	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**223,200,000**		APBD

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1,690,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar		400,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		7,350,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		650,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Bimtek Operator Dapodik Satuan Pendidikan SD dan SMP		17,640,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar		18,000,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	Bimtek Operator Dapodik Satuan Pendidikan SD dan SMP		21,600,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar		23,750,000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		7,200,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	Bimtek Operator Dapodik Satuan Pendidikan SD dan SMP		17,000,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar		2,400,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		63,544,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Bimtek Operator Dapodik Satuan Pendidikan SD dan SMP		3,600,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar		38,376,000	
1.01.02.2.01.0047	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**5,575,880,000**		APBD
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**			
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural			
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		230,000,000	
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			
	Jasa Konsultan Pengawasan (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		102,000,000	
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**			
	Bangunan Sementara SD GKST Kolonodale		200,000,000	
	Lanjutan Pembangunan RKB SDN 2 Bunta		128,000,000	
	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK ALKHAIRAAT KOROMATANTU. Dana Alokasi Khusus (DAK)		166,538,000	
	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK ALKHAIRAAT MALINO JAYA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		166,538,000	
	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK UE TONDE TINOMPO. Dana Alokasi Khusus (DAK)		165,000,000	
	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD NEGERI BENCUE. Dana Alokasi Kbusus (DAK)		211,480,000	
	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD NEGERI 1 TOMATA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		211,480,000	

	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD NEGERI 2 KOROWOU. Dana Alokasi Khusus (DAK)		211,480,000	
	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD NEGERI KOROBONDE. Dana Alokasi Khusus (DAK)		211,480,000	
	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD NEGERI KOROMONTO. Dana Alokasi Khusus (DAK)		211,480,000	
	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD NEGERI MALINO JAYA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		96,064,000	
	Pembangunan Ruang Guru SDN 1 Korowou		125,000,000	
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SD NEGERI BENCUE. Dana Alokasi Kbusus (DAK)		2,469,340,000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sea		200,000,000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Uepakatu		200,000,000	
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Paramba Kelas Jauh Padalampe		195,000,000	
	Pembangunan Toilet SD GKST Tiu		75,000,000	
1.01.02.2.01.0050	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**	**328,806,030**		APBD
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SD		1,138,500	
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SD		676,000	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**			
	Kegiatan Pengelolaan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik Satuan Pendidikan SD		800,800	
	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengelolaan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik Satuan Pendidikan SD		470,000	
	Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan Jenjang SD		35,888,130	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**		43,200,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan Jenjang SD		88,550,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
	Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan Jenjang SD		4,500,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengelolaan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik Satuan Pendidikan SD		29,188,000	
	Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan Jenjang SD		18,820,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Monev dan Pendampingan Kegiatan Simulasi, Gladi Bersih dan Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SD		50,033,600	
	Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan Jenjang SD		55,541,000	
1.01.02.2.01.0051	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**3,199,348,000**		APBD
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			

	Rehab Bangunan Gedung dan Pembuatan Jalan/Talud SDN 1 Kolonodale		150,000,000	
	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD Negeri Peonea. Dana Alokasi Khusus (DAK)		162,500,000	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD Negeri Peonea. Dana Alokasi Khusus (DAK)		805,000,000	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD NEGERI TIRONGAN ATAS. Dana Alokasi Khusus (DAK)		1,006,848,000	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SD NEGERI UERURU. Dana Alokasi Khusus (DAK)		1,075,000,000	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**6,287,577,000**		APBD
1.01.02.2.02.0014	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**			
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 6 BUNGKU UTARA SATU ATAP. Dana Alokasi Khusus (DAK)		780,000,000	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 1 MORI UTARA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		1,755,000,000	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 1 PETASIA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		1,223,642,000	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		524,418,000	
	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 2 SOYO JAYA. Dana AlokasiKhusus (DAK)		524,418,000	
	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 1 MORI UTARA		140,000,000	
	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 2 SOYO JAYA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		327,761,000	
	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 1 MORI UTARA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		325,000,000	
	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 1 PETASIA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		243,669,000	
	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		243,669,000	
	Rehabilitasi SMPN 6 Mamosalato		200,000,000	

1.01.02.2.02.0025	**Pengadaan Mebel Sekolah**	**1,350,140,000**		APBD
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel			
	Pengadaan Mobiler Satuan Pendidikan SMP di 10 Kecamatan		1,350,140,000	
1.01.02.2.02.0038	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	**292,652,450**		APBD
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Kabupaten Morowali Utara		2,711,600	
	Pelaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang SD		588,350	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			
	Pelaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang SD		1,300,000	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi TengahMorowali Utara		9,000,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Kabupaten Morowali Utara		40,200,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi TengahMorowali Utara		14,400,000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi TengahMorowali Utara		28,312,500	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10,150,000	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Kabupaten Morowali Utara		41,000,000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Tengah		25,000,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Kabupaten Morowali Utara		9,000,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi TengahMorowali Utara		31,500,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Kabupaten Morowali Utara		20,340,000	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			
	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi O2SN, FLS2N dan OSN Jenjang SMP Kabupaten Morowali Utara		59,150,000	
1.01.02.2.02.0058	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**	**282,533,400**		APBD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			

	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SMP		2,157,750	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			
	Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		1,215,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SMP		470,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		5,316,150	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SMP		43,200,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SMP		87,850,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur			
	Lembur Tim Teknis ANBK SMP Kab. Morowali Utara		8,730,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SMP		4,500,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SMP		27,030,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Kegiatan Pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan SMP		71,508,000	
	Monev dan Pendampingan Pelaksanaan Simulasi, Gladi dan Pelaksanaan ANBK SMP Tahun 2024		30,556,000	
1.01.02.2.02.0059	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**16,059,094,998**		APBD
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			
	Pembangunan dan Perencanaan SMPN 1 Petasia		6,617,999,998	
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SMPN 2 Lembo. Dana Alokasi Khusus (DAK)		1,299,980,000	
	Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP ALKHAIRAAT BUNGINTIMBE. Dana Alokasi Khusus (DAK)		227,761,000	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMPN 2 Lembo. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMPN 6 BUNGKU UTARA SATU ATAP. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP NEGERI 1 MAMOSALATO. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP NEGERI 1 MORI UTARA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP NEGERI 3 MAMOSALATO SATU ATAP. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	

	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP. Dana Alokasi Khusus (DAK)		609,560,000	
	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMP NEGERI 3 MAMOSALATO SATU ATAP. Dana Alokasi Khusus (DAK)		541,140,000	
	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP. Dana Alokasi Khusus (DAK)		541,140,000	
	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya SMP ALKHAIRAAT BUNGINTIMBE. Dana Alokasi Khusus (DAK)		290,278,090	
	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya SMPN 2 Lembo. Dana Alokasi Khusus (DAK)		559,800,000	
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMP ALKHAIRAAT BUNGINTIMBE. Dana Alokasi Khusus (DAK)		153,194,000	
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 5 Mamosalato		195,000,000	
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMP NEGERI 2 MORI UTARA. Dana Alokasi Khusus (DAK)		351,321,910	
	Pembangunan Toilet SMPN 5 Mamosalato		75,000,000	
	Pembuatan Paving Blok Halaman SMPN 1 Soyo Jaya		200,000,000	
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar			
	Pembangunan Pagar SMPN 1 Petasia		130,000,000	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			
1.01.02.2.03.0007	**Pengadaan Mebel PAUD**	**69,795,763**		APBD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Belanja Alat Tulis Kantor		46,800	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			
	BelanjaKertas dan Cover		929,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	Belanja Bahan Cetak		268,800	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	Bantuan Mobiler TK Bintangor Mukti		19,019,549	
	Pengadaan Mobiler PAUD Bahtera Kasih Kolonodale		49,531,114	
1.01.02.2.03.0011	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**	**2,985,393,800**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		876,300	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		760,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3,524,000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		300,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		17,064,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		21,600,000	

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		9,600,000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		1,500,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		76,879,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Transport peserta kegiatan		19,890,000	
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS			
	BOP PAUD Reguler		**2,795,400,000**	
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja			
	BOP PAUD Kinerja		**30,000,000**	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer			
	Printer		**8,000,000**	
1.01.02.2.03.0012	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**	**129,999,990**		APBD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2,367,840	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		845,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1,487,150	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		300,000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	Pengadaan Alat Permainan Luar (APL) Lembaga PAUD		125,000,000	
1.01.02.2.03.0013	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**	**135,633,000**		APBD
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4,022,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		31,920,000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		9,600,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10,300,000	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		6,000,000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		3,900,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1,500,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		59,891,000	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		8,500,000	
1.01.02.2.03.0016	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**	**299,484,400**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		52,037,800	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3,900,000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		27,200,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		3,000,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		145,181,000	

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		68,165,600	
1.01.02.2.03.0040	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**	**217,721,257**		APBD
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			
	Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Desa Moleono		92,840,976	
	Pembangunan Pagar TK Desa Momo		49,908,781	
	Pembuatan Pagar TK Alkhairat Kolonodale		74,971,500	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			
1.01.02.2.04.0015	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**124,266,970**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		19,299,370	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3,150,000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		13,600,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		1,500,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		62,820,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		23,897,600	
1.01.02.2.04.0016	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**505,939,280**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,471,980	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		734,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		6,664,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		18,000,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16,120,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12,948,800	
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler			
	BOP Kesetaraan (DAK Pusat Non Fisik)		435,000,000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer			
	Belanja Laptop Untuk Operasional Akreditasi Lembaga PAUD dan PNF		15,000,000	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			
1.01.03.2.01.0004	**Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**174,946,000**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		800,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		37,800,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		66,950,000	

5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		4,500,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1,800,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		63,096,000	
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			
1.01.03.2.02.0002	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**101,009,900**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		26,539,900	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		29,550,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		4,500,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16,120,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		24,300,000	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			
1.01.04.2.01.0001	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal_Kesetaraan**	**1,424,159,500**		APBD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		2,323,100	
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		1,604,800	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		1,604,800	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		1,344,800	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		1,669,800	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		1,344,800	
	Studi Tiru Untuk Guru dan Kepala Sekolah		338,000	
	Wisata Literasi Nasional		1,161,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1,014,000	
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		507,000	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		507,000	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		507,000	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		507,000	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		507,000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
	Bantuan Hibah Dana PPG		1,820,000	

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		2,238,600	
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		2,811,400	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		1,130,000	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		1,025,000	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		1,200,000	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		1,270,000	
	Studi Tiru Untuk Guru dan Kepala Sekolah		1,495,000	
	Wisata Literasi Nasional		5,550,000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		900,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		15,252,000	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		20,880,000	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		15,480,000	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		22,680,000	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		15,480,000	
	Studi Tiru Untuk Guru dan Kepala Sekolah		14,400,000	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			
	Studi Tiru Untuk Guru dan Kepala Sekolah		4,000,000	
	Wisata Literasi Nasional		11,600,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		7,550,000	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		19,550,000	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		19,550,000	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		19,550,000	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		19,550,000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
	Studi Tiru Untuk Guru dan Kepala Sekolah		5,800,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		1,500,000	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		3,000,000	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		3,000,000	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		3,000,000	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		3,000,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			

	Bimbingan Teknis Pengelola dan Keuangan dan Anggaran		21,031,000	
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Kompetensi PTK di Palu		12,090,000	
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi MKKS di Palu		15,970,000	
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi PPG di Jakarta dan Sekitarnya		94,600,000	
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi PPG di Palu		36,270,000	
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program Guru Penggerak di Palu		20,000,000	
	Dalam Rangka Mengikuti Rakor di Jakarta dan Sekitarnya		63,940,000	
	Dalam Rangka Rakor untuk Kompetensi PTK di Jakarta dan Sekitarnya		47,300,000	
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		8,500,000	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		1,200,000	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		1,200,000	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		1,200,000	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		1,200,000	
	Studi Tiru Untuk Guru dan Kepala Sekolah		214,756,000	
	Wisata Literasi Nasional di Banggai dan Sekitarnya		39,700,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahun		22,745,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Awal Tahun		22,745,000	
	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Guru		13,100,400	
	Pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)		47,846,000	
	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		32,251,000	
	Sosialisasi dan Pendampingan Program Guru Penggerak		74,062,000	
	Sosialisasi Pendidikan Profesi Guru		32,251,000	
	Wisata Literasi Nasional		2,000,000	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
	Bantuan Hibah Dana PPG 20 Guru		289,000,000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		50,000,000	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			
2.22.02.2.01.0001	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**	**99,087,000**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		25,727,000	

	Belanja Pakaian Olahraga		5,700,000	
	Kegiatan Jelajah Budaya (Study Objek Pemajuan Kebudayaan)			
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		22,500,000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		13,500,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		27,460,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4,200,000	
2.22.02.2.01.0002	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan**	**74,999,550**		APBD
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		16,319,550	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		19,400,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		39,280,000	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			
2.22.03.2.01.0001	**Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**	**349,824,450**		APBD
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		422,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1,976,950	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
	Belanja Bantuan Kelompok Sanggar Tari Wiraseni Kencana Desa Panca Makmur		50,000,000	
	Pengadaan Alat Musik Desa Beteleme		199,825,000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		27,900,000	
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah		4,200,000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		10,500,000	
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias		1,200,000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		21,000,000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			
	Tenda Pameran dan Bahan Pameran Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya		10,000,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		22,800,000	
2.22.03.2.01.0003	**Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**	**91,789,200**		APBD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,066,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		422,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1,063,700	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		20,520,000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		12,000,000	

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		4,600,000	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		4,500,000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		7,500,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		3,000,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		26,320,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10,797,000	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			
2.22.05.2.02.0002	**Pengembangan Cagar Budaya**	**314,125,000**		APBD
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,647,400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		760,500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2,997,100	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar		3,600,000	
	Kajian Zonasi CB Rock Art Tebing Batu Putih		25,920,000	
	Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya		16,500,000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga			
	Kajian Zonasi CB Rock Art Tebing Batu Putih		6,000,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			
	Kajian Zonasi CB Rock Art Tebing Batu Putih		7,200,000	
	Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar		3,600,000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			
	Kajian Zonasi CB Rock Art Tebing Batu Putih		25,900,000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			
	Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar		2,000,000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			
	Kajian Zonasi CB Rock Art Tebing Batu Putih		6,000,000	
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			
	Kajian Zonasi CB Rock Art Tebing Batu Putih		4,500,000	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
	Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar		1,500,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		79,236,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		26,764,000	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			
	Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya		100,000,000	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan dokumen strategis untuk menjadi arah dan kebijakan (satu) tahun ke depan yaitu kelanjutan dan peningkatan Pembangunan Pendidikan Tahun 2023.

Renja Tahun 2024 ini adalah implementasi dari Visi dan Misi Bupati Morowali Utara yaitu langkah atau upaya-upaya yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, membantu dan memfasilitasi Pembangunan Anak Usia Dini, membangun sarana dan prasarana pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Dengan demikian Renja ini akan dimanfaatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pembangunan bidang pendidikan oleh pihak eksekutif dan legislatif atau pihak-pihak pengguna layanan pendidikan di Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

MOHAMMAD RIDWAN Dg MALURENG
Pembina Tkt 1, IV/b
NIP. 19650329 199303 1 007

LAMPIRAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOLONODALE
Kompleks Perkantoran Bumi Nangka, Kolonodale, Kode Pos 94671
E-mail: Disdikbudmorut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Nomor :

TENTANG
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL RENJA) TAHUN 2024
DISDIKBUD KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Morowali Utara ;

b. bahwa Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dilingkup Pendidikan Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;

c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf b diatas, maka dipandang perlu Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Pendidikan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Disdikbud Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 06);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentag Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Disdikbud Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Pasal 1

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul Rencana Strategis mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran program kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
b. Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;
e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
f. Tujuan adalah suatu sebagai penjabaran atau impleentasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai dalam jangka waktu tertentu;
g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;

h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelakasanaan;
i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan, sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas dan pokok dan fungsi yang dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Disdikbud Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistimatika penulisan dari Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Disdikbud Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan Dan Tupoksi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDIKBUD TAHUN LALU
- A. Evaluasi Pelksanaan Kerja Tahun 2018
- B. Analisa Kerja Pelayanan
- C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

D. Review TerhadapRencanganAwal RKPD

E. Penetapan Usulan Program

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran PD

B. Program Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PRANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP.

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

MOHAMMAD RIDWAN Dg MALURENG
Pembina Tkt 1, IV/b
NIP. 19650329 199303 1 007

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA TAHUNAN
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pembangunan harus didasari oleh suatu perencanaan yang terarah, terukur dan transparan. Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan suatu Jabaran Program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi.

Terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Pemerintah no. 18 Tahun 2016, dan baru beroperasi pada bulan Januari Tahun 2017.

1.1.1. Pengertian Rancangan Rencana Kerja (RENJA)

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun ke depan yang memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam Membangun Daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam Pembangunan Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat tujuan dan sasaran Rancangan RENJA serta memuat program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk Kerangka Pembangunan berupa Regulasi dan Kerangka Anggaran. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan Penjabaran dari Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.1.2 Proses Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dibuat melalui penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Bidang Komunikasi Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Komunikasi dan Informatika sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Morowali Utara serta mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"

Tahun Anggaran 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara reublik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaa Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang merupakan realisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini adalah untuk menggambarkan kebijakan, rencana program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara disesuaikan dengan ketentuan pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Strategi
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun lalu dan Pencapaian Kinerja ditujukan untuk Mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan Program dan kegiatannya serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi Program/Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah memenuhi target hasil / Keluaran yang direncanakan diantaranya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator terpenuhinya hak-hak ASN, sampai pada Triwulan IV tahun 2023 mencapai target realisasi sebesar 99,50%
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Persentase Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien sampai pada Triwulan IV tahun 2023 Mencapai 92,74%
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien dalam Pelaksanaannya sampai pada triwulan IV (empat) tahun 2023 Mencapai 69,97%
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator terpeliharanya kendaraan operasional dalam Pelaksanaannya sampai pada triwulan IV (empat) tahun 2023 Mencapai 63,72%
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam pelaksanaannya sampai pada akhir Tahun 2023 mencapai 82,69%

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kabupaten / Kota Aparatur dalam pelaksanaannya sampai pada akhir Tahun 2023 mencapai 87,45%
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Kegiatan Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator Tersusunya Dokumen Statistik Sektoral. Dalam pelaksanaannya sampai pada akhir Tahun 2023 mencapai 73,25 %
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

   Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator tersedianya Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Sumber Daya Keamanan Informasi. dalam pelaksanaannya sampai pada akhir Tahun 2023 mencapai 65,77 %

Berikut Realisasi Program/Kegiatan Tahun lalu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Pelayanan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Dearah Kabupaten Morowali Utara dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informasi yang bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Morowali Utara.

Pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, kesenjangan pelayanan pada, kesenjangan pelayanan pada target ketercapaian belum dapat dijabarkan karena Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara baru dapat menerapkan Target Kinerja pada awal tahun 2023.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Seiring dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan maka ada beberapa isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih sangat terbatas.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Penerapan Aplikasi Pemerintah yang Terintegrasi serta Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
3. Masih kurangnya Tenaga Administrasi / Staf Organik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu kepada hasil kerja, akan tetapi Dinas Komunikasi dan Infromatika Daerah Kabupaten Morowali Utara belum dapat membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena masih merupakan Perangkat Daerah Baru yang dibentuk pada awal tahun 2017. Adapun hasil pengerjaan Rancangan RKPD belum dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel T-C.31

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja

Dalam rangka pengembangan Organisasi untuk mencapai tujuan maka perlu menetapkan Visi yang merupakan bagian dari perencanaan strategi. Penetapan Visi merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dip8engaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana suatu organisasi akan dibawaagar tetap eksis, inovatif dan produktif. Adapun Visi Bupati Morowali Utara, adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera".***

Untuk Mewujudkan cita-cita dan tujuan yang yang ditetapkan dalam visi tersebut diatas, maka diperlukan misi yang merupakan pernyataan dan rumusan tujuan inti. Berikut Misi Bupati Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Bertolak dari Visi dan Misi, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui target kinerja pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dan strategi yang dapat di lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam pencapaian target kinerja Pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

   Untuk mencapai hasil secara nyata, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rumusan yang lebih spesifik dari tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu maka beberapa sasaran yang yang ditetapkan sebagai berikut:
3. Perluasan dan pemerataan memperoleh layanan inter koneksi.
4. Meningkatkan Intensitas pelaksanaan desiminasi dan distribusi Informasi.

5. Meningkatkan manajemen dan pelayanan Informasi dan Komunikasi yang efisien dan efektif.
6. Mewujudkan Infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok.
7. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten di bidang Komunikasi dan informatika.
8. Berdayanya kelompok informasi masyarakat selaku mitra kerja.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Rancangan Rencana Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
   - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

BAB IV
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan Pagu dana Indikatif Kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Total Anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4.827,754,871,- (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Dana tersebut diperuntukkan bagi pencapaian Program dan Kegiatan rutin dan Kegiatan baru yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga menunjang pencapaian target sasaran yang direncanakan sesuai Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana / Pagu Indikatif dan Perkiraan Target Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terlampir:

Tabel T-C.33

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 merupakan Dokumen Strategis untuk menjadi arah dan kebijakan 1 (satu) tahun ke depan yaitu kelanjutan dan peningkatan Pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah implementasi dari Visi dan Misi Bupati Morowali Utara yaitu langkah atau upaya-upaya yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pemerataan kesempatan memperoleh layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, membangun sarana dan prasarana, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun untuk dimanfaatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika oleh pihak eksekutif dan legislatif atau pihak-pihak pengguna layanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Utara,

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI

NIP. 19691023 200212 1 005

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN (N-3)2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (N-1)2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD 2023	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (N-2) 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (N-2)2022		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2. 10.	**BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2. 16 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
2. 16 01	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100%**	**99%**	**100%**	**98%**	**100%**	**297%**	**297%**
2. 16 01	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100%**	**99%**	**100%**	**92%**	**100%**	**291%**	**291%**
2. 16 01	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100%**	**99%**	**100%**	**92%**	**100%**	**291%**	**291%**
2. 16 01	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100%**	**99%**	**100%**	**0%**	**100%**	**199%**	**199%**
2. 16 01	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100%**	**99%**	**100%**	**99%**	**100%**	**298%**	**298%**
2. 16 01	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**100%**	**99%**	**100%**	**100%**	**0%**	**199%**	**199%**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN (N-3)2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (N-1)2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD 2023	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (N-2) 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (N-2)2022		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2. 10. 01 01 02.	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**100%**	**91%**	**100%**	**99%**	**100%**	**199%**	**199%**
2. 10. 01 01 02. 10	*- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*								
2. 10. 01 01 03.	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**100%**		**100%**	**98%**	**100%**	**198%**	**198%**
2. 10. 01 01 03. 10	*- Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*								
2. 10. 01 01 05	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**100%**			**94%**	**100%**	**194%**	**194%**
2. 10. 01 01 05 03	*- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota*								

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN (N-3)2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (N-1)2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD 2023	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (N-2) 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (N-2)2022		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2. 10. 01 01 15	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							
2. 10. 01 01 15 01	*- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*		**100%**			**97%**	**100%**	**100%**	**100%**
2. 10. 01 01 15 02	*- Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota*		**100%**		**0%**	**0%**	**0%**		

Kolonodale, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Drs.IVAN RIZAL MAREOLI

NIP. 19691023 200212 1 005

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*
1	*Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan*			28	28	28	28	28	28	28	28	
2	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*			1	1	1	1	1	1	1	1	
3	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan*			1	12	1	1	1	12	1	1	
4	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorYang Disediakan*			2	12	2	2	2	12	2	2	
5	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan*			1	12	1	1	1	12	1	1	
6	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan*			1	1	2	2	1	1	2	2	
7	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan PenggandaanYang Disediakan*			1	1	2	2	1	1	2	2	
8	*Jumnlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*			1	1	2	2	1	1	2	2	
9	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara*			5	20	20	20	5	20	20	20	
10	*Jumlah Pkendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			2	3	7	7	2	3	7	7	
11	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan*			0	5	4	4	0	5	4	4	
12	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganYang Disediakan*			0	5	2	2	0	5	2	2	
13	*Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan*			0	20	5	5	0	20	5	5	
14	*Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*			49	0	49	49	49	0	49	49	
15	*Jumlah Layanan Hubungan Media*			7	7	15	15	7	7	15	15	
16	*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik Yang Meningkat Kapasitasnya*			5	5	3	3	5	5	3	3	
17	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah*			1	4	1	1	1	4	1	1	
18	*Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan*			4	4	4	4	4	4	4	4	
19	*Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Governement Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota*			1	12	1	1	1	12	1	1	
20	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah Yang Dikelola*			1	1	1	1	1	1	1	1	
21	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi*			1	12	1	1	1	12	1	1	
22	*Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik*			2	36	36	36	2	36	36	36	
23	*Jumlah Pelayanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*			10	46	1	1	10	46	1	1	
24	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*			1	1	1	1	1	1	1	1	
25	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*			1	1	3	3	1	1	3	3	
26	*Jumlah SDM Yang Meningkat Kapasitas Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi*			0	4	10	10	0	4	10	10	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*
27	*Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral Dari BPS*			0	36	36	36	0	36	36	36	
28	*Jumnlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*			1	1	5	5	1	1	5	5	
29	*Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi*			0	10	36	36	0	10	36	36	
30	*Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung Jaring Komunikasi Sandi*			0	0	36	36	0	0	36	36	

Kolonodale, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Drs.IVAN RIZAL MAREOLI

NIP. 19691023 200212 1 005

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOROWALI UTARA

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	PENTING
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3,908,994,871**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3,908,994,871**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya hak-hak ASN	100%	3,158,006,266	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya hak-hak ASN	100%	3,158,006,266	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	480,029,400	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	480,029,400	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	51,837,950	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	51,837,950	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	50,240,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	50,240,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	157,305,005	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pelayanan Publik	100%	157,305,005	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Administrasi Kepegawaian	100%	11,576,250	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Administrasi Kepegawaian	100%	11,576,250	
										-	
2	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100%**	**269,290,000**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**100%**	269,290,000	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Terwujudnya Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	100%	269,290,000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Terwujudnya Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	100%	269,290,000	
										-	
3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**100%**	**639,860,000**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**100%**	639,860,000	
	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	100%	639,860,000	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	100%	639,860,000	
										-	
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**100%**	**4,480,000**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**100%**	4,480,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	PENTING
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	4,480,000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	4,480,000	
										-	
5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**100%**	**5,130,000**	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Diskominfo**	**Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**100%**	5,130,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	950,000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	950,000	
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota		Terpantaunya Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100%	4,180,000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota		Terpantaunya Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100%	4,180,000	
TOTAL					**4,827,754,871**					**4,827,754,871**	

Kolonodale, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Drs.IVAN RIZAL MAREOLI

NIP. 19691023 200212 1 005

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**4,818,144,871**					**5,007,805,066**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**3,908,994,871**					**3,991,025,066**
2	**16**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***								**3,158,006,266**					**3,160,052,461**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	Diskominfo	100%	28 Org	100%	3,158,006,266	**DAU**		Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	28 Org	3,160,052,461
					Belanja Gaji Pokok ASN									**DAU**				
					Belanja Tunjangan Keluarga ASN									**DAU**				
					Belanja Tunjangan Jabatan ASN									**DAU**				
					Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN									**DAU**				
					Belanja Tunjangan Beras ASN									**DAU**				
					Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN									**DAU**				
					Belanja Pembulatan Gaji ASN									**DAU**				
					Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN									**DAU**				
					Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN									**DAU**				
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									**DAU**				
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa									**DAU**				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan									DAU				
2	16	01	2.08		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***								**480,029,400**	**DAU**				**527,513,400**
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskominfo	100%	1 laporan	100%	1,000,000	DAU		Jumlah laporan penyediaan jasa surat	100%	2,000,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskominfo	100%	1 laporan	100%	24,589,400	DAU		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	100%	25,589,400
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskominfo	100%	2 laporan	100%	453,840,000	DAU		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di	100%	499,224,000
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskominfo	100%	1 laporan	100%	600,000	DAU		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	100%	700,000
2	**16**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***								**51,837,950**	**DAU**				**62,837,950**
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	Diskominfo	100%	2 paket	100%	15,090,900	**DAU**		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	100%	22,090,900
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	Diskominfo	100%	1 paket	100%	17,501,050	**DAU**		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	100%	19,501,050
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	Diskominfo	100%	2 laporan	100%	19,246,000	**DAU**		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	21,246,000
2	**16**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***								**50,240,000**	**DAU**				**54,640,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Diskominfo	100%	20 Unit	100%	16,240,000	**DAU**		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	17,240,000
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Diskominfo	100%	7 Unit	100%	34,000,000	**DAU**		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan di	7 Unit	37,400,000
2	**16**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah***								**157,305,005**	**DAU**				**174,405,005**
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskominfo	100%	4 Unit	100%	90,750,173	**DAU**		Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	99,750,173
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskominfo	100%	1 Unit	100%	55,920,000	**DAU**		Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas	5 Unit	58,920,000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Diskominfo	100%	5 Unit	100%	10,634,832	**DAU**		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	25 Unit	15,734,832
2	**16**	**01**	**2.05**		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***								**11,576,250**	**DAU**				**11,576,250**
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Diskominfo	100%	49 Paket	100%	11,576,250	**DAU**		Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	49 Pasang	11,576,250
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**269,290,000**					**303,340,000**
2	**16**	**02**	**2.01**		***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***								**269,290,000**					**303,340,000**
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Hubungan Media	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat	Diskominfo	100%	15 layanan	100%	240,000,000	**DAU**		Jumlah Layanan Hubungan Media	100%	264,000,000
2	16	02	2.01	13	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah suber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat	Diskominfo	100%	3 orang	100%	7,800,000	**DAU**		Jumlah suber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	100%	10,850,000
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat	Diskominfo	100%	1 dokumen	100%	16,240,000	**DAU**		Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	100%	18,240,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi program atau kebijakan	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat	Diskominfo	100%	4 dokumen	100%	5,250,000	**DAU**		Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi program atau kebijakan	100%	10,250,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**639,860,000**					**713,440,000**
2	**16**	**03**	**2.02**		***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***								**639,860,000**					**713,440,000**
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Diskominfo	100%	1 dokumen	100%	4,180,000	**DAU**		Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	8,180,000
2	16	03	2.02	03	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Diskominfo	100%	1 dokumen	100%	16,240,000	**DAU**		Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi	100%	17,840,000
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Diskominfo	100%	1 dokumen	100%	15,400,000	**DAU**		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem	100%	18,400,000
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah perangkat Daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Diskominfo	100%	36 perangkat daerah	100%	16,240,000	**DAU**		Jumlah perangkat Daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data	100%	18,440,000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sisitim penghubung layanan pemerintah Daerah	Terpeliharanya Sistem Jaringan Pengubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	100%	1 layanan	100%	10,000,000	**DAU**		Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sisitim penghubung layanan pemerintah Daerah	100%	15,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	10	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang di kelola	Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Diskominfo	100%	1 unit	100%	577,800,000	**DAU**		Jumlah pusat data pemerintah daerah yang di kelola	100%	635,580,000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**4,480,000**					**5,780,000**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**4,480,000**					**5,780,000**
2	**20**	**02**	**2.01**		***Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota***								**4,480,000**					**5,780,000**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral	Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral	Diskominfo	100%	3 dokumen	100%	150,000	**DAU**		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan desiminasi data	100%	150,000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemda dan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Diskominfo	100%	10 orang	100%	150,000	**DAU**		Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	100%	150,000
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	100%	36 perangkat daerah	100%	4,180,000	**DAU**		Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	100%	5,480,000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**5,130,000**					**7,280,000**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**5,130,000**					**7,280,000**
2	**21**	**02**	**2.01**		***Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota***								**950,000**					**1,100,000**
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah laporan analisis kebutuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Tersedianya Kebutuhan Analisis Kebutuhan dan pengolaaan Sumber daya keamanan	Diskominfo	100%	5 laporan	100%	150,000	**DAU**		Jumlah laporan analisis kebutuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	150,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Terwujudnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	100%	36 perankat daerah	100%	800,000	**DAU**		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	100%	950,000
2	**21**	**02**	**2.02**		***Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota***								**4,180,000**	**DAU**				**6,180,000**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Terpantaunya Jaring Komunasi Sandi Pemerintah Daerah	Diskominfo	100%	36 perangkat daerah%	100%	4,180,000	**DAU**		Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	100%	6,180,000
												TOTAL	**4,827,754,871**					**5,020,865,066**

CATATAN

JUMLAH PROGRAM : 5
JUMLAH KEGIATAN : 11
JUMLAH SUB KEGIATAN : 30

KOLONODALE, 24 Februari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
Kabupaten Morowali Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

Drs.IVAN RIZAL MAREOLI
NIP. 19691023 200212 1 005

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MORI UTARA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Tahun 2024 ini.

Kami mengharapkan Rancangan Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Kecamatan Mori Utara terutama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian kami menyadari Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang objektif dengan senang hati kami harapkan guna terwujudnya Rencana Kerja yang lebih baik dimasa mendatang.

Mayumba, 14 Maret 2024

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Mayumba, 14 Maret 2024

CAMAT MORI UTARA

WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE
P E M B I N A
NIP. 19751101 201001 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanakan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari 3 tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Mori Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun sebelumnya sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Mori Utara dituntut untuk mampu membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repunlik Indonesia) Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan pada Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mori Utara Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Input Tahun 2023 berupa dana Rp. 162,005,434 - dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 162,005,434 – (100%), kegiatan ini berupa Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Alat Tulis Kantor Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor.

2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Input tahun 2023 berupa dana Rp. 4,263,000,- (100%). dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4,263,000 – (100%), Kegiatan ini berupa Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kantor.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Input tahun 2023 berupa Dana Rp. 68,143,200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 68,143,200,- (100%), kegiatan ini mencakup pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta koordinasi dan pembinaan dalam daerah. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien dengan hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan dan kelancaran tugas aparatur.

B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Input tahun 2023 berupa dana Rp. 1.530.000,00,- (100%). Kegiatan ini berupa belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat dengan hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pelayanan kantor secara tertib dan lancar.

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Input tahun 2023 berupa dana Rp. 172,487,514,- (100%). Kegiatan ini berupa belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Tenaga Administrasi, Belanja Air, Belanja Listrik, Dan Surat Kabar Majalah. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Jasa Administrasi dengan hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pelayanan kantor secara tertib dan lancar.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Input tahun 2023 berupa dana Rp. 65,868,000,- (100%). Kegiatan ini berupa belanja Makan Dan Minum Kantor. Output dari kegiatan ini adalah Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien.

C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Input tahun 2023 berupa dana Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- (100%), Kegiatan ini mencakup Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operisoanal Dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas. Output dari kegiatan ini adalah Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien.

D. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Input tahun 2023 berupa dana Rp. 42,100,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42,100,000,- (100%), Kegiatan ini mencakup Belanja Jasa Narasumber, Moderator, Panitia dan Belanja Jasa Tenaga Ahli. Output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Masyarakat Yang Diberdayakan.

Secara umum, Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksnaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Kecamatan Mori Utara

Kode	Urursan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2025	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun Lalu (2022)	Realiasi Renja SKPD Tahun ini (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Target Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
I.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terseedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	Terseedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**300%**	**300%**	**300%**	**300%**	**300%**	**300%**	**900%**	**900%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**300%**	**300%**	**300%**	**400%**	**400%**	**400%**	**1100%**	**1100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0%	0%	0%	100%	100%	100%	200%	200%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
III.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**0%**	0%	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**0%**
	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur Yang Diadakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
V.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		**0%**	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Bmbingan Teknis Perundang-undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diikuti	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
VI.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		**0%**	**0%**	**0%**	**200%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Penyusunan laporan Lakip SKPD	Meningkatnya laporan capaian kinerja SKPD Kecamatan	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Meningkatnya laporan keuangan SKPD Kecamatan	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
VII.	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Peningkatan Pembinaan Masyarakat	Persentase Pemibinaan Masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Laporan Keuangan SKPD Kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
VIII.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Meningkatnya Masyarakat Yang Diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
IX.	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**	Jumlah Dokumen Data/Profil Desa Tkt. Kecamatan	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	Pengelolaan Data Profil Desa Tingkat Kecamatan	Tersedianya Data Informasi Data Profil Desa Tkt. Kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
										-
T o t a l			**800%**							

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Mori Utara menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, Maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapaun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mori Utara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
5) Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi. Secara umum Pencapaian Kinerja SKPD Kecamatan Mori Utara dapat dilihat pada Tabel T-C, 30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Mori Utara

Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Kecamatan Mori Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realiasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				6	7	7	7	7	7	7	7	
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Terseedianya peralatan dan perlengkapan kantor			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Terseedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	peningkatan pelayanan administrasi terpadu			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan			0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Jumlah Meubeleur yang diadakan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diikuti			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Meningkatnya laporan capaian kinerja SKPD Kecamatan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Meningkatnya laporan keuangan SKPD Kecamatan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Persentase Pemibinaan Masyarakat			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana Desa dan Alokasai Dana Desa	0		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Tersedianya Data Informasi Data Profil Desa Tkt. Kecamatan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Meningkatnya Masyarakat Yang Diberdayakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Tugas dan fungsi Kantor Camat Mori Utara yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilyahan di Kecamatan Mori Utara.

Kecamatan Mori Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mori Utara antara lain :

a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Mori Utara.
b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Mori Utara juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Mori Utara dalam mencapai Visi dan Misi.

a. Organisasi Kecamatan Mori Utara merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kecamatan Mori Utara.
b. Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi dan jarak tempuh dari kecamatan ke Kabupaten memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

c. Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing SKPD membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke Kecamatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL TAHUN

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD.

Berikut dapat kita lihat review rancangan awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Mori Utara dalam tabel T-C. 31.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Kecamatan Mori Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	8	4	5	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**					
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**244.981.663,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**51.182.550,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	100%	116.501.663,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	100%	5.957.550,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kantor	100%	7.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kantor	100%	2.625.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien	100%	121.480.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien	100%	42.600.000,00	
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat			**271.201.737**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat		**100%**	**216.817.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	100%	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	0%	0,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat	Terpenuhinya Jasa Administrasi	100%	174.401.737,38	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat	Terpenuhinya Jasa Administrasi	100%	181.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	0,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	7.633.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%	92.800.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%	27.984.000,00	
3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kantor Camat			**15.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	100%	15.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**53.765.707**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					
4	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**100%**	**37.000.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Masyarak	Meningkatnya Masyarakat Yang Diberdayakan	100%	53.765.706,95	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat	Meningkatnya Masyarakat Yang Diberdayakan	100%	37.000.000,00	
	TOTAL				**584.949.107,33**					**319.999.550,00**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipasif. Keterpaduan proses perencaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah – olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan – tahapan Musrembang sendiri meliputi Musrembang tingkat RT/RW, Musrembang tingkat kelurahan, Musrembang Tingkat Kecamatan dan Musrembang tingkat Kabupaten. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan Musrembang yang telah dilakukan setiap tahunnnya diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar – benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil usulan musrembang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mori Utara.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kecamatan Mori Utara pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Morowali Utara dalam rangka penguatan otonomi daerah adalah Sebagai Berikut :

Tabel.2.1
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kecamatan Mori Utara
Tahun 2024

Nama SKPD : Kec. Mori Utara

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Tribun	Kec. Mori Utara	Terbangunnya Tribun Kecamatan Mori Utara	1 (satu) Unit	
2	Rehap Berat Kantor Camat	Kec. Mori Utara	Terselenggaranya Rehap Kantor Camat	1 (Satu) Lokal	
3	Pembuatan Tiang Bendera	Kec. Mori Utara	Terbangunya Tiang Bendera	1 (Satu) Lokal	
4	Pengadaan Mobiler Meja Biro	Kec. Mori Utara	Tersedianya Mobiler Meja Biro	1 (Satu) Lokal	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum di dalam visi RPJMN Tahun 2021 – 2026, yaitu **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur,** dan memiliki 8 misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni :

1. Merosotnya kewibawaan negara.
2. Melemahnya sendi – sendi perekonomian nasioanl.
3. Merebaknya intoleransi dan krisi kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan :

1. Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk meciptakan birokrasi yang efektif, serta pemberatasan korupsi.

2. Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan serta keberlanjutan pembangunan.
3. Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2021 – 2026, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera**".

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkansumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Mori Utara, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran

yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Mori Utara baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyrakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Morowali Utara yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat
6. Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya di kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
10. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
11. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PAD dan PBB kecamatan
13. Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan organisasi kemasyarakatan

di kecamatan

14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam lomba Desa dan kegiatan Kemasyarakatan lainnya
15. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
16. Termonitornya kegiatan raskin yang tersebar di Kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 terdiri dari :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, untuk memberikan pelayanan Administrasi perkantoran di Lingkungan Kecamatan Mori Utara untuk mewujudkan Pelayanan administrasi yang tepat waktu
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Ini bertujuan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pada masyarakat sehingga tercapai tingginya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program ini bertujuan meningkatkan kinerja dan Pelayanan di lingkungan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Untuk tahun 2022, Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatannya adalah :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatannya adalah :

- Penyediaan Jasa Surat
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatannya adalah :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

4. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Adapun usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024, dan Secara umum rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C, 32 dan Tabel T-C, 33.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Kecamatan Mori Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
I.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor Camat Mori Utara**		**285.301.330,00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kantor Camat Mori Utara**	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	133.821.330	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kantor Camat Mori Utara**	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kantor	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kantor Camat Mori Utara**	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien	141.480.000	
II.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Mori Utara**		**302.213.582**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kantor Camat Mori Utara**	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kantor Camat Mori Utara**	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kantor Camat Mori Utara**	Terpenuhinya Jasa Administrasi	195.413.582,48	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kantor Camat Mori Utara**	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	98.800.000,00	
III.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor Camat Mori Utara**		**20.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	**Kantor Camat Mori Utara**	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	20.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kantor Camat Mori Utara**			
IV.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kantor Camat Mori Utara**		**55.916.335,23**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kantor Camat Mori Utara**	Meningkatnya Masyarakat Yang Diberdayakan	55.916.335,23	
				Rp663.431.248	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KECAMATAN MORI UTARA, KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Mori Utara

Kode	Urursan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Kantor Camat Mori Utara**	**100%**	**285.301.330,00**	**APBD**		**100%**	**320.301.330**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	**Kantor Camat Mori Utara**	**100%**	133.821.330,00			100%	143.821.330,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kantor	**Kantor Camat Mori Utara**	**100%**	10.000.000,00			100%	15.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien	**Kantor Camat Mori Utara**	**100%**	141.480.000,00			100%	161.480.000
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Kantor Camat Mori Utara**	**100%**	**302.213.582**			**100%**	**332.114.871**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	**Kantor Camat Mori Utara**	100%	8.000.000,00			100%	13.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kantor Camat Mori Utara**	0%				0%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Administrasi	**Kantor Camat Mori Utara**	100%	195.413.582,48			100%	210.314.871
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	**Kantor Camat Mori Utara**	100%	98.800.000,00			100%	108.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kantor Camat Mori Utara**	**100%**	**20.000.000,00**			**100%**	**25.000.000**
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	**Kantor Camat Mori Utara**	100%	20.000.000,00			100%	25.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Kantor Camat Mori Utara**	**100%**	**55.916.335,23**			**100%**	**58.152.988,64**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Masyarakat Yang Diberdayakan	**Kantor Camat Mori Utara**	100%	55.916.335,23			100%	58.152.989
T o t a l					**663.431.248**				**735.569.189**

BAB V
P E N U T U P

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Mori Utara di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Mori Utara sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Mori Utara yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mori Utara demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Mori Utara telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Mayumba, 14 Maret 2024

CAMAT MORI UTARA

WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE
P E M B I N A
NIP. 19751101 201001 1 001

KEPUTUSAN
CAMAT MORI TARA
Nomor : 050/02/Renja-CMU/I/2024

TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)
KECAMATAN MORI UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024

CAMAT MORI UTARA

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Mori Utara ;

b. bahwa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;

c. bahwa dalam rangka efektifitas danefisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf b diatas, maka dipandang perlu RENJA Kecamatan Mori Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat Mori Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas Kolusi, Korups idan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2035;
18. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Pasal 1

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul Rencana Strategis mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran program kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
b. Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu

tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;
e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
f. Tujuan adalah suatu sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai dalam jangka waktu tertentu;
g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakatioleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelakasanaan;
i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan, sasaran yang sama dalam mewujudka nvisi dan misi yang telah ditetapkan;
j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas dan pokok dan fungsi yang dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistimatika penulisan dari Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud dan Tujuan

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.4 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.5 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.6 Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale

Pada tanggal : 14 Maret 2024

Mayumba, 14 Maret 2024

CAMAT MORI UTARA

WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE

P E M B I N A

NIP. 19751101 201001 1 001

RANCANGAN AKHIR RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH.

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Alamat: Jalan Bumi Nangka Nomor 03 Kolonodale

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 184.4/787.b/DPUPRPKPD/VII/2023

TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAHKABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara;

b. Bahwa Rencana Kerja sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dilingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;

c. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf b diatas, maka dipandang perlu Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005- 2025.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangk menegah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 1

a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul Rencana Strategis mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran program kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;

b. Rencana Kerja adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. Perangkat Daerah Adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;

e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;

f. Tujuan adalah suatu sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai dalam jangka waktu tertentu;

g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;

h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelakasanaan;

i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan, sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;

j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas dan pokok dan fungsi yang dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistimatika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviuw terhadap Rencana kerja RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepapkan di : Kolonodale Pada
Tanggal : 03 Juli 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Morowali Utara,

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
NIP. 19731203 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Atas Berkat dan Rahmat-Nya Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah TA. 2024 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 dan isu-isu strategis rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kolonodale, 03 Juli 2023

Kepala Dinas PUPRPKPD
Kabupaten Morowali Utara,

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

I.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja RKPD 11

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 13

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 13

3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD 14

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15

BAB V PENUTUP 211

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja 211

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 21

5.3 Rencana Tindak Lanjut 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 didasarkan pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 dan isu-isu strategis rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Pemerintah Daerah (Rankhir RKPD) Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repunlik Indonesia) Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Utara Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rancangan Akhir (RANKHIR) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 dan isu-isu strategis rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah:

a. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 dan isu-isu strategis rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025.

b. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adildan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi.
c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKATDAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviuw terhadap Rancangan Akhir Renja RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penetapan sejumlah **Rp126.356.974.495,**- (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Untuk APBD Perubahan sejumlah **Rp266.279.169.667,-** (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian disajikanpada tabel 2.1.

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		SebelumPerubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	**PENDAPATAN**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4. 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4. 1. 02	Hasil Retribusi Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	**126.356.974.495,00**	**266.279.169.667,00**	**139.922.195.172,00**	**110,74**
5. 1	**BELANJA OPERASI**	59.558.869.138,00	63.128.340.433,00	3.569.471.295,00	5,99
5. 1. 1	Belanja Pegawai	7.875.045.940,00	7.677.170.221,00	(197.875.719,00)	(2,51)
5. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	51.683.823.198,00	55.451.170.212,00	3.767.347.014,00	7,29
5. 2	**BELANJA MODAL**	**66.798.105.357,00**	203.150.829.234,00	136.352.723.877,00	204,13
5. 2. 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.782.777,00	593.648.456,00	116.865.879,00	24,51
5. 2. 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.947.123.665,00	11.693.307.391,00	9.746.183.726,00	500,54
5. 2. 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	64.374.198.915,00	190.863.873.387,00	126.489.674.472,00	196,49
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.326.974.495,00)	(266.249.169.667,00)	(139.922.195.172,00)	110,76

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 13 Program dan 21 kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2. Rekap Kegiatan dan Program T.A 2022 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5	100
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2	100
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	100
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	100
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	100
6	Program Pengembangan Permukiman	1	100
7	Program Penataan Bangunan Gedung	1	100
8	Program Penyelenggaraan Jalan	1	100
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2	100
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	100

11	Program Kawasan Permukiman	1	100
12	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	100
13	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	100

Tingkat Penyerapan Dana untuk seluruh program belanja langsung (BL) per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 213.610.235.608,-** (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sepeuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) atau **80,22%** terhadap total nilai yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2022 adalah **88%.** Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rekap Realisasi fisik dan keuangan T.A 2022 yang dikelola

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.277.653.935	Rp 10.793.776.567	95,71%	95,53%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 16.091.350.692	Rp 10.439.210.118	64,87%	98,33%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 10.323.879.843	Rp 9.321.381.203	90,29%	94,50%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 5.361.560.000	Rp 4.853.560.000	90,53%	98%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 3.019.709.329	Rp 3.017.826.300	99,94%	99%

Program Pengembangan Permukiman	Rp 8.290.448.999	Rp 8.101.335.799	97,72%	49,5%
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 14.385.596.406	Rp 1.954.854.200	13,59%	69%
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 185.922.276.486	Rp 153.872.530.542	82,76%	93,38%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 132.927.000	Rp 115.709.662	87,05%	75,5%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.392.552.654	Rp 2.219.372.477	92,76%	90,33%
Program Kawasan Permukiman	Rp 250.000.000	Rp 244.895.126	97,96%	93%
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 8.723.314.323	Rp 8.568.143.614	98,22%	89%
Program Peningkatan Prasarana Dan Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 107.900.000	Rp 107.640.000	99,76%	100%

Adapun indikator kinerja/keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk 21 kegiatan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah;
2. Tersedianya prasarana dan sarana air baku;
3. Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Bersih;
4. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah;
5. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Tersedianya Pengembangan Permukiman;
7. Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung;
8. Terbangunnya Jaringan Transportasi Darat;
9. Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Terwujudnya Keterpaduan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
11. Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman;

12. Terbangunnya Perumahan dan Permukiman Sesuai Standar Minimum;
13. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi dan hasil pelaksanaan Rancangan Akhir Renja tahun 2021 dan Rencana Capaian Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. T-C.29.

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH S/D TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	**URUSAN WAJIB**									
1. 03.	**BIDANG URUSAN PELAYANAN DASAR**									
1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	96,42 %	100 %	95 %	95,00%			
1 03 01 2.01	**- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			100 %						
1 03 01 2.01 07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %						
1 03 01 2.02	***- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu***	100 %	87 %	100 %	84 %	84,00%	100 %		
1 03 01 2.02 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	100 %	87 %	100 %	84 %	84,00%	100 %		
1 03 01 2.05	***- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Penigkatan Sumber Daya Aparatur***	100 %	95,5 %	100 %	100 %	100,00%			
1 03 01 2.05 02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100 %						
1 03 1 2.05 09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
1 03 01 2.05 11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	91 %	100 %	100 %	100,00%	15 orang		
1 03 01 2.06	***- Administrasi umum perangkat daerah***	***Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien***	100 %	97 %	100 %	98 %	98,00%	100 %		
1 03 01 2.06 02	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	85 %	100 %	96 %	96,00%	100 %		
1 03 01 2.06 03	- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	100 %	100 %	98 %	98,00%	100 %		
1 03 01 2.06 04	- Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100 %						
1 03 01 2.06 05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 01 2.06 09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 01 2.07	***- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah***	***Menigkatnya Kinerja Pelayanan Publik***	100 %							
1 03 01 2.07 02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	2 Unit							
1 03 01 2.07 03	- Pengadaan Alat Besar	Jumlah kendaraan Alat Besar yang diadakan	2 Unit							
1 03 01 2.08	***- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik***	100 %	99 %	100 %	95 %	95,00%	100 %		
1 03 01 2.08 01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 %						
1 03 01 2.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	100 %	100 %	99 %	99,00%	100 %		
1 .03 01 2.08 03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 01 2.08 04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	97 %	100 %	88 %	88,00%	100 %		
1 03 1 2.09	***- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien***	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 01 2.09 01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 01 2.09 02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 01 2.09 03	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100 %		100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 01 2.09 06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai**	78,5 %	98,5 %	100 %	98,67 %	98,67%	75,5 %		
		Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	52 %	92,7 %	100 %	98 %	98,00%	47 %		
1 03 02 2.01	***- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai***	78,5 %	98,5 %	100 %	98,67 %	98,67%	75,5 %		
1 03 02 2.01 **05**	- Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan Yang di Bangun	1,0 unit							
1 03 02 2.01 09	- Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1623,20 m	98 %	100 %	97 %	97,00%	1608 unit		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 02 2.01 10	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1023,197 m		100 %	98 %	98,00%	975,158 m		
1 03 02 2.01 16	- Pembangunan Check Dam	Jumlah Check DAM yang terbangun	1 unit					1 unit		
1 03 02 2.01 17	- Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	369,11 m		100 %	100 %	100,00%	351,54 m		
1 03 02 2.01 18	- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2688,1 m					2560 m		
1 03 02 2.01 34	- Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang ditinggikan	85,4 m							
1 03 02 2.01 46	- Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	95327,15 m	99 %	100 %	100 %	100,00%	92671,7 m		
1 03 02 2.01 53	- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	85,4 m		100 %	99 %	99,00%	81 m		
1 03 02 2.02	- ***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik***	52,00 %	92,7 %	100 %	98 %	98,00%	47,00 %		
1 03 02 2.02 02	- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2 unit	88 %	100 %	93 %	93,00%	2 unit		
1 03 02 2.02 08	- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	192,35 m	91 %				183,2 m		
1 03 02 2.02 09	- PeningkatanBendungIrigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	85,4 m		100 %	100 %	100,00%	81 m		
1 03 02 2.02 14	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3697,05 m		100 %	99 %	99,00%	3473,5 m		
1 03 02 2.02 15	- Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 unit					1 unit		
1 03 2 2.02 21	- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	99 %	100 %	100 %	100,00%	1 unit		
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten**	61 %	74 %	100 %	94,50 %	94,50%	59 %		
1 03 03 2.01	- ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***	***Tersediannya Sarana Dan prasarana air minum***	1919 unit	74 %	100 %	94,50 %	94,50%	1619 unit		
1 03 03 2.01 04	- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1052 unit	74 %	100 %	99,00 %	99,00%	994 unit		
1 03 03 2.01 06	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	287 unit					206 unit		
1 03 03 2.01 15	- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	3 unit ikk					3 unit IKK		
1 03 03 2.01 19	- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	580 unit		100 %	90,00 %	90,00%	419 unit		
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	50,45 %	99 %	100 %	98,00 %	98,00%	45,37 %		
1 03 05 2.01	- ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat***	50,45 %	99 %	100 %	98,00 %	98,00%	45,37 %		
1 03 05 2.01 06	- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	271 unit		100 %	98,00 %	98,00%	244 unit		
1 03 05 2.01 11	- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		99 %						
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik**	69 %	91 %	100 %	99 %	99,00%	67 %		
1 03 06 2.01	- ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat***	69 %	91 %	100 %	99 %	99,00%	67 %		
1 03 06 2.01 05	- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		91 %						
1 03 06 2.01 12	- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	952 m		100 %	99 %	99,00%	786 m		
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pemukiman**	53 %	99,5 %	100 %	49 %	49,00%	51 %		
1 03 07 2.01	- ***Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota***	***tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur untuk masyarakat***	53 %	99,5 %	100 %	49 %	49,00%	51 %		
1 03 07 2.01 01	- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	38 Keg	100 %	100 %	49 %	49,00%	36 Keg		
1 03 07 2.01 02	- Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		99 %						

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Banguan Gedung Yang Layak Fungsi**	67 %	84 %	100 %	69 %	69,00%	65 %		
1 03 08 2.01	- ***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***	***tersedianya sarana dan prasarana kantor***	67 %	84 %	100 %	69 %	69,00%	65 %		
1 03 08 2.01 02	- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	84 %	100 %	81 %	81,00%	2 unit		
1 03 08 2.01 13	- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	7 unit		100 %	100 %	100,00%	6 unit		
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN**	**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap**	63,37 %	93,25 %	100 %	93,38 %	93,38%	63,06 %		
1 03 10 2.01	- ***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	***Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan***	63,37 %	93,25 %	100 %	93,38 %	93,38%	63,06 %		
1 03 10 2.01 01	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	25 Dokumen		100 %	99 %	99,00%	24 Dokumen		
1 03 10 2.01 05	- Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	16,75 KM	95 %	100 %	100 %	100,00%	17,25 KM		
1 03 10 2.01 06	- Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	0 %	87 %	100 %	94 %	94,00%	0 %		
1 03 10 2.01 08	- Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	13,30 KM					12,01 KM		
1 03 10 2.01 09	- Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		97 %						
1 03 10 2.01 10	- Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1,2 KM		100 %	90 %	90,00%	1 KM		
1 03 10 2.01 11	- Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,50 KM		100 %	100 %	100,00%	2,50 KM		
1 03 10 2.01 12	- Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	60,53 M	94 %	100 %	95 %	95,00%	65,79 M		
1 03 10 2.01 16	- Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	47,06 M					58,82 M		
1 03 10 2.01 19	- Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	66,67 M2		100 %	70 %	70,00%	66,67 M2		
1 03 10 2.01 20	- Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	50 M2		100 %	90 %	90,00%	50 M2		
1 03 10 2.01 23	- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen Pengawasan Ruas Jalan dan Jembatan	24 dokumen							
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi**	50,12 %	79 %	100 %	75,5 %	75,50%	45,31 %		
1 03 11 2.01	- ***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	***tersedianya tenaga terampil konstruksi***	100 %		100 %	79 %	79,00%	100 %		
1 03 11 2.01 04	- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	27 Orang		100 %	79 %	79,00%	27 Orang		
1 03 11 2.02	- ***Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***tersedianya dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan***	100 %	79 %	100 %	100 %	100,00%	100 %		
1 03 11 2.02 07	- Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	2 Dokumen	79 %	100 %	100 %	100,00%	2 Dokumen		
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang**	70 %	85 %	100 %	90,33 %	90,33%	55 %		
1 03 12 2.01	- ***Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota***	***Tersedianya dokumen Teknis RTRW Kab. Morowali Utara***	70 %	85 %	100 %	90,33 %	90,33%	65 %		
1 03 12 2.01 01	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	85 %	100 %	71 %	71,00%	1 Dokumen		
1 03 12 2.01 02	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Perkada		100 %	100 %	100,00%	2 Perkada		
1 03 12 2.01 04	- Sosialisasi Kebijakan danPeraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	30 Orang		100 %	100 %	100,00%	30 Orang		
1 03 12 2.02	- ***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang***	70 %		100 %	100 %	100,00%	65 %		
1 03 12 2.02 01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		100 %	100 %	100,00%	1 Dokumen		
1 03 12 2.04	- ***Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang***	70 %		100 %	99 %	99,00%	65 %		
1 03 12 2.04 04	- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		100 %	99 %	99,00%	1 Dokumen		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh**	15 %		100 %	93,00 %	93,00%	10 %		
1 04 03 2.01	- ***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***	***Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***	15 %		100 %	93,00 %	93,00%	10 %		
1 04 03 2.01 02	- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	5 Dokumen		100 %	93,00 %	93,00%	4 Dokumen		
1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	50,19 %	99 %	100 %	89,00 %	89,00%	45,52 %		
1 04 04 2.01	- ***Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota***	***Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat***	50,19 %	99 %	100 %	89,00 %	89,00%	45,52 %		
1 04 04 2.01 01	- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	121 unit	99 %	100 %	89,00 %	89,00%	104 Dokumen		
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan**	23 %		100 %	100 %	100,00%	18 %		
1 04 05 2.01	- ***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	***terbangunnya Panjang Jalan***	23 %		100 %	100 %	100,00%	18 %		
1 04 05 2.01 02	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6,6 KM		100 %	100 %	100,00%	4,7 KM		
1 04 06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman**	15 %					10 %		
1 04 06 2.01	- ***Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil***	***Tersedianya Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan***	15 %					10 %		
1 04 06 2.01 01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	44 Dokumen					42 Dokumen		

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah KabupatenMorowali Utara telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain :

1. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan-kegiatan Konsultansi seperti Perencanaan maupun Studi Kelayakan;
2. Masih kurangnya pemahaman stakholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan;

Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimum kami sajikan dalam tabel T-C.30.

TABEL T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Kabupaten Morowali Utara

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100 %		100 %	100 %	96,42 %	95 %			
2	***presentase lancarnya administrasi perkantor***							100 %				
3	presentase lancarnya administrasi perkantor							100 %				
4	***Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu***			100 %	100 %	100 %	100 %	87 %	84 %			
5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN			100 %	100 %	100 %	100 %	87 %	84 %			
6	***Penigkatan Sumber Daya Aparatur***			100 %		100 %	100 %	95,5 %	100 %			
7	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							100 %				
8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											
9	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100 %	15 orang	16 orang	16 orang	91 %	100 %			
10	***Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien***			100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	98 %			
11	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	100 %	100 %	100 %	85 %	96 %			
12	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %			
13	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							100 %				
14	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
15	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
16	***Menigkatnya Kinerja Pelayanan Publik***					100 %	100 %					
17	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan					2 Unit	3 Unit					
18	Jumlah kendaraan Alat Besar yang diadakan					2 Unit	1 Unit					
19	***Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik***			100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	95 %			
20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							100 %				
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %			
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %			
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	88 %			
24	***Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien***			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
25	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
26	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %			
27	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %			
28	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra								Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023	2024	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12	13
29	**persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai**			100	%	75,5	%	78,5	%	81,5	%	98,5	%	98,67	%			
30	***Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik***			100	%	47	%	52	%	57	%	92,7	%	98	%			
31	***persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai***			100	%	75,5	%	78,5	%	81,5	%	98,5	%	98,67	%			
32	Jumlah Bendungan yang dibangun							1,0	unit	2	unit							
33	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			100	%	1608	unit	1623,20	m	1639,614	m	98	%	97	%			
34	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			100	%	975,158	m	1023,197	m	1075,112	m			98	%			
35	Panjang Check DAM yang terbangun							1	unit	2	unit							
36	Panjang Breakwater yang Dibangun			100	%	351,54	m	369,11	m	387,57	m			100	%			
37	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun					2560	m	2688,1	m	2822,48	m							
38	Panjang tanggul sungai yang ditinggikan							85,4	m	89,67	m							
39	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			100	%	92671,7	m	95327,15	m	96176,25	m	99	%	100	%			
40	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara			100	%	81	m	85,4	m	89,67	m			99	%			
41	***Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik***			100	%	47,00	%	52,00	%	57	%	92,7	%	98	%			
42	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			100	%	2	unit	2	unit	2	unit	88	%	93	%			
43	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					183,2	m	192,35	m	201,97	m	91	%					
44	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan			100	%	81	m	85,4	m	89,67	m			100	%			
45	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			100	%	3473,5	m	3697,05	m	3748,87	m			99	%			
46	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi					1	unit	1	unit	1	unit							
47	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			100	%	1	unit	1	unit	1	unit	99	%	100	%			
48	**Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten**			100	%	59	%	61	%	63	%	74	%	94,50	%			
49	***Tersediannya Sarana Dan prasarana air minum***			100	%	1619	unit	1919	unit	1913	unit	74	%	94,50	%			
50	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			100	%	994	unit	1052	unit	943	unit	74	%	99,00	%			
51	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum					206	unit	287	unit	297	unit							
52	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan					3	unit IKK	3	unit ikk	3	unit IKK							
53	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum			100	%	419	unit	580	unit	673	unit			90,00	%			
54	**Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik**			100	%	45,37	%	50,45	%	55,37	%	99	%	98,00	%			
55	***tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat***			100	%	45,37	%	50,45	%	55,37	%	99	%	98,00	%			
56	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik			100	%	244	unit	271	unit	300	unit			98,00	%			
57	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman											99	%					
58	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik**			100	%	67,00	%	69,00	%	71	%	91	%	99,00	%			
59	***tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat***			100	%	67	%	69	%	71	%	91	%	99	%			
60	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun											91	%					
61	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			100	%	786	m	952	m	1149	m			99	%			
62	**Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pemukiman**			100	%	51,00	%	53,00	%	55	%	99,5	%	49,00	%			
63	***tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur untuk masyarakat***			100	%	51	%	53	%	55	%	99,5	%	49	%			

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			100 %	36 Keg	38 Keg	40 Keg	100 %	49 %			
65	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							99 %				
66	**Persentase Banguan Gedung Yang Layak Fungsi**			100 %	65,00 %	67,00 %	69 %	84 %	69,00 %			
67	***tersedianya sarana dan prasarana kantor***			100 %	65 %	67 %	69 %	84 %	69 %			
68	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			100 %	2 unit	2 unit	2 unit	84 %	81 %			
69	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan			100 %	6 unit	7 unit	7 unit		100 %			
70	**Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap**			100 %	63,06 %	63,37 %	67,69 %	93,25 %	93,38 %			
71	***Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan***			100 %	63,06 %	63,37 %	67,69 %	93,25 %	93,38 %			
72	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			100 %	24 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen		99 %			
73	Panjang Jalan yang Dibangun			100 %	17,25 KM	16,75 KM	16,75 KM	95 %	100 %			
74	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar			100 %	0 %	0 %	0 %	87 %	94 %			
75	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				12,01 KM	13,30 KM	13,36 %					
76	Panjang Jalan yang Direhabilitasi							97 %				
77	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			100 %	1 KM	1,2 KM	1,2 KM		90 %			
78	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			100 %	2,50 KM	2,50 KM	3 KM		100 %			
79	Panjang Jembatan yang Dibangun			100 %	65,79 M	60,53 M	60,53 M	94 %	95 %			
80	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				58,82 M	47,06 M	47,06 M					
81	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			100 %	66,67 M2	66,67 M2	66,67 M2		70 %			
82	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			100 %	50 M2	50 M2	50 M2		90 %			
83	Jumlah dokumen Pengawasan Ruas Jalan dan Jembatan					24 dokumen	24 Dokumen					
84	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi**			100 %	45,31 %	50,12 %	55,8 %	79 %	75,50 %			
85	***tersedianya tenaga terampil konstruksi***			100 %	100 %	100 %	100 %		79 %			
86	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan			100 %	27 Orang	27 Orang	27 orang		79 %			
87	***tersedianya dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan***			100 %	100 %	100 %	100 %	79 %	100 %			
88	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			100 %	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	79 %	100 %			
89	**Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang**			100 %	55,00 %	70,00 %	85 %	85 %	90,33 %			
90	***Tersedianya dokumen Teknis RTRW Kab. Morowali Utara***			100 %	65 %	70 %	85 %	85 %	90,33 %			
91	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	85 %	71 %			
92	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			100 %	2 Perkada	2 Perkada	1 perkada		100 %			
93	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			100 %	30 Orang	30 Orang	30 Orang		100 %			
94	***Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang***			100 %	65 %	70 %	85 %		100 %			
95	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen		100 %			
96	***Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang***			100 %	65 %	70 %	85 %		99 %			

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra								Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*	*12*	*13*
97	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			100	%	1	Dokumen	1	Dokumen	1	dokumen			99	%			
98	**Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh**			100	%	10,00	%	15,00	%	20	%			93,00	%			
99	***Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***			100	%	10	%	15	%	20	%			93,00	%			
100	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan			100	%	4	Dokumen	5	Dokumen	7	dokumen			93,00	%			
101	**Persentase Rumah Layak Huni**			100	%	45,52	%	50,19	%	55,89	%	99	%	89,00	%			
102	***Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat***			100	%	45,52	%	50,19	%	55,89	%	99	%	89,00	%			
103	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			100	%	104	Dokumen	121	unit	140	unit	99	%	89,00	%			
104	**Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan**			100	%	18,00	%	23,00	%	28	%			100,00	%			
105	***terbangunnya Panjang Jalan***			100	%	18	%	23	%	28	%			100	%			
106	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			100	%	4,7	KM	6,6	KM	10	KM			100	%			
107	**Persentase Ketersediaan Dokumen Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman**					10,00	%	15,00	%	20	%							
108	***Tersedianya Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan***					10	%	15	%	20	%							
109	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					42	Dokumen	44	Dokumen	48	Dokumen							

2.3 Isu-isu penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum optimal Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Perundang undangan;
2. Terbatasnya sumber daya manusia terutama secara kualitas dan kuantitas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana misalkan ketersediaan alat-alat berat dan mobil operasional penunjang kegiatan kedinasan dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani;
4. Terbatasnya Dana Yang sesuai dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada masing-masing unit kerja;
5. Masih banyaknya pekerjaan yang berpusat pada beberapa orang diluar tugas dan tanggung jawabnya sehingga dirasakan tupoksi jabatan belum berjalan sebagaimana mestinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Renja RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan. Untuk lebih jelas Tentang Rancangan Akhir Renja RKPD dan Hasil

Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel T-C.31. Tentang Review Terhadap Rancangan Akhir Renja RKPD tahun 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2024 juga penting untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyrakat khususnya di Kabupaten Morowali Utara. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif. Adapun usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat tersebut diperoleh dari hasil MUSRENBANG tingkat kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel T-C.32.

Tabel T-C. 31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Kabupaten Morowali Utara

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.164.077.801	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.164.077.801	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	68 orang	8.091.655.635	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	68 orang	8.091.655.635	
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan	83 Orang/Bulan	8.091.655.635	**Penyediaan Gaji danTunjangan ASN**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan	69 Orang/Bulan	8.089.155.635	
	Belanja Gaji Pokok PNS					Belanja Gaji Pokok PNS					
	Tunjangan Keluarga					Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Tunjangan Struktural					Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Tunjangan Fungsional PNS					Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS					Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Pembulatan Gaji PNS					Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Pegawai					Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					
	insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Penigkatan Sumber Daya Aparatur	100%	164.570.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Penigkatan Sumber Daya Aparatur	100%	164.570.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DKI JAKARTA dan daerah lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	15 orang	164.570.000	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**	DKI JAKARTA dan daerah lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	16 Orang	149.105.635	
	Bimbingan Teknis Ke Pu - an					Bimbingan Teknis Ke Pu - an					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	578.560.519	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	100%	578.560.519	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	151.322.340	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	27 Paket	201.322.340	
	Belanja Alat Tulis Kantor					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Belanja Kertas dan Cover Kegiatan Kantor					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	Belanja Materai					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Belanja Bahan Komputer					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Belanja Meja Kerja					Belanja Meja Esselon III					
	Belanja Kursi Kerja					Belanja Meja Staf 1/2 Biro					
	Belanja Lemari Arsip					Pengadaan Drone					
	Belanja Personal Komputer					Pengadaan Kursi Kerja					
	Belanja Perlatan Komputer					Pengadaan Laptop					
						Pengadaan Lemari Arsip/Lemari Filling Cabinet - C119					
						Pengadaan Printer					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	34.084.629	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	6 Paket	34.084.629	
	Belanja Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					
	Belanja Peralatan Rumah Tangga					Pengadaan AC					
						Pengadaan Dispenser					
						Pengadaan Kain Gorden					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	77.153.550	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.956.208	
	Belanja Cetak Penggandaan					Belanja Cetak Penggandaan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	316.000.000	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	236.000.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Luar Daerah					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi					
	Rapat - Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah					Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Menigkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	3.030.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Menigkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	3.030.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	80.000.000	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
	Belanja Kendaraan Dinas Atau Lapangan Roda 2					Belanja Kendaraan Dinas Atau Lapangan Roda 2					
	Pengadaan Alat Besar	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 unit	2.950.000.000	**Pengadaan Alat Besar**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	-	
	Belanja Alat Besar/Berat					Belanja Alat Besar/Berat					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	3.084.891.647	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	100%	3.084.891.647	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.191.647	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	159.250.000	
	Belanja Tagihan Listrik					Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					
	Belanja Langganan Koran					Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					
	Belanja Berlangganan WIFI/Internet/TV Kabel					Belanja Tagihan Air					
						Belanja Tagihan Listrik					
	Penyedia Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0%	-	**Penyedia Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.904.700.000	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	68 Laporan	2.588.200.000	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Belanja Gaji P3K					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Belanja Lembur					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Makan Minum Kantor					Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran/Penerima					
	Honorarium Gaji P3K/Non PNS					Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerima					
	Honorarium Operator Aplikasi					Honorarium Jasa Tenaga Supir					
	Honorarium Penilik Bangunan Gedung					Honorarium Operator Aplikasi					
	Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung					Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung					Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)					
	Honorarium Jasa Tenaga Supir					Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
	Belanja Lembur PNS dan Non PNS					Honorarium Pengguna Anggaran					
						Honorarium Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah					
						Honorarium Penilik Bangunan Gedung					
						Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung					
						Honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	100%	214.400.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien	100%	214.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ynag Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100.000.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ynag Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	62.500.000	
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dinas PUPRPKPD**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0%	-	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0%	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	45.000.000	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	30.000.000	
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	69.400.000	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	37.340.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Alat Kantor Lainnya					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	78,5%	12.916.058.282	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	78,5%	7.360.000.000	
			Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	52%	8.544.800.796			Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	52%	4.840.000.000	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	75,5%		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	78,5%	4.840.000.000	
	Pembangunan Bendungan	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan		**Pembangunan Bendungan**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendung	405.000.000	
	Pengadaan Alat Tulis Perlengkapan Kantor					Pembangunan Bendungan Desa Tiwaa,Dusun 1 Rt 01,Kec. Mori Utara					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey dan Monitoring					Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring					
	Pembangunan Saluran Pembuang Irigasi Desa Tiwaa										
	Pembangunan Tanggul Sungai	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1,62 KM	2.482.058.000	**Pembangunan Tanggul Sungai**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 Unit	-	
	Makan Minum Rapat										
	Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring										
	Pembangunan Tangglu Sungai Dusun 2 Desa Ensa										
	Pembangunan Tanggul Desa Girimulya Dusun 1 dan 2										
	Pembangunan Tanggul Sungai Desa Keuno										
	Pembangunan Tanggul Sungai Desa Lemboroma										
	Pembangunan Tanggul Sungai Desa Sampalowo										
	Pembangunan Tanggul Sungai Jl. Cempaka Dusun1 Desa Beteleme										
	Pembangunan Tanggul Sungai Lembolioka										
	Pembangunan Tanggul Sungai Tansi										
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,02 KM	906.200.000	**Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0 Km	-	
	Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring										
	Pemasangan Bronjong Desa Tamainusi										
	Pembangunan Bronjong Desa Uemasi										
	Pembangunan Bronjong Desa Winagabino										
	Pembangunan *Check Dam*	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Check DAM yang Dibangun	1 unit	354.600.000	**Pembangunan *Check Dam***	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Km	-	
	Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring										
	Pembangunan Check DAM Sungai Andolia										
	Pembangunan *Breakwater*	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,36 KM	134.400.000	**Pembangunan *Breakwater***	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Breakwater yang Dibangun	1,02 KM	355.000.000	
	Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka survey dan Monitoring					Pembangunan Pemecah Ombak Desa Baturube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara					
	Pembangunan Breakwater Desa Siliti					Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey. Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan					
	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2,68 KM	1.622.800.000	**Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,4 KM	365.000.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring					Pembangunan Tanggul Pantai Dusun II, Ueruru, Kec. Bungku Utara					
	Pembangunan Tanggul Pantai Desa Tokonanaka					Pembangunan Tanggul Pantai Pantai Dusun 4, Desa Ganda-Ganda, Kec. Petasia					
	Pembangunan Tanggul Pantai Desa Ungkea					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan					
	Peningkatan Tanggul Sungai	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,08KM	139.964.898	**Peningkatan Tanggul Sungai**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 Unit	-	
	Peningkatan Tanggul Sungai Bahontula										
	Normalisasi/Restorasi Sungai	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	95,32KM	2.036.000.000	**Normalisasi/Restorasi Sungai**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,75 KM	425.000.000	
	Normalisasi Sungai Desa Menyoe					Lembur					
	Normalisasi Sungai Desa Tokala Atas Belakang Kuburan					Normalisasi Sungai dusun 01, Kab. Morowali Utara, Momo, Kec. Mamosalato					
	Normalisasi Sungai Korowonu Desa Korololama					Normalisasi Sungai Dusun 1 dan 2, Kumpi, Kec. Lembo					
	Normalisasi Sungai Lembolioka					Normalisasi Sungai Desa Taliwan, Mori Utara					
	Normalisasi Sungai Sadinopi Desa Tiu					Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan					
	Perencanaan Revitalisasi Sungai Bahontula										
	Perencanaan Revitalisasi Sungai Tansi										
	Belanja Lembur										
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi										

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring										
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,08KM	139.964.898	**Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0 Km	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Sungai										
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	47%	12.916.058.282	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	52%	7.360.000.000	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	4,4 KM	6.251.540.000	**Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	4,4 KM	2.040.000.000	
	Makan Minum Rapat					Belanja Alat Tulis Kantor					
	Epaksi (DAK)					Makan Minum Rapat					
	Pengawasan (DAK)					Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Peleru, Kec. Mori Utara					
	Belanja Lembur					Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Tomata, Kec. Mori Atas					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi					Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kayuputih Desa Tanasumpu, Mamosalato					
	Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi (DAK)					Pembangunan Saluran Pembuang D.I. Korondui Desa Korondui, Mori Atas					
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Kayuputih (DAK)					Pembangunan Saluran Pembuang Irigasi Desa Lijo, Kec. Mamosalato					
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Mandula (DAK)					Pembangunan Saluran Pembuang Irigasi Dusun III, Koromatantu, Kec. Petasia					
						Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan					
						Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,19 KM	360.350.000	**Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	-	
	Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring										
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Maralee										
	Peningkatan Bendung Irigasi	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1 Bendung	196.050.000	**Peningkatan Bendung Irigasi**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	0 Bendung	-	
	Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring										
	Peningkatan Bendung D.I. Tiu										
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3,69 KM	5.684.800.000	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4, 36 Km	1.130.000.000	
	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bendung D.I. Padawa					Makan Minum Rapat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring					Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ensa					Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Malino Kec. Soyo Jaya					Rehabilitasi Jaringan Irigasi dusun 1 dan 2, Mandula, Kec. Lembo Raya					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mayumba					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Andolia Desa Pandaueke, Mamosalato					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padawa (DAK)					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ensa Desa Ensa, Mori Atas					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Waraa					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lijo Desa Lijo, Bungku Utara					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Tananagaya (DAK)					Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lintobulosa Desa Tomata, Mori Atas					
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padawa Desa Padawa, Mori Atas					
						Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Timbarasi Desa Tabarano, Kecamatan Mori utara					
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendung Irigasai yang Direhabilitasi	1 Bendung	195.118.282	**Rehabilitasi Bendung Irigasi**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendung Irigasai yang Direhabilitasi	7 Bendung	3.120.000.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey dan Monitoring					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan					
	Rehabilitasi Bendung D.I. Taliwan					Rehabilitasi Bendung D.I. Tongko Desa Tomata, Mori Atas					
						Rehabilitasi Bendung Irgasi D.I. Waraa Kecamatan Lembo					
						Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun I, Saemba, Kec. Mori Atas					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rehabilitasi Bendung Irigasi desa tamonjengi kelompok tani Tadogu, Kec. Mori Utara					
						Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun 02, RT 08, , Tabarano, Kec. Mori Utara					
						Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Ensa Desa Ensa, Mori Atas					
						Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Gontara Tahap II Desa Gontara, Kecamatan Mori Atas					
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.18 KM	228.200.000	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 Km	1.070.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey, Monitoring dan Evaluasi					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan					
						Perjalanan Luar Daerah Dalam Dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan OP					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten	61%	7.321.183.150	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten	61%	8.035.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Tersediannya Sarana Dan prasarana air minum	1919 Unit	7.321.183.150	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		Tersediannya Sarana Dan prasarana air minum	1919 Unit	8.035.000.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1052 SR	5.261.307.947	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	21 Liter/Detik	6.325.000.000	
	Pengawasan Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan (Tersebar Kab. Morowali Utara)					Pembangunan Air Bersih Desa Mohoni					
	Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan (Tersebar Kab. Morowali Utara)					Pembangunan air bersih desa pontangoa					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					Pembangunan Air Bersih desa saemba kec. mori atas					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Pembangunan Air Bersih Desa Taronggo					
	Pembuatan Papan Informasi SPAM Kab. Morowali Utara					Pembangunan air bersih desa togo					
	Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya					Pembangunan Air Bersih Desa Tompira					
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bimor Jaya					Pembangunan Air Bersih Dusun I, II dan III (Usulan P1 Tahun 2024)					
	Pembuatan Sumur Bor Desa Lanumor Kec. Mori Atas					Pembangunan air bersih kec. bungku utara					
	Pembuatan Sumur Bor Desa Tanauge Kec. Petasia					pembangunan fasilitas air bersih desa bungintimbe					
	Pembuatan Sumur Bor Desa Tandayondo Kec. Soyo Jaya					Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya					
	Pembuatan Sumur Bor Desa Tokonanaka Kec. Petasia					Pembuatan Papan Informasi SPAM Kab. Morowali Utara (Buah)					
						Pembuatan Sumur Bor Desa Lanumor Kec. Mori Atas					
						Pembuatan Sumur Bor Desa Matube Kec. bungku utara					
						Pembuatan Sumur Bor Desa Tanauge Kec. Bungku utara					
						Pembuatan Sumur Bor Desa Tandayondo Kec. Soyo Jaya					
						Pembuatan Sumur Bor Desa Tokonanaka Kec. Petasia					
						Pengadaan Pipa Air Bersih Desa Bimor Jaya					
						Pengawasan Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan (Tersebar Kab. Morowali Utara)					
						Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan (Tersebar Kab. Morowali Utara)					
						Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Bungku Utara					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mamosalato					
						Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mori Atas					
						Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mori Utara					
						Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Soyo Jaya					
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara					
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	287 Unit	516.094.256	**Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	775.000.000	
	Pengawasan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya					pembuatan jaringan air bersih desa tambayoli					
	Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bimor Jaya					Pengawasan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya					
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya					Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bimor Jaya					
	Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bimor Jaya					Peningkatan SPAM Desa Toddopuli Uebangke Kec. Soyo Jaya					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					Perencanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bimor Jaya					
	Peningkatan SPAM Desa Uebangke Kec. Soyo Jaya					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	3 Unit	500.000.000	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	525.000.000	
	Perencanaan Operasional Dan Pemeliharaan SPAM (Tersebar Kab. Morowali Utara)					Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Kab. Morowali Utara					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultas					Perencanaan Operasional Dan Pemeliharaan SPAM (Tersebar Kab. Morowali Utara)					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara					
	Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Kab. Morowali Utara					Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih/air minum	580 Unit	1.043.780.947	**Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	Tersebar di Kab. Morowali Utara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	673 SR	410.000.000	
	Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan					Belanja Lembur Non PNS					
	Perencanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan					Data base air bersih (tersebar kab. Morowali utara)					
	Belanja Lembur Non PNS					Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan					
	Perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Rangka koordinasi, konsultasi					Perencanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara					
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan tersebar					Perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Rangka koordinasi, konsultasi					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	50,45%	2.710.396.500	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	50,45%	1.248.100.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya sarana dan prasarana air limbah	50,45%	2.710.396.500	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		tersedianya sarana dan prasarana air limbah	50,45%	1.248.100.000	
	Pembangunan /penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Tersebar di. Kab. Morowali Utara	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	271 Rumah Tangga	2.710.396.500	**Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat**	Tersebar di. Kab. Morowali Utara	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	271 Rumah Tangga	1.248.100.000	
	Belanja Makan Minum Rapat Bid. Cipta Karya					data base Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Tersebar Kab. Morowali Utara)					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					Pembangunan Tangki Septik Individual (Tersebar Kab. Morowali Utara)					
	Pengawasan Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Tersebar Kab. Morowali Utara					Pengawasan Tangki Septik Individual (Tersebar Kab. Morowali Utara)					
	Perencanaan Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Tersebar Kab. Morowali Utara)					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
	Pembangunan Tangki Septik Individual (Tersebar Kab. Morowali Utara)										
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik	69%	1.332.322.190	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik	69%	3.310.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat	69%	1.332.322.190	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat	69%	3.310.000.000	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar di. Kab. Morowali Utara	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	952 M	1.332.322.190	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**	Tersebar di. Kab. Morowali Utara	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	952 M	3.310.000.000	
	Belanja Makan Minum Rapat Bidang Cipta Karya					Belanja Makan Minum Rapat Bidang Cipta Karya					
	Pengawasan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Tersebar di Kab. Morowali Utara)					Data Base Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Tersebar di Kab. Morowali Utara)					
	Perencanaan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Tersebar di Kab. Morowali Utara					Drainase desa kumpi Kec. Lembo					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					Drainase Desa Tambayoli					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Drainase Desa Wawondula					
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IKK Kec. Mamosalato					drainase dusun 6 desa tiu kec petasia barat					
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IKK Kec. Soyo Jaya					drainse desa matube					
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Bahontula					Pembangunan Drainase desa Sampalowo					
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Bahoue					pembangunan riol desa pambarea kec. mori atas					
						Pembangunan Riol Desa Tontowea Kec. Petasia Barat					
						pembangunan riol jalan lingkungan desa tiwaa					
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IKK Kec. Mamosalato					
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IKK Kec. Soyo Jaya					
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Bahontula					
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Bahoue					
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Kolonodale					
						Pengawasan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Tersebar di Kab. Morowali Utara)					
						Perencanaan Drainase Kec. Bungku Utara					
						Perencanaan Drainase Kec. Lembo					
						Perencanaan Drainase Kec. Mamosalato					
						Perencanaan Drainase Kec. Petasia					
						Perencanaan Drainase Kec. Petasia Barat					
						Perencanaan Drainase Kec. Petasia Timur					
						Perencanaan Drainase Kec. Soyo Jaya					
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara					
						Riol Desa Toddopuli Uebangke Kec. Mamosalato					
						Riol Desa Wawondula Kec. Lembo					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pemukiman	53%	7.552.423.433	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pemukiman	53%	-	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur untuk masyarakat	53%	7.552.423.433	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota**		tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur untuk masyarakat	53%	-	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di. Kab. Morowali Utara	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	38 Sistem Jaringan	7.552.423.433	**Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Tersebar di. Kab. Morowali Utara	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Sistem Jaringan	-	
	Pengawasan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
	Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi										
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring										
	Pembangunan Tanggul Kec. Petasia Barat										
	Pembangunan Tanggul Kel. Bahontula Kec. Petasia										
	Pembangunan Tanggul Kel. Bahoue Kec. Petasia										
	Pembangunan Tanggul Kel. Kolonodale Kec. Petasia										
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Lembo Raya										
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Petasia Barat										
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Bahontula Kec. Petasia										
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Bahoue Kec. Petasia										
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Kolonodale Kec. Petasia										
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Banguan Gedung Yang Layak Fungsi	67%	6.560.795.115	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		Persentase Banguan Gedung Yang Layak Fungsi	67%	4.341.900.000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		tersedianya sarana dan prasarana kantor	67%	6.560.795.115	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		tersedianya sarana dan prasarana kantor	67%	4.341.900.000	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN MOROWALI UTARA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.209.564.734	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	KABUPATEN MOROWALI UTARA	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	4 Gedung	2.391.900.000	
	Pengawasan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					Pembangunan Gedung Kantor Camat Soyo Jaya, Lembah Sumara					
	Perencanaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					Pembangunan Gedung Kantor Kab. Morowali Utara					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					Pembangunan pagar kantor camat petasia barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Pembangunan Rujab Camat Bungku Utara					
	Pembangunan Gedung Kantor Kab. Morowali Utara					Pengadaan Laptop SIMBG Bidang Cipta Karya (ROG STRIX G512LI)					
						Pengadaan Meteran laser digital					
						Pengadaan Printer Epson L-14150 Bidang Cipta Karya					
						Pengawasan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					
						Perencanaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara					
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	7 unit	1.351.230.381	**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas PUPRPKPD	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	4 Bangunan Gedung	1.950.000.000	
	Pengawasan Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					Pemeliharaan Gedung Kantor (Tersebar Kab. Morowali Utara)					
	Perencanaan Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					Pengadaan ATK bidang cipta karya					
	Pemeliharaan Gedung Kantor (Tersebar Kab. Morowali Utara)					Pengawasan Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring					Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi					
						Rehab Bangunan Desa Mayumba, Kecamatan mori Utara, Kabupaten Morowali Utara					
						Rehabilitasi Kantor Camat Lembo Raya					
						Rehabilitasi Rujab Tanasumpu					
						Rehab Rujab Camat Lembo					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	65,37%	66.942.643.535	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	65,37%	71.941.362.000	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan	65,37%	66.942.643.535	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan	65,37%	71.941.362.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	25 Dokumen	2.500.000.000	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	25 Dokumen	1.050.000.000	
	Dokumen Lingkungan Pembangunan/Peningkatan Jalan					Dokumen Lingkungan Pembangunan/Peningkatan jalan					
	Dokumen Lingkungan Pembangunan/Peningkatan Jembatan					Dokumen Lingkungan Pembangunan/Peningkatan Jembatan					
	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan & Jembatan					Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan Jembatan					
	Perencanaan Pembangunan Jalan SP3 Jln. Negara Lembobelala					Perencanaan Pembangunan Jalan SP3 Jln. Negara Lembobelala					
	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tomata					Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tomata					
	Perencanaan Peningkatan Jalan Panca Makmur - Toddopuli Uebangke					Perencanaan Peningkatan Jalan SP3 Jln. Provinsi Tomui Karya					
	Perencanaan Peningkatan Jalan Ronta - Bimor Jaya (Batas Kecamatan)					Perencanaan Peningkatan Jalan Tiu -Togo					
	Perencanaan Peningkatan Jalan SP3 Jalan Nasional - Mayumba					Perencanaan Peningkatan Jalan Uempanapa - Lemowalia					
	Perencanaan Peningkatan Jalan SP3 Jalan Negara - Lanumor					Review Desain Perencanaan Jembatan Lembobelala					
	Perencanaan Peningkatan Jalan SP3 Jln. Provinsi Tomui Karya										
	Perencanaan Peningkatan Jalan Tiu -Togo										
	Perencanaan Peningkatan Jalan Tontowea - Era										
	Perencanaan Peningkatan Jalan Uempanapa - Lemowalia										
	Review Desain Perencanaan Jembatan Lembobelala										
	Pembangunan Jalan	Kabupaten Morowali Utara	Panjang Jalan yang Dibangun	16.75 KM	6.700.000.000	**Pembangunan Jalan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jalan yang Dibangun	28,06 KM	7.800.000.000	
	Pembangunan Jalan Produksi (Tersebar)					Pembangunan Jalan Dusun II, Tanauge, Kec. Petasia					
	Pembangunan Jalan SP3 Jalan Negara - Lembobelala					Pembangunan Jalan Desa Mayumba Kec. Mori Utara					
	Pembangunan SP3 Jalan Negara (Korompeli) - Beteleme Tua					Pembangunan Jalan Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara					
						Pembangunan Jalan Dusun I,II,III,IV dan V Desa Ulu Laa Kec. Petasia Barat					
						Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Maralee Kec. Petasia Barat					
						Pembangunan Jalan Masuk Pasar Baru Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur					
						Pembangunan Jalan Produksi Desa Bintangor Mukti Kec. Lembo Raya					
						Pembangunan Jalan Produksi Dusun 1 Desa Peboa Kec. Petasia Timur					
						Pembangunan Jalan Produksi Dusun 2 RT 5 Desa Kasingoli Kec. Mori Atas					
						Pembangunan Jalan Produksi Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas					
						Pembangunan Jalan Produksi Persawahan Tongko RT. 06 Desa Pambarea Kec. Mori Atas					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pembangunan Jalan Produksi (Tersebar)					
						Pembangunan Jalan SP3 Jalan Negara - Beteleme Tua Kec. Lembo					
						Pembangunan Jalan SP3 Jalan Negara - Lembobelala Kec. Lembo Raya					
	Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Morowali Utara	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	13.30 KM	33.242.643.535	**Rekonstruksi Jalan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	32.232.362.000	
	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tomata (DAK)					Biaya Lembur					
	Peningkatan Jalan Lingkar Atas Kantor Desa Bungintimbe					Biaya Makan dan Minum Rapat					
	Peningkatan Jalan Lingkar Atas Maralee - Tiu					Operasional Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Peningkatan Jalan Panca Makmur - Toddopuli Uebangke (DAK)					Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Peningkatan Jalan Ronta - Bimor Jaya (Batas Kecamatan) (DAK)					Penanganan Long Segmen Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Beteleme					
	Peningkatan Jalan SP3 Jalan Kabupaten - Koya					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Dalam Desa Pancamakmur					
	Peningkatan Jalan SP3 Jalan Nasional - Mayumba (DAK)					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Ensa - Lanumor					
	Peningkatan Jalan SP3 Jalan Negara - Lanumor (DAK)					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Lemo - Lemowalia					
	Peningkatan Jalan Tiu -Togo (DAK)					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Tiwaa - SP3 Jalan Kabupaten					
	Peningkatan Jalan Togo - Ulu Laa					Pengaspalan Jalan Desa Era Kec. Mori Utara					
	Peningkatan Jalan Tontowea - Era (DAK)					Pengaspalan Jalan Dusun I dan Dusun II Desa Mora Kec. Lembo					
	Peningkatan Jalan Uempanapa - Lemowalia (DAK)					Pengaspalan Jalan Dusun I - Dusun II Desa Peonea Kec. Mori Atas					
	Peningkatan Jalan Ungkea - Towara Pantai					Pengaspalan Jalan Dusun I - Dusun IV Desa Lembontonara Kec. Mori Utara					
						Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Malino Jaya Kec. Soyo Jaya					
						Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Wawopada Kec. Lembo					
						Pengaspalan Jalan Dusun I, II, III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur					
						Pengaspalan Jalan Dusun I - IV Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Raya					
						Pengaspalan Jalan Pasar Dusun I Desa Bunta Kec. Petasia Timur					
						Peninggian Badan Jalan Tiu - Togo					
						Peningkatan Jalan Dalam Desa Tinompo					
						Peningkatan Jalan Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Raya					
						Peningkatan Jalan Desa Tabarano Kec. Mori Utara					
						Peningkatan Jalan Lingkar Atas Kantor Desa Bungintimbe					
						Peningkatan Jalan Lingkar Atas Maralee - Tiu					
						Peningkatan Jalan Tinompo - Onepute					
						Peningkatan Jalan Uempanapa - Lemowalia - Salubiro (Long Section)					
						Peningkatan Jalan Uepakatu - Manyoe					
						Peningkatan Jalan Ungkea - Towara Pantai					
						Peralataan ATK					
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi					
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tersebar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.2 KM	1.200.000.000	**Pemeliharaan Berkala Jalan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	750.000.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Desa Tinompo					Pemeliharaan Bahu dan Drainase Jalan Dalam Kota Kolonodale					
	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Beteleme					Rehabilitasi Jalan Beteleme - Ronta					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersebar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2.5 KM	1.000.000.000	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	370.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan Beteleme - Ronta					Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Kolonodale					
	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Kolonodale					Pemeliharaan Rutin Jalan Korololama-PAM Kolonodale					
	Pemeliharaan Rutin Jalan Korololama-PAM Kolonodale					Pemeliharaan Rutin Jalan Korololama - Tiu					
	Pemeliharaan Rutin Jalan Korololama - Tiu					Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Atas Beteleme-Tinompo					
	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Atas Beteleme-Tinompo										

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Jembatan	Tersebar	Panjang Jembatan yang Dibangun	60.53 M	11.500.000.000	**Pembangunan Jembatan**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Jembatan yang Dibangun	JEMBATAN	21.788.000.000	
	Pembangunan Jembatan Baturube II					Operasional Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Pembangunan Jembatan Kabupaten (Tersebar)					Pembangunan Jembatan Desa Mohoni, Kec. Petasia Timur					
	Pembangunan Jembatan Masara					Pembangunan Jembatan Baturube II Kec. Bungku Utara					
	Pembangunan Jembatan Pu'awu Desa Wawopada Tahap II					Pembangunan Jembatan Desa Sea Kec. Mamosalato					
	Pembangunan Jembatan Woomparigi II					Pembangunan Jembatan Desa Uemasi Kec. Bungku Utara					
						Pembangunan Jembatan Dusun 1 Desa Tadaku Jaya					
						Pembangunan Jembatan Dusun I dan Dusun II Desa Lembobelala Kec. Lembo Raya					
						Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Petumbea Kec. Lembo Raya					
						Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Ronta Kec. Lembo Raya					
						Pembangunan Jembatan Dusun III Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur					
						Pembangunan Jembatan Dusun II Lemboroma Kec. Lembo					
						Pembangunan Jembatan Dusun II Petambata Desa Tingkeao Kec. Lembo					
						Pembangunan Jembatan Dusun I Tambalako Bawah Lembobaru Kec. Lembo					
						Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gontara Kec. Mori Atas					
						Pembangunan Jembatan Kabupaten (Tersebar)					
						Pembangunan Jembatan Kawuyu Dusun 2 Desa Uemasi Kec. Bungku Utara					
						Pembangunan Jembatan Koronjaya Dusun 1 RT. 01 Desa Peleru Kec. Mori Utara					
						Pembangunan Jembatan Koroposampa Desa Tomata Kec. Mori Atas					
						Pembangunan Jembatan Masara Kec. Petasia Timur					
						Pembangunan Jembatan Parangisi Kec. Mamosalato					
						Pembangunan Jembatan Puawu Desa Wawopada Tahap II					
						Pembangunan Jembatan RT IV Dusun II Desa Lee Kec. Mori Atas					
						Pembangunan Jembatan Tole Kelompok Tani Desa Peleru Kec. Mori Utara					
						Pembangunan Jembatan Wata Desa Lemowalia					
						Pembangunan Plat Duicker Desa Kororlolama Dusun III dan Dusun IV Kec. Petasia					
						Pembangunan Riol dan Plat Duiker Desa Tabarano Kec. Mori Utara					
						Pembuatan Jalan Pemukiman Dusun I Dan IV Desa Kororlolama Kec. Petasia					
						Pembuatan Jembatan Gantung Desa Wawopada Kec. Lembo					
	Penggantian Jembatan	Tersebar	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	50 M	500.000.000	**Penggantian Jembatan**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Jembatan yang Diganti	6 Jembatan	6.101.000.000	
	Penggantian Jembatan Kabupaten (Tersebar)					Penggantian Jembatan Desa Woomparigi Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara					
	Penggantian Jembatan Lembobelala					Penggantian Jembatan Kabupaten (Tersebar)					
						Penggantian Jembatan Katu Kec. Mori Utara					
						Penggantian Jembatan Koro Mayumba					
						Penggantian Jembatan Lembobelala Kec. Lembo Raya					
						Penggantian Jembatan Lemo Kec. Bungku Utara					
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tersebar	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	66.67 M	500.000.000	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	JEMBATAN	50.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan (Tersebar)					Pemeliharaan Rutin Jembatan (Tersebar)					
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Tersebar	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	50 M	500.000.000	**Pemeliharaan Berkala Jembatan**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	JEMBATAN	600.000.000	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan (Tersebar)					Pemeliharaan Berkala Jembatan Dusun I Desa Korompeeli Kec. Lembo					
						Pemeliharaan Rutin Jembatan (Tersebar)					
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tersebar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	24 Dokumen	1.800.000.000	**Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	24 KM	1.200.000.000	
	Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan (DAU)					Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan					
	Pengawasan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan (DAU)					Pengawasan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan					
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)					Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	50,12%	216.996.800	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	50,12%	153.840.750	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		tersedianya tenaga terampil konstruksi	100%	216.996.800	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		tersedianya tenaga terampil konstruksi	100%	153.840.750	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	kabupaten morowali utara	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	27 Orang	216.996.800	**Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	27 Orang	153.840.750	
	Belanja ATK Untuk Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Makan dan Minum Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Biaya Honorarium Narasumber					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	Biaya Penginapan Narasumber					Belanja Lembur					
	Belanja Lembur PNS/Non-PNS					Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					
	Sewa Kendaraan					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan					Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					
	Perjalanan DInas Luar Daerah					Biaya Sewa Kendaraan					
	Belanja Personal Komputer					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan	0,00%	-	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		tersedianya dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan	0,00%	-	
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	kabupaten morowali utara	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	0,00%	-	**Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan**	kabupaten morowali utara	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	0,00%	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	70%	3.136.516.412	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	70%	2.000.000.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Tersedianya dokumen Teknis RTRW Kab. Morowali Utara	70%	2.700.000.000	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**		Tersedianya dokumen Teknis RTRW Kab. Morowali Utara	70%	350.000.000	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kecamatan Petasia & Kecamatan Petrasia Timur	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	500.000.000	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	350.000.000	
	Penetapan Revisi RTRW					Penetapan RTRW Kabupaten Morowali Utara					
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.100.000.000	**Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	
	Penyelarasan RDTR Kota Beteleme										
	Penyusunan RDTR Tanasumpu										

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000	**Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	-	
	Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang	70%	200.000.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang	70%	1.550.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Morowali Utara	Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	200.000.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
	Operasional Kegiatan Pelaksanaan					Belanja Alat Tulis Kantor					
						Belanja Lembur					
						Makan Minum Rapat					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 DOKUMEN	1.500.000.000	
						Penetapan RDTR Kawasan Industri Bungini					
						Penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale					
						Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Baturube dan Sekitarnya					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota		Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	70%	236.516.412	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota**		Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	70%	100.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Morowali Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	236.516.412	**Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000	
	Operasional FPR					Perjalanan Dalam Daerah di 10 Kecamatan					
						Perjalanan Luar Daerah					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.750.686.250	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	15%	332.850.000	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	15%	120.000.000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	15%	332.850.000	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**		Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	15%	120.000.000	
	Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kab. Morowali Utara	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersusun dan/atau tereview serta terlegalisasi	7 Dokumen	332.850.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 LAPORAN	120.000.000	
	Penyusunan Ranperda RP3KP Kabupaten Morowali Utara					Penyusunan Ranperda RP3KP Kabupaten Morowali Utara					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah										
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Rumah Layak Huni	50,19%	4.686.436.250	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		Persentase Rumah Layak Huni	50,19%	4.980.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota		Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	50,19%	4.686.436.250	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**		Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	50,19%	4.980.000.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Kab. Morowali Utara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	104 unit Rumah	4.686.436.250	**PPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	4.980.000.000	
	Sosialisasi Rumah Swadaya Kabupaten Morowali Utara					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Beteleme					
	Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana di Desa Mondowe					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bimor Jaya					
	Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana di Desa Sampalowo					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bintangor Mukti					
	Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana di Kelurahan Kolonodale					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Dolupo Karya					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bungintimbe					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Era					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Beteleme					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Giri Mulya					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bimor Jaya					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Jamor Jaya					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bintangor Mukti					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Keuno					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Dolupo Karya					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Korowalelo					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Ensa					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Korowou					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Gontara					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Malino					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Jamor Jaya					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Molores					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Keuno					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Onepute					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Korololama					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Pandauke					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Koromatantu					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Poona					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Lanumor					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Saemba					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Lee					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sampalowo					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Mandula					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sumara Jaya					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Maralee					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Taliwan					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Mayumba					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tandoyondo					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Molores					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tinompo					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Onepute					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tomui Karya					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Peleru					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tontowea					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Po'ona					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Towara					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Saemba					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Uemasi					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sampalowo					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Uluanso					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tingkeao					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Ungkea					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Towara					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Wawopada					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Uluanso					Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Ulu Laa					Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Morowali Utara					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Ungkea					Honorarium Tenaga Lembur					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Wawopada					Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Pembuatan Aplikasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Morowali Utara					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kasingoli					Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Morowali Utara					
	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kelurahan Kolonodale					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sumara Jaya, Kec. Soyo Jaya					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Korololaki (DAK Pengentasan Kumuh Terpadu)					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Pokeang, Kec. Bungku Utara					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Bahontula (DAK Pengentasan Kumuh Terpadu)					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tandoyondo, Kec. Soyo Jaya					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Bahoue (DAK Pengentasan Kumuh Terpadu)					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dusun I, II, III, Desa Tokonanaka, Kec. Bungku Utara					
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Kolonodale (DAK Pengentasan Kumuh Terpadu)					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Boba, Kec. Bungku Utara					
	Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Operator Perumahan Swadaya					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa aemba Walati, Kec. Mori Atas					
	Sosialisasi Pendataan RTLH dan Backlog di Kecamatan Mamosalato, BUngku Utara dan Soyojaya					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dusun 1, 2 dan 3 Desa Posangke, Kec. Bungku Utara					
	Sosialisasi Pendataan RTLH dan Backlog di Kecamatan Petasia, Petasia Barat, Petasia Timur, Mori Atas, Mori Utara, Lembo dan Lembo Raya					Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Sosialisasi Rumah Swadaya Kabupaten Morowali Utara					Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Morowali Utara					Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya					
	Honorarium Tenaga Lembur					Sosialisasi Cara Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Operator Desa Kecamatan Bungku Utara, Petasia, Petasia Barat, Petasia Timur, Lembo, Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah					Sosialisasi RTLH Terdampak Kawasan Kumuh Dalam Kota Kolonodale					
	Pengawasan Pelaksanaan Rumah Swadaya										
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah										
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	23%	1.661.350.000	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	23%	7.330.000.000	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		terbangunnya Panjang Jalan	23%	1.661.350.000	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		terbangunnya Panjang Jalan	23%	7.330.000.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Morowali Uatara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	1.661.350.000	**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	7.330.000.000	
	Pembuatan Riol Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Keuno					Drainase Kolonodale					
	Pembuatan Riol Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Korololama					Jalan Lingkungan Desa Lemowalia					
	Pembuatan Riol Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Koya					Jalan Lingkungan Dusun 3 Desa Tompira					
	Pembuatan Riol Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Lee					Jalan Lingkungan Lorong Idola Pelita Pantai Kolonodale					
	Pembuatan Riol Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tadaku Jaya					Lanjutan Jalan LIngkungan Papoji Kel. Bahoue					
	Pembuatan Riol Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tiwaa					Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan IV Hol Kel.Kolonodale					
	Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Koromatantu					Pembangunan Jalan Lingkungan desa Kolo Bawah					
	Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Kumpi					Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mondowe					
	Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tabarano					Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tambale					
	Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tamainusi					Pembangunan Jalan Lingkungan Lorong Sehati Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara					
	Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tiu					Pembangunan Rabat Beton Desa Mohoni					
	Pengawasan Pelaksanaan PSU Kabupaten Morowali Utara					Pembangunan Rabat Beton Desa Onepute					
	Pemasangan Paving Block Jalan Perumahan Morita Jalur Dua					Pembangunan Rabat Beton Desa Taronggo					
						Pembangunan Rabat Beton Desa Tontowea					
						Pembangunan Rabat Beton Desa Uewajo					
						Pembangunan Tanggul Kantor Camat Petasia Timur					
						Pembuatan Riol Kawasan Perumahan Desa Koromatantu					
						Pembuatan Talud GT Bukit Zaitun Desa Saemba					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Girimulya Dusun 1 dan 2, Kec. Mamosalato					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun I dan Dusun II, Kab. Desa Towara, Kec. Petasia Timur					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3, Tinompo, Kec. Lembo					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1,2 & 3, Pandauke, Kec. Mamosalato					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1-4, Korobonde, Kec. Lembo					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1 dan 2, Desa Siliti Kec. Bungku Utara					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman DUSUN I, DUSUN II, DUSUN III, DUSUN IV, DUSUN V.,Desa Togo Mulyo, Kec. Petasia Barat					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tambarobone, Kec. Bungku Utara					
						Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman					
						Rabat Beton Desa Ganda-Ganda					
						Rabat Beton Desa Gililana					
						Rabat Beton Desa Londi					
						Rabat Beton Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia					
						Rabat Beton Puncak Harmoni Desa Korololaki Kec.Petasia					
						Rabat Beton Samping Masjid Desa Korowasu					
						Tanggul Desa Jamor Jaya					
						Tanggul Desa Keuno					
						Tanggul Desa Molores					
						Tanggul Desa Uluanso					
						Tanggul Lapangan Bola Dusun 4 Desa Peboa, Kec.Petasia Timur					
						Tanggul Puncak Harmoni Desa Korololaki					
						Tanggul Samping Kantor Camat / Belakang Masjid Nurul Taqwa Tomata					
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Ketersediaan Dokumen Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	15%	70.050.000	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		Persentase Ketersediaan Dokumen Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	15%	70.050.000	
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Tersedianya Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan	15%	70.050.000	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**		Tersedianya Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan	15%	70.050.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi	Kab. Morowali Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat dan Registrasi Pengembang	46 Laporan	70.050.000	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat dan Registrasi Pengembang	46 Laporan	70.050.000	
	Database dan Fasilitasi Penerbitan IMB Perumahan Swadaya Kabupaten Morowali Utara					Database dan Fasilitasi Penerbitan IMB Perumahan Swadaya Kabupaten Morowali Utara					

Tabel T-C.32.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				
	- ***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah***				
	- **Normalisasi/Restorasi Sungai**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	
	Normalisasi Sungai Dusun 1 dan 2, Kumpi, Kec. Lembo Normalisasi Sungai dusun 01, Kab. Morowali Utara, Momo, Kec. Mamosalato				
	- **Pembangunan *Breakwater***	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Breakwater yang Dibangun	500 M	
	Pembangunan Pemecah Ombak Desa Baturube				
	- **Pembangunan Bendungan**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	
	Pembangunan Bendungan Desa Tiwa'a				
	- **Peningkatan Tanggul Sungai**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	3950 M	
	Pembangunan Bronjong Desa Po'ona sungai sokita Pembangunan Bronjong Dusun 1, Desa Winagabino Pembangunan Tanggul Sungai Desa Tananagaya, Kec. Mamosalato Pembangunan Bronjong dusun 1, Uempanapa, Kec. Bungku Utara Pembangunan Tanggul Sungai Dusun III DesaTananagaya, Kec. Mamosalato Pembangunan Tanggul Sungai Lingkungan 1 Kelurahan Bahoue, Kec. Petasia Pembangunan Bronjong Desa opo dusun II, Kab. Morowali Utara Pembangunan Bronjong Belakang SDN Ensa, Ensa, Kec. Mori Atas Pembangunan Bronjong Desa Tokala Atas, Kec. Bungku Utara Pembangunan Tanggul Sungai desa Menyo'e, Kec. Mamosalato Pembangunan Tanggul Sungai Dusun I Dusun II Desa Kalombang, Kec. Bungku Utara Pembangunan Tanggul Sungai dusun 2 desa korolaki, Kec. Petasia				

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	- **Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,4 KM	
	Pembangunan Tanggul Pantai Dusun II, Ueruru, Kec. Bungku Utara Pembangunan Tanggul Pantai Pantai Dusun 4, Desa Ganda-Ganda, Kec. Petasia				
	- **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				
	- **Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1,8 KM	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Peleru, Kec. Mori Utara Pembangunan Saluran Pembuang Irigasi Desa Lijo, Kec. Mamosalato Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Tomata, Kec. Mori Atas Pembangunan Saluran Pembuang Irigasi Dusun III, Koromatantu, Kec. Petasia				
	- **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,5 KM	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dusun 1 dan 2, Mandula, Kec. Lembo Raya				
	- **Rehabilitasi Bendung Irigasi**	KAB. MOROWALI UTARA	Jumlah Bendung Irigasai yang Direhabilitasi	3 Bendung	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun I, Saemba, Kec. Mori Atas Rehabilitasi Bendung Irigasi desa tamonjengi kelompok tani Tadogu, Kec. Mori Utara Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun 02, RT 08, Tabarano, Kec. Mori Utara				
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				
	- ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota***				
	- **Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	
	pembuatan jaringan air bersih desa tambayoli Kec. Soyo Jaya			793,63	

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	- **Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	KAB. MOROWALI UTARA	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	10 Liter/Detik	
	Pembangunan Air Bersih desa saemba kec. mori atas Pembangunan Air Bersih Desa Tompira Pengadaan Pipa Air Bersih Desa Bimor Jaya Pembangunan Air Bersih Desa Mohoni Pembangunan Air Bersih Desa Taronggo Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mamosalato Pembangunan air bersih desa pontangoa Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Bungku Utara Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mori Atas Pembangunan air bersih desa togo pembangunan fasilitas air bersih desa bungintimbe Pembuatan Sumur Bor Desa Tanauge Kec. Bungku utara Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mori Utara Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Soyo Jaya				
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				
	- ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi***				
	- **Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**	Kab. Morowali Utara	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1676,97 M	
	Drainase Desa Tambayoli Drainase Desa Wawondula drainase dusun 6 desa tiu kec petasia barat drainse desa matube Pembangunan Drainase desa Sampalowo pembangunan riol desa pambarea kec. mori atas Pembangunan Riol Desa Tontowea Kec. Petasia Barat pembangunan riol jalan lingkungan desa tiwaa Perencanaan Drainase Kec. Bungku Utara Perencanaan Drainase Kec. Lembo Perencanaan Drainase Kec. Mamosalato Perencanaan Drainase Kec. Petasia Perencanaan Drainase Kec. Petasia Barat Perencanaan Drainase Kec. Petasia Timur Perencanaan Drainase Kec. Soyo Jaya				

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Riol Desa Wawondula Kec. Lembo				
4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				
	- ***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***				
	- **Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Morowali Utara	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	4 Bangunan Gedung	
	Rehab Bangunan Desa Mayumba, Kecamatan mori Utara, Kabupaten Morowali Utara Rehabilitasi Kantor Camat Lembo Raya Rehabilitasi Rujab Tanasumpu Rehab Rujab Camat Lembo				
	- **Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Morowali Utara	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan	3 Gedung	
	Pembangunan Gedung Kantor Camat Soyo Jaya, Lembah Sumara Pembangunan pagar kantor camat petasia barat Pembangunan Rujab Camat Bungku Utara				
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				
	- ***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***				
	- **Penggantian Jembatan**	Kab. Morowali Utara	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	-
	Penggantian Jembatan Desa Woomparigi Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara				
	- **Pembangunan Jalan**	Kab. Morowali Utara	Panjang Jalan yang Dibangun	27, 43 Km	-
	Pembangunan Jalan Dusun II, Tanauge, Kec. Petasia Pembangunan Jalan Desa Mayumba Kec. Mori Utara Pembangunan Jalan Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara Pembangunan Jalan Dusun I,II,III,IV dan V Desa Ulu Laa Kec. Petasia Barat Pembangunan Jalan Masuk Pasar Baru Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Pembangunan Jalan Produksi Desa Bintangor Mukti Kec. Lembo Raya Pembangunan Jalan Produksi Dusun 1 Desa Peboa Kec. Petasia Timur				

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pembangunan Jalan Produksi Dusun 2 RT 5 Desa Kasingoli Kec. Mori Atas Pembangunan Jalan Produksi Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas Pembangunan Jalan Produksi Persawahan Tongko RT. 06 Desa Pambarea Kec. Mori Atas				
	- **Rekonstruksi Jalan**	Kab. Morowali Utara	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	19 Km	-
	Pengaspalan Jalan Desa Era Kec. Mori Utara Pengaspalan Jalan Dusun I dan Dusun II Desa Mora Kec. Lembo Pengaspalan Jalan Dusun I - Dusun II Desa Peonea Kec. Mori Atas Pengaspalan Jalan Dusun I - Dusun IV Desa Lembontonara Kec. Mori Utara Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Malino Jaya Kec. Soyo Jaya Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Wawopada Kec. Lembo Pengaspalan Jalan Dusun I - IV Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Raya Pengaspalan Jalan Pasar Dusun I Desa Bunta Kec. Petasia Timur Peningkatan Jalan Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Raya Peningkatan Jalan Desa Tabarano Kec. Mori Utara				
	- **Pembangunan Jembatan**	Kab. Morowali Utara	Jumlah Jembatan yang Dibangun	21 Jembatan	-
	Pembangunan Jembatan Desa Mohoni, Kec. Petasia Timur Pembangunan Jembatan Baturube II Kec. Bungku Utara Pembangunan Jembatan Desa Sea Kec. Mamosalato Pembangunan Jembatan Desa Uemasi Kec. Bungku Utara Pembangunan Jembatan Dusun 1 Desa Tadaku Jaya Pembangunan Jembatan Dusun I dan Dusun II Desa Lembobelala Kec. Lembo Raya Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Petumbea Kec. Lembo Raya Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Ronta Kec. Lembo Raya				

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pembangunan Jembatan Dusun II Lemboroma Kec. Lembo Pembangunan Jembatan Dusun II Petambata Desa Tingkeao Kec. Lembo Pembangunan Jembatan Dusun I Tambalako Bawah Lembobaru Kec. Lembo Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gontara Kec. Mori Atas Pembangunan Jembatan Kawuyu Dusun 2 Desa Uemasi Kec. Bungku Utara Pembangunan Jembatan Koronjaya Dusun 1 RT. 01 Desa Peleru Kec. Mori Utara Pembangunan Jembatan Koroposampa Desa Tomata Kec. Mori Atas Pembangunan Jembatan RT IV Dusun II Desa Lee Kec. Mori Atas Pembangunan Jembatan Tole Kelompok Tani Desa Peleru Kec. Mori Utara Pembangunan Plat Duicker Desa Korololama Dusun III dan Dusun IV Kec. Petasia Pembangunan Riol dan Plat Duiker Desa Tabarano Kec. Mori Utara Pembuatan Jalan Pemukiman Dusun I Dan IV Desa Korololama Kec. Petasia Pembuatan Jembatan Gantung Desa Wawopada Kec. Lembo				
	- **Pemeliharaan Berkala Jembatan**	Kab. Morowali Utara	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Jembatan	-
	Pemeliharaan Berkala Jembatan Dusun I Desa Korompeeli Kec. Lembo				
7	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				
	- **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**				
	- **Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha**	Kab. Morowali Utara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	211 Unit Rumah	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sumara Jaya, Kec. Soyo Jaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Pokeang, Kec. Bungku Utara Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tandoyondo, Kec. Soyo Jaya				

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dusun I, II, III, Desa Tokonanaka, Kec. Bungku Utara Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Boba, Kec. Bungku Utara Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa aemba Walati, Kec. Mori Atas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dusun 1, 2 dan 3 Desa Posangke, Kec. Bungku Utara				
8	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				
	- **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				
	- **Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	Kab. Morowali Uatara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	8 Lokasi	
	Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Girimulya Dusun 1 dan 2, Kec. Mamosalato Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun I dan Dusun II, Kab. Desa Towara, Kec. Petasia Timur Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3, Tinompo, Kec. Lembo Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1,2 & 3, Pandauke, Kec. Mamosalato Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1-4, Korobonde, Kec. Lembo Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1 dan 2, Desa Siliti Kec. Bungku Utara				
	Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman DUSUN I, DUSUN II, DUSUN III, DUSUN IV, DUSUN V.,Desa Togo Mulyo, Kec. Petasia Barat Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tambarobone, Kec. Bungku Utara				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maka Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraiakn diatas dilakukan melalui:

1. Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum;
2. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;
3. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari;
4. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
5. Penataan Bangunan dan Lingkungan/Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
6. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Berkaitan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum mengimplementasikannya dalam Visi dan Misi yang diwujudkan melalui :

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di bidang jalan dan jembatan serta utilitas pendukung penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar dalam rangka mendukung pengintegrasian transportasi perkotaan dan perdesaan serta kelancaran barang dan jasa serta

mengurangi tingkat kemacetan.

2. Memenuhi sarana dan prasarana penyediaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pelayanan kebutuhan kepada masyarakat.
4. Mendorong berkembangnya industri konstruksi daerah yang handal dan kompetitif serta mempunyai daya saing yang tinggi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis sumber daya alam yang tersedia.
5. Meningkatnya Permukiman yang Berkualitas dan Produktif serta Meningkatnya Proporsi Kualitas Perumahan dan Permukiman
6. Mendorong kemitraan masyarakat dan dunia usaha jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Menerapkan sistem organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip *good governance* serta mengembangkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupatem Morowali Utara Maka Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah perlu menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang tedapat di dalam dokumen RENSTRA 2022 – 2026 Dinas PUPR, Perumahan dan Permukiman Daerah, yaitu :

Tujuan :

- **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD).**

Sasaran :

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap.
2. Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat.
3. Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni.
4. Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Pemutakhiran dari Kepmendagri 050-3708 Tahun 2023) adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Sub kegiatan:

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.

   Sub kegiatan:

   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

   Sub Kegiatan:

   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   - Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan.
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub kegiatan:

   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
   - Pengadaan Alat Besar

e. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Sub Kegiatan:

   - Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub kegiatan:
- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
- Pembangunan Breakwater
- Peningkatan Tanggul Sungai
- Pembangunan Check Dam
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- Pembangunan Bendungan
- Pembangunan Tanggul Sungai
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Sub kegiatan:
- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Peningkatan Bendung Irigasi
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.
   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
      Sub kegiatan:
      - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
      - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
      - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
      - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      Sub kegiatan:
      - Penyediaan Sub Sistem Pengelolahan Air Limbah Domestik (SPLD) Setempat.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
      Sub kegiatan:
      - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:
   a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
      Sub kegiatan:
      - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaPerencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:
   a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
      Sub kegiatan:
      - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
      - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
      - Penggantian Jembatan
      - Pembangunan Jalan
      - Rekonstruksi Jalan
      - Pemeliharaan Berkala Jalan
      - Pemeliharaan Rutin Jembatan
      - Pembangunan Jembatan
      - Pemeliharaan Berkala Jembatan
      - Pemeliharaan Rutin Jalan

8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:
   a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
      Sub kegiatan:
      - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
   Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:
   a. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota.
      Sub kegiatan:

- Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

10. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Sub kegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

11. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Adapun Kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.

12. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub kegiatan:

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di

Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

13. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

    Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

    a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

       Sub kegiatan:

       - Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Secara detail, rumusan rencana program dan kegiatan serta sumber pendanaan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapantan Asli Daerah (PAD) dan sumber dari Dana Daerah Lainnya (DDL) untuk tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

TABEL T-C. 33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	03				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**114.867.117.197,00**				**112.832.572.185,52**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**11.636.914.447,00**	DAU			**15.624.115.438,38**
1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Peningkatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu		**100%**	**8.089.155.635,00**				**8.322.863.653**
1	03	01	2.02	0001	**Penyediaan Gaji danTunjangan ASN**	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PUPRPKPD	69 Orang/Bulan	8.089.155.635,00	DAU		100%	**8.322.863.653**
					Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah								**4.363.306.878**
1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Penigkatan Sumber Daya Aparatur		**100%**	**149.105.635,00**				**240.000.000,00**
1	03	01	2.05	0011	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	DKI JAKARTA dan daerah lainnya	16 Orang	**149.105.635,00**	DAU		15 orang	**240.000.000**
					Bimbingan Teknis Ke Pu - an								
1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien		100%	**521.363.177,00**				**713.747.952,54**
1	03	01	2.06	0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	27 Paket	**201.322.340,00**	DAU		1 Paket	**158.404.953**
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Meja Esselon III Belanja Meja Staf 1/2 Biro Pengadaan Drone Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Laptop Pengadaan Lemari Arsip/Lemari Filling Cabinet - C119 Pengadaan Printer								
1	**03**	**01**	**2.06**	**0003**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	6 Paket	**34.084.629,00**	DAU		1 Paket	**60.343.000**
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Pengadaan AC Pengadaan Dispenser Pengadaan Kain Gorden								
1	**03**	**01**	**2.06**	**0005**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	1 Paket	**49.956.208,00**	DAU		1 Paket	**165.000.000**
					Belanja Cetak Penggandaan								
1	**03**	**01**	**2.06**	**0009**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	24 Laporan	**236.000.000,00**	DAU		24 Laporan	**330.000.000**
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi								
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Menigkatnya Kinerja Pelayanan Publik		**100%**	**-**				**2.540.000.000,00**
1	**03**	**01**	**2.07**	**0002**	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	0 Unit	**-**	DAU		2 unit	**940.000.000**
					Pengadaan Kendaraan Bermotor Dinas atau Lapangan								
1	**03**	**01**	**2.07**	**0003**	**Pengadaan Alat Besar**	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	0 Unit	**-**	DAU		2 unit	**1.600.000.000**
					Belanja Alat Besar/Berat								
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik		**100%**	**2.747.450.000,00**				**3.333.969.458,50**
1	**03**	**01**	**2.08**	**0002**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	48 Laporan	**159.250.000,00**	DAU		12 Laporan	**238.446.827,73**
					Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**03**	**01**	**2.08**	**03**	**Penyedia Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	-	**-**	DAU		0%	**115.235.696,49**
1	**03**	**01**	**2.08**	**0004**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PUPRPKPD	68 Laporan	**2.588.200.000,00**	DAU		12 Laporan	**2.980.286.934,28**
					Belanja Gaji P3K Belanja Lembur Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran/Penerima Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerima Honorarium Jasa Tenaga Supir Honorarium Operator Aplikasi Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium Pengurus / Penyimpan Barang Milik Daerah Honorarium Penilik Bangunan Gedung Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Honorarium Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung								
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien		100%	**129.840.000,00**				**473.534.374,72**
1	**03**	**01**	**2.09**	**0001**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ynag Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas PUPRPKPD	8 Unit	**62.500.000,00**	DAU		8 Unit	**131.544.621**
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan								
1	**03**	**01**	**2.09**	**0002**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas PUPRPKPD	-	**-**	DAU		0,00%	**120.981.747**
					Belanja pemeliharaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	01	2.09	0003	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar**	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Dinas PUPRPKPD	2 Unit	**30.000.000,00**	DAU		2 Unit	**128.926.772**
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								
1	03	01	2.09	0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PUPRPKPD	8 Unit	**37.340.000,00**	DAU		8 Unit	**92.081.234**
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer								
1	03	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai		**78,5%**	**7.360.000.000,00**				
						Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik		**52%**	**4.840.000.000,00**				
1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	persentase kawasan permukiman terlindungi infrasturktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai		**75,5%**	**4.840.000.000,00**				**8.905.946.106,36**
01	03	02	2.01	0080	**Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai**	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KAB. MOROWALI UTARA	0 Km	-	DAU		78,5%	**736.882.139**
1	03	02	2.01	0093	**Normalisasi/Restorasi Sungai**	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KAB. MOROWALI UTARA	2,75 KM	**425.000.000,00**	DAU		78,5%	**2.549.538.149**
					Lembur Normalisasi Sungai dusun 01, Kab. Morowali Utara, Momo, Kec. Mamosalato Normalisasi Sungai Dusun 1 dan 2, Kumpi, Kec. Lembo Normalisasi Sungai Desa Taliwan, Mori Utara Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan								
01	03	02	2.01	0102	**Pembangunan Breakwater**	Panjang Breakwater yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	0,5 Km	**355.000.000,00**	DAU		78,5%	**968.522.902**
					Pembangunan Pemecah Ombak Desa Baturube Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey. Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan			0,5					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
01	**03**	**02**	**2.01**	**0103**	**Peningkatan Tanggul Sungai**	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KAB. MOROWALI UTARA	0 Unit	-	DAU		78,5%	**389.529.349**
1	**03**	**02**	**2.01**	**0104**	**Pembangunan Check Dam**	Jumlah Check Dam yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	0 Km	-	DAU		78,5%	**158.185.402**
01	**03**	**02**	**2.01**	**0109**	**Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	0 Km	-	DAU		78,5%	**1.720.979.152**
01	**03**	**02**	**2.01**	**0111**	**Pembangunan Bendungan**	Jumlah Bendungan yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	1 Bendung	**405.000.000,00**	DAU		78,5%	**163.967.509**
					Pembangunan Bendungan Desa Tiwaa,Dusun 1 Rt 01, Kec. Mori Utara Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring								
1	**03**	**02**	**2.01**	**0115**	**Pembangunan Tanggul Sungai**	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	5,25 Km	**3.290.000.000,00**	DAU		78,5%	**2.054.373.995**
					Lembur Pembangunan Bronjong Desa opo dusun II, Kab. Morowali Utara Pembangunan Bronjong sungai sokita desa Po'ona, Kec. Lembo Raya Pembangunan Bronjong Belakang SDN Ensa, Ensa, Kec. Mori Atas Pembangunan Bronjong dusun 1, Uempanapa, Kec. Bungku Utara Pembangunan Bronjong Dusun 1 Desa Winangobino, Kec. Mamosalato Pembangunan Bronjong Desa Tokala Atas, Kec. Bungku Utara Pembangunan Bronjong Dusun II RT 5 (Usulan P1 Tahun 2022 2023) Pembangunan Tanggul Sungai desa Menyo'e, Kec. Mamosalato Pembangunan Tanggul Sungai Dusun I Dusun II Desa Kalombang, Kec. Bungku Utara Pembangunan Tanggul Sungai Dusun III DesaTananagaya, Kec. Mamosalato Pembangunan Tanggul Sungai dusun 2 desa korolaki, Kec. Petasia Pembangunan Tanggul Sungai Lingkungan 1 Kelurahan Bahoue, Kec. Petasia								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Pembangunan Tanggul Sungai Desa Tananagaya, ec. Mamosalato Pembangunan Tanggul Sungai Beo Dusun III (Usulan P1 Tahun 2024) Pembangunan Tanggul Sungai Desa Koromatantu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan								
01	03	02	2.01	0117	**Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya**	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	0,4 KM	**365.000.000,00**	DAU		78,5%	**163.967.509**
					Pembangunan Tanggul Pantai Dusun II, Ueruru, Kec. Bungku Utara Pembangunan Tanggul Pantai Pantai Dusun 4, Desa Ganda-Ganda, Kec. Petasia Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan								
1	03	02	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik		**52%**	**7.360.000.000,00**				**13.206.109.788**
1	03	02	2.02	0002	**Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	5,05 Km	**2.040.000.000,00**	DAU		52,00%	**6.302.495.658**
					Belanja Alat Tulis Kantor Makan Minum Rapat Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Peleru, Kec. Mori Utara Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Tomata, Kec. Mori Atas Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Kayuputih Desa Tanasumpu, Mamosalato Pembangunan Saluran Pembuang D.I. Korondui Desa Korondui, Mori Atas Pembangunan Saluran Pembuang Irigasi Desa Lijo, Kec. Mamosalato Pembangunan Saluran Pembuang Irigasi Dusun III, Koromatantu, Kec. Petasia Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan Perjalanan Dinas Luar Daerah								
1	03	02	2.02	0008	**Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan**	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KAB. MOROWALI UTARA	0 KM	-	DAU		52,00%	**395.446.260**
1	03	02	2.02	0009	**Peningkatan Bendung Irigasi**	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	KAB. MOROWALI UTARA	0 Bendung	-	DAU		52,00%	**221.983.563**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**03**	**02**	**2.02**	**0014**	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KAB. MOROWALI UTARA	4, 36 Km	**1.130.000.000,00**	DAU		52,00%	**5.807.488.431**
					Makan Minum Rapat Perjalanan Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rehabilitasi Jaringan Irigasi dusun 1 dan 2, Mandula, Kec. Lembo Raya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Andolia Desa Pandaueke, Mamosalato Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ensa Desa Ensa, Mori Atas Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lijo Desa Lijo, Bungku Utara Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lintobulosa Desa Tomata, Mori Atas Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padawa Desa Padawa, Mori Atas Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Timbarasi Desa Tabarano, Kecamatan Mori utara								
1	**03**	**02**	**2.02**	**0015**	**Rehabilitasi Bendung Irigasi**	Jumlah Bendung Irigasai yang Direhabilitasi	KAB. MOROWALI UTARA	7 Bendung	**3.120.000.000,00**	DAU		52,00%	**221.983.563**
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan Rehabilitasi Bendung D.I. Tongko Desa Tomata, Mori Atas Rehabilitasi Bendung Irgasi D.I. Waraa Kecamatan Lembo Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun I, Saemba, Kec. Mori Atas Rehabilitasi Bendung Irigasi desa tamonjengi kelompok tani Tadogu, Kec. Mori Utara Rehabilitasi Bendung Irigasi Dusun 02, RT 08, , Tabarano, Kec. Mori Utara Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Ensa Desa Ensa, Mori Atas Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I. Gontara Tahap II Desa Gontara, Kecamatan Mori Atas								
1	**03**	**02**	**2.02**	**0021**	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KAB. MOROWALI UTARA	7 Km	**1.070.000.000,00**	DAU		52,00%	**256.712.313**
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Tersebar) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan dan Monitoring di 10 Kecamatan Perjalanan Luar Daerah Dalam Dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan OP								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten		**61%**	**8.035.000.000,00**		DAU/DAK		**8.095.235.958**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Tersediannya Sarana Dan prasarana air minum		**1919 Unit**	**8.035.000.000,00**				**8.095.235.958**
1	**03**	**03**	**2.01**	**0026**	**Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Morowali Utara	2 Liter/Detik	**775.000.000,00**			61,00%	**5.655.933.832**
					pembuatan jaringan air bersih desa tambayoli Pengawasan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bimor Jaya Peningkatan SPAM Desa Toddopuli Uebangke Kec. Soyo Jaya Perencanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Bimor Jaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi							
1	**03**	**03**	**2.01**	**0028**	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	Kab. Morowali Utara	21 Liter/Detik	**6.325.000.000,00**			61,00%	**593.406.832**
					Pembangunan Air Bersih Desa Mohoni Pembangunan air bersih desa pontangoa Pembangunan Air Bersih desa saemba kec. mori atas Pembangunan Air Bersih Desa Taronggo Pembangunan air bersih desa togo Pembangunan Air Bersih Desa Tompira Pembangunan Air Bersih Dusun I, II dan III (Usulan P1 Tahun 2024) Pembangunan air bersih kec. bungku utara pembangunan fasilitas air bersih desa bungintimbe Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Bau Kec. Soyo Jaya Pembuatan Papan Informasi SPAM Kab. Morowali Utara(Buah)							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Pembuatan Sumur Bor Desa Lanumor Kec. Mori Atas Pembuatan Sumur Bor Desa Matube Kec. bungku utara Pembuatan Sumur Bor Desa Tanauge Kec. Bungku utara Pembuatan Sumur Bor Desa Tandayondo Kec. Soyo Jaya Pembuatan Sumur Bor Desa Tokonanaka Kec. Petasia Pengadaan Pipa Air Bersih Desa Bimor Jaya Pengawasan Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan (Tersebar Kab. Morowali Utara) Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan (Tersebar Kab. Morowali Utara) Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Bungku Utara Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mamosalato Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mori Atas Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Mori Utara Perencanaan Sumur Dalam (Sumur Bor) Kec Soyo Jaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi							
1	**03**	**03**	**2.01**	**0029**	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Morowali Utara	3 Unit	**525.000.000,00**			61,00%	**500.000.000**
					Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Kab. Morowali Utara Perencanaan Operasional Dan Pemeliharaan SPAM (Tersebar Kab. Morowali Utara) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi							
1	**03**	**03**	**2.01**	**0032**	**Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Morowali Utara	673 SR	**410.000.000,00**			61,00%	**1.345.895.294**
					Belanja Lembur Non PNS Data base air bersih (tersebar kab. Morowali utara) Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan Perencanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasaan Perdesaan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara Perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Rangka koordinasi, konsultasi								
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		**50,45%**	**1.248.100.000,00**				**2.996.960.991**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	tersedianya sarana dan prasarana air limbah		**50,45%**	**1.248.100.000,00**				**2.996.960.991**
1	**03**	**05**	**2.01**	**0039**	**Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat**	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kab. Morowali Utara	271 Rumah Tangga	**1.248.100.000,00**	DAU		50,45%	**2.996.960.991**
					data base Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Tersebar Kab. Morowali Utara) Pembangunan Tangki Septik Individual (Tersebar Kab. Morowali Utara) Pengawasan Tangki Septik Individual (Tersebar Kab. Morowali Utara) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah								
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik		**69%**	**3.310.000.000,00**				**1.607.111.780**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	tersedianya sarana dan prasarana drainase untuk masyarakat		**69%**	**3.310.000.000,00**				**1.607.111.780**
1	**03**	**06**	**2.01**	**0012**	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Tersebar di. Kab. Morowali Utara	2119,58 M	**3.310.000.000,00**	DAU		69%	**1.607.111.780**
					Belanja Makan Minum Rapat Bidang Cipta Karya Data Base Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Tersebar di Kab. Morowali Utara) Drainase desa kumpi Kec. Lembo Drainase Desa Tambayoli Drainase Desa Wawondula								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					drainase dusun 6 desa tiu kec petasia barat								
					drainse desa matube								
					Pembangunan Drainase desa Sampalowo								
					pembangunan riol desa pambarea kec. mori atas								
					Pembangunan Riol Desa Tontowea Kec. Petasia Barat								
					pembangunan riol jalan lingkungan desa tiwaa								
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IKK Kec. Mamosalato								
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan IKK Kec. Soyo Jaya								
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Bahontula								
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Bahoue								
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kel. Kolonodale								
					Pengawasan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Tersebar di Kab. Morowali Utara)								
					Perencanaan Drainase Kec. Bungku Utara								
					Perencanaan Drainase Kec. Lembo								
					Perencanaan Drainase Kec. Mamosalato								
					Perencanaan Drainase Kec. Petasia								
					Perencanaan Drainase Kec. Petasia Barat								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Perencanaan Drainase Kec. Petasia Timur Perencanaan Drainase Kec. Soyo Jaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara Riol Desa Toddopuli Uebangke Kec. Mamosalato Riol Desa Wawondula Kec. Lembo								
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pemukiman		**53%**	**-**				**7.971.337.682**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota**	tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur untuk masyarakat		**53%**	-				**7.971.337.682**
1	**03**	**07**	**2.01**	**01**	**Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Morowali Utara	0 Sistem Jaringan	-			53%	**7.971.337.682**
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Banguan Gedung Yang Layak Fungsi		**67%**	**4.341.900.000,00**				**6.924.706.195**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	tersedianya sarana dan prasarana kantor		**67%**	**4.341.900.000,00**				**6.924.706.195**
1	**03**	**08**	**2.01**	**0018**	**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	KABUPATEN MOROWALI UTARA	5 Bangunan Gedung	**1.950.000.000,00**	DAU		67%	**5.473.475.814**
					Pemeliharaan Gedung Kantor (Tersebar Kab. Morowali Utara) Pengadaan ATK bidang cipta karya Pengawasan Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Rehab Bangunan Desa Mayumba, Kecamatan mori Utara, Kabupaten Morowali Utara Rehabilitasi Kantor Camat Lembo Raya Rehabilitasi Rujab Tanasumpu Rehab Rujab Camat Lembo								
1	**03**	**08**	**2.01**	**0021**	**Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Dokumen	6 Dokumen	**2.391.900.000,00**	DAU		67%	**1.451.230.381**
					Pembangunan Gedung Kantor Camat Soyo Jaya, Lembah Sumara Pembangunan Gedung Kantor Kab. Morowali Utara Pembangunan pagar kantor camat petasia barat Pembangunan Rujab Camat Bungku Utara Pengadaan Laptop SIMBG Bidang Cipta Karya (ROG STRIX G512LI) Pengadaan Meteran laser digital Pengadaan Printer Epson L-14150 Bidang Cipta Karya Pengawasan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Survey, Pengawasan, Monitoring di Kab. Morowali Utara Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		**65,37%**	**71.941.362.000,00**				**67.291.225.156**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan		**65,37%**	**71.941.362.000,00**				**67.291.225.156**
1	**03**	**10**	**2.01**	**0029**	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	KAB. MOROWALI UTARA	9 Dokumen	**1.050.000.000,00**	DAU	-	65%	**2.500.000.000**
					Dokumen Lingkungan Pembangunan/Peningkatan jalan Dokumen Lingkungan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan SP3 Jln. Negara Lembobelala Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tomata Perencanaan Peningkatan Jalan SP3 Jln. Provinsi Tomui Karya Perencanaan Peningkatan Jalan Tiu -Togo Perencanaan Peningkatan Jalan Uempanapa - Lemowalia Review Desain Perencanaan Jembatan Lembobelala								
1	**03**	**10**	**2.01**	**0030**	**Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa**	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KAB. MOROWALI UTARA	24 KM	**1.200.000.000,00**	**DAU/DAK**	-	65%	**6.700.000.000**
					Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan Pengawasan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)								
1	**03**	**10**	**2.01**	**0031**	**Penggantian Jembatan**	Jumlah Jembatan yang Diganti	KAB. MOROWALI UTARA	6 Jembatan	**6.101.000.000,00**	DAU	-	65%	**33.391.225.156**
					Penggantian Jembatan Desa Woomparigi Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara Penggantian Jembatan Kabupaten (Tersebar)								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Penggantian Jembatan Katu Kec. Mori Utara Penggantian Jembatan Koro Mayumba Penggantian Jembatan Lembobelala Kec. Lembo Raya Penggantian Jembatan Lemo Kec. Bungku Utara								
1	**03**	**10**	**2.01**	**0032**	**Pembangunan Jalan**	Panjang Jalan yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	28,06 KM	**7.800.000.000,00**	DAU	-	65%	**1.200.000.000**
					Pembangunan Jalan Dusun II, Tanauge, Kec. Petasia Pembangunan Jalan Desa Mayumba Kec. Mori Utara Pembangunan Jalan Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara Pembangunan Jalan Dusun I,II,III,IV dan V Desa Ulu Laa Kec. Petasia Barat Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Maralee Kec. Petasia Barat Pembangunan Jalan Masuk Pasar Baru Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Pembangunan Jalan Produksi Desa Bintangor Mukti Kec. Lembo Raya Pembangunan Jalan Produksi Dusun 1 Desa Peboa Kec. Petasia Timur Pembangunan Jalan Produksi Dusun 2 RT 5 Desa Kasingoli Kec. Mori Atas Pembangunan Jalan Produksi Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas Pembangunan Jalan Produksi Persawahan Tongko RT. 06 Desa Pambarea Kec. Mori Atas Pembangunan Jalan Produksi (Tersebar) Pembangunan Jalan SP3 Jalan Negara - Beteleme Tua Kec. Lembo Pembangunan Jalan SP3 Jalan Negara - Lembobelala Kec. Lembo Raya								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**03**	**10**	**2.01**	**0033**	**Rekonstruksi Jalan**	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KAB. MOROWALI UTARA	30,40 Km	**32.232.362.000,00**	DAU	-	65,37%	**1.200.000.000**
					Biaya Lembur								
					Biaya Makan dan Minum Rapat								
					Operasional Perjalanan Dinas Dalam Daerah								
					Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah								
					Penanganan Long Segmen Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Beteleme								
					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Dalam Desa Pancamakmur								
					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Ensa - Lanumor								
					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Lemo - Lemowalia								
					Penanganan Long Segmen Peningkatan Jalan Tiwaa - SP3 Jalan Kabupaten								
					Pengaspalan Jalan Desa Era Kec. Mori Utara								
					Pengaspalan Jalan Dusun I dan Dusun II Desa Mora Kec. Lembo								
					Pengaspalan Jalan Dusun I - Dusun II Desa Peonea Kec. Mori Atas								
					Pengaspalan Jalan Dusun I - Dusun IV Desa Lembontonara Kec. Mori Utara								
					Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Malino Jaya Kec. Soyo Jaya								
					Pengaspalan Jalan Dusun II Desa Wawopada Kec. Lembo								
					Pengaspalan Jalan Dusun I, II, III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur								
					Pengaspalan Jalan Dusun I - IV Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Raya								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Pengaspalan Jalan Pasar Dusun I Desa Bunta Kec. Petasia Timur								
					Peninggian Badan Jalan Tiu - Togo								
					Peningkatan Jalan Dalam Desa Tinompo								
					Peningkatan Jalan Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Raya								
					Peningkatan Jalan Desa Tabarano Kec. Mori Utara								
					Peningkatan Jalan Lingkar Atas Kantor Desa Bungintimbe								
					Peningkatan Jalan Lingkar Atas Maralee - Tiu								
					Peningkatan Jalan Tinompo - Onepute								
					Peningkatan Jalan Uempanapa - Lemowalia - Salubiro (Long Section)								
					Peningkatan Jalan Uepakatu - Manyoe								
					Peningkatan Jalan Ungkea - Towara Pantai								
					Peralatan ATK								
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi								
1	**03**	**10**	**2.01**	**0034**	**Pemeliharaan Berkala Jalan**	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KAB. MOROWALI UTARA	0,38 KM	**750.000.000,00**	DAU	-	65,37%	**11.500.000.000**
					Pemeliharaan Bahu dan Drainase Jalan Dalam Kota Kolonodale								
					Rehabilitasi Jalan Beteleme - Ronta								
1	**03**	**10**	**2.01**	**0038**	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	KAB. MOROWALI UTARA	1 JEMBATAN	**50.000.000,00**	DAU	-	65,37%	**8.000.000.000**
					Pemeliharaan Rutin Jembatan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**03**	**10**	**2.01**	**0040**	**Pembangunan Jembatan**	Jumlah Jembatan yang Dibangun	KAB. MOROWALI UTARA	27 JEMBATAN	**21.788.000.000,00**	DAU	-	65,37%	**500.000.000**
					Operasional Perjalanan Dinas Dalam Daerah								
					Pembangunan Jembatan Desa Mohoni, Kec. Petasia Timur								
					Pembangunan Jembatan Baturube II Kec. Bungku Utara								
					Pembangunan Jembatan Desa Sea Kec. Mamosalato								
					Pembangunan Jembatan Desa Uemasi Kec. Bungku Utara								
					Pembangunan Jembatan Dusun 1 Desa Tadaku Jaya								
					Pembangunan Jembatan Dusun I dan Dusun II Desa Lembobelala Kec. Lembo Raya								
					Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Petumbea Kec. Lembo Raya								
					Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Ronta Kec. Lembo Raya								
					Pembangunan Jembatan Dusun III Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur								
					Pembangunan Jembatan Dusun II Lemboroma Kec. Lembo								
					Pembangunan Jembatan Dusun II Petambata Desa Tingkeao Kec. Lembo								
					Pembangunan Jembatan Dusun I Tambalako Bawah Lembobaru Kec. Lembo								
					Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gontara Kec. Mori Atas								
					Pembangunan Jembatan Kabupaten (Tersebar)								
					Pembangunan Jembatan Kawuyu Dusun 2 Desa Uemasi Kec. Bungku Utara								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Pembangunan Jembatan Koronjaya Dusun 1 RT. 01 Desa Peleru Kec. Mori Utara Pembangunan Jembatan Koroposampa Desa Tomata Kec. Mori Atas Pembangunan Jembatan Masara Kec. Petasia Timur Pembangunan Jembatan Parangisi Kec. Mamosalato Pembangunan Jembatan Puawu Desa Wawopada Tahap II Pembangunan Jembatan RT IV Dusun II Desa Lee Kec. Mori Atas Pembangunan Jembatan Tole Kelompok Tani Desa Peleru Kec. Mori Utara Pembangunan Jembatan Wata Desa Lemowalia Pembangunan Plat Duicker Desa Korololama Dusun III dan Dusun IV Kec. Petasia Pembangunan Riol dan Plat Duiker Desa Tabarano Kec. Mori Utara Pembuatan Jalan Pemukiman Dusun I Dan IV Desa Korololama Kec. Petasia Pembuatan Jembatan Gantung Desa Wawopada Kec. Lembo								
1	**03**	**10**	**2.01**	**0042**	**Pemeliharaan Berkala Jembatan**	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	KAB. MOROWALI UTARA	6 JEMBATAN	**600.000.000,00**	DAU	-	65,37%	**500.000.000**
					Pemeliharaan Berkala Jembatan Dusun I Desa Korompeeli Kec. Lembo Pemeliharaan Rutin Jembatan (Tersebar)								
1	**03**	**10**	**2.01**	**0046**	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KAB. MOROWALI UTARA	1,48 KM	**370.000.000,00**	**DAU**	-	65,37%	**1.800.000.000**
					Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Kolonodale Pemeliharaan Rutin Jalan Korololama-PAM Kolonodale Pemeliharaan Rutin Jalan Korololama - Tiu Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Atas Beteleme-Tinompo								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi		**50,12%**	**153.840.750,00**	DAU			**223.580.066**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	tersedianya tenaga terampil konstruksi		**100%**	**153.840.750,00**				**113.580.066**
1	**03**	**11**	**2.01**	**0016**	**Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis**	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	KAB. MOROWALI UTARA	27 0rang	**153.840.750,00**	**DAU**		50,12%	**113.580.066**
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Lembur Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Biaya Sewa Kendaraan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia								
1	**3**	**11**	**2,02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	tersedianya dokumen perencanaan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan			-				**110.000.000**
1	**03**	**11**	**2.02**	**07**	**Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan**	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	kabupaten morowali utara	0,00%				2 Dokumen	**110.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang		**70%**	**2.000.000.000,00**				**2.098.298.919,34**
1	**3**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	Tersedianya dokumen Teknis RTRW Kab. Morowali Utara		**70%**	**350.000.000,00**				**1.600.000.000,00**
1	**03**	**12**	**2.01**	**0011**	**Penetapan RTRW Kabupaten/Kota**	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	KAB. MOROWALI UTARA	1 dokumen	**350.000.000,00**	DAU		70%	**500.000.000**
					Penetapan RTRW Kabupaten Morowali Utara								
1	**03**	**12**	**2.01**	**02**	**Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	KAB. MOROWALI UTARA	0 Dokumen	-	DAU		70%	**1.000.000.000**
1	**03**	**12**	**2.01**	**04**	**Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang**	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	KAB. MOROWALI UTARA	0 Dokumen	-	DAU		70%	**100.000.000**
1	**3**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang		70%	**1.550.000.000,00**				**200.000.000,00**
1	**3**	**12**	**2.02**	**0001**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	KAB. MOROWALI UTARA	1 Dokumen	**50.000.000,00**	DAU		70%	**200.000.000**
					Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Lembur Makan Minum Rapat								
1	**3**	**12**	**2.02**	**0002**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	KAB. MOROWALI UTARA	1 Dokumen	**1.500.000.000,00**	DAU		0%	**200.000.000**
					Penetapan RDTR Kawasan Industri Bungini Penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Baturube dan Sekitarnya								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	3	12	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota**	Persentase Laporan Forum Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang		70%	**100.000.000,00**				**298.298.919,34**
1	3	12	2.04	0004	**Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	KAB. MOROWALI UTARA	1 Dokumen	**100.000.000,00**	DAU		70%	**298.298.919**
					Perjalanan Dalam Daerah di 10 Kecamatan Perjalanan Luar Daerah								
1	04				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**12.500.050.000,00**				
1	04	03			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh		15%	**120.000.000,00**				**356.010.080,61**
1	04	03	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		15%	**120.000.000,00**	DAU			**356.010.080,61**
1	04	03	2.01	0004	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	KAB. MOROWALI UTARA	1 LAPORAN	**120.000.000,00**			15,00%	**356.010.081**
					Penyusunan Ranperda RP3KP Kabupaten Morowali Utara Perjalanan Dinas Luar Daerah								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Rumah Layak Huni		**50,19%**	**4.980.000.000,00**				**4.896.178.247**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**	Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat		**50,19%**	**4.980.000.000,00**				**4.896.178.247**
1	**04**	**04**	**2.01**	**0001**	**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) ha**	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	KAB. MOROWALI UTARA	838 Unit Rumah	**4.980.000.000,00**	DAU		50,19%	**4.896.178.247**
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Beteleme								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bimor Jaya								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bintangor Mukti								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Dolupo Karya								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Era								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Giri Mulya								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Jamor Jaya								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Keuno								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Korowalelo								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Korowou								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Malino								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Molores								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Onepute								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Pandauke								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Poona								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Saemba								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sampalowo								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sumara Jaya								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Taliwan								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tandoyondo								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tinompo								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tomui Karya								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tontowea								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Towara								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Uemasi								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Uluanso								
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Ungkea								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Wawopada								
					Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat								
					Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Morowali Utara								
					Honorarium Tenaga Lembur								
					Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Pembuatan Aplikasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Morowali Utara								
					Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Morowali Utara								
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sumara Jaya, Kec. Soyo Jaya								
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Pokeang, Kec. Bungku Utara								
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tandoyondo, Kec. Soyo Jaya								
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dusun I, II, III, Desa Tokonanaka, Kec. Bungku Utara								
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Boba, Kec. Bungku Utara								
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa aemba Walati, Kec. Mori Atas								
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dusun 1, 2 dan 3 Desa Posangke, Kec. Bungku Utara								
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah								
					Perjalanan Dinas Luar Daerah								
					Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya								
					Sosialisasi Cara Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Operator Desa Kecamatan Bungku Utara, Petasia, Petasia Barat, Petasia Timur, Lembo, Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara								
					Sosialisasi RTLH Terdampak Kawasan Kumuh Dalam Kota Kolonodale								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan		23%	**7.330.000.000,00**				**2.505.020.632**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	terbangunnya Panjang Jalan		23%	**7.330.000.000,00**				**2.505.020.632**
1	**04**	**05**	**2.01**	**0002**	**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	KAB. MOROWALI UTARA	40 Lokasi	**7.330.000.000,00**	Dau		23%	**2.505.020.632**
					Drainase Kolonodale								
					Jalan Lingkungan Desa Lemowalia								
					Jalan Lingkungan Dusun 3 Desa Tompira								
					Jalan Lingkungan Lorong Idola Pelita Pantai Kolonodale								
					Lanjutan Jalan LIngkungan Papoji Kel. Bahoue								
					Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan IV Hol Kel.Kolonodale								
					Pembangunan Jalan Lingkungan desa Kolo Bawah								
					Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mondowe								
					Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Tambale								
					Pembangunan Jalan Lingkungan Lorong Sehati Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara								
					Pembangunan Rabat Beton Desa Mohoni								
					Pembangunan Rabat Beton Desa Onepute								
					Pembangunan Rabat Beton Desa Taronggo								
					Pembangunan Rabat Beton Desa Tontowea								
					Pembangunan Rabat Beton Desa Uewajo								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Pembangunan Tanggul Kantor Camat Petasia Timur								
					Pembuatan Riol Kawasan Perumahan Desa Koromatantu								
					Pembuatan Talud GT Bukit Zaitun Desa Saemba								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Girimulya Dusun 1 dan 2, Kec. Mamosalato								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun I dan Dusun II, Kab. Desa Towara, Kec. Petasia Timur								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3, Tinompo, Kec. Lembo								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1,2 & 3, Pandauke, Kec. Mamosalato								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1-4, Korobonde, Kec. Lembo								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dusun 1 dan 2, Desa Siliti Kec. Bungku Utara								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman DUSUN I, DUSUN II, DUSUN III, DUSUN IV, DUSUN V.,Desa Togo Mulyo, Kec. Petasia Barat								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman Desa Tambarobone, Kec. Bungku Utara								
					Peningkatan Jalan Kawasan Perumahan dan Permukiman								
					Rabat Beton Desa Ganda-Ganda								
					Rabat Beton Desa Gililana								
					Rabat Beton Desa Londi								
					Rabat Beton Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Rabat Beton Puncak Harmoni Desa Korololaki Kec.Petasia Rabat Beton Samping Masjid Desa Korowasu Tanggul Desa Jamor Jaya Tanggul Desa Keuno Tanggul Desa Molores Tanggul Desa Uluanso Tanggul Lapangan Bola Dusun 4 Desa Peboa, Kec.Petasia Timur Tanggul Puncak Harmoni Desa Korololaki Tanggul Samping Kantor Camat / Belakang Masjid Nurul Taqwa Tomata							
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Ketersediaan Dokumen Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman		15%	**70.050.000,00**				**670.617.315**
1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	Tersedianya Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan		15%	**70.050.000,00**				**670.617.315**
1	**04**	**06**	**2.01**	**0001**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	KAB. MOROWALI UTARA	46 Laporan	**70.050.000,00**	Dau		15%	**670.617.315**
					Database dan Fasilitasi Penerbitan IMB Perumahan Swadaya Kabupaten Morowali Utara								
								TOTAL	**127.367.167.197,00**				

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025 dan isu-isu strategis rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025. Nomenklatur serta kodefikasi Program dan kegiatan untuk mecapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
2. Di dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024, masih belum

sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 86 tahun 2017 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda- beda;

3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaranyang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;
2. Menerapkan system *reward and punishment* terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat;
5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku;
6. Untuk menjaga efektivitas pelaksaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Kolonodale, 03 Juli 2023

Kepala Dinas PUPRPKPD
Kabupaten Morowali Utara,

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
NIP. 19731203 200012 1 003

PENETAPAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat tersusun.

Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Penetapan Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2024 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja.

Demikian semoga Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kolonodale, 23 Juni 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Daerah
Kabupaten Morowali Utara

BUHARMAN LAMBULI, S.Sos
NIP. 19711009 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH 2020..... 6
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH..... 6
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 7
2.3. ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 8
2.4. REVIEW TERHADAP PENETAPAN RKPD..... 22
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM..... 23

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 24
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL .. 24
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PENETAPAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 24
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 25

BAB IV. PENETAPAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN... 27

BAB V. PENUTUP 28

5.1 KESIMPULAN 28
5.2 HARAPAN 28
5.3 KAIDAH PELAKSANAAN 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun Pertama dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah atau disebut Penetapan Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rancagan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Penetapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara menterjemahkan dan mengoperasikan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke dalam Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Proses penyusunan Penetapan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang di formulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD) dan Renja SOPD juga diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Penetapan RKPD dan Renja SOPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SOPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SOPD yang dilanjutkan dengan Renja SOPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SOPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, Penetapan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2020 tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang kedudukan dan susunan Dinas Daerah;
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 30 tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Masing – masing Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penetapan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024

Tujuan penyusunan Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematik Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review Terhadap Penetapan RKPD

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terjadinya Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Penetapan Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. PENETAPAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Penetapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan.

Dalam penyusunan Penetapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Penetapan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 belanja langsung ditargetkan sebesar Rp. 10.873.546.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.727.813.153,- atau sebesar 98,66%.

.Untuk melihat hasil evaluasi tingkat capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat

pada uraian rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada Tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai.
b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara;
c. Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
d. Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan serta lintas Organisasi Perangkat Daerah
e. Terlaksananya Pembinaan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga proses Roda Pemerintahan dapat berjalan aman dan lancar.
f. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam dalam hal Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang proses pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
g. Terciptanya Ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam sehingga terciptanya kondisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang kondusif.
h. Terproteksinya sumber-sumber kebakaran secara dini.
i. Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran secara dini.
j. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Penegakan Perda, Perbup dan SDA pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2. Faktor Eksternal

a) Partisipasi masyarakat yang terus meningkat dalam mendukung penegakan PERDA dan Perkada serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
b) Koordinasi dengan TNI, POLRI dan instansi lain berlangsung dengan baik terutama dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c) Partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran lewat sosialisasi mengenai alat pemadam kebakaran dan cara menanggulangi kebakaran;
d) Kerjasama dengan pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan PERDA dan Perkada, dan Perlindungan Masyarakat;

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2021 mencapai 98,66%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraannya Tugas dan Fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Sekretariat

a. Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.
b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang terjadi di Bidang Sekretariat dimana keterbatasan petugas melebihi jam kerja seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya digantikan dengan hak yang lain.

2. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

a. Masih kurangnya keterampilan yang dimiliki anggota dalam melaksanakan tugas;
b. Perlunya penambahan perlengkapan sarana dan prasarana;

c. Status pengelolaan sarana prasarana sampai saat ini masih dilakukan OPD, untuk pemeliharaan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara, untuk ijin penggunaan dilakukan oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/ penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/ Dispenda.

3. Bidang Peraturan Daerah

a. Masih kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
b. Banyaknya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengakibatkan kerugian terhadap daerah .

4. Bidang Pemadam Kebakaran

a. Perlunya penambahan sarana dan prasarana armada dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran mengingat luasnya wilayah Kabupaten Morowali Utara;
b. Perlunya pelatihan anggota dalam penanganan pencegahan bahaya kebakaran.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranmerupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

(1). Menyusun Perencanaan Pembinaan Gangguan Ketentraman;
(2). Menyusun Perencanaan Pembinaan Ketertiban Umum;
(3). Menyusun Perencanaan Penegakkan Peraturan Daerah,Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;
(4). Menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS;

(5). Menyusun Perencanaan Proteksi Kebakaran;

(6). Menyusun Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran ;

(7). Menyusun Perencanaan Operasional Sarana dan Prasarana;

(8). Menyusun Perencanaan Data Informasi dan Pelaporan;

(9). Melaksanakan Penatausahaan Keuangan, Aset, Umum dan Kepegawaian;

B. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan susunan Organisasi Dinas Daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah mempunyai tugas membantu Bupati serta memimpin, merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

Kepala Satuan dalam mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. pelaksanaan administrasi pada urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas penyiapan penyelenggaraan dan pengordinasian, pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan asset, kepegawaian dan umum serta pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah. Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyiapan pengelolaan penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;

b. penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan aset serta urusan kepegawaian dan umum;
c. penyiapan perumusan kebijakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas – tugas kesekertariatan dan kepala bidang;
d. penyiapan pengordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan Unit Kerja/Instansi/Lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan masyarakat;dan
e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan rumusan Kebijakan Koordinasi Penyusunan Program secara terpadu;
f. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Asset;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dinas, anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan teknis administrasi, rencana kegiatan dan anggaran;
b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keuangan dan aset;
c. melaksanakan pengordinasian penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan rencana anggaran, perumusan kebijakan penyusunan kegiatan dan program kerja dinas;
e. melaksanakan evaluasi pelaporan dan monitoring keuangan dan aset;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan kebijakan teknis administrasi kepegawaian dan menghimpun, pengumpulan dan pengolahan data pegawai sesuai pedoman administrasi kepegawaian;
b. melaksanakan urusan administrasi kantor sesuai surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
c. melaksanakan petunjuk teknis menyusun Daftar Induk Kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatandan nominatif pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian ;
d. melaksanakan pengempulan data pegawai usulan kenaikan pangkat kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai, asuransi kesehatan Kartu Suami/Istri, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pengisian pejabat structural/fungsional, mutasi pegawai dan lain - lain;
e. melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat Keputusan Bupati;
f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi dan optimalisasi usulan permintaan kepegawaian sesuai kebutuhan formasi unit tugas;
g. melaksanakan evaluasi penyiapan bahan perlengkapan yang dibuthkan masing – masing bidang;
h. melaksanakan evaluasi penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing – masing bidang;
i. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas, memimpin, mengoordinasikan, penyiapan pedoman data operasi gangguan ketenteraman, pengendalian ketenteraman dan pembinaan ketenteraman serta menghimpun informasi dan pelaporan ketenteraman dan ketertiban di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan perencanaan dan penetapan program kerja ketenteraman dan ketertiban umum;

b. penyiapan penyelenggaraan bahan kajian teknis, kebijakan teknis dan fasilitas ketenteraman dan ketertiban umum serta kerjasama operasional;
c. penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan kajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketenteraman dan ketertiban umum dan kerjasama operasional;
d. penyiapan kajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan kerjasama operasional;
e. penyiapan teknis pengendalian operasional dan penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
f. penyiapan tugas pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
g. penyiapan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya serta pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
h. penyiapan perumusan pemelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
i. penyiapan evaluasi dan pelaporan tugas Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
j. penyiapan pengordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oelh pimpinan.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah membawahi

1. Seksi Pembinaan Gangguan Ketenteraman;
2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum; dan
3. Seksi Data Informasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Pembinaan Gangguan Ketenteraman

Seksi pembinaan gangguan ketenteraman mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pembinaan gangguan ketenteraman dan penegakan peraturan perundang – undangan daerah. Seksi pembinaan gangguan ketenteraman mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan program kerja operasional dan rencana kerja Seksi Pembinaan Gangguan Ketenteraman;

b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, gangguan ketenteraman daerah;
c. melaksanakan pengelolaan data pembinaan gangguan ketenteraman daerah;
d. melaksanakan pertimbangan dan saran sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, gangguan ketenteraman daerah;dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

(2) Seksi Pembinaan Ketertiban Umum

Seksi Pembinaan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, memimpin dan mengendalikan tugas – tugas seksi ketertiban umum yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama, Seksi Pembinaan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja ketertiban umum;
b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum masyarakat serta kerjasama operasional;
c. melaksanakan penyelengaraan ketertiban umum serta kerjasama operasional;
d. melaksanakan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
e. melaksanakan koordinasi penetapan rumusan pembinaan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum serta kerjasama operasional.
f. melaksanakan penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional dan tugas fungsi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
g. melaksanakan penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan dan pejabat lainnya serta gedung – gedung milik pemerintah daerah;
h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;

i. melaksanakan kerjasama pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum dengan pelaksanaan perlindungan masyarakat di Daerah Kabupaten Morowali Utara;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas ketenteraman dan ketertiban umum daerah;dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Data Informasi dan Pelaporan.

Seksi Data Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta mengolah data hasil analisis serta menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pada Seksi Data Informasi dan Pelaporan. Seksi Data Informasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan dan mengolah data informasi dan pelaporan sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan laporan;
b. melakukan analisis atas hasil evaluasi pelaporan data kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
c. melaksanakan pelaporan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah; sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait ;
d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait serta menyajikan data Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
e. melaksanakan konsultasikan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh pentunjuk lebih lanjut;
f. melaksanakan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan, mengordinasi, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi pembinaan, pengawasan,

penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;
b. Menyiapkan kebijakan teknis, pengkajian dan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;
c. penyiapan pedoman, supervisi, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam ;
d. penyiapan kajian, fasilitasi, koordinasi penyelenggaran dan penyidikan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam ;
e. penyiapan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan serta pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam serta fasilitasi;
f. penyiapan pelaporan teknis operasional penyidikan serta pemeriksaan pelanggaran tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam;dan
g. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam, membawahi :

1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
2. Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Seksi Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian, mengendalikan dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan . Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan teknis rumusan penegakan Peraturaran Daerah dan Peraturan Bupati;
b. melaksanakan kajian, fasilitasi, penyusunan pedoman dan penyelidikan serta supervisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d. melaksanakan fasilitasi operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daeah dan Peraturan Bupati;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
f. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

(2) Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan, mengordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang – undangan daerah . Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan perumusan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
b. melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
c. melaksanakan pengolahan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan seksi koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
d. melaksanakan pengendalian, pelaporan dan evaluasi kebijakan teknis dan fasilitasi Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Seksi Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Perundang – Undangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan pengembangan Seksi Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
b. melaksanakan pengendalian kebijakan teknis operasional, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
d. melaksanakan pengolahan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah;
e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
f. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah;
g. melaksanakan analisa, pelaporan dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambil kebijakan pimpinan;dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penyiapan urusan pemerintahan, dan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan masyarakat. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran Daerah;
b. penyiapan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran;
c. penyiapan penyusunan standarisasi prosedur tetap di Bidang Pemadam Kebakaran;
d. penyiapan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan dan pencegahan Bidang Pemadam Kebakaran;
e. penyiapan pembinaan, pengordinasian pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pencegahan;
f. penyiapan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
g. penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran;dan;
h. penyiapan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :

1. Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran; dan
3. Seksi Operasional Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran

Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, merencanakan dan koordinasi serta mengawasi pengendalian program usaha – usaha yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran. Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan pola pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;
b. melaksanakan peningkatan dan mengembangkan sistem metode peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c. melaksanakan persyaratan teknis menentukan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan ;
d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
e. melaksanakan permohonan ijin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran dengan menerima dan meneliti berkas - berkas;
f. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan kedepan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan bakar berbahaya yang mudah terbakar;
h. melaksanakan pengajuan bahan dan peralatan Proteksi Kebakaran di setiap instansi atau perusahaan;
i. melaksanakan pelaporan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program usaha – usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan pemadam kebakaran. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kepada masyarakat luas dan dinas atau instansi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
b. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggraan kegiatan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
c. melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran dan instalasi gedung;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya terkait penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
g. melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri;dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Operasional Sarana dan Prasarana

Seksi Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi operasional kebakaran mengacu pada rencana strategi;
b. melaksanakan kajian, bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap di Seksi Operasional Sarana dan Prasarana;
c. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, operasional kebakaran;
d. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional kebakaran;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian hydrant kebakaran dan sumber daya air lainnya;

f. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraam operasional, sarana dan prasarana;
g. melaksanakan penyusunan sistem komunikasi informasi dan petakan wilayah kebakaran;
h. melaksanakan penyusunan rencana kerja saranan dan prasarana kebakaran mengacu pada rencana strategis kerja;
i. melaksanakan kajian perumusan kebijakan teknis dan mengumpulkan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana;
j. melaksanakan dan mengumpulkan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana;
k. melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran
l. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi operasional dan sarana prasarana, teknis kebakaran;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Adapun analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel T-C.30

2.4. Review Terhadap Penetapan RKPD

Adapun review terhadap Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagaimana terurai dalam Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program

Dalam Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, di samping berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 – 2026. Untuk lebih jelas hasil telaahan usulan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara terurai pada

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijaksanaan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 - 2026, disebutkan bahwa melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara harus memiliki prospek yang kompetitif berkelanjutan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik beratkan pada strategi Perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pelaksanaan Trantibum, Penegakkan Perda, Peraturan Bupati, dan Proteksi Kebakaran Dini dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat.

Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan yang akan dilakukan adalah :

a. Menyusun Perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pelaksanaan Trantibum, Penegakkan Perda, Peraturan Bupati, dan Proteksi Kebakaran Dini dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat.
b. Meningkatkan basis data perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Trantibum, Penegakan Perda, Perhub, SDA, dan Proteksi Kebakaran Dini.
c. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas Pelaksanaan Trantibum, Penegakan Perda, Perhub, SDA, dan Proteksi Kebakaran Dini.
d. Meningkatkan kualitas Pelayanan.
e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

3.3 Program Dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menangani urusan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, penegakan perda, peraturan bupati dan poteksi kebakaran dini serta tugas pembantuan.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan di daerah serta pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang terdiri dari 7 Program dan 12 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
   1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Program Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah,terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
   1. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor;
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
c. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
d. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
e. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   1. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
   2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
f. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

g. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah

1. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB IV
PENETAPANRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah yang berisi Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Tahun 2024, yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran. Mengingat keterbatasan Sumber Daya Anggaran Pelaksanaan Program Pembangunan yang ditetapkan dalam Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun Penetapan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah pada Tabel T - C. 32

BAB V
PENUTUP

Dengan berpedoman pada Penetapan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut :

5.1 KESIMPULAN

1. Penetapan Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan.
2. Penetapan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2024 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

5.2 HARAPAN

1. Dalam pelaksanaan Penetapan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara ini, diharapkan seluruh Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program- program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Penetapan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali

Utara.

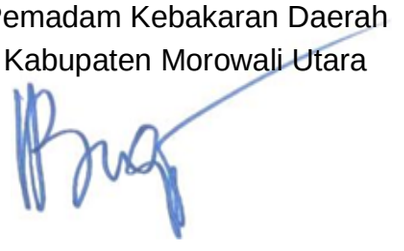
5.3 KAIDAH PELAKSANAAN

Penetapan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2024 ini akan dapat terwujud jika seluruh perangkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridho atas terwujudnya Penetapan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2024. Amin.

Kolonodale, 23 Juni 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Daerah
Kabupaten Morowali Utara



BUHARMAN LAMBULI, S.Sos

NIP. 19711009 199403 1 007

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Morowali Utara

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Peningkatan Pengelolaan tata tertib administrasi keuangan yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	32 Orang		52 Orang	52 Orang	
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			80%	81%	82%	83%	80%		82%	83%	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			363 Stel	300 Paket	22 Paket	22 Paket	363 Stel		22 Paket	22 Paket	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	2 Orang	4 Orang	-		2 Orang	4 Orang	
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah				7 Unit	12 Unit	22 Unit			12 Unit	22 Unit	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-		1 Unit	1 Unit	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	5 Unit	10 Unit	20 Unit	-		10 Unit	20 Unit	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-		1 Unit	1 Unit	
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Barang Bangunan Kantor			12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan		-	-	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34 Laporan	28 Laporan	14 Laporan	28 Laporan	34 Laporan		14 Laporan	28 Laporan	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	1 Dok	1 Dok	-		1 Dok	1 Dok	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
	Terselenggaranya kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efisien			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit		6 Unit	6 Unit	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	8 Unit	1 Unit (Dari 8 Unit)	3 Unit (Dari 8 Unit)	8 Unit		1 Unit (Dari 8 Unit)	3 Unit (Dari 8 Unit)	
	Terlaksananya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100%		10 Kecamatan	10 Kecamatan	
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			10 Kasus	11 Kasus	12 Kasus	13 Kasus	10 Kasus		12 Kasus	13 Kasus	
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada Yang Terlayani					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			10 Kasus	11 Kasus	12 Kasus	13 Kasus	10 Kasus		12 Kasus	13 Kasus	
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya			-	-	4 Orang	5 Orang	-		4 Orang	5 Orang	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan		10 Kecamatan	10 Kecamatan	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			-	-	10 Laporan	10 Laporan	-		10 Laporan	10 Laporan	
	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			-	1 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	-		5 Laporan	8 Laporan	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			-	1 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	-		5 Laporan	8 Laporan	
	Persentase Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			95%	95%	96%	97%	95%		96%	97%	
	Terlaksananya Pencegahan Pengedalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			95%	95%	96%	97%	95%		96%	97%	
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-		5 Dokumen	5 Dokumen	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			10 Laporan	15 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	10 Laporan		20 Laporan	25 Laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			-	1 Unit	1 Unit	2 Unit	-		1 Unit	2 Unit	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			-	2 Orang	3 Orang	5 Orang	-		3 Orang	5 Orang	
	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			-	96%	97%	98%	-		97%	98%	
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			-	2 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	-		4 Dokumen	5 Dokumen	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			-	95%	96%	97%	-		96%	97%	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya					122 Desa dan 3 Kelurahan	122 Desa dan 3 Kelurahan			122 Desa dan 3 Kelurahan	122 Desa dan 3 Kelurahan	
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			-	20 Orang	50 Orang	80 Orang	-		50 Orang	80 Orang	

TABEL T - C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Penetapan RKPD)				Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.541.736.830**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.541.736.830**		
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4.808.115.982**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**4.808.115.982**		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.808.115.982	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.808.115.982	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**53.766.850**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**53.766.850**		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	42.052.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	42.052.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	11.714.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	11.714.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**280.418.850**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**280.418.850**		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.862.680	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.862.680	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Penetapan RKPD)				Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.349.470	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.349.470	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	226.206.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	226.206.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**26.825.650**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**26.825.650**		
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	8.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	8.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18.275.650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18.275.650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Penetapan RKPD)				Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8.009.074.648**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**8.009.074.648**		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.296.648	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.296.648	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.278.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.278.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.953.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.953.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**363.534.850**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**363.534.850**		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	57.540.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	57.540.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	305.994.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	305.994.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Penetapan RKPD)				Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**576.925.300**		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**576.925.300**		
1	**5**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**280.000.000**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**280.000.000**		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	13 Laporan	60.785.150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	13 Laporan	60.785.150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	13 Laporan	182.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	13 Laporan	182.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	37.214.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	37.214.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Penetapan RKPD)				Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	**5**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**228.099.300**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**228.099.300**		
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10 Laporan	150.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10 Laporan	150.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	77.699.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	77.699.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**5**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**68.826.000**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**68.826.000**		
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	8 Laporan	68.826.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	8 Laporan	68.826.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**329.999.910**		**PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**329.999.910**		
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**281.217.110**		**Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**281.217.110**		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulanga Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulanga Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Penetapan RKPD)				Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	60.003.610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	60.003.610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	116.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	116.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	45.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	45.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan. antar Lembaga. dan Kemitraan dalam Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	60.213.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan. antar Lembaga. dan Kemitraan dalam Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	60.213.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**5**	**4**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**-**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**			**-**		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	**5**	**4**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**48.782.800**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			**48.782.800**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Akhir RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan (Penetapan RKPD)				Catatan Penting
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	80 Orang	19.999.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	80 Orang	19.999.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	125 Desa/Kel	28.783.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	125 Desa/Kel	28.783.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
TOTAL								**14.448.662.040**					**14.448.662.040**		

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

BUHARMAN LAMBULI, S.Sos
NIP. 19711009 199403 1 007

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH						**14.448.662.040,00**							**13.076.204.637,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.448.662.040,00**							**13.076.204.637,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.448.662.040,00**							**13.076.204.637,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**13.541.736.830,00**						**-**	**11.993.947.483,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.808.115.982,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	2.706.071.984,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49.00 Orang/bulan	4.808.115.982,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		2.706.071.984,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	53.766.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22.00 Paket	42.052.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4.00 Orang	11.714.350,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.418.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	305.287.930,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.862.680,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		135.287.930,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.349.470,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	226.206.700,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26.825.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	8.550.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	18.275.650,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.009.074.648,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	8.612.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	3.500.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	18.296.648,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	34.278.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.953.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		8.570.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	363.534.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	-	250.387.569,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	57.540.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		91.387.569,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	305.994.850,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		159.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**576.925.300,00**						**-**	**683.038.720,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	10 Kecamatan			-	280.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	10 Kecamatan	400.038.720,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	37.214.850,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				13 laporan	60.785.150,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		205.038.720,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				13 Laporan	182.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	10 Kecamatan			-	228.099.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	10 Kecamatan	184.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				10 Laporan	77.699.300,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	150.400.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		134.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	11 Laporan			-	68.826.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	11 Laporan	99.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				8 Laporan	68.826.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		99.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**329.999.910,00**						**-**	**399.218.434,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	99 Persen			-	281.217.110,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	99 Persen	334.218.434,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Laporan	60.003.610,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				5 Orang	45.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				2 Unit	116.000.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		204.218.434,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	60.213.500,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	99 Persen			-	48.782.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	99 Persen	65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				80 Orang	19.999.000,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				125 Desa/Kelurahan	28.783.800,00	Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
	J U M L A H							**14.448.662.040,00**							**13.076.204.637,00**	

RENCANA KERJA TAHUN 2024



BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan merupakan penjabaran yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021 - 2026 dan Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi sasaran acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja berdasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dan sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfataan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD yang didasarkan pada penalaan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD
2. Rumusan program/kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
3. Penyusunan renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan kegiatan APBD.
4. Program dan kegiatan yang di rencanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun -n dan tahun +1.

   Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD

merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA PPAS dan RAPDB.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor: 23);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Rencana Kerja (RENJA) menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang mengacu pada RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan sitematika sebagai Berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD……. Tabel. T-C.29.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan…….. Tabel. T-C.30.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- 2.4 Review Terhadap RKPD …….. Tabel. T-C. 31.
- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. Tabel. T-C. 32.

BAB III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3.3 Program dan Kegiatan ……
Tabel. T-C. 33.
BAB IV Dana Indikatif, Sumber Dana Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Tabel 5 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024
BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (RENJA) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023

Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan(Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun lalu 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Target Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
4.01.03.08.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran**								
4.01.03.08.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran	0	94,90	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4.01.03.08.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	0	98,77	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4.01.03.08.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0	100,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4.01.03.08.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Efektif dan Efesien**								
4.01.03.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4.01.03.08.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4.01.03.08.21	**PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA**	**Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah**								
4.01.03.08.21.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya informasi pembangunan daerah	0	86,69	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4.01.03.08.20	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH / WKDH**	**Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH**								
4.01.03.08.20.05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Internal Pemerintah Daerah	0	99,52	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**									
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**									
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Hak-hak ASN**								
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!

4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif**								
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8	0	0	0	#DIV/0!	7	7,00	87,50
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0	0	4	4	100,00	0	4,00	#DIV/0!
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	0	1	1	100,00	1	2,00	200,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	0	1	1	100,00	1	2,00	200,00
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**								
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0,00	#DIV/0!
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	0	1	1	100,00	1	2,00	200,00
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**								
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	0	1	1	100,00	2	3,00	100,00
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan**								
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1	0	1	1	100,00	1	2,00	200,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1	0	1	1	100,00	1	2,00	200,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1	0	1	1	100,00	1	2,00	200,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan yang meliputi Kecamatan dan Kelurahan, Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumntasi;
c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi dan ;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran			-	-	-	-	-	-	-	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2016
2	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Terlaksananya informasi pembangunan daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jumlah Kunjungan Kerja Internal Pemerintah Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			0	0	0	0	0	-	0	0	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
9	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			0	7	8	8	0	-	8	8	
10	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			4	0	0	0	4	-	0	0	
11	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1	1	1	1	1	-	1	1	
12	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1	1	1	1	1	-	1	1	
13	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			0	0	0	0	0	-	0	0	
14	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			0	1	1	1	0	-	1	1	
15	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1	1	1	1	1	-	1	1	
16	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1	2	3	4	1	-	3	4	
17	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan			1	1	1	1	1	-	1	1	
18	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan			1	1	1	1	1	-	1	1	
19	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan			1	1	1	1	1	-	1	1	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain **REFORMASI BIROKRASI,** sebagaimana yang di amanatkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tujuan yang hendak dicapai terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik, Bersih, dan Profesional melalui prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik (Good Government) dengan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kinerja aparatur;
2. Terlaksananya fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH;
3. Terlaksananya fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
4. Terlaksananya fasilitasi Pendokumentasian Tugas Pimpinan;

Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (*good gonernance)* merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap pembangunan dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

2.4. Review Terhadap RKPD

Review RKPD adalah membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, seperti tabel T-C. 31.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Lokasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BAG. PROKOMPI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100%**	**1.471.452.422**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**BAG. PROKOMPI**	**PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100%**	**1.471.452.422**	
	BAG. PROKOMPI	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**442.521.222**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BAG. PROKOMPI**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	**442.521.222**	
	BAG. PROKOMPI	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 paket	50.753.222,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAG. PROKOMPI	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 paket	50.753.222	
	BAG. PROKOMPI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	102.100.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BAG. PROKOMPI	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	102.100.000	
	BAG. PROKOMPI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	289.668.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAG. PROKOMPI	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	289.668.000	
	BAG. PROKOMPI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**329.800.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAG. PROKOMPI**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**329.800.000**	
	BAG. PROKOMPI	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	20.800.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAG. PROKOMPI	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	20.800.000	
	BAG. PROKOMPI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	309.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAG. PROKOMPI	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	309.000.000	
	BAG. PROKOMPI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**19.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BAG. PROKOMPI**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	**19.000.000**	
	BAG. PROKOMPI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	19.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BAG. PROKOMPI	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	19.000.000	

	BAG. PROKOMPI	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan**	**100%**	**680.131.200**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**BAG. PROKOMPI**	**Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan**	**100%**	**680.131.200**	
	BAG. PROKOMPI	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 laporan	201.407.600,00	Fasilitasi Keprotokolan	BAG. PROKOMPI	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 laporan	201.407.600	
	BAG. PROKOMPI	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 laporan	212.043.400,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	BAG. PROKOMPI	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 laporan	212.043.400	
	BAG. PROKOMPI	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 laporan	266.680.200,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	BAG. PROKOMPI	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 laporan	266.680.200	
									Jumlah	**1.471.452.422**	

Kolonodale, April 2023

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kabupaten Morowali Utara

HERRY Y PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19870218 200602 1 001

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara seperti yang disajikan dalam Tabel T-C. 32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**BAG. PROKOMPI**	**PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100%**	
I.1.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bag. Prokompi**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**	**100%**	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Prokompi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 paket	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. Prokompi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Prokompi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	
I.2.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Prokompi**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Prokompi	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bag. Prokompi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	
I.3.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bag. Prokompi**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**	**100%**	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bag. Prokompi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	
I.4.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Bag. Prokompi**	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	**100%**	
a	Fasilitasi Keprotokolan	Bag. Prokompi	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 laporan	
b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bag. Prokompi	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 laporan	
c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bag. Prokompi	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 laporan	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut harus paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini adalah :

a. Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah untuk Tahun 2024 sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Program Pokok serta kegiatan dengan skala prioritas yang dilandasi dengan kondisi daerah, baik secara langsung maupun melalui DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Daerah

Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2024 dan sebagai alat evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak tertampung dalam anggaran tahun 2023.

b. Memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama 1 (satu) tahun mendatang.

Sasaran Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah:

a. Tercapainya dan terarahnya suatu Rencana Kerja (RENJA) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Otonomi Daerah tahun 2024;
b. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan serta tepat waktu dan tertibnya administrasi pemerintahan;
c. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
d. Memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara, melalui laporan yang dapat disajikan tentang informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap bulannya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

4. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

   - Fasilitasi Keprotokolan

   - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

   - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Morowali Utara

Nama Perangkat Daerah : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2025
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH**								
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**1.471.452.422,00**				**1.530.310.542,59**
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien**			**442.521.222,00**				**407.196.167,59**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Bag. Prokompi	8 paket	50.753.222,00	DAU		1 paket	64.428.667,59
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bag. Prokompi	1 paket	102.100.000,00	DAU		1 paket	115.000.000,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pusat, Provinsi dan Daerah Lainnya	1 laporan	289.668.000,00	DAU		1 laporan	227.767.500,00
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**			**329.800.000,00**				**268.900.000,00**
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang	Bag. Prokompi	1 laporan	20.800.000,00	DAU		1 laporan	25.500.000,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bag. Prokompi	1 laporan	309.000.000,00	DAU		2 laporan	243.400.000,00
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Publik**			**19.000.000,00**				**21.000.000,00**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bag. Prokompi	3 unit	19.000.000,00	DAU		1 unit	21.000.000,00

4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan**			**680.131.200,00**				**833.214.375,00**
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Kab. Morut/Luar Daerah	1 laporan	201.407.600,00	DAU		1 laporan	259.638.750,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Morut/Luar Daerah	1 laporan	212.043.400,00	DAU		1 laporan	270.388.125,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Kab. Morut/Luar Daerah	1 laporan	266.680.200,00	DAU		1 laporan	303.187.500,00
				JUMLAH	**1.471.452.422,00**				**1.530.310.542,59**

Kolonodale, April 2023

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kabupaten Morowali Utara

HERRY Y PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19870218 200602 1 001

BAB IV
DANA INDIKATIF, SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang juga diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2023, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.471.452.444,00,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)

Dana tersebut diperuntukkan bagi pencapaian program dan kegiatan rutin dan kegiatan baru yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Sehingga memberikan nuansa penambahan wawasan baru dalam pencapaian target sasaran yang direncanakan.

Lebih lanjut mengenai gambaran keperluan dana/pagu indikatif, dan perkiraan target 2024 dapat dilihat dalam tabel Rencana Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali utara sebagaimana terlampir.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan proses perencanaan atas kerjasama seluruh komponen Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan saran dan masukan dari pimpinan maupun staf, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka Rencana Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan/penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah dituliskan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini dapat membawa hasil positif dalam bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Visi dan Misi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, April 2023

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kabupaten Morowali Utara

HERRY Y PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19870218 200602 1 001

RENCANA KERJA
(RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upayapenyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam Rencana Kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Periode 2022-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4 Review Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, dan KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.4 Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2022-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Morowali Utara, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana KerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2022-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa Rencana Kerja tahunan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menetukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Utara
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan RPJMD
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah thn 2016 no 11, tambahan lembaran daerah kab. Morowali Utara no 25)
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 37).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2022 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2022 ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan

penganggaran, sehingga sumber–sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga terdapat informasi–informasi yang akan memudahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RenjaPerangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indicator ynag dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah

Berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam

peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Periode 2022-2026

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2022-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan program dan kegiatannya.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2024 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Periode 2022-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2024 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTahun 2023 dan Capaian RENSTRA Periode 2022-2026 akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel T-C-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dan Pencapaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Morowali Utara

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (KELUARAN) / KEGIATAN (HASIL)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA BPKD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BPKD TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2024	
					TARGET RENJA BPKD TAHUN 2023	REALISASI RENJA BPKD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5. 2. 01	***Program penunjang urusan pemerintahan daerah (90)***	Persentase lancarnya administrasi perkantoran								

			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 01. 2. 08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan	Presentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor								
5. 02. 01. 2. 08. 03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 01. 2. 08. 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Presentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 01. 2. 08. 04	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Presentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1. 2. 09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional								
5. 2. 1. 2. 09. 02	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1. 2. 09. 06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1. 2. 06	Administrasi umum perangkat Daerah									
5. 02. 01. 2. 06. 02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 01. 2. 06. 05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1. 2. 06 5. 2. 1. 2. 06. 09	Administrasi Umum Perangkat Daerah (90) - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (90)	Presentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. 2. 1. 2. 07	Program penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 01. 2. 07. 06	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
5. 2. 01. 2. 07. 9	- Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 01. 2. 07. 10	- Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 01. 2. 07. 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pengadaan Mebel (20)	Jumlah mebel yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5. 2. 1. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5. 2. 1. 2. 05. 11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1. 2. 05. 02	- Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(90)									
5. 2. 1. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(90)									
5. 02. 01. 2. 02. 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (90)	Data laporan keuangan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. 2. 2. 2. 01	***Program Pengelolaan Keuangan Daerah***		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2. 2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2.0 2. 2. 03.05	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terwujudnya pertanggungjawaban KDH yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2. 2. 04	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah									
5. 2. 2. 2. 04. 08	- Analis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Tersedianya bantuan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2.	Program pengelolaan keuangan daerah									
5. 02.0 2. 2. 05	Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah									
5. 2. 2. 2. 02. 05. 02	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terciptanya sistim informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5. 2. 3. 2. 01			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 03. 2. 01. 05	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terciptanya manajemen asset yang handal								
5. 02.0 3. 2. 01. 06	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terciptanya manajemen asset yang handal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 02. 2. 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (90)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 02. 2. 07	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (90)	Terwujudnya pengesahan DPA-SKPD se Kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 02. 2. 01. 07										
		Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2 5. 2. 2. 2. 01 5. 02.0 2. 2. 01. 07	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terwujudnya penyusunan APBD dan APBD-P setiap tahunnya								
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2 5. 2. 2. 2. 02 5. 02. 02. 2. 02. 01	Program pengelolaan keuangan daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Terciptanya pengelolaan kas daerah secara terstruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2. 2. 01 5. 02.0 2. 2. 01. 05	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah - Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Terwujudnya pengesahan DPA-SKPD se Kabupaten Morowali Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. 2. 2. 2. 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	100%	*100%*	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 02. 2. 01. 03	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terwujudnya pengesahan RKA-SKPD se Kab. Morowali Utara								
5. 2. 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 1. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terciptanya sistim pengelolaan gaji PNS								
5. 02. 01. 2. 02. 01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2	Program pengelolaan keuangan daerah									
5. 2. 2. 2. 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
5. 02. 02. 2. 02. 07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan pihak Ketiga (PFK)	Rekonsiliasi pajak PPN dan PPh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. 2. 2 5. 2. 2. 2. 03	Program pengelolaan keuangan daerah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 02. 02. 2. 03. 01	- Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. 2. 2	Program pengelolaan keuangan daerah									
5. 2. 2. 2. 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5. 02. 2. 2. 01. 01	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Khusus untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menentukan sendiri tolok ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerahsertanormadan standar pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lainnya yang berkaitan.

Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu :

1. Faktor Internal
    a. Masih belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah
    b. Masih kurangnyaSumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengelolaan keuangan daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Faktor Eksternal
    a. Kualitas pengelolaan keuangan daerah masih rendah, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan pegawai dalam pelaksanaan diklat teknis pengelolaan keuangan.
    b. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih belum sempurna, hal ini disebabkan data dalam pengelolaan keuangan sering terlambat.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengelolaan keuangan Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Mewujudkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai *Counsultant Partner*.
4. Peningkatan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
6. Mengikuti diklat teknis pengelolaan keuangan

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadapap Visi dan Misi Bupati Morowali Utara.

2.4 Review Terhadap RKPD 2023

Untuk reviev terhadap RKPD 2023 telah dilaksanakan oleh BAPEDA Morowali Utara, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel F.10

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara hanya menerima laporan dari pearangkat daerah terkait untuk ditindak lanjut berdasarkan rekomendasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mendukung keberhasilan pemerintah daerah.

Saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalamn Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga dengan demikian program dan kegiatan dalam dokumen pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan, sehingga kami pun belum merubah Program dan Kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Rencana Kerja tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Periode 2022-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana KerjaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2022-2026 sebagai berikut :

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara :

1. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang handal, transparan dan

akuntabel.

3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2024 ini kami belum dapat melakukan evaluasi *progress* pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana ketiga masih sedang berlangsung (2024).

Namun demikian target pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2024 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan berikut tabel Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 :

Tabel T-C. 31
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2024 menetapkan 3 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

c. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Mebel

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
   - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
   - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (FPK)

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
   - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan pembayaran cicilan pokok Dan bunga pinjaman pemerintah daerah

e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
   - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah
   - Inventarisasi Barang Milik Daerah

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2022-2026 khususnya pada Misi point ***Misi ke 5***, yaitu ***Meningkatnya profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangkah tata kelola pemerintahan yang baik***

oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimulai pada tahun 2022 mulai mengakomodir kegiatan yang bersifat pengembangan Aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Aparat Pengelola yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya, berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025 :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**2**				**KEUANGAN**								0					0
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**19,767,076,033.40**					**19,767,076,033.40**
5	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**41.887.949.755,00**					**41.887.949.755,00**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-Hak ASN	BPKAD	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	41.686.198.072,00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	41.686.198.072,00
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen hasil laporan keuangan	Data laporan keuangan semesteran	BPKAD	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	201.751.683,00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	201.751.683,00
5	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**403.827.500,00**					**403.827.500,00**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut dan perlengkapannya yang diadakan	Berkurangnya Pelanggaran Disiplin Aparatur	BPKAD	100 Persen	84 Pasang	84 Pasang	69.912.500,00			Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100 Persen	69.912.500,00
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	ASN yang bersetifikat	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	333.915.000,00			Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100 Persen	333.915.000,00
5	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**906.327.000,00**					**986,426,954.40**
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	159.042.000,00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	200,000,000.00
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya bahan logistik kantor	terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	BPKAD	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan				Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	200,000,000.00

5	0 2	0 1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang di adakan	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kantor	BPKAD	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	59,999,954.40			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	59,999,954.40
5	0 2	0 1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Secara Efektif Dan Efisien	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	526,427,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	526,427,000.00
5	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**800,000,000.00**					**800,000,000.00**
5	0 2	0 1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Mebel yang diadakan	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	200,000,000.00
5	0 2	0 1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000.00					200,000,000.00
5	0 2	0 1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah gedung kantor yang diadakan	tersedianya ruang kegiatan kantor yang memadai	BPKAD	100 Persen	1 unit	1 unit	200,000,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	200,000,000.00
5	0 2	0 1	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah sarana prasarana kantor yang diadakan	tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	200,000,000.00
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,140,139,208.00**					**2,140,139,208.00**
5	0 2	0 1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya hasil kinerja	BPKAD	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	200,000,000.00
5	0 2	0 1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	735,000,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	735,000,000.00
5	0 2	0 1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien	BPKAD	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	1,205,139,208.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	1,205,139,208.00
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**365,000,000.00**					**365,000,000.00**
5	0 2	0 1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	165,000,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	165,000,000.00
5	0 2	0 1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000.00			Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	200,000,000.00
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**181,975,788,602.00**					**181,975,788,602.00**
5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**134,999,800.00**					**134,999,800.00**
5	0 2	2	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	tersedianya dokumen KUA dan PPAS setiap tahunnya	BPKAD	100 Persen	4 dokumen	4 dokumen	134,999,800.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	134,999,800.00

5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**1,374,999,500.00**						**1,374,999,500.00**
5	0 2	0 2	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan RKA-SKPD	Terwujudnya pengesahan RKA-SKPD se Kab. Morowali Utara	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	344,999,850.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	344,999,850.00
5	0 2	0 2	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya pengesahan DPA-SKPD se Kab. Morowali Utara	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	329,999,800.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	329,999,800.00
5	0 2	0 2	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen Penjabaran APBD	Terwujudnya penyusunan APBD dan APBD-P setiap tahunnya	BPKAD	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	699,999,850.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	699,999,850.00
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**649,999,846.00**						**649,999,846.00**
5	0 2	0 2	2.02	01	Koordinasi danPengelolaan Kas Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan kas daerah secara terstruktur	Terciptanya pengelolaan kas daerah secara terstruktur	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatandari sektor Pajak	100 Persen	200,000,000.00
5	0 2	0 2	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Tersedianya dokumen laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	BPKAD	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	449,999,846.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	449,999,846.00
5	**2**	**2**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**799,999,657.00**						**799,999,657.00**
5	0 2	0 2	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Akurasi data pendapatan dan belanja	Terwujudnya rekon kas daerah	BPKAD	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	200,000,000.00
5	0 2	0 2	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen pertanggungjawaban APBD	Terwujudnya pertanggungjawaban KDH yang akuntabel	BPKAD	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	599,999,657.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	599,999,657.00
5	**2**	**2**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**178,305,506,599.00**						**178,305,506,599.00**

5	0 2	0 2	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya bantuan keuangan	tersedianya bantuan keuangan	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	178,305,506,599.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	178,305,506,599.00
5	**2**	**2**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**								**710,283,200.00**					**710,283,200.00**
5	0 2	0 2	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya pemeliharaan sistim informasi keuangan daerah	Terciptanya sistim informasi keuangan daerah	BPKAD	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	710,283,200.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	100 Persen	710,283,200.00
5	**2**	**3**			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								**874,908,000.00**					**874,908,000.00**
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**874,908,000.00**					**874,908,000.00**
5	0 2	0 3	2.01	05	Penatausahaan BarangMilik Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	tersedianya dokumen aset daerah	Terciptanya manajemen asset yang handal	BPKAD	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	225,000,000.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatandari sektor Pajak	- persen	225,000,000.00
5	0 2	0 3	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya inventarisasi aset daerah	Terlaksananya inventarisasi aset daerah	BPKAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	649,908,000.00			Jumlah dan persentase PAD, Meningkatnya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Peresentase Pendapatan dari sektor Pajak	- persen	649,908,000.00
												TOTAL	**202,617,772,635.40**					**202,617,772,635.40**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara, memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance And Clean Governance) Serta Akuntabel".

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



MASJUDIN SUDIN,SE.,MSi
NIP. 19650329 199303 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Nangka - Kolonodale Kec. Petasia

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor : 188.5/ 63 /BPKAD/II/2024

Tentang
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang :

a. Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja tahunan perangkat daerah sebagai penjabaran dari pentahapan pelaksanaan prorgram dan kegiatan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Morowali Utara;
b. Bahwa Rencana Kerja sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh bidang dilingkup BPKAD Kabupaten Morowali Utara dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
c. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut, maka dipandang perlu Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Motrowali Utara
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Pasal 1

a. Rencana strategis (renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yg ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul rencana strategis mengandung visi, misi dan tujuan, sasaran program kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat di capai ;
b. Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
c. Perangkat daerah (PD) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkanoleh organisasi;
e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh oraganisasi agar tujuan dapat terlaksanakan dan berhasil dangan baik;
f. Tujuan adalah suatu penjambaran atau impleentasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai dalam jangka waktu tertentu;
g. Sasaran adalah penjambaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan di tetapkan oleh yang berwenang untuk di jadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
i. Program adalah kumpulan dari kegiatan kegiatan yang mempunyai arah, tujuan, sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;

j. Kegiatan adalah aktifitas rutin sebagai bagian tugas dan pokok dan fungsi yang dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



MASJUDIN SUDIN,SE.,MSi
NIP. 19650329 199303 1 007

2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN LEMBO RAYA

TAHUN 2024

KEPUTUSAN CAMAT LEMBO RAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.4/032.1/CLR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN LEMBO RAYA
TAHUN 2024
CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);
b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5414);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tatacacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
14. ***Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor..... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah KabupatenMorowali Utara Tahun 2019 Nomor).***

M E M U T U S K A N

Menetapakan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara;
2. Melaksanakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara;
3. Melaksanakan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara;

KETIGA : Guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun ***2022-2024***, dan penjabaran RESTRA Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun ***2022-2024***, maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Petumbea
Pada tanggal : 06 Februari 2024

CAMAT LEMBO RAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARS

ANSAR, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19690808 199408 1 001

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Daerah periode 1 (satu) tahun

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembo Raya yang memuat tujuan, sasaran, Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dan kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih obyektif karena Rencana Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan namun demikian dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada. Kepada semua pihak yang telah berperan memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan RENJA Kecamatan Lembo Raya ini, di ucapkan terima kasih.

Petumbea, 06 Februari 2024

CAMAT LEMBO RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA KECAMATAN LEMBO RAYA

ANSAR, S.Sos

Pembina, IV/a

NIP. 19690808 199408 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara
Nomor : 188.4/ /CLR/II/2024
Tanggal : 06 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

1. Penanggungjawab : Camat Lembo Raya
2. Ketua : Sekretaris Camat
3. Sekretaris : Kasubag Program Keuangan Dan Asset
4. Anggota :
   1. Kasubag Kepegawaian Dan Umum
   2. Kepala Seksi Pemerintahan
   3. Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan
   4. Kepala Seksi Sosial Dan Kemasyarakatan
   5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   6. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Ditetapkan di : Petumbea
Pada tanggal : 06 Februari 2024

CAMAT LEMBO RAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA



ANSAR, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19690808 199408 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI ……..... ii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

1.1. Latar Belakang …….. 1

1.2. Landasan Hukum …….. 3

1.3. Maksud Dan Tujuan …….. 4

1.4. Sistematika Penulisan …… 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 ……..... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Dan Capaian Renstra SKPD 7

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 10

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …….. 12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat … 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……..... 16

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……..…… 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……..……. 18

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2024……..……...… 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...

BAB V PENUTUP . . . . . ……

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju mengenai dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

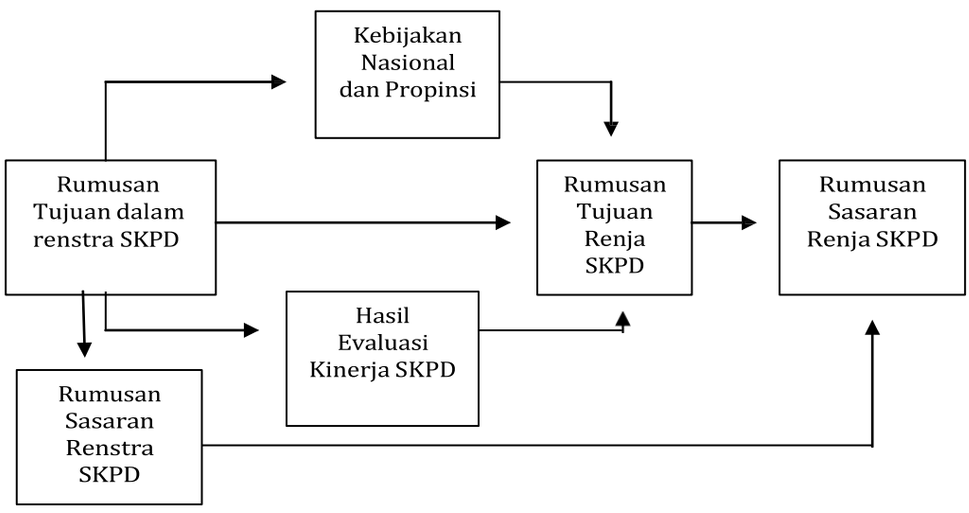
Renja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Renja Kecamatan Lembo Raya menerjemahkan RKPD Kabupaten Morowali Utara ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Penyusunan Renja Kecamatan Lembo Raya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Lembo Raya (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Renja Kecamatan Lembo Raya memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari VISI, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Lembo Raya, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di Wilayah Kerja Kecamatan. Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial Kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good Governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik ditingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayananan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

"Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah". Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1). Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2). Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3). Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4). Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5). Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
6). Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7). Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Lembo Raya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pengaggaran Pemerintah Daerah
13. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lembo Raya guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Morowali

Utara maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari element masyarakat. Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024 adalah :

1). Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2). Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara khususnya Kecamatan Lembo Raya;
3). Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4). Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LEMBO RAYA TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Lembo Raya
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lembo Raya
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LEMBO RAYA TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LEMBO RAYA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lembo Raya Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut:

URUSAN OTONOMI DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

      Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 6.500.000 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.500.000,- (100%), Kegiatan ini berupa Belanja Pakaian Latihan Peserta/Panitia/Pelatih/Pengapit-Kain dan Belanja Pakaian Seragam Upacara Peatih/Panitia – Kain. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan hasil yang diharapkan yaitu terlaksananya kegiatan administrasi kantor.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 7.979 .448,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.979 .447,- (100 %)

   Kegiatan ini berupa Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor (Kertas dan Cover) dan Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak), Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 48.679.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.679.500,- (100 %), kegiatan ini berupa belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar kota dengan hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan dan kelancaran tugas aparatur.

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 1.080.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.080.000,- (100%)**.** Kegiatan ini berupa Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor (benda pos). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat dengan hasil yang diharapkan yaitu lancarnya administrasi perkantoran.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 6.002.729,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.002.728,50,- (100%). Kegiatan ini berupa Belanja Listrik dengan hasil yang diharapkan yaitu lancarnya proses administrasi perkantoran.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 190.887.050,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 190.887.050,- (100%). Kegiatan ini berupa belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor (ATK), belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor (kertas dan cover), belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor (bahan computer) dan belanja jasa Tenaga Administrasi. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan hasil yang diharapkan yaitu lancarnya proses administrasi perkantoran.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 15.000000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000000,- (100%) . Kegiatan ini mencakup belanja pemeliharaan Alat angkutan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas.

5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input Tahun 2022 berupa dana Rp. 21.850.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.850.000,- (100%). Kegiatan ini mencakup Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya peninkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.

Dalam rangka meningkatkan partisiasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan Lembo Raya dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Musrenbang mengakomodasi aspirasi berbagai komponen yang ada di masyarakat serta menjawab permasalahan yang ada di lapangan.

Setiap tahunnya dilakukan musrenbang dan ditetapkan skala prioritas Desa dan Kecamatan Hasil yang dicapai dari hasil musrenbang adalah tersusunnya skala prioritas kecamatan untuk dibawa ke tingkat kabupaten.

Secara umum,Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel C.29

Tabel C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Pprogram(Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Ralisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Ralisasi (%)		Rrealisasi Capaian Program dan Keegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Wajib									
				Bidang urusan otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Ddaerah, Kepegawaian									
4.01	4.01.05		01	**Program Pelayanan Administrasi**	**Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor**								
4.01	4.01.05.01.03			Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa penunjang pelayanan	20% 100%	294%	100%	98%	98%	100%	492%	246.0%

4.01.4.01.05.01.13				Kegiatan Penyediaan dan	Tersedianya jasa penunjang	20%	285,40%	100%	99%	99%	100%	484.40%	242.2%
				Perlengkapan kantor	pelayanan	100%							
4.01.4.01.05.01.18				Rapat-rapat koordinasi	Terlaksananya rapat -rapat	1 Tahun	288,80%	100%	100%	100%	100%	488.80%	488%
				dan konsultasi dalam dan luar	koordinasi dan konsultasi	100%							
				Daerah	dalam dan luar daerah								
4.01.4.01.05.06				**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**			-						
				Pelaporan capaian kinerja									
				dan Keuangan									
4.01.4.01.05.06.01				Penyusunan laporan capaian	Tersedianya LAKIP	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
				kinerja dan ikhtiar realisasi		100%							
				kinerja SKPD									
4.01.4.01.05.06.02				Penyusunan Pelaporan	Tersedianya Laporan	1 Tahun	150%	100%	100%	100%	100%	350%	350%
				keuangan semesteran	Keuangan	100%							
4.01.4.01.05.03				**Program Peningkatan Disiplin**									
				Aparatur									
4.01.4.01.05.03.05				Pengadaan pakaian khusus	Tersedianya pakaian dinas	1 Paket	-	100%	-		100%		
				hari-hari tertentu	khusus hari-hari tertentu								
4.01.4.01.05.02				**Program Peningkatan Sarana**									
				dan Prasarana Aparatur									
4.01.4.01.05.02.22				Pemeliharaan rutin / berkala	Terlaksananya pemeliharaan	1 Tahun	-	100%	-		100%		
				gedung kantor	gedung kantor								
4.01.4.01.05.14				**Program**									

				Peningkatan									
				Partisipasi Masyarakat Dalam									
				Membangun Desa									
4.01.4.01.05.14.01				Peningkatan pembinaan	Terlaksananya pembinaan	10 Desa	187,10%	100%	99.78%	99%	100%	386.88%	386%
				Masyarakat	masyarakat	100%							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Lembo Raya menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, Maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapaun beberapa hal yang per lu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembo Raya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;

Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi. Secara umum Pencapaian Kinerja SKPD Kecamatan Lembo Raya dapat dilihat pada Tabel C.30

Tabel C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LEMBO RAYA

KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan penting
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
	* Penyelesaian jasa peralatan dan per pelengkapan kantor			100%	100%	100 %	100%	98.%	100 %	99%	100%]	
	* Penyelesaian peralatan dan perengkapan Kantor			100%	100%	1 Tahun 20%	100%	99.,7%	0.31%	98,7	100%	
	* Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			100%	100%	1 Tahun 20%	100%	98.7%	11.87%	100%	100%	
2	**Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Sistem Capaian Kinerja**											
	* Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD			100%	100%	1 Tahun 20%	100%	100%	100%	100%	100%	
	* Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran			100%	100%	1 Tahun 20%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**											
	* Peningkatan pembinaan masyarakat			100%	100%	-100%		99.78%	6.36%	99,80%	99,90%	
4	**Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur**											
	* Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			-	100%	1 Tahun		-	100%	100%	100%	
5	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**											
	* Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tertentu			-	100%	20%		-	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaannya, baik program maupun kegiatan tidak terlepas dari adanya hambatan baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembo Raya antara lain :

a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh personil yang terdapat di Kecamatan Lembo Raya.
b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, akan terus dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi, kebijakan penganggaran, serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Kecamatan Lembo Raya baik melalui diklat ataupun mengusulkan penambahan aparatur sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan. Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Lembo Raya juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Lembo Raya dalam mencapai Visi dan Misi antara lain :

a. Organisasi Kecamatan Lembo Raya merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
b. Sarana informasi yang berbasis teknologi informasi dan jarak tempuh dari kecamatan ke kabupaten memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
c. Adanya hubungan yang dinamis dengan masing-masing SKPD membantu pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ke Kecamatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berikut dapat kita lihat review rancangan awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Lembo Raya dalam tabel C.31

Tabel.C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Kecamatan Lembo Raya

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	100%	6.500000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	12 Bulan	6.500000,-	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	7.979.448,50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	7.979.448,50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lembo Raya	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	48.679.500,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lembo Raya	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	48.679.500,-	
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.080.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.080.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	6.002.728,50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	6.002.728,50	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	190.887.050,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	190.887.050,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	100%	65.140.220,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	100%	65.140.220,00	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	15.000.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	15.000.000	
5.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lembo Raya	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa	100%	21.850.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lembo Raya	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa	100%	21.850.000	

Tabel.C.32

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Morowali Utara

Nama SKPD : Kecamatan Lembo Raya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	6.500.000,-	APBD	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Penyediaan Barang dan Penggandaan	12 Bulan	7.979.448,50	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lembo Raya	Terlaksananya Rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	48.679.500,-	APBD	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1.080.000,-	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6.002.728,50	APBD	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	190.887.050,-	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	65.140.220,-	APBD	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	15.000.000,-	APBD	
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lembo Raya	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	12 Bulan	21.850.000,-	APBD	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Lembo Raya pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Morowali Utara dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Lembo Raya maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel C.33
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kecamatan Lembo Raya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pembangunan Gedung Serbaguna	Kec. Lembo Raya	Terbangunnya Gedung Serbaguna	1 (satu) Unit	
2.	Pemasangan Jaringan Wifi Kantor Camat Lembo Raya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Jaringan Wi-Fi Kantor Camat Lembo Raya	1 (satu) Paket	
3.	Pemasangan Paving Blok Kantor Camat Lembo Raya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Paving Blok Kantor Camat Lembo raya	1 (satu) Paket	
4.	Peningkatan Lapangan Kantor Lembo Raya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Lapangan Kantor Camat Lembo Raya	1 (satu) Paket	
5.	Pembangunan Tribun Kantor Camat Lembo Raya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Tribun Kantor Camat Lembo raya	1 (satu) Paket	
6.	Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Camat Lembo Raya	Kec. Lembo Raya	Tersedianya Pagar Kantor Camat Lembo raya	1 (satu) Paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Lembo Raya dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
b. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
c. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
d. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan.
e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Lembo Raya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
f. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan
g. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Lembo Raya, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Lembo Raya baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyrakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Morowali Utara yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat
6. Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya di kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
10. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
11. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PAD dan PBB kecamatan
13. Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan
14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam lomba Desa dan kegiatan Kemasyarakatan lainnya
15. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
16. Termonitornya kegiatan raskin yang tersebar di Kecamatan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Urusan Kewenangan Kantor Camat Lembo Raya pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pem.Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Untuk tahun 2024**,** Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

   Kegiatannya adalah :

   - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

2. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

   Kegiatannya adalah :

   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   Kegiatannya adalah :

   - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Kegiatannya adalah :

   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

   Kegiatannya adalah :

   - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Secara umum rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dalam Lampiran.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

PROVINSI SULAWESI TENGAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebuthan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan ***Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan***								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	Kec.Lembo Raya	**100%**	**672.239.844**	APBD		**100%**	**672.239.844**
	* Penyediaan jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Presentase Lancarnya Administrasi Perkantoran		100%	213.234.000			100%	213.234.000
	* Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100%	58.981.279	APBD		100 %	58.981.279
	* Rapat--rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			100%	176.248.800	APBD		100%	176.248.800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur**		3 Unit	**65.856.000**	APBD		4 Unit	**65.856.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		3 Unit	**65.856.000**			3 Unit	65.856.000
	* **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatnya Kemamampuan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2 Orang	25.987.500			3 Orang	25.987.500
	* Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2 Orang	25.987.500			3 Orang	25.987.500
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangan Desa	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan**	Kec. Lembo Raya	100%	**131.932.265**	APBD			**131.932.265**

BAB IV
P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Lembo Raya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Morowali Utara di Kecamatan Lembo Raya. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lembo Raya. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Lembo Raya ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a). Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

b). Pengkomunikasian/Sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

c). Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stake holders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

d). Pengukuran pencapaian sasaran dan terget yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat ;

e). Pengevaluasian, pengakajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Lembo Raya

Petumbea, 06 Februari 2024

CAMAT LEMBO RAYA

ANSAR, S.Sos

Pembina, IV/a

NIP. 19690808 199408 1 001

KEPUTUSAN CAMAT LEMBO RAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.4/130.1/CLR/II/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LEMBO RAYA
TAHUN 2024

CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD;
b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lembo Raya perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Renja Kecamatan Lembo Raya Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5414);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tatacacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.
16. ***Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor..... Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah KabupatenMorowali Utara Tahun 2019 Nomor).***

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara.

Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan SKPD;

Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

Bab. II. EvaluasiI Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD
- 2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1. Telaahan Terjadinya Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BaB. V. PENUTUP

Keempat : Rencana Kerja Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan;

Kelima : Guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun ***2022-2024***, dan penjabaran RESTRA Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Tahun ***2022-2024***, maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas.

Keenam : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perluya.

Ditetapkan di : Petumbea
Pada tanggal : 06 Februari 2024

CAMAT LEMBO RAYA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ANSAR, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19690808 199408 1 001

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Kompleks Perkantoran
Jalan: Bumi Nangka Kelurahan Baho'ue-Kolonodale

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 060/ /ORG/VI/2023

TENTANG

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD;
b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara perlu menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Ranwal Renja Bagian Organisasi Morowali Utara Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara tentang Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara.

Kedua : Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024, mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan serta pertanggung jawaban keuangan;

Ketiga : Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 adalah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II. EvaluasiI Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab. III. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Bagian Organisasi
- A. Visi dan Misi Bagian
- B. Tujuan dan Sasaran Renja
- C. Program dan Kegiatan Bagian Organisasi

Bab. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BaB. V. PENUTUP

Keempat : Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 yang memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan;

Kelima : Guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021, dan penjabaran RENSTRA Bagian Organisasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dan menetapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranwal RENJA) Tahun Anggaran 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024.

Keenam : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDAKAB. MOROWALI UTARA,

RIRIN RUDI ASTUTIK, SH
Pembina, IV/a
NIP.19740310 200212 2 008

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karuniaNYA Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman perencanaan kinerja Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehingga memberikan kontribusi positif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Semoga Dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dan arahan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah.

Kolonodale, 26Juni 2023

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,
SETDAKAB. MOROWALI UTARA

RIRIN RUDI ASTUTIK, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19740310 200212 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR IS.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang..... ..1
1.2 Landasan Hukum.....2
1.3 Maksud dan Tujuan.....4
1.4 Sistematika Penulisan.....4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bagian Organisasi.....6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi 23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi 32
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 33

BAB III TUJUAN, SASARAN BAGIAN ORGANISASI 39

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Bagian Organisasi.....40
3.3 Program dan Kegiatan.....40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ORGANISASI DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 47

BAB V PENUTUP 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan pembangunan harus didasari oleh suatu perencanaan yang terarah, terukur dan transparan. Rencana Kerja kegiatan merupakan suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mecapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka pembangunan berupa regulasi dan kerangka anggaran. Sedangkan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Bagian Organisasi periode Tahun 2024.

Rancangan akhir Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah dokumen perencanaan selama Tahun 2024 dilaksanakan pada 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari pemerintah.

Bagian Organisasi sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 telah mengalami perubahan struktur karena adanya penyederhanaan birokrasi. Struktur Bagian organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 31). Dan Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tatalaksana serta Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
b. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik Dan Tatalaksana serta Kinerja dan Refomasi Birokrasi;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik Dan Tatalaksana serta Kinerja dan Refomasi Birokrasi;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Publik Dan Tatalaksana serta Kinerja dan Refomasi Birokrasi;
e. Penyiapan bahan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pelayanan Publik Dan Tatalaksana serta Kinerja dan Refomasi Birokrasi;
f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memberi gambaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai visi dan misi Bupati Morowali Utara, khususnya pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sedangkan tujuannya adalah agar dapat disinkronkan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara sesui visi dan misi Bupati terpilih priode 2021-2026 nantinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara disesuaikan dengan ketentuan pasal 361 ayat 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksaanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Organisasi

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi tahun lalu dan pencapaian kinerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bagian Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi program/kegiatan dan sub kegiatan pada Bagian Organisasi yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdiri dari 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan yaitu;

  1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu;
     - Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu;
     - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
     - Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Kosultasi SKPD
  3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yaitu;
     - Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya
  4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yaitu;
     - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
     - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
     - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yaitu;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Kegiatan Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan yaitu;
   - Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
   - Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
   - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi tahun lalu dan pencapaian kinerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bagian Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun uraian masing-masing indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Target kegiatan pada indikator kinerja Peningkatan Sumber Daya Aparatur tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar 0 % dengan capaian kinerjanya 0 %, ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak dianggarkan. Selanjutnya realisasi kinerja Tahun Anggaran 2023 sementara belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan. Selanjutnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai sub kegiatan yaitu;
   - Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2022 tidak ada target dan anggaran yang ditetapkan dalam Renja tahun 2022 sehingga realisasi target kinerja dan capaian kinerja tidak ada. Sementara pada tahun 2023 target kinerja sebesar 100%, untuk realisasi target kinerja dan capaian kinerja tahun 2023

belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien. Target kegiatan pada indikator kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar 95,92% dengan capaian kinerjanya sebesar 95,92%, sementara realisasi target kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan. Selanjutnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu;

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada Tahun Anggaran 2022 target yang ditetapkan sebesar 1 paket, dengan realisasi target tahun 2022 sebesar 1 paket serta capaian kinerja sebesar 100%. Sementara pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 1 paket, dengan realisasi target dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 1 paket, dengan realisasi target tahun 2022 sebesar 1 paket serta capaian kinerja sebesar 99,69%. Sementara pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 1 paket, dengan realisasi target dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam

pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Kosultasi SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 12 laporan, dengan realisasi target tahun 2022 sebesar 12 laporan serta capaian kinerja sebesar 88,07%. Sementara pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 12 laporan, dengan realisasi target dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Target kegiatan pada indikator kinerja Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar 0 % dengan capaian kinerjanya 0 %, ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak dianggarkan. Selanjutnya realisasi kinerja Tahun Anggaran 2023 sementara belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan. Selanjutnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu;

- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun 2022 tidak ada target dan anggaran yang ditetapkan dalam Renja tahun 2022 sehingga realisasi target kinerja dan capaian kinerja tidak ada. Sementara pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 2 unit, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Target kegiatan pada indikator kinerja Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar 94,41% dengan capaian kinerjanya 94,41% dan realisasi target kinerja dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 sementara belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan. Selanjutnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu;

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 1 laporan serta capaian kinerja sebesar 100%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada Tahun Anggaran 2022 target yang ditetapkan sebesar 4 laporan, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 4 laporan serta capaian kinerja sebesar 83,24%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 4 laporan, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sumber Daya Air Dan Listrik, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada Tahun Anggaran 2022 target yang ditetapkan sebesar 12 laporan, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 12 laporan serta capaian kinerja sebesar 100%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 12 laporan, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya Tahun Anggaran 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien. Target Kinerja pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebesar 100%, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100% dan realisasi target kinerja dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 sementara belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan. Selanjutnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu;
   - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 4 unit, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 4 unit serta capaian kinerja sebesar 100%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 4 unit, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya Tahun Anggaran 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub

kegiatan.

- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada Tahun Anggaran 2022 target yang ditetapkan sebesar 7 unit, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 7 unit serta capaian kinerja sebesar 100%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 7 unit, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya Tahun Anggaran 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

f. Kegiatan Penataan Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu Peningkatan Penataan Organisasi. Target Kinerja pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebesar 100%, realisasi kinerja Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar 85,78% dengan capaian kinerjanya 85,78% dan realisasi target kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 sementara belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan. Selanjutnya Kegiatan Penataan Organisasi mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu;

- Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 5 dokumen, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 5 dokumen serta capaian kinerja sebesar 95,06%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 5 dokumen, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 3 laporan, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 3 laporan serta capaian kinerja sebesar 86,68%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 3 laporan, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya Tahun Anggaran 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

- Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Tahun Anggaran 2022 target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, dengan realisasi target kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar 3 dokumen serta capaian kinerja sebesar 75,61%. Sementara pada Tahun Anggaran 2023 target yang ditetapkan sebesar 5 dokumen, dengan realisasi target kinerja dan capaian kinerjanya tahun 2023 belum dapat dipaparkan karena merupakan tahun berjalan dalam pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan.

Berikut ini akan dipaparkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program pelayanan administrasi perkantoran	**Persentase lancarnya administrasi perkantoran**		**92,95%**						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kelnacaran Administrasi Perkantoran		120,86%						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		83,00%						
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur		75,00%						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Peresentase Peningkatan Kwalitas Sarana dan Prasarana Efektif dan Efesien**		**66,67%**						
	Pengadaan mebleur Laptop dan Printer	Tersedianya Sarana dan Prasarana administrasi yang Memadai pada Bagian Organisasi		66,67%						
	Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia	**Meningkatnya kualitas SDM aparatur**		**0%**						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kamampuan Sumber Daya Aparatur		0%						
	Program penyusunan ANJAB dan ABK	**Jumlah Dokumen ANJAB dan ABK yang dibuat**		**93,24%**						
	Monitoring Kegiatan Anjab ABK	Persentase hasil ANJAB dan ABK serta EVJAB yang ditindaklanjuti		86,93%						
	Workshop Pedoman Penyusunann Standar Kompetensi Manajerial Perumusan Tehnis ASN	Persentase meningkatnya pemahaman ASN tentang SKM, SKJ, dan EVJAB		99,92%						

				Program Evaluasi Kelembagaan	**Pembinaan OPD/Peningkatan kepasitas kelembagaan perangkat daerah**		**60,18%**						
				Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan, pembinaan dan pengendalian serta jumlah peraturan SOTK serta penjabaran tugas dan fungsi yang difasilitasi		70,54%						
				Penata Kelembagaan sesuai dengan kebutuhan	Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai kemampuan dan karakteristik daerah		100%						
				Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Terlaksana fasilitasi dan tersusunnya Perbup Kelembagaan		10%						
				Naskah Kajian /Akademik	Tersusunnya Kajian naskah akademik		-						
				Program Tatalaksana dan Pelayanan Publik	**Jumlah SOP Yang di buat dan persentase tingkat kepuasan pelayanan masyarakat**		**157,72%**						
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Standar Operasional Proseddur (SOP)	Persentase kualitas Standar Operasional Prosedur (SOP)		100%						
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase kualitas Standar pelayanan publik/SPM		100%						
				Peningkatan sistim Inovasi Pelayanan Publik (sinovik)/Rakornis SINOVIK	Persentase meningkatnya jumlah inovasi Pelayanan Publik perangkat daerah		62,09%						
				Program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Jumlah Lakip yang tersusun**		**35,28%**						
				Penyusunan LAKIP Pemda	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		35,28%						
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**100%**	**94,03**	**94,03**	**100%**	**100%**	**100%**
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan Sumber Daya Aparatur**	**100%**		**0%**	0%	0%	**100%**	**100%**	**100%**
				Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 orang		0%	0%	0%	6 orang	6 orang	6 orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat**	**100%**		**100%**	**95,92**	**95,92**	**100%**	**100%**	**100%**

					Daerah Secara Efektif dan Efesien								
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Kosultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**		**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0%	0%	0%	2 Unit	2 Unit	2 Unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**	**100%**		**100%**	**94,41**	**94,41**	**100%**	**100%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
				Penataan Organisasi	**Peningkatan Penataan**	**100%**		**100%**	**85,78%**	**85,78%**	**100%**	**100%**	**100%**

					Organisasi								
				Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
				Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pelayanan bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan. Pelayanan yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi yaitu :

1. Penataan kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan di beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi peraturan-peraturan terkait penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
4. Menyusun naskah kajian akademis penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Mensosialisasikan dan mengkoordinasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi jabatan dan workshop SKM, SKJ dan Evjab pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan ANJAB dan ABK, evaluasi jabatan, standar kompetensi manajerial, standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan SOP dan SPP.
9. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan penyusunan proposal pelayanan publik yang diikutkan untuk berkompetisi dalam Sistim Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK).

Tingkat capaian kinerja dari pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kinerja Bagian Organisasi. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara belum

didapat kesenjangan, masing-masing memiliki target dan realisasi tersendiri ini terlihat dari pelaksanaan SAKIP/LAKIP tahun 2021 dan 2023. Dalam 2 (dua) tahun terakhir pelaksanaan Renja dari tahun 2021-2022, ini dilihat realisasi ketercapaian kinerja pelayanan pada Bagian Organisasi berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesulitan atau masalah yang mengganggu proses pelayanan walaupun Bagian Organisasi dalam segi anggaran merupakan bagian yang sangat minim atau sedikit dibandingkan dengan bagian-bagian lain yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, baik pada refocusing anggaran pada masa Covid-19 maupun dari segi SDM Bagian Organisasi masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya memiliki pegawai organik 12 (dua belas) orang selebihnya pegawai harian lepas (honor) sebanyak 5 (lima) orang pada tahun 2022, jadi total pegawai pada Bagian Organisasi sebanyak 17 orang. Meskipun demikian tidak dipungkiri ada hal-hal kecil yang menggangu jalannya pelayanan, akan tetapi tidak sampai menyebabkan masalah pada layanan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pelayanan tersebut adalah disebabkan oleh rasa tanggungjawab yang besar yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra (%)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anlisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	8	9	10		11	12	13	14	15
1	**Peningkatan Sumber Daya Aparatur**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**94,03**	**100%**	**100%**	**100%**	
2	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0 orang	6 orang	7 orang	7 orang	0%	6 orang	100%	100%	
3	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 Paket	100%	100%	
5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 Paket	100%	100%	
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	100%	100%	
7	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**			**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	
8	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 unit	2 unit	2 unit	4 unit	0%	2 unit	100%	100%	
9	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**94,41**	**100%**	**100%**	**100%**	
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	100%	100%	
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 laporan	4 Laporan	100%	100%	
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	100%	100%	

13	**Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
14	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	100%	
15	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	100%	
16	**Peningkatan Penataan Organisasi**			**100%**	**100%**	**100%**	**85,78%**	**85,78%**	**100%**	**100%**	**100%**	
17	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	
18	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%	
19	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat adanya kesenjangan atau tidak pada masing-masing indikator kinerja program antara lain ;

1. Bahwa pada indikator kinerja kegiatan **Peningkatan Sumber Daya Aparatur,** tidak di anggarkan pada tahun 2022 oleh pemerintah daerah, walaupun dalam renstra kegiatan tersebut dituangkan, sehingga tidak dapat dijabarkan keberhasilannya. Untuk tahun 2023 target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%, realisasi capaian indikator kinerja kegiatan tersebut diperoleh dari hasil rata-rata 1 (satu) indikator kinerja sub kegiatan yaitu:
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, pada tahun 2022 tidak ditargetkan, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2023 target indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 6 orang, akan tetapi realisasi capaiannya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan. Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.
2. Bahwa pada indikator kinerja kegiatan **Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien,** pada Tahun Anggaran 2022 nilai realisasi capaian rata-rata indikator kinerja tersebut sebesar 95,92%. Untuk tahun 2023 target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%. Realisasi indikator kegiatan tersebut diperoleh dari 3 (tiga) indikator kinerja sub kegiatan yaitu:
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 100%, selanjutnya pada tahun 2023 realisasi capaian indikator sub kegiatan ini tidak dapat dipaparkan karena pelaksanaan renja tahun berjalan. Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 99,69%, selanjutnya pada tahun 2023 realisasi capaian indikator sub kegiatan ini tidak dapat dipaparkan karena pelaksanaan renja tahun berjalan. Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.

- Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 88,07%, selanjutnya pada tahun 2023 realisasi capaian indikator sub kegiatan ini tidak dapat dipaparkan karena pelaksanaan renja tahun berjalan. Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.

3. Bahwa pada indikator kinerja **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik,** tidak di anggarkan pada tahun 2022 oleh pemerintah daerah, walaupun dalam renstra kegiatan tersebut dituangkan, sehingga tidak dapat dijabarkan keberhasilannya. Untuk tahun 2023 target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%, realisasi capaian indikator kinerja kegiatan tersebut diperoleh dari hasil rata-rata 1 (satu) indikator kinerja sub kegiatan yaitu:
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun 2022 tidak ditargetkan, selanjutnya pada tahun 2023 realisasi capaian indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 2 unit, akan tetapi realisasi capaiannya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan. Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.
4. Bahwa pada indikator kinerja kegiatan **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik,** pada Tahun Anggaran 2022 nilai realisasi capaian rata-rata indikator kinerja tersebut sebesar 94,41%. Untuk Tahun Anggaran 2023 target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%. Realisasi indikator kegiatan tersebut diperoleh dari 3 (tiga) indikator kinerja sub kegiatan

yaitu:

- Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 1 Laporan. selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 1 Laporan, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.

  Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.
- Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 83,24%, dengan target yang ditetapkan sebesar 4 unit. selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 4 unit, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.

  Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.
- Indikator sub kegiatan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 12 Laporan. selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 12 Laporan, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.

  Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.

5. Bahwa pada indikator kinerja kegiatan **Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien,** pada Tahun Anggaran 2022 nilai realisasi capaian rata-rata indikator kinerja tersebut sebesar 100%. Untuk Tahun Anggaran 2023 target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%. Realisasi indikator kegiatan tersebut diperoleh dari 2 (dua) indikator kinerja sub kegiatan yaitu:
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 1 laporan. selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 1 laporan, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 4 laporan, dengan target yang ditetapkan sebesar 4 laporan. Selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 4 laporan, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 12 laporan, dengan target yang ditetapkan sebesar 12 laporan. Selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 12 laporan, akan tetapi realisasi capaian kinerja nya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.

   Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian

Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.

6. Bahwa pada indikator kinerja kegiatan **Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien,** pada Tahun Anggaran 2022 nilai realisasi capaian rata-rata indikator kinerja tersebut sebesar 100%. Untuk Tahun Anggaran 2023 target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%. Realisasi indikator kegiatan tersebut diperoleh dari 2 (dua) indikator kinerja sub kegiatan yaitu:
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 4 unit. selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 4 unit, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 100, dengan target yang ditetapkan sebesar 7 unit. Selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 7 unit, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.

     Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.
7. Bahwa pada indikator kinerja kegiatan **Peningkatan Penataan Organisasi,** pada Tahun Anggaran 2022 nilai realisasi capaian rata-rata indikator kinerja tersebut sebesar 85,78%. Untuk Tahun Anggaran 2023 target indikator kinerja kegiatan sebesar 100%. Realisasi indikator kegiatan tersebut diperoleh dari 3 (tiga) indikator kinerja sub kegiatan yaitu:
   - Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Pengelolaan

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 95,06%. dokumen, dengan target yang ditetapkan sebesar 5 dokumen. selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 5 dokumen, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.

- Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebanyak 86,68%, dengan target yang ditetapkan sebesar 3 laporan. Selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 3 laporan, akan tetapi realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.
- Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2022 realisasi capaiannya sebesar 75,61%, dengan target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen. Selanjutnya pada tahun 2023 indikator sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 3 dokumen, akan tetapi realisasi capaian kinerja nya tidak dapat dipaparkan karena pada saat disusunnya rancangan awal renja 2024 ini masih dalam pelaksanaan renja tahun berjalan.

  Pada tahun 2024 dan 2025 pelaksanaan Renja Bagian Organisasi proyeksi/target direncanakan 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Bagian Organisasi baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, kelembagaan maupun analisis formasi

jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain:

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya dapat berjalan secara efektif.
6. Peningkatan kinerja untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen.
7. Penataan di bidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung. pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi.
9. Masih kurangnya staf PNS pada Bagian Organisasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada hasil kerja Bagian Organisasi antara lain :

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara membandingkan antara rancangan awal Renja Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024. Rancangan Awal Renja Tahun 2024 terkait program dan kegiatan serta penganggaran tetap mengacu pada rancangan Renja tahun 2023. Untuk lebih jelasnya terkait rancangan awal Renja Tahun 2024 Program, Kegiatan, sub kegiatan

dan target kinerja yang diberikan dalam mendanai indikator kinerja program kegiatan /sub kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi Bagian Organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2. Analisis kebutuhan dilaksanakan karena pada pelaksanaan renja tahun 2024 nantinya ada kegiatan yang ditargetkan tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena minimnya anggaran yang diberikan dalam mendanai kegiatan tersebut. Untuk diketahui bahwa program dan kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 sampai seterusnya, program dan kegiatan serta sub kegiatan sudah menggunakan Sistem Impormasi Penganggaran Daerah (SIPD) sehingga semua program dan kegiatan sudah berubah sesuai hasil mapping Permendagri Nomor 90 tahun 2019.
3. Pada Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan oleh TAPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3
Review Terhadap Rancangan Akhir Renja Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Kode	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatip (Rp.000)	Indikator Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Program/ Kegiatan	Lokasi	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
1	**Unsur Pendudkung Urusan Pemerintahan**							**Unsur Pendudkung Urusan Pemerintahan**							
2	**Urusan Sekretariat Daerah**							**Urusan Sekretariat Daerah**							
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**1.050.309.300**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**1.050.309.300**	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**100%**	**64.720.000,00**	**64.720.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**100%**	**104.911.000**	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	4 Orang	**64.720.000,00**	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparat	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	4 Orang	**64.720.000,00**	
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**100%**	**281.695.750,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**100%**	**281.695.750,00**	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien	1 Paket	29.912.450,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien	1 Paket	29.912.450,00	

8	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien Kantor	1 Paket	24.666.600,00	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien Kantor	1 Paket	24.666.600,00	
9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Kosultasi SKPD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien	12 Laporan	227.166.700,00	Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Kosultasi SKPD		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efesien	12 Laporan	227.166.700,00	
10	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**17.030.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**17.030.000,00**	
11	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.030.000,00	17.030.000,00	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	2 Unit	22.405.186	
12	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**181.640.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**181.640.000,00**	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	1 Laporan	3.660.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	1 Laporan	3.660.000,00	

14	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	4 Laporan	17.180.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	4 Laporan	17.180.000,00	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	12 Laporan	160.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	12 Laporan	160.800.000	
16	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**25.670.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**25.670.000,00**	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien	1 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien	1 Unit	20.000.000	
						3 unit	6.000.000						3 unit	6.000.000	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien	7 Unit	4.670.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif dan Efesien	7 Unit	8.528.000	
19	**Penataan Organisasi**					**100%**	**479.553.550,00**						**100%**	**479.553.550,00**	

20	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peningkatan Penataan Organisasi	5 Dokumen	295.425.500,00	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peningkatan Penataan Organisasi	5 Dokumen	295.425.500,00	
21	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Peningkatan Penataan Organisasi	3 Laporan	74.175.750,00	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Peningkatan Penataan Organisasi	3 Laporan	74.175.750,00	
22	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Penataan Organisasi	3 Dokumen	109.952.300,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Penataan Organisasi	3 Dokumen	109.952.300,00	

BAB III
TUJUAN, SASARAN BAGIAN ORGANISASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Daerah berdasrkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dirumuskan dalam 10 (sepuluh) agenda prioritas Daerah, yakni sebagai berikut :

1. Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM.
2. Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta komunikasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan.
3. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.
4. Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.
5. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
6. Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly.
7. Melanjutkan pengelolaan sumber daya agribisnis dan maritim serta pariwisata berdaya saing.
8. Revitalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
9. Optimalisasi pengelolaan pndidikan menengah dan khusus sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.

    Dari gambaran diatas untuk lebih jelasnya, gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pelaksanaan kegiatan pada Bagian Organisasi adalah sebagai berikut ;

    a. Nawa cita 2015-2019 nomor urut ketiga yaitu, Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

b. 10 prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu, percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM.
c. Tujuh (7) prioritas pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yaitu, penataan organisasi perangkat daerah dan tata kelola pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Bagian Organisasi didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bagian Organisasi adapun tujan dan sasaran bagian organisasi pada penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2024 yaitu: **Tujuan Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah" dan sasarannya "Penataan Organisasi".** Tujan dan sasaran ini telah menyesuaikan visi dan misi Bupati Morowali Utara terpilih yaitu Visi Bupati "Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, cerdas dan Sejahtera" dengan mengemban misi kelima yaitu "Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sesuai dengan SIPD, adapun faktor-faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta garis rekafitulasi program dan kegiatan lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:
b. Uraian garis besar mengenai rekafitulasi program dan kegiatan antara lain:

1. Jumlah Program dan Kegiatan.

   Adapun jumlah program sebanyak 1 program sesuai pemutakhiran berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 05-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan jumlah kegiatan sebanyak 6 dan Sub Kegiatan sebanyak 13, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** terdiri dari 6 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yaitu antara lain:
  a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
     1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
  c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
  d. Kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
     2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
     3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Kegiatan Penataan Organisasi
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.050.309.300,00**							**1.345.184.947,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.050.309.300,00**							**1.345.184.947,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.050.309.300,00**				**Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom**			**1.345.184.947,00**	**BAGIAN ORGANISASI**
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Organisasi) (%)				***100***									

	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.720.000,00				Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			104.911.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					64.720.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			104.911.000,00	BAGIAN ORGANISASI
			Biaya Kontribusi Bimtek (Orang)				*4*	*22.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Bagian Organisasi*			
			Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (kegitan)				*1*	*42.720.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					281.695.750,00				Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembaga			355.584.122,00	BAGIAN ORGANISASI

												an masyarakat dalam pembangunan daerah otonom				
	4.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					29.912.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			33.792.569,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kantor (Paket)				*1*	*3.295.950,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Bagian Organisasi*			
			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer (Paket)				*1*	*5.915.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*		*Bagian Organisasi*			
			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Paket)				*1*	*20.701.500,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					24.666.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan	Bagian Organisasi		24.164.375,00	BAGIAN ORGANISASI

			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Lembar)				*70.476*	*24.666.600,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Saing	kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom	*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						227.116.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom	Bagian Organisasi		297.627.178,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam rangka, Konsultasi dan koordinasi dalam Daerah (Kegiatan)				*97*	*62.666.700,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Perjalanan Dinas Biasa Dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Ibu kota Prov. Sulteng dan Wilayah Kab. Lain				*18*	*70.610.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

			dlm wilayah Prop. Sulteng (Kegiatan) *Perjalanan Dinas Biasa Dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di Pusat dan Daerah lainnya (Kegiatan)*				*6*	*93.840.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.030.000,00				Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			22.965.316,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Belanja Modal Personal Komputer/ Pengadaan Laptop (Unit)*				*2*	17.030.000,00 *17.030.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom	*Bagian Organisasi*		22.965.316,00	BAGIAN ORGANISASI

	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					181.640.000,00				Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			192.979.126,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3.660.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			3.844.775,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Bulan)				*12*	*1.620.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Bagian Organisasi*			
			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Bulan)				*12*	*2.040.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					17.180.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat	Bagian Organisasi		19.334.351,00	BAGIAN ORGANISASI

											dalam pembangunan daerah otonom				
			Belanja Lembur (Jam)				*288*	*7.152.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kotak)				*122*	*7.076.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Belanja Makan Dan Minum Lembur (Kotak)				*72*	*2.952.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						160.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom	Bagian Organisasi		169.800.000,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Orang / Bulan)				*4*	*22.800.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi/PHL				*9*	*138.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Bagian Organisasi*			

			(Orang / Bulan)							*Umum*						
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.670.000,00				Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			34.741.200,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			26.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Pemeliharaan Roda 4 (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Biaya Pemeliharaan Roda Dua (Unit)				*3*	*6.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.670.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan	Bagian Organisasi		8.741.200,00	BAGIAN ORGANISASI

												masyarakat dalam pembangunan daerah otonom				
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor danRumah Tangga-Alat Kantor-Alat kantor Lainnya Berupa Air Conditioner (AC) (Unit)				*3*	*1.830.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Alat Kantor Lainnya Berupa Laptop (Unit)				*2*	*1.460.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Alat Kantor Lainnya Berupa Printer (Unit)				*2*	*1.380.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						479.553.550,00				Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat			634.004.183,00	BAGIAN ORGANISASI

											dalam pembangunan daerah otonom					
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					295.425.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom			344.134.329,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Akomodasi Narasumber Sosialisasi/ FGD Naskah Kajian Akademik Rancangan Perda (Kegiatan)				*1*	*3.350.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Belanja Akomodasi Narasumber sosialisasi Kegiatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Kegiatan)				*1*	*3.350.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
			Belanja Jasa Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia pada acara Forum				*1*	*1.450.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

			Group Diskusi(FGD) Naskah kajiaan Akademik Rancangan Perda (kegitan)														
			Belanja Jasa Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia pada kegiatan Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan (Kegiatan)			*1*	*1.450.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Jasa Narasumber Atau Pembahas Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Jam)			*6*	*7.200.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusun Naskah Kajian Akademik Rancangan Perda, (Jam)			*60*	*102.000.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan Harmonisasi dan			*400*	*11.600.000,00*	*(bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				

			Fasilitasi Perbup (Kotak)														
			Belanja Makan Minum Kegiatan FGD Naskah kajian Akadmik rancangan Perda (Kotak)			*100*	*2.900.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Makan Minum Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan (Kotak)			*396*	*9.900.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Pengadaan Baliho (Meter)			*8*	*400.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka konsultasi dan koordinasi Kegiatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan ke Ibu kota Prop. Sulteng dan Wilayah Kab. Lain dlm wilayah Prop. Sulteng (Kegiatan)			*20*	*80.158.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				

			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di Pusat dan Daerah lainnya (Kegiatan)				*2*	*25.196.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Kegiatan dan Analisis Jabatan (Kegiatan)				*66*	*40.471.500,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Sewa Gedung kegiatan Sosialisasi Naskah Kajian Akademik Rancangan Perda/Perkada (Kegiatan)				*1*	*1.500.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Belanja Sewa Gedung Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Kegiatan)				*1*	*1.500.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				
			Sewa Sound Sistem Kegian Sosialiasi Naskah				*1*	*1.500.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*				

			Kajian Akademik Rancangan Perda/Perkada (Kegiatan)												
			Sewa Sound Sistem kegiatan Sosialisasi PengelolaanKelembagaan dan Analisis Jabatan (Kegiatan)				*1*	*1.500.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*		
	4.01.01.2.13.00 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						74.175.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom	Bagian Organisasi		143.367.350,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Barang Pakai Habis/ATK (Paket)				*1*	*135.850,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*		
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana ke Ibu kota Prop. Sulteng dan Wilayah Kab. Lain dlm				*6*	*32.768.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*		

			wilayah Prop. Sulteng (Kegiatan)													
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka, Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi dan Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Kegiatan)				*70*	*41.271.900,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						109.952.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom	Bagian Organisasi		146.502.504,00	BAGIAN ORGANISASI
			Belanja Honorarium Tim Pengarah dan Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana KegiatanPraktik Baik Reformasi Birokrasi				*17*	*30.450.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

			(Orang / Bulan)													
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi ke Ibu kota Prop. Sulteng dan Wilayah Kab. Lain dlm wilayah Prop. Sulteng (Kegiatan)				*7*	*37.598.000,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam rangka, Pendampingan Perbaikan SAKIP dan Pengisian Form Praktik Baik RB (Kegiatan)				*68*	*41.904.300,00*	*(Bagian Organisasi, KAB. MOROWALI UTARA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*		
	J U M L A H							**1.050.309.300,00**							1.345.184.947,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang juga diharapkan dapat berlanjut pada tahun 2025, maka Bagian Organisasi telah merencanakan pagu dana indikatif kegiatan pada dokumen Rancangan Awal Renja tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dengan total anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 1.050.309.300,00-** (Satu Miliyar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Dana tersebut diperuntukkan bagi pencapaian program dan kegiatan rutin dan kegiatan teknis yang baru direncanakan Tahun 2024 maupun yang belum dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga memberikan nuansa penambahan wawasan baru dalam pencapaian target sasaran yang direncanakan.

Adapun gambaran sementara pagu anggaran Belanja Langsung Bagian Organisasi untuk prakiraan maju Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar **Rp**. **1.345.184.947,00**- (Satu Miliyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2024 dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan, program kegiatan merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan dan kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang baik.

Demikian Rencana Kerja Program/kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 disampaikan dalam upaya mencapai sasaran, semoga program dan kegiatan beserta target pencapaiannya dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

Kolonodale, 26 Juni 2023

KEPALA BAGIANORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

RIRIN RUDI ASTUTIK, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19740310 200212 2 008